



Katalog: 4201005
ISSN 2598-5655

PROFIL STATISTIK KESEHATAN 2025

Volume 8, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4201005
ISSN 2598-5655

PROFIL STATISTIK KESEHATAN 2025

Volume 8, 2025

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

PROFIL STATISTIK KESEHATAN 2025

Volume 8, 2025

Katalog: 4201005

ISSN: 2598-5655

Nomor Publikasi: 04200.25029

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah halaman: xxxii+480 halaman

Penyusun Naskah: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit: ©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

ISSN 2598-5655

TIM PENYUSUN

Profil Statistik Kesehatan 2025
Volume 8, 2025

Pelindung

Amalia Adininggar Widyasanti

Pengarah

Ateng Hartono

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora

Penyunting

Ida Eridawaty Harahap • Budi Setiawan • Henri Asri Reagan • Din Nurika Agustina

Penulis Naskah

Siswi Puji Astuti • Mayang Sari • Eva Yugiana • Susanti • Rizqi Nafi' Syari'ati

Pengolah Data

Susanti

Penata Letak

Rizqi Nafi' Syari'ati

KATA PENGANTAR

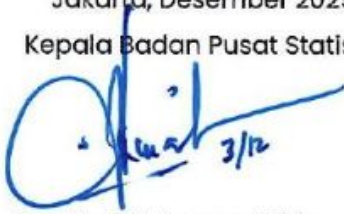
Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 3 yaitu “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”, menempatkan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Menyadari urgensi kesehatan di semua kalangan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang salah satunya melalui *Universal Health Coverage* (UHC). Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat terkait kesehatan untuk menunjang program pemerintah terkait kesehatan.

Publikasi Profil Statistik Kesehatan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai situasi kesehatan masyarakat Indonesia secara berkala. Publikasi Profil Statistik Kesehatan 2025 menyajikan data kesehatan penduduk secara umum, kesehatan wanita usia subur, kesehatan anak, serta pengeluaran

kesehatan masyarakat yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2025 dengan level penyajian nasional dan provinsi serta menurut berbagai karakteristik. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna. Saran dan kritik kami harapkan demi penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.



Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Statistik Kesehatan 2025

Penduduk yang sehat merupakan aset strategis dan vital bagi kemajuan suatu negara, secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional, penurunan tingkat kemiskinan, dan percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Profil Statistik Kesehatan 2025 disusun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Publikasi ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, mencerminkan kemajuan sekaligus tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Secara umum, berbagai indikator kunci menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam akses masyarakat terhadap layanan dan perlindungan kesehatan. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pemerataan layanan kesehatan antarprovinsi serta akses masyarakat dengan status ekonomi kuintil bawah dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Hasil survei mengindikasikan adanya tren peningkatan keluhan kesehatan di kalangan penduduk. Sekitar 28,31 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2025, angka yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Keluhan ini secara konsisten lebih banyak dialami oleh perempuan, kelompok usia lanjut, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Meskipun akses terhadap fasilitas layanan kesehatan semakin baik, sebagian besar masyarakat masih cenderung memilih pengobatan mandiri.

Terkait perlindungan finansial, tingkat kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan penguatan yang berkelanjutan, di mana 78,04 persen dari total penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan menjadi penyumbang terbesar dalam cakupan ini, baik bagi peserta mandiri maupun penerima bantuan iuran (PBI). Walaupun capaian ini positif, kesenjangan cakupan antarwilayah masih terlihat jelas, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Di sisi perilaku, merokok masih merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang besar, terlihat dari tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok tembakau, serta peningkatan penggunaan rokok elektrik. Upaya pengendalian perilaku berisiko seperti merokok, bersama dengan perluasan



jaminan kesehatan, dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat, menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Kesehatan anak balita merupakan fondasi krusial dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menjamin kesehatan anak sejak dalam kandungan. Hasil Susenas Maret menunjukkan adanya peningkatan angka keluhan kesehatan, serta kenaikan tingkat rawat jalan dan rawat inap balita dalam tiga tahun terakhir. Faktor pendidikan kepala rumah tangga dan status ekonomi keluarga sangat memengaruhi kemampuan untuk mengakses layanan. Anak-anak di perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh layanan kesehatan dibandingkan di perdesaan.

Capaian positif ditunjukkan oleh peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan, di mana sekitar 84 persen balita telah memiliki jaminan kesehatan, sebagian besar tercakup melalui BPJS Kesehatan. Angka ini merefleksikan kemajuan menuju *Universal Health Coverage* (UHC) bagi anak, meskipun pemerataan cakupan di wilayah perdesaan dan provinsi dengan infrastruktur terbatas tetap menjadi tantangan. Jaminan kesehatan ini sangat penting untuk melindungi rumah tangga dari risiko finansial akibat biaya pengobatan.

Selain pelayanan kesehatan, intervensi gizi dan pencegahan penyakit juga menunjukkan kemajuan: sekitar 64 persen anak umur 12–23 bulan telah menerima imunisasi dasar lengkap, dan 72 persen bayi umur 0–5 bulan memperoleh Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) juga membaik, di mana tujuh dari sepuluh anak umur 6–23 bulan mengonsumsi lima dari delapan kelompok makanan dan minuman pada hari sebelumnya. Namun, kekhawatiran orang tua terhadap vaksinasi dan ketimpangan akses imunisasi di daerah tertentu masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Kesehatan wanita usia subur juga merupakan fokus penting, mengingat peran sentral mereka dalam kesejahteraan keluarga dan pembentukan generasi berikutnya. Pada tahun 2025, sekitar 23,96 persen perempuan melaporkan mengalami keluhan kesehatan, meningkat dari 22,10 persen pada tahun 2023. Keluhan lebih tinggi terjadi di perdesaan (25,05 persen) dibandingkan perkotaan (23,25 persen). Meskipun perilaku mengobati sendiri masih dominan (81,01 persen), pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap terus meningkat.

Cakupan jaminan kesehatan pada wanita usia subur juga meningkat pesat dari 76,04 persen pada 2023 menjadi 81,54 persen pada 2025, mayoritas sebagai anggota BPJS PBI (49,85 persen). Namun, kesenjangan antarwilayah masih ada, dengan Provinsi Aceh mencatat kepemilikan hampir universal (99,5 persen) sementara Jambi terendah (66,63 persen). Akses terhadap layanan persalinan menunjukkan perbaikan signifikan, di mana 93,95 persen persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan 97,35 persen ditolong oleh tenaga profesional. Walaupun demikian, peningkatan prevalensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) menjadi 13,95



persen perlu diwaspadai, dengan angka yang lebih tinggi di perdesaan (15,92 persen).

Dari sisi pembiayaan, arah pembangunan kesehatan nasional RPJMN 2025–2029 adalah mewujudkan sistem yang tangguh, merata, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terdampak oleh beban biaya kesehatan. Berdasarkan data Susenas Maret 2025, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kesehatan tercatat sebesar Rp39.837,00, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Proporsi pengeluaran kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga juga meningkat dari 2,17 persen pada 2023 menjadi 2,54 persen pada 2025. Komposisi pengeluaran kesehatan didominasi oleh pelayanan pengobatan atau kuratif sekitar 71 persen. Sekitar setengah dari pengeluaran kesehatan rumah tangga masih ditanggung langsung oleh rumah tangga (*out-of-pocket*). Pengeluaran *out-of-pocket* lebih besar pada masyarakat yang tinggal di perkotaan serta meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kesejahteraan.

Profil Statistik Kesehatan 2025 menggambarkan kemajuan berarti dalam perlindungan dan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kesadaran terhadap layanan kesehatan menjadi sinyal positif bagi arah pembangunan nasional. Namun, ketimpangan antarwilayah, perilaku berisiko yang persisten, serta beban biaya kesehatan yang masih ditanggung langsung oleh rumah tangga, menegaskan perlunya kolaborasi multi-sektor dan kebijakan berbasis data yang berkelanjutan. Upaya kolektif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk terus meningkatkan derajat kesehatan bangsa, mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.



DAFTAR ISI

Profil Statistik Kesehatan 2025
Volume 8, 2025

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xxvii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Pembangunan Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas	3
1.2 Peranan Data Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan	4
1.3 Sistematika Penulisan	4
Bab 2 Kesehatan Penduduk	7
2.1 Gambaran Kesehatan Penduduk	9
2.2 Akses ke Layanan Kesehatan	14
2.3 Kepemilikan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	22
2.4 Perilaku Merokok	30
Bab 3 Kesehatan Anak	149
3.1 Gambaran Kesehatan Balita Indonesia	151
3.2 Kepemilikan Jaminan kesehatan sebagai Upaya Mewujudkan <i>Universal Health Coverage</i>	158
3.3 Pemberian Imunisasi untuk Kesehatan Anak yang Optimal	161
3.4 Praktik Pemberian ASI dan MPASI untuk Anak Indonesia	165
Bab 4 Kesehatan Wanita Usia Subur	257
4.1 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur (WUS)	259



4.2 Kepemilikan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan pada Wanita Usia Subur	269
4.3 Pelayanan Kesehatan untuk Persalinan dan Bayi Baru Lahir	278
Bab 5 Pengeluaran Kesehatan	417
5.1 Pola Pengeluaran Kesehatan	420
5.2 Komposisi Pengeluaran Kesehatan	421
5.3 OOP Pengeluaran Kesehatan	426
Daftar Pustaka	453
Lampiran	455

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Profil Statistik Kesehatan 2025

Bab 2 Kesehatan Penduduk

Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	36
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	37
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2023–2025.....	38
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	39
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	40
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	41
Tabel 2.7	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	42
Tabel 2.8	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	43
Tabel 2.9	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025.....	44
Tabel 2.10	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025.....	47
Tabel 2.11	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025.....	50



Tabel 2.12	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025.....	52
Tabel 2.13	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	54
Tabel 2.14	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	55
Tabel 2.15	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025	56
Tabel 2.16	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025	58
Tabel 2.17	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025.....	60
Tabel 2.18	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025	61
Tabel 2.19	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025.....	62
Tabel 2.20	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025	64
Tabel 2.21	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	66
Tabel 2.22	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	67
Tabel 2.23	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025	68
Tabel 2.24	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025.....	70
Tabel 2.25	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025.....	72
Tabel 2.26	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	73
Tabel 2.27	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi	



	dan Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025	74
Tabel 2.28	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025.....	76
Tabel 2.29	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025	78
Tabel 2.30	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025.....	81
Tabel 2.31	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025	84
Tabel 2.32	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025	87
Tabel 2.33	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik/Vape Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	90
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik/Vape Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	91
Tabel 2.35	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	92
Tabel 2.36	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	93
Tabel 2.37	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Pernah Merokok dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	94
Tabel 2.38	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Pernah Merokok dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	95
Tabel 2.39	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025	96



Tabel 2.40	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025.....	102
Tabel 2.41	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025	107
Tabel 2.42	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025	109
Tabel 2.43	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025.....	112
Tabel 2.44	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Inap, 2025	116
Tabel 2.45	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025.....	121
Tabel 2.46	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025	130
Tabel 2.47	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025.....	132
Tabel 2.48	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025.....	141

Bab 3 Kesehatan Anak

Tabel 3.1	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	170
Tabel 3.2	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	171
Tabel 3.3	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2023–2025	172



Tabel 3.4	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2023–2025	173
Tabel 3.5	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	174
Tabel 3.6	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	175
Tabel 3.7	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	176
Tabel 3.8	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	177
Tabel 3.9	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025.....	178
Tabel 3.10	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025.....	181
Tabel 3.11	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025.....	184
Tabel 3.12	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	185
Tabel 3.13	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025	186
Tabel 3.14	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025	188
Tabel 3.15	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025	190
Tabel 3.16	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	191
Tabel 3.17	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025.....	192
Tabel 3.18	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025	194



Tabel 3.19	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025	196
Tabel 3.20	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025	198
Tabel 3.21	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025	200
Tabel 3.22	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025	202
Tabel 3.23	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, 2023–2025	204
Tabel 3.24	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik, 2023–2025	205
Tabel 3.25	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi dan Tempat Pemberian Imunisasi, 2025	206
Tabel 3.26	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Tempat Pemberian Imunisasi, 2025	208
Tabel 3.27	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi dan dan Pemberi Imunisasi, 2025	210
Tabel 3.28	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan dan Pemberi Imunisasi, 2025	212
Tabel 3.29	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Diberi Imunisasi, 2025	214
Tabel 3.30	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Diberi Imunisasi, 2025	216
Tabel 3.31	Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi, 2023–2025	218
Tabel 3.32	Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Karakteristik, 2023–2025	219
Tabel 3.33	Persentase Bayi Umur 0–5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Provinsi, 2023–2025	220
Tabel 3.34	Persentase Bayi Umur 0–5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Karakteristik, 2023–2025	221



Tabel 3.35	Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari Kemarin Menurut Provinsi, 2023–2025.....	222
Tabel 3.36	Persentase Anak Umur 6-23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari Delapan Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari Kemarin Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	223
Tabel 3.37	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025	224
Tabel 3.38	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025.....	232
Tabel 3.39	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023–2025	239
Tabel 3.40	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025	245
Tabel 3.41	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025.....	251

Bab 4 Kesehatan Wanita Usia Subur

Tabel 4.1	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	290
Tabel 4.2	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	291
Tabel 4.3	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Gangguan Aktivitas Sehari-hari Menurut Provinsi, 2023–2025	292
Tabel 4.4	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Gangguan Aktivitas Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2023–2025	293



Tabel 4.5	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	294
Tabel 4.6	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	295
Tabel 4.7	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	296
Tabel 4.8	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	297
Tabel 4.9	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025.....	298
Tabel 4.10	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025	300
Tabel 4.11	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Rawat Jalan, 2025	302
Tabel 4.12	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Rawat Jalan, 2025.....	304
Tabel 4.13	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	306
Tabel 4.14	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	307
Tabel 4.15	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025.....	308
Tabel 4.16	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025	310
Tabel 4.17	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025	312
Tabel 4.18	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025	313
Tabel 4.19	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025.....	314



Tabel 4.20	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025.....	316
Tabel 4.21	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025	318
Tabel 4.22	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025	319
Tabel 4.23	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	320
Tabel 4.24	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025.....	322
Tabel 4.25	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan Menurut Provinsi, 2025.....	324
Tabel 4.26	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan Menurut Karakteristik, 2025	327
Tabel 4.27	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025.....	330
Tabel 4.28	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	331
Tabel 4.29	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025.....	332
Tabel 4.30	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025.....	334
Tabel 4.31	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Inap, 2025.....	336



Tabel 4.32	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Inap, 2025.....	339
Tabel 4.33	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Provinsi, 2023–2025.....	342
Tabel 4.34	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Karakteristik, 2023–2025	343
Tabel 4.35	Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Provinsi, 2023–2025.....	344
Tabel 4.36	Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	345
Tabel 4.37	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025	346
Tabel 4.38	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	347
Tabel 4.39	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025.....	348
Tabel 4.40	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	350
Tabel 4.41	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025.....	352
Tabel 4.42	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025	353
Tabel 4.43	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	354



Tabel 4.44	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	356
Tabel 4.45	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Provinsi dan Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025	358
Tabel 4.46	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Karakteristik dan Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025	359
Tabel 4.47	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Provinsi, 2023–2025	360
Tabel 4.48	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Karakteristik, 2023–2025	361
Tabel 4.49	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025	362
Tabel 4.50	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025	363
Tabel 4.51	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025	364
Tabel 4.52	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Rawat Jalan, 2025	369
Tabel 4.53	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025	375



Tabel 4.54	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025.....	379
Tabel 4.55	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025.....	381
Tabel 4.56	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	383
Tabel 4.57	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	386
Tabel 4.58	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan dan Provinsi, 2025	387
Tabel 4.59	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan dan Karakteristik, 2025	396
Tabel 4.60	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Inap dan Provinsi, 2025.....	398
Tabel 4.61	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	407
Tabel 4.62	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	409
Tabel 4.63	<i>Sampling Error</i> Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025	410

Bab 5 Pengeluaran Kesehatan

Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah), 2023–2025	429
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk di Daerah Perkotaan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025	430
Tabel 5.3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk di Daerah Perdesaan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025	431
Tabel 5.4	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025	432
Tabel 5.5	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2023	433
Tabel 5.6	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2024	434
Tabel 5.7	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2025	435
Tabel 5.8	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2023	436
Tabel 5.9	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2024	437
Tabel 5.10	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2025	438
Tabel 5.11	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2023	439
Tabel 5.12	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2024	440
Tabel 5.13	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2025	441
Tabel 5.14	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2023	442
Tabel 5.15	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2024	443



Tabel 5.16	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2025.....	444
Tabel 5.17	Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2023.....	445
Tabel 5.18	Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2024.....	446
Tabel 5.19	Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2025.....	447
Tabel 5.20	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP) Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025.....	448
Tabel 5.21	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP) Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023.....	449
Tabel 5.22	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP) Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2024.....	450
Tabel 5.23	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP) Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2025.....	451



DAFTAR GAMBAR

Profil Statistik Kesehatan 2025

Bab 2 Kesehatan Penduduk

Gambar 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2023–2025	10
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025.....	11
Gambar 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, 2023–2025.....	12
Gambar 2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2025.....	13
Gambar 2.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2025	14
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri, 2023–2025	15
Gambar 2.7	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Karakteristik, 2025	16
Gambar 2.8	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, 2025.....	17
Gambar 2.9	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025.....	18
Gambar 2.10	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023–2025	19
Gambar 2.11	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	20
Gambar 2.12	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2025.....	21



Gambar 2.13	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2023–2025.....	23
Gambar 2.14	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025.....	24
Gambar 2.15	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Karakteristik, 2025	25
Gambar 2.16	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2025	26
Gambar 2.17	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir, 2025.....	28
Gambar 2.18	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir, 2025.....	29
Gambar 2.19	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik Selama Sebulan Terakhir, 2023–2025	31
Gambar 2.20	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	32
Gambar 2.21	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir, 2023–2025	33
Gambar 2.22	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Pernah Merokok dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025.....	34

Bab 3 Kesehatan Anak

Gambar 3.1	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	152
Gambar 3.2	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	153
Gambar 3.3	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025	155
Gambar 3.4	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025.....	156



Gambar 3.5	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	157
Gambar 3.6	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025.....	159
Gambar 3.7	Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap, 2025	160
Gambar 3.8	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik, 2025.....	162
Gambar 3.9	Persentase Anak Umur 0–59 Bulan yang Menerima Imunisasi Menurut Tempat Pemberian dan Pemberi Imunisasi, 2025	163
Gambar 3.10	Persentase Anak Umur 0–59 Bulan yang Tidak Diberi Imunisasi Menurut Alasan Tidak Pernah Diimunisasi , 2025.....	164
Gambar 3.11	Persentase Anak Umur 0–5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif , 2025	166
Gambar 3.12	Persentase Anak Umur 6–23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya 5 dari 8 Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari, 2025.....	168

Bab 4 Kesehatan Wanita Usia Subur

Gambar 4.1	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025.....	260
Gambar 4.2	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2025.....	261
Gambar 4.3	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2025	262
Gambar 4.4	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	263
Gambar 4.5	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	265
Gambar 4.2	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025	266



Gambar 4.7	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023–2025.....	267
Gambar 4.8	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2025	268
Gambar 4.2	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025.....	270
Gambar 4.10	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2025	271
Gambar 4.11	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2025	272
Gambar 4.12	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025.....	273
Gambar 4.13	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025.....	275
Gambar 4.14	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	275
Gambar 4.15	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025.....	277
Gambar 4.16	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2023–2025.....	278
Gambar 4.17	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	280
Gambar 4.18	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi, 2025	281
Gambar 4.19	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Persalinan, 2025	282
Gambar 4.20	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan	



	Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2025	284
Gambar 4.21	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2025	285
Gambar 4.22	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025	287
Gambar 4.23	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah, 2023–2025	288

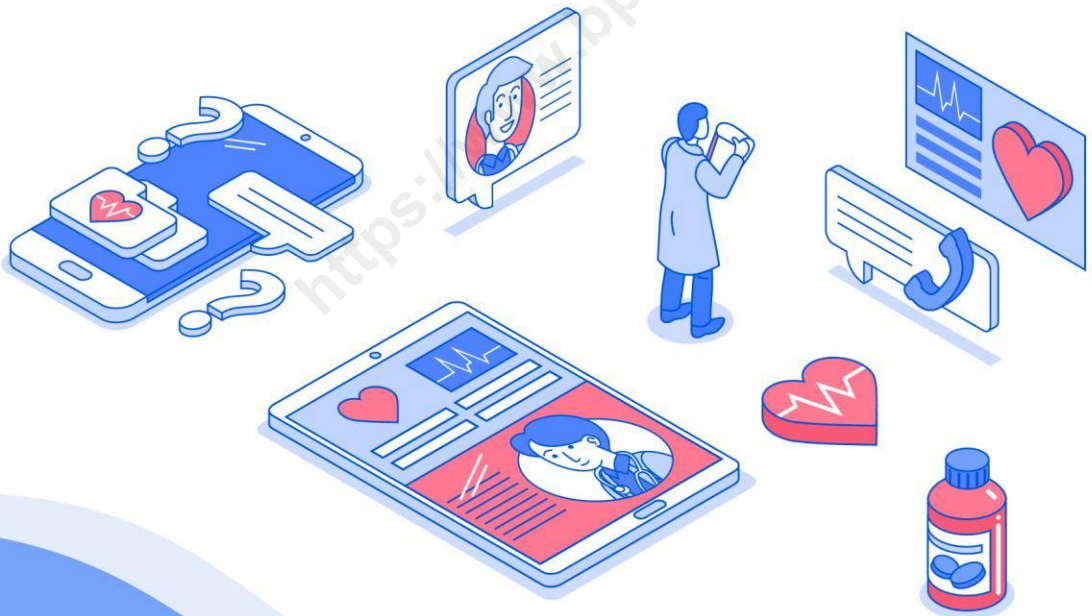
Bab 5 Pengeluaran Kesehatan

Gambar 5.1	Rata-rata dan Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Biaya Kesehatan, 2023–2025	421
Gambar 5.2	Rata-rata dan Proporsi Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Kesehatan Menurut Jenis Pengeluaran Kesehatan, 2023–2025	423
Gambar 5.3	Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif Menurut Ragamnya, 2025	424
Gambar 5.4	Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif Menurut Ragamnya, 2025	425
Gambar 5.5	Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif Menurut Ragamnya, 2025	426
Gambar 5.6	Rata-rata Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan yang Dibayar Sendiri (Out-of-Pocket) Menurut Karakteristik, 2023–2025	427



1

PENDAHULUAN



1.1 Pembangunan Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang memiliki peran besar dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini Indonesia berada dalam momentum krusial untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Namun, potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan jika seluruh SDM yang dimiliki bangsa Indonesia berkualitas sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah derajat kesehatan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 28H, selain itu juga menjadi prasyarat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan daya saing bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan pembangunan SDM sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 dengan menekankan pentingnya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan itu, RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam pembangunan manusia melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai upaya kuratif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi produktif yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi bangsa.

Tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini berkaitan dengan transisi demografi dan epidemiologi sehingga jumlah penduduk dewasa dan lanjut usia meningkat. Di sisi lain, perilaku kesehatan masyarakat masih belum berubah signifikan, sehingga penyakit tidak menular kini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Meskipun cakupan kesehatan semesta melalui BPJS Kesehatan dilaporkan sudah mencakup sebagian besar penduduk, namun masih terdapat tantangan besar dalam kualitas layanan dan pemerataan wilayah. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pembangunan kesehatan di Indonesia perlu menyeimbangkan antara perluasan akses dan peningkatan mutu, memperkuat upaya preventif di semua wilayah, serta menyesuaikan strategi dengan tantangan baru seperti perubahan iklim, digitalisasi layanan, dan perubahan pola penyakit. Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memastikan perencanaan berbasis bukti sehingga kebijakan kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.



1.2 Peranan Data Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan

Ketersediaan data yang berkualitas memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Data yang akurat, lengkap, dan komprehensif akan dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang berbasis bukti. Dengan data yang andal, pemerintah dapat memahami kondisi kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif, termasuk pengaruh faktor sosial ekonomi dan kelompok penduduk yang perlu menjadi sasaran prioritas. Data yang inklusif memungkinkan strategi yang lebih tepat untuk akses layanan kesehatan yang lebih merata, mutu pelayanan yang lebih baik, serta penguatan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, data tidak hanya berperan sebagai alat pemantauan hasil pembangunan, tetapi juga mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik dasar di bidang kesehatan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sesuai dengan visi dan misinya, BPS selalu berupaya untuk menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan berkelanjutan melalui berbagai survei, salah satunya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas merupakan salah satu sumber utama data kesehatan yang mencakup berbagai aspek seperti pemanfaatan layanan kesehatan, kepemilikan dan penggunaan jaminan kesehatan, perilaku merokok, kesehatan ibu dan anak, serta pengeluaran rumah tangga untuk keperluan kesehatan. Dengan cakupan luas hingga dapat menghasilkan estimasi hingga level provinsi dan kabupaten/kota, data Susenas dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan masyarakat di berbagai kelompok umur dan wilayah. Oleh karena itu, hasil Susenas menjadi landasan penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti, memantau ketimpangan wilayah, serta menilai kemajuan terhadap target-target pembangunan nasional dan global seperti RPJMN dan SDGs.

1.3 Sistematika Penulisan

Secara sistematis publikasi Profil Statistik Kesehatan 2025 disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

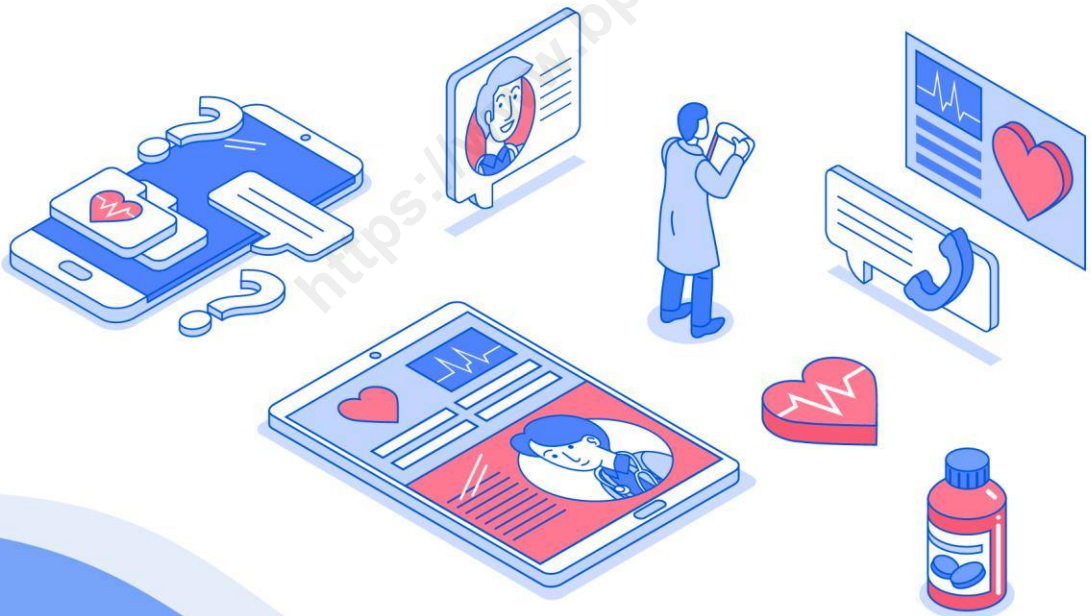
Bab I membahas pentingnya pembangunan sektor kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta menjelaskan peran BPS dalam menyediakan data kesehatan yang menjadi dasar bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti.

- Bab II memaparkan kondisi kesehatan penduduk secara umum yang mencakup keluhan kesehatan dan angka kesakitan, upaya kesehatan rawat jalan dan rawat inap, kepemilikan serta pemanfaatan jaminan kesehatan, dan juga perilaku merokok masyarakat.
- Bab III menguraikan keadaan kesehatan balita, termasuk keluhan dan angka kesakitan pada balita, upaya kesehatan yang dilakukan, kepemilikan jaminan kesehatan, serta cakupan imunisasi, pemberian Air Susu Ibu (ASI), dan Makanan Pendamping ASI (MPASI).
- Bab IV menyajikan gambaran mengenai kesehatan Wanita Usia Subur (WUS), yaitu perempuan berusia 15–49 tahun yaitu terkait layanan persalinan.
- Bab V menampilkan informasi tentang pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan kesehatan, baik yang bersifat pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), maupun pembelian obat. Selain itu, bab ini juga menyajikan data mengenai pengeluaran kesehatan rumah tangga yang dibayar langsung atau *out-of-pocket* (OOP).



2

KESEHATAN PENDUDUK



Kesehatan penduduk Indonesia merupakan indikator utama pembangunan nasional yang tercermin melalui data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau aspek kesejahteraan masyarakat. Mengetahui kondisi kesehatan penduduk sangat penting karena berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi jangka panjang, penurunan kemiskinan, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Pentingnya pemahaman ini semakin krusial ketika terjadi transisi demografi Indonesia, di mana kualitas kesehatan penduduk menjadi fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan kesehatan penduduk Indonesia pada 2025 masih meliputi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker sebagai beban utama, serta penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC), ditambah isu *stunting*, kemiskinan ekstrem, dan krisis kesehatan mental yang dipicu oleh dampak pandemi serta tekanan ekonomi. Solusi berbasis kebijakan yang mencakup kolaborasi antar pemangku kebijakan untuk kebijakan inklusif sangat dibutuhkan guna memperkuat ketahanan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas.

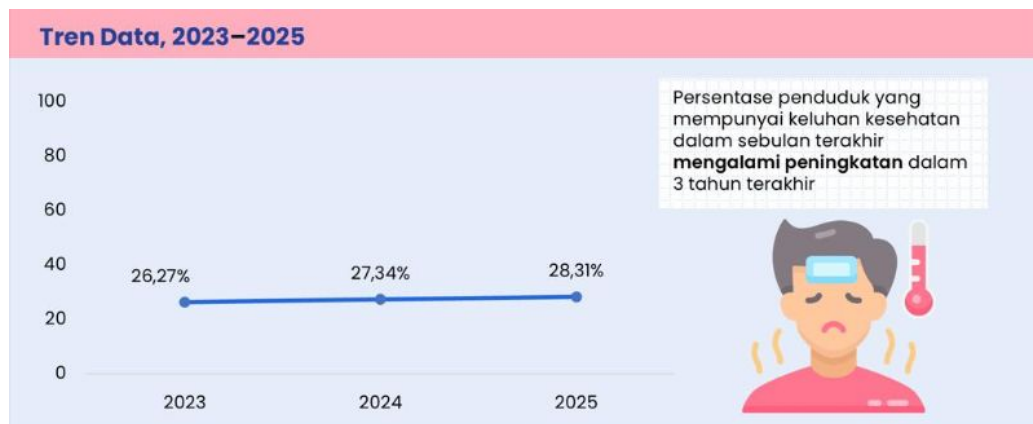
2.1 Gambaran Kesehatan Penduduk

Keluhan kesehatan dan angka kesakitan merupakan indikator fundamental yang memberikan gambaran awal mengenai situasi kesehatan masyarakat Indonesia dan mencerminkan prevalensi masalah kesehatan yang dialami penduduk dalam periode tertentu. Keluhan ini mencakup berbagai gejala fisik dan mental yang dilaporkan oleh individu, sementara angka kesakitan mengukur tingkat penyakit atau kondisi kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk memahami beban penyakit menular maupun tidak menular, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemantauan secara berkala melalui survei nasional memungkinkan identifikasi pola kesehatan masyarakat yang esensial untuk perencanaan intervensi preventif dan kuratif.

Pemahaman atas keluhan kesehatan dan angka kesakitan tidak hanya menggambarkan ketahanan masyarakat terhadap risiko kesehatan, tetapi juga menyoroti disparitas regional dan demografi di Indonesia. Studi ilmiah menunjukkan bahwa transisi epidemiologi di negara ini telah menyebabkan peningkatan beban penyakit kronis, di samping tantangan penyakit infeksius yang masih ada, sehingga memerlukan pendekatan holistik dalam kebijakan kesehatan masyarakat (Mboi, dkk. 2022). Dengan demikian, indikator ini menjadi dasar strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi



ketidaksetaraan, guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

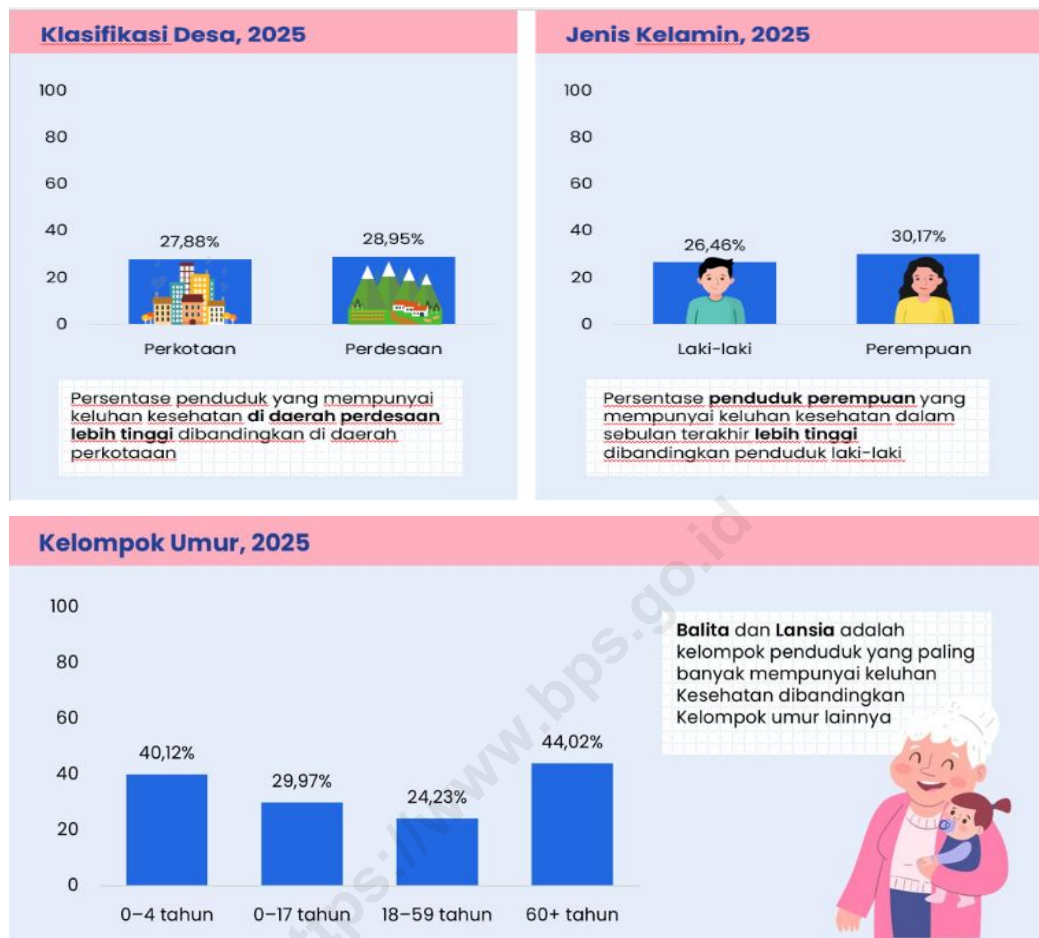
Gambar 2.1
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2023–2025

Gambar 2.1 menunjukkan tren persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir selama periode 2023 sampai dengan 2025 hasil Susenas Maret tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Secara umum terlihat adanya peningkatan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikannya tidak terlalu tajam, tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Dengan demikian peningkatan angka keluhan kesehatan ini menjadi sinyal bagi perlunya upaya promotif dan preventif yang lebih kuat untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Susenas memperoleh informasi mengenai keluhan kesehatan melalui metode di mana individu menilai kondisi kesehatannya sendiri berdasarkan persepsi pribadi. Keluhan kesehatan yang dicakup dalam definisi operasional Susenas meliputi batuk, pilek, demam, termasuk juga penduduk yang memiliki penyakit kronis, mempunyai keluhan kesehatan akibat kecelakaan, keluhan kesehatan pada ibu hamil atau wanita yang sedang menstruasi seperti mual dan pusing, ataupun keluhan psikologis yang berdampak pada keluhan fisik seperti bulimia.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi tertinggi dengan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir mencapai 42 persen, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,34 persen dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 32,74 persen. Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir terendah adalah Provinsi Papua Tengah, dengan hanya 8,57 persen. Secara umum, provinsi-provinsi di wilayah barat Indonesia

cenderung memiliki persentase keluhan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah timur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.2
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Angka keluhan kesehatan menurut karakteristik klasifikasi desa, jenis kelamin, serta kelompok umur juga terlihat mengalami perbedaan. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di daerah perdesaan sebesar 28,95 persen, angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk di daerah perkotaan yaitu sebesar 27,88 persen. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (30,17 persen dan 26,46 persen).

Sementara itu, berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa balita (usia 0–4 tahun) dan lansia (usia 60 tahun ke atas) merupakan dua kelompok yang paling banyak



mengalami keluhan kesehatan, masing-masing sebesar 40,12 persen dan 44,02 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok usia rentan baik balita maupun lansia memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar dan program promotif-preventif yang berfokus pada kelompok usia rentan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan keluhan kesehatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga sejalan dengan dinamika angka kesakitan di masyarakat. Angka kesakitan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai seberapa besar beban penyakit yang benar-benar dialami penduduk, serta seberapa efektif sistem kesehatan dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan yang timbul. Oleh karena itu, analisis terhadap angka kesakitan menjadi langkah penting untuk memahami lebih jauh kondisi kesehatan masyarakat secara komprehensif.

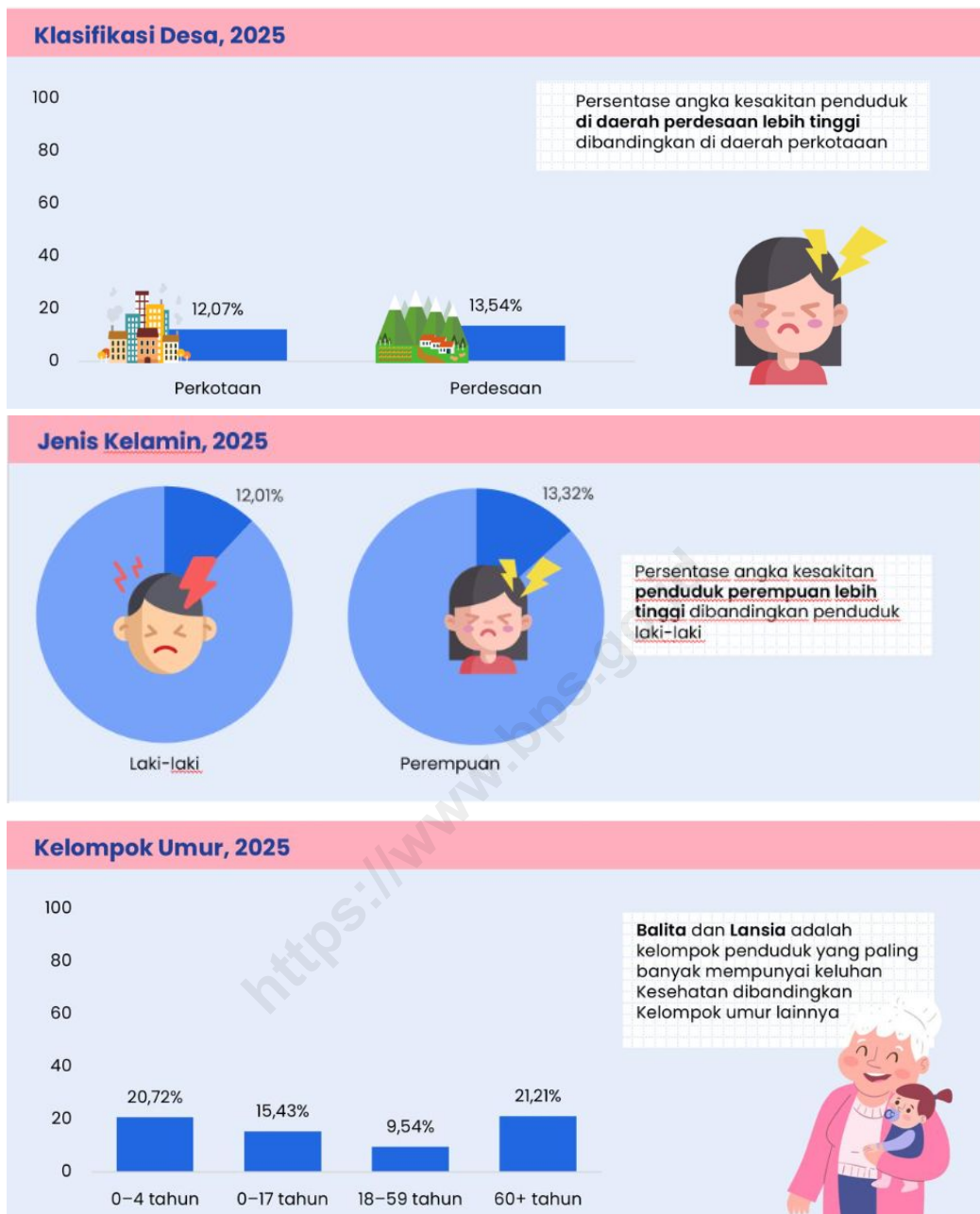


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.3

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, 2023–2025

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 11,15 persen pada tahun 2023 menjadi 12,66 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bertambahnya beban kesehatan yang berdampak pada aktivitas dan produktivitas masyarakat.



Gambar 2.4
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan
Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari
Menurut Karakteristik, 2025

Gambar 2.4 menampilkan perbandingan persentase angka kesakitan penduduk pada tahun 2025 menurut karakteristik klasifikasi desa, jenis kelamin, dan



kelompok umur. Berdasarkan karakteristik klasifikasi desa, penduduk yang tinggal di daerah perdesaan memiliki persentase angka kesakitan lebih tinggi yaitu sebesar 13,54 persen dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan yaitu sebesar 12,07 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan cenderung memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (13,32 persen dan 12,01 persen). Sementara itu, berdasarkan kelompok umur, angka kesakitan tertinggi terdapat pada kelompok balita sebesar 20,72 persen dan lansia sebesar 21,21 persen. Angka kesakitan ini selaras dengan persentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.5
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2025

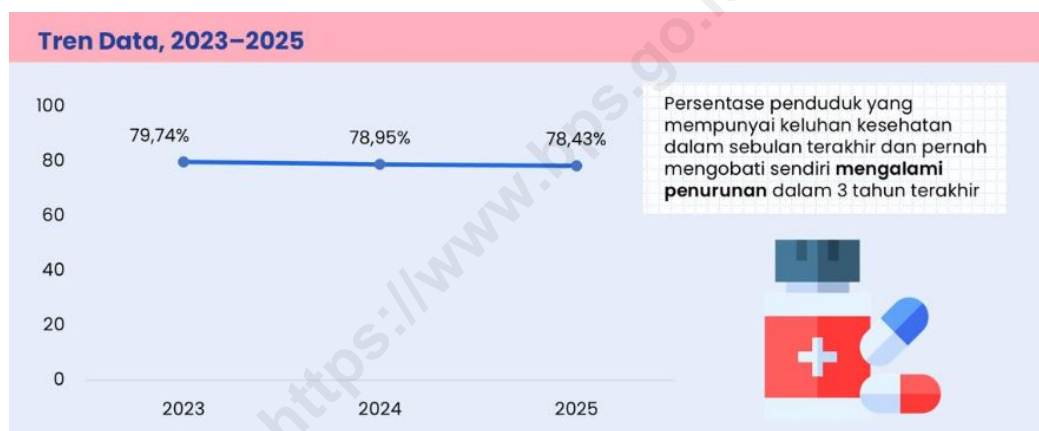
Angka kesakitan penduduk menurut provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi tertinggi dengan persentase 20,59 persen, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,28 persen. Sebaliknya, Provinsi Papua Tengah memiliki persentase angka kesakitan penduduk terendah sebesar 3,89 persen. Persentase angka kesakitan penduduk menurut provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3.

2.2 Akses ke Layanan Kesehatan

Pemerataan layanan kesehatan merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Akses yang setara terhadap berbagai

bentuk pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif maupun kuratif menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu daerah. Upaya preventif, seperti edukasi kesehatan, imunisasi, dan pemeriksaan rutin, berperan penting dalam mencegah timbulnya penyakit, sementara layanan kuratif seperti pengobatan sendiri, rawat jalan, dan rawat inap dibutuhkan untuk menangani masalah kesehatan yang sudah terjadi. Meskipun sebagian masyarakat masih cenderung mengobati sendiri ketika mengalami keluhan ringan, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan rawat jalan dan rawat inap yang berkualitas tetap sangat diperlukan bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis lebih intensif.

Dalam pendataan Susenas, upaya kesehatan kuratif yang dicakup yaitu hanya ketika penduduk mengalami keluhan kesehatan pada periode waktu tertentu berupa mengobati sendiri, rawat jalan, dan rawat inap. Data Susenas menunjukkan dalam periode tiga tahun yaitu 2023 sampai dengan 2025, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah mengobati sendiri mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

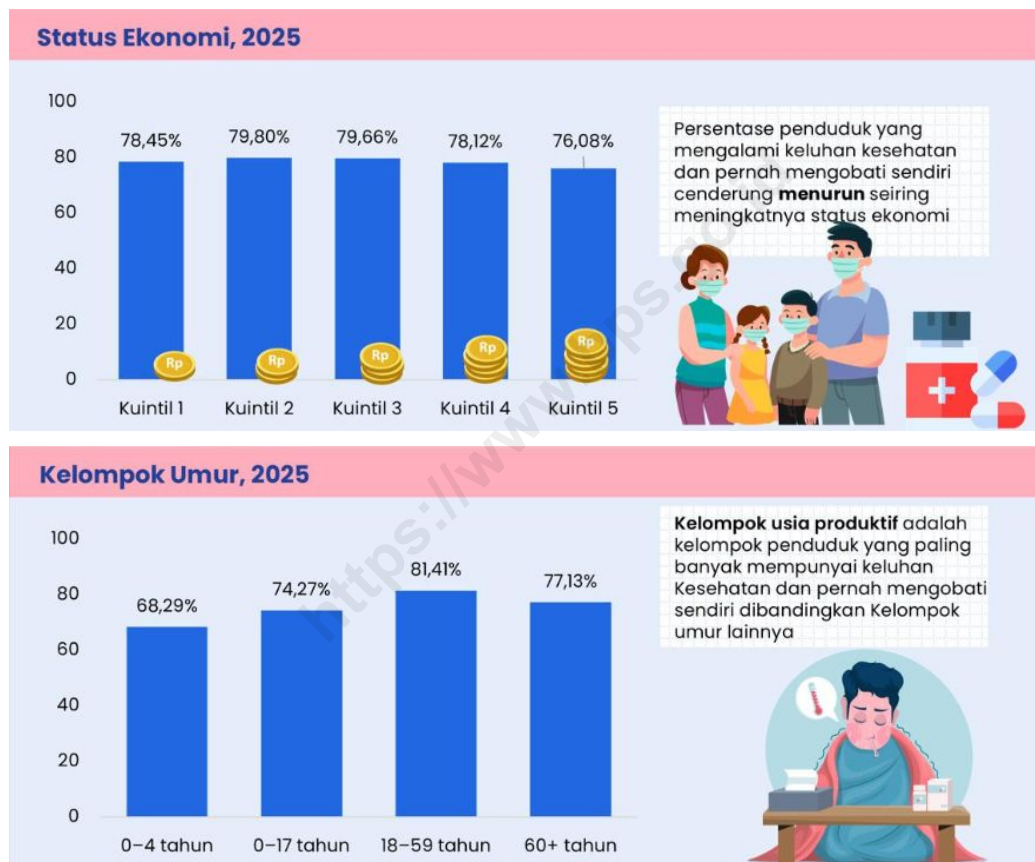
Gambar 2.6
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri, 2023–2025

Berdasarkan provinsi, tiga provinsi teratas persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah mengobati sendiri yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 89,95 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 89,63 persen, dan Kalimantan Barat sebesar 84,82 persen. Sementara provinsi dengan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri terendah yaitu Provinsi Bali sebesar 62,72 persen.

Menurut klasifikasi desa, praktik mengobati sendiri lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan



kelompok umur, kelompok usia produktif (18–59 tahun) merupakan kelompok dengan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengobati sendiri paling tinggi, yakni sebesar 81,41 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa kelompok usia produktif lebih mandiri dan cenderung memilih cara cepat untuk mengatasi keluhan kesehatan ringan. Sementara pada kelompok balita (0–4 tahun) merupakan persentase yang paling rendah yaitu sebesar 68,29 persen. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit persentase penduduk yang mengobati sendiri. Hal ini juga sejalan dengan status ekonomi, semakin tinggi status ekonomi, kecenderungan mengobati sendiri menurun. (Tabel 2.6)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

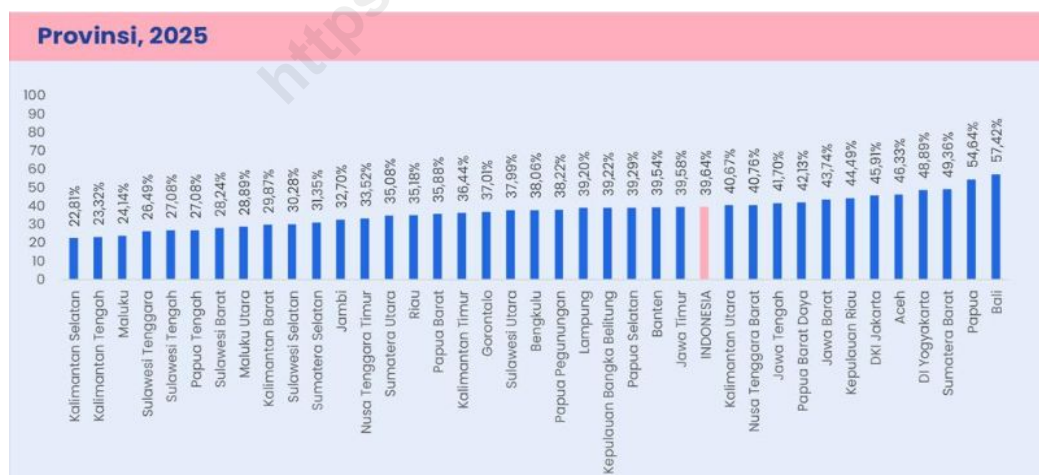
Gambar 2.7

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Karakteristik, 2025

Ketika upaya pengobatan sendiri tidak memberikan hasil yang diharapkan, masyarakat umumnya akan beralih mencari pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif melalui rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan. Hal

ini dilakukan karena pengobatan mandiri sering kali hanya efektif untuk keluhan ringan dan bersifat sementara. Namun, ketika gejala tidak kunjung membaik atau bahkan memburuk, masyarakat menyadari perlunya pemeriksaan dan penanganan medis oleh tenaga kesehatan profesional. Layanan rawat jalan memberikan kesempatan untuk memperoleh diagnosis yang tepat serta pengobatan yang terarah tanpa perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan rawat inap menjadi pilihan bagi kasus yang memerlukan pengawasan intensif dan perawatan berkelanjutan. Keputusan untuk beralih ke fasilitas kesehatan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan aman guna mencegah komplikasi serta mempercepat proses penyembuhan.

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 39,64 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan rawat jalan dalam sebulan terakhir (Tabel 2.7). Artinya, dari setiap 100 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, hanya sekitar 39 orang yang memilih mendapatkan penanganan melalui layanan rawat jalan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 35,16 persen dan tahun 2024 yang mencapai 38,70 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk perkotaan cenderung lebih banyak memanfaatkan layanan rawat jalan dibandingkan penduduk perdesaan, masing-masing sebesar 41,65 persen dan 36,79 persen (Tabel 2.8). Tren peningkatan penggunaan layanan rawat jalan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya mendapatkan perawatan medis yang tepat. Namun, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan mengindikasikan masih perlunya pemerataan akses dan kualitas fasilitas kesehatan di seluruh wilayah.



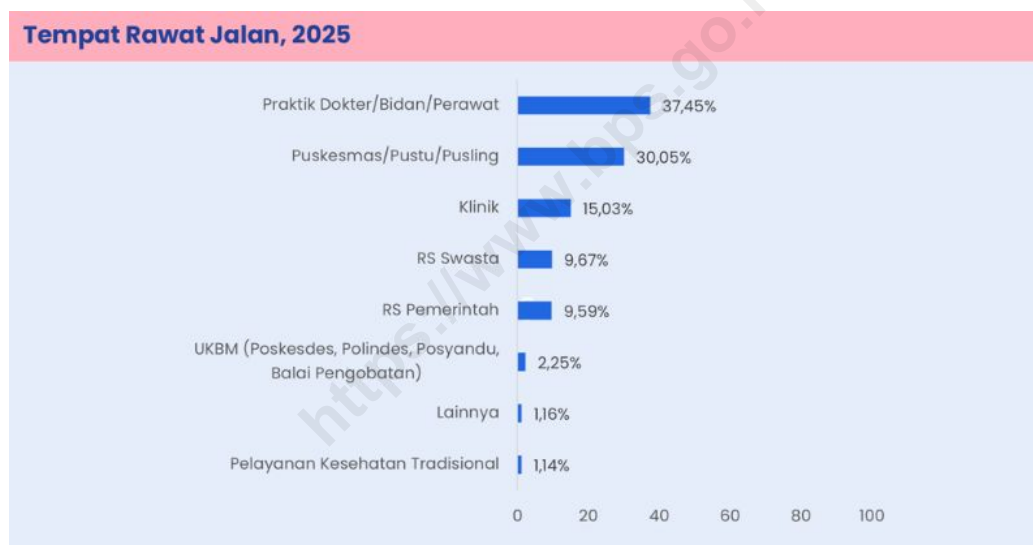
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.8
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menurut Provinsi, 2025



Gambar 2.8 menunjukkan variasi capaian antarprovinsi pada tahun 2025 dengan rentang nilai yang cukup lebar, yakni dari sekitar 22 persen hingga 57 persen. Provinsi dengan capaian tertinggi antara lain Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Papua, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Maluku berada pada posisi terendah. Perbedaan ini menggambarkan ketimpangan pencapaian antarwilayah yang masih perlu menjadi perhatian.

Tabel 2.8 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir berdasarkan berbagai karakteristik, yang menggambarkan adanya perbedaan dalam pemanfaatan layanan rawat jalan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan tercatat lebih banyak memanfaatkan layanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Selain itu, status ekonomi turut memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan kesehatan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih baik cenderung lebih sering melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

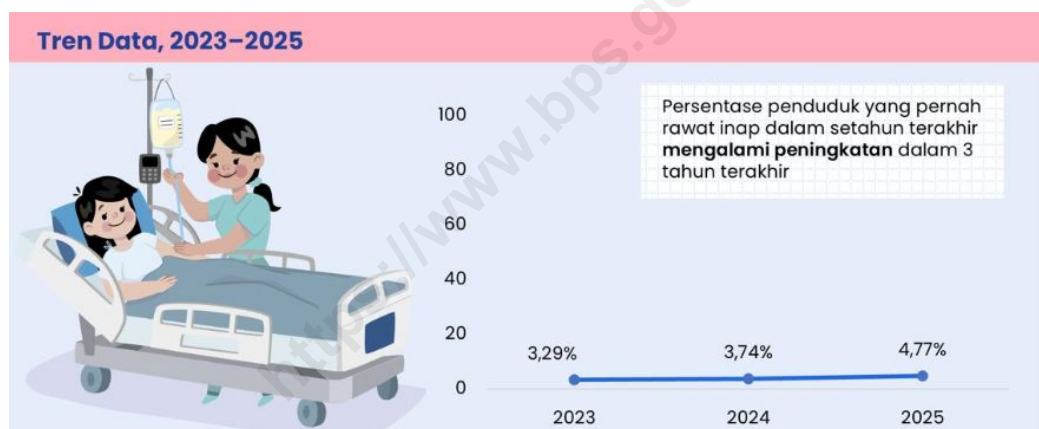
Gambar 2.9
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025

Pada tahun 2025, hasil Susenas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebanyak 37,45 persen penduduk memilih berobat ke praktik dokter, bidan, atau perawat, menjadikannya tempat rawat jalan yang paling banyak digunakan. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk mencari pelayanan yang

mudah dijangkau, cepat, dan bersifat personal. Di urutan berikutnya, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Puskesmas Keliling (Pusling) menjadi pilihan bagi 30,05 persen penduduk, menunjukkan peran penting puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan dasar, terutama di wilayah perdesaan.

Sementara itu, klinik digunakan oleh 15,03 persen penduduk sebagai alternatif layanan dengan fasilitas yang lebih lengkap namun tetap terjangkau dan efisien. Pemanfaatan rumah sakit, baik swasta (9,67 persen) maupun pemerintah (9,59 persen) untuk mendapatkan layanan rawat jalan relatif lebih rendah dibandingkan fasilitas tingkat pertama.

Terdapat berbagai alasan mengapa sebagian penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan. Alasan utama yang paling banyak disebutkan adalah karena mereka memilih untuk mengobati sendiri sebesar 66,88 persen atau merasa tidak memerlukan perawatan medis sebesar 30,57 persen. Meskipun persentase alasan lainnya relatif kecil, hal ini tetap penting untuk diperhatikan, terutama karena masih ada penduduk yang tidak melakukan rawat jalan akibat keterbatasan biaya pengobatan serta lamanya waktu tunggu pelayanan di fasilitas kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

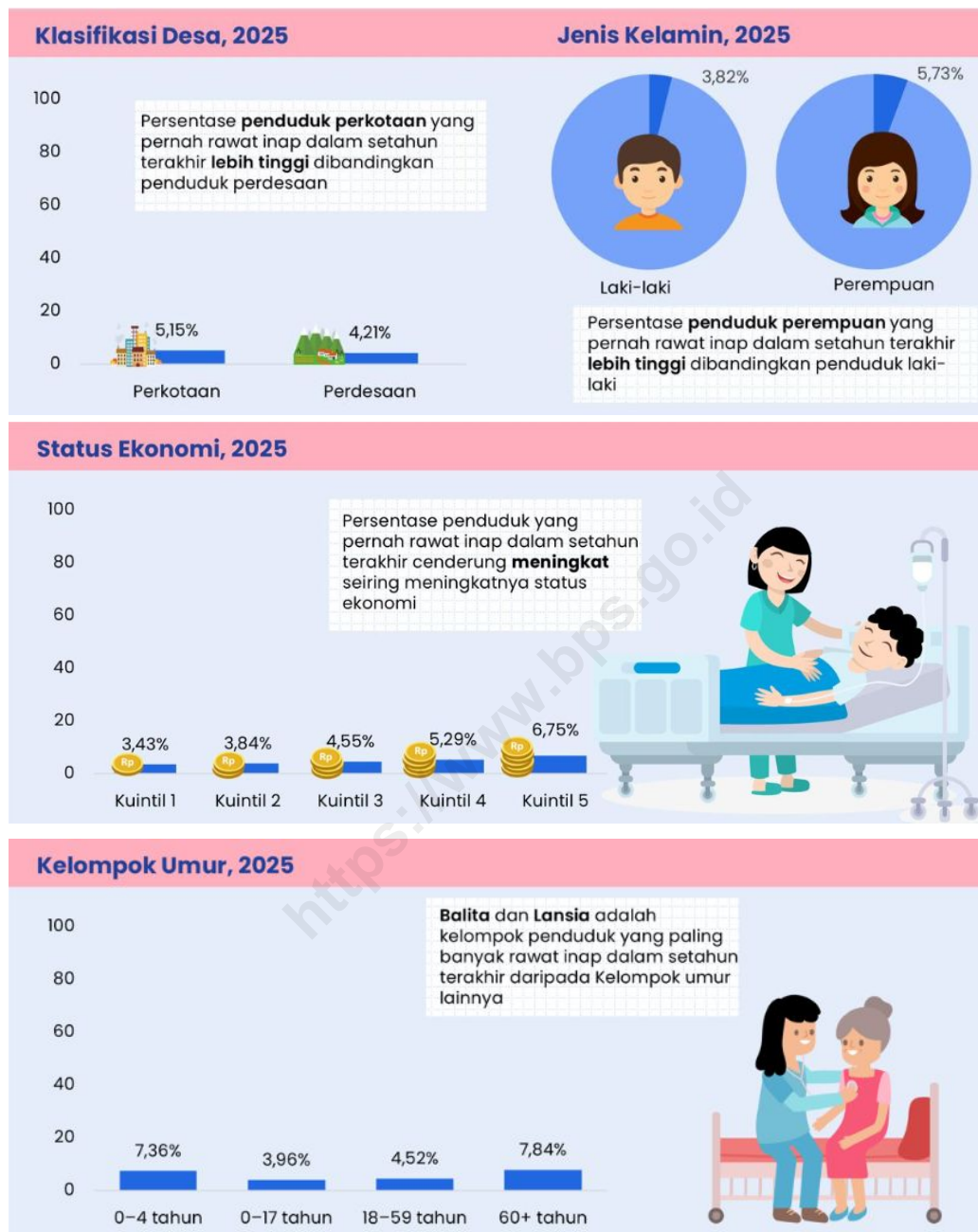
Gambar 2.10

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023–2025

Upaya penanganan kesehatan lanjutan yang dilakukan oleh penduduk setelah mengalami keluhan kesehatan adalah melalui perawatan inap di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2025, persentase penduduk yang pernah menjalani rawat inap dalam setahun terakhir tercatat sebesar 4,77 persen (Gambar 2.10). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3,74 persen pada tahun 2024 dan 3,29 persen pada tahun 2023. Berdasarkan provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan persentase penduduk rawat inap tertinggi pada tahun 2025, mencapai 6,52 persen. Sebaliknya, Provinsi Papua



Pegunungan mencatatkan persentase terendah, yakni hanya sebesar 0,67 persen (Tabel 2.13).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.11
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Pada tahun 2025, hasil Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir bervariasi menurut karakteristik demografis dan sosial ekonomi. Dilihat dari klasifikasi desa, penduduk perkotaan memiliki persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan yaitu 5,15 persen dan 4,21 persen. Kondisi ini mencerminkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik di wilayah perkotaan, baik dari segi ketersediaan rumah sakit maupun kemudahan transportasi.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan (5,73 persen) cenderung lebih banyak menjalani rawat inap dibandingkan laki-laki (3,82 persen). Dari sisi status ekonomi, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin besar persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Penduduk dari kelompok status ekonomi terendah (kuintil 1) memiliki persentase 3,43 persen, sedangkan pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5) meningkat menjadi 6,75 persen. Pola ini menunjukkan bahwa kelompok ekonomi atas memiliki akses dan kemampuan finansial lebih besar untuk mendapatkan layanan rawat inap dibandingkan kelompok ekonomi bawah.

Sementara itu, menurut kelompok umur, balita (0–4 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas) merupakan kelompok dengan persentase rawat inap tertinggi, masing-masing 7,36 persen dan 7,84 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kelompok usia rentan, baik anak-anak maupun lanjut usia, memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi akibat kondisi fisik yang lebih lemah dan risiko penyakit yang lebih besar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.12
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Tempat Rawat Inap, 2025



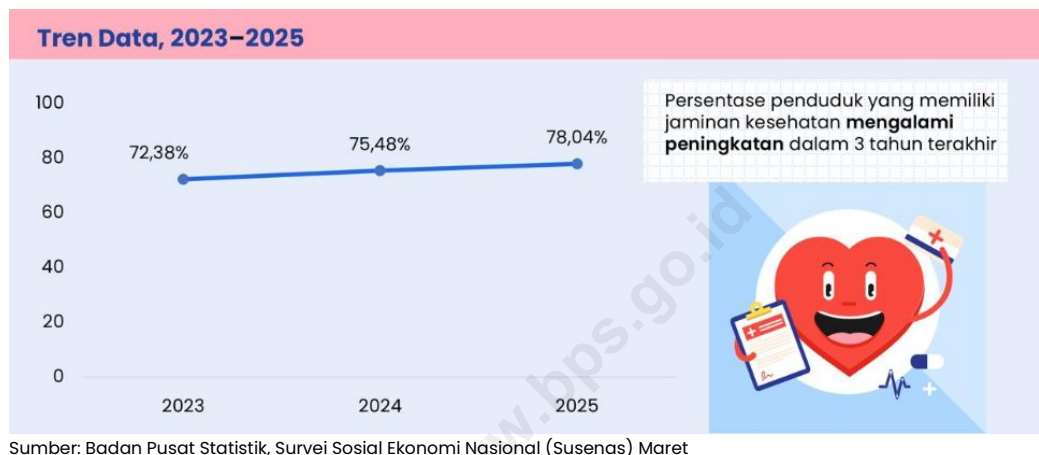
Berdasarkan hasil Susenas penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menurut tempat rawat inap, terlihat bahwa rumah sakit menjadi pilihan utama masyarakat. Sebagian besar penduduk menjalani rawat inap di rumah sakit swasta (43,75%) dan rumah sakit pemerintah (38,47%), yang menunjukkan bahwa kedua jenis fasilitas tersebut memiliki peran dominan dalam memberikan layanan perawatan intensif. Puskesmas, pusku, dan pusling masih dimanfaatkan oleh sebagian penduduk dengan persentase 10,53 persen, mencerminkan perannya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke rumah sakit. Sementara itu, klinik dan praktik bidan digunakan oleh sebagian kecil penduduk, masing-masing sebesar 6,96 persen dan 2,26 persen. Adapun pelayanan kesehatan tradisional (0,28 persen) dan kategori lainnya (0,17 persen) menunjukkan bahwa pilihan rawat inap di luar fasilitas medis modern relatif sedikit. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan bahwa masyarakat lebih mempercayakan perawatan kesehatan serius kepada rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya layanan medis yang profesional dan terstandar.

2.3 Kepemilikan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan memegang peranan penting sebagai bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Melalui jaminan kesehatan, beban biaya pengobatan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengakses pelayanan medis ketika mengalami gangguan kesehatan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis jaminan kesehatan yang berfungsi untuk memperluas cakupan perlindungan. Dalam Susenas, jaminan kesehatan yang dicakup adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta program lain seperti jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), asuransi kesehatan swasta, dan asuransi bagi pegawai kantor tertentu. Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, berkurangnya risiko finansial akibat biaya pengobatan yang tinggi, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan di berbagai lapisan sosial ekonomi. Dengan demikian, jaminan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan individu, tetapi juga sebagai strategi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 78,04 persen penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,48 persen dan tahun 2023 sebesar

72,38 persen. Peningkatan ini mencerminkan semakin meluasnya cakupan program jaminan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan maupun melalui asuransi swasta dan program daerah. Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Aceh mencatat persentase kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi sebesar 98,74 persen, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 96,63 persen. Sebaliknya, Provinsi Jambi memiliki persentase terendah yaitu 63,47 persen, yang mengindikasikan masih perlunya upaya peningkatan kesadaran dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan di wilayah tersebut agar seluruh penduduk dapat memperoleh perlindungan finansial yang memadai dalam mengakses layanan kesehatan.



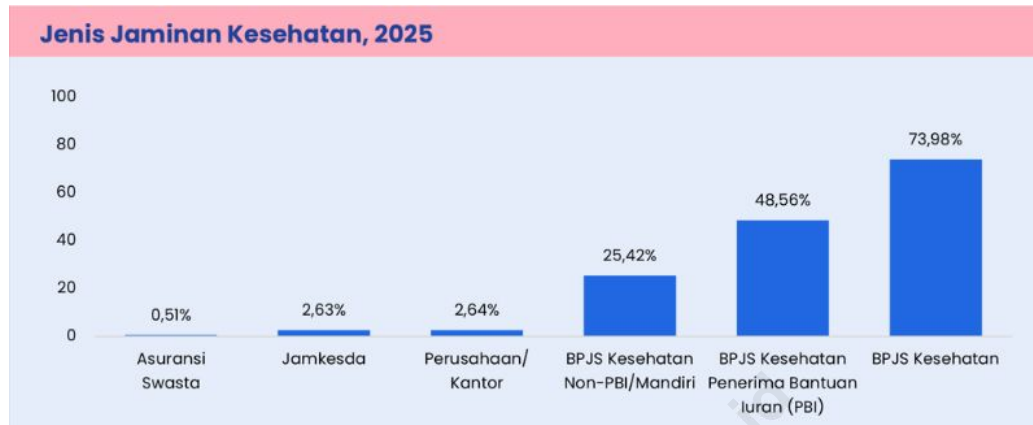
Gambar 2.13

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2023–2025

Data kepemilikan jaminan kesehatan menurut berbagai karakteristik sosial ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan klasifikasi desa, penduduk perkotaan memiliki tingkat kepemilikan jaminan kesehatan yang lebih tinggi yaitu sebesar 81,63 persen dibandingkan dengan penduduk perdesaan yaitu sebesar 72,77 persen, mencerminkan masih adanya perbedaan akses informasi dan fasilitas antara kedua wilayah tersebut. Jika dilihat menurut kelompok umur, kepemilikan jaminan kesehatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Anak usia 0–4 tahun memiliki tingkat kepemilikan terendah (61,68 persen), sementara kelompok dewasa (18–59 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan tingkat kepemilikan yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 80,92 persen dan 81,62 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat pola yang serupa di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan memiliki jaminan kesehatan. Penduduk berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepemilikan tertinggi (91,79 persen), sedangkan mereka yang tidak atau belum pernah sekolah hanya sebesar 70,59 persen. Dari sisi status ekonomi, tingkat kepemilikan jaminan kesehatan juga meningkat seiring naiknya tingkat kesejahteraan. Kelompok



ekonomi terbawah (kuintil 1) memiliki tingkat kepemilikan 68,49 persen, sedangkan kelompok teratas (kuintil 5) mencapai 88,03 persen. Pola ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal masih berpengaruh besar terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia. (Tabel 2.18)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

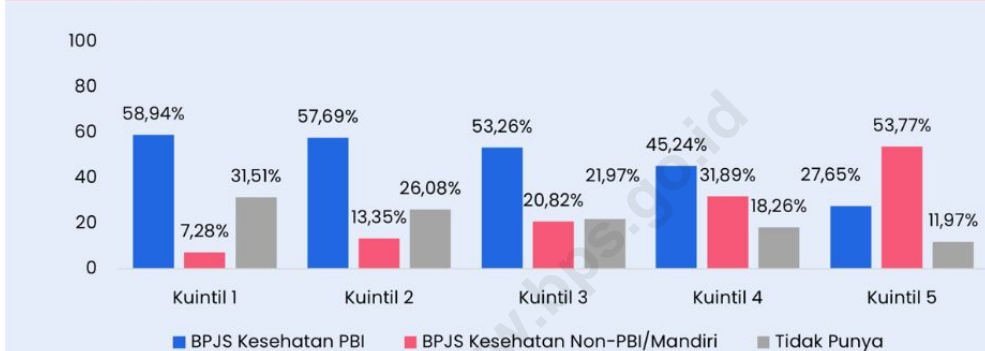
Gambar 2.14
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Sebagian besar penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI. Berdasarkan Gambar 2.14, tercatat 73,98 persen penduduk memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 48,56 persen peserta PBI dan 25,42 persen peserta Non-PBI. Jika dilihat menurut provinsi, Aceh menempati posisi tertinggi dengan 97,79 persen penduduk memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Tabel 2.19). Provinsi ini juga memiliki persentase tertinggi untuk kepemilikan BPJS Kesehatan PBI, yakni mencapai 85,29 persen. Sementara itu, untuk BPJS Kesehatan Non-PBI, persentase tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 47,88 persen. Data tersebut menunjukkan peran besar BPJS Kesehatan sebagai instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat di berbagai daerah, dengan variasi kepesertaan berdasarkan karakteristik wilayah dan status ekonomi penduduk.

Klasifikasi Desa, 2025



Status Ekonomi, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.15
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Karakteristik, 2025

Berdasarkan klasifikasi desa, penduduk perdesaan lebih banyak menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI (54,31 persen) dibandingkan penduduk perkotaan (44,64 persen). Sebaliknya, kepemilikan BPJS Kesehatan Non-PBI atau mandiri jauh lebih tinggi di perkotaan (32,71 persen) dibandingkan perdesaan (14,72 persen), mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat kota yang lebih baik dalam membayar iuran secara mandiri. Sementara itu, penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan lebih banyak di perdesaan (27,23 persen) dibandingkan di perkotaan (18,37 persen), menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap perlindungan kesehatan di wilayah pedesaan.

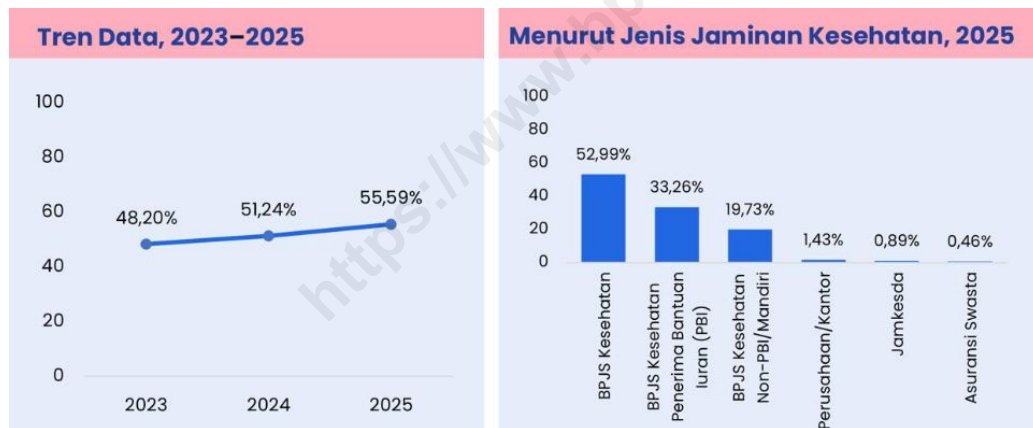
Jika dilihat dari status ekonomi, terlihat pola yang jelas bahwa kepemilikan jaminan kesehatan PBI menurun seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan. Pada kelompok status ekonomi terendah (kuintil 1), sebanyak 58,94 persen merupakan peserta BPJS PBI, sedangkan hanya 7,28 persen yang memiliki BPJS Non-PBI. Sebaliknya, pada kelompok status ekonomi tertinggi (kuintil 5), hanya 27,65 persen yang menjadi peserta PBI, sementara 53,77 persen merupakan



peserta BPJS Non-PBI/Mandiri. Persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan juga menunjukkan tren menurun dari 31,51 persen pada kuintil 1 menjadi hanya 11,97 persen pada kuintil 5.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan, khususnya PBI, berhasil menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan yang tinggal di perdesaan. Namun, masih diperlukan upaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terlindungi, agar seluruh penduduk dapat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial.

Kepemilikan jaminan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap beban biaya ketika mengalami sakit atau membutuhkan perawatan medis. Bagi layanan rawat jalan, jaminan kesehatan memungkinkan individu mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sedini mungkin, sehingga penyakit dapat ditangani lebih cepat dan tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Sementara untuk rawat inap, jaminan kesehatan menjadi pelindung finansial yang krusial, karena biaya perawatan di rumah sakit sering kali cukup besar dan dapat membebani ekonomi keluarga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.16

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2025

Selain memberikan rasa aman secara finansial, kepemilikan jaminan kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan formal secara rutin. Program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perawatan yang layak.

Pada tahun 2025, tercatat 55,59 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir menggunakan jaminan kesehatan, menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Angka ini naik dari 48,20 persen pada tahun 2023 dan 51,24 persen pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan kesadaran dan pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional di kalangan masyarakat.

Dari berbagai jenis jaminan kesehatan yang digunakan, BPJS Kesehatan mendominasi dengan kontribusi sebesar 52,99 persen dari total pengguna. Dalam kelompok ini, peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 33,26 persen, sedangkan peserta non-PBI atau mandiri menyumbang 19,73 persen. Sementara itu, penggunaan jaminan kesehatan dari perusahaan atau kantor tercatat sebesar 1,43 persen, Jamkesda sebesar 0,89 persen, dan asuransi swasta hanya 0,46 persen.

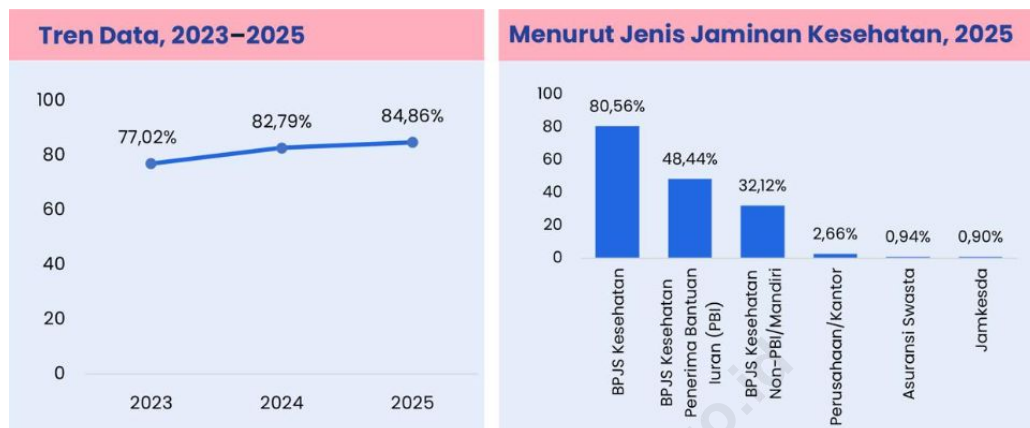
Dari Tabel 2.22, pemanfaatan jaminan kesehatan oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah dan kelompok sosial. Penduduk perkotaan tercatat lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan, yakni 63,38 persen, dibandingkan penduduk perdesaan yang hanya mencapai 43,11 persen. Dilihat dari kelompok umur, penggunaan jaminan kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia. Penduduk usia 0–4 tahun dan 0–17 tahun masing-masing memiliki persentase 43,29 persen dan 47,69 persen, sedangkan kelompok usia produktif 18–59 tahun mencapai 58,69 persen, dan tertinggi terdapat pada kelompok lansia dengan 60,89 persen. Pola ini menggambarkan bahwa semakin tinggi risiko kesehatan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk memanfaatkan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok lansia yang lebih rentan terhadap penyakit kronis dan membutuhkan perawatan rutin.

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, terlihat adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan pemanfaatan jaminan kesehatan. Penduduk dengan pendidikan tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD memiliki persentase 47,99 persen, sementara yang berpendidikan SMA/ sederajat mencapai 65,64 persen, dan tertinggi pada pendidikan perguruan tinggi sebesar 72,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan jaminan kesehatan.

Jika dilihat berdasarkan status ekonomi, persentase penggunaan jaminan kesehatan juga meningkat seiring naiknya kesejahteraan. Status ekonomi terendah (kuintil 1) mencatat 48,26 persen, sedangkan status ekonomi tertinggi (kuintil 5) mencapai 64,58 persen.



Dilihat dari provinsi (Tabel 2.21), provinsi dengan persentase tertinggi pengguna jaminan kesehatan untuk rawat jalan adalah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 96,83 persen, disusul Provinsi Papua Selatan sebesar 89,44 persen, dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 83,96 persen. Sebaliknya, provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 41,39 persen, Provinsi Lampung sebesar 43,47 persen, dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 44,24 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.17

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir, 2025

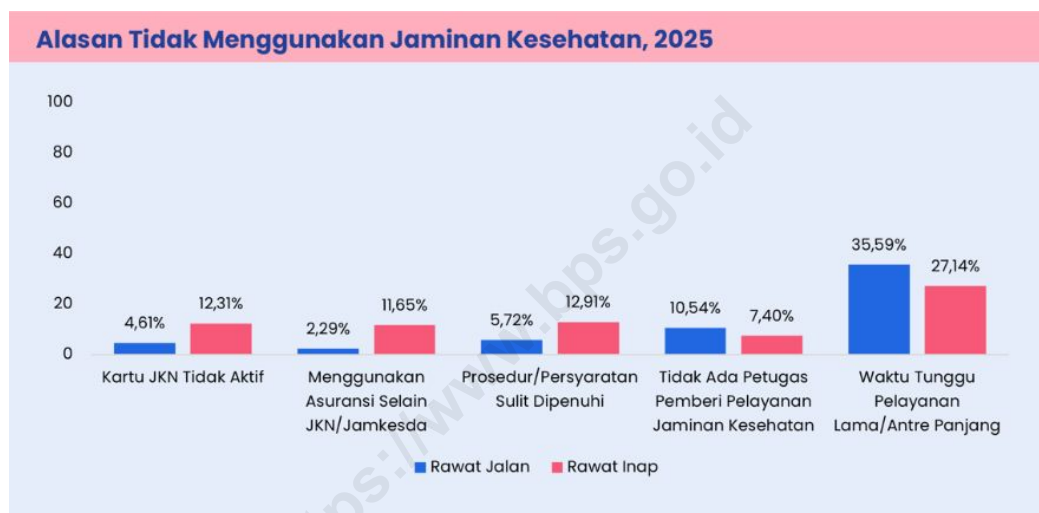
Sebagaimana pada rawat jalan, persentase penduduk yang pernah rawat inap menggunakan jaminan kesehatan dalam setahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025 mencapai 84,86 persen, angka ini naik dari 77,02 persen pada tahun 2023 dan 82,79 persen pada tahun 2024.

Dari jenis jaminan yang digunakan, BPJS Kesehatan menjadi penyumbang terbesar, dengan 80,56 persen penduduk rawat inap menggunakan fasilitas ini. Di antara peserta BPJS, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 48,44 persen, sementara peserta non-PBI atau mandiri menyumbang 32,12 persen. Selain BPJS Kesehatan, sebagian kecil penduduk menggunakan jaminan kesehatan lain seperti jaminan perusahaan atau kantor sebesar 2,66 persen, asuransi swasta sebesar 0,94 persen, dan Jamkesda sebesar 0,90 persen.

Tabel 2.26 memperlihatkan pemanfaatan jaminan kesehatan oleh penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menurut karakteristik. Penduduk perkotaan memiliki tingkat penggunaan jaminan kesehatan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 88,18 persen, dibandingkan dengan penduduk perdesaan sebesar 78,89 persen. Jika dilihat dari kelompok umur, kecenderungan penggunaan jaminan kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia. Penduduk usia 0–4 tahun dan 0–17 tahun memiliki tingkat penggunaan masing-masing 77,92

persen dan 79,79 persen, sedangkan kelompok usia produktif (18–59 tahun) mencapai 86,23 persen, dan tertinggi pada lansia sebesar 87,00 persen. Pola ini menggambarkan bahwa semakin tinggi risiko kesehatan, semakin besar pula pemanfaatan jaminan kesehatan, terutama pada kelompok usia lanjut yang lebih sering membutuhkan perawatan medis intensif.

Berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan memanfaatkan jaminan kesehatan. Penduduk dengan pendidikan tidak/belum tamat SD mencatat 80,66 persen, meningkat hingga 90,64 persen pada kelompok berpendidikan perguruan tinggi. Dari sisi status ekonomi, pola serupa juga terlihat. Penduduk pada kuintil 1 memiliki tingkat penggunaan jaminan kesehatan sebesar 81,85 persen, sedangkan pada kuintil 5 mencapai 86,25 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.18

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir, 2025

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masih banyak penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Hasil Susenas 2025 menunjukkan berbagai alasan yang menyebabkan penduduk tidak menggunakan jaminan kesehatan ketika menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Untuk pelayanan rawat jalan, alasan yang paling banyak disebut adalah waktu tunggu pelayanan yang lama atau antrean yang panjang, mencapai 35,59 persen. Pada pelayanan rawat inap, alasan yang sama juga menempati posisi tertinggi, dengan 27,14 persen.

Selain itu, sebagian masyarakat menyebut ketiadaan petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan sebagai hambatan. Sebanyak 10,54 persen untuk rawat jalan dan 7,40 persen untuk rawat inap mengalami kendala ini. Alasan lain



yang cukup menonjol adalah prosedur atau persyaratan yang sulit dipenuhi, yang dirasakan oleh 5,72 persen pengguna rawat jalan dan 12,91 persen pengguna rawat inap. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat memiliki kartu JKN yang tidak aktif, yaitu 4,61 persen pada rawat jalan dan 12,31 persen pada rawat inap. Selain itu, penggunaan asuransi di luar JKN atau Jamkesda juga menjadi faktor, dengan 2,29 persen pada rawat jalan dan 11,65 persen pada rawat inap memilih menggunakan asuransi lain.

2.4 Perilaku Merokok

Memahami perilaku merokok masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Merokok telah lama diketahui memberikan pengaruh negatif yang serius bagi tubuh, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, antara lain penyakit jantung, stroke, gangguan paru-paru, serta kanker, terutama kanker paru-paru. Selain itu, kebiasaan merokok juga berdampak pada penurunan kualitas hidup, produktivitas, serta meningkatnya beban pembiayaan kesehatan bagi individu maupun negara.

Namun, tantangan dalam menghadapi gaya hidup merokok tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Bagi sebagian masyarakat, merokok telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial dan identitas diri, sehingga sulit ditinggalkan meskipun telah mengetahui risikonya. Pengaruh lingkungan, pergaulan, iklan rokok yang masih masif, serta harga rokok yang relatif terjangkau turut memperkuat perilaku ini. Di sisi lain, tingkat kecanduan nikotin yang tinggi membuat banyak perokok mengalami kesulitan untuk berhenti tanpa dukungan medis atau program berhenti merokok yang efektif. Dalam subbab ini akan disajikan ulasan mengenai data-data perilaku merokok elektrik dan merokok tembakau penduduk Indonesia berdasarkan hasil Susenas 2025.

Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan *vape* kini menjadi fenomena yang semakin marak di berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Produk ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, namun pada kenyataannya rokok elektrik tetap mengandung zat kimia berbahaya seperti nikotin, logam berat, dan senyawa toksik lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan jantung. Tantangan terbesar dalam pengendalian rokok elektrik terletak pada meningkatnya popularitasnya akibat promosi yang masif dan persepsi keliru masyarakat bahwa penggunaannya tidak berisiko. Kurangnya pemahaman tentang bahaya jangka panjang serta minimnya regulasi yang tegas juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan

kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar penggunaan rokok elektrik dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.



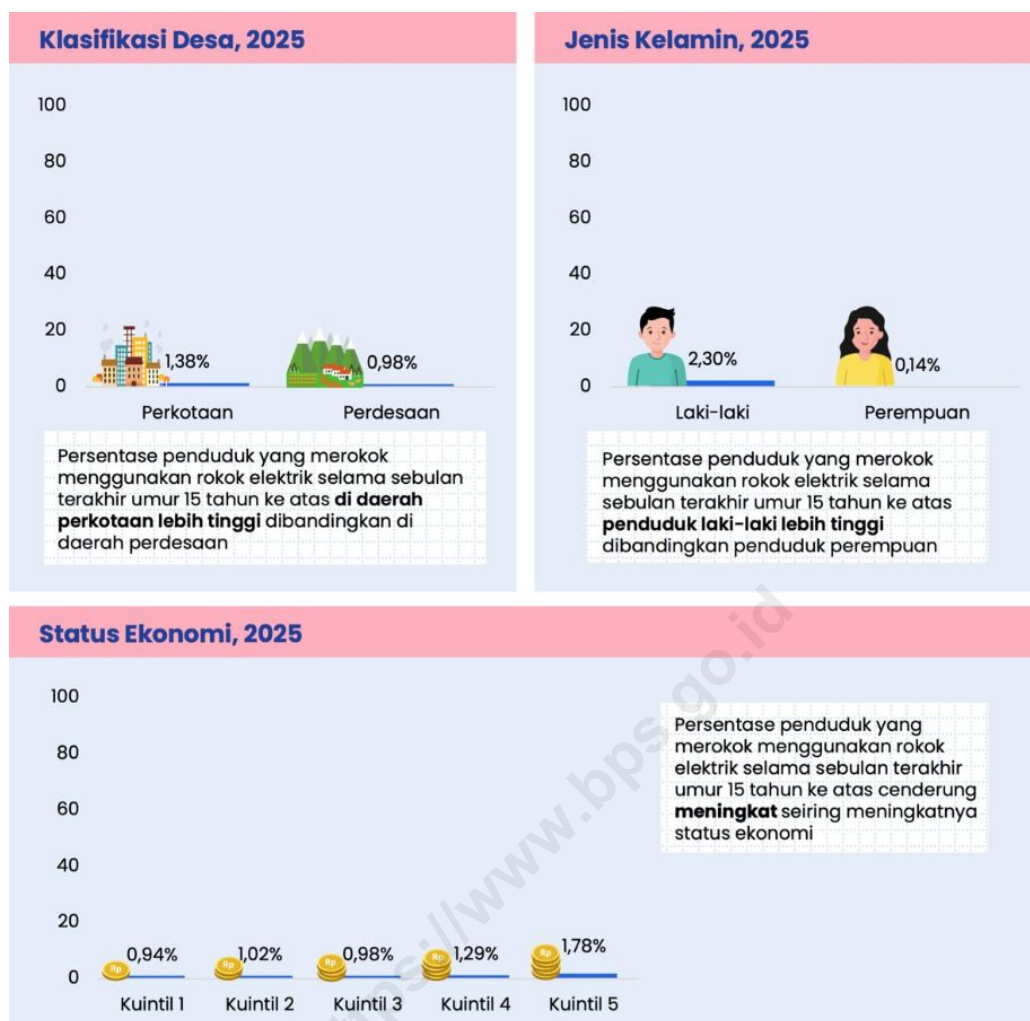
Gambar 2.19

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik Selama Sebulan Terakhir, 2023–2025

Hasil Susenas memperlihatkan bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentasenya tercatat sebesar 1,55 persen, menurun menjadi 1,42 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 1,22 persen pada 2025. Penurunan ini dapat mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok elektrik. Berdasarkan klasifikasi desa, penduduk perkotaan memiliki persentase pengguna rokok elektrik lebih tinggi yaitu sebesar 1,38 persen dibandingkan perdesaan sebesar 0,98 persen. Hal ini menunjukkan lebih mudahnya akses terhadap produk rokok elektrik ini di wilayah perkotaan.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kecenderungan merokok elektrik meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Penduduk berpendidikan perguruan tinggi memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 1,73 persen, sedangkan yang tidak atau belum pernah sekolah dan tidak tamat SD hanya sebesar 0,64 persen. Hal ini dapat mencerminkan tren gaya hidup modern dan daya beli yang lebih tinggi di kalangan berpendidikan tinggi. Pola serupa juga terlihat pada status ekonomi, di mana persentase pengguna rokok elektrik meningkat seiring naiknya tingkat kesejahteraan. Status ekonomi tertinggi mencatatkan persentase 1,78 persen, sementara kelompok status ekonomi terendah hanya 0,94 persen.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.20
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Perilaku merokok menggunakan rokok tembakau lebih populer di masyarakat Indonesia dibandingkan menggunakan rokok elektrik. Tabel 2.35 menunjukkan bahwa sekitar 28 dari 100 penduduk umur 15 tahun ke atas merokok tembakau selama sebulan terakhir. Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir selama periode 2023–2025 cenderung stagnan yaitu berkisar di angka 28 persen. Merokok tembakau berperan penting dalam pembentukan identitas laki-laki dan merupakan bagian dari konstruksi sosial maskulinitas. Oleh karena itu, para pemuda menerima pesan ambigu tentang merokok. Satu sisi memberikan informasi mengenai dampak buruk merokok, sementara di sisi lain mereka hidup dalam lingkungan di mana merokok sudah mengakar dan diterima.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

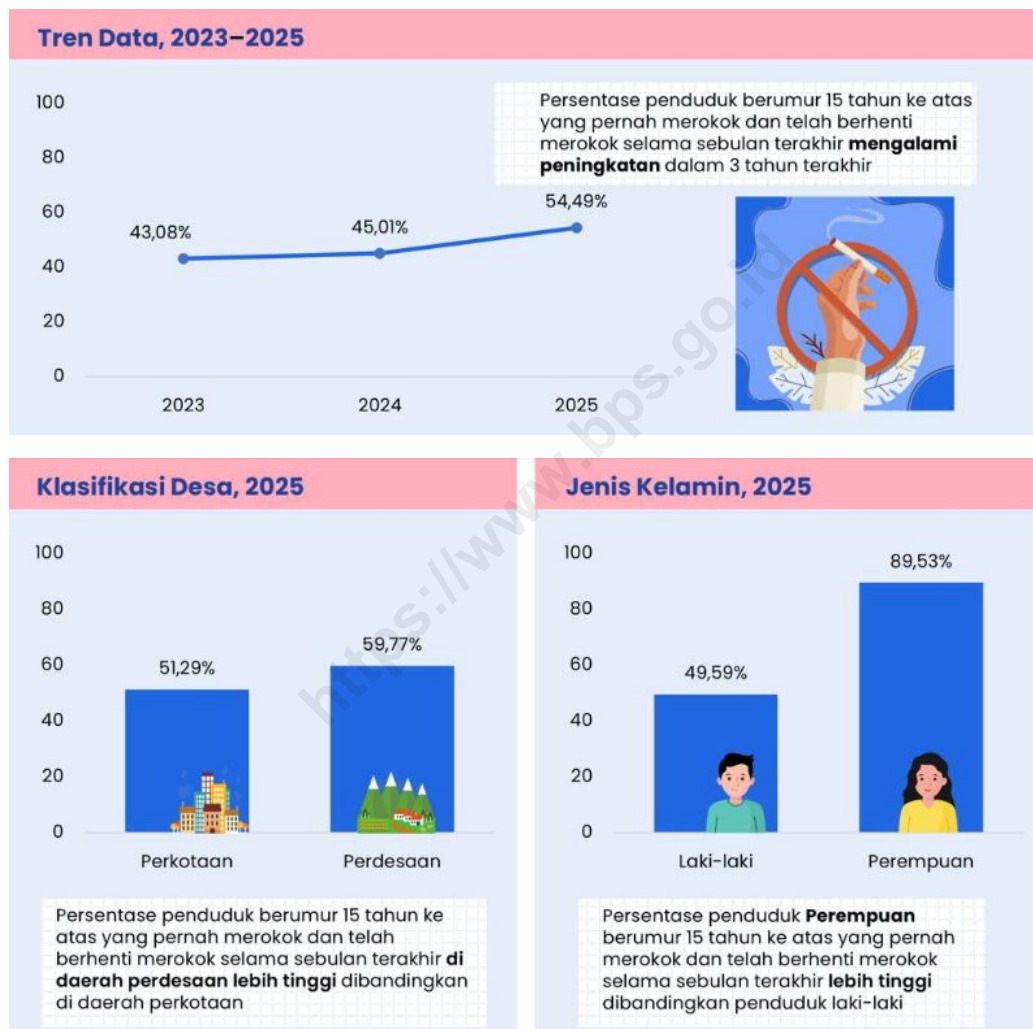
Gambar 2.21
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir, 2023–2025

Jika dilihat berdasarkan provinsi, wilayah dengan persentase tertinggi penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir pada tahun 2025 adalah Provinsi Lampung (34,25 persen) dan yang terendah adalah Provinsi Bali (19,02 persen). Berbeda dengan perilaku merokok menggunakan rokok elektrik, persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan, yaitu 31,39 persen di perdesaan dibandingkan 26,86 persen di perkotaan (Tabel 2.36). Persentase laki-laki umur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir juga jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lebih dari separuh laki-laki umur 15 tahun ke atas merokok tembakau selama sebulan terakhir, sementara untuk perempuan hanya 1 di antara 100 perempuan yang merokok tembakau selama sebulan terakhir.

Upaya berhenti merokok merupakan langkah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengingat dampak buruk rokok terhadap tubuh bersifat jangka panjang dan kompleks. Banyak individu yang sebelumnya merupakan perokok aktif kini berhasil menghentikan kebiasaannya melalui berbagai cara, seperti dorongan kesadaran pribadi akan risiko kesehatan, dukungan keluarga, serta program berhenti merokok yang disediakan oleh fasilitas kesehatan. Keberhasilan berhenti merokok sering kali tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan niat kuat, pengendalian diri, dan lingkungan yang mendukung. Faktor seperti meningkatnya informasi tentang bahaya merokok, kenaikan harga rokok, serta kebijakan kawasan tanpa rokok juga turut mendorong seseorang untuk berhenti. Keputusan untuk berhenti merokok tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit akibat konsumsi tembakau di masyarakat.



Dari hasil Susenas, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah merokok dan telah berhenti merokok selama sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentasenya tercatat sebesar 43,08 persen, meningkat menjadi 45,01 persen pada 2024, dan melonjak hingga 54,49 persen pada 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kesadaran yang semakin tinggi di masyarakat terhadap bahaya merokok. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk perdesaan memiliki proporsi berhenti merokok lebih tinggi yaitu sebesar 59,77 persen dibandingkan perkotaan sebesar 51,29 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.22

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Pernah Merokok dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Dari sisi jenis kelamin, perempuan menunjukkan angka berhenti merokok jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (89,53 persen dan 49,59 persen). Berdasarkan kelompok umur, kecenderungan berhenti merokok meningkat seiring bertambahnya usia. Penduduk berumur 15–17 tahun dan 18–59 tahun masing-masing memiliki persentase 48,83 persen dan 47,29 persen, sedangkan pada kelompok lansia angka ini melonjak hingga 80,83 persen, yang menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menjaga kesehatan di usia lanjut.

Jika dilihat menurut provinsi, wilayah dengan persentase penduduk berhenti merokok tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 88,30 persen, diikuti oleh Provinsi Lampung sebesar 76,32 persen, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 75,01 persen. Sebaliknya, persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 31,58 persen, Provinsi Papua Selatan sebesar 34,45 persen, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 41,38 persen.

<https://www.bps.go.id>



Tabel 2.1
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27,71	25,58	24,60
Sumatera Utara	23,75	23,99	24,32
Sumatera Barat	28,93	30,10	28,47
R i a u	24,31	23,60	21,74
J a m b i	24,37	23,73	25,95
Sumatera Selatan	27,22	29,89	26,17
Bengkulu	27,81	28,27	29,95
Lampung	26,69	29,54	29,97
Kep. Bangka Belitung	28,65	28,80	31,44
Kep. Riau	31,75	26,26	17,87
DKI Jakarta	20,95	24,07	25,32
Jawa Barat	25,27	28,88	30,50
Jawa Tengah	30,16	31,86	33,34
DI Yogyakarta	26,96	28,82	32,74
Jawa Timur	27,31	28,75	30,65
Banten	27,02	25,77	26,79
B a l i	22,64	19,32	20,27
Nusa Tenggara Barat	39,40	38,88	42,00
Nusa Tenggara Timur	30,51	29,56	30,00
Kalimantan Barat	26,25	24,37	24,30
Kalimantan Tengah	23,20	21,37	25,05
Kalimantan Selatan	27,76	29,00	29,55
Kalimantan Timur	23,53	20,01	21,50
Kalimantan Utara	23,42	19,93	21,76
Sulawesi Utara	25,05	23,30	22,49
Sulawesi Tengah	20,81	22,41	21,68
Sulawesi Selatan	22,55	23,43	27,10
Sulawesi Tenggara	21,14	20,87	20,22
Gorontalo	35,35	33,80	28,62
Sulawesi Barat	24,83	23,33	24,28
Maluku	19,04	14,38	18,63
Maluku Utara	15,49	13,22	13,44
Papua Barat	16,67 ¹	14,18	14,21
Papua Barat Daya	–	17,43	19,15
Papua	12,64 ²	14,43	15,94
Papua Selatan	–	21,24	19,09
Papua Tengah	–	10,72	8,57
Papua Pegunungan	–	8,88	12,94
Indonesia	26,27	27,34	28,31

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.2
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	25,81	27,12	27,88
Perdesaan	26,90	27,64	28,95
Jenis Kelamin			
Laki-laki	24,66	25,45	26,46
Perempuan	27,88	29,23	30,17
Kelompok Umur			
0–4 tahun	37,40	39,85	40,12
0–17 tahun	27,84	29,32	29,97
18–59 tahun	22,47	23,23	24,23
60+ tahun	41,49	42,81	44,02
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	32,87	34,92	35,56
SD/Sederajat	27,91	28,50	30,19
SMP/Sederajat	22,19	23,36	24,34
SMA/Sederajat	20,98	21,50	22,66
Perguruan Tinggi	20,62	21,82	22,59
Status Ekonomi			
Kuintil 1	24,39	26,39	27,18
Kuintil 2	26,49	27,08	28,88
Kuintil 3	26,69	27,26	28,65
Kuintil 4	26,89	27,88	28,34
Kuintil 5	26,87	28,07	28,50
Indonesia	26,27	27,34	28,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.3
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi,
2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,51	13,58	13,33
Sumatera Utara	10,10	10,08	10,43
Sumatera Barat	11,84	15,50	13,57
R i a u	9,68	10,19	9,79
J a m b i	10,73	10,08	10,61
Sumatera Selatan	8,29	10,35	8,63
Bengkulu	11,75	12,80	12,52
Lampung	11,39	12,91	12,97
Kep. Bangka Belitung	10,06	10,08	10,40
Kep. Riau	9,99	10,25	7,46
DKI Jakarta	8,44	9,10	8,92
Jawa Barat	11,50	13,92	14,93
Jawa Tengah	12,34	13,83	15,27
DI Yogyakarta	10,79	12,32	13,42
Jawa Timur	11,16	12,22	12,87
Banten	10,61	10,97	11,63
B a l i	11,40	10,61	10,31
Nusa Tenggara Barat	20,92	19,34	20,59
Nusa Tenggara Timur	13,76	13,60	15,28
Kalimantan Barat	11,89	10,20	10,99
Kalimantan Tengah	8,46	7,68	9,26
Kalimantan Selatan	9,34	10,33	10,09
Kalimantan Timur	9,22	8,42	8,88
Kalimantan Utara	10,42	8,95	10,23
Sulawesi Utara	11,83	11,64	10,98
Sulawesi Tengah	10,01	11,69	11,40
Sulawesi Selatan	9,63	10,24	11,84
Sulawesi Tenggara	10,39	10,58	9,68
Gorontalo	16,35	16,91	15,15
Sulawesi Barat	11,37	11,14	11,49
Maluku	10,00	6,76	8,38
Maluku Utara	8,24	7,44	7,36
Papua Barat	6,70 ¹	6,07	7,10
Papua Barat Daya	–	8,15	9,11
Papua	5,73 ²	7,60	10,52
Papua Selatan	–	10,02	10,10
Papua Tengah	–	3,60	3,89
Papua Pegunungan	–	3,76	6,53
Indonesia	11,15	12,12	12,66

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	10,64	11,75	12,07
Perdesaan	11,85	12,63	13,54
Jenis Kelamin			
Laki-laki	10,60	11,42	12,01
Perempuan	11,69	12,81	13,32
Kelompok Umur			
0–4 tahun	17,54	20,63	20,72
0–17 tahun	13,11	14,81	15,43
18–59 tahun	8,49	9,05	9,54
60+ tahun	19,72	20,71	21,21
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	15,62	17,74	18,36
SD/Sederajat	11,81	12,47	13,40
SMP/Sederajat	8,86	9,39	10,07
SMA/Sederajat	7,63	8,13	8,56
Perguruan Tinggi	7,31	7,90	8,02
Status Ekonomi			
Kuintil 1	10,68	12,14	12,64
Kuintil 2	11,45	12,21	13,20
Kuintil 3	11,49	12,16	12,96
Kuintil 4	11,18	12,30	12,62
Kuintil 5	10,93	11,77	11,89
Indonesia	11,15	12,12	12,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,91	71,87	73,68
Sumatera Utara	80,95	81,41	79,51
Sumatera Barat	66,21	67,55	67,56
Riau	80,04	79,44	78,29
Jambi	80,97	81,73	80,11
Sumatera Selatan	85,22	83,24	82,03
Bengkulu	78,92	80,07	78,18
Lampung	80,16	78,60	79,42
Kep. Bangka Belitung	80,29	78,16	81,62
Kep. Riau	78,55	81,33	69,69
DKI Jakarta	76,95	76,02	75,71
Jawa Barat	80,62	80,22	79,00
Jawa Tengah	77,42	76,17	75,00
DI Yogyakarta	73,30	72,59	67,66
Jawa Timur	81,25	79,93	80,01
Banten	85,54	82,48	82,41
Bali	62,98	58,54	62,72
Nusa Tenggara Barat	82,61	84,54	82,40
Nusa Tenggara Timur	78,51	79,51	79,35
Kalimantan Barat	84,67	84,72	84,82
Kalimantan Tengah	87,57	88,56	89,63
Kalimantan Selatan	89,08	87,66	89,95
Kalimantan Timur	78,66	76,52	77,23
Kalimantan Utara	79,57	70,95	75,57
Sulawesi Utara	72,06	74,59	75,98
Sulawesi Tengah	83,71	83,59	84,11
Sulawesi Selatan	77,72	77,11	80,01
Sulawesi Tenggara	81,00	82,88	81,54
Gorontalo	83,14	79,23	80,14
Sulawesi Barat	79,35	75,08	74,24
Maluku	77,17	79,90	81,70
Maluku Utara	79,52	77,47	79,74
Papua Barat	66,16 ¹	73,87	70,94
Papua Barat Daya	–	68,12	70,58
Papua	73,29 ²	74,82	65,42
Papua Selatan	–	70,79	66,43
Papua Tengah	–	53,38	64,72
Papua Pegunungan	–	86,06	83,56
Indonesia	79,74	78,95	78,43

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.6
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	78,84	78,01	77,32
Perdesaan	80,94	80,27	80,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	80,23	79,56	78,82
Perempuan	79,31	78,42	78,09
Kelompok Umur			
0–4 tahun	70,26	68,77	68,29
0–17 tahun	75,62	74,70	74,27
18–59 tahun	82,90	82,16	81,41
60+ tahun	77,96	77,36	77,13
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	76,63	75,57	75,10
SD/Sederajat	82,01	81,57	81,20
SMP/Sederajat	81,89	81,79	81,14
SMA/Sederajat	81,92	80,50	79,43
Perguruan Tinggi	78,90	78,56	78,44
Status Ekonomi			
Kuintil 1	80,06	79,89	78,45
Kuintil 2	81,05	79,80	79,80
Kuintil 3	79,92	79,46	79,66
Kuintil 4	79,87	78,83	78,12
Kuintil 5	77,86	76,88	76,08
Indonesia	79,74	78,95	78,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.7
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	45,83	49,70	46,33
Sumatera Utara	33,24	35,59	35,08
Sumatera Barat	45,15	50,99	49,36
R i a u	28,59	33,11	35,18
J a m b i	28,70	33,56	32,70
Sumatera Selatan	26,86	30,18	31,35
Bengkulu	29,56	34,42	38,06
Lampung	33,94	37,24	39,20
Kep. Bangka Belitung	34,33	35,46	39,22
Kep. Riau	28,87	35,26	44,49
DKI Jakarta	41,49	42,80	45,91
Jawa Barat	38,80	42,11	43,74
Jawa Tengah	36,75	40,13	41,70
DI Yogyakarta	40,72	46,25	48,89
Jawa Timur	35,26	39,36	39,58
Banten	30,13	38,83	39,54
B a l i	53,08	62,07	57,42
Nusa Tenggara Barat	41,56	39,26	40,76
Nusa Tenggara Timur	30,05	33,03	33,52
Kalimantan Barat	25,93	28,69	29,87
Kalimantan Tengah	19,28	20,48	23,32
Kalimantan Selatan	22,68	23,11	22,81
Kalimantan Timur	33,39	39,14	36,44
Kalimantan Utara	28,34	38,36	40,67
Sulawesi Utara	38,18	42,02	37,99
Sulawesi Tengah	24,21	26,34	27,08
Sulawesi Selatan	31,60	30,42	30,28
Sulawesi Tenggara	24,53	26,51	26,49
Gorontalo	31,26	36,65	37,01
Sulawesi Barat	28,08	29,55	28,24
Maluku	27,08	28,93	24,14
Maluku Utara	29,99	32,45	28,89
Papua Barat	39,20 ¹	28,44	35,88
Papua Barat Daya	–	38,54	42,13
Papua	34,74 ²	43,47	54,64
Papua Selatan	–	39,49	39,29
Papua Tengah	–	26,05	27,08
Papua Pegunungan	–	27,40	38,22
Indonesia	35,16	38,70	39,64

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.8
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	37,02	40,55	41,65
Perdesaan	32,68	36,11	36,79
Jenis Kelamin			
Laki-laki	33,85	37,39	38,26
Perempuan	36,32	39,84	40,85
Kelompok Umur			
0–4 tahun	45,21	50,31	50,65
0–17 tahun	37,95	41,90	42,87
18–59 tahun	30,61	33,95	34,93
60+ tahun	42,96	46,10	46,95
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	39,36	43,35	44,50
SD/Sederajat	33,64	36,86	37,91
SMP/Sederajat	32,03	34,52	35,28
SMA/Sederajat	31,26	35,12	36,49
Perguruan Tinggi	33,98	37,72	37,50
Status Ekonomi			
Kuintil 1	32,57	34,97	36,56
Kuintil 2	33,42	37,51	37,81
Kuintil 3	34,71	38,59	39,04
Kuintil 4	36,36	39,62	40,96
Kuintil 5	38,48	42,53	43,72
Indonesia	35,16	38,70	39,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.9
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi
dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	17,34	2,92	7,45
Sumatera Utara	6,89	10,04	12,88
Sumatera Barat	11,31	6,60	10,80
R i a u	10,81	15,82	28,91
J a m b i	9,59	5,63	9,65
Sumatera Selatan	9,24	6,02	9,81
Bengkulu	9,38	4,82	8,70
Lampung	3,88	8,37	10,72
Kep. Bangka Belitung	11,98	9,09	10,40
Kep. Riau	12,84	20,15	29,72
DKI Jakarta	20,25	14,62	21,56
Jawa Barat	7,93	11,95	24,41
Jawa Tengah	7,87	11,07	9,60
DI Yogyakarta	11,64	20,66	14,06
Jawa Timur	8,94	8,10	11,24
Banten	7,16	11,74	32,03
B a l i	11,40	9,82	8,65
Nusa Tenggara Barat	6,03	2,30	8,66
Nusa Tenggara Timur	6,72	3,69	6,66
Kalimantan Barat	14,61	5,51	5,92
Kalimantan Tengah	19,02	2,29	4,58
Kalimantan Selatan	17,63	6,06	6,16
Kalimantan Timur	17,01	12,95	16,73
Kalimantan Utara	22,05	3,52	2,92
Sulawesi Utara	11,80	7,38	2,94
Sulawesi Tengah	17,35	1,49	6,75
Sulawesi Selatan	14,89	5,11	9,10
Sulawesi Tenggara	16,69	4,67	5,96
Gorontalo	6,88	0,43	5,37
Sulawesi Barat	11,56	1,22	3,61
Maluku	12,59	6,75	3,42
Maluku Utara	15,16	2,37	3,71
Papua Barat	18,35	1,85	10,85
Papua Barat Daya	10,62	4,94	6,73
Papua	17,89	5,72	4,40
Papua Selatan	14,29	2,38	6,06
Papua Tengah	10,87	12,89	22,93
Papua Pegunungan	8,05	–	2,41
Indonesia	9,59	9,67	15,03



Lanjutan Tabel 2.9

Provinsi	Praktik Dokter/Bidan/ Perawat	Puskesmas/Pustu/ Pusling	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,76	44,76	4,70
Sumatera Utara	46,90	24,64	1,46
Sumatera Barat	39,13	32,97	2,76
R i a u	23,62	20,48	3,26
J a m b i	47,70	26,87	1,95
Sumatera Selatan	53,07	20,82	3,60
Bengkulu	55,84	22,86	2,16
Lampung	54,76	23,25	1,13
Kep. Bangka Belitung	41,77	29,38	1,83
Kep. Riau	12,51	25,77	0,94
DKI Jakarta	3,54	43,93	0,35
Jawa Barat	31,63	27,95	0,95
Jawa Tengah	44,69	28,28	2,05
DI Yogyakarta	25,46	33,00	0,71
Jawa Timur	51,29	20,70	2,71
Banten	23,14	29,53	1,03
B a l i	53,80	19,55	0,42
Nusa Tenggara Barat	46,92	38,24	4,47
Nusa Tenggara Timur	14,43	62,78	12,83
Kalimantan Barat	36,72	36,66	4,77
Kalimantan Tengah	32,24	39,44	5,26
Kalimantan Selatan	32,49	32,10	8,47
Kalimantan Timur	19,02	35,57	2,91
Kalimantan Utara	22,87	49,08	3,93
Sulawesi Utara	43,56	35,51	1,63
Sulawesi Tengah	21,82	50,23	7,54
Sulawesi Selatan	22,97	48,93	1,92
Sulawesi Tenggara	16,58	55,87	4,04
Gorontalo	48,86	41,03	1,31
Sulawesi Barat	24,34	59,87	3,90
Maluku	24,87	49,73	4,27
Maluku Utara	16,97	59,62	4,19
Papua Barat	12,66	58,41	2,26
Papua Barat Daya	15,21	65,17	1,92
Papua	19,07	55,76	0,81
Papua Selatan	10,30	65,81	3,81
Papua Tengah	13,68	39,09	–
Papua Pegunungan	0,84	88,30	1,10
Indonesia	37,45	30,05	2,25



Lanjutan Tabel 2.9

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Aceh	1,81	1,36
Sumatera Utara	2,11	1,84
Sumatera Barat	1,27	0,91
R i a u	0,88	0,68
J a m b i	1,87	3,25
Sumatera Selatan	1,17	1,18
Bengkulu	1,04	0,91
Lampung	1,38	1,17
Kep. Bangka Belitung	0,88	0,59
Kep. Riau	1,21	0,49
DKI Jakarta	0,72	0,64
Jawa Barat	1,10	1,07
Jawa Tengah	0,91	0,99
DI Yogyakarta	0,48	1,08
Jawa Timur	1,16	1,25
Banten	1,56	0,85
B a l i	0,75	0,36
Nusa Tenggara Barat	1,71	2,43
Nusa Tenggara Timur	0,27	0,19
Kalimantan Barat	2,72	2,34
Kalimantan Tengah	0,80	1,77
Kalimantan Selatan	2,22	2,13
Kalimantan Timur	0,28	0,87
Kalimantan Utara	0,88	3,34
Sulawesi Utara	0,77	0,75
Sulawesi Tengah	0,29	1,01
Sulawesi Selatan	0,46	1,23
Sulawesi Tenggara	2,26	2,20
Gorontalo	0,44	0,71
Sulawesi Barat	1,34	1,82
Maluku	0,35	1,09
Maluku Utara	1,12	1,48
Papua Barat	0,59	0,79
Papua Barat Daya	0,31	0,31
Papua	0,26	1,18
Papua Selatan	–	0,39
Papua Tengah	0,61	0,61
Papua Pegunungan	0,01	1,81
Indonesia	1,14	1,16

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.10
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	10,50	12,57	19,42
Perdesaan	8,13	5,03	8,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	10,00	9,40	15,27
Perempuan	9,25	9,89	14,83
Kelompok Umur			
0–4 tahun	4,46	6,49	17,04
0–17 tahun	4,22	5,68	17,33
18–59 tahun	10,88	10,63	15,71
60+ tahun	14,80	13,53	10,39
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	6,00	6,66	14,81
SD/Sederajat	11,12	8,50	11,27
SMP/Sederajat	11,31	9,60	13,35
SMA/Sederajat	12,37	13,67	19,62
Perguruan Tinggi	16,33	22,14	20,09
Status Ekonomi			
Kuintil 1	6,51	4,40	7,73
Kuintil 2	8,12	5,49	10,21
Kuintil 3	8,91	7,37	14,97
Kuintil 4	10,46	9,78	16,59
Kuintil 5	13,13	19,49	23,68
Indonesia	9,59	9,67	15,03



Lanjutan Tabel 2.10

Karakteristik	Praktik Dokter/Bidan/ Perawat	Puskesmas/Pustu/ Pusling	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	29,49	30,57	1,32
Perdesaan	50,20	29,21	3,75
Jenis Kelamin			
Laki-laki	38,22	28,91	1,86
Perempuan	36,81	30,99	2,57
Kelompok Umur			
0–4 tahun	45,43	27,59	2,44
0–17 tahun	42,96	30,87	1,97
18–59 tahun	34,31	30,23	1,97
60+ tahun	35,66	28,51	3,21
Tingkat Pendidikan			
Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	43,50	30,46	2,72
SD/Sederajat	38,07	32,66	2,87
SMP/Sederajat	35,23	32,47	1,84
SMA/Sederajat	28,37	28,14	1,29
Perguruan Tinggi	25,87	18,75	0,64
Status Ekonomi			
Kuintil 1	42,19	38,94	3,66
Kuintil 2	43,20	33,76	2,71
Kuintil 3	38,23	32,15	2,18
Kuintil 4	37,01	29,20	1,91
Kuintil 5	28,32	18,62	1,10
Indonesia	37,45	30,05	2,25

Lanjutan Tabel 2.10

Karakteristik	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	0,90	1,02
Perdesaan	1,52	1,38
Jenis Kelamin		
Laki-laki	1,19	1,22
Perempuan	1,09	1,11
Kelompok Umur		
0–4 tahun	0,55	0,61
0–17 tahun	0,53	0,68
18–59 tahun	1,31	1,38
60+ tahun	1,67	1,41
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,85	0,88
SD/Sederajat	1,62	1,45
SMP/Sederajat	1,43	1,48
SMA/Sederajat	1,11	1,17
Perguruan Tinggi	0,80	1,29
Status Ekonomi		
Kuintil 1	1,20	1,25
Kuintil 2	1,23	1,29
Kuintil 3	1,19	1,25
Kuintil 4	1,02	0,96
Kuintil 5	1,06	1,08
Indonesia	1,14	1,16

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.11

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Punya Biaya Transportasi	Tidak Ada yang Mendampingi	Mengobati Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	NA	0,40	NA	62,05
Sumatera Utara	0,97	0,12	0,23	61,41
Sumatera Barat	0,77	0,21	0,12	61,83
R i a u	0,23	NA	0,19	59,79
J a m b i	0,59	NA	NA	63,73
Sumatera Selatan	0,25	NA	0,21	68,80
Bengkulu	0,42	NA	NA	63,46
Lampung	0,23	0,06	NA	61,72
Kep. Bangka Belitung	NA	–	NA	77,25
Kep. Riau	NA	NA	NA	61,11
DKI Jakarta	NA	0,13	NA	63,65
Jawa Barat	0,76	0,19	0,48	67,13
Jawa Tengah	0,32	0,15	0,10	70,49
DI Yogyakarta	NA	–	NA	73,41
Jawa Timur	0,19	0,14	0,11	68,94
Banten	1,44	0,60	NA	59,11
B a l i	NA	NA	NA	61,86
Nusa Tenggara Barat	0,49	NA	0,17	74,29
Nusa Tenggara Timur	0,66	0,41	0,09	75,25
Kalimantan Barat	0,34	0,30	NA	61,22
Kalimantan Tengah	0,83	NA	NA	69,61
Kalimantan Selatan	NA	NA	0,32	75,08
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	59,01
Kalimantan Utara	NA	NA	–	70,06
Sulawesi Utara	0,28	–	NA	72,66
Sulawesi Tengah	0,51	0,18	NA	62,09
Sulawesi Selatan	0,35	0,09	0,07	63,41
Sulawesi Tenggara	0,28	NA	NA	72,60
Gorontalo	–	NA	NA	79,16
Sulawesi Barat	0,71	NA	NA	60,83
Maluku	0,64	0,25	NA	59,41
Maluku Utara	0,59	0,67	NA	61,51
Papua Barat	NA	NA	NA	60,67
Papua Barat Daya	NA	NA	–	59,80
Papua	NA	0,82	NA	66,64
Papua Selatan	NA	NA	NA	49,99
Papua Tengah	1,75	NA	NA	48,55
Papua Pegunungan	NA	3,43	2,74	69,41
Indonesia	0,50	0,19	0,21	66,88



Lanjutan Tabel 2.11

Provinsi	Merasa Tidak Perlu	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	32,36	NA	1,95	2,94
Sumatera Utara	35,51	0,11	0,45	1,22
Sumatera Barat	35,33	NA	0,40	1,34
R i a u	38,25	NA	0,29	1,14
J a m b i	33,20	NA	0,56	1,74
Sumatera Selatan	28,36	NA	0,33	1,57
Bengkulu	34,50	NA	NA	1,10
Lampung	37,12	NA	NA	0,50
Kep. Bangka Belitung	21,90	NA	0,30	NA
Kep. Riau	34,50	NA	NA	2,59
DKI Jakarta	34,28	NA	0,58	0,96
Jawa Barat	29,94	NA	0,34	1,14
Jawa Tengah	27,69	0,05	0,23	0,97
DI Yogyakarta	23,76	–	0,89	1,41
Jawa Timur	28,97	NA	0,29	1,32
Banten	36,28	NA	0,75	1,57
B a l i	36,57	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	23,29	–	0,23	1,50
Nusa Tenggara Timur	21,61	0,37	0,44	1,16
Kalimantan Barat	37,19	0,40	0,24	NA
Kalimantan Tengah	28,54	NA	NA	0,72
Kalimantan Selatan	22,92	NA	0,32	0,24
Kalimantan Timur	37,64	–	1,39	0,95
Kalimantan Utara	26,22	NA	0,59	1,75
Sulawesi Utara	25,34	NA	NA	0,99
Sulawesi Tengah	35,67	0,29	NA	1,04
Sulawesi Selatan	34,49	0,18	0,58	0,82
Sulawesi Tenggara	25,06	NA	NA	1,77
Gorontalo	20,04	NA	–	0,47
Sulawesi Barat	36,14	NA	NA	1,65
Maluku	38,34	NA	NA	1,09
Maluku Utara	35,94	NA	–	1,18
Papua Barat	32,98	–	NA	3,53
Papua Barat Daya	35,03	–	1,44	1,26
Papua	28,08	NA	NA	3,52
Papua Selatan	44,43	2,32	–	NA
Papua Tengah	42,32	–	NA	6,72
Papua Pegunungan	18,41	1,34	NA	2,43
Indonesia	30,57	0,08	0,40	1,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.12

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Punya Biaya Transportasi	Tidak Ada yang Mendampingi	Mengobati Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,42	0,16	0,28	67,85
Perdesaan	0,61	0,22	0,13	65,61
Jenis Kelamin				
Laki-laki	0,48	0,17	0,19	66,91
Perempuan	0,52	0,20	0,23	66,86
Kelompok Umur				
0–4 tahun	0,70	0,09	0,15	66,06
0–17 tahun	0,53	0,06	0,14	67,66
18–59 tahun	0,38	0,15	0,17	66,89
60+ tahun	0,82	0,53	0,49	65,53
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,68	0,24	0,25	66,67
SD/Sederajat	0,69	0,23	0,22	66,53
SMP/Sederajat	0,38	0,13	0,27	67,43
SMA/Sederajat	0,22	0,12	0,16	66,62
Perguruan Tinggi	0,06	0,13	0,05	68,58
Status Ekonomi				
Kuintil 1	1,10	0,39	0,33	67,25
Kuintil 2	0,65	0,12	0,17	67,24
Kuintil 3	0,39	0,19	0,15	66,55
Kuintil 4	0,22	0,15	0,26	66,18
Kuintil 5	0,10	0,08	0,15	67,18
Indonesia	0,50	0,19	0,21	66,88

Lanjutan Tabel 2.12

Karakteristik	Merasa Tidak Perlu	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	29,53	0,05	0,51	1,19
Perdesaan	31,93	0,10	0,25	1,15
Jenis Kelamin				
Laki-laki	30,63	0,06	0,40	1,15
Perempuan	30,52	0,09	0,39	1,19
Kelompok Umur				
0–4 tahun	31,11	0,03	0,30	1,56
0–17 tahun	29,99	0,06	0,34	1,21
18–59 tahun	30,93	0,06	0,38	1,05
60+ tahun	30,42	0,16	0,57	1,49
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	30,40	0,10	0,37	1,28
SD/Sederajat	30,68	0,07	0,39	1,19
SMP/Sederajat	30,14	0,08	0,42	1,15
SMA/Sederajat	31,43	0,06	0,44	0,97
Perguruan Tinggi	29,55	–	0,36	1,26
Status Ekonomi				
Kuintil 1	29,20	0,12	0,34	1,27
Kuintil 2	30,51	0,08	0,28	0,95
Kuintil 3	31,21	0,07	0,38	1,05
Kuintil 4	31,29	0,07	0,50	1,32
Kuintil 5	30,68	0,04	0,49	1,28
Indonesia	30,57	0,08	0,40	1,17



Tabel 2.13
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,51	4,50	5,09
Sumatera Utara	3,01	2,96	3,87
Sumatera Barat	3,51	3,95	4,13
R i a u	2,76	2,82	3,46
J a m b i	3,10	3,07	3,72
Sumatera Selatan	2,37	2,76	3,72
Bengkulu	3,00	3,55	4,46
Lampung	3,02	3,50	5,05
Kep. Bangka Belitung	3,07	3,27	3,79
Kep. Riau	4,23	3,65	4,31
DKI Jakarta	3,28	3,66	4,88
Jawa Barat	3,11	3,84	5,35
Jawa Tengah	4,10	4,62	6,21
DI Yogyakarta	4,31	4,94	6,14
Jawa Timur	3,27	3,91	4,78
Banten	2,63	3,30	3,56
B a l i	2,98	3,42	4,72
Nusa Tenggara Barat	5,03	5,60	6,52
Nusa Tenggara Timur	2,74	3,37	3,74
Kalimantan Barat	2,49	2,52	3,21
Kalimantan Tengah	1,75	2,34	2,54
Kalimantan Selatan	2,61	2,81	3,27
Kalimantan Timur	3,50	3,67	4,09
Kalimantan Utara	4,26	4,36	5,28
Sulawesi Utara	4,76	5,47	5,69
Sulawesi Tengah	3,66	4,14	5,04
Sulawesi Selatan	4,09	4,21	5,55
Sulawesi Tenggara	3,05	3,10	3,76
Gorontalo	5,12	5,73	5,93
Sulawesi Barat	3,12	3,63	4,70
Maluku	1,92	1,98	2,39
Maluku Utara	2,34	2,30	2,79
Papua Barat	2,39 ¹	1,85	2,01
Papua Barat Daya	–	2,79	3,55
Papua	1,37 ²	2,49	3,35
Papua Selatan	–	3,28	2,80
Papua Tengah	–	1,09	1,28
Papua Pegunungan	–	0,22	0,67
Indonesia	3,29	3,74	4,77

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.14
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	3,56	4,11	5,15
Perdesaan	2,92	3,23	4,21
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,59	2,93	3,82
Perempuan	4,00	4,56	5,73
Kelompok Umur			
0–4 tahun	5,10	6,22	7,36
0–17 tahun	2,55	2,99	3,96
18–59 tahun	3,22	3,61	4,52
60+ tahun	5,52	6,19	7,84
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	3,25	3,89	5,01
SD/Sederajat	3,03	3,31	4,50
SMP/Sederajat	2,97	3,44	4,25
SMA/Sederajat	3,40	3,76	4,72
Perguruan Tinggi	4,60	5,01	5,87
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2,27	2,71	3,43
Kuintil 2	2,70	3,07	3,84
Kuintil 3	3,11	3,52	4,55
Kuintil 4	3,63	4,12	5,29
Kuintil 5	4,75	5,31	6,75
Indonesia	3,29	3,74	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.15
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65,38	19,75	3,05	3,17
Sumatera Utara	30,02	55,16	8,23	4,33
Sumatera Barat	46,87	36,19	4,61	5,32
Riau	33,10	50,00	7,55	3,75
Jambi	39,91	37,88	10,02	2,54
Sumatera Selatan	42,14	39,33	9,12	7,78
Bengkulu	53,45	35,32	6,50	2,35
Lampung	20,39	50,70	19,05	4,56
Kep. Bangka Belitung	55,56	31,11	3,83	2,38
Kep. Riau	30,38	62,41	NA	3,18
DKI Jakarta	50,66	44,73	NA	1,01
Jawa Barat	29,90	50,93	9,62	3,08
Jawa Tengah	34,40	52,17	5,23	0,68
DI Yogyakarta	29,75	63,36	3,99	2,31
Jawa Timur	36,79	42,80	7,85	1,32
Banten	26,89	56,27	9,23	3,08
Bali	43,09	54,11	NA	2,08
Nusa Tenggara Barat	36,40	14,51	12,23	1,75
Nusa Tenggara Timur	49,81	22,61	1,56	NA
Kalimantan Barat	52,87	28,01	4,25	5,52
Kalimantan Tengah	74,12	11,85	2,76	1,90
Kalimantan Selatan	66,48	20,81	5,00	2,18
Kalimantan Timur	50,63	37,96	5,00	0,90
Kalimantan Utara	84,23	10,03	NA	NA
Sulawesi Utara	46,38	45,34	2,04	0,42
Sulawesi Tengah	65,74	10,73	1,01	NA
Sulawesi Selatan	54,20	24,72	3,70	1,06
Sulawesi Tenggara	57,45	18,72	3,26	NA
Gorontalo	73,78	17,01	1,92	NA
Sulawesi Barat	53,29	9,59	NA	0,98
Maluku	60,12	29,15	NA	NA
Maluku Utara	72,97	8,20	1,10	NA
Papua Barat	83,58	3,84	NA	–
Papua Barat Daya	56,08	39,32	4,41	NA
Papua	65,22	24,22	1,86	NA
Papua Selatan	47,44	26,12	NA	NA
Papua Tengah	40,23	20,47	32,09	–
Papua Pegunungan	72,89	NA	NA	–
Indonesia	38,47	43,75	6,96	2,26

Lanjutan Tabel 2.15

Provinsi	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,99	NA	NA
Sumatera Utara	3,71	NA	NA
Sumatera Barat	8,90	–	NA
R i a u	7,15	NA	NA
J a m b i	12,01	–	–
Sumatera Selatan	3,45	–	0,75
Bengkulu	5,06	NA	NA
Lampung	7,81	NA	NA
Kep. Bangka Belitung	8,86	–	–
Kep. Riau	2,18	NA	–
DKI Jakarta	3,76	NA	–
Jawa Barat	7,43	0,54	0,36
Jawa Tengah	9,85	0,20	NA
DI Yogyakarta	2,78	–	–
Jawa Timur	14,02	0,22	NA
Banten	6,16	NA	–
B a l i	0,70	NA	–
Nusa Tenggara Barat	40,43	NA	1,20
Nusa Tenggara Timur	28,18	NA	NA
Kalimantan Barat	11,37	0,47	NA
Kalimantan Tengah	11,33	–	–
Kalimantan Selatan	6,98	NA	–
Kalimantan Timur	6,24	0,02	NA
Kalimantan Utara	5,37	–	–
Sulawesi Utara	8,35	–	–
Sulawesi Tengah	25,37	–	NA
Sulawesi Selatan	18,26	NA	NA
Sulawesi Tenggara	21,68	–	–
Gorontalo	10,45	–	–
Sulawesi Barat	37,80	NA	–
Maluku	10,48	NA	–
Maluku Utara	17,86	NA	NA
Papua Barat	13,05	–	–
Papua Barat Daya	2,90	–	–
Papua	9,67	–	–
Papua Selatan	22,99	–	–
Papua Tengah	7,83	–	–
Papua Pegunungan	9,37	–	–
Indonesia	10,53	0,28	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.16
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025

Karakteristik	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	37,10	50,99	5,46	1,94
Perdesaan	40,93	30,75	9,66	2,84
Jenis Kelamin				
Laki-laki	42,17	42,56	6,65	1,25
Perempuan	36,00	44,54	7,17	2,94
Kelompok Umur				
0–4 tahun	34,00	49,68	5,89	2,35
0–17 tahun	34,24	47,12	7,41	1,63
18–59 tahun	37,85	43,06	6,91	3,13
60+ tahun	45,16	41,71	6,56	0,59
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	36,76	44,10	7,78	1,52
SD/Sederajat	43,00	35,90	8,28	1,46
SMP/Sederajat	39,67	39,95	7,33	3,26
SMA/Sederajat	37,27	47,65	5,58	3,33
Perguruan Tinggi	35,75	54,61	4,58	2,10
Status Ekonomi				
Kuintil 1	38,23	31,51	8,40	3,06
Kuintil 2	40,70	35,46	7,09	2,81
Kuintil 3	40,14	40,90	7,74	2,18
Kuintil 4	40,59	44,20	6,91	2,35
Kuintil 5	34,54	56,25	5,67	1,53
Indonesia	38,47	43,75	6,96	2,26

Lanjutan Tabel 2.16

Karakteristik	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,93	0,28	0,16
Perdesaan	18,80	0,27	0,18
Jenis Kelamin			
Laki-laki	9,46	0,39	0,17
Perempuan	11,26	0,20	0,16
Kelompok Umur			
0–4 tahun	9,11	–	NA
0–17 tahun	10,91	0,26	0,18
18–59 tahun	10,99	0,27	0,16
60+ tahun	8,85	0,32	0,18
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	11,76	0,23	0,21
SD/Sederajat	14,22	0,48	0,20
SMP/Sederajat	11,83	0,37	0,18
SMA/Sederajat	7,63	0,21	0,09
Perguruan Tinggi	4,53	NA	0,12
Status Ekonomi			
Kuintil 1	20,76	NA	0,30
Kuintil 2	15,72	0,25	0,11
Kuintil 3	11,51	0,15	NA
Kuintil 4	8,03	0,44	0,15
Kuintil 5	3,71	0,32	0,10
Indonesia	10,53	0,28	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.17
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi,
2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,72	97,64	98,74
Sumatera Utara	65,76	69,09	71,32
Sumatera Barat	72,36	77,40	79,08
R i a u	67,60	72,41	77,26
J a m b i	55,86	60,12	63,47
Sumatera Selatan	66,22	73,46	75,10
Bengkulu	69,81	73,93	77,93
Lampung	68,00	71,73	74,02
Kep. Bangka Belitung	77,43	81,70	85,20
Kep. Riau	80,93	86,16	87,61
DKI Jakarta	94,61	95,35	96,63
Jawa Barat	68,01	71,88	74,14
Jawa Tengah	70,73	72,69	74,77
DI Yogyakarta	85,90	88,46	91,02
Jawa Timur	70,54	71,90	76,06
Banten	72,46	76,37	78,58
B a l i	87,28	89,74	91,00
Nusa Tenggara Barat	64,50	68,71	72,60
Nusa Tenggara Timur	72,53	75,64	77,77
Kalimantan Barat	63,88	67,57	70,59
Kalimantan Tengah	61,16	68,61	70,72
Kalimantan Selatan	71,12	73,63	77,02
Kalimantan Timur	84,51	87,79	89,12
Kalimantan Utara	86,93	89,39	90,38
Sulawesi Utara	81,44	86,23	85,97
Sulawesi Tengah	76,60	78,99	82,13
Sulawesi Selatan	81,77	85,14	88,12
Sulawesi Tenggara	76,97	81,86	85,86
Gorontalo	85,09	88,61	88,64
Sulawesi Barat	89,14	89,83	89,58
Maluku	61,44	63,00	66,82
Maluku Utara	70,87	71,62	75,11
Papua Barat	73,84 ¹	73,46	77,85
Papua Barat Daya	–	83,94	87,19
Papua	81,11 ²	84,07	82,07
Papua Selatan	–	90,97	93,56
Papua Tengah	–	69,99	74,73
Papua Pegunungan	–	97,28	96,34
Indonesia	72,38	75,48	78,04

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.18
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	77,04	79,80	81,63
Perdesaan	65,91	69,33	72,77
Jenis Kelamin			
Laki-laki	71,92	74,99	77,46
Perempuan	72,84	75,98	78,63
Kelompok Umur			
0–4 tahun	52,88	57,70	61,68
0–17 tahun	64,30	67,69	70,54
18–59 tahun	75,62	78,64	80,92
60+ tahun	76,04	78,65	81,62
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	64,11	67,41	70,59
SD/Sederajat	71,36	73,95	76,30
SMP/Sederajat	72,99	76,05	78,32
SMA/Sederajat	78,72	81,71	83,63
Perguruan Tinggi	87,50	90,34	91,79
Status Ekonomi			
Kuintil 1	63,19	65,84	68,49
Kuintil 2	67,27	70,72	73,92
Kuintil 3	71,73	75,08	78,03
Kuintil 4	76,63	79,81	81,74
Kuintil 5	83,08	85,97	88,03
Indonesia	72,38	75,48	78,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.19
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi
dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,79	85,29	12,50
Sumatera Utara	67,91	41,36	26,55
Sumatera Barat	75,12	48,39	26,73
R i a u	70,48	45,08	25,41
J a m b i	61,04	32,34	28,70
Sumatera Selatan	69,38	50,17	19,21
Bengkulu	75,32	48,74	26,58
Lampung	65,84	47,37	18,47
Kep. Bangka Belitung	84,11	50,66	33,44
Kep. Riau	79,65	31,77	47,88
DKI Jakarta	91,64	62,14	29,50
Jawa Barat	70,26	41,62	28,64
Jawa Tengah	72,57	47,98	24,59
DI Yogyakarta	89,07	58,64	30,43
Jawa Timur	72,83	51,75	21,08
Banten	73,85	41,69	32,16
B a l i	89,12	51,47	37,65
Nusa Tenggara Barat	69,50	55,46	14,04
Nusa Tenggara Timur	74,62	58,55	16,07
Kalimantan Barat	65,50	39,38	26,12
Kalimantan Tengah	67,32	39,26	28,06
Kalimantan Selatan	74,01	44,16	29,85
Kalimantan Timur	82,77	39,19	43,59
Kalimantan Utara	88,40	55,21	33,19
Sulawesi Utara	83,16	50,47	32,69
Sulawesi Tengah	79,15	59,50	19,66
Sulawesi Selatan	86,05	61,13	24,92
Sulawesi Tenggara	81,43	59,00	22,42
Gorontalo	87,10	69,94	17,15
Sulawesi Barat	86,13	66,11	20,02
Maluku	63,31	39,69	23,62
Maluku Utara	57,69	36,97	20,72
Papua Barat	71,53	54,45	17,08
Papua Barat Daya	83,50	64,48	19,02
Papua	70,88	44,21	26,67
Papua Selatan	69,55	51,59	17,96
Papua Tengah	40,12	31,03	9,09
Papua Pegunungan	60,21	49,07	11,14
Indonesia	73,98	48,56	25,42



Lanjutan Tabel 2.19

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,28	0,13	0,70
Sumatera Utara	1,52	0,21	2,63
Sumatera Barat	8,42	0,17	1,19
R i a u	4,36	0,40	4,10
J a m b i	–	0,55	2,19
Sumatera Selatan	5,29	0,42	1,92
Bengkulu	0,89	NA	1,70
Lampung	12,42	0,21	2,22
Kep. Bangka Belitung	–	0,27	1,01
Kep. Riau	0,69	0,44	7,65
DKI Jakarta	NA	1,95	4,62
Jawa Barat	0,48	0,89	3,63
Jawa Tengah	0,58	0,24	1,84
DI Yogyakarta	0,20	0,78	1,81
Jawa Timur	1,72	0,39	2,27
Banten	2,70	1,00	4,30
B a l i	0,12	0,53	1,81
Nusa Tenggara Barat	10,31	0,16	1,11
Nusa Tenggara Timur	3,41	0,07	0,33
Kalimantan Barat	6,11	0,34	1,77
Kalimantan Tengah	1,21	0,21	3,13
Kalimantan Selatan	0,31	0,20	2,93
Kalimantan Timur	0,23	1,09	7,44
Kalimantan Utara	–	NA	1,98
Sulawesi Utara	0,32	0,16	2,49
Sulawesi Tengah	2,29	0,05	1,32
Sulawesi Selatan	0,52	0,28	1,69
Sulawesi Tenggara	2,88	0,05	1,73
Gorontalo	0,14	0,30	1,62
Sulawesi Barat	21,25	NA	0,33
Maluku	2,35	0,19	1,22
Maluku Utara	17,46	0,13	1,90
Papua Barat	6,01	NA	1,08
Papua Barat Daya	0,64	NA	3,34
Papua	10,28	0,20	2,30
Papua Selatan	22,94	NA	1,20
Papua Tengah	33,76	0,26	3,94
Papua Pegunungan	48,66	NA	NA
Indonesia	2,63	0,51	2,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.20
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik,
2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	77,35	44,64	32,71
Perdesaan	69,03	54,31	14,72
Jenis Kelamin			
Laki-laki	73,31	48,20	25,10
Perempuan	74,65	48,91	25,74
Kelompok Umur			
0–4 tahun	56,61	29,96	26,65
0–17 tahun	65,94	41,40	24,54
18–59 tahun	76,69	50,21	26,47
60+ tahun	79,65	57,22	22,43
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	66,28	46,05	20,23
SD/Sederajat	73,88	60,53	13,34
SMP/Sederajat	75,08	55,85	19,23
SMA/Sederajat	78,79	45,08	33,71
Perguruan Tinggi	84,99	22,01	62,98
Status Ekonomi			
Kuintil 1	66,22	58,94	7,28
Kuintil 2	71,04	57,69	13,35
Kuintil 3	74,08	53,26	20,82
Kuintil 4	77,13	45,24	31,89
Kuintil 5	81,43	27,65	53,77
Indonesia	73,98	48,56	25,42

Lanjutan Tabel 2.20

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	1,88	0,77	3,46
Perdesaan	3,73	0,13	1,43
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,64	0,52	2,72
Perempuan	2,62	0,50	2,56
Kelompok Umur			
0–4 tahun	2,82	0,71	3,11
0–17 tahun	2,88	0,57	2,80
18–59 tahun	2,61	0,52	2,95
60+ tahun	2,14	0,30	0,76
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	3,34	0,44	2,17
SD/Sederajat	2,41	0,16	1,05
SMP/Sederajat	2,52	0,22	1,98
SMA/Sederajat	2,32	0,48	3,87
Perguruan Tinggi	1,82	2,27	6,15
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2,48	0,04	0,62
Kuintil 2	2,57	0,08	1,39
Kuintil 3	2,95	0,11	2,36
Kuintil 4	2,97	0,21	3,14
Kuintil 5	2,17	2,09	5,69
Indonesia	2,63	0,51	2,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.21
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat
Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi,
2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65,50	70,27	70,89
Sumatera Utara	37,96	44,13	44,24
Sumatera Barat	51,38	50,72	56,31
R i a u	52,80	57,11	63,52
J a m b i	40,94	43,97	44,57
Sumatera Selatan	43,16	42,58	48,05
Bengkulu	39,84	45,75	47,55
Lampung	34,46	40,21	43,47
Kep. Bangka Belitung	45,90	52,07	55,84
Kep. Riau	74,64	70,07	80,25
DKI Jakarta	74,76	75,16	83,96
Jawa Barat	44,16	48,98	54,86
Jawa Tengah	45,33	46,62	53,33
DI Yogyakarta	56,84	60,69	66,14
Jawa Timur	38,13	41,46	44,95
Banten	55,09	58,98	58,56
B a l i	42,31	46,39	51,01
Nusa Tenggara Barat	33,52	41,06	41,39
Nusa Tenggara Timur	70,25	70,55	74,73
Kalimantan Barat	46,82	47,45	53,59
Kalimantan Tengah	45,54	50,34	52,17
Kalimantan Selatan	61,24	64,31	63,15
Kalimantan Timur	76,19	80,52	82,56
Kalimantan Utara	64,40	77,14	81,33
Sulawesi Utara	59,29	68,39	60,53
Sulawesi Tengah	69,23	65,37	74,22
Sulawesi Selatan	69,32	70,40	75,77
Sulawesi Tenggara	72,58	73,36	77,31
Gorontalo	54,95	56,38	56,83
Sulawesi Barat	76,26	71,06	76,61
Maluku	52,63	60,87	60,36
Maluku Utara	72,84	72,12	78,09
Papua Barat	71,34 ¹	71,43	69,78
Papua Barat Daya	–	81,43	75,53
Papua	72,59 ²	76,98	75,68
Papua Selatan	–	92,32	89,44
Papua Tengah	–	72,12	66,99
Papua Pegunungan	–	98,86	96,83
Indonesia	48,20	51,24	55,59

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.22
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	55,54	58,64	63,38
Perdesaan	37,11	39,61	43,11
Jenis Kelamin			
Laki-laki	46,79	50,31	54,07
Perempuan	49,36	52,00	56,84
Kelompok Umur			
0–4 tahun	35,67	37,74	43,29
0–17 tahun	39,72	42,81	47,69
18–59 tahun	51,87	55,18	58,69
60+ tahun	53,47	56,10	60,89
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	40,27	42,94	47,99
SD/Sederajat	48,28	50,34	54,93
SMP/Sederajat	51,35	55,16	58,57
SMA/Sederajat	59,18	62,97	65,64
Perguruan Tinggi	67,64	71,29	72,95
Status Ekonomi			
Kuintil 1	40,90	41,62	48,26
Kuintil 2	42,23	46,03	49,78
Kuintil 3	45,68	49,64	54,99
Kuintil 4	52,10	54,29	58,25
Kuintil 5	57,47	61,68	64,58
Indonesia	48,20	51,24	55,59

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.23

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	70,28	62,33	7,95
Sumatera Utara	41,75	25,25	16,49
Sumatera Barat	54,54	35,84	18,70
R i a u	61,09	32,66	28,43
J a m b i	42,84	19,36	23,48
Sumatera Selatan	43,91	30,16	13,75
Bengkulu	46,61	26,78	19,83
Lampung	38,87	28,29	10,58
Kep. Bangka Belitung	54,93	31,44	23,49
Kep. Riau	73,39	28,18	45,21
DKI Jakarta	79,97	54,00	25,97
Jawa Barat	51,89	29,18	22,71
Jawa Tengah	52,07	32,11	19,96
DI Yogyakarta	63,40	41,24	22,17
Jawa Timur	42,73	26,58	16,15
Banten	55,02	32,27	22,75
B a l i	50,56	30,21	20,35
Nusa Tenggara Barat	39,44	30,20	9,23
Nusa Tenggara Timur	71,34	57,00	14,34
Kalimantan Barat	51,57	32,85	18,72
Kalimantan Tengah	51,26	26,85	24,41
Kalimantan Selatan	61,40	36,78	24,62
Kalimantan Timur	77,63	38,01	39,62
Kalimantan Utara	80,18	52,59	27,59
Sulawesi Utara	59,19	36,99	22,20
Sulawesi Tengah	72,00	53,24	18,75
Sulawesi Selatan	73,75	50,81	22,94
Sulawesi Tenggara	73,47	53,37	20,10
Gorontalo	55,35	46,54	8,81
Sulawesi Barat	72,96	58,74	14,21
Maluku	55,54	31,55	23,99
Maluku Utara	61,36	39,11	22,25
Papua Barat	58,00	40,94	17,06
Papua Barat Daya	73,05	58,08	14,97
Papua	65,24	43,61	21,64
Papua Selatan	73,54	58,33	15,20
Papua Tengah	52,93	39,47	13,47
Papua Pegunungan	71,36	53,32	18,04
Indonesia	52,99	33,26	19,73



Lanjutan Tabel 2.23

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,86	NA	0,25
Sumatera Utara	1,01	0,15	1,42
Sumatera Barat	0,62	0,24	0,99
R i a u	1,56	0,40	0,59
J a m b i	–	NA	0,80
Sumatera Selatan	2,43	NA	0,80
Bengkulu	NA	–	0,89
Lampung	3,89	NA	1,02
Kep. Bangka Belitung	–	0,48	0,52
Kep. Riau	NA	NA	6,82
DKI Jakarta	NA	1,56	2,49
Jawa Barat	0,18	0,80	2,08
Jawa Tengah	0,31	0,20	0,79
DI Yogyakarta	NA	NA	1,13
Jawa Timur	0,77	0,15	1,44
Banten	0,44	1,21	2,42
B a l i	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	1,71	NA	0,45
Nusa Tenggara Timur	3,29	NA	NA
Kalimantan Barat	1,09	NA	0,91
Kalimantan Tengah	NA	NA	0,78
Kalimantan Selatan	NA	NA	1,15
Kalimantan Timur	NA	1,21	3,84
Kalimantan Utara	–	NA	1,14
Sulawesi Utara	0,19	–	1,17
Sulawesi Tengah	2,24	NA	0,81
Sulawesi Selatan	0,39	NA	1,69
Sulawesi Tenggara	2,75	–	1,41
Gorontalo	NA	–	NA
Sulawesi Barat	10,61	NA	NA
Maluku	4,35	–	NA
Maluku Utara	12,95	–	NA
Papua Barat	11,91	NA	NA
Papua Barat Daya	2,09	–	NA
Papua	9,59	NA	1,16
Papua Selatan	15,63	–	NA
Papua Tengah	NA	–	11,44
Papua Pegunungan	29,35	–	NA
Indonesia	0,89	0,46	1,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.24

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	60,20	34,27	25,93
Perdesaan	41,44	31,65	9,79
Jenis Kelamin			
Laki-laki	51,33	31,35	19,98
Perempuan	54,36	34,84	19,51
Kelompok Umur			
0–4 tahun	39,69	21,20	18,49
0–17 tahun	44,35	25,42	18,93
18–59 tahun	56,00	35,77	20,23
60+ tahun	59,53	39,65	19,88
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	45,26	30,04	15,22
SD/Sederajat	53,84	42,12	11,73
SMP/Sederajat	56,35	39,67	16,68
SMA/Sederajat	62,53	31,97	30,56
Perguruan Tinggi	66,73	14,27	52,46
Status Ekonomi			
Kuintil 1	46,75	40,68	6,08
Kuintil 2	48,33	38,22	10,11
Kuintil 3	53,10	37,28	15,82
Kuintil 4	55,81	31,91	23,91
Kuintil 5	59,32	20,66	38,66
Indonesia	52,99	33,26	19,73



Lanjutan Tabel 2.24

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,68	0,67	1,95
Perdesaan	1,21	0,11	0,61
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,86	0,48	1,57
Perempuan	0,90	0,44	1,32
Kelompok Umur			
0–4 tahun	1,31	0,81	1,63
0–17 tahun	1,20	0,63	1,66
18–59 tahun	0,76	0,45	1,69
60+ tahun	0,67	0,22	0,59
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	1,18	0,51	1,23
SD/Sederajat	0,62	0,07	0,55
SMP/Sederajat	0,99	0,19	1,18
SMA/Sederajat	0,63	0,38	2,28
Perguruan Tinggi	0,38	2,23	3,89
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1,27	0,06	0,31
Kuintil 2	0,85	0,06	0,64
Kuintil 3	1,00	0,04	1,03
Kuintil 4	0,82	0,20	1,59
Kuintil 5	0,56	1,74	3,24
Indonesia	0,89	0,46	1,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.25
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,89	97,94	97,29
Sumatera Utara	74,44	78,25	83,50
Sumatera Barat	80,18	84,22	87,74
R i a u	68,64	81,16	84,55
J a m b i	65,15	74,67	72,79
Sumatera Selatan	73,17	75,36	80,60
Bengkulu	82,16	89,04	90,49
Lampung	66,85	78,78	81,29
Kep. Bangka Belitung	87,14	85,80	87,30
Kep. Riau	86,56	95,10	93,99
DKI Jakarta	91,93	94,28	93,98
Jawa Barat	74,46	81,06	83,54
Jawa Tengah	73,26	80,11	82,64
DI Yogyakarta	87,30	90,91	89,67
Jawa Timur	71,63	79,12	80,71
Banten	76,24	82,83	83,43
B a l i	83,58	91,70	91,29
Nusa Tenggara Barat	65,58	71,89	77,74
Nusa Tenggara Timur	85,22	91,33	90,09
Kalimantan Barat	72,56	73,62	78,98
Kalimantan Tengah	75,78	75,38	86,12
Kalimantan Selatan	79,40	86,78	89,15
Kalimantan Timur	88,81	88,17	93,64
Kalimantan Utara	87,77	91,64	94,23
Sulawesi Utara	90,62	91,91	93,40
Sulawesi Tengah	89,73	91,24	91,63
Sulawesi Selatan	87,82	91,85	94,41
Sulawesi Tenggara	86,72	90,56	91,80
Gorontalo	94,07	95,62	97,05
Sulawesi Barat	89,66	89,55	91,27
Maluku	79,99	86,52	86,05
Maluku Utara	73,17	83,81	88,25
Papua Barat	78,69 ¹	83,32	89,13
Papua Barat Daya	–	89,68	83,42
Papua	75,48 ²	92,78	87,61
Papua Selatan	–	89,44	90,08
Papua Tengah	–	72,10	54,58
Papua Pegunungan	–	88,05	100,00
Indonesia	77,02	82,79	84,86

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.26
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	81,16	86,58	88,18
Perdesaan	70,02	75,91	78,89
Jenis Kelamin			
Laki-laki	75,96	82,31	83,74
Perempuan	77,72	83,10	85,60
Kelompok Umur			
0–4 tahun	66,19	74,81	77,92
0–17 tahun	70,54	76,93	79,79
18–59 tahun	79,01	84,74	86,23
60+ tahun	78,60	84,01	87,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	70,65	76,88	80,66
SD/Sederajat	76,03	81,66	83,62
SMP/Sederajat	78,16	84,83	85,52
SMA/Sederajat	80,62	87,27	88,36
Perguruan Tinggi	87,03	89,03	90,64
Status Ekonomi			
Kuintil 1	72,84	77,23	81,85
Kuintil 2	75,56	80,50	84,77
Kuintil 3	76,01	82,91	84,77
Kuintil 4	77,37	84,13	85,15
Kuintil 5	80,25	85,84	86,25
Indonesia	77,02	82,79	84,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.27
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan
dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan
yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,28	80,88	15,40
Sumatera Utara	80,03	42,48	37,55
Sumatera Barat	86,41	50,07	36,34
R i a u	80,83	47,51	33,32
J a m b i	68,73	33,85	34,89
Sumatera Selatan	75,96	48,81	27,15
Bengkulu	87,45	55,18	32,27
Lampung	76,01	50,15	25,86
Kep. Bangka Belitung	84,61	45,14	39,47
Kep. Riau	88,66	25,95	62,70
DKI Jakarta	84,62	55,98	28,65
Jawa Barat	77,88	42,59	35,30
Jawa Tengah	80,04	47,89	32,16
DI Yogyakarta	85,70	54,33	31,38
Jawa Timur	76,66	46,65	30,01
Banten	76,39	39,97	36,42
B a l i	89,26	44,78	44,48
Nusa Tenggara Barat	75,41	60,69	14,71
Nusa Tenggara Timur	86,54	63,09	23,46
Kalimantan Barat	75,70	47,14	28,56
Kalimantan Tengah	81,68	39,61	42,08
Kalimantan Selatan	85,18	47,24	37,94
Kalimantan Timur	85,17	37,93	47,23
Kalimantan Utara	93,61	60,93	32,68
Sulawesi Utara	89,12	51,59	37,53
Sulawesi Tengah	88,39	61,95	26,44
Sulawesi Selatan	91,87	60,66	31,21
Sulawesi Tenggara	89,06	61,30	27,75
Gorontalo	92,82	72,84	19,98
Sulawesi Barat	88,59	61,84	26,75
Maluku	84,43	40,52	43,91
Maluku Utara	68,63	41,88	26,75
Papua Barat	84,02	55,55	28,46
Papua Barat Daya	82,02	56,39	25,63
Papua	82,26	48,17	34,09
Papua Selatan	77,26	49,06	28,20
Papua Tengah	39,14	29,51	9,63
Papua Pegunungan	82,69	28,07	54,62
Indonesia	80,56	48,44	32,12

Lanjutan Tabel 2.27

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,60	NA	0,64
Sumatera Utara	NA	0,40	3,04
Sumatera Barat	0,85	NA	0,53
R i a u	0,62	0,71	2,59
J a m b i	–	2,47	1,59
Sumatera Selatan	1,99	0,76	2,26
Bengkulu	NA	NA	2,36
Lampung	2,83	0,32	2,55
Kep. Bangka Belitung	–	1,75	NA
Kep. Riau	NA	NA	4,18
DKI Jakarta	–	2,90	6,47
Jawa Barat	0,71	1,80	3,33
Jawa Tengah	0,24	0,51	1,85
DI Yogyakarta	NA	2,72	1,20
Jawa Timur	1,10	0,32	2,76
Banten	NA	NA	3,98
B a l i	NA	NA	1,32
Nusa Tenggara Barat	1,38	NA	NA
Nusa Tenggara Timur	3,39	NA	0,44
Kalimantan Barat	NA	0,84	2,25
Kalimantan Tengah	NA	NA	3,00
Kalimantan Selatan	NA	NA	3,71
Kalimantan Timur	NA	1,98	6,78
Kalimantan Utara	–	NA	NA
Sulawesi Utara	NA	NA	3,75
Sulawesi Tengah	2,38	–	1,18
Sulawesi Selatan	0,80	NA	1,34
Sulawesi Tenggara	1,19	NA	1,54
Gorontalo	NA	NA	4,15
Sulawesi Barat	8,19	NA	NA
Maluku	0,78	NA	NA
Maluku Utara	16,31	–	3,99
Papua Barat	4,31	NA	NA
Papua Barat Daya	NA	–	NA
Papua	4,12	NA	NA
Papua Selatan	10,50	–	NA
Papua Tengah	NA	–	11,60
Papua Pegunungan	29,36	–	–
Indonesia	0,90	0,94	2,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.28
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan
dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan
yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	82,90	44,40	38,50
Perdesaan	76,36	55,69	20,67
Jenis Kelamin			
Laki-laki	79,29	47,57	31,72
Perempuan	81,41	49,02	32,39
Kelompok Umur			
0–4 tahun	71,40	34,26	37,14
0–17 tahun	73,67	38,97	34,71
18–59 tahun	81,75	49,98	31,77
60+ tahun	85,35	55,27	30,08
Tingkat Pendidikan			
Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	76,16	48,35	27,80
SD/Sederajat	81,60	62,94	18,66
SMP/Sederajat	82,48	56,05	26,43
SMA/Sederajat	83,32	43,34	39,99
Perguruan Tinggi	82,40	21,02	61,38
Status Ekonomi			
Kuintil 1	79,89	67,76	12,13
Kuintil 2	82,83	63,41	19,43
Kuintil 3	81,15	56,60	24,55
Kuintil 4	81,91	46,14	35,76
Kuintil 5	78,16	26,42	51,74
Indonesia	80,56	48,44	32,12

Lanjutan Tabel 2.28

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,76	1,36	3,33
Perdesaan	1,15	0,18	1,44
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,86	0,91	2,90
Perempuan	0,93	0,96	2,50
Kelompok Umur			
0–4 tahun	1,14	2,00	3,71
0–17 tahun	1,06	1,69	3,68
18–59 tahun	0,89	0,86	2,94
60+ tahun	0,74	0,28	0,69
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,99	1,17	2,60
SD/Sederajat	0,80	0,22	1,16
SMP/Sederajat	0,97	0,26	2,01
SMA/Sederajat	1,04	0,62	3,53
Perguruan Tinggi	0,39	3,38	4,67
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1,49	0,03	0,71
Kuintil 2	0,68	0,09	1,26
Kuintil 3	1,14	0,12	2,49
Kuintil 4	0,76	0,23	2,40
Kuintil 5	0,68	2,99	4,75
Indonesia	0,90	0,94	2,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.29

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (Transportas, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,86	0,89	1,11
Sumatera Utara	2,60	2,19	2,00
Sumatera Barat	0,91	NA	6,66
R i a u	1,34	1,88	8,65
J a m b i	6,85	NA	10,38
Sumatera Selatan	13,55	1,11	3,86
Bengkulu	2,05	0,38	5,39
Lampung	3,04	0,51	6,89
Kep. Bangka Belitung	NA	–	4,45
Kep. Riau	3,03	NA	9,77
DKI Jakarta	5,45	NA	NA
Jawa Barat	3,96	1,12	8,01
Jawa Tengah	3,78	0,58	3,77
DI Yogyakarta	NA	NA	1,47
Jawa Timur	7,97	1,01	3,32
Banten	3,48	1,21	3,48
B a l i	0,94	NA	1,43
Nusa Tenggara Barat	4,53	NA	2,70
Nusa Tenggara Timur	3,68	2,74	7,79
Kalimantan Barat	3,83	NA	3,07
Kalimantan Tengah	7,27	NA	9,60
Kalimantan Selatan	6,58	NA	9,23
Kalimantan Timur	NA	–	NA
Kalimantan Utara	NA	–	18,72
Sulawesi Utara	1,78	NA	2,73
Sulawesi Tengah	NA	NA	5,22
Sulawesi Selatan	NA	NA	3,43
Sulawesi Tenggara	NA	NA	2,27
Gorontalo	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	NA	NA	1,45
Maluku	NA	–	11,17
Maluku Utara	NA	NA	NA
Papua Barat	NA	NA	NA
Papua Barat Daya	NA	NA	–
Papua	6,11	NA	NA
Papua Selatan	–	–	NA
Papua Tengah	0,52	–	NA
Papua Pegunungan	88,55	10,72	–
Indonesia	4,66	0,97	4,61



Lanjutan Tabel 2.29

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	NA	4,68	2,11
Sumatera Utara	1,56	3,50	12,15
Sumatera Barat	1,70	6,73	9,29
R i a u	NA	9,94	12,29
J a m b i	NA	9,45	15,72
Sumatera Selatan	NA	3,43	19,89
Bengkulu	NA	7,50	12,02
Lampung	NA	5,80	17,25
Kep. Bangka Belitung	NA	3,12	8,71
Kep. Riau	NA	NA	3,92
DKI Jakarta	11,96	7,11	NA
Jawa Barat	3,66	6,94	11,35
Jawa Tengah	0,73	4,57	10,12
DI Yogyakarta	5,74	8,69	5,97
Jawa Timur	1,32	5,99	6,56
Banten	5,81	5,28	8,54
B a l i	NA	4,54	14,13
Nusa Tenggara Barat	0,66	2,36	7,02
Nusa Tenggara Timur	NA	13,13	5,86
Kalimantan Barat	1,28	9,22	9,37
Kalimantan Tengah	NA	9,16	5,45
Kalimantan Selatan	NA	8,23	1,89
Kalimantan Timur	23,38	5,13	NA
Kalimantan Utara	NA	12,44	NA
Sulawesi Utara	NA	3,65	2,99
Sulawesi Tengah	1,59	3,59	3,31
Sulawesi Selatan	1,74	1,50	6,00
Sulawesi Tenggara	NA	4,21	NA
Gorontalo	NA	5,07	3,96
Sulawesi Barat	NA	NA	–
Maluku	–	NA	NA
Maluku Utara	NA	NA	NA
Papua Barat	–	0,94	NA
Papua Barat Daya	–	NA	NA
Papua	NA	NA	6,09
Papua Selatan	NA	–	–
Papua Tengah	–	NA	40,30
Papua Pegunungan	0,70	–	–
Indonesia	2,29	5,72	9,54



Lanjutan Tabel 2.29

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,41	47,01	33,43
Sumatera Utara	6,24	42,23	31,12
Sumatera Barat	18,00	33,07	26,57
R i a u	10,19	38,82	21,20
J a m b i	17,90	25,86	14,87
Sumatera Selatan	10,20	24,22	23,94
Bengkulu	20,77	17,07	37,42
Lampung	11,75	26,73	29,52
Kep. Bangka Belitung	10,90	41,82	27,88
Kep. Riau	NA	38,11	31,13
DKI Jakarta	NA	46,59	21,64
Jawa Barat	8,22	35,39	25,96
Jawa Tengah	10,17	34,88	33,40
DI Yogyakarta	10,63	37,88	30,39
Jawa Timur	10,82	34,80	30,67
Banten	5,58	54,46	18,08
B a l i	7,45	48,82	26,42
Nusa Tenggara Barat	26,57	17,34	41,38
Nusa Tenggara Timur	7,56	18,63	43,04
Kalimantan Barat	15,65	41,94	17,70
Kalimantan Tengah	19,40	29,29	20,93
Kalimantan Selatan	11,18	33,77	31,30
Kalimantan Timur	7,15	39,30	14,75
Kalimantan Utara	NA	32,64	25,32
Sulawesi Utara	28,59	30,34	29,60
Sulawesi Tengah	23,32	34,67	27,07
Sulawesi Selatan	2,95	50,39	32,50
Sulawesi Tenggara	10,19	26,29	42,42
Gorontalo	15,54	18,19	52,07
Sulawesi Barat	4,25	46,87	42,22
Maluku	7,35	32,16	35,97
Maluku Utara	11,79	17,97	45,03
Papua Barat	NA	17,94	50,65
Papua Barat Daya	5,91	32,64	35,36
Papua	11,49	NA	52,38
Papua Selatan	NA	NA	44,70
Papua Tengah	NA	26,44	NA
Papua Pegunungan	—	—	0,73
Indonesia	10,54	35,59	29,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.30
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (Transportas, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,00	0,78	4,71
Perdesaan	5,39	1,18	4,50
Jenis Kelamin			
Laki-laki	4,74	0,93	4,69
Perempuan	4,59	1,00	4,54
Kelompok Umur			
0–4 tahun	3,98	0,64	3,45
0–17 tahun	3,35	0,52	4,92
18–59 tahun	4,58	0,88	5,20
60+ tahun	4,81	1,08	4,06
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	5,40	1,04	4,21
SD/Sederajat	4,91	1,01	4,91
SMP/Sederajat	4,03	0,90	4,80
SMA/Sederajat	3,85	0,79	5,85
Perguruan Tinggi	1,93	0,93	2,50
Status Ekonomi			
Kuintil 1	7,36	1,31	5,33
Kuintil 2	5,26	1,50	5,51
Kuintil 3	4,63	1,27	4,86
Kuintil 4	3,83	0,56	3,73
Kuintil 5	2,95	0,35	3,85
Indonesia	4,66	0,97	4,61



Lanjutan Tabel 2.30

Karakteristik	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	3,96	5,86	7,01
Perdesaan	0,43	5,56	12,34
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,35	5,74	9,73
Perempuan	2,23	5,70	9,37
Kelompok Umur			
0–4 tahun	3,65	6,27	9,52
0–17 tahun	2,40	3,22	10,41
18–59 tahun	2,40	6,18	9,09
60+ tahun	2,18	5,44	9,89
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,08	5,37	10,31
SD/Sederajat	0,54	5,90	10,44
SMP/Sederajat	1,17	6,19	9,87
SMA/Sederajat	2,87	5,51	7,78
Perguruan Tinggi	11,55	7,01	4,41
Status Ekonomi			
Kuintil 1	0,35	6,03	10,21
Kuintil 2	0,39	5,35	10,61
Kuintil 3	0,35	4,52	10,39
Kuintil 4	1,40	4,63	9,61
Kuintil 5	8,00	7,93	7,24
Indonesia	2,29	5,72	9,54



Lanjutan Tabel 2.30

Karakteristik	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,07	42,04	27,78
Perdesaan	14,39	28,44	30,87
Jenis Kelamin			
Laki-laki	10,02	36,61	28,41
Perempuan	10,99	34,70	29,96
Kelompok Umur			
0–4 tahun	8,93	38,86	27,59
0–17 tahun	12,06	39,51	25,48
18–59 tahun	10,87	34,70	29,44
60+ tahun	10,16	36,16	29,28
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	10,40	34,99	29,41
SD/Sederajat	11,96	33,60	30,02
SMP/Sederajat	12,09	35,96	27,64
SMA/Sederajat	8,90	37,78	29,15
Perguruan Tinggi	6,91	40,92	28,95
Status Ekonomi			
Kuintil 1	11,44	28,17	32,19
Kuintil 2	11,80	33,62	29,04
Kuintil 3	10,60	35,55	30,78
Kuintil 4	11,14	38,01	29,75
Kuintil 5	8,11	40,57	25,40
Indonesia	10,54	35,59	29,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.31
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap,
2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (Transportas, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	NA	–	–
Sumatera Utara	NA	NA	7,46
Sumatera Barat	NA	NA	19,39
R i a u	NA	NA	10,66
J a m b i	9,21	NA	18,26
Sumatera Selatan	16,13	NA	6,86
Bengkulu	NA	–	12,58
Lampung	5,15	NA	22,35
Kep. Bangka Belitung	NA	–	NA
Kep. Riau	1,43	–	NA
DKI Jakarta	NA	–	NA
Jawa Barat	4,96	NA	10,30
Jawa Tengah	4,95	–	15,60
DI Yogyakarta	–	–	NA
Jawa Timur	12,69	NA	14,41
Banten	NA	NA	4,91
B a l i	NA	–	NA
Nusa Tenggara Barat	NA	–	24,13
Nusa Tenggara Timur	1,66	NA	36,29
Kalimantan Barat	NA	–	8,08
Kalimantan Tengah	NA	–	NA
Kalimantan Selatan	NA	–	NA
Kalimantan Timur	–	–	NA
Kalimantan Utara	11,64	–	6,86
Sulawesi Utara	NA	–	23,26
Sulawesi Tengah	NA	0,19	34,66
Sulawesi Selatan	NA	–	21,87
Sulawesi Tenggara	NA	–	17,14
Gorontalo	–	–	34,08
Sulawesi Barat	21,66	–	17,03
Maluku	NA	–	12,37
Maluku Utara	–	–	36,29
Papua Barat	13,95	27,82	NA
Papua Barat Daya	NA	–	NA
Papua	NA	–	NA
Papua Selatan	NA	–	NA
Papua Tengah	–	–	NA
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	6,04	0,39	12,31

Lanjutan Tabel 2.31

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,10	21,44	NA
Sumatera Utara	NA	9,28	11,20
Sumatera Barat	8,81	21,94	11,87
R i a u	NA	17,09	7,77
J a m b i	14,21	15,97	NA
Sumatera Selatan	10,11	6,26	16,32
Bengkulu	2,87	NA	NA
Lampung	5,95	10,27	9,68
Kep. Bangka Belitung	17,25	30,86	NA
Kep. Riau	NA	NA	NA
DKI Jakarta	30,41	NA	NA
Jawa Barat	13,79	10,31	7,87
Jawa Tengah	6,19	14,26	3,31
DI Yogyakarta	26,57	28,79	NA
Jawa Timur	5,40	17,24	4,50
Banten	24,94	12,01	NA
B a l i	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	NA	11,42	NA
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA
Kalimantan Barat	17,76	16,69	NA
Kalimantan Tengah	NA	15,07	NA
Kalimantan Selatan	19,57	NA	NA
Kalimantan Timur	42,19	11,89	–
Kalimantan Utara	0,84	–	–
Sulawesi Utara	33,12	NA	1,82
Sulawesi Tengah	–	36,15	–
Sulawesi Selatan	NA	17,64	NA
Sulawesi Tenggara	NA	18,11	NA
Gorontalo	43,09	NA	–
Sulawesi Barat	–	NA	–
Maluku	–	NA	NA
Maluku Utara	–	18,91	–
Papua Barat	–	54,74	–
Papua Barat Daya	NA	NA	NA
Papua	–	0,79	–
Papua Selatan	NA	–	–
Papua Tengah	–	NA	NA
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	11,65	12,91	5,60



Lanjutan Tabel 2.31

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3,18	33,09	35,95
Sumatera Utara	5,18	36,24	24,38
Sumatera Barat	NA	13,17	18,14
R i a u	6,23	17,58	36,49
J a m b i	17,78	11,94	7,79
Sumatera Selatan	7,89	18,78	23,44
Bengkulu	NA	27,21	43,52
Lampung	16,10	14,12	20,08
Kep. Bangka Belitung	NA	20,31	NA
Kep. Riau	NA	NA	53,53
DKI Jakarta	NA	34,52	23,81
Jawa Barat	8,50	24,22	25,03
Jawa Tengah	7,49	29,07	24,14
DI Yogyakarta	NA	18,07	27,50
Jawa Timur	5,21	33,99	17,41
Banten	NA	41,52	8,96
B a l i	–	41,72	18,98
Nusa Tenggara Barat	18,45	16,48	25,00
Nusa Tenggara Timur	NA	10,41	25,55
Kalimantan Barat	NA	37,26	18,99
Kalimantan Tengah	NA	34,56	16,78
Kalimantan Selatan	NA	22,81	37,35
Kalimantan Timur	NA	11,69	19,31
Kalimantan Utara	–	76,33	4,32
Sulawesi Utara	NA	6,14	11,35
Sulawesi Tengah	NA	8,92	–
Sulawesi Selatan	NA	27,78	15,23
Sulawesi Tenggara	NA	24,85	26,22
Gorontalo	NA	–	18,11
Sulawesi Barat	–	23,20	NA
Maluku	NA	52,10	27,73
Maluku Utara	–	6,20	28,14
Papua Barat	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	74,47	NA
Papua	14,35	NA	40,10
Papua Selatan	–	9,15	NA
Papua Tengah	26,95	43,26	NA
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	7,40	27,14	22,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.32
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda
untuk Rawat Inap, 2025

Karakteristik	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (Transportas, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	3,56	NA	9,12
Perdesaan	9,72	0,52	17,02
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,19	NA	14,31
Perempuan	5,20	0,31	10,83
Kelompok Umur			
0–4 tahun	3,47	0,36	9,92
0–17 tahun	NA	–	12,95
18–59 tahun	5,77	0,30	13,03
60+ tahun	6,54	NA	11,20
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	6,94	NA	10,80
SD/Sederajat	8,04	NA	19,88
SMP/Sederajat	7,25	–	11,85
SMA/Sederajat	4,82	NA	13,97
Perguruan Tinggi	1,72	NA	2,82
Status Ekonomi			
Kuintil 1	15,08	NA	26,01
Kuintil 2	7,57	NA	13,33
Kuintil 3	6,03	NA	13,36
Kuintil 4	7,94	NA	14,64
Kuintil 5	2,55	NA	7,27
Indonesia	6,04	0,39	12,31



Lanjutan Tabel 2.32

Karakteristik	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	17,79	12,90	4,36
Perdesaan	2,58	12,92	7,43
Jenis Kelamin			
Laki-laki	11,00	12,13	4,02
Perempuan	12,13	13,49	6,76
Kelompok Umur			
0–4 tahun	16,02	12,61	3,02
0–17 tahun	10,65	18,86	NA
18–59 tahun	11,99	13,31	6,31
60+ tahun	11,24	11,83	4,37
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	11,90	10,78	4,86
SD/Sederajat	3,41	15,55	4,76
SMP/Sederajat	6,40	14,61	4,40
SMA/Sederajat	10,30	12,64	7,94
Perguruan Tinggi	30,62	12,46	6,22
Status Ekonomi			
Kuintil 1	NA	12,27	6,67
Kuintil 2	1,32	13,99	7,93
Kuintil 3	2,98	14,76	7,41
Kuintil 4	5,96	11,22	7,88
Kuintil 5	23,23	12,86	2,95
Indonesia	11,65	12,91	5,60



Lanjutan Tabel 2.32

Karakteristik	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,38	29,94	22,88
Perdesaan	11,85	22,99	21,27
Jenis Kelamin			
Laki-laki	6,72	26,45	21,80
Perempuan	7,89	27,64	22,55
Kelompok Umur			
0–4 tahun	6,38	32,24	21,92
0–17 tahun	NA	31,36	11,36
18–59 tahun	6,87	23,47	24,09
60+ tahun	8,62	32,12	20,43
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	8,92	31,71	20,22
SD/Sederajat	8,08	25,50	20,02
SMP/Sederajat	8,53	22,52	26,83
SMA/Sederajat	4,74	27,03	24,75
Perguruan Tinggi	5,80	24,39	21,11
Status Ekonomi			
Kuintil 1	16,06	18,11	17,92
Kuintil 2	6,09	26,60	29,60
Kuintil 3	9,50	27,01	27,59
Kuintil 4	5,57	28,34	24,24
Kuintil 5	5,79	28,95	18,22
Indonesia	7,40	27,14	22,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.33
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan
Rokok Elektrik/Vape Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,18	1,70	1,11
Sumatera Utara	1,44	1,38	0,74
Sumatera Barat	0,91	0,28	0,81
R i a u	1,56	1,17	1,23
J a m b i	1,47	0,79	1,00
Sumatera Selatan	1,53	1,80	1,38
Bengkulu	0,50	1,09	0,91
Lampung	1,19	0,88	0,67
Kep. Bangka Belitung	0,65	0,85	0,58
Kep. Riau	2,02	2,16	1,30
DKI Jakarta	2,18	2,21	1,47
Jawa Barat	1,90	1,51	1,42
Jawa Tengah	1,26	1,09	1,22
DI Yogyakarta	2,08	1,78	1,98
Jawa Timur	1,62	1,68	1,24
Banten	1,39	1,64	1,01
B a l i	3,10	2,77	2,24
Nusa Tenggara Barat	1,73	1,02	1,21
Nusa Tenggara Timur	1,19	1,01	1,01
Kalimantan Barat	0,83	1,36	1,06
Kalimantan Tengah	1,40	1,13	0,91
Kalimantan Selatan	1,46	1,41	1,18
Kalimantan Timur	2,06	1,68	2,18
Kalimantan Utara	1,39	2,12	0,77
Sulawesi Utara	1,55	1,64	1,29
Sulawesi Tengah	1,34	1,64	1,19
Sulawesi Selatan	1,10	0,80	1,15
Sulawesi Tenggara	1,05	0,55	0,21
Gorontalo	1,05	1,03	0,89
Sulawesi Barat	1,37	1,25	1,17
Maluku	1,42	1,13	0,91
Maluku Utara	1,10	1,56	1,18
Papua Barat	1,34 ¹	1,86	1,53
Papua Barat Daya	–	1,26	1,51
Papua	1,46 ²	1,56	1,56
Papua Selatan	–	1,28	1,17
Papua Tengah	–	1,10	1,01
Papua Pegunungan	–	0,45	0,92
Indonesia	1,55	1,42	1,22

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.34
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Menggunakan
Rokok Elektrik/Vape Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	1,72	1,61	1,38
Perdesaan	1,31	1,14	0,98
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,97	2,72	2,30
Perempuan	0,14	0,13	0,14
Kelompok Umur			
15–17 tahun	0,44	0,34	0,43
18–59 tahun	1,76	1,63	1,43
60+ tahun	0,95	0,83	0,54
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	1,00	0,83	0,64
SD/Sederajat	1,22	1,13	0,91
SMP/Sederajat	1,46	1,29	1,06
SMA/Sederajat	2,04	1,87	1,59
Perguruan Tinggi	1,76	1,70	1,73
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1,29	0,94	0,94
Kuintil 2	1,32	1,20	1,02
Kuintil 3	1,59	1,45	0,98
Kuintil 4	1,57	1,50	1,29
Kuintil 5	1,92	1,93	1,78
Indonesia	1,55	1,42	1,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023–2025



Tabel 2.35
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau
Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	28,66	28,61	28,19
Sumatera Utara	26,28	26,69	26,41
Sumatera Barat	30,42	31,45	30,48
Riau	27,76	28,02	28,88
Jambi	28,67	29,76	30,29
Sumatera Selatan	30,91	31,01	31,02
Bengkulu	31,86	32,96	32,03
Lampung	34,08	33,84	34,25
Kep. Bangka Belitung	27,33	27,97	27,71
Kep. Riau	25,49	25,46	24,67
DKI Jakarta	22,60	22,56	25,17
Jawa Barat	32,78	32,98	32,07
Jawa Tengah	28,55	29,13	28,48
DI Yogyakarta	24,82	25,18	23,29
Jawa Timur	28,83	28,72	28,11
Banten	29,34	31,31	31,19
Bali	18,90	19,22	19,02
Nusa Tenggara Barat	32,79	32,40	32,32
Nusa Tenggara Timur	26,64	27,51	28,55
Kalimantan Barat	26,96	28,06	27,80
Kalimantan Tengah	27,24	28,02	27,13
Kalimantan Selatan	22,24	23,07	23,21
Kalimantan Timur	22,97	23,99	22,42
Kalimantan Utara	25,36	25,93	25,83
Sulawesi Utara	26,96	26,93	25,81
Sulawesi Tengah	28,28	28,98	28,48
Sulawesi Selatan	24,24	24,66	24,05
Sulawesi Tenggara	24,66	24,80	25,42
Gorontalo	30,69	31,61	30,72
Sulawesi Barat	25,30	26,99	26,31
Maluku	28,04	29,43	27,59
Maluku Utara	28,82	29,72	29,08
Papua Barat	25,30	25,90	27,76
Papua Barat Daya	22,30	25,00	24,94
Papua	28,62	22,11	22,02
Papua Selatan	28,66	32,28	31,62
Papua Tengah	26,28	19,48	23,98
Papua Pegunungan	30,42	19,54	26,52
Indonesia	27,76	28,99	28,68

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.36
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau
Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	26,87	27,25	26,86
Perdesaan	31,09	31,51	31,39
Jenis Kelamin			
Laki-laki	56,36	57,11	56,22
Perempuan	1,06	1,01	1,30
Kelompok Umur			
15–17 tahun	5,62	5,87	6,43
18–59 tahun	31,53	32,02	31,73
60+ tahun	23,91	24,01	23,31
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	27,35	26,41	26,41
SD/Sederajat	31,59	32,06	32,07
SMP/Sederajat	27,78	27,96	28,17
SMA/Sederajat	30,35	31,90	31,49
Perguruan Tinggi	19,66	17,97	16,71
Status Ekonomi			
Kuintil 1	27,47	27,86	28,22
Kuintil 2	29,74	30,18	30,10
Kuintil 3	30,13	30,35	30,35
Kuintil 4	30,02	30,70	30,02
Kuintil 5	25,86	26,03	24,98
Indonesia	27,76	28,99	28,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023–2025



Tabel 2.37
Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Pernah Merokok
dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47,60	35,59	55,84
Sumatera Utara	40,83	41,16	66,29
Sumatera Barat	65,23	87,26	74,90
R i a u	34,54	54,27	48,49
J a m b i	34,71	58,13	63,41
Sumatera Selatan	40,43	37,24	43,62
Bengkulu	63,22	57,65	65,63
Lampung	58,67	65,86	76,32
Kep. Bangka Belitung	50,70	50,57	75,01
Kep. Riau	48,88	39,22	50,07
DKI Jakarta	30,49	27,83	44,25
Jawa Barat	35,49	43,18	46,97
Jawa Tengah	54,01	55,27	54,62
DI Yogyakarta	49,81	60,06	57,27
Jawa Timur	39,44	34,66	56,07
Banten	40,40	34,18	43,78
B a l i	30,27	32,91	43,23
Nusa Tenggara Barat	36,04	58,76	52,66
Nusa Tenggara Timur	50,35	56,29	56,48
Kalimantan Barat	61,19	47,84	62,67
Kalimantan Tengah	35,11	45,51	47,78
Kalimantan Selatan	52,17	51,01	61,53
Kalimantan Timur	40,10	39,64	41,38
Kalimantan Utara	47,84	27,23	73,85
Sulawesi Utara	56,14	49,79	60,88
Sulawesi Tengah	41,34	34,03	72,63
Sulawesi Selatan	52,51	63,80	63,74
Sulawesi Tenggara	56,79	77,85	88,30
Gorontalo	62,16	50,84	66,74
Sulawesi Barat	49,64	40,28	49,14
Maluku	46,58	46,87	61,71
Maluku Utara	58,49	37,14	62,82
Papua Barat	38,15 ¹	25,91	47,92
Papua Barat Daya	–	38,20	43,05
Papua	37,45 ²	28,55	52,94
Papua Selatan	–	30,61	34,45
Papua Tengah	–	27,14	42,26
Papua Pegunungan	–	68,41	31,58
Indonesia	43,08	45,01	54,49

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.38
Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Pernah Merokok
dan Telah Berhenti Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	41,52	42,11	51,29
Perdesaan	45,65	49,66	59,77
Jenis Kelamin			
Laki-laki	38,37	38,99	49,59
Perempuan	89,73	91,01	89,53
Kelompok Umur			
15–17 tahun	56,31	64,69	48,83
18–59 tahun	35,93	37,62	47,29
60+ tahun	70,33	71,66	80,83
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	58,65	65,96	74,76
SD/Sederajat	50,27	51,33	61,76
SMP/Sederajat	37,69	40,78	47,97
SMA/Sederajat	35,40	35,35	46,88
Perguruan Tinggi	44,99	45,58	50,57
Status Ekonomi			
Kuintil 1	47,76	56,83	58,49
Kuintil 2	46,74	50,24	56,08
Kuintil 3	42,92	41,64	58,59
Kuintil 4	40,93	41,47	52,07
Kuintil 5	38,60	38,81	48,91
Indonesia	43,08	45,01	54,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 2.39
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Provinsi
dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Punya Biaya Berobat				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	72,86 ²	–	–
Sumatera Utara	0,97	0,19	19,47	0,60	1,34
Sumatera Barat	0,77	0,29	37,30 ¹	0,21	1,33
R i a u	0,23	0,09	40,39 ¹	0,05	0,41
J a m b i	0,59	0,19	31,98 ¹	0,22	0,96
Sumatera Selatan	0,25	0,10	40,06 ¹	0,05	0,44
Bengkulu	0,42	0,21	48,94 ¹	0,02	0,83
Lampung	0,23	0,08	37,52 ¹	0,06	0,39
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,12 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	75,35 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	100,11 ²	–	–
Jawa Barat	0,76	0,14	18,75	0,48	1,04
Jawa Tengah	0,32	0,06	17,65	0,21	0,43
DI Yogyakarta	NA	–	65,09 ²	–	–
Jawa Timur	0,19	0,05	27,90 ¹	0,09	0,30
Banten	1,44	0,32	22,55	0,80	2,08
B a l i	NA	–	100,06 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,49	0,18	37,27 ¹	0,13	0,85
Nusa Tenggara Timur	0,66	0,18	27,33 ¹	0,31	1,02
Kalimantan Barat	0,34	0,09	26,71 ¹	0,16	0,52
Kalimantan Tengah	0,83	0,37	44,23 ¹	0,11	1,54
Kalimantan Selatan	NA	–	57,76 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	77,63 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	51,19 ²	–	–
Sulawesi Utara	0,28	0,13	47,56 ¹	0,02	0,54
Sulawesi Tengah	0,51	0,18	35,81 ¹	0,15	0,87
Sulawesi Selatan	0,35	0,13	36,95 ¹	0,10	0,61
Sulawesi Tenggara	0,28	0,10	34,29 ¹	0,09	0,47
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	0,71	0,34	47,29 ¹	0,05	1,37
Maluku	0,64	0,21	33,29 ¹	0,22	1,05
Maluku Utara	0,59	0,26	43,85 ¹	0,08	1,10
Papua Barat	NA	–	100,22 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	87,71 ²	–	–
Papua	NA	–	71,09 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	100,38 ²	–	–
Papua Tengah	1,75	0,77	44,12 ¹	0,24	3,26
Papua Pegunungan	NA	–	98,28 ²	–	–
Indonesia	0,50	0,04	7,70	0,42	0,58

Lanjutan Tabel 2.39

Provinsi	Tidak Punya Biaya Transportasi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,40	0,18	44,29 ¹	0,05	0,74
Sumatera Utara	0,12	0,04	30,14 ¹	0,05	0,19
Sumatera Barat	0,21	0,06	31,13 ¹	0,08	0,33
R i a u	NA	–	51,99 ²	–	–
J a m b i	NA	–	69,86 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	66,46 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	72,41 ²	–	–
Lampung	0,06	0,03	39,60 ¹	0,01	0,11
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	74,91 ²	–	–
DKI Jakarta	0,13	0,09	70,08 ²	–	–
Jawa Barat	0,19	0,07	39,10 ¹	0,04	0,33
Jawa Tengah	0,15	0,04	24,74	0,08	0,22
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	0,14	0,05	36,87 ¹	0,04	0,25
Banten	0,60	0,22	36,03 ¹	0,18	1,03
B a l i	NA	–	61,82 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	55,72 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,20	47,61 ¹	0,03	0,80
Kalimantan Barat	0,30	0,13	41,72 ¹	0,06	0,55
Kalimantan Tengah	NA	–	56,10 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	54,94 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	71,39 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	72,62 ²	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	0,18	0,07	39,44 ¹	0,04	0,32
Sulawesi Selatan	0,09	0,03	37,94 ¹	0,02	0,15
Sulawesi Tenggara	NA	–	66,68 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	91,25 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,09 ²	–	–
Maluku	0,25	0,09	37,08 ¹	0,07	0,43
Maluku Utara	0,67	0,28	41,33 ¹	0,13	1,22
Papua Barat	NA	–	57,72 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	56,61 ²	–	–
Papua	0,82	0,38	46,26 ¹	0,08	1,57
Papua Selatan	NA	–	55,94 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	92,68 ²	–	–
Papua Pegunungan	3,43	1,11	32,44 ¹	1,25	5,61
Indonesia	0,19	0,02	11,81	0,15	0,23



Lanjutan Tabel 2.39

Provinsi	Tidak Ada yang Mendampingi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	NA	–	85,10 ²	–	–
Sumatera Utara	0,23	0,06	25,59 ¹	0,11	0,34
Sumatera Barat	0,12	0,05	41,98 ¹	0,02	0,21
Riau	0,19	0,08	43,39 ¹	0,03	0,34
Jambi	NA	–	91,43 ²	–	–
Sumatera Selatan	0,21	0,10	48,92 ¹	0,01	0,41
Bengkulu	NA	–	97,94 ²	–	–
Lampung	NA	–	53,64 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	75,31 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	99,51 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	50,41 ²	–	–
Jawa Barat	0,48	0,14	28,66 ¹	0,21	0,75
Jawa Tengah	0,10	0,03	25,76 ¹	0,05	0,15
DI Yogyakarta	NA	–	54,76 ²	–	–
Jawa Timur	0,11	0,03	30,62 ¹	0,04	0,17
Banten	NA	–	71,25 ²	–	–
Bali	NA	–	65,19 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,17	0,07	41,58 ¹	0,03	0,31
Nusa Tenggara Timur	0,09	0,04	49,27 ¹	~0	0,17
Kalimantan Barat	NA	–	56,75 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	92,74 ²	–	–
Kalimantan Selatan	0,32	0,16	49,59 ¹	0,01	0,63
Kalimantan Timur	NA	–	65,17 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,06 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	68,69 ²	–	–
Sulawesi Selatan	0,07	0,03	45,63 ¹	0,01	0,13
Sulawesi Tenggara	NA	–	75,13 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	75,13 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	97,37 ²	–	–
Maluku	NA	–	100,14 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	71,40 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	87,58 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	78,21 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	100,47 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	100,41 ²	–	–
Papua Pegunungan	2,74	1,08	39,38 ¹	0,63	4,85
Indonesia	0,21	0,03	13,82	0,16	0,27

Lanjutan Tabel 2.39

Provinsi	Tidak Ada Sarana Transportasi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Aceh	NA	—	68,23 ²	—	—
Sumatera Utara	0,11	0,04	40,83 ¹	0,02	0,19
Sumatera Barat	NA	—	60,38 ²	—	—
R i a u	NA	—	85,40 ²	—	—
J a m b i	NA	—	56,25 ²	—	—
Sumatera Selatan	NA	—	63,53 ²	—	—
Bengkulu	NA	—	100,08 ²	—	—
Lampung	NA	—	52,00 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	NA	—	100,12 ²	—	—
Kep. Riau	NA	—	70,71 ²	—	—
DKI Jakarta	NA	—	100,06 ²	—	—
Jawa Barat	NA	—	81,65 ²	—	—
Jawa Tengah	0,05	0,02	36,36 ¹	0,01	0,09
DI Yogyakarta	—	—	NA	—	—
Jawa Timur	NA	—	58,89 ²	—	—
Banten	NA	—	100,05 ²	—	—
B a l i	NA	—	75,32 ²	—	—
Nusa Tenggara Barat	—	—	100,03 ²	—	—
Nusa Tenggara Timur	0,37	0,14	38,88 ¹	0,09	0,65
Kalimantan Barat	0,40	0,15	37,48 ¹	0,11	0,69
Kalimantan Tengah	NA	—	74,79 ²	—	—
Kalimantan Selatan	NA	—	60,10 ²	—	—
Kalimantan Timur	—	—	NA	—	—
Kalimantan Utara	NA	—	62,59 ²	—	—
Sulawesi Utara	NA	—	99,96 ²	—	—
Sulawesi Tengah	0,29	0,13	46,04 ¹	0,03	0,55
Sulawesi Selatan	0,18	0,08	43,70 ¹	0,03	0,33
Sulawesi Tenggara	NA	—	72,97 ²	—	—
Gorontalo	NA	—	99,99 ²	—	—
Sulawesi Barat	NA	—	59,12 ²	—	—
Maluku	NA	—	54,93 ²	—	—
Maluku Utara	NA	—	100,03 ²	—	—
Papua Barat	—	—	NA	—	—
Papua Barat Daya	—	—	NA	—	—
Papua	NA	—	65,84 ²	—	—
Papua Selatan	2,32	1,00	43,24 ¹	0,35	4,29
Papua Tengah	—	—	NA	—	—
Papua Pegunungan	1,34	0,54	40,16 ¹	0,29	2,40
Indonesia	0,08	0,01	12,35	0,06	0,09



Lanjutan Tabel 2.39

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Aceh	1,95	0,37	19,14	1,22	2,69
Sumatera Utara	0,45	0,13	30,02 ¹	0,18	0,71
Sumatera Barat	0,40	0,14	34,58 ¹	0,13	0,66
Riau	0,29	0,11	38,10 ¹	0,07	0,50
Jambi	0,56	0,23	40,06 ¹	0,12	1,01
Sumatera Selatan	0,33	0,10	30,23 ¹	0,13	0,52
Bengkulu	NA	–	66,99 ²	–	–
Lampung	NA	–	66,11 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	0,30	0,13	42,74 ¹	0,05	0,56
Kep. Riau	NA	–	67,46 ²	–	–
DKI Jakarta	0,58	0,26	44,13 ¹	0,08	1,09
Jawa Barat	0,34	0,13	38,64 ¹	0,08	0,60
Jawa Tengah	0,23	0,05	20,24	0,14	0,33
DI Yogyakarta	0,89	0,28	31,23 ¹	0,34	1,43
Jawa Timur	0,29	0,05	18,08	0,19	0,40
Banten	0,75	0,34	45,27 ¹	0,08	1,41
Bali	NA	–	50,31 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,23	0,11	47,05 ¹	0,02	0,43
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,13	29,95 ¹	0,18	0,69
Kalimantan Barat	0,24	0,07	30,55 ¹	0,10	0,39
Kalimantan Tengah	NA	–	50,66 ²	–	–
Kalimantan Selatan	0,32	0,12	36,26 ¹	0,09	0,55
Kalimantan Timur	1,39	0,53	38,33 ¹	0,35	2,43
Kalimantan Utara	0,59	0,28	47,87 ¹	0,04	1,14
Sulawesi Utara	NA	–	59,77 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	65,80 ²	–	–
Sulawesi Selatan	0,58	0,12	21,21	0,34	0,83
Sulawesi Tenggara	NA	–	70,75 ²	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	50,93 ²	–	–
Maluku	NA	–	50,53 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	NA	–	72,22 ²	–	–
Papua Barat Daya	1,44	0,69	47,83 ¹	0,09	2,78
Papua	NA	–	64,71 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	100,34 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	58,55 ²	–	–
Indonesia	0,40	0,04	9,05	0,33	0,47

Lanjutan Tabel 2.39

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
Aceh	2,94	0,39	13,32	2,18	3,71
Sumatera Utara	1,22	0,24	19,30	0,76	1,68
Sumatera Barat	1,34	0,49	36,55 ¹	0,38	2,30
Riau	1,14	0,25	22,09	0,65	1,63
Jambi	1,74	0,42	24,31	0,91	2,56
Sumatera Selatan	1,57	0,27	17,45	1,04	2,11
Bengkulu	1,10	0,27	24,27	0,58	1,62
Lampung	0,50	0,12	23,95	0,26	0,73
Kep. Bangka Belitung	NA	–	52,25 ²	–	–
Kep. Riau	2,59	0,90	34,87 ¹	0,82	4,35
DKI Jakarta	0,96	0,28	29,34 ¹	0,41	1,52
Jawa Barat	1,14	0,17	15,15	0,80	1,48
Jawa Tengah	0,97	0,12	12,02	0,74	1,20
DI Yogyakarta	1,41	0,32	22,97	0,78	2,04
Jawa Timur	1,32	0,17	12,72	0,99	1,65
Banten	1,57	0,31	19,88	0,96	2,18
Bali	NA	–	55,02 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	1,50	0,42	28,35 ¹	0,66	2,33
Nusa Tenggara Timur	1,16	0,20	17,60	0,76	1,56
Kalimantan Barat	NA	–	73,49 ²	–	–
Kalimantan Tengah	0,72	0,21	28,70 ¹	0,32	1,13
Kalimantan Selatan	0,24	0,08	32,45 ¹	0,09	0,40
Kalimantan Timur	0,95	0,28	29,99 ¹	0,39	1,50
Kalimantan Utara	1,75	0,51	29,38 ¹	0,74	2,75
Sulawesi Utara	0,99	0,30	30,57 ¹	0,40	1,58
Sulawesi Tengah	1,04	0,23	22,35	0,59	1,50
Sulawesi Selatan	0,82	0,12	15,12	0,58	1,07
Sulawesi Tenggara	1,77	0,63	35,77 ¹	0,53	3,01
Gorontalo	0,47	0,20	43,32 ¹	0,07	0,87
Sulawesi Barat	1,65	0,39	23,65	0,88	2,41
Maluku	1,09	0,27	24,70	0,56	1,62
Maluku Utara	1,18	0,34	29,15 ¹	0,50	1,85
Papua Barat	3,53	1,60	45,38 ¹	0,39	6,67
Papua Barat Daya	1,26	0,59	46,81 ¹	0,10	2,41
Papua	3,52	1,16	32,79 ¹	1,26	5,79
Papua Selatan	NA	–	71,37 ²	–	–
Papua Tengah	6,72	1,47	21,83	3,84	9,59
Papua Pegunungan	2,43	1,07	44,03 ¹	0,33	4,52
Indonesia	1,17	0,06	4,71	1,06	1,28

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.40
Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap
dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	RS Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	19,75	1,15	5,84	17,49	22,01
Sumatera Utara	55,16	1,71	3,10	51,80	58,51
Sumatera Barat	36,19	1,73	4,78	32,80	39,58
R i a u	50,00	2,12	4,25	45,84	54,16
J a m b i	37,88	2,20	5,81	33,56	42,19
Sumatera Selatan	39,33	2,01	5,10	35,39	43,26
Bengkulu	35,32	2,16	6,12	31,08	39,55
Lampung	50,70	1,75	3,46	47,26	54,13
Kep. Bangka Belitung	31,11	2,58	8,29	26,05	36,16
Kep. Riau	62,41	3,84	6,15	54,88	69,93
DKI Jakarta	44,73	2,66	5,95	39,52	49,95
Jawa Barat	50,93	1,17	2,29	48,64	53,21
Jawa Tengah	52,17	0,89	1,71	50,42	53,91
DI Yogyakarta	63,36	2,31	3,65	58,83	67,89
Jawa Timur	42,80	1,04	2,44	40,75	44,85
Banten	56,27	2,50	4,44	51,37	61,16
B a l i	54,11	2,37	4,38	49,46	58,76
Nusa Tenggara Barat	14,51	1,29	8,88	11,98	17,04
Nusa Tenggara Timur	22,61	1,52	6,72	19,63	25,59
Kalimantan Barat	28,01	2,08	7,43	23,93	32,09
Kalimantan Tengah	11,85	1,95	16,44	8,03	15,67
Kalimantan Selatan	20,81	1,94	9,31	17,02	24,61
Kalimantan Timur	37,96	2,72	7,16	32,64	43,29
Kalimantan Utara	10,03	2,25	22,47	5,61	14,44
Sulawesi Utara	45,34	1,88	4,14	41,66	49,02
Sulawesi Tengah	10,73	1,37	12,80	8,04	13,42
Sulawesi Selatan	24,72	1,28	5,19	22,21	27,24
Sulawesi Tenggara	18,72	1,82	9,74	15,15	22,30
Gorontalo	17,01	1,89	11,11	13,31	20,72
Sulawesi Barat	9,59	1,72	17,95	6,22	12,96
Maluku	29,15	4,17	14,32	20,97	37,33
Maluku Utara	8,20	1,65	20,09	4,97	11,43
Papua Barat	3,84	1,54	40,15 ¹	0,82	6,86
Papua Barat Daya	39,32	4,64	11,79	30,24	48,41
Papua	24,22	4,15	17,13	16,08	32,35
Papua Selatan	26,12	5,13	19,64	16,07	36,18
Papua Tengah	20,47	5,71	27,87 ¹	9,29	31,66
Papua Pegunungan	NA	–	61,67 ²	–	–
Indonesia	43,75	0,39	0,90	42,98	44,52

Lanjutan Tabel 2.40

Provinsi	Klinik				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	3,05	0,48	15,76	2,11	3,99
Sumatera Utara	8,23	1,08	13,17	6,11	10,36
Sumatera Barat	4,61	0,76	16,46	3,12	6,10
R i a u	7,55	0,99	13,13	5,61	9,49
J a m b i	10,02	1,59	15,90	6,90	13,14
Sumatera Selatan	9,12	1,20	13,20	6,76	11,48
Bengkulu	6,50	1,09	16,75	4,36	8,63
Lampung	19,05	1,50	7,87	16,11	21,99
Kep. Bangka Belitung	3,83	1,11	28,99 ¹	1,65	6,01
Kep. Riau	NA	–	65,47 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	60,86 ²	–	–
Jawa Barat	9,62	0,73	7,64	8,18	11,06
Jawa Tengah	5,23	0,38	7,25	4,48	5,97
DI Yogyakarta	3,99	1,03	25,79 ¹	1,97	6,01
Jawa Timur	7,85	0,57	7,29	6,73	8,97
Banten	9,23	1,45	15,76	6,38	12,08
B a l i	NA	–	55,14 ²	-0,07	1,77
Nusa Tenggara Barat	12,23	1,44	11,80	9,40	15,06
Nusa Tenggara Timur	1,56	0,49	31,68 ¹	0,59	2,53
Kalimantan Barat	4,25	1,03	24,26	2,23	6,27
Kalimantan Tengah	2,76	0,85	30,67 ¹	1,10	4,42
Kalimantan Selatan	5,00	1,22	24,41	2,61	7,39
Kalimantan Timur	5,00	1,40	27,98 ¹	2,26	7,73
Kalimantan Utara	NA	–	100,18 ²	–	–
Sulawesi Utara	2,04	0,43	20,91	1,21	2,88
Sulawesi Tengah	1,01	0,43	42,93 ¹	0,16	1,86
Sulawesi Selatan	3,70	0,51	13,81	2,70	4,71
Sulawesi Tenggara	3,26	0,92	28,15 ¹	1,46	5,06
Gorontalo	1,92	0,64	33,14 ¹	0,67	3,17
Sulawesi Barat	NA	–	59,38 ²	–	–
Maluku	NA	–	53,42 ²	–	–
Maluku Utara	1,10	0,48	43,83 ¹	0,15	2,04
Papua Barat	NA	–	100,63 ²	–	–
Papua Barat Daya	4,41	1,45	32,77 ¹	1,58	7,25
Papua	1,86	0,82	43,95 ¹	0,26	3,45
Papua Selatan	NA	–	56,02 ²	–	–
Papua Tengah	32,09	5,65	17,61	21,02	43,17
Papua Pegunungan	NA	–	85,87 ²	–	–
Indonesia	6,96	0,22	3,13	6,53	7,39



Lanjutan Tabel 2.40

Provinsi	Praktik Bidan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	3,17	0,65	20,36	1,91	4,44
Sumatera Utara	4,33	0,74	17,07	2,88	5,77
Sumatera Barat	5,32	0,77	14,58	3,80	6,83
Riau	3,75	0,79	21,11	2,20	5,30
Jambi	2,54	0,72	28,41 ¹	1,12	3,95
Sumatera Selatan	7,78	1,14	14,71	5,54	10,02
Bengkulu	2,35	0,74	31,28 ¹	0,91	3,80
Lampung	4,56	0,73	16,07	3,12	5,99
Kep. Bangka Belitung	2,38	1,03	43,18 ¹	0,37	4,39
Kep. Riau	3,18	1,44	45,34 ¹	0,35	6,01
DKI Jakarta	1,01	0,47	46,25 ¹	0,09	1,93
Jawa Barat	3,08	0,49	15,99	2,11	4,04
Jawa Tengah	0,68	0,20	28,61 ¹	0,30	1,06
DI Yogyakarta	2,31	0,76	32,83 ¹	0,82	3,79
Jawa Timur	1,32	0,21	16,03	0,91	1,74
Banten	3,08	0,82	26,59 ¹	1,48	4,69
Bali	2,08	0,93	44,49 ¹	0,27	3,89
Nusa Tenggara Barat	1,75	0,56	32,23 ¹	0,64	2,85
Nusa Tenggara Timur	NA	–	98,01 ²	–	–
Kalimantan Barat	5,52	1,30	23,61	2,96	8,07
Kalimantan Tengah	1,90	0,69	36,62 ¹	0,53	3,26
Kalimantan Selatan	2,18	0,92	42,26 ¹	0,37	3,99
Kalimantan Timur	0,90	0,36	39,88 ¹	0,20	1,61
Kalimantan Utara	NA	–	53,84 ²	–	–
Sulawesi Utara	0,42	0,19	44,66 ¹	0,05	0,79
Sulawesi Tengah	NA	–	71,01 ²	–	–
Sulawesi Selatan	1,06	0,29	27,09 ¹	0,49	1,62
Sulawesi Tenggara	NA	–	50,56 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,97 ²	–	–
Sulawesi Barat	0,98	0,41	41,63 ¹	0,18	1,77
Maluku	NA	–	100,07 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,41 ²	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	100,20 ²	–	–
Papua	NA	–	79,05 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	84,31 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,26	0,14	5,98	2,00	2,53



Lanjutan Tabel 2.40

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Aceh	NA	—	69,50 ²	—	—
Sumatera Utara	NA	—	57,76 ²	—	—
Sumatera Barat	—	—	NA	—	—
R i a u	NA	—	55,54 ²	—	—
J a m b i	—	—	NA	—	—
Sumatera Selatan	—	—	NA	—	—
Bengkulu	NA	—	100,10 ²	—	—
Lampung	NA	—	56,99 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	NA	—	—
Kep. Riau	NA	—	100,19 ²	—	—
DKI Jakarta	NA	—	72,38 ²	—	—
Jawa Barat	0,54	0,20	36,59 ¹	0,15	0,92
Jawa Tengah	0,20	0,08	42,73 ¹	0,03	0,36
DI Yogyakarta	—	—	NA	—	—
Jawa Timur	0,22	0,11	47,41 ¹	0,02	0,43
Banten	NA	—	67,66 ²	—	—
B a l i	NA	—	61,70 ²	—	—
Nusa Tenggara Barat	NA	—	72,39 ²	—	—
Nusa Tenggara Timur	NA	—	76,31 ²	—	—
Kalimantan Barat	0,47	0,22	46,50 ¹	0,04	0,91
Kalimantan Tengah	—	—	NA	—	—
Kalimantan Selatan	NA	—	99,93 ²	—	—
Kalimantan Timur	0,02	0,02	100,07 ²	—	—
Kalimantan Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Tengah	—	—	NA	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	57,83 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	—	—	NA	—	—
Gorontalo	—	—	NA	—	—
Sulawesi Barat	NA	—	79,65 ²	—	—
Maluku	NA	—	72,73 ²	—	—
Maluku Utara	NA	—	76,38 ²	—	—
Papua Barat	—	—	NA	—	—
Papua Barat Daya	—	—	NA	—	—
Papua	—	—	NA	—	—
Papua Selatan	—	—	NA	—	—
Papua Tengah	—	—	NA	—	—
Papua Pegunungan	—	—	NA	—	—
Indonesia	0,28	0,05	18,48	0,18	0,38



Lanjutan Tabel 2.40

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(32)	(33)	(34)	Lower (35)	Upper (36)
Aceh	NA	—	97,90 ²	—	—
Sumatera Utara	NA	—	87,82 ²	—	—
Sumatera Barat	NA	—	100,02 ²	—	—
Riau	NA	—	59,97 ²	—	—
Jambi	—	—	NA	—	—
Sumatera Selatan	0,75	0,33	44,06 ¹	0,10	1,39
Bengkulu	NA	—	81,31 ²	—	—
Lampung	NA	—	79,06 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	NA	—	—
Kep. Riau	—	—	NA	—	—
DKI Jakarta	—	—	NA	—	—
Jawa Barat	0,36	0,14	37,95 ¹	0,09	0,62
Jawa Tengah	NA	—	81,75 ²	—	—
DI Yogyakarta	—	—	NA	—	—
Jawa Timur	NA	—	60,37 ²	—	—
Banten	—	—	NA	—	—
Bali	—	—	NA	—	—
Nusa Tenggara Barat	1,20	0,45	37,91 ¹	0,31	2,09
Nusa Tenggara Timur	NA	—	100,05 ²	—	—
Kalimantan Barat	NA	—	100,14 ²	—	—
Kalimantan Tengah	—	—	NA	—	—
Kalimantan Selatan	—	—	NA	—	—
Kalimantan Timur	NA	—	99,88 ²	—	—
Kalimantan Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Tengah	NA	—	99,43 ²	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	79,78 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	—	—	NA	—	—
Gorontalo	—	—	NA	—	—
Sulawesi Barat	—	—	NA	—	—
Maluku	—	—	NA	—	—
Maluku Utara	NA	—	73,98 ²	—	—
Papua Barat	—	—	NA	—	—
Papua Barat Daya	—	—	NA	—	—
Papua	—	—	NA	—	—
Papua Selatan	—	—	NA	—	—
Papua Tengah	—	—	NA	—	—
Papua Pegunungan	—	—	NA	—	—
Indonesia	0,17	0,03	20,17	0,10	0,23

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.41
Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap
dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025

Karakteristik	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Tipe Daerah					
Perkotaan	0,28	0,07	26,18 ¹	0,14	0,42
Perdesaan	0,27	0,06	20,98	0,16	0,39
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	0,39	0,09	23,75	0,21	0,58
Perempuan	0,20	0,06	29,37 ¹	0,09	0,32
Kelompok Umur					
0–4 tahun	–	–	NA	–	–
0-17 tahun	0,26	0,10	39,55 ¹	0,06	0,46
18-59 tahun	0,27	0,07	27,47 ¹	0,12	0,41
60+ tahun	0,32	0,09	28,17 ¹	0,14	0,50
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	0,23	0,07	30,12 ¹	0,09	0,36
SD/Sederajat	0,48	0,17	35,28 ¹	0,15	0,82
SMP/Sederajat	0,37	0,15	39,73 ¹	0,08	0,66
SMA/Sederajat	0,21	0,10	46,24 ¹	0,02	0,40
Perguruan Tinggi	NA	–	60,90 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	58,22 ²	–	–
Kuintil 2	0,25	0,11	43,98 ¹	0,03	0,46
Kuintil 3	0,15	0,04	29,70 ¹	0,06	0,23
Kuintil 4	0,44	0,16	36,26 ¹	0,13	0,75
Kuintil 5	0,32	0,10	32,30 ¹	0,12	0,52
Indonesia	0,28	0,05	18,48	0,18	0,38



Lanjutan Tabel 2.41

Karakteristik	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(32)	(33)	(34)	Lower (35)	Upper (36)
Tipe Daerah					
Perkotaan	0,16	0,05	29,03 ¹	0,07	0,25
Perdesaan	0,18	0,04	24,72	0,09	0,27
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	0,17	0,05	31,47 ¹	0,07	0,28
Perempuan	0,16	0,03	21,25	0,09	0,23
Kelompok Umur					
0-4 tahun	NA	—	58,16 ²	—	—
0-17 tahun	0,18	0,07	36,38 ¹	0,05	0,31
18-59 tahun	0,16	0,04	24,79	0,08	0,23
60+ tahun	0,18	0,07	38,01 ¹	0,05	0,32
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	0,21	0,06	29,86 ¹	0,09	0,33
SD/Sederajat	0,20	0,09	42,52 ¹	0,03	0,38
SMP/Sederajat	0,18	0,07	39,68 ¹	0,04	0,33
SMA/Sederajat	0,09	0,03	36,00 ¹	0,03	0,15
Perguruan Tinggi	0,12	0,06	46,61 ¹	0,01	0,23
Status Ekonomi					
Kuintil 1	0,30	0,11	37,19 ¹	0,08	0,51
Kuintil 2	0,11	0,05	42,96 ¹	0,02	0,20
Kuintil 3	NA	—	54,76 ²	—	—
Kuintil 4	0,15	0,04	30,53 ¹	0,06	0,23
Kuintil 5	0,10	0,03	31,70 ¹	0,04	0,16
Indonesia	0,17	0,03	20,17	0,10	0,23

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.42
Sampling Error Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan
yang Dimiliki, 2025

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1,28	0,10	7,65	1,09	1,47
Sumatera Utara	1,52	0,14	9,06	1,25	1,79
Sumatera Barat	8,42	0,29	3,48	7,84	8,99
Riau	4,36	0,35	7,95	3,68	5,04
Jambi	—	—	NA	—	—
Sumatera Selatan	5,29	0,27	5,18	4,75	5,83
Bengkulu	0,89	0,14	16,23	0,61	1,17
Lampung	12,42	0,44	3,54	11,56	13,28
Kep. Bangka Belitung	—	—	NA	—	—
Kep. Riau	0,69	0,15	21,54	0,40	0,98
DKI Jakarta	NA	—	54,35 ²	—	—
Jawa Barat	0,48	0,07	14,95	0,34	0,62
Jawa Tengah	0,58	0,07	12,65	0,43	0,72
DI Yogyakarta	0,20	0,08	38,53 ¹	0,05	0,35
Jawa Timur	1,72	0,12	6,74	1,49	1,94
Banten	2,70	0,20	7,24	2,32	3,08
Bali	0,12	0,04	33,79 ¹	0,04	0,21
Nusa Tenggara Barat	10,31	0,36	3,53	9,59	11,02
Nusa Tenggara Timur	3,41	0,19	5,71	3,03	3,79
Kalimantan Barat	6,11	0,39	6,44	5,34	6,88
Kalimantan Tengah	1,21	0,17	14,15	0,88	1,55
Kalimantan Selatan	0,31	0,08	25,72 ¹	0,15	0,47
Kalimantan Timur	0,23	0,08	35,81 ¹	0,07	0,39
Kalimantan Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Utara	0,32	0,08	24,07	0,17	0,46
Sulawesi Tengah	2,29	0,24	10,25	1,83	2,75
Sulawesi Selatan	0,52	0,06	11,96	0,40	0,64
Sulawesi Tenggara	2,88	0,22	7,54	2,46	3,31
Gorontalo	0,14	0,06	40,26 ¹	0,03	0,25
Sulawesi Barat	21,25	0,98	4,61	19,33	23,18
Maluku	2,35	0,26	10,96	1,84	2,85
Maluku Utara	17,46	0,78	4,46	15,93	18,99
Papua Barat	6,01	0,54	8,91	4,96	7,06
Papua Barat Daya	0,64	0,18	27,59 ¹	0,29	0,98
Papua	10,28	0,64	6,22	9,03	11,54
Papua Selatan	22,94	1,23	5,37	20,53	25,36
Papua Tengah	33,76	0,93	2,76	31,94	35,58
Papua Pegunungan	48,66	1,10	2,26	46,50	50,82
Indonesia	2,63	0,04	1,41	2,56	2,70



Lanjutan Tabel 2.42

Provinsi	Asuransi Swasta				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	RSE	<i>95% Confidence Interval</i>	
				<i>Lower</i>	<i>Upper</i>
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	0,13	0,03	22,78	0,07	0,18
Sumatera Utara	0,21	0,04	20,23	0,13	0,30
Sumatera Barat	0,17	0,06	37,41 ¹	0,05	0,30
Riau	0,40	0,08	20,73	0,24	0,57
Jambi	0,55	0,13	23,66	0,30	0,81
Sumatera Selatan	0,42	0,12	27,76 ¹	0,19	0,65
Bengkulu	NA	–	51,64 ²	–	–
Lampung	0,21	0,06	30,15 ¹	0,08	0,33
Kep. Bangka Belitung	0,27	0,11	39,55 ¹	0,06	0,47
Kep. Riau	0,44	0,16	36,37 ¹	0,13	0,75
DKI Jakarta	1,95	0,28	14,43	1,40	2,51
Jawa Barat	0,89	0,09	10,20	0,71	1,06
Jawa Tengah	0,24	0,04	16,69	0,16	0,32
DI Yogyakarta	0,78	0,20	25,84 ¹	0,39	1,18
Jawa Timur	0,39	0,07	19,01	0,25	0,54
Banten	1,00	0,17	17,14	0,66	1,33
Bali	0,53	0,15	27,50 ¹	0,24	0,82
Nusa Tenggara Barat	0,16	0,05	33,75 ¹	0,05	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,03	46,07 ¹	0,01	0,14
Kalimantan Barat	0,34	0,06	18,50	0,22	0,46
Kalimantan Tengah	0,21	0,06	29,62 ¹	0,09	0,33
Kalimantan Selatan	0,20	0,05	27,37 ¹	0,09	0,31
Kalimantan Timur	1,09	0,15	14,10	0,79	1,39
Kalimantan Utara	NA	–	88,98 ²	–	–
Sulawesi Utara	0,16	0,06	37,81 ¹	0,04	0,28
Sulawesi Tengah	0,05	0,02	48,52 ¹	~0	0,10
Sulawesi Selatan	0,28	0,10	34,80 ¹	0,09	0,47
Sulawesi Tenggara	0,05	0,02	37,24 ¹	0,01	0,09
Gorontalo	0,30	0,14	46,08 ¹	0,03	0,58
Sulawesi Barat	NA	–	52,87 ²	–	–
Maluku	0,19	0,09	44,93 ¹	0,02	0,36
Maluku Utara	0,13	0,06	45,10 ¹	0,01	0,24
Papua Barat	NA	–	50,89 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	72,99 ²	–	–
Papua	0,20	0,07	36,66 ¹	0,06	0,34
Papua Selatan	NA	–	97,73 ²	–	–
Papua Tengah	0,26	0,10	37,21 ¹	0,07	0,44
Papua Pegunungan	NA	–	51,94 ²	–	–
Indonesia	0,51	0,03	5,15	0,46	0,56

Lanjutan Tabel 2.42

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Aceh	0,70	0,08	12,13	0,53	0,86
Sumatera Utara	2,63	0,20	7,69	2,24	3,03
Sumatera Barat	1,19	0,14	11,45	0,92	1,46
Riau	4,10	0,28	6,93	3,55	4,66
Jambi	2,19	0,21	9,56	1,78	2,60
Sumatera Selatan	1,92	0,16	8,43	1,60	2,24
Bengkulu	1,70	0,25	14,44	1,22	2,18
Lampung	2,22	0,20	9,12	1,82	2,62
Kep. Bangka Belitung	1,01	0,17	16,71	0,68	1,34
Kep. Riau	7,65	0,92	12,05	5,85	9,46
DKI Jakarta	4,62	0,44	9,59	3,75	5,49
Jawa Barat	3,63	0,17	4,75	3,30	3,97
Jawa Tengah	1,84	0,10	5,49	1,64	2,04
DI Yogyakarta	1,81	0,25	13,72	1,32	2,29
Jawa Timur	2,27	0,12	5,36	2,03	2,51
Banten	4,30	0,34	7,79	3,65	4,96
Bali	1,81	0,25	13,67	1,33	2,30
Nusa Tenggara Barat	1,11	0,16	14,18	0,80	1,42
Nusa Tenggara Timur	0,33	0,08	25,68 ¹	0,16	0,50
Kalimantan Barat	1,77	0,17	9,36	1,45	2,09
Kalimantan Tengah	3,13	0,25	8,05	2,64	3,62
Kalimantan Selatan	2,93	0,24	8,23	2,46	3,40
Kalimantan Timur	7,44	0,49	6,63	6,48	8,41
Kalimantan Utara	1,98	0,32	16,14	1,35	2,60
Sulawesi Utara	2,49	0,27	11,04	1,95	3,02
Sulawesi Tengah	1,32	0,14	10,85	1,04	1,61
Sulawesi Selatan	1,69	0,14	8,19	1,42	1,96
Sulawesi Tenggara	1,73	0,20	11,53	1,34	2,11
Gorontalo	1,62	0,31	19,38	1,00	2,23
Sulawesi Barat	0,33	0,08	25,91 ¹	0,16	0,49
Maluku	1,22	0,22	18,19	0,79	1,66
Maluku Utara	1,90	0,26	13,48	1,40	2,40
Papua Barat	1,08	0,29	26,38 ¹	0,52	1,64
Papua Barat Daya	3,34	0,58	17,30	2,21	4,47
Papua	2,30	0,35	15,29	1,61	2,99
Papua Selatan	1,20	0,30	25,02 ¹	0,61	1,79
Papua Tengah	3,94	0,50	12,75	2,96	4,93
Papua Pegunungan	NA	–	77,08 ²	–	–
Indonesia	2,64	0,05	1,92	2,54	2,74

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.43

Sampling Error Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan non-PBI/Mandiri				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	7,95	0,65	8,22	6,67	9,23
Sumatera Utara	16,49	1,11	6,73	14,32	18,67
Sumatera Barat	18,70	0,90	4,81	16,94	20,46
Riau	28,43	1,75	6,16	25,00	31,86
Jambi	23,48	1,57	6,68	20,41	26,55
Sumatera Selatan	13,75	1,29	9,37	11,22	16,28
Bengkulu	19,83	1,50	7,56	16,89	22,77
Lampung	10,58	0,80	7,52	9,02	12,14
Kep. Bangka Belitung	23,49	1,81	7,69	19,95	27,03
Kep. Riau	45,21	3,31	7,31	38,74	51,69
DKI Jakarta	25,97	1,82	6,99	22,41	29,53
Jawa Barat	22,71	0,81	3,56	21,13	24,30
Jawa Tengah	19,96	0,55	2,73	18,89	21,03
DI Yogyakarta	22,17	1,48	6,69	19,26	25,07
Jawa Timur	16,15	0,62	3,83	14,94	17,36
Banten	22,75	1,32	5,82	20,15	25,34
Bali	20,35	1,26	6,20	17,88	22,83
Nusa Tenggara Barat	9,23	0,81	8,77	7,65	10,82
Nusa Tenggara Timur	14,34	0,97	6,77	12,44	16,25
Kalimantan Barat	18,72	1,44	7,67	15,91	21,53
Kalimantan Tengah	24,41	2,05	8,42	20,38	28,44
Kalimantan Selatan	24,62	1,58	6,40	21,53	27,71
Kalimantan Timur	39,62	2,40	6,06	34,92	44,33
Kalimantan Utara	27,59	2,65	9,60	22,40	32,78
Sulawesi Utara	22,20	1,46	6,58	19,34	25,07
Sulawesi Tengah	18,75	1,93	10,29	14,97	22,54
Sulawesi Selatan	22,94	1,30	5,64	20,40	25,48
Sulawesi Tenggara	20,10	1,58	7,85	17,00	23,19
Gorontalo	8,81	1,17	13,31	6,52	11,11
Sulawesi Barat	14,21	1,73	12,15	10,83	17,59
Maluku	23,99	2,60	10,85	18,89	29,09
Maluku Utara	22,25	2,53	11,37	17,29	27,20
Papua Barat	17,06	2,84	16,65	11,50	22,63
Papua Barat Daya	14,97	2,63	17,55	9,82	20,12
Papua	21,64	2,72	12,59	16,30	26,97
Papua Selatan	15,20	2,79	18,35	9,74	20,67
Papua Tengah	13,47	3,46	25,70 ¹	6,68	20,25
Papua Pegunungan	18,04	4,00	22,19	10,20	25,89
Indonesia	19,73	0,26	1,34	19,21	20,25

Lanjutan Tabel 2.43

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	0,86	0,16	18,70	0,55	1,18
Sumatera Utara	1,01	0,41	40,76 ¹	0,20	1,81
Sumatera Barat	0,62	0,14	22,06	0,35	0,89
Riau	1,56	0,38	24,56	0,81	2,31
Jambi	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	2,43	0,69	28,40 ¹	1,08	3,79
Bengkulu	NA	–	70,81 ²	–	–
Lampung	3,89	0,55	14,20	2,81	4,98
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	56,91 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	100,01 ²	–	–
Jawa Barat	0,18	0,07	36,95 ¹	0,05	0,31
Jawa Tengah	0,31	0,08	26,31 ¹	0,15	0,48
DI Yogyakarta	NA	–	69,98 ²	–	–
Jawa Timur	0,77	0,15	19,55	0,47	1,06
Banten	0,44	0,15	33,02 ¹	0,16	0,73
Bali	NA	–	60,37 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	1,71	0,52	30,20 ¹	0,70	2,72
Nusa Tenggara Timur	3,29	0,41	12,53	2,48	4,10
Kalimantan Barat	1,09	0,39	35,47 ¹	0,33	1,85
Kalimantan Tengah	NA	–	82,13 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	59,76 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,12 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	0,19	0,09	46,44 ¹	0,02	0,37
Sulawesi Tengah	2,24	0,61	27,28 ¹	1,04	3,43
Sulawesi Selatan	0,39	0,10	26,31 ¹	0,19	0,59
Sulawesi Tenggara	2,75	0,54	19,60	1,69	3,81
Gorontalo	NA	–	70,87 ²	–	–
Sulawesi Barat	10,61	1,54	14,55	7,58	13,64
Maluku	4,35	0,76	17,40	2,87	5,84
Maluku Utara	12,95	1,71	13,21	9,59	16,30
Papua Barat	11,91	1,77	14,88	8,43	15,38
Papua Barat Daya	2,09	0,94	44,83 ¹	0,25	3,93
Papua	9,59	1,44	15,01	6,77	12,41
Papua Selatan	15,63	1,89	12,08	11,93	19,33
Papua Tengah	NA	–	61,30 ²	–	–
Papua Pegunungan	29,35	3,09	10,52	23,30	35,41
Indonesia	0,89	0,05	5,62	0,79	0,98



Lanjutan Tabel 2.43

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	NA	–	97,95 ²	–	–
Sumatera Utara	0,15	0,07	44,03 ¹	0,02	0,28
Sumatera Barat	0,24	0,11	47,67 ¹	0,02	0,46
Riau	0,40	0,19	47,19 ¹	0,03	0,76
Jambi	NA	–	53,69 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	66,90 ²	–	–
Bengkulu	–	–	NA	–	–
Lampung	NA	–	96,62 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	0,48	0,23	48,81 ¹	0,02	0,94
Kep. Riau	NA	–	100,21 ²	–	–
DKI Jakarta	1,56	0,44	28,45 ¹	0,69	2,43
Jawa Barat	0,80	0,16	20,00	0,49	1,11
Jawa Tengah	0,20	0,06	28,11 ¹	0,09	0,31
DI Yogyakarta	NA	–	58,15 ²	–	–
Jawa Timur	0,15	0,04	30,49 ¹	0,06	0,24
Banten	1,21	0,49	40,86 ¹	0,24	2,17
Bali	NA	–	77,04 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	87,19 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,98 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	59,42 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	100,09 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	100,08 ²	–	–
Kalimantan Timur	1,21	0,50	41,51 ¹	0,23	2,19
Kalimantan Utara	NA	–	100,17 ²	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	100,18 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	85,16 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,20 ²	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	NA	–	75,39 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	61,30 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,46	0,05	11,59	0,35	0,56

Lanjutan Tabel 2.43

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Aceh	0,25	0,10	38,03 ¹	0,06	0,44
Sumatera Utara	1,42	0,37	25,80 ¹	0,70	2,14
Sumatera Barat	0,99	0,27	27,54 ¹	0,45	1,52
R i a u	0,59	0,16	27,61 ¹	0,27	0,91
J a m b i	0,80	0,25	31,31 ¹	0,31	1,29
Sumatera Selatan	0,80	0,24	30,38 ¹	0,32	1,27
Bengkulu	0,89	0,29	33,05 ¹	0,31	1,46
Lampung	1,02	0,32	31,33 ¹	0,39	1,64
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,25	47,84 ¹	0,03	1,01
Kep. Riau	6,82	2,30	33,74 ¹	2,31	11,33
DKI Jakarta	2,49	0,55	22,16	1,41	3,57
Jawa Barat	2,08	0,24	11,67	1,60	2,55
Jawa Tengah	0,79	0,13	15,93	0,54	1,04
DI Yogyakarta	1,13	0,31	27,64 ¹	0,52	1,74
Jawa Timur	1,44	0,20	13,95	1,04	1,83
Banten	2,42	0,44	18,32	1,55	3,29
B a l i	NA	–	57,76 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,45	0,15	34,08 ¹	0,15	0,75
Nusa Tenggara Timur	NA	–	70,82 ²	–	–
Kalimantan Barat	0,91	0,29	31,59 ¹	0,35	1,47
Kalimantan Tengah	0,78	0,30	38,46 ¹	0,19	1,37
Kalimantan Selatan	1,15	0,33	28,82 ¹	0,50	1,80
Kalimantan Timur	3,84	0,70	18,15	2,48	5,21
Kalimantan Utara	1,14	0,46	40,59 ¹	0,23	2,05
Sulawesi Utara	1,17	0,44	37,74 ¹	0,30	2,03
Sulawesi Tengah	0,81	0,35	43,83 ¹	0,11	1,50
Sulawesi Selatan	1,69	0,36	21,25	0,98	2,39
Sulawesi Tenggara	1,41	0,49	35,11 ¹	0,44	2,38
Gorontalo	NA	–	56,58 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	52,48 ²	–	–
Maluku	NA	–	72,74 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	52,00 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	63,46 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	61,12 ²	–	–
Papua	1,16	0,53	46,05 ¹	0,11	2,20
Papua Selatan	NA	–	79,45 ²	–	–
Papua Tengah	11,44	3,68	32,16 ¹	4,23	18,65
Papua Pegunungan	NA	–	100,24 ²	–	–
Indonesia	1,43	0,08	5,45	1,28	1,58

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.44

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan PBI				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	80,88	1,14	1,41	78,64	83,12
Sumatera Utara	42,48	1,78	4,19	38,99	45,97
Sumatera Barat	50,07	1,77	3,54	46,59	53,55
R i a u	47,51	2,33	4,90	42,95	52,07
J a m b i	33,85	2,36	6,96	29,23	38,46
Sumatera Selatan	48,81	2,05	4,20	44,79	52,82
Bengkulu	55,18	2,32	4,21	50,63	59,74
Lampung	50,15	1,75	3,49	46,72	53,58
Kep. Bangka Belitung	45,14	2,97	6,57	39,33	50,96
Kep. Riau	25,95	3,57	13,75	18,96	32,95
DKI Jakarta	55,98	2,81	5,01	50,48	61,48
Jawa Barat	42,59	1,21	2,84	40,22	44,95
Jawa Tengah	47,89	0,90	1,88	46,12	49,65
DI Yogyakarta	54,33	2,47	4,55	49,48	59,17
Jawa Timur	46,65	1,02	2,20	44,64	48,66
Banten	39,97	2,58	6,45	34,91	45,02
B a l i	44,78	2,21	4,95	40,44	49,13
Nusa Tenggara Barat	60,69	1,93	3,18	56,91	64,48
Nusa Tenggara Timur	63,09	1,78	2,82	59,60	66,57
Kalimantan Barat	47,14	2,31	4,91	42,60	51,67
Kalimantan Tengah	39,61	2,92	7,38	33,87	45,34
Kalimantan Selatan	47,24	2,40	5,08	42,53	51,94
Kalimantan Timur	37,93	2,77	7,30	32,50	43,36
Kalimantan Utara	60,93	3,20	5,26	54,65	67,21
Sulawesi Utara	51,59	1,92	3,71	47,83	55,34
Sulawesi Tengah	61,95	2,04	3,30	57,95	65,95
Sulawesi Selatan	60,66	1,45	2,39	57,81	63,50
Sulawesi Tenggara	61,30	2,23	3,64	56,94	65,67
Gorontalo	72,84	2,66	3,65	67,63	78,04
Sulawesi Barat	61,84	2,62	4,24	56,71	66,98
Maluku	40,52	4,10	10,12	32,49	48,56
Maluku Utara	41,88	3,09	7,39	35,81	47,95
Papua Barat	55,55	5,08	9,15	45,59	65,52
Papua Barat Daya	56,39	4,81	8,52	46,97	65,81
Papua	48,17	4,39	9,11	39,56	56,77
Papua Selatan	49,06	5,97	12,18	37,35	60,77
Papua Tengah	29,51	5,51	18,69	18,70	40,32
Papua Pegunungan	28,07	9,13	32,51 ¹	10,18	45,96
Indonesia	48,44	0,40	0,83	47,65	49,23

Lanjutan Tabel 2.44

Provinsi	BPJS Kesehatan non-PBI/Mandiri				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	15,40	1,06	6,87	13,32	17,47
Sumatera Utara	37,55	1,75	4,66	34,12	40,98
Sumatera Barat	36,34	1,75	4,83	32,90	39,78
Riau	33,32	2,24	6,71	28,94	37,71
Jambi	34,89	2,31	6,61	30,37	39,41
Sumatera Selatan	27,15	1,92	7,09	23,38	30,92
Bengkulu	32,27	2,24	6,94	27,88	36,67
Lampung	25,86	1,54	5,96	22,84	28,88
Kep. Bangka Belitung	39,47	2,98	7,55	33,63	45,31
Kep. Riau	62,70	4,25	6,78	54,38	71,03
DKI Jakarta	28,65	2,55	8,90	23,65	33,64
Jawa Barat	35,30	1,17	3,33	32,99	37,60
Jawa Tengah	32,16	0,85	2,63	30,50	33,82
DI Yogyakarta	31,38	2,28	7,27	26,91	35,85
Jawa Timur	30,01	0,98	3,26	28,09	31,93
Banten	36,42	2,41	6,60	31,71	41,14
Bali	44,48	2,37	5,33	39,83	49,12
Nusa Tenggara Barat	14,71	1,20	8,16	12,36	17,07
Nusa Tenggara Timur	23,46	1,64	6,99	20,24	26,67
Kalimantan Barat	28,56	2,05	7,17	24,55	32,58
Kalimantan Tengah	42,08	2,86	6,80	36,47	47,68
Kalimantan Selatan	37,94	2,43	6,40	33,19	42,70
Kalimantan Timur	47,23	2,75	5,83	41,84	52,63
Kalimantan Utara	32,68	3,05	9,34	26,70	38,66
Sulawesi Utara	37,53	1,88	5,00	33,86	41,21
Sulawesi Tengah	26,44	1,92	7,25	22,68	30,20
Sulawesi Selatan	31,21	1,38	4,42	28,50	33,91
Sulawesi Tenggara	27,75	2,16	7,77	23,53	31,98
Gorontalo	19,98	2,12	10,62	15,82	24,14
Sulawesi Barat	26,75	2,52	9,42	21,81	31,69
Maluku	43,91	4,51	10,28	35,07	52,75
Maluku Utara	26,75	2,84	10,60	21,19	32,31
Papua Barat	28,46	4,51	15,84	19,63	37,30
Papua Barat Daya	25,63	4,51	17,59	16,79	34,46
Papua	34,09	4,20	12,32	25,86	42,33
Papua Selatan	28,20	6,10	21,63	16,25	40,15
Papua Tengah	9,63	3,24	33,68 ¹	3,27	15,99
Papua Pegunungan	54,62	13,05	23,90	29,04	80,21
Indonesia	32,12	0,38	1,19	31,37	32,87



Lanjutan Tabel 2.44

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	0,60	0,15	24,98	0,31	0,90
Sumatera Utara	NA	–	56,67 ²	–	–
Sumatera Barat	0,85	0,35	41,12 ¹	0,17	1,54
Riau	0,62	0,31	49,51 ¹	0,02	1,23
Jambi	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	1,99	0,52	26,36 ¹	0,96	3,02
Bengkulu	NA	–	72,74 ²	–	–
Lampung	2,83	0,60	21,28	1,65	4,01
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	62,12 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	0,71	0,21	30,10 ¹	0,29	1,14
Jawa Tengah	0,24	0,07	28,11 ¹	0,11	0,38
DI Yogyakarta	NA	–	99,95 ²	–	–
Jawa Timur	1,10	0,22	20,25	0,67	1,54
Banten	NA	–	62,07 ²	–	–
Bali	NA	–	58,36 ²	-0,03	0,47
Nusa Tenggara Barat	1,38	0,31	22,79	0,76	2,00
Nusa Tenggara Timur	3,39	0,51	14,96	2,39	4,38
Kalimantan Barat	NA	–	74,09 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	69,51 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	100,01 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	69,95 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	63,82 ²	–	–
Sulawesi Tengah	2,38	0,55	23,19	1,30	3,46
Sulawesi Selatan	0,80	0,22	26,93 ¹	0,38	1,22
Sulawesi Tenggara	1,19	0,46	38,15 ¹	0,30	2,08
Gorontalo	NA	–	100,12 ²	–	–
Sulawesi Barat	8,19	1,60	19,48	5,07	11,32
Maluku	0,78	0,29	37,45 ¹	0,21	1,35
Maluku Utara	16,31	2,33	14,28	11,74	20,87
Papua Barat	4,31	1,44	33,39 ¹	1,49	7,13
Papua Barat Daya	NA	–	100,07 ²	–	–
Papua	4,12	1,45	35,18 ¹	1,28	6,96
Papua Selatan	10,50	2,31	22,00	5,97	15,03
Papua Tengah	NA	–	56,33 ²	–	–
Papua Pegunungan	29,36	10,69	36,40 ¹	8,41	50,31
Indonesia	0,90	0,07	7,56	0,77	1,03

Lanjutan Tabel 2.44

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	NA	–	99,97 ²	–	–
Sumatera Utara	0,40	0,18	46,34 ¹	0,04	0,76
Sumatera Barat	NA	–	59,92 ²	–	–
R i a u	0,71	0,31	43,26 ¹	0,11	1,30
J a m b i	2,47	0,93	37,54 ¹	0,65	4,28
Sumatera Selatan	0,76	0,36	47,52 ¹	0,05	1,47
Bengkulu	NA	–	99,90 ²	–	–
Lampung	0,32	0,16	49,39 ¹	0,01	0,63
Kep. Bangka Belitung	1,75	0,75	43,13 ¹	0,27	3,22
Kep. Riau	NA	–	78,42 ²	–	–
DKI Jakarta	2,90	0,89	30,84 ¹	1,15	4,65
Jawa Barat	1,80	0,38	21,29	1,05	2,55
Jawa Tengah	0,51	0,13	26,13 ¹	0,25	0,78
DI Yogyakarta	2,72	1,08	39,61 ¹	0,61	4,83
Jawa Timur	0,32	0,11	34,33 ¹	0,10	0,53
Banten	NA	–	60,50 ²	–	–
B a l i	NA	–	51,38 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	100,02 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,05 ²	–	–
Kalimantan Barat	0,84	0,29	34,22 ¹	0,28	1,41
Kalimantan Tengah	NA	–	89,87 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	85,52 ²	–	–
Kalimantan Timur	1,98	0,63	31,76 ¹	0,75	3,21
Kalimantan Utara	NA	–	100,18 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	70,78 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	74,90 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	100,07 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	71,00 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,14 ²	–	–
Maluku	NA	–	100,44 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	NA	–	75,38 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	100,61 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,94	0,11	11,80	0,72	1,16



Lanjutan Tabel 2.44

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Aceh	0,64	0,23	36,19 ¹	0,19	1,09
Sumatera Utara	3,04	0,57	18,69	1,93	4,15
Sumatera Barat	0,53	0,23	43,84 ¹	0,07	0,98
Riau	2,59	0,63	24,26	1,36	3,83
Jambi	1,59	0,56	35,45 ¹	0,49	2,70
Sumatera Selatan	2,26	0,55	24,27	1,19	3,34
Bengkulu	2,36	0,79	33,59 ¹	0,81	3,92
Lampung	2,55	0,51	20,01	1,55	3,55
Kep. Bangka Belitung	NA	–	91,80 ²	–	–
Kep. Riau	4,18	1,71	40,90 ¹	0,83	7,53
DKI Jakarta	6,47	1,72	26,58 ¹	3,10	9,84
Jawa Barat	3,33	0,40	11,91	2,55	4,11
Jawa Tengah	1,85	0,24	13,20	1,37	2,33
DI Yogyakarta	1,20	0,44	36,98 ¹	0,33	2,07
Jawa Timur	2,76	0,42	15,06	1,95	3,58
Banten	3,98	0,96	24,09	2,10	5,86
Bali	1,32	0,48	36,34 ¹	0,38	2,27
Nusa Tenggara Barat	NA	–	51,79 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,21	47,27 ¹	0,03	0,85
Kalimantan Barat	2,25	0,68	30,35 ¹	0,91	3,58
Kalimantan Tengah	3,00	1,00	33,50 ¹	1,03	4,96
Kalimantan Selatan	3,71	0,96	25,78 ¹	1,83	5,58
Kalimantan Timur	6,78	1,24	18,36	4,34	9,22
Kalimantan Utara	NA	–	78,86 ²	–	–
Sulawesi Utara	3,75	1,18	31,35 ¹	1,45	6,06
Sulawesi Tengah	1,18	0,35	29,50 ¹	0,50	1,86
Sulawesi Selatan	1,34	0,36	27,03 ¹	0,63	2,05
Sulawesi Tenggara	1,54	0,49	32,03 ¹	0,57	2,51
Gorontalo	4,15	1,95	47,03 ¹	0,32	7,97
Sulawesi Barat	NA	–	79,48 ²	–	–
Maluku	NA	–	86,79 ²	–	–
Maluku Utara	3,99	1,23	30,81 ¹	1,58	6,39
Papua Barat	NA	–	77,61 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	79,81 ²	–	–
Papua	NA	–	50,32 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	89,32 ²	–	–
Papua Tengah	11,60	4,96	42,75 ¹	1,88	21,32
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,66	0,15	5,49	2,37	2,94

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.45
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak
Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,86	1,59	32,67 ¹	1,75	7,97
Sumatera Utara	2,60	0,52	19,91	1,58	3,61
Sumatera Barat	0,91	0,26	28,49 ¹	0,40	1,43
Riau	1,34	0,61	45,92 ¹	0,13	2,54
Jambi	6,85	1,93	28,19 ¹	3,06	10,63
Sumatera Selatan	13,55	2,47	18,26	8,70	18,40
Bengkulu	2,05	0,72	35,26 ¹	0,63	3,47
Lampung	3,04	0,61	19,98	1,85	4,23
Kep. Bangka Belitung	NA	–	55,48 ²	–	–
Kep. Riau	3,03	1,29	42,70 ¹	0,49	5,56
DKI Jakarta	5,45	2,00	36,68 ¹	1,53	9,36
Jawa Barat	3,96	0,66	16,62	2,67	5,25
Jawa Tengah	3,78	0,48	12,69	2,84	4,72
DI Yogyakarta	NA	–	65,41 ²	–	–
Jawa Timur	7,97	0,64	8,01	6,72	9,23
Banten	3,48	1,70	48,80 ¹	0,15	6,80
Bali	0,94	0,37	39,84 ¹	0,21	1,67
Nusa Tenggara Barat	4,53	1,31	28,88 ¹	1,96	7,09
Nusa Tenggara Timur	3,68	1,07	29,03 ¹	1,59	5,78
Kalimantan Barat	3,83	1,23	32,01 ¹	1,43	6,24
Kalimantan Tengah	7,27	2,37	32,58 ¹	2,63	11,92
Kalimantan Selatan	6,58	1,88	28,54 ¹	2,90	10,26
Kalimantan Timur	NA	–	54,15 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	73,66 ²	–	–
Sulawesi Utara	1,78	0,60	33,95 ¹	0,60	2,97
Sulawesi Tengah	NA	–	52,99 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	66,73 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	53,17 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	73,56 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	84,79 ²	–	–
Maluku	NA	–	100,84 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	80,13 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	53,79 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	83,30 ²	–	–
Papua	6,11	2,33	38,20 ¹	1,53	10,68
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	0,52	0,11	20,78	0,31	0,73
Papua Pegunungan	88,55	0,04	0,05	88,47	88,63
Indonesia	4,66	0,24	5,15	4,19	5,13



Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,89	0,30	33,51 ¹	0,31	1,47
Sumatera Utara	2,19	0,70	31,98 ¹	0,82	3,56
Sumatera Barat	NA	–	74,54 ²	–	–
Riau	1,88	0,75	39,71 ¹	0,42	3,34
Jambi	NA	–	50,02 ²	–	–
Sumatera Selatan	1,11	0,45	40,77 ¹	0,22	2,00
Bengkulu	0,38	0,24	62,35 ²	–	–
Lampung	0,51	0,24	47,02 ¹	0,04	0,99
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	95,82 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,14 ²	–	–
Jawa Barat	1,12	0,36	31,98 ¹	0,42	1,83
Jawa Tengah	0,58	0,18	31,78 ¹	0,22	0,94
DI Yogyakarta	NA	–	100,15 ²	–	–
Jawa Timur	1,01	0,38	38,05 ¹	0,26	1,76
Banten	1,21	0,49	40,34 ¹	0,25	2,16
Bali	NA	–	73,55 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	64,65 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	2,74	1,29	46,98 ¹	0,22	5,27
Kalimantan Barat	NA	–	67,66 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	100,99 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	78,38 ²	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	70,48 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	67,77 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	53,10 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	72,83 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	67,41 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	75,84 ²	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	NA	–	101,29 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	70,48 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	101,76 ²	–	–
Papua	NA	–	100,03 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	10,72	0,04	0,35	10,64	10,79
Indonesia	0,97	0,13	13,16	0,72	1,22

Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Kartu JKN Tidak Aktif				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1,11	0,42	37,81 ¹	0,29	1,94
Sumatera Utara	2,00	0,52	25,95 ¹	0,98	3,02
Sumatera Barat	6,66	1,14	17,17	4,42	8,91
Riau	8,65	2,67	30,86 ¹	3,42	13,88
Jambi	10,38	2,18	21,01	6,11	14,65
Sumatera Selatan	3,86	0,78	20,11	2,34	5,38
Bengkulu	5,39	1,43	26,53 ¹	2,59	8,19
Lampung	6,89	1,40	20,35	4,14	9,64
Kep. Bangka Belitung	4,45	1,55	34,83 ¹	1,41	7,48
Kep. Riau	9,77	4,62	47,27 ¹	0,72	18,83
DKI Jakarta	NA	–	71,23 ²	–	–
Jawa Barat	8,01	0,99	12,31	6,08	9,94
Jawa Tengah	3,77	0,48	12,73	2,83	4,72
DI Yogyakarta	1,47	0,51	34,84 ¹	0,46	2,47
Jawa Timur	3,32	0,46	13,97	2,41	4,23
Banten	3,48	1,54	44,33 ¹	0,46	6,50
Bali	1,43	0,50	34,72 ¹	0,46	2,41
Nusa Tenggara Barat	2,70	0,97	35,85 ¹	0,80	4,59
Nusa Tenggara Timur	7,79	2,15	27,58 ¹	3,58	12,00
Kalimantan Barat	3,07	0,86	27,97 ¹	1,39	4,76
Kalimantan Tengah	9,60	3,25	33,86 ¹	3,23	15,96
Kalimantan Selatan	9,23	3,43	37,17 ¹	2,50	15,95
Kalimantan Timur	NA	–	62,36 ²	–	–
Kalimantan Utara	18,72	7,71	41,18 ¹	3,61	33,84
Sulawesi Utara	2,73	1,01	36,91 ¹	0,76	4,71
Sulawesi Tengah	5,22	2,04	39,03 ¹	1,23	9,22
Sulawesi Selatan	3,43	0,90	26,25 ¹	1,67	5,19
Sulawesi Tenggara	2,27	1,14	49,93 ¹	0,05	4,50
Gorontalo	NA	–	51,77 ²	–	–
Sulawesi Barat	1,45	0,72	49,67 ¹	0,04	2,85
Maluku	11,17	5,28	47,31 ¹	0,81	21,52
Maluku Utara	NA	–	53,47 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	65,96 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	55,02 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	61,97 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	60,45 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	4,61	0,26	5,63	4,10	5,12



Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	NA	–	56,94 ²	–	–
Sumatera Utara	1,56	0,77	49,60 ¹	0,04	3,07
Sumatera Barat	1,70	0,59	34,67 ¹	0,54	2,85
Riau	NA	–	52,90 ²	–	–
Jambi	NA	–	61,79 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	63,18 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	71,63 ²	–	–
Lampung	NA	–	59,07 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	53,37 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	67,38 ²	–	–
DKI Jakarta	11,96	2,94	24,61	6,19	17,72
Jawa Barat	3,66	0,66	18,12	2,36	4,95
Jawa Tengah	0,73	0,22	30,81 ¹	0,29	1,17
DI Yogyakarta	5,74	2,59	45,17 ¹	0,66	10,82
Jawa Timur	1,32	0,38	28,84 ¹	0,57	2,07
Banten	5,81	2,08	35,82 ¹	1,73	9,89
Bali	NA	–	64,64 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,66	0,31	46,66 ¹	0,06	1,25
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,76 ²	–	–
Kalimantan Barat	1,28	0,61	47,70 ¹	0,08	2,48
Kalimantan Tengah	NA	–	61,16 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	51,27 ²	–	–
Kalimantan Timur	23,38	4,10	17,53	15,35	31,42
Kalimantan Utara	NA	–	74,77 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	89,95 ²	–	–
Sulawesi Tengah	1,59	0,16	10,23	1,27	1,91
Sulawesi Selatan	1,74	0,67	38,54 ¹	0,43	3,05
Sulawesi Tenggara	NA	–	72,08 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,17 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	73,00 ²	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	NA	–	86,17 ²	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	61,67 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	113,07 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	0,70	~0	0,35	0,70	0,71
Indonesia	2,29	0,21	9,36	1,87	2,71

Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Aceh	4,68	1,20	25,68 ¹	2,32	7,03
Sumatera Utara	3,50	0,75	21,52	2,02	4,97
Sumatera Barat	6,73	1,12	16,70	4,53	8,93
Riau	9,94	2,09	21,03	5,84	14,04
Jambi	9,45	2,18	23,03	5,18	13,72
Sumatera Selatan	3,43	0,79	22,99	1,89	4,98
Bengkulu	7,50	1,96	26,17 ¹	3,66	11,35
Lampung	5,80	1,01	17,36	3,83	7,77
Kep. Bangka Belitung	3,12	1,15	37,00 ¹	0,86	5,38
Kep. Riau	NA	–	62,56 ²	–	–
DKI Jakarta	7,11	2,30	32,31 ¹	2,61	11,61
Jawa Barat	6,94	1,00	14,41	4,98	8,89
Jawa Tengah	4,57	0,47	10,34	3,65	5,50
DI Yogyakarta	8,69	1,76	20,29	5,24	12,15
Jawa Timur	5,99	0,60	10,10	4,80	7,17
Banten	5,28	1,29	24,40	2,76	7,81
Bali	4,54	1,17	25,69 ¹	2,25	6,83
Nusa Tenggara Barat	2,36	0,54	22,76	1,31	3,42
Nusa Tenggara Timur	13,13	2,97	22,62	7,31	18,96
Kalimantan Barat	9,22	2,68	29,05 ¹	3,97	14,48
Kalimantan Tengah	9,16	3,36	36,71 ¹	2,57	15,74
Kalimantan Selatan	8,23	2,00	24,33	4,31	12,15
Kalimantan Timur	5,13	1,31	25,57 ¹	2,56	7,71
Kalimantan Utara	12,44	5,53	44,43 ¹	1,61	23,27
Sulawesi Utara	3,65	1,41	38,73 ¹	0,88	6,41
Sulawesi Tengah	3,59	1,62	45,04 ¹	0,42	6,76
Sulawesi Selatan	1,50	0,53	35,43 ¹	0,46	2,54
Sulawesi Tenggara	4,21	1,64	38,87 ¹	1,00	7,43
Gorontalo	5,07	1,75	34,45 ¹	1,65	8,49
Sulawesi Barat	NA	–	55,45 ²	–	–
Maluku	NA	–	54,97 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	74,20 ²	–	–
Papua Barat	0,94	0,26	28,03 ¹	0,42	1,46
Papua Barat Daya	NA	–	55,00 ²	–	–
Papua	NA	–	78,81 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	104,58 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	5,72	0,28	4,83	5,18	6,26



Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(27)	(28)	(29)	Lower (30)	Upper (31)
Aceh	2,11	0,60	28,21 ¹	0,94	3,28
Sumatera Utara	12,15	1,27	10,41	9,67	14,63
Sumatera Barat	9,29	1,30	14,03	6,73	11,84
Riau	12,29	2,50	20,34	7,39	17,19
Jambi	15,72	3,12	19,88	9,59	21,84
Sumatera Selatan	19,89	2,17	10,89	15,65	24,14
Bengkulu	12,02	2,31	19,26	7,48	16,55
Lampung	17,25	1,95	11,29	13,43	21,06
Kep. Bangka Belitung	8,71	3,04	34,90 ¹	2,75	14,67
Kep. Riau	3,92	1,70	43,38 ¹	0,59	7,25
DKI Jakarta	NA	–	54,37 ²	–	–
Jawa Barat	11,35	1,11	9,82	9,17	13,53
Jawa Tengah	10,12	0,83	8,25	8,48	11,75
DI Yogyakarta	5,97	1,58	26,53 ¹	2,87	9,07
Jawa Timur	6,56	0,66	10,09	5,26	7,86
Banten	8,54	2,05	24,01	4,52	12,57
Bali	14,13	1,80	12,72	10,61	17,65
Nusa Tenggara Barat	7,02	1,36	19,39	4,35	9,69
Nusa Tenggara Timur	5,86	1,86	31,78 ¹	2,21	9,51
Kalimantan Barat	9,37	1,54	16,40	6,36	12,38
Kalimantan Tengah	5,45	2,05	37,66 ¹	1,43	9,48
Kalimantan Selatan	1,89	0,72	37,88 ¹	0,49	3,30
Kalimantan Timur	NA	–	52,19 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	60,67 ²	–	–
Sulawesi Utara	2,99	1,14	38,26 ¹	0,75	5,23
Sulawesi Tengah	3,31	1,27	38,33 ¹	0,82	5,79
Sulawesi Selatan	6,00	1,33	22,14	3,40	8,60
Sulawesi Tenggara	NA	–	59,05 ²	–	–
Gorontalo	3,96	1,22	30,71 ¹	1,57	6,34
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	NA	–	50,46 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	54,23 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,48 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	61,64 ²	–	–
Papua	6,09	2,54	41,71 ¹	1,11	11,08
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	40,30	14,93	37,04 ¹	11,05	69,55
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	9,54	0,35	3,63	8,86	10,22

Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Aceh	7,41	1,33	17,94	4,80	10,01
Sumatera Utara	6,24	1,09	17,46	4,10	8,37
Sumatera Barat	18,00	1,81	10,03	14,46	21,54
Riau	10,19	2,01	19,69	6,26	14,12
Jambi	17,90	2,75	15,34	12,52	23,28
Sumatera Selatan	10,20	1,55	15,19	7,16	13,23
Bengkulu	20,77	2,98	14,33	14,93	26,60
Lampung	11,75	1,65	14,04	8,51	14,98
Kep. Bangka Belitung	10,90	2,23	20,48	6,53	15,28
Kep. Riau	NA	–	56,13 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	52,14 ²	–	–
Jawa Barat	8,22	0,94	11,47	6,37	10,06
Jawa Tengah	10,17	1,03	10,10	8,16	12,18
DI Yogyakarta	10,63	1,91	17,96	6,89	14,37
Jawa Timur	10,82	0,77	7,11	9,31	12,32
Banten	5,58	1,44	25,72 ¹	2,77	8,39
Bali	7,45	1,10	14,74	5,30	9,61
Nusa Tenggara Barat	26,57	2,39	9,01	21,88	31,26
Nusa Tenggara Timur	7,56	2,10	27,80 ¹	3,44	11,68
Kalimantan Barat	15,65	2,32	14,84	11,10	20,20
Kalimantan Tengah	19,40	4,25	21,92	11,07	27,74
Kalimantan Selatan	11,18	1,97	17,59	7,32	15,03
Kalimantan Timur	7,15	2,38	33,24 ¹	2,49	11,81
Kalimantan Utara	NA	–	76,80 ²	–	–
Sulawesi Utara	28,59	3,60	12,60	21,53	35,65
Sulawesi Tengah	23,32	5,35	22,95	12,83	33,82
Sulawesi Selatan	2,95	0,78	26,53 ¹	1,42	4,48
Sulawesi Tenggara	10,19	3,07	30,09 ¹	4,18	16,20
Gorontalo	15,54	2,81	18,08	10,03	21,04
Sulawesi Barat	4,25	1,94	45,60 ¹	0,45	8,04
Maluku	7,35	2,90	39,47 ¹	1,66	13,03
Maluku Utara	11,79	5,16	43,75 ¹	1,68	21,90
Papua Barat	NA	–	62,55 ²	–	–
Papua Barat Daya	5,91	2,59	43,92 ¹	0,82	10,99
Papua	11,49	4,59	39,96 ¹	2,49	20,49
Papua Selatan	NA	–	67,66 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	53,12 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	10,54	0,35	3,30	9,86	11,22



Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antrre Panjang				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	<i>RSE</i>	<i>95% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
Aceh	47,01	2,47	5,26	42,16	51,85
Sumatera Utara	42,23	2,54	6,00	37,26	47,20
Sumatera Barat	33,07	2,09	6,33	28,96	37,18
Riau	38,82	3,73	9,61	31,51	46,13
Jambi	25,86	3,26	12,59	19,48	32,25
Sumatera Selatan	24,22	2,32	9,59	19,67	28,78
Bengkulu	17,07	2,05	12,03	13,04	21,09
Lampung	26,73	2,44	9,14	21,94	31,52
Kep. Bangka Belitung	41,82	4,18	9,99	33,63	50,00
Kep. Riau	38,11	7,38	19,38	23,64	52,59
DKI Jakarta	46,59	4,58	9,84	37,60	55,57
Jawa Barat	35,39	1,72	4,87	32,01	38,76
Jawa Tengah	34,88	1,39	3,99	32,15	37,60
DI Yogyakarta	37,88	3,29	8,70	31,43	44,34
Jawa Timur	34,80	1,30	3,73	32,26	37,34
Banten	54,46	4,60	8,45	45,44	63,47
Bali	48,82	2,61	5,34	43,70	53,93
Nusa Tenggara Barat	17,34	1,90	10,93	13,63	21,06
Nusa Tenggara Timur	18,63	3,60	19,32	11,58	25,69
Kalimantan Barat	41,94	3,40	8,10	35,27	48,60
Kalimantan Tengah	29,29	5,05	17,25	19,38	39,19
Kalimantan Selatan	33,77	3,39	10,05	27,11	40,42
Kalimantan Timur	39,30	5,46	13,90	28,60	50,01
Kalimantan Utara	32,64	7,49	22,96	17,96	47,33
Sulawesi Utara	30,34	3,48	11,46	23,52	37,15
Sulawesi Tengah	34,67	5,68	16,39	23,53	45,81
Sulawesi Selatan	50,39	3,75	7,44	43,04	57,75
Sulawesi Tenggara	26,29	4,25	16,15	17,97	34,61
Gorontalo	18,19	3,56	19,57	11,22	25,17
Sulawesi Barat	46,87	7,25	15,47	32,66	61,08
Maluku	32,16	8,79	27,34 ¹	14,93	49,40
Maluku Utara	17,97	7,89	43,92 ¹	2,50	33,43
Papua Barat	17,94	8,94	49,81 ¹	0,42	35,46
Papua Barat Daya	32,64	10,62	32,55 ¹	11,81	53,47
Papua	NA	–	62,48 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	90,58 ²	–	–
Papua Tengah	26,44	11,28	42,65 ¹	4,34	48,55
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	35,59	0,60	1,69	34,41	36,76

Lanjutan Tabel 2.45

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)
Aceh	33,43	2,16	6,47	29,19	37,67
Sumatera Utara	31,12	2,31	7,41	26,60	35,64
Sumatera Barat	26,57	1,87	7,06	22,89	30,24
Riau	21,20	2,99	14,08	15,34	27,05
Jambi	14,87	2,66	17,89	9,66	20,09
Sumatera Selatan	23,94	2,40	10,04	19,23	28,66
Bengkulu	37,42	3,41	9,12	30,73	44,10
Lampung	29,52	2,13	7,20	25,35	33,69
Kep. Bangka Belitung	27,88	4,22	15,14	19,60	36,15
Kep. Riau	31,13	6,47	20,78	18,45	43,81
DKI Jakarta	21,64	3,38	15,64	15,01	28,27
Jawa Barat	25,96	1,48	5,71	23,06	28,87
Jawa Tengah	33,40	1,40	4,19	30,65	36,14
DI Yogyakarta	30,39	2,84	9,35	24,83	35,96
Jawa Timur	30,67	1,19	3,87	28,35	33,00
Banten	18,08	2,79	15,43	12,61	23,54
Bali	26,42	2,16	8,18	22,18	30,65
Nusa Tenggara Barat	41,38	2,62	6,32	36,25	46,51
Nusa Tenggara Timur	43,04	4,15	9,63	34,91	51,16
Kalimantan Barat	17,70	2,98	16,82	11,86	23,53
Kalimantan Tengah	20,93	3,64	17,39	13,79	28,06
Kalimantan Selatan	31,30	3,10	9,91	25,22	37,38
Kalimantan Timur	14,75	3,27	22,16	8,34	21,16
Kalimantan Utara	25,32	6,64	26,21 ¹	12,31	38,34
Sulawesi Utara	29,60	3,76	12,69	22,24	36,96
Sulawesi Tengah	27,07	5,16	19,05	16,97	37,18
Sulawesi Selatan	32,50	3,12	9,61	26,38	38,62
Sulawesi Tenggara	42,42	5,36	12,64	31,91	52,93
Gorontalo	52,07	4,71	9,05	42,83	61,31
Sulawesi Barat	42,22	7,30	17,28	27,92	56,52
Maluku	35,97	7,83	21,76	20,63	51,31
Maluku Utara	45,03	8,08	17,94	29,19	60,86
Papua Barat	50,65	11,73	23,15	27,66	73,63
Papua Barat Daya	35,36	8,65	24,45	18,41	52,30
Papua	52,38	9,17	17,51	34,40	70,37
Papua Selatan	44,70	18,19	40,69 ¹	9,05	80,35
Papua Tengah	NA	—	95,13 ²	—	—
Papua Pegunungan	0,73	~0	0,35	0,73	0,74
Indonesia	29,25	0,52	1,79	28,22	30,27

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.46

Sampling Error Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Tipe Daerah					
Perkotaan	4,00	0,36	8,93	3,30	4,70
Perdesaan	5,39	0,32	5,87	4,77	6,01
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	4,74	0,33	7,06	4,08	5,40
Perempuan	4,59	0,28	6,07	4,05	5,14
Kelompok Umur					
0-4 tahun	3,98	0,68	17,01	2,65	5,31
0-17 tahun	3,35	0,70	20,97	1,98	4,73
18-59 tahun	4,58	0,31	6,84	3,97	5,20
60+ tahun	4,81	0,33	6,87	4,16	5,46
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	5,40	0,39	7,17	4,64	6,16
SD/Sederajat	4,91	0,40	8,21	4,12	5,71
SMP/Sederajat	4,03	0,52	12,81	3,02	5,04
SMA/Sederajat	3,85	0,49	12,80	2,89	4,82
Perguruan Tinggi	1,93	0,55	28,53 ¹	0,85	3,01
Status Ekonomi					
Kuintil 1	7,36	0,79	10,75	5,81	8,92
Kuintil 2	5,26	0,53	10,05	4,22	6,30
Kuintil 3	4,63	0,56	12,11	3,53	5,73
Kuintil 4	3,83	0,50	13,07	2,85	4,81
Kuintil 5	2,95	0,37	12,49	2,23	3,67
Indonesia	4,66	0,24	5,15	4,19	5,13



Lanjutan Tabel 2.46

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tipe Daerah					
Perkotaan	0,78	0,16	20,50	0,47	1,10
Perdesaan	1,18	0,20	17,14	0,78	1,57
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	0,93	0,16	17,16	0,62	1,25
Perempuan	1,00	0,15	15,33	0,70	1,30
Kelompok Umur					
0-4 tahun	0,64	0,23	35,63 ¹	0,19	1,08
0-17 tahun	0,52	0,26	48,87 ¹	0,02	1,03
18-59 tahun	0,88	0,16	18,57	0,56	1,20
60+ tahun	1,08	0,16	14,87	0,76	1,39
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	1,04	0,17	16,69	0,70	1,39
SD/Sederajat	1,01	0,19	18,75	0,64	1,38
SMP/Sederajat	0,90	0,24	26,90 ¹	0,43	1,37
SMA/Sederajat	0,79	0,29	37,34 ¹	0,21	1,36
Perguruan Tinggi	0,93	0,41	44,67 ¹	0,12	1,73
Status Ekonomi					
Kuintil 1	1,31	0,31	23,41	0,71	1,92
Kuintil 2	1,50	0,42	27,88 ¹	0,68	2,32
Kuintil 3	1,27	0,36	28,25 ¹	0,57	1,98
Kuintil 4	0,56	0,15	26,52 ¹	0,27	0,85
Kuintil 5	0,35	0,09	25,78 ¹	0,17	0,52
Indonesia	0,97	0,13	13,16	0,72	1,22

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSEs 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.47
Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk
Rawat Inap, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	72,66 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	54,67 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	61,41 ²	–	–
R i a u	NA	–	74,61 ²	–	–
J a m b i	9,21	3,46	37,52 ¹	2,43	16,00
Sumatera Selatan	16,13	4,06	25,15 ¹	8,18	24,09
Bengkulu	NA	–	102,62 ²	–	–
Lampung	5,15	2,51	48,73 ¹	0,23	10,08
Kep. Bangka Belitung	NA	–	72,34 ²	–	–
Kep. Riau	1,43	0,30	21,06	0,84	2,02
DKI Jakarta	NA	–	101,51 ²	–	–
Jawa Barat	4,96	1,74	35,13 ¹	1,54	8,37
Jawa Tengah	4,95	1,33	26,93 ¹	2,34	7,56
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	12,69	2,40	18,90	7,98	17,39
Banten	NA	–	102,07 ²	–	–
B a l i	NA	–	101,38 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	65,61 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	1,66	0,32	19,41	1,03	2,29
Kalimantan Barat	NA	–	100,54 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	98,98 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	68,12 ²	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	11,64	1,59	13,67	8,52	14,76
Sulawesi Utara	NA	–	92,39 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	96,81 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	102,08 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	87,98 ²	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	21,66	3,11	14,35	15,56	27,75
Maluku	NA	–	61,46 ²	-1,64	17,57
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	13,95	1,93	13,86	10,16	17,74
Papua Barat Daya	NA	–	87,55 ²	–	–
Papua	NA	–	85,34 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	92,69 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	6,04	0,68	11,28	4,71	7,38

Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	–	–	NA	–	–
Sumatera Utara	NA	–	100,39 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	100,61 ²	–	–
Riau	NA	–	99,96 ²	–	–
Jambi	NA	–	71,77 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	76,15 ²	–	–
Bengkulu	–	–	NA	–	–
Lampung	NA	–	100,36 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	NA	–	79,39 ²	–	–
Jawa Tengah	–	–	NA	–	–
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	NA	–	78,42 ²	–	–
Banten	NA	–	101,55 ²	–	–
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,27 ²	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	0,19	0,04	20,31	0,12	0,27
Sulawesi Selatan	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	27,82	3,86	13,86	20,26	35,38
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,39	0,14	36,69¹	0,11	0,67



Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Kartu JKN Tidak Aktif				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	–	–	NA	–	–
Sumatera Utara	7,46	2,19	29,32 ¹	3,17	11,74
Sumatera Barat	19,39	5,43	28,02 ¹	8,74	30,05
Riau	10,66	4,37	41,02 ¹	2,09	19,24
Jambi	18,26	4,84	26,54 ¹	8,75	27,76
Sumatera Selatan	6,86	2,82	41,17 ¹	1,32	12,40
Bengkulu	12,58	4,68	37,16 ¹	3,41	21,75
Lampung	22,35	5,07	22,71	12,40	32,30
Kep. Bangka Belitung	NA	–	54,94 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	71,11 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	75,19 ²	–	–
Jawa Barat	10,30	2,08	20,23	6,21	14,38
Jawa Tengah	15,60	2,60	16,65	10,51	20,69
DI Yogyakarta	NA	–	55,45 ²	–	–
Jawa Timur	14,41	2,62	18,14	9,28	19,54
Banten	4,91	2,21	44,97 ¹	0,58	9,25
Bali	NA	–	58,00 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	24,13	7,59	31,45 ¹	9,25	39,01
Nusa Tenggara Timur	36,29	10,91	30,06 ¹	14,90	57,69
Kalimantan Barat	8,08	3,74	46,21 ¹	0,76	15,41
Kalimantan Tengah	NA	–	66,65 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	77,56 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	55,26 ²	–	–
Kalimantan Utara	6,86	0,94	13,67	5,02	8,70
Sulawesi Utara	23,26	6,75	29,03 ¹	10,02	36,50
Sulawesi Tengah	34,66	11,26	32,48 ¹	12,58	56,74
Sulawesi Selatan	21,87	6,35	29,01 ¹	9,43	34,32
Sulawesi Tenggara	17,14	8,32	48,51 ¹	0,83	33,45
Gorontalo	34,08	1,20	3,53	31,72	36,44
Sulawesi Barat	17,03	7,64	44,85 ¹	2,05	32,02
Maluku	12,37	5,88	47,56 ¹	0,83	23,91
Maluku Utara	36,29	14,59	40,19 ¹	7,69	64,90
Papua Barat	NA	–	111,44 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	102,41 ²	–	–
Papua	NA	–	60,43 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	107,37 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	103,31 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	12,31	0,91	7,37	10,53	14,09

Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	11,10	1,86	16,79	7,45	14,76
Sumatera Utara	NA	–	50,77 ²	–	–
Sumatera Barat	8,81	2,86	32,44 ¹	3,21	14,42
Riau	NA	–	51,12 ²	–	–
Jambi	14,21	4,62	32,54 ¹	5,14	23,27
Sumatera Selatan	10,11	3,88	38,41 ¹	2,49	17,73
Bengkulu	2,87	1,25	43,60 ¹	0,42	5,32
Lampung	5,95	1,96	32,84 ¹	2,12	9,79
Kep. Bangka Belitung	17,25	8,01	46,45 ¹	1,54	32,97
Kep. Riau	NA	–	56,74 ²	–	–
DKI Jakarta	30,41	10,24	33,67 ¹	10,33	50,49
Jawa Barat	13,79	3,46	25,12 ¹	7,00	20,58
Jawa Tengah	6,19	1,74	28,06 ¹	2,78	9,59
DI Yogyakarta	26,57	8,11	30,55 ¹	10,65	42,48
Jawa Timur	5,40	1,50	27,80 ¹	2,46	8,35
Banten	24,94	12,25	49,14 ¹	0,91	48,97
Bali	NA	–	51,65 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	100,45 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	60,42 ²	–	–
Kalimantan Barat	17,76	5,58	31,41 ¹	6,82	28,70
Kalimantan Tengah	NA	–	87,50 ²	–	–
Kalimantan Selatan	19,57	6,79	34,70 ¹	6,25	32,89
Kalimantan Timur	42,19	6,08	14,41	30,27	54,11
Kalimantan Utara	0,84	0,12	13,67	0,62	1,07
Sulawesi Utara	33,12	3,64	10,98	25,99	40,25
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	83,83 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	78,14 ²	–	–
Gorontalo	43,09	2,51	5,83	38,17	48,02
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	59,30 ²	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	NA	–	97,86 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	11,65	1,27	10,87	9,17	14,13



Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Estimate	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi			
		Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(22)	(23)	(24)	Lower (25)	Upper (26)
Aceh	21,44	7,83	36,53 ¹	6,08	36,81
Sumatera Utara	9,28	3,65	39,30 ¹	2,13	16,44
Sumatera Barat	21,94	4,69	21,35	12,76	31,13
Riau	17,09	3,43	20,07	10,36	23,81
Jambi	15,97	4,70	29,44 ¹	6,75	25,19
Sumatera Selatan	6,26	1,99	31,75 ¹	2,36	10,15
Bengkulu	NA	–	50,39 ²	–	–
Lampung	10,27	3,31	32,22 ¹	3,78	16,76
Kep. Bangka Belitung	30,86	10,03	32,50 ¹	11,19	50,52
Kep. Riau	NA	–	101,69 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	66,58 ²	–	–
Jawa Barat	10,31	2,76	26,75 ¹	4,90	15,73
Jawa Tengah	14,26	2,01	14,09	10,32	18,20
DI Yogyakarta	28,79	8,22	28,56 ¹	12,67	44,91
Jawa Timur	17,24	2,81	16,27	11,74	22,75
Banten	12,01	4,95	41,25 ¹	2,29	21,72
Bali	NA	–	79,15 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	11,42	3,74	32,77 ¹	4,08	18,77
Nusa Tenggara Timur	NA	–	50,09 ²	–	–
Kalimantan Barat	16,69	4,81	28,82 ¹	7,26	26,13
Kalimantan Tengah	15,07	4,91	32,61 ¹	5,43	24,70
Kalimantan Selatan	NA	–	72,80 ²	–	–
Kalimantan Timur	11,89	5,42	45,62 ¹	1,25	22,53
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	62,81 ²	–	–
Sulawesi Tengah	36,15	16,95	46,88 ¹	2,91	69,39
Sulawesi Selatan	17,64	7,94	45,00 ¹	2,07	33,21
Sulawesi Tenggara	18,11	8,85	48,85 ¹	0,76	35,46
Gorontalo	NA	–	97,96 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	64,32 ²	–	–
Maluku	NA	–	92,22 ²	–	–
Maluku Utara	18,91	2,35	12,43	14,30	23,52
Papua Barat	54,74	9,32	17,02	36,46	73,01
Papua Barat Daya	NA	–	50,90 ²	–	–
Papua	0,79	0,15	19,13	0,49	1,08
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	86,97 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	12,91	0,98	7,61	10,99	14,84

Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
	Lower	Upper			
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Aceh	NA	—	60,12 ²	—	—
Sumatera Utara	11,20	5,53	49,37 ¹	0,36	22,04
Sumatera Barat	11,87	5,48	46,17 ¹	1,12	22,62
R i a u	7,77	3,72	47,88 ¹	0,47	15,06
J a m b i	NA	—	60,57 ²	—	—
Sumatera Selatan	16,32	5,36	32,83 ¹	5,81	26,83
Bengkulu	NA	—	98,30 ²	—	—
Lampung	9,68	3,03	31,31 ¹	3,73	15,62
Kep. Bangka Belitung	NA	—	100,77 ²	—	—
Kep. Riau	NA	—	104,47 ²	—	—
DKI Jakarta	NA	—	99,00 ²	—	—
Jawa Barat	7,87	1,99	25,25 ¹	3,97	11,77
Jawa Tengah	3,31	1,42	43,00 ¹	0,52	6,10
DI Yogyakarta	NA	—	101,56 ²	—	—
Jawa Timur	4,50	1,45	32,34 ¹	1,64	7,35
Banten	NA	—	101,55 ²	—	—
B a l i	NA	—	76,99 ²	—	—
Nusa Tenggara Barat	NA	—	78,77 ²	—	—
Nusa Tenggara Timur	NA	—	100,83 ²	—	—
Kalimantan Barat	NA	—	69,68 ²	—	—
Kalimantan Tengah	NA	—	99,66 ²	—	—
Kalimantan Selatan	NA	—	72,08 ²	—	—
Kalimantan Timur	—	—	NA	—	—
Kalimantan Utara	—	—	NA	—	—
Sulawesi Utara	1,82	0,18	9,63	1,48	2,17
Sulawesi Tengah	—	—	NA	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	104,03 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	NA	—	101,85 ²	—	—
Gorontalo	—	—	NA	—	—
Sulawesi Barat	—	—	NA	—	—
Maluku	NA	—	108,92 ²	—	—
Maluku Utara	—	—	NA	—	—
Papua Barat	—	—	NA	—	—
Papua Barat Daya	NA	—	103,43 ²	—	—
Papua	—	—	NA	—	—
Papua Selatan	—	—	NA	—	—
Papua Tengah	NA	—	60,35 ²	—	—
Papua Pegunungan	—	—	NA	—	—
Indonesia	5,60	0,70	12,42	4,24	6,96



Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	<i>RSE</i>	<i>95% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Aceh	3,18	1,03	32,44 ¹	1,16	5,21
Sumatera Utara	5,18	1,69	32,66 ¹	1,86	8,50
Sumatera Barat	NA	–	61,18 ²	–	–
Riau	6,23	2,24	36,04 ¹	1,83	10,63
Jambi	17,78	4,21	23,66	9,53	26,03
Sumatera Selatan	7,89	2,73	34,56 ¹	2,54	13,23
Bengkulu	NA	–	74,77 ²	–	–
Lampung	16,10	4,59	28,51 ¹	7,10	25,10
Kep. Bangka Belitung	NA	–	62,72 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	106,05 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	101,45 ²	–	–
Jawa Barat	8,50	2,94	34,54 ¹	2,74	14,27
Jawa Tengah	7,49	2,73	36,42 ¹	2,14	12,84
DI Yogyakarta	NA	–	100,36 ²	–	–
Jawa Timur	5,21	1,36	26,05 ¹	2,55	7,88
Banten	NA	–	58,31 ²	–	–
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	18,45	5,72	30,99 ¹	7,24	29,66
Nusa Tenggara Timur	NA	–	76,73 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	101,44 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	55,80 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	76,22 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	87,50 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	69,66 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	91,38 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	101,64 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	100,27 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	98,62 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	NA	–	105,39 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	104,97 ²	–	–
Papua	14,35	2,75	19,13	8,97	19,74
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	26,95	11,16	41,42 ¹	5,06	48,84
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	7,40	0,94	12,74	5,55	9,24

Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
Aceh	33,09	7,26	21,94	18,85	47,32
Sumatera Utara	36,24	6,32	17,44	23,84	48,63
Sumatera Barat	13,17	3,80	28,82 ¹	5,73	20,62
Riau	17,58	3,93	22,37	9,87	25,29
Jambi	11,94	3,85	32,26 ¹	4,39	19,49
Sumatera Selatan	18,78	4,27	22,74	10,41	27,16
Bengkulu	27,21	8,60	31,61 ¹	10,34	44,08
Lampung	14,12	2,93	20,73	8,38	19,86
Kep. Bangka Belitung	20,31	8,52	41,94 ¹	3,60	37,01
Kep. Riau	NA	–	54,33 ²	–	–
DKI Jakarta	34,52	9,88	28,60 ¹	15,16	53,89
Jawa Barat	24,22	3,53	14,59	17,29	31,15
Jawa Tengah	29,07	2,79	9,59	23,60	34,54
DI Yogyakarta	18,07	6,91	38,24 ¹	4,52	31,63
Jawa Timur	33,99	3,45	10,14	27,23	40,74
Banten	41,52	9,42	22,70	23,04	60,00
Bali	41,72	11,95	28,66 ¹	18,27	65,16
Nusa Tenggara Barat	16,48	4,45	26,98 ¹	7,76	25,20
Nusa Tenggara Timur	10,41	4,58	43,98 ¹	1,43	19,38
Kalimantan Barat	37,26	7,65	20,53	22,26	52,26
Kalimantan Tengah	34,56	9,76	28,24 ¹	15,42	53,69
Kalimantan Selatan	22,81	7,24	31,74 ¹	8,61	37,01
Kalimantan Timur	11,69	3,98	34,05 ¹	3,88	19,50
Kalimantan Utara	76,33	3,24	4,24	69,99	82,68
Sulawesi Utara	6,14	2,70	43,91 ¹	0,85	11,43
Sulawesi Tengah	8,92	1,81	20,31	5,37	12,47
Sulawesi Selatan	27,78	10,57	38,06 ¹	7,04	48,51
Sulawesi Tenggara	24,85	4,69	18,89	15,64	34,05
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	23,20	11,27	48,59 ¹	1,09	45,31
Maluku	52,10	16,74	32,13 ¹	19,27	84,93
Maluku Utara	6,20	0,77	12,43	4,69	7,72
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	74,47	12,01	16,13	50,91	98,02
Papua	NA	–	103,51 ²	–	–
Papua Selatan	9,15	4,42	48,32 ¹	0,48	17,81
Papua Tengah	43,26	12,88	29,77 ¹	18,01	68,52
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	27,14	1,34	4,95	24,50	29,77



Lanjutan Tabel 2.47

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(42)	(43)	(44)	Lower (45)	Upper (46)
Aceh	35,95	8,19	22,77	19,90	52,01
Sumatera Utara	24,38	6,13	25,15 ¹	12,35	36,40
Sumatera Barat	18,14	4,33	23,85	9,65	26,62
Riau	36,49	5,92	16,21	24,89	48,09
Jambi	7,79	3,06	39,31 ¹	1,78	13,80
Sumatera Selatan	23,44	6,54	27,90 ¹	10,61	36,26
Bengkulu	43,52	8,73	20,05	26,41	60,64
Lampung	20,08	4,68	23,30	10,91	29,26
Kep. Bangka Belitung	NA	–	55,27 ²	–	–
Kep. Riau	53,53	19,43	36,30 ¹	15,42	91,63
DKI Jakarta	23,81	11,54	48,46 ¹	1,18	46,44
Jawa Barat	25,03	4,05	16,17	17,09	32,96
Jawa Tengah	24,14	2,49	10,30	19,27	29,02
DI Yogyakarta	27,50	7,28	26,46 ¹	13,23	41,78
Jawa Timur	17,41	2,56	14,68	12,40	22,42
Banten	8,96	3,81	42,59 ¹	1,48	16,44
Bali	18,98	6,11	32,18 ¹	7,00	30,97
Nusa Tenggara Barat	25,00	6,56	26,23 ¹	12,14	37,86
Nusa Tenggara Timur	25,55	8,17	31,97 ¹	9,53	41,57
Kalimantan Barat	18,99	6,05	31,84 ¹	7,13	30,85
Kalimantan Tengah	16,78	7,97	47,50 ¹	1,15	32,41
Kalimantan Selatan	37,35	6,87	18,40	23,87	50,83
Kalimantan Timur	19,31	5,66	29,33 ¹	8,20	30,41
Kalimantan Utara	4,32	0,59	13,67	3,16	5,48
Sulawesi Utara	11,35	4,70	41,43 ¹	2,13	20,58
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	15,23	4,36	28,64 ¹	6,68	23,79
Sulawesi Tenggara	26,22	10,26	39,13 ¹	6,10	46,35
Gorontalo	18,11	4,07	22,47	10,13	26,09
Sulawesi Barat	NA	–	77,64 ²	–	–
Maluku	27,73	12,01	43,33 ¹	4,17	51,29
Maluku Utara	28,14	3,58	12,71	21,12	35,15
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	57,80 ²	–	–
Papua	40,10	17,41	43,42 ¹	5,95	74,24
Papua Selatan	NA	–	87,15 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	106,18 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	22,23	1,36	6,13	19,56	24,90

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 2.48
Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda
untuk Rawat Inap, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	3,56	0,56	15,65	2,46	4,65
Perdesaan	9,72	1,45	14,91	6,88	12,56
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	7,19	1,09	15,13	5,05	9,32
Perempuan	5,20	0,72	13,89	3,78	6,62
Kelompok Umur					
0-4 tahun	3,47	0,40	11,60	2,66	4,27
0-17 tahun	NA	—	54,11 ²	—	—
18-59 tahun	5,77	0,78	13,45	4,25	7,29
60+ tahun	6,54	1,09	16,64	4,41	8,68
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	6,94	1,28	18,38	4,44	9,45
SD/Sederajat	8,04	1,57	19,60	4,95	11,12
SMP/Sederajat	7,25	1,78	24,54	3,76	10,74
SMA/Sederajat	4,82	1,15	23,94	2,55	7,08
Perguruan Tinggi	1,72	0,77	44,63 ¹	0,21	3,22
Status Ekonomi					
Kuintil 1	15,08	3,59	23,79	8,05	22,12
Kuintil 2	7,57	1,94	25,66 ¹	3,76	11,38
Kuintil 3	6,03	1,82	30,23 ¹	2,46	9,61
Kuintil 4	7,94	1,57	19,76	4,86	11,02
Kuintil 5	2,55	0,70	27,31 ¹	1,18	3,91
Indonesia	6,04	0,68	11,28	4,71	7,38



Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tipe Daerah					
Perkotaan	NA	–	61,32 ²	–	–
Perdesaan	0,52	0,23	43,29 ¹	0,08	0,96
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	NA	–	53,66 ²	–	–
Perempuan	0,31	0,12	39,39 ¹	0,07	0,54
Kelompok Umur					
0–4 tahun	0,36	0,02	4,26	0,33	0,39
0-17 tahun	–	–	NA	–	–
18-59 tahun	0,30	0,12	40,96 ¹	0,06	0,54
60+ tahun	NA	–	52,29 ²	–	–
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	NA	–	56,89 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	51,63 ²	–	–
SMP/Sederajat	–	–	NA	–	–
SMA/Sederajat	NA	–	79,70 ²	–	–
Perguruan Tinggi	NA	–	76,31 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	61,74 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	71,96 ²	–	–
Kuintil 3	NA	–	62,22 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	61,06 ²	–	–
Kuintil 5	NA	–	94,42 ²	–	–
Indonesia	0,39	0,14	36,69¹	0,11	0,67

Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Kartu JKN Tidak Aktif				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tipe Daerah					
Perkotaan	9,12	0,98	10,71	7,21	11,04
Perdesaan	17,02	1,69	9,94	13,71	20,34
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	14,31	1,48	10,34	11,41	17,22
Perempuan	10,83	1,10	10,11	8,68	12,98
Kelompok Umur					
0-4 tahun	9,92	1,35	13,57	7,23	12,62
0-17 tahun	12,95	4,07	31,41 ¹	4,97	20,92
18-59 tahun	13,03	1,22	9,33	10,65	15,42
60+ tahun	11,20	1,31	11,71	8,63	13,77
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	10,80	1,43	13,28	7,99	13,61
SD/Sederajat	19,88	2,52	12,65	14,95	24,82
SMP/Sederajat	11,85	1,87	15,78	8,18	15,52
SMA/Sederajat	13,97	2,18	15,61	9,69	18,24
Perguruan Tinggi	2,82	0,93	32,95 ¹	1,00	4,63
Status Ekonomi					
Kuintil 1	26,01	3,90	15,01	18,36	33,67
Kuintil 2	13,33	2,39	17,96	8,63	18,02
Kuintil 3	13,36	2,09	15,67	9,25	17,46
Kuintil 4	14,64	2,21	15,07	10,31	18,97
Kuintil 5	7,27	1,15	15,81	5,01	9,52
Indonesia	12,31	0,91	7,37	10,53	14,09



Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tipe Daerah					
Perkotaan	17,79	2,01	11,30	13,84	21,73
Perdesaan	2,58	0,71	27,67 ¹	1,18	3,98
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	11,00	1,80	16,35	7,48	14,53
Perempuan	12,13	1,31	10,83	9,55	14,70
Kelompok Umur					
0-4 tahun	16,02	3,37	21,01	9,29	22,74
0-17 tahun	10,65	3,13	29,37 ¹	4,52	16,79
18-59 tahun	11,99	1,30	10,85	9,44	14,54
60+ tahun	11,24	1,88	16,68	7,56	14,92
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	11,90	2,22	18,66	7,55	16,26
SD/Sederajat	3,41	1,11	32,61 ¹	1,23	5,59
SMP/Sederajat	6,40	1,61	25,21 ¹	3,24	9,57
SMA/Sederajat	10,30	1,77	17,23	6,82	13,78
Perguruan Tinggi	30,62	4,09	13,34	22,61	38,63
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	—	100,39 ²	—	—
Kuintil 2	1,32	0,60	45,50 ¹	0,14	2,51
Kuintil 3	2,98	1,00	33,38 ¹	1,03	4,94
Kuintil 4	5,96	1,19	19,96	3,63	8,29
Kuintil 5	23,23	2,73	11,75	17,88	28,58
Indonesia	11,65	1,27	10,87	9,17	14,13

Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Tipe Daerah					
Perkotaan	12,90	1,38	10,66	10,20	15,60
Perdesaan	12,92	1,34	10,35	10,30	15,55
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	12,13	1,45	11,93	9,29	14,96
Perempuan	13,49	1,22	9,02	11,11	15,88
Kelompok Umur					
0-4 tahun	12,61	2,31	18,34	7,99	17,24
0-17 tahun	18,86	7,75	41,11 ¹	3,66	34,07
18-59 tahun	13,31	1,22	9,19	10,91	15,71
60+ tahun	11,83	1,34	11,31	9,21	14,46
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	10,78	1,51	14,00	7,82	13,75
SD/Sederajat	15,55	1,92	12,34	11,79	19,31
SMP/Sederajat	14,61	2,78	19,05	9,16	20,07
SMA/Sederajat	12,64	1,99	15,75	8,74	16,55
Perguruan Tinggi	12,46	2,76	22,15	7,05	17,87
Status Ekonomi					
Kuintil 1	12,27	2,61	21,30	7,14	17,39
Kuintil 2	13,99	2,75	19,64	8,60	19,38
Kuintil 3	14,76	2,60	17,64	9,65	19,86
Kuintil 4	11,22	1,69	15,09	7,90	14,54
Kuintil 5	12,86	1,74	13,52	9,45	16,27
Indonesia	12,91	0,98	7,61	10,99	14,84



Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	<i>RSE</i>	<i>95% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Tipe Daerah					
Perkotaan	4,36	0,87	20,06	2,64	6,07
Perdesaan	7,43	1,13	15,23	5,21	9,65
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	4,02	0,80	19,79	2,46	5,58
Perempuan	6,76	1,06	15,72	4,68	8,85
Kelompok Umur					
0-4 tahun	3,02	0,54	17,91	1,94	4,11
0-17 tahun	NA	–	56,23 ²	–	–
18-59 tahun	6,31	1,03	16,37	4,29	8,34
60+ tahun	4,37	0,85	19,54	2,69	6,04
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	4,86	1,01	20,74	2,88	6,84
SD/Sederajat	4,76	1,14	23,93	2,53	7,00
SMP/Sederajat	4,40	1,67	37,94 ¹	1,13	7,67
SMA/Sederajat	7,94	1,90	23,96	4,21	11,67
Perguruan Tinggi	6,22	2,43	39,05 ¹	1,46	10,98
Status Ekonomi					
Kuintil 1	6,67	2,29	34,25 ¹	2,19	11,15
Kuintil 2	7,93	2,10	26,45 ¹	3,82	12,04
Kuintil 3	7,41	2,21	29,84 ¹	3,08	11,75
Kuintil 4	7,88	1,78	22,63	4,38	11,38
Kuintil 5	2,95	0,83	28,23 ¹	1,32	4,58
Indonesia	5,60	0,70	12,42	4,24	6,96

Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Tipe Daerah					
Perkotaan	4,38	1,14	26,00 ¹	2,15	6,61
Perdesaan	11,85	1,60	13,51	8,71	14,99
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	6,72	1,33	19,80	4,11	9,33
Perempuan	7,89	1,05	13,27	5,84	9,95
Kelompok Umur					
0-4 tahun	6,38	2,49	38,99 ¹	1,41	11,36
0-17 tahun	NA	–	61,48 ²	–	–
18-59 tahun	6,87	1,03	15,03	4,85	8,90
60+ tahun	8,62	1,46	16,93	5,76	11,49
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	8,92	1,68	18,90	5,61	12,22
SD/Sederajat	8,08	1,74	21,53	4,67	11,50
SMP/Sederajat	8,53	2,02	23,74	4,56	12,49
SMA/Sederajat	4,74	1,23	25,95 ¹	2,33	7,15
Perguruan Tinggi	5,80	2,66	45,85 ¹	0,58	11,01
Status Ekonomi					
Kuintil 1	16,06	3,29	20,46	9,62	22,51
Kuintil 2	6,09	1,47	24,23	3,19	8,98
Kuintil 3	9,50	2,21	23,24	5,17	13,83
Kuintil 4	5,57	1,39	24,93	2,85	8,30
Kuintil 5	5,79	1,77	30,50 ¹	2,33	9,25
Indonesia	7,40	0,94	12,74	5,55	9,24



Lanjutan Tabel 2.48

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(42)	(43)	(44)	Lower (45)	Upper (46)
Tipe Daerah					
Perkotaan	22,88	1,99	8,68	18,98	26,77
Perdesaan	21,27	1,67	7,84	18,00	24,54
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	21,80	2,01	9,21	17,86	25,74
Perempuan	22,55	1,55	6,89	19,50	25,59
Kelompok Umur					
0-4 tahun	21,92	4,12	18,78	13,69	30,14
0-17 tahun	11,36	3,47	30,50 ¹	4,56	18,15
18-59 tahun	24,09	1,64	6,81	20,87	27,30
60+ tahun	20,43	1,92	9,38	16,67	24,19
Pendidikan yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat	20,22	2,21	10,91	15,89	24,54
SD/Sederajat	20,02	2,18	10,89	15,74	24,29
SMP/Sederajat	26,83	3,68	13,72	19,61	34,06
SMA/Sederajat	24,75	2,84	11,49	19,17	30,33
Perguruan Tinggi	21,11	3,09	14,65	15,05	27,18
Status Ekonomi					
Kuintil 1	17,92	3,83	21,35	10,42	25,43
Kuintil 2	29,60	3,48	11,76	22,77	36,43
Kuintil 3	27,59	3,96	14,37	19,82	35,36
Kuintil 4	24,24	2,76	11,38	18,83	29,65
Kuintil 5	18,22	2,17	11,93	13,96	22,49
Indonesia	22,23	1,36	6,13	19,56	24,90

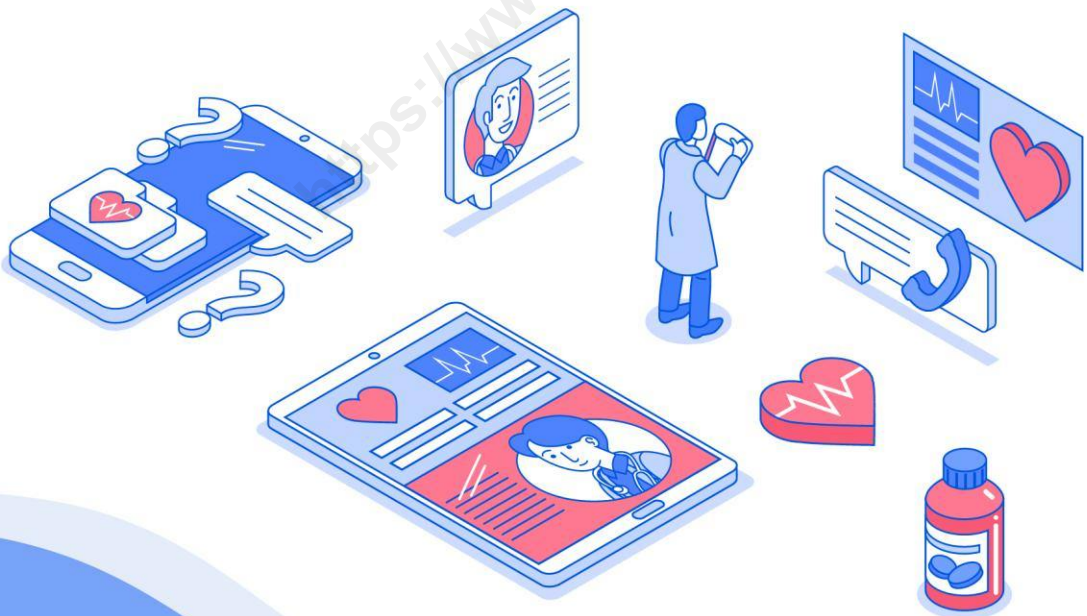
Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

3

KESEHATAN ANAK



Kesehatan anak merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada usia di bawah lima tahun (balita). Masa balita adalah periode emas (*golden age*) yang sangat menentukan tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Pada masa ini, anak memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi, imunisasi, serta lingkungan yang sehat dan aman. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan hingga masa tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, pemantauan kondisi kesehatan anak balita melalui data menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup anak di Indonesia.

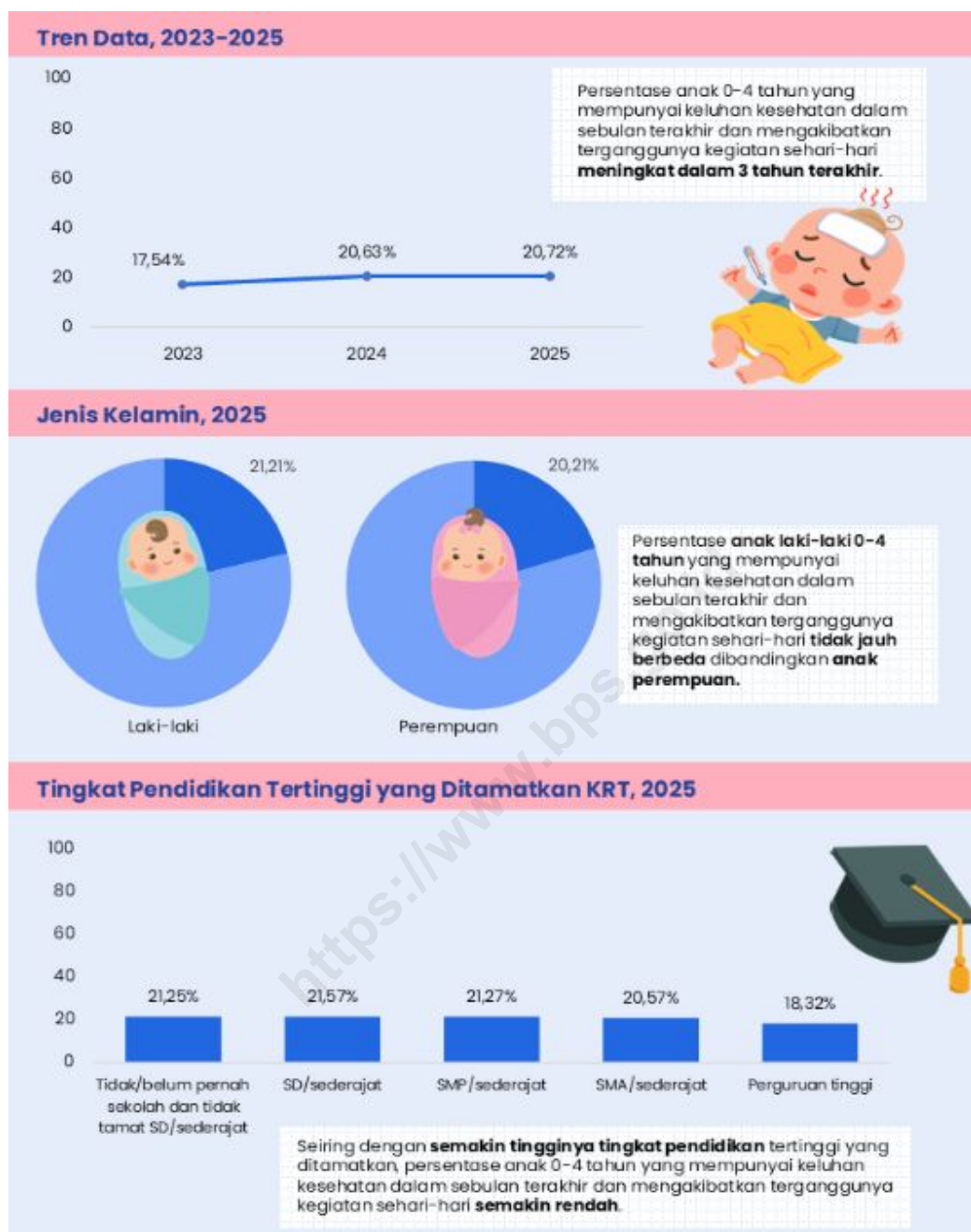
Bab III publikasi ini menyajikan gambaran kondisi kesehatan balita di Indonesia, di antaranya terkait keluhan kesehatan dan angka kesakitan pada balita, upaya kesehatan yang dilakukan, jaminan kesehatan yang dimiliki, pemberian imunisasi, serta praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada anak di bawah dua tahun (baduta).

3.1 Gambaran Kesehatan Balita Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan balita. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap anak berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. Oleh karena itu, analisis statistik terhadap balita yang mengalami keluhan kesehatan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan intervensi kesehatan, termasuk peningkatan ketahanan keluarga dalam menjaga kesehatan anak serta penguatan layanan promotif dan preventif di tingkat masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan ketika balita sakit adalah melakukan rawat jalan. Susenas mendefinisikan rawat jalan sebagai upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

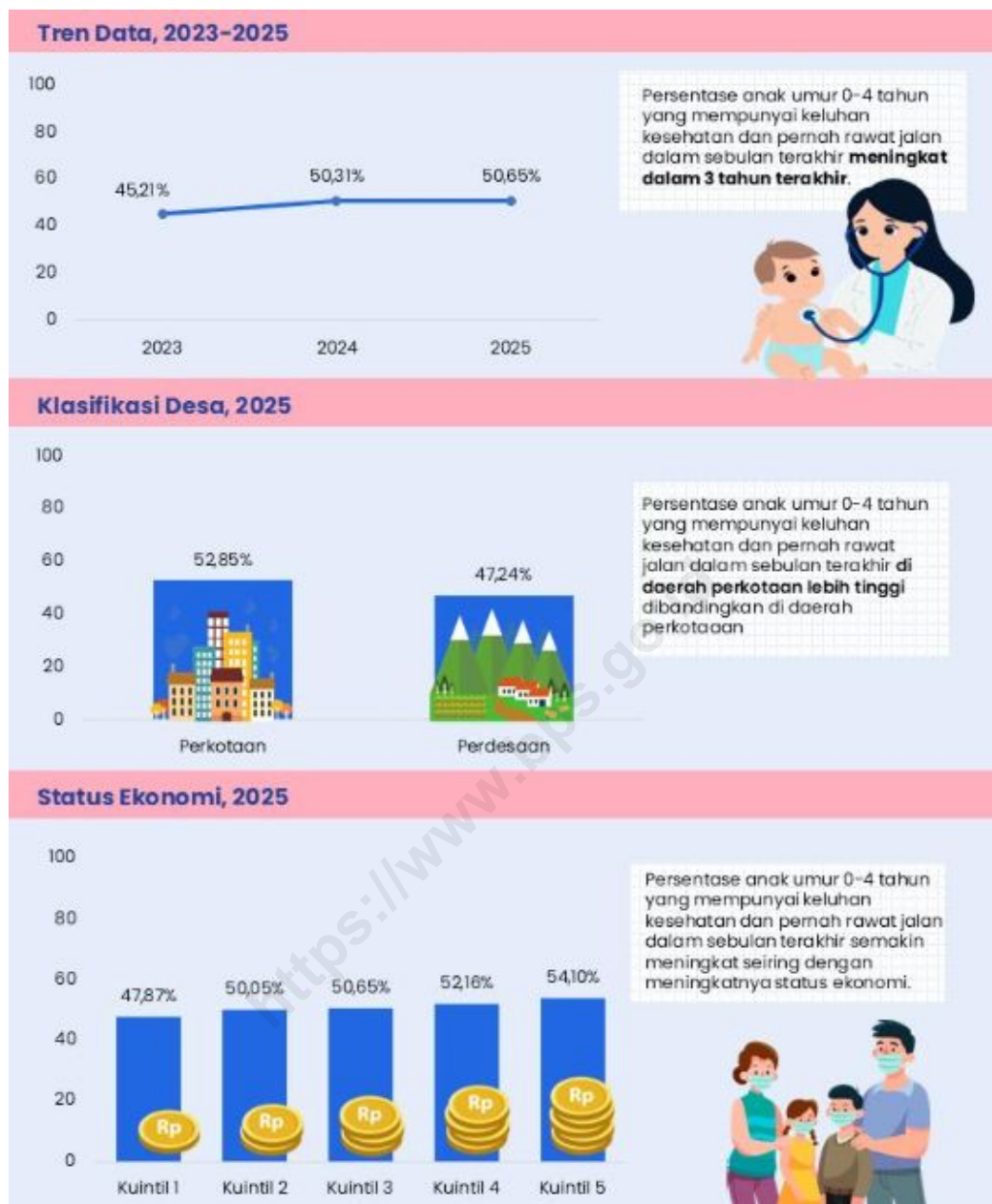




Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.1

Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2023–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.2

Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Gambar 3.2 menunjukkan adanya peningkatan persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir, yang sebelumnya 45,21 persen pada tahun 2023 menjadi 50,65 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini dapat menggambarkan adanya pemenuhan



kebutuhan kesehatan balita yang lebih baik, karena kebutuhan balita yang sakit adalah dengan mengakses fasilitas kesehatan untuk melakukan rawat jalan.

Berdasarkan klasifikasi desa, balita yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan di daerah perkotaan (52,85 persen) lebih tinggi daripada di daerah perdesaan (47,24 persen). Hal ini diduga karena akses ke fasilitas kesehatan di daerah perkotaan lebih mudah daripada di daerah perdesaan. Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah perkotaan relatif lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Status ekonomi rumah tangga merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi perilaku balita dalam mengakses fasilitas kesehatan ketika sakit. Gambar 3.2 menunjukkan semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka persentase anak umur 0–4 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir semakin meningkat. Balita yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang baik memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam mengakses fasilitas kesehatan, sehingga meningkatkan peluang untuk melakukan rawat jalan ketika sakit.

Tempat rawat jalan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan menyediakan layanan medis tanpa memerlukan perawatan inap. Pelayanan rawat jalan mencakup pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan medis yang dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik dokter mandiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam konteks tersebut, data mengenai tempat rawat jalan menjadi sumber informasi yang penting untuk menggambarkan pola pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat, menilai pemerataan akses, serta mengevaluasi efektivitas program pelayanan kesehatan di Indonesia.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa tempat rawat jalan yang paling banyak diakses oleh balita ketika mempunyai keluhan kesehatan adalah praktik dokter/bidan/perawat sebesar 45,43 persen, diikuti oleh puskesmas/puskesmas pembantu/puskesmas keliling sebesar 27,59 persen dan klinik sebesar 17,04 persen. Tempat yang paling jarang diakses oleh balita untuk rawat jalan ketika mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir adalah pelayanan kesehatan tradisional.

Tempat Rawat Jalan, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.3

Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025

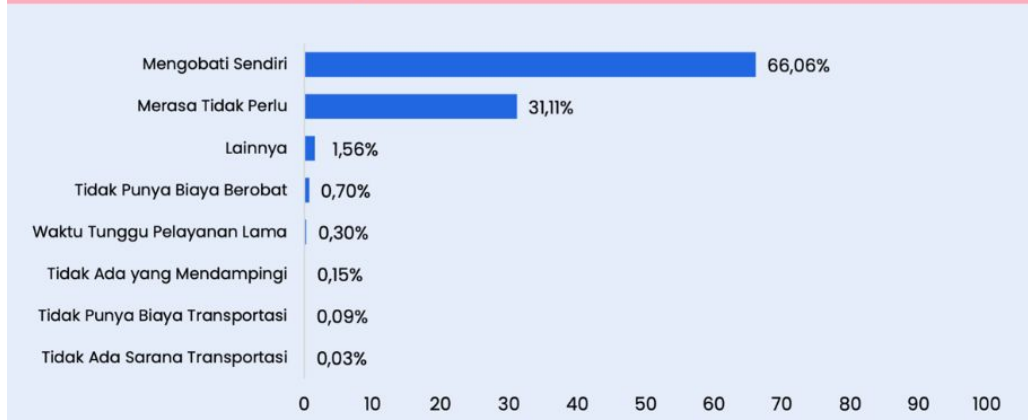
Rawat jalan merupakan salah satu kebutuhan anak ketika sakit. Namun demikian, hampir separuh balita yang mempunyai keluhan kesehatan tidak rawat jalan dalam sebulan terakhir. Untuk meningkatkan layanan kesehatan di masa mendatang, perlu untuk mencari penyebab anak-anak yang sakit tetapi tidak rawat jalan. Gambar 3.4 menunjukkan alasan terbanyak balita yang mempunyai keluhan kesehatan tetapi tidak rawat jalan dalam sebulan terakhir adalah mengobati sendiri sebesar 66,06 persen dan diikuti oleh alasan merasa tidak perlu sebesar 31,11 persen.

Sebagai alasan terbanyak, mengobati sendiri merupakan salah satu cara pertama orang tua dalam mengobati anaknya ketika sakit. Namun demikian, perlu dipastikan pengobatan sendiri yang dilakukan sudah tepat dan cepat. Orang tua perlu terus melakukan *update* ilmu terkait pertolongan pertama pada balita ketika sakit, serta kapan balita perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan pengobatan lebih lanjut. Sosialisasi terkait kedua hal ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan balita.

Praktik orang tua yang mengobati sendiri balitanya ketika sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya karena status ekonomi. Data Susenas menunjukkan bahwa secara umum persentase anak balita yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir akan semakin rendah seiring dengan meningkatnya status ekonomi. Persentase tertinggi terdapat pada kuintil 2 yaitu sebesar 69,87 persen (Tabel 3.6).



Alasan Tidak Rawat Jalan, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret

Gambar 3.4

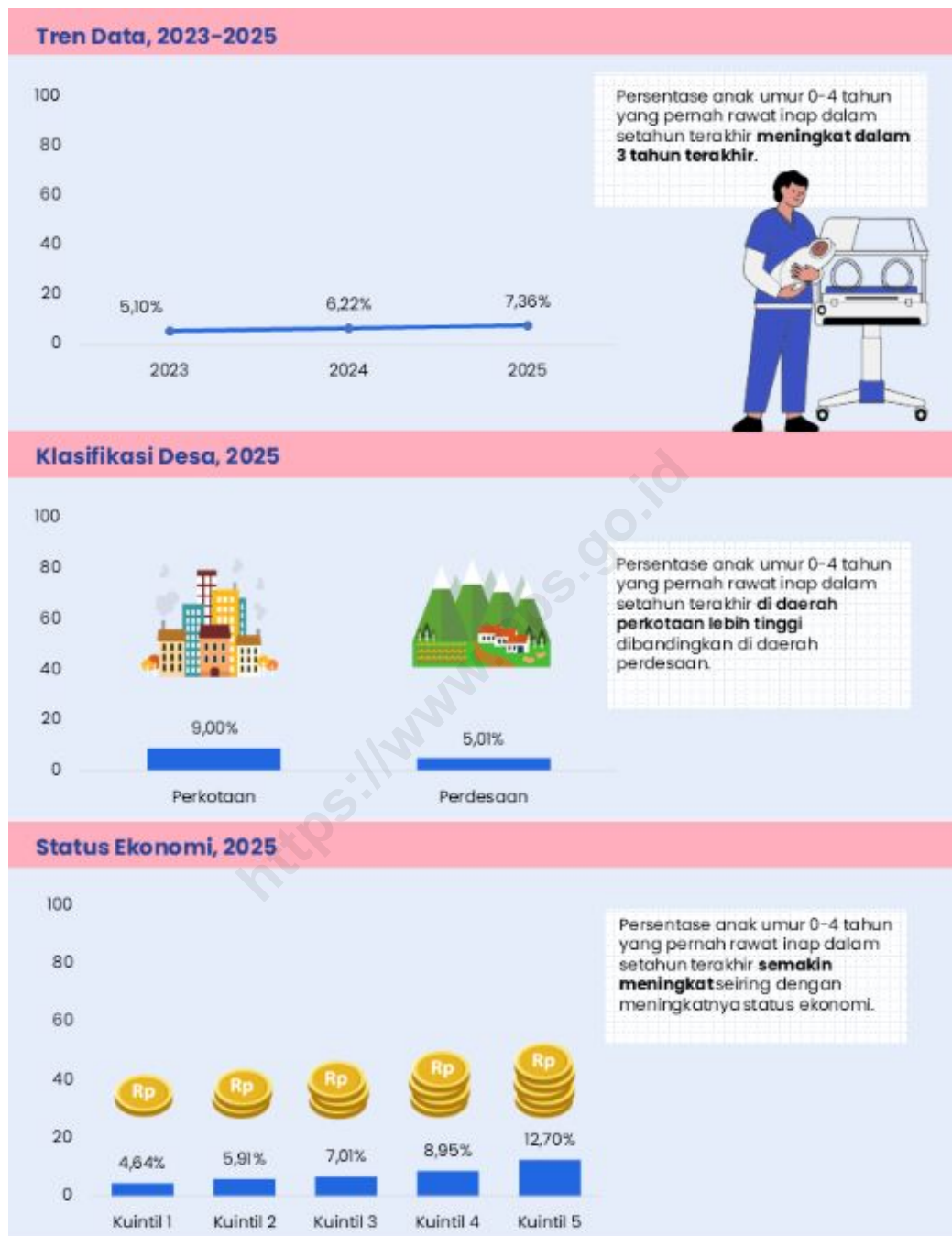
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Pelayanan rawat inap merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi memberikan penanganan intensif kepada pasien yang memerlukan observasi dan perawatan berkelanjutan. Balita yang sakit dan memerlukan observasi maupun penanganan yang lebih lanjut maka perlu mengakses pelayanan rawat inap. Layanan ini mencerminkan kemampuan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan fasilitas rawat inap, dalam memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat, dalam hal ini kepada balita.

Tren tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan persentase balita yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Pada tahun 2025, sebanyak 7 dari 100 anak balita di Indonesia pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Jika dilihat dari klasifikasi desa, persentase balita yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir di daerah perkotaan lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa balita di daerah perkotaan memiliki akses ke layanan kesehatan, khususnya rawat inap, yang lebih baik daripada di daerah perdesaan.

Gambar 3.5 menunjukkan semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka persentase balita yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir semakin meningkat. Hal ini dapat dipahami, karena balita yang hidup pada rumah tangga yang memiliki status ekonomi yang lebih baik tentunya akan lebih mudah dalam mengakses rawat inap. Meski jaminan kesehatan nasional sudah menjangkau hampir seluruh penduduk, biaya lainnya yang timbul akibat rawat inap tentu

menjadi pertimbangan sehingga status ekonomi memengaruhi keputusan rumah tangga untuk melakukan rawat inap.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.5
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

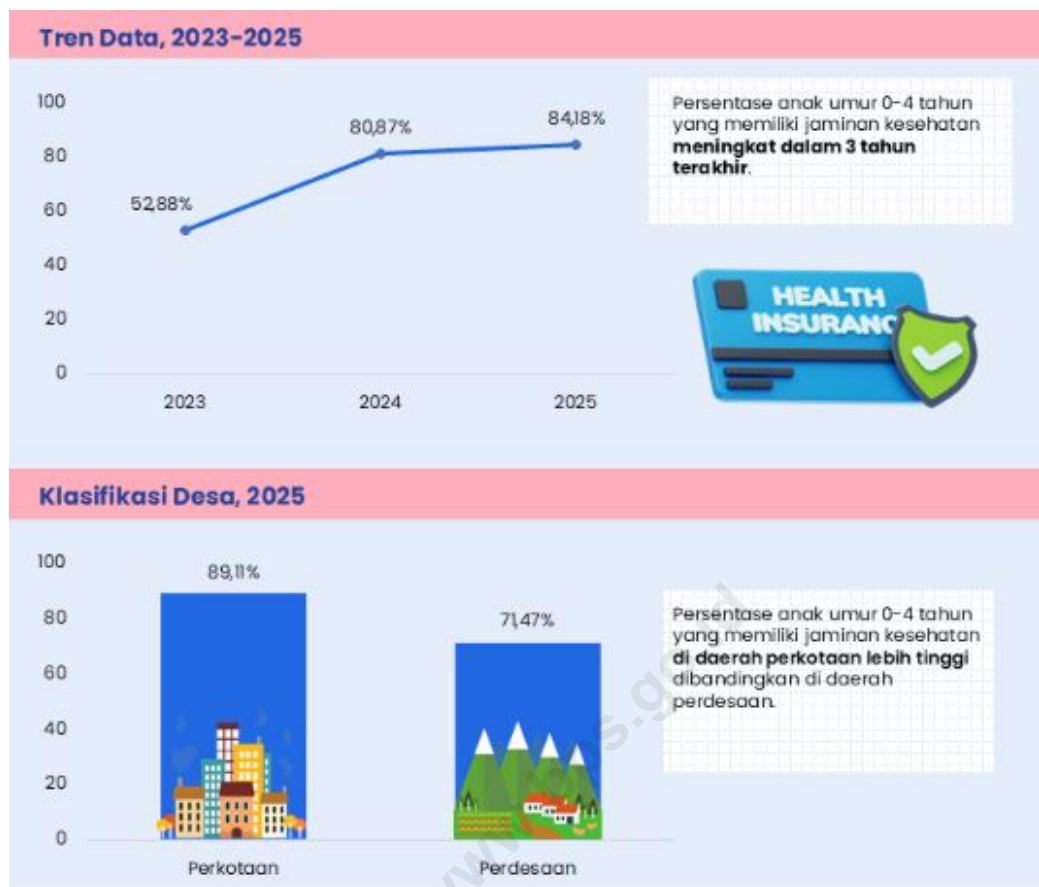


3.2 Kepemilikan Jaminan kesehatan sebagai Upaya Mewujudkan *Universal Health Coverage*

Negara menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, Pemerintah Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2011. Penyelenggaraan JKN diatur melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang menjamin setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, menyeluruh, dan bermutu tanpa hambatan finansial (Wapres RI, 2024).

Gambar 3.6 menunjukkan delapan dari sepuluh balita Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan pada balita mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 52,88 persen pada tahun 2023 menjadi 84,18 persen pada tahun 2025. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan ini tentu saja menjadi keberhasilan pemerintah dalam upaya mewujudkan UHC. Namun demikian, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk pemerintah. Salah satunya adalah terkait pemerataan. Persentase balita di daerah perkotaan yang memiliki jaminan kesehatan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan yaitu 89,11 persen di daerah perkotaan dan 71,47 persen di daerah perdesaan. Selain itu, kepemilikan jaminan kesehatan juga belum merata di seluruh provinsi. Beberapa provinsi sudah meraih cakupan 100 persen yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua Pegunungan. Namun demikian, masih ada provinsi yang cakupan kepemilikan jaminan kesehatan oleh balita relatif rendah yaitu Provinsi Papua Tengah (50,94 persen) dan Provinsi Maluku Utara (66,86 persen) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.15.



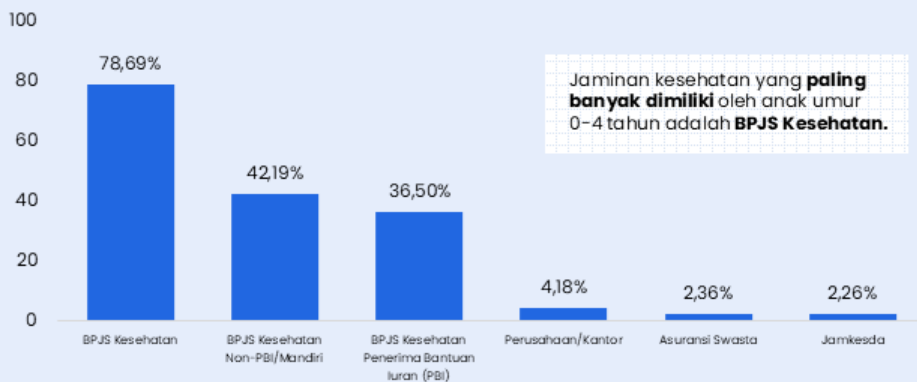
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.6
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025

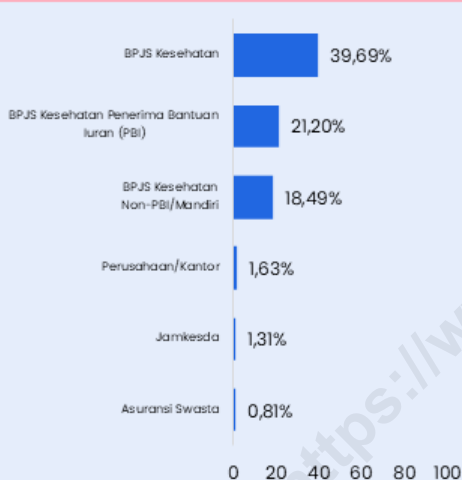
Kepemilikan jenis jaminan kesehatan yang ditanyakan pada Susenas adalah BPJS Kesehatan baik BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI/Mandiri, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi swasta, maupun perusahaan/kantor. Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh anak umur 0–4 tahun adalah BPJS Kesehatan sebesar 78,69 persen yang terdiri dari 36,50 persen peserta BPJS Kesehatan PBI dan 42,19 persen peserta BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri (Gambar 3.7). Masih ada balita yang memiliki Jamkesda meski angkanya relatif kecil yaitu 2,26 persen.



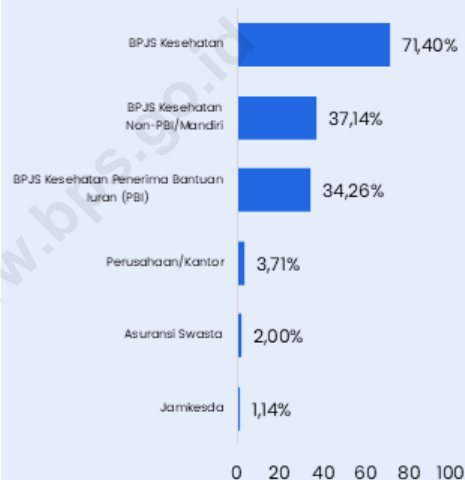
Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025



Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan, 2025



Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.7

Persentase Anak Umur 0-4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap, 2025

Penggunaan jaminan kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak balita, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya pengobatan. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan memerlukan penanganan medis yang cepat serta berkesinambungan. Melalui kepesertaan dalam program JKN, setiap penduduk termasuk balita dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan secara lebih mudah, teratur, dan terjamin dari sisi pembiayaan.

Oleh karena itu, pemanfaatan jaminan kesehatan tidak hanya melindungi kondisi ekonomi rumah tangga saat anak sakit, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan balita dan pencapaian UHC di Indonesia.

3.3 Pemberian Imunisasi untuk Kesehatan Anak yang Optimal

Balita merupakan kelompok penduduk yang sangat rentan terhadap penyakit, karena daya tahan tubuh yang belum terbentuk dengan baik. Salah satu intervensi kesehatan yang bisa diberikan kepada balita untuk terhindar dari terkena penyakit adalah dengan pemberian imunisasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar diberikan kepada bayi di bawah satu tahun, dan kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan pada anak di bawah dua tahun dan anak usia sekolah dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar.

Imunisasi dasar pada bayi terdiri dari imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan campak yang diberikan sebelum anak berumur satu tahun. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian imunisasi adalah indikator tentang imunisasi dasar lengkap yang diukur untuk anak 12–23 bulan. Anak umur 12–23 bulan dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap jika menerima 1 kali imunisasi BCG, 3 kali imunisasi Hepatitis B, 3 kali imunisasi DPT-HB-HiB, 3 kali imunisasi Polio, dan 1 kali imunisasi Campak.

Pada tahun 2025, 64 dari 100 anak umur 12–23 bulan menerima imunisasi dasar lengkap. Persentase anak umur 12–23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi daripada di daerah perdesaan (Gambar 3.8). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa akses terhadap fasilitas imunisasi baik pemerintah maupun swasta di perkotaan lebih baik daripada di perdesaan (Williams, Akande, & Abbas, 2024).

Tingkat pendidikan yang ditamatkan KRT memengaruhi keputusan pemberian imunisasi untuk anak. Data Susenas Maret 2025 menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, maka persentase anak umur 12–23 bulan yang menerima imunisasi semakin meningkat. Orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi, memiliki informasi yang lebih banyak tentang pentingnya imunisasi sehingga akan berpengaruh pada keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung memberikan vaksinasi kepada anaknya karena tidak adanya keraguan terhadap vaksin (Fadl, et al., 2024).



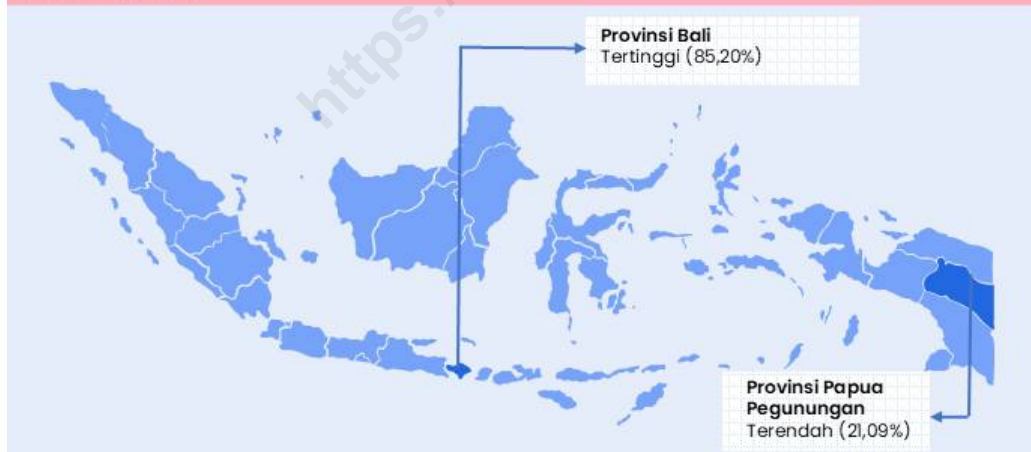
Klasifikasi Desa, 2025



Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT, 2025



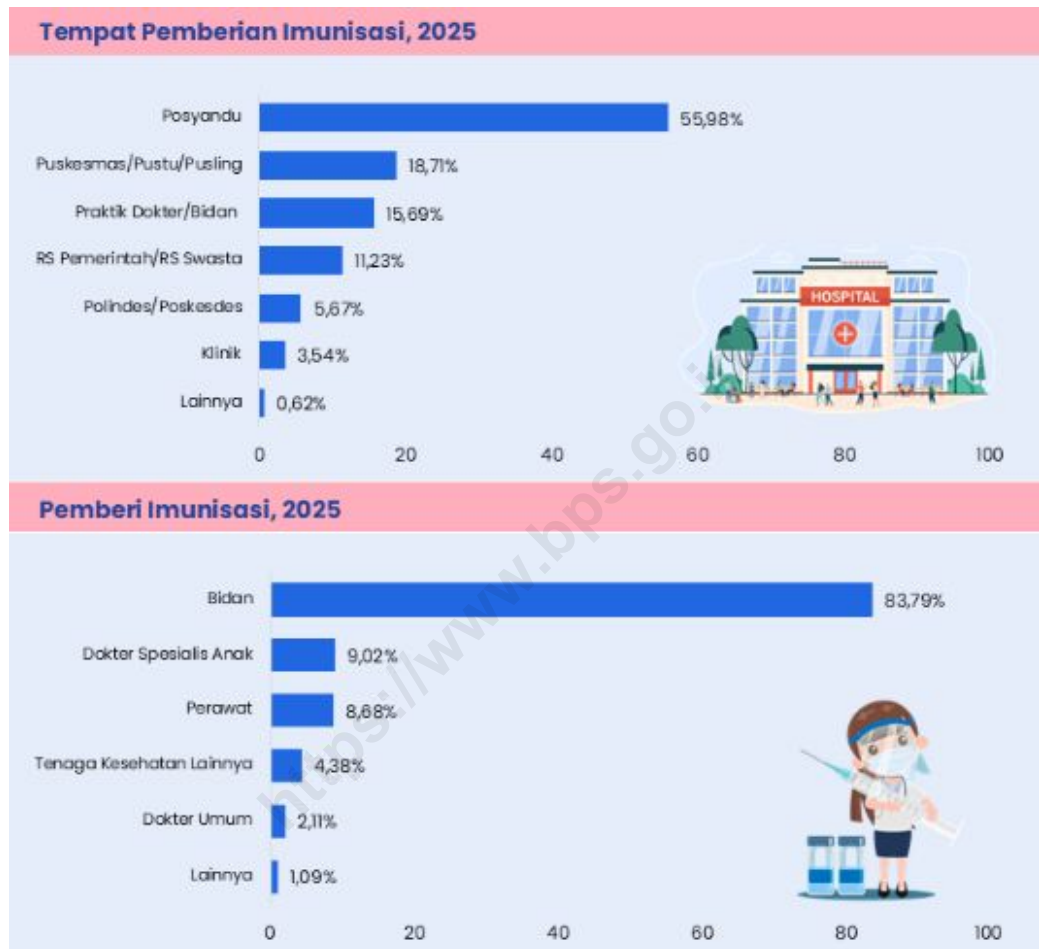
Provinsi, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.8
Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik, 2025

Pemerataan program imunisasi nyatanya juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan. Cakupan program imunisasi dasar untuk anak balita di setiap daerah masih terdapat perbedaan yang cukup besar. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase tertinggi anak umur 12–23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.9
Persentase Anak Umur 0–59 Bulan yang Menerima Imunisasi
Menurut Tempat Pemberian dan Pemberi Imunisasi, 2025

Imunisasi pada balita bisa diberikan di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Gambar 3.9 menunjukkan bahwa lebih dari separuh balita Indonesia menerima imunisasi di posyandu. Selain itu, banyak juga balita yang menerima imunisasi di puskesmas/puskesmas pembantu/puskesmas keliling. Kedua tempat tersebut memang tempat yang paling dekat dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adapun tempat



yang paling sedikit diakses balita untuk imunisasi adalah lainnya. Tempat lainnya yang dimaksud adalah gerai PIN atau layanan imunisasi dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di pusat perbelanjaan (mall)/lapangan/Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)/stasiun/rumah warga/dll.

Susenas Maret 2025 juga mengumpulkan data tentang pemberi imunisasi. Pemberi imunisasi yang paling banyak diakses oleh balita adalah bidan yaitu sebesar 83,79 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah lainnya seperti kader posyandu.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.10
Persentase Anak Umur 0–59 Bulan yang Tidak Diberi Imunisasi Menurut Alasan Tidak Pernah Diimunisasi , 2025

Pemberian imunisasi pada balita merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat. Imunisasi dapat menimbulkan/meningkatkan kekebalan balita terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Namun demikian, masih terdapat anak-anak yang belum pernah diberi imunisasi. Lebih dari 70 persen orang tua mengaku khawatir dengan efek samping vaksin sehingga balitanya tidak pernah diberi imunisasi. Selain itu, alasan balita tidak pernah diimunisasi yang juga cukup besar adalah khawatir dengan kandungan dalam vaksin sebesar 41,37 persen dan ragu terhadap efektivitas imunisasi sebesar 39,21 persen. Sosialisasi terkait imunisasi harus lebih banyak dilakukan oleh pemerintah supaya tidak ada lagi balita yang tidak diberi imunisasi sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

3.4 Praktik Pemberian ASI dan MPASI untuk Anak Indonesia

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta daya tahan tubuh anak. ASI mengandung berbagai macam sel, nutrisi, hormon dan faktor pertumbuhan yang penting untuk membentuk sistem kekebalan tubuh bayi. Pemberian ASI oleh ibu kepada bayi memiliki banyak manfaat, baik untuk ibu maupun bayi. Manfaat ASI untuk bayi di antaranya memberikan gizi ideal bagi bayi, ASI mengandung antibodi sehingga mengurangi risiko terkena penyakit, meningkatkan berat badan bayi secara sehat, dan lain sebagainya. Adapun manfaat ASI untuk ibu di antaranya menurunkan risiko terkena kanker payudara, kontrasepsi alami, menurunkan berat badan, memperkuat ikatan batin dengan bayi, dan sebagainya.

Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis seperti yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberian ASI eksklusif terbukti dapat menurunkan risiko penyakit infeksi, meningkatkan kecerdasan, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Bayi yang diberi makanan selain ASI (baik makanan maupun cairan selain ASI) sebelum usia enam bulan memiliki peluang tiga kali lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif memberikan perlindungan terhadap risiko diare, infeksi saluran pernapasan bawah, serta obesitas pada anak (WHO & UNICEF, 2021). Dalam konteks pembangunan kesehatan nasional, peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu indikator penting dalam upaya perbaikan gizi serta meningkatkan derajat kesehatan anak.

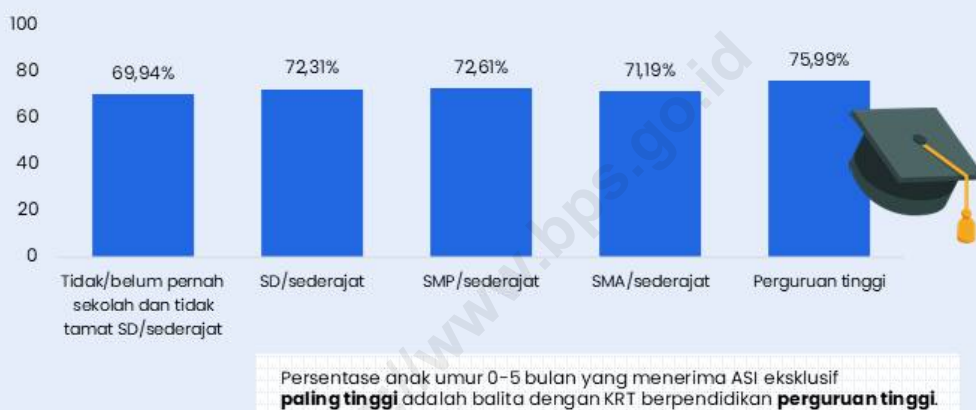
Hasil Susenas Maret 2025 menunjukkan sebanyak 72,13 persen anak umur 0-5 bulan menerima ASI eksklusif. Persentase ASI eksklusif di daerah perkotaan tidak berbeda jauh dengan di daerah perdesaan. Tingkat pendidikan KRT juga memengaruhi pemberian ASI eksklusif. Jika dilihat pada Gambar 3.11, semakin tinggi tingkat pendidikan KRT maka persentase anak 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif cenderung semakin tinggi. Persentase anak umur 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif paling tinggi adalah balita dengan KRT berpendidikan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, maka ilmu yang dimiliki tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi semakin tinggi. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung memberikan ASI eksklusif sebesar 1,44 kali (Kalhor, et al., 2025).



Klasifikasi Desa, 2025



Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT, 2025



Status Ekonomi, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.11
Persentase Anak Umur 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif, 2025

Status ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh terhadap praktik pemberian ASI eksklusif. Balita yang berada pada rumah tangga dengan status ekonomi di kuintil 1 dan kuintil 2 merupakan yang paling banyak menerima ASI eksklusif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan ibu yang ada pada rumah tangga menengah ke bawah cenderung tidak memiliki sumber daya untuk memberikan makanan lain kepada bayi selain ASI. Meski angka ASI eksklusif pada kuintil bawah cenderung tinggi, pemerintah harus memastikan bahwa ibu-ibu tersebut mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga praktik pemberian ASI eksklusif oleh ibu-ibu dari kalangan ekonomi bawah tetap optimal untuk tumbuh kembang anak.

Setelah pemberian ASI eksklusif untuk bayi hingga berumur enam bulan, bayi memerlukan makanan pendamping ASI (MPASI) untuk memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Pemberian MPASI berperan penting dalam periode tumbuh kembang anak agar anak dapat tumbuh optimal dan terhindar dari masalah gizi seperti *stunting* dan anemia, karena ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi setelah berumur enam bulan. Praktik pemberian MPASI harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu usia anak, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, dan kebersihan. Pemberian MPASI yang tepat yang disertai dengan pemberian ASI yang dilanjutkan hingga usia dua tahun merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian status gizi yang baik bagi anak.

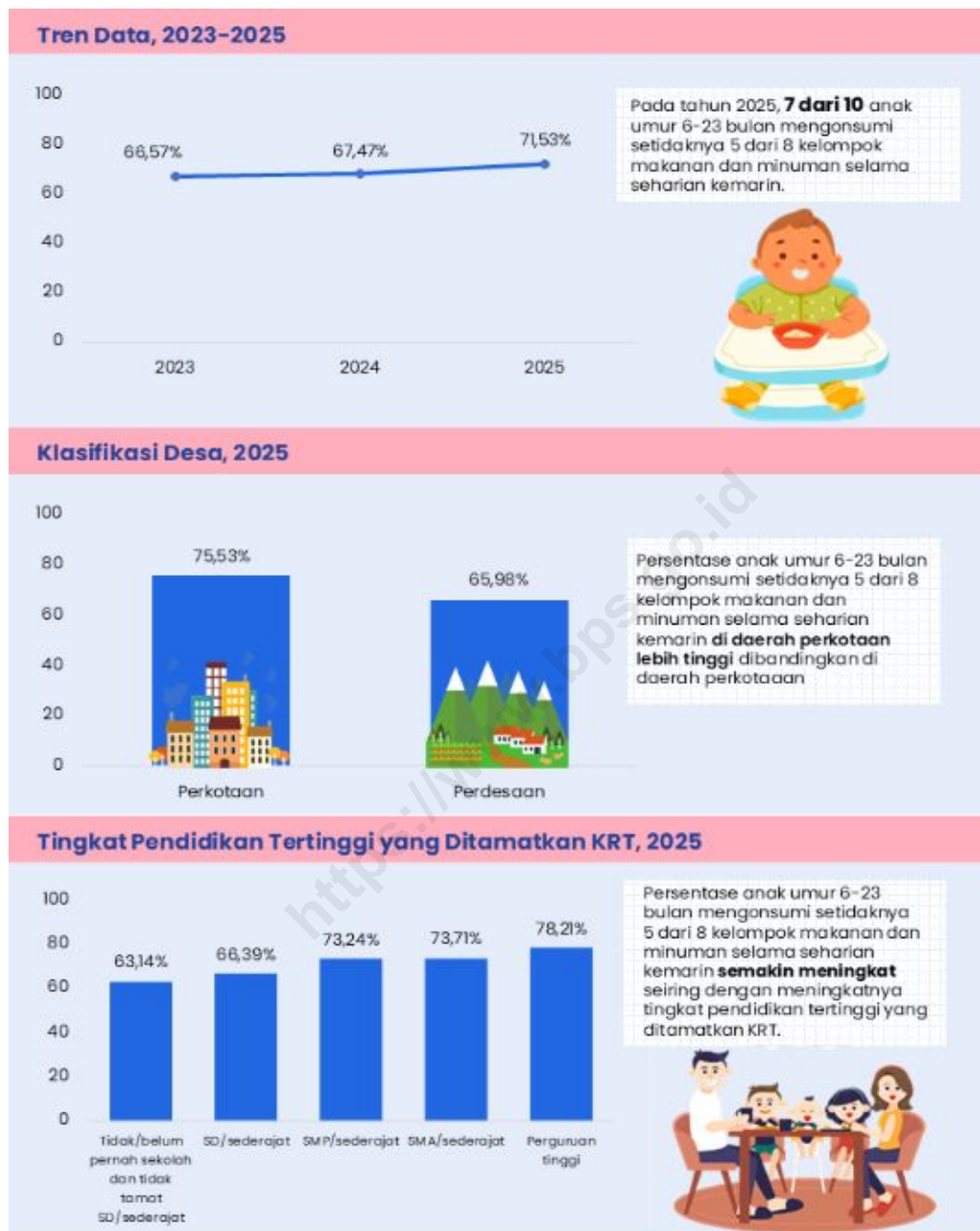
Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur ketepatan pemberian MPASI pada anak adalah *minimum dietary diversity* (MDD). MDD merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung keragaman makanan yang dikonsumsi oleh anak 6-23 bulan. Menurut WHO dan UNICEF (2021), makanan/minuman terdiri dari delapan kelompok yaitu:

1. ASI
2. Biji-bijian dan umbi-umbian
3. Makanan dari kacang-kacangan
4. Produk turunan susu
5. Daging, ikan
6. Telur
7. Buah dan sayur tinggi vitamin A
8. Buah atau sayuran lainnya

Anak umur 6-23 bulan dikatakan mengonsumsi makanan beragam jika mengonsumsi minimal lima dari delapan kelompok makanan tersebut di atas selama sehari kemarin. Keanekaragaman kelompok makanan berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan pada anak usia dini. Pola makan yang kurang beragam dapat meningkatkan risiko kekurangan mikronutrien, yang dapat



berdampak buruk pada perkembangan fisik dan kognitif anak misalnya kejadian stunting (WHO & UNICEF, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.12
Persentase Anak Umur 6–23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya 5 dari 8 Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari Kemarin, 2025

Pada tahun 2025, tujuh dari sepuluh anak umur 6-23 bulan mengonsumsi setidaknya 5 dari 8 kelompok makanan dan minuman selama sehari kemarin. Konsumsi makanan yang beragam oleh anak umur 6-23 bulan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan akses untuk mendapatkan makanan yang beragam lebih mudah di daerah perkotaan. Pendidikan KRT memengaruhi keragaman makanan yang dikonsumsi oleh anak umur 6-23 bulan. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan KRT, maka persentase anak umur 6-23 bulan yang mengonsumsi setidaknya 5 dari 8 kelompok makanan dan minuman selama sehari kemarin semakin meningkat. Semakin baik tingkat pendidikan, maka semakin banyak ilmu yang diketahui oleh orang tua dalam praktik pemberian makanan kepada anak. Praktik pemberian ASI dan MPASI di Indonesia perlu menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat supaya bisa diterapkan dengan baik oleh orang tua, sehingga anak balita Indonesia bisa mendapatkan gizi dan tumbuh kembang yang optimal untuk mencapai generasi emas 2045.

<https://www.bps.go.id>



Tabel 3.1
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	41,65	40,80	38,59
Sumatera Utara	34,12	35,77	35,78
Sumatera Barat	38,98	40,32	38,53
R i a u	35,63	31,33	31,82
J a m b i	32,44	34,03	36,08
Sumatera Selatan	33,57	40,38	36,92
Bengkulu	37,98	40,55	42,71
Lampung	37,61	42,09	44,46
Kep. Bangka Belitung	39,17	44,27	46,24
Kep. Riau	40,56	41,25	32,35
DKI Jakarta	35,84	40,70	48,53
Jawa Barat	37,93	41,43	42,25
Jawa Tengah	43,68	48,21	45,90
DI Yogyakarta	40,33	42,69	46,56
Jawa Timur	39,46	43,01	43,39
Banten	40,63	41,09	40,40
B a l i	35,44	34,28	34,26
Nusa Tenggara Barat	46,42	49,97	51,94
Nusa Tenggara Timur	36,45	40,93	38,90
Kalimantan Barat	35,60	34,85	34,41
Kalimantan Tengah	32,28	27,49	34,55
Kalimantan Selatan	36,12	40,97	38,44
Kalimantan Timur	36,25	28,78	33,02
Kalimantan Utara	35,80	29,57	36,14
Sulawesi Utara	32,59	30,38	28,38
Sulawesi Tengah	26,70	29,66	26,95
Sulawesi Selatan	31,57	33,69	36,38
Sulawesi Tenggara	26,21	27,58	26,32
Gorontalo	41,51	39,57	32,26
Sulawesi Barat	31,86	30,44	32,10
Maluku	29,23	23,83	26,45
Maluku Utara	21,74	17,07	24,29
Papua Barat	25,43 ¹	22,78	24,63
Papua Barat Daya	–	29,77	32,35
Papua	18,04 ²	21,77	23,41
Papua Selatan	–	24,74	28,98
Papua Tengah	–	16,61	10,91
Papua Pegunungan	–	14,03	19,24
Indonesia	37,40	39,85	40,12

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.2
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	38,83	41,60	41,39
Perdesaan	35,49	37,44	38,28
Jenis Kelamin			
Laki-laki	37,87	40,02	40,59
Perempuan	36,92	39,68	39,63
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	35,28	39,62	38,59
SD/Sederajat	37,32	40,44	39,99
SMP/Sederajat	38,68	40,45	40,56
SMA/Sederajat	37,89	39,80	40,90
Perguruan Tinggi	35,86	37,91	38,38
Status Ekonomi			
Kuintil 1	34,76	38,36	37,80
Kuintil 2	37,37	39,73	40,27
Kuintil 3	39,01	39,87	41,44
Kuintil 4	38,76	40,71	41,02
Kuintil 5	38,35	41,65	40,97
Indonesia	37,40	39,85	40,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023–2025



Tabel 3.3
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,70	23,75	22,37
Sumatera Utara	14,96	17,15	17,86
Sumatera Barat	17,65	23,68	22,82
R i a u	14,94	13,91	16,09
J a m b i	13,82	16,65	16,34
Sumatera Selatan	12,03	16,37	15,59
Bengkulu	18,42	20,65	21,35
Lampung	17,52	24,40	22,57
Kep. Bangka Belitung	14,88	17,91	19,59
Kep. Riau	12,18	19,29	11,84
DKI Jakarta	16,81	19,24	20,36
Jawa Barat	19,00	21,52	22,90
Jawa Tengah	19,52	24,67	24,35
DI Yogyakarta	16,98	20,70	20,02
Jawa Timur	18,68	23,74	22,41
Banten	15,71	20,84	20,30
B a l i	20,93	21,14	18,83
Nusa Tenggara Barat	26,11	27,26	30,22
Nusa Tenggara Timur	18,27	22,55	22,27
Kalimantan Barat	18,80	17,83	18,58
Kalimantan Tengah	12,75	10,46	15,41
Kalimantan Selatan	14,67	17,79	16,50
Kalimantan Timur	14,76	13,25	15,53
Kalimantan Utara	18,20	14,47	19,72
Sulawesi Utara	18,57	18,77	15,00
Sulawesi Tengah	15,16	17,97	15,14
Sulawesi Selatan	16,44	18,00	19,36
Sulawesi Tenggara	13,67	15,75	13,42
Gorontalo	24,37	24,60	23,69
Sulawesi Barat	16,42	17,71	16,93
Maluku	16,85	12,01	13,66
Maluku Utara	12,21	10,02	12,04
Papua Barat	9,80 ¹	10,90	12,17
Papua Barat Daya	–	16,05	19,33
Papua	8,59 ²	10,80	15,35
Papua Selatan	–	12,00	14,16
Papua Tengah	–	9,41	6,88
Papua Pegunungan	–	5,84	14,35
Indonesia	17,54	20,63	20,72

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.4
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam
Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	17,89	21,08	20,77
Perdesaan	17,07	20,00	20,63
Jenis Kelamin			
Laki-laki	17,54	20,69	21,21
Perempuan	17,54	20,56	20,21
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	16,34	20,92	21,25
SD/Sederajat	17,71	21,70	21,57
SMP/Sederajat	18,92	21,33	21,27
SMA/Sederajat	17,24	19,93	20,57
Perguruan Tinggi	16,80	19,04	18,32
Status Ekonomi			
Kuintil 1	16,07	19,75	19,14
Kuintil 2	17,41	21,15	21,22
Kuintil 3	19,33	20,97	22,01
Kuintil 4	17,50	20,75	20,67
Kuintil 5	18,03	20,78	20,95
Indonesia	17,54	20,63	20,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.5
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	70,71	66,09	68,01
Sumatera Utara	74,26	71,72	72,14
Sumatera Barat	58,47	60,85	56,65
R i a u	73,38	71,02	70,03
J a m b i	74,57	79,25	70,09
Sumatera Selatan	74,48	74,82	73,35
Bengkulu	67,52	72,55	71,64
Lampung	67,51	65,87	65,76
Kep. Bangka Belitung	63,79	64,67	71,25
Kep. Riau	71,11	75,24	62,91
DKI Jakarta	67,13	68,27	66,85
Jawa Barat	71,08	68,69	67,27
Jawa Tengah	66,46	65,30	64,19
DI Yogyakarta	74,52	68,48	61,77
Jawa Timur	68,99	66,36	67,42
Banten	78,63	71,77	71,90
B a l i	47,51	42,91	52,16
Nusa Tenggara Barat	72,33	77,60	71,92
Nusa Tenggara Timur	69,58	70,95	69,00
Kalimantan Barat	74,54	77,93	72,86
Kalimantan Tengah	80,84	82,19	84,96
Kalimantan Selatan	86,50	82,36	85,62
Kalimantan Timur	72,36	69,30	75,66
Kalimantan Utara	68,01	61,40	72,41
Sulawesi Utara	58,45	60,11	67,24
Sulawesi Tengah	74,04	70,95	76,61
Sulawesi Selatan	66,68	67,09	71,59
Sulawesi Tenggara	78,83	77,06	76,82
Gorontalo	68,27	66,82	64,91
Sulawesi Barat	70,39	63,18	73,99
Maluku	70,92	68,32	74,96
Maluku Utara	68,46	67,92	72,35
Papua Barat	57,26 ¹	66,16	61,72
Papua Barat Daya	–	66,35	58,44
Papua	66,61 ²	65,18	47,76
Papua Selatan	–	62,48	70,46
Papua Tengah	–	55,74	73,05
Papua Pegunungan	–	77,83	74,34
Indonesia	70,26	68,77	68,29

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.6
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	69,83	68,72	67,77
Perdesaan	70,89	68,84	69,11
Jenis Kelamin			
Laki-laki	70,73	68,95	67,59
Perempuan	69,76	68,58	69,03
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	71,07	67,29	67,54
SD/Sederajat	70,93	68,03	69,30
SMP/Sederajat	69,54	69,03	69,00
SMA/Sederajat	70,15	69,30	67,39
Perguruan Tinggi	69,78	69,45	68,44
Status Ekonomi			
Kuintil 1	71,17	70,36	68,49
Kuintil 2	71,40	69,17	69,87
Kuintil 3	70,04	69,00	69,86
Kuintil 4	69,81	68,35	67,19
Kuintil 5	68,01	65,75	64,90
Indonesia	70,26	68,77	68,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.7
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47,90	50,90	50,68
Sumatera Utara	39,66	42,77	46,31
Sumatera Barat	51,99	58,76	64,14
R i a u	33,62	35,21	39,32
J a m b i	34,13	41,78	36,88
Sumatera Selatan	40,05	40,53	43,30
Bengkulu	40,76	39,79	43,69
Lampung	47,98	57,91	52,59
Kep. Bangka Belitung	47,44	42,63	51,87
Kep. Riau	37,66	47,53	41,68
DKI Jakarta	51,77	52,51	57,61
Jawa Barat	51,11	54,70	56,44
Jawa Tengah	47,03	54,90	53,68
DI Yogyakarta	39,83	48,66	53,76
Jawa Timur	47,67	55,08	53,44
Banten	40,52	52,78	52,25
B a l i	71,44	76,27	66,42
Nusa Tenggara Barat	46,28	46,46	51,84
Nusa Tenggara Timur	43,61	45,19	44,38
Kalimantan Barat	36,90	39,74	43,80
Kalimantan Tengah	28,86	28,51	30,78
Kalimantan Selatan	29,30	32,48	29,09
Kalimantan Timur	38,94	43,57	39,97
Kalimantan Utara	39,26	49,60	51,79
Sulawesi Utara	56,61	50,69	49,92
Sulawesi Tengah	32,63	38,19	31,10
Sulawesi Selatan	36,37	38,82	38,00
Sulawesi Tenggara	26,86	33,36	29,30
Gorontalo	49,91	48,33	53,10
Sulawesi Barat	33,63	41,45	21,39
Maluku	34,58	36,59	37,56
Maluku Utara	38,52	45,11	30,53
Papua Barat	49,55 ¹	37,37	37,26
Papua Barat Daya	–	43,41	53,07
Papua	45,51 ²	50,15	64,75
Papua Selatan	–	45,47	36,09
Papua Tengah	–	59,44	35,56
Papua Pegunungan	–	34,12	52,92
Indonesia	45,21	50,31	50,65

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.8
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	47,03	51,56	52,85
Perdesaan	42,55	48,40	47,24
Jenis Kelamin			
Laki-laki	46,18	50,69	51,52
Perempuan	44,20	49,92	49,75
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	43,86	48,02	48,22
SD/Sederajat	44,31	52,40	49,25
SMP/Sederajat	47,68	50,03	51,40
SMA/Sederajat	45,19	50,02	51,92
Perguruan Tinggi	44,00	48,59	49,85
Status Ekonomi			
Kuintil 1	41,93	46,47	47,87
Kuintil 2	44,57	50,52	50,05
Kuintil 3	46,44	51,28	50,65
Kuintil 4	46,09	50,44	52,16
Kuintil 5	48,63	54,86	54,10
Indonesia	45,21	50,31	50,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.9
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut
Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,49	1,60	10,32
Sumatera Utara	0,91	4,73	16,42
Sumatera Barat	4,84	2,43	14,63
R i a u	2,83	8,72	31,97
J a m b i	3,87	NA	6,75
Sumatera Selatan	5,53	NA	11,94
Bengkulu	5,64	4,64	6,46
Lampung	0,64	4,29	9,71
Kep. Bangka Belitung	7,31	6,39	9,77
Kep. Riau	1,10	22,78	48,22
DKI Jakarta	13,29	8,62	27,52
Jawa Barat	4,50	9,56	28,63
Jawa Tengah	3,46	6,94	10,15
DI Yogyakarta	6,88	19,58	16,83
Jawa Timur	3,45	4,55	10,83
Banten	1,47	7,96	28,44
B a l i	4,14	6,36	8,51
Nusa Tenggara Barat	4,95	NA	6,41
Nusa Tenggara Timur	3,48	2,16	7,03
Kalimantan Barat	3,39	1,94	8,20
Kalimantan Tengah	4,57	3,62	5,45
Kalimantan Selatan	12,04	3,95	8,82
Kalimantan Timur	9,22	10,64	23,21
Kalimantan Utara	9,86	NA	NA
Sulawesi Utara	3,16	4,50	2,27
Sulawesi Tengah	9,99	NA	4,96
Sulawesi Selatan	3,74	4,16	14,02
Sulawesi Tenggara	9,78	NA	5,99
Gorontalo	4,84	–	4,34
Sulawesi Barat	NA	1,33	3,22
Maluku	5,49	NA	NA
Maluku Utara	NA	–	NA
Papua Barat	13,41	–	13,68
Papua Barat Daya	5,41	NA	5,51
Papua	19,67	NA	NA
Papua Selatan	NA	–	2,97
Papua Tengah	–	–	33,22
Papua Pegunungan	7,90	–	NA
Indonesia	4,46	6,49	17,04

Lanjutan Tabel 3.9

Provinsi	Praktik Dokter/Bidan/ Perawat	Puskesmas/Pustu/ Pusling	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,88	41,28	6,99
Sumatera Utara	58,78	19,38	1,86
Sumatera Barat	54,49	21,47	4,51
R i a u	37,70	14,91	4,69
J a m b i	58,53	25,03	NA
Sumatera Selatan	62,08	12,79	3,73
Bengkulu	65,67	19,29	NA
Lampung	64,59	21,58	1,71
Kep. Bangka Belitung	51,63	28,25	NA
Kep. Riau	15,00	12,81	NA
DKI Jakarta	4,74	46,88	NA
Jawa Barat	37,30	23,93	1,17
Jawa Tengah	56,98	24,25	1,32
DI Yogyakarta	29,73	30,86	NA
Jawa Timur	63,13	16,51	3,39
Banten	36,50	26,88	NA
B a l i	65,23	19,79	–
Nusa Tenggara Barat	42,04	48,61	5,34
Nusa Tenggara Timur	16,04	65,23	12,45
Kalimantan Barat	48,10	38,47	3,89
Kalimantan Tengah	40,46	46,30	NA
Kalimantan Selatan	45,10	26,47	7,91
Kalimantan Timur	24,25	33,50	1,52
Kalimantan Utara	29,09	57,07	NA
Sulawesi Utara	49,30	39,11	NA
Sulawesi Tengah	29,93	50,41	4,19
Sulawesi Selatan	27,32	50,89	2,16
Sulawesi Tenggara	21,88	58,01	5,88
Gorontalo	42,78	50,41	NA
Sulawesi Barat	29,80	62,48	NA
Maluku	29,90	51,69	5,25
Maluku Utara	15,65	62,14	6,86
Papua Barat	12,84	61,05	NA
Papua Barat Daya	16,67	62,05	NA
Papua	28,36	44,19	NA
Papua Selatan	13,04	76,23	NA
Papua Tengah	23,09	43,70	–
Papua Pegunungan	–	90,21	–
Indonesia	45,43	27,59	2,44



Lanjutan Tabel 3.9

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Aceh	NA	NA
Sumatera Utara	NA	NA
Sumatera Barat	0,65	0,56
R i a u	–	NA
J a m b i	NA	3,33
Sumatera Selatan	1,04	0,88
Bengkulu	NA	NA
Lampung	–	NA
Kep. Bangka Belitung	NA	NA
Kep. Riau	NA	NA
DKI Jakarta	NA	NA
Jawa Barat	0,34	0,44
Jawa Tengah	0,60	0,67
DI Yogyakarta	–	–
Jawa Timur	0,46	0,58
Banten	NA	–
B a l i	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	NA
Nusa Tenggara Timur	NA	NA
Kalimantan Barat	NA	NA
Kalimantan Tengah	–	NA
Kalimantan Selatan	NA	NA
Kalimantan Timur	NA	NA
Kalimantan Utara	NA	NA
Sulawesi Utara	NA	NA
Sulawesi Tengah	–	NA
Sulawesi Selatan	NA	NA
Sulawesi Tenggara	NA	NA
Gorontalo	NA	NA
Sulawesi Barat	NA	NA
Maluku	NA	NA
Maluku Utara	NA	NA
Papua Barat	NA	NA
Papua Barat Daya	–	NA
Papua	–	–
Papua Selatan	–	–
Papua Tengah	–	–
Papua Pegunungan	–	–
Indonesia	0,55	0,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.10
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut
Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,58	8,87	22,32
Perdesaan	2,50	2,36	7,89
Jenis Kelamin			
Laki-laki	4,74	6,69	16,12
Perempuan	4,15	6,29	18,04
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,29	1,69	7,60
SD/Sederajat	3,55	3,51	10,21
SMP/Sederajat	3,69	3,06	11,23
SMA/Sederajat	5,28	7,53	22,73
Perguruan Tinggi	6,21	17,84	27,88
Status Ekonomi			
Kuintil 1	3,27	1,98	8,61
Kuintil 2	4,67	3,56	10,98
Kuintil 3	4,10	4,40	18,93
Kuintil 4	5,16	5,93	20,80
Kuintil 5	5,48	19,95	29,99
Indonesia	4,46	6,49	17,04



Lanjutan Tabel 3.10

Karakteristik	Praktik Dokter/Bidan/ Perawat	Puskesmas/Pustu/ Pusling	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	36,93	28,81	1,28
Perdesaan	60,19	25,48	4,45
Jenis Kelamin			
Laki-laki	44,84	28,37	2,58
Perempuan	46,07	26,75	2,28
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	55,40	32,24	3,28
SD/Sederajat	55,87	28,37	3,46
SMP/Sederajat	50,95	30,70	3,04
SMA/Sederajat	38,20	27,80	1,90
Perguruan Tinggi	32,69	17,22	0,60
Status Ekonomi			
Kuintil 1	50,49	35,52	4,24
Kuintil 2	50,70	30,86	2,67
Kuintil 3	45,52	28,09	1,90
Kuintil 4	44,68	25,21	2,14
Kuintil 5	32,21	14,39	0,64
Indonesia	45,43	27,59	2,44

Lanjutan Tabel 3.10

Karakteristik	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	0,46	0,51
Perdesaan	0,69	0,80
Jenis Kelamin		
Laki-laki	0,49	0,58
Perempuan	0,61	0,65
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT		
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,39	0,71
SD/Sederajat	0,91	0,87
SMP/Sederajat	0,45	0,67
SMA/Sederajat	0,43	0,44
Perguruan Tinggi	NA	NA
Status Ekonomi		
Kuintil 1	0,77	0,99
Kuintil 2	0,59	0,54
Kuintil 3	0,52	0,70
Kuintil 4	0,19	NA
Kuintil 5	0,63	0,34
Indonesia	0,55	0,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.11
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,91	2,99	4,37
Sumatera Utara	3,16	3,49	3,85
Sumatera Barat	4,31	5,00	4,66
R i a u	4,19	3,50	3,91
J a m b i	3,72	3,79	4,47
Sumatera Selatan	2,40	3,22	5,08
Bengkulu	5,02	4,36	6,16
Lampung	4,02	4,96	5,39
Kep. Bangka Belitung	4,84	6,61	6,16
Kep. Riau	6,36	5,92	8,07
DKI Jakarta	6,65	6,20	10,02
Jawa Barat	4,70	6,51	9,22
Jawa Tengah	6,74	8,87	10,52
DI Yogyakarta	10,72	10,92	11,89
Jawa Timur	6,69	8,56	8,45
Banten	4,49	5,79	5,54
B a l i	5,78	5,03	9,74
Nusa Tenggara Barat	6,15	7,64	8,77
Nusa Tenggara Timur	3,79	4,73	4,83
Kalimantan Barat	3,42	4,42	4,62
Kalimantan Tengah	2,88	4,75	4,12
Kalimantan Selatan	4,57	6,76	7,41
Kalimantan Timur	6,84	6,28	7,33
Kalimantan Utara	7,83	10,04	9,61
Sulawesi Utara	5,50	8,10	6,72
Sulawesi Tengah	6,38	5,80	5,26
Sulawesi Selatan	5,69	7,14	7,91
Sulawesi Tenggara	3,36	4,61	3,26
Gorontalo	6,16	7,41	6,09
Sulawesi Barat	4,33	4,70	5,89
Maluku	1,76	2,06	2,51
Maluku Utara	2,93	2,90	3,24
Papua Barat	3,77 ¹	3,56	2,57
Papua Barat Daya	–	3,46	6,70
Papua	2,78 ²	4,17	6,05
Papua Selatan	–	2,43	1,82
Papua Tengah	–	2,76	4,80
Papua Pegunungan	–	0,19	0,65
Indonesia	5,10	6,22	7,36

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.12
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,86	7,41	9,00
Perdesaan	4,07	4,59	5,01
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,43	6,59	7,59
Perempuan	4,75	5,85	7,13
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	4,53	5,03	5,74
SD/Sederajat	4,26	5,09	6,20
SMP/Sederajat	4,93	6,01	6,44
SMA/Sederajat	5,38	6,88	7,93
Perguruan Tinggi	6,68	7,91	10,40
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2,95	4,24	4,64
Kuintil 2	4,25	5,09	5,91
Kuintil 3	5,25	5,82	7,01
Kuintil 4	6,30	8,15	8,95
Kuintil 5	8,45	9,78	12,70
Indonesia	5,10	6,22	7,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023–2025



Tabel 3.13
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	63,62	24,72	NA	8,00
Sumatera Utara	25,36	51,77	13,39	NA
Sumatera Barat	49,69	34,97	NA	5,22
Riau	20,07	61,26	6,99	NA
Jambi	42,70	42,98	7,01	NA
Sumatera Selatan	39,31	46,63	9,33	NA
Bengkulu	48,62	43,87	NA	NA
Lampung	15,81	61,58	11,66	NA
Kep. Bangka Belitung	70,90	16,19	NA	NA
Kep. Riau	10,03	89,01	–	NA
DKI Jakarta	48,71	47,16	NA	–
Jawa Barat	25,38	59,86	7,21	4,14
Jawa Tengah	31,45	56,33	4,49	NA
DI Yogyakarta	16,42	72,45	NA	NA
Jawa Timur	31,77	49,06	5,91	0,63
Banten	27,70	62,23	NA	NA
Bali	33,94	63,86	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	32,65	12,54	10,94	NA
Nusa Tenggara Timur	48,76	23,01	NA	–
Kalimantan Barat	48,16	30,31	NA	NA
Kalimantan Tengah	74,46	11,24	NA	NA
Kalimantan Selatan	72,41	16,14	4,44	2,80
Kalimantan Timur	35,84	50,59	9,95	NA
Kalimantan Utara	80,90	17,48	–	–
Sulawesi Utara	35,75	53,07	NA	–
Sulawesi Tengah	59,43	17,09	NA	–
Sulawesi Selatan	45,25	22,64	8,78	NA
Sulawesi Tenggara	43,21	15,38	NA	–
Gorontalo	60,72	24,69	NA	NA
Sulawesi Barat	46,54	15,83	NA	NA
Maluku	85,28	NA	1,06	–
Maluku Utara	74,92	NA	2,33	–
Papua Barat	69,25	NA	–	–
Papua Barat Daya	47,95	45,69	NA	–
Papua	60,35	36,76	–	NA
Papua Selatan	36,09	NA	NA	–
Papua Tengah	31,48	42,94	20,08	–
Papua Pegunungan	NA	NA	–	–
Indonesia	34,00	49,68	5,89	2,35

Lanjutan Tabel 3.13

Provinsi	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	9,89	—	1,22
Sumatera Utara	7,45	—	—
Sumatera Barat	8,91	—	—
Riau	NA	—	—
Jambi	NA	—	—
Sumatera Selatan	NA	—	—
Bengkulu	NA	—	—
Lampung	10,04	—	—
Kep. Bangka Belitung	9,97	—	—
Kep. Riau	NA	—	—
DKI Jakarta	NA	—	—
Jawa Barat	3,85	—	NA
Jawa Tengah	8,06	—	—
DI Yogyakarta	NA	—	—
Jawa Timur	13,16	—	—
Banten	NA	—	—
Bali	—	—	—
Nusa Tenggara Barat	45,24	—	—
Nusa Tenggara Timur	27,21	—	—
Kalimantan Barat	9,09	—	—
Kalimantan Tengah	12,64	—	—
Kalimantan Selatan	4,57	—	—
Kalimantan Timur	NA	—	—
Kalimantan Utara	NA	—	—
Sulawesi Utara	10,62	—	—
Sulawesi Tengah	24,24	—	NA
Sulawesi Selatan	22,82	—	NA
Sulawesi Tenggara	38,18	—	—
Gorontalo	15,66	—	—
Sulawesi Barat	28,94	—	—
Maluku	11,26	—	—
Maluku Utara	13,15	—	—
Papua Barat	27,35	—	—
Papua Barat Daya	—	—	—
Papua	2,85	—	—
Papua Selatan	46,68	—	—
Papua Tengah	5,50	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—
Indonesia	9,11	—	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.14
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir
Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	32,39	56,11	4,95	1,97
Perdesaan	38,14	33,07	8,30	3,33
Jenis Kelamin				
Laki-laki	35,05	48,17	5,81	2,60
Perempuan	32,86	51,33	5,97	2,07
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	35,64	33,08	8,14	NA
SD/Sederajat	34,11	42,26	8,83	2,00
SMP/Sederajat	36,17	41,72	8,58	3,52
SMA/Sederajat	33,57	54,63	4,07	2,17
Perguruan Tinggi	32,14	60,70	3,17	1,56
Status Ekonomi				
Kuintil 1	33,14	37,70	8,17	2,73
Kuintil 2	40,58	41,98	4,19	2,44
Kuintil 3	37,40	43,26	7,30	1,93
Kuintil 4	36,83	51,22	5,71	1,83
Kuintil 5	25,19	65,83	4,70	2,79
Indonesia	34,00	49,68	5,89	2,35

Lanjutan Tabel 3.14

Provinsi	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,72	–	NA
Perdesaan	17,88	–	NA
Jenis Kelamin			
Laki-laki	9,50	–	NA
Perempuan	8,70	–	NA
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	19,87	–	NA
SD/Sederajat	14,36	–	NA
SMP/Sederajat	11,07	–	NA
SMA/Sederajat	6,53	–	0,04
Perguruan Tinggi	3,20	–	–
Status Ekonomi			
Kuintil 1	18,83	–	NA
Kuintil 2	12,98	–	–
Kuintil 3	10,65	–	NA
Kuintil 4	5,79	–	NA
Kuintil 5	2,10	–	–
Indonesia	9,11	–	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.15
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	87,81	99,22	98,38
Sumatera Utara	39,11	76,43	76,11
Sumatera Barat	52,16	83,92	82,04
R i a u	49,08	85,41	81,67
J a m b i	39,77	58,34	78,64
Sumatera Selatan	46,25	77,06	89,84
Bengkulu	47,43	96,77	91,08
Lampung	44,49	81,84	77,33
Kep. Bangka Belitung	62,67	79,09	87,44
Kep. Riau	72,25	99,79	97,18
DKI Jakarta	87,17	99,08	100,00
Jawa Barat	48,32	79,83	86,93
Jawa Tengah	49,81	72,38	78,27
DI Yogyakarta	70,04	94,67	94,35
Jawa Timur	56,41	78,02	80,98
Banten	55,63	95,36	90,49
B a l i	69,95	92,09	85,99
Nusa Tenggara Barat	34,88	69,22	72,61
Nusa Tenggara Timur	36,72	79,12	73,57
Kalimantan Barat	47,67	72,98	67,86
Kalimantan Tengah	39,64	78,23	75,93
Kalimantan Selatan	54,42	85,22	89,53
Kalimantan Timur	77,85	94,18	96,60
Kalimantan Utara	64,61	90,78	84,24
Sulawesi Utara	55,96	90,45	88,06
Sulawesi Tengah	45,89	75,93	75,56
Sulawesi Selatan	57,80	87,55	87,32
Sulawesi Tenggara	45,56	80,78	79,05
Gorontalo	52,68	86,91	91,28
Sulawesi Barat	66,65	78,21	74,14
Maluku	30,82	61,84	78,91
Maluku Utara	50,12	62,91	66,86
Papua Barat	45,09 ¹	75,22	81,93
Papua Barat Daya	–	71,48	76,87
Papua	71,33 ²	86,53	91,04
Papua Selatan	–	78,12	99,31
Papua Tengah	–	71,51	50,94
Papua Pegunungan	–	100,00	100,00
Indonesia	52,88	80,87	84,18

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.16
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	61,36	86,88	89,11
Perdesaan	41,53	67,52	71,47
Jenis Kelamin			
Laki-laki	52,95	80,60	84,58
Perempuan	52,80	81,19	83,74
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	41,39	69,36	77,78
SD/Sederajat	39,96	66,95	73,88
SMP/Sederajat	46,03	75,82	77,02
SMA/Sederajat	61,29	88,23	88,81
Perguruan Tinggi	75,21	92,52	94,77
Status Ekonomi			
Kuintil 1	36,44	66,11	71,79
Kuintil 2	45,06	73,93	83,10
Kuintil 3	54,18	81,42	81,47
Kuintil 4	65,17	85,93	85,04
Kuintil 5	76,72	92,33	93,90
Indonesia	52,88	80,87	84,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023–2025



Tabel 3.17
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun Menurut Provinsi dan
Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,23	76,15	20,08
Sumatera Utara	71,79	22,05	49,75
Sumatera Barat	80,40	43,40	37,00
R i a u	73,09	25,16	47,93
J a m b i	74,81	24,12	50,69
Sumatera Selatan	86,93	46,77	40,15
Bengkulu	86,02	48,22	37,79
Lampung	69,11	40,39	28,71
Kep. Bangka Belitung	84,07	44,79	39,28
Kep. Riau	91,94	6,81	85,13
DKI Jakarta	90,24	57,29	32,95
Jawa Barat	80,92	28,00	52,91
Jawa Tengah	73,68	33,32	40,36
DI Yogyakarta	88,87	41,48	47,39
Jawa Timur	74,00	37,97	36,03
Banten	88,35	30,59	57,76
B a l i	84,06	33,01	51,06
Nusa Tenggara Barat	70,32	57,72	12,60
Nusa Tenggara Timur	67,28	44,15	23,13
Kalimantan Barat	64,26	34,01	30,25
Kalimantan Tengah	73,99	42,72	31,27
Kalimantan Selatan	87,41	42,05	45,36
Kalimantan Timur	90,19	27,91	62,28
Kalimantan Utara	84,24	52,35	31,89
Sulawesi Utara	80,11	29,09	51,02
Sulawesi Tengah	69,68	51,49	18,19
Sulawesi Selatan	81,26	51,08	30,18
Sulawesi Tenggara	77,28	47,45	29,83
Gorontalo	85,60	51,91	33,69
Sulawesi Barat	67,73	31,93	35,80
Maluku	67,50	16,37	51,13
Maluku Utara	53,57	20,89	32,68
Papua Barat	54,57	30,82	23,75
Papua Barat Daya	76,87	51,91	24,95
Papua	86,89	45,40	41,50
Papua Selatan	82,96	49,18	33,79
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	100,00	8,77	91,23
Indonesia	78,69	36,50	42,19

Lanjutan Tabel 3.17

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,74	NA	NA
Sumatera Utara	1,37	NA	3,95
Sumatera Barat	5,73	–	NA
R i a u	NA	NA	5,07
J a m b i	–	NA	NA
Sumatera Selatan	NA	NA	2,50
Bengkulu	NA	NA	NA
Lampung	12,60	–	5,70
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA
Kep. Riau	NA	–	NA
DKI Jakarta	–	NA	9,76
Jawa Barat	NA	5,16	3,69
Jawa Tengah	NA	1,25	2,87
DI Yogyakarta	NA	NA	NA
Jawa Timur	2,96	NA	4,89
Banten	2,63	NA	8,62
B a l i	–	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	9,98	–	NA
Nusa Tenggara Timur	4,17	NA	NA
Kalimantan Barat	4,65	–	–
Kalimantan Tengah	0,53	NA	NA
Kalimantan Selatan	–	–	NA
Kalimantan Timur	–	NA	16,13
Kalimantan Utara	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	NA	NA
Sulawesi Tengah	NA	–	NA
Sulawesi Selatan	2,62	–	3,44
Sulawesi Tenggara	NA	–	0,37
Gorontalo	–	–	NA
Sulawesi Barat	20,24	–	–
Maluku	NA	–	NA
Maluku Utara	11,38	–	NA
Papua Barat	27,36	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–
Papua	NA	–	NA
Papua Selatan	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	NA
Papua Pegunungan	100,00	–	–
Indonesia	2,26	2,36	4,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.18
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun Menurut Karakteristik dan
Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	83,05	34,12	48,93
Perdesaan	67,42	42,63	24,78
Jenis Kelamin			
Laki-laki	78,80	37,85	40,94
Perempuan	78,56	35,02	43,54
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	72,68	49,81	22,86
SD/Sederajat	71,02	49,73	21,28
SMP/Sederajat	71,91	43,66	28,25
SMA/Sederajat	82,04	33,81	48,22
Perguruan Tinggi	88,62	15,84	72,78
Status Ekonomi			
Kuintil 1	67,98	50,08	17,90
Kuintil 2	79,36	51,00	28,36
Kuintil 3	76,21	41,99	34,22
Kuintil 4	80,10	36,77	43,32
Kuintil 5	85,54	13,95	71,59
Indonesia	78,69	36,50	42,19

Lanjutan Tabel 3.18

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	2,26	3,17	4,76
Perdesaan	2,26	0,28	2,70
Jenis Kelamin			
Laki-laki	2,49	1,84	4,86
Perempuan	2,01	2,93	3,45
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,66	NA	NA
SD/Sederajat	1,98	NA	1,34
SMP/Sederajat	4,01	NA	1,95
SMA/Sederajat	2,06	NA	5,81
Perguruan Tinggi	1,21	10,72	6,41
Status Ekonomi			
Kuintil 1	3,30	NA	NA
Kuintil 2	1,94	NA	2,02
Kuintil 3	3,46	NA	3,45
Kuintil 4	1,97	0,75	3,84
Kuintil 5	1,18	7,90	8,26
Indonesia	2,26	2,36	4,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.19

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,51	52,15	4,36
Sumatera Utara	21,15	11,10	10,05
Sumatera Barat	34,74	15,13	19,61
R i a u	42,19	14,22	27,97
J a m b i	25,63	11,21	14,42
Sumatera Selatan	34,77	16,76	18,00
Bengkulu	39,36	21,71	17,64
Lampung	22,29	15,33	6,96
Kep. Bangka Belitung	42,01	21,75	20,26
Kep. Riau	70,09	9,77	60,32
DKI Jakarta	75,68	48,44	27,24
Jawa Barat	41,52	16,96	24,55
Jawa Tengah	35,42	17,98	17,44
DI Yogyakarta	52,47	33,62	18,85
Jawa Timur	30,85	15,59	15,26
Banten	38,73	22,54	16,19
B a l i	35,95	18,18	17,77
Nusa Tenggara Barat	30,71	21,72	8,99
Nusa Tenggara Timur	45,70	35,11	10,59
Kalimantan Barat	36,44	19,37	17,07
Kalimantan Tengah	32,32	17,64	14,68
Kalimantan Selatan	47,32	22,98	24,34
Kalimantan Timur	65,45	24,81	40,64
Kalimantan Utara	64,79	42,85	21,93
Sulawesi Utara	34,05	20,76	13,29
Sulawesi Tengah	42,13	33,29	8,83
Sulawesi Selatan	62,07	41,52	20,55
Sulawesi Tenggara	50,93	33,42	17,51
Gorontalo	51,09	42,08	9,00
Sulawesi Barat	54,19	39,97	14,21
Maluku	27,33	7,68	19,65
Maluku Utara	41,75	17,49	24,27
Papua Barat	37,87	22,65	15,23
Papua Barat Daya	48,70	37,74	10,96
Papua	53,46	38,47	14,99
Papua Selatan	52,47	43,98	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	55,51	35,51	20,00
Indonesia	39,69	21,20	18,49



Lanjutan Tabel 3.19

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,82	–	NA
Sumatera Utara	NA	NA	1,59
Sumatera Barat	NA	NA	2,46
R i a u	1,98	NA	NA
J a m b i	–	NA	NA
Sumatera Selatan	3,49	NA	NA
Bengkulu	NA	–	NA
Lampung	5,80	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	NA	NA
Kep. Riau	NA	–	NA
DKI Jakarta	–	NA	NA
Jawa Barat	–	2,29	2,09
Jawa Tengah	0,94	0,48	1,11
DI Yogyakarta	NA	–	NA
Jawa Timur	0,68	NA	1,94
Banten	1,69	NA	1,93
B a l i	–	NA	–
Nusa Tenggara Barat	2,94	NA	NA
Nusa Tenggara Timur	5,36	–	NA
Kalimantan Barat	NA	NA	NA
Kalimantan Tengah	NA	–	NA
Kalimantan Selatan	NA	–	NA
Kalimantan Timur	–	NA	8,93
Kalimantan Utara	–	–	NA
Sulawesi Utara	NA	–	NA
Sulawesi Tengah	3,11	–	NA
Sulawesi Selatan	0,98	NA	1,59
Sulawesi Tenggara	5,14	–	NA
Gorontalo	NA	–	NA
Sulawesi Barat	7,80	–	–
Maluku	7,33	–	NA
Maluku Utara	15,98	–	NA
Papua Barat	25,75	–	NA
Papua Barat Daya	NA	–	NA
Papua	7,13	–	NA
Papua Selatan	19,46	–	–
Papua Tengah	6,27	–	–
Papua Pegunungan	50,92	–	–
Indonesia	1,31	0,81	1,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.20
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat
Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan,
2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	48,38	23,43	24,95
Perdesaan	24,61	17,33	7,27
Jenis Kelamin			
Laki-laki	39,28	21,18	18,10
Perempuan	40,13	21,22	18,90
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	28,45	21,23	7,22
SD/Sederajat	29,17	21,65	7,53
SMP/Sederajat	33,16	22,30	10,85
SMA/Sederajat	48,10	23,22	24,89
Perguruan Tinggi	51,26	11,92	39,34
Status Ekonomi			
Kuintil 1	31,24	25,55	5,69
Kuintil 2	34,19	23,47	10,72
Kuintil 3	40,95	22,27	18,67
Kuintil 4	48,23	21,39	26,85
Kuintil 5	47,26	10,58	36,68
Indonesia	39,69	21,20	18,49

Lanjutan Tabel 3.20

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,95	1,27	2,13
Perdesaan	1,94	NA	0,78
Jenis Kelamin			
Laki-laki	1,28	0,68	1,78
Perempuan	1,34	0,96	1,47
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,60	NA	NA
SD/Sederajat	1,42	–	NA
SMP/Sederajat	1,33	NA	0,98
SMA/Sederajat	1,21	0,47	2,75
Perguruan Tinggi	0,59	4,86	2,40
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1,91	NA	NA
Kuintil 2	1,37	NA	0,82
Kuintil 3	1,60	NA	1,13
Kuintil 4	0,83	NA	1,62
Kuintil 5	0,58	4,48	5,18
Indonesia	1,31	0,81	1,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.21
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan
dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan
Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,24	74,52	19,72
Sumatera Utara	66,24	20,83	45,41
Sumatera Barat	78,45	41,45	37,00
R i a u	59,86	18,82	41,04
J a m b i	61,62	24,12	37,50
Sumatera Selatan	73,44	41,08	32,36
Bengkulu	83,20	46,84	36,36
Lampung	65,39	39,48	25,91
Kep. Bangka Belitung	78,07	42,38	35,69
Kep. Riau	90,54	6,62	83,92
DKI Jakarta	78,65	54,33	24,33
Jawa Barat	71,66	26,43	45,23
Jawa Tengah	68,57	31,59	36,98
DI Yogyakarta	78,87	38,99	39,88
Jawa Timur	67,10	34,58	32,52
Banten	72,44	27,68	44,77
B a l i	76,60	29,94	46,66
Nusa Tenggara Barat	65,03	52,89	12,14
Nusa Tenggara Timur	64,48	44,15	20,33
Kalimantan Barat	61,35	33,68	27,67
Kalimantan Tengah	68,20	42,72	25,48
Kalimantan Selatan	82,57	41,29	41,28
Kalimantan Timur	80,77	25,17	55,60
Kalimantan Utara	82,36	52,35	30,01
Sulawesi Utara	78,62	27,60	51,02
Sulawesi Tengah	62,89	44,70	18,19
Sulawesi Selatan	79,64	50,44	29,20
Sulawesi Tenggara	74,85	45,78	29,07
Gorontalo	83,39	49,70	33,69
Sulawesi Barat	60,55	28,35	32,20
Maluku	65,93	16,37	49,56
Maluku Utara	50,14	17,46	32,68
Papua Barat	54,57	30,82	23,75
Papua Barat Daya	65,17	41,09	24,08
Papua	86,89	45,40	41,50
Papua Selatan	80,39	46,60	33,79
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	100,00	8,77	91,23
Indonesia	71,40	34,26	37,14



Lanjutan Tabel 3.21

Provinsi	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	NA	–	NA
Sumatera Utara	0,01	NA	3,95
Sumatera Barat	–	–	NA
R i a u	–	NA	NA
J a m b i	–	NA	NA
Sumatera Selatan	–	NA	2,50
Bengkulu	NA	NA	NA
Lampung	NA	–	5,27
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA
Kep. Riau	NA	–	NA
DKI Jakarta	–	NA	9,76
Jawa Barat	NA	3,84	3,62
Jawa Tengah	NA	1,22	2,20
DI Yogyakarta	NA	NA	NA
Jawa Timur	1,94	NA	4,59
Banten	–	NA	3,92
B a l i	–	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	3,16	–	NA
Nusa Tenggara Timur	3,97	–	NA
Kalimantan Barat	NA	–	–
Kalimantan Tengah	–	NA	NA
Kalimantan Selatan	–	–	NA
Kalimantan Timur	–	NA	11,60
Kalimantan Utara	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	NA	NA
Sulawesi Tengah	NA	–	NA
Sulawesi Selatan	1,98	–	3,44
Sulawesi Tenggara	NA	–	0,37
Gorontalo	–	–	NA
Sulawesi Barat	13,14	–	–
Maluku	NA	–	NA
Maluku Utara	8,96	–	NA
Papua Barat	22,23	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–
Papua	NA	–	NA
Papua Selatan	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	NA
Papua Pegunungan	NA	–	–
Indonesia	1,14	2,00	2,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.22
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan Jaminan Kesehatan
dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan
Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	75,00	32,22	42,78
Perdesaan	62,12	39,54	22,57
Jenis Kelamin			
Laki-laki	71,25	35,78	35,47
Perempuan	71,56	32,61	38,95
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	66,23	47,42	18,80
SD/Sederajat	65,97	45,51	20,46
SMP/Sederajat	65,37	41,76	23,61
SMA/Sederajat	76,82	31,94	44,88
Perguruan Tinggi	73,21	14,78	58,43
Status Ekonomi			
Kuintil 1	62,00	46,16	15,84
Kuintil 2	74,63	49,35	25,28
Kuintil 3	71,58	39,85	31,73
Kuintil 4	76,18	34,73	41,45
Kuintil 5	70,92	12,14	58,79
Indonesia	71,40	34,26	37,14

Lanjutan Tabel 3.22

Karakteristik	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	1,03	2,70	4,33
Perdesaan	1,43	0,21	2,09
Jenis Kelamin			
Laki-laki	1,17	1,58	4,49
Perempuan	1,11	2,47	2,85
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,14	—	NA
SD/Sederajat	1,08	NA	NA
SMP/Sederajat	NA	NA	1,91
SMA/Sederajat	1,11	NA	5,56
Perguruan Tinggi	0,44	8,81	5,12
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2,35	NA	NA
Kuintil 2	1,22	NA	2,02
Kuintil 3	1,77	NA	3,27
Kuintil 4	NA	NA	3,40
Kuintil 5	0,18	6,69	7,36
Indonesia	1,14	2,00	3,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.23
Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	24,79	25,88	24,02
Sumatera Utara	41,04	41,12	43,86
Sumatera Barat	39,12	39,76	38,36
R i a u	45,03	45,63	46,28
J a m b i	52,99	53,68	52,37
Sumatera Selatan	54,30	54,47	52,82
Bengkulu	71,41	72,16	71,59
Lampung	73,76	74,40	70,57
Kep. Bangka Belitung	72,51	73,39	72,83
Kep. Riau	70,75	70,99	72,19
DKI Jakarta	65,76	66,07	66,88
Jawa Barat	64,45	64,51	66,09
Jawa Tengah	74,83	75,46	77,87
DI Yogyakarta	84,50	85,58	83,73
Jawa Timur	75,41	75,27	75,46
Banten	50,82	51,23	50,02
B a l i	81,65	82,09	85,20
Nusa Tenggara Barat	70,74	71,38	69,68
Nusa Tenggara Timur	72,12	72,35	72,03
Kalimantan Barat	53,78	54,52	53,41
Kalimantan Tengah	56,36	56,73	57,58
Kalimantan Selatan	69,60	70,57	66,61
Kalimantan Timur	69,51	70,15	67,96
Kalimantan Utara	70,01	57,69	60,08
Sulawesi Utara	67,80	68,03	68,46
Sulawesi Tengah	60,82	61,62	57,35
Sulawesi Selatan	67,85	68,85	67,45
Sulawesi Tenggara	71,81	72,44	65,92
Gorontalo	70,56	71,47	68,50
Sulawesi Barat	58,44	58,82	56,26
Maluku	60,12	60,49	55,11
Maluku Utara	52,55	53,49	52,64
Papua Barat	53,24 ¹	57,73	55,27
Papua Barat Daya	–	50,01	53,98
Papua	50,37 ²	51,82	57,69
Papua Selatan	–	62,64	58,67
Papua Tengah	–	34,60	28,86
Papua Pegunungan	–	18,41	21,09
Indonesia	63,58	63,69	63,88

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.24
Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	65,92	65,18	65,60
Perdesaan	60,47	61,68	61,49
Jenis Kelamin			
Laki-laki	63,43	63,56	63,69
Perempuan	63,75	63,83	64,08
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	56,95	61,81	59,55
SD/Sederajat	62,35	62,05	61,30
SMP/Sederajat	63,04	63,45	62,98
SMA/Sederajat	64,37	64,32	64,62
Perguruan Tinggi	70,10	67,44	70,83
Status Ekonomi			
Kuintil 1	59,60	62,43	60,97
Kuintil 2	61,79	61,45	61,40
Kuintil 3	62,02	61,42	61,64
Kuintil 4	66,77	65,90	67,31
Kuintil 5	72,39	71,10	72,03
Indonesia	63,58	63,69	63,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.25
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi
Menurut Provinsi dan Tempat Pemberian Imunisasi, 2025

Provinsi	RS Pemerintah/ RS Swasta	Klinik	Praktik Dokter/Bidan	Puskesmas/ Pustu/Pusling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	16,82	2,88	13,40	11,46
Sumatera Utara	8,36	5,06	13,38	11,29
Sumatera Barat	10,69	4,24	11,92	11,89
R i a u	13,28	4,25	11,61	9,99
J a m b i	8,87	1,67	12,96	18,45
Sumatera Selatan	6,40	3,11	16,84	13,01
Bengkulu	8,23	3,83	11,84	12,29
Lampung	6,14	2,84	18,81	6,70
Kep. Bangka Belitung	13,89	1,52	8,88	13,96
Kep. Riau	19,04	11,24	18,94	7,31
DKI Jakarta	20,58	5,73	15,06	40,10
Jawa Barat	10,45	5,25	29,58	10,75
Jawa Tengah	10,95	2,48	17,70	28,91
DI Yogyakarta	16,76	10,47	39,99	45,29
Jawa Timur	12,12	1,32	12,00	16,74
Banten	13,67	6,04	15,99	14,80
B a l i	19,54	4,06	20,81	40,04
Nusa Tenggara Barat	6,22	0,71	2,06	14,63
Nusa Tenggara Timur	9,36	0,77	0,44	30,12
Kalimantan Barat	7,89	4,04	10,04	14,97
Kalimantan Tengah	7,04	4,12	10,32	23,55
Kalimantan Selatan	9,12	2,03	9,51	20,24
Kalimantan Timur	17,26	6,71	10,05	27,21
Kalimantan Utara	11,02	NA	14,26	36,19
Sulawesi Utara	11,96	2,54	3,62	27,85
Sulawesi Tengah	10,91	1,08	1,87	14,39
Sulawesi Selatan	13,07	1,41	3,13	21,99
Sulawesi Tenggara	6,91	0,61	1,83	18,67
Gorontalo	12,00	NA	NA	19,50
Sulawesi Barat	6,38	0,95	1,35	23,64
Maluku	5,30	NA	3,20	17,27
Maluku Utara	8,81	1,31	1,01	19,81
Papua Barat	7,23	2,21	1,28	36,99
Papua Barat Daya	7,16	NA	4,31	32,86
Papua	20,35	NA	1,13	31,01
Papua Selatan	2,03	3,48	2,72	48,61
Papua Tengah	10,56	4,20	2,41	36,16
Papua Pegunungan	2,43	NA	NA	59,54
Indonesia	11,23	3,54	15,69	18,71

Lanjutan Tabel 3.25

Provinsi	Polindes/Poskesdes	Posyandu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	9,19	58,09	1,11
Sumatera Utara	5,65	62,07	1,67
Sumatera Barat	4,75	64,78	0,43
Riau	6,06	61,67	1,00
Jambi	4,05	58,88	0,60
Sumatera Selatan	12,55	55,71	0,34
Bengkulu	4,97	64,71	1,53
Lampung	3,23	69,92	0,46
Kep. Bangka Belitung	1,78	67,83	NA
Kep. Riau	NA	58,55	NA
DKI Jakarta	NA	29,18	NA
Jawa Barat	1,78	54,22	0,30
Jawa Tengah	8,74	46,73	0,66
DI Yogyakarta	NA	8,48	2,41
Jawa Timur	10,83	59,35	0,51
Banten	0,95	59,63	NA
Bali	0,95	25,27	–
Nusa Tenggara Barat	9,56	78,01	0,55
Nusa Tenggara Timur	11,18	63,91	1,18
Kalimantan Barat	9,27	60,13	0,22
Kalimantan Tengah	4,01	52,94	2,23
Kalimantan Selatan	7,93	57,45	1,05
Kalimantan Timur	1,67	46,87	NA
Kalimantan Utara	1,67	49,74	NA
Sulawesi Utara	2,11	60,68	NA
Sulawesi Tengah	8,88	67,85	1,92
Sulawesi Selatan	2,94	68,93	0,18
Sulawesi Tenggara	4,72	73,12	0,27
Gorontalo	3,72	72,53	0,49
Sulawesi Barat	2,76	71,56	0,53
Maluku	5,26	68,23	3,11
Maluku Utara	12,55	58,74	0,88
Papua Barat	1,93	52,51	3,24
Papua Barat Daya	1,72	59,92	1,74
Papua	1,11	56,08	NA
Papua Selatan	2,48	44,39	–
Papua Tengah	NA	49,05	–
Papua Pegunungan	5,46	26,86	2,14
Indonesia	5,67	55,98	0,62

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.26
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi
Menurut Karakteristik dan Tempat Pemberian Imunisasi, 2025

Provinsi	RS Pemerintah/ RS Swasta	Klinik	Praktik Dokter/Bidan	Puskesmas/ Pustu/Pusling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	14,15	4,90	19,89	20,27
Perdesaan	6,98	1,55	9,61	16,44
Jenis Kelamin				
Laki-laki	11,42	3,74	15,62	18,91
Perempuan	11,03	3,33	15,77	18,50
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	7,65	1,16	11,02	18,01
SD/Sederajat	7,58	1,72	12,73	16,82
SMP/Sederajat	8,22	2,20	15,55	18,84
SMA/Sederajat	11,89	4,93	17,56	20,15
Perguruan Tinggi	22,83	6,39	18,87	18,24
Status Ekonomi				
Kuintil 1	6,12	1,39	12,09	18,39
Kuintil 2	7,92	2,03	14,20	18,51
Kuintil 3	9,64	3,15	14,46	19,63
Kuintil 4	12,37	5,33	17,51	19,96
Kuintil 5	24,82	7,51	23,13	16,83
Indonesia	11,23	3,54	15,69	18,71

Lanjutan Tabel 3.26

Provinsi	Polindes/Poskesdes	Posyandu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	3,46	49,38	0,36
Perdesaan	8,87	65,56	0,99
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,77	55,42	0,57
Perempuan	5,56	56,56	0,67
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	7,89	65,16	0,87
SD/Sederajat	6,79	63,46	0,94
SMP/Sederajat	6,35	60,07	0,50
SMA/Sederajat	4,86	52,54	0,48
Perguruan Tinggi	3,49	40,19	0,45
Status Ekonomi			
Kuintil 1	7,43	64,25	0,92
Kuintil 2	6,54	61,71	0,62
Kuintil 3	5,58	57,50	0,64
Kuintil 4	5,02	52,16	0,33
Kuintil 5	2,47	37,10	0,44
Indonesia	5,67	55,98	0,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.27
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut
Provinsi dan dan Pemberi Imunisasi, 2025

Provinsi	Dokter Spesialis Anak	Dokter Umum	Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,31	3,24	83,18
Sumatera Utara	7,41	2,58	86,17
Sumatera Barat	9,18	1,42	87,38
R i a u	11,37	2,09	83,63
J a m b i	6,42	3,67	84,89
Sumatera Selatan	6,39	1,74	86,76
Bengkulu	7,48	4,02	79,50
Lampung	4,69	1,24	92,72
Kep. Bangka Belitung	12,58	8,07	67,88
Kep. Riau	16,88	5,49	76,02
DKI Jakarta	20,75	5,82	70,41
Jawa Barat	8,76	1,14	88,97
Jawa Tengah	8,49	2,10	91,46
DI Yogyakarta	18,07	3,68	80,89
Jawa Timur	8,65	0,86	89,86
Banten	12,40	1,84	84,40
B a l i	25,10	3,94	72,45
Nusa Tenggara Barat	4,32	2,08	54,99
Nusa Tenggara Timur	3,92	2,01	88,26
Kalimantan Barat	4,85	1,65	83,91
Kalimantan Tengah	4,85	2,13	70,92
Kalimantan Selatan	7,38	2,43	79,19
Kalimantan Timur	14,60	2,73	73,25
Kalimantan Utara	9,66	3,32	65,24
Sulawesi Utara	10,21	7,95	50,83
Sulawesi Tengah	5,85	3,37	66,72
Sulawesi Selatan	6,24	1,80	80,10
Sulawesi Tenggara	2,91	1,75	67,76
Gorontalo	5,31	2,99	53,75
Sulawesi Barat	2,56	0,95	78,60
Maluku	3,38	2,06	75,92
Maluku Utara	3,63	2,21	83,12
Papua Barat	5,43	2,01	63,91
Papua Barat Daya	5,96	1,15	46,90
Papua	6,27	2,64	68,96
Papua Selatan	3,47	3,14	70,71
Papua Tengah	4,65	1,41	66,05
Papua Pegunungan	0,86	3,20	61,27
Indonesia	9,02	2,11	83,79



Lanjutan Tabel 3.27

Provinsi	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,25	5,43	1,42
Sumatera Utara	5,60	4,21	1,56
Sumatera Barat	3,66	3,51	1,94
R i a u	4,49	5,80	0,88
J a m b i	9,02	5,26	1,04
Sumatera Selatan	7,40	6,06	0,61
Bengkulu	16,16	8,11	1,08
Lampung	2,92	2,49	0,97
Kep. Bangka Belitung	23,71	11,65	2,05
Kep. Riau	11,92	7,27	0,52
DKI Jakarta	4,76	6,01	NA
Jawa Barat	2,57	3,12	1,03
Jawa Tengah	2,92	1,86	0,54
DI Yogyakarta	8,23	2,91	NA
Jawa Timur	4,08	3,38	1,61
Banten	1,84	4,25	0,48
B a l i	5,41	2,60	NA
Nusa Tenggara Barat	43,71	9,05	1,64
Nusa Tenggara Timur	18,47	2,89	1,85
Kalimantan Barat	12,38	6,53	0,70
Kalimantan Tengah	30,86	5,79	0,49
Kalimantan Selatan	15,44	7,19	0,73
Kalimantan Timur	13,18	7,27	1,91
Kalimantan Utara	31,51	5,05	1,88
Sulawesi Utara	35,29	9,01	NA
Sulawesi Tengah	28,64	11,65	3,39
Sulawesi Selatan	15,83	6,78	1,39
Sulawesi Tenggara	32,93	5,05	0,59
Gorontalo	47,56	7,75	NA
Sulawesi Barat	20,37	6,81	1,82
Maluku	20,20	7,00	3,32
Maluku Utara	12,12	5,62	0,76
Papua Barat	30,69	4,22	1,05
Papua Barat Daya	50,16	6,73	1,65
Papua	28,49	2,62	1,15
Papua Selatan	31,95	3,98	1,61
Papua Tengah	29,72	6,11	–
Papua Pegunungan	31,53	10,99	NA
Indonesia	8,68	4,38	1,09

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.28
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut
Karakteristik dan dan Pemberi Imunisasi, 2025

Karakteristik	Dokter Spesialis Anak	Dokter Umum	Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	12,37	2,44	81,03
Perdesaan	4,17	1,63	87,80
Jenis Kelamin			
Laki-laki	9,33	2,01	83,48
Perempuan	8,70	2,22	84,11
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	4,17	1,77	87,50
SD/Sederajat	4,94	1,37	87,94
SMP/Sederajat	5,88	1,78	87,88
SMA/Sederajat	9,46	2,60	83,05
Perguruan Tinggi	23,10	2,78	69,70
Status Ekonomi			
Kuintil 1	3,63	1,37	88,99
Kuintil 2	5,10	1,71	87,64
Kuintil 3	6,50	2,24	85,25
Kuintil 4	10,25	2,59	82,61
Kuintil 5	25,05	3,14	69,49
Indonesia	9,02	2,11	83,79

Lanjutan Tabel 3.28

Karakteristik	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	6,99	4,32	0,89
Perdesaan	11,13	4,46	1,38
Jenis Kelamin			
Laki-laki	8,79	4,45	0,95
Perempuan	8,57	4,30	1,22
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	11,24	4,12	1,22
SD/Sederajat	8,97	4,14	1,25
SMP/Sederajat	7,74	4,14	1,29
SMA/Sederajat	8,52	4,68	0,93
Perguruan Tinggi	8,48	4,46	0,85
Status Ekonomi			
Kuintil 1	9,24	3,58	1,54
Kuintil 2	8,95	4,56	1,05
Kuintil 3	8,67	4,91	1,02
Kuintil 4	8,31	4,86	0,78
Kuintil 5	7,84	4,16	0,85
Indonesia	8,68	4,38	1,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.29
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut
Provinsi dan Alasan Tidak Diberi Imunisasi, 2025

Provinsi	Tidak tahu manfaat imunisasi	Tidak memiliki biaya	Tidak tahu program imunisasi	Khawatir dengan efek samping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	16,15	2,10	5,94	80,89
Sumatera Utara	24,56	4,94	7,95	77,67
Sumatera Barat	20,21	4,40	9,54	77,20
R i a u	26,53	7,92	22,61	72,85
J a m b i	21,16	5,48	6,21	75,40
Sumatera Selatan	36,31	7,28	11,43	69,58
Bengkulu	26,64	NA	NA	55,55
Lampung	35,71	NA	8,55	76,24
Kep. Bangka Belitung	15,96	–	NA	71,05
Kep. Riau	37,74	NA	NA	80,29
DKI Jakarta	31,87	NA	NA	59,67
Jawa Barat	26,16	9,37	12,59	74,97
Jawa Tengah	44,91	7,45	12,94	69,14
DI Yogyakarta	–	–	–	10,76
Jawa Timur	41,48	3,65	11,35	85,84
Banten	41,45	5,22	11,16	80,08
B a l i	42,68	NA	2,15	54,77
Nusa Tenggara Barat	26,42	–	23,00	53,86
Nusa Tenggara Timur	54,33	NA	8,61	52,33
Kalimantan Barat	21,80	5,97	11,49	72,88
Kalimantan Tengah	30,43	9,19	21,04	71,49
Kalimantan Selatan	20,50	3,72	9,07	78,33
Kalimantan Timur	24,29	12,01	8,33	62,15
Kalimantan Utara	30,03	NA	NA	51,21
Sulawesi Utara	23,16	NA	NA	36,58
Sulawesi Tengah	21,51	NA	21,24	46,31
Sulawesi Selatan	37,15	NA	7,71	67,34
Sulawesi Tenggara	24,51	NA	8,70	78,38
Gorontalo	27,54	NA	NA	56,24
Sulawesi Barat	22,18	NA	12,46	73,85
Maluku	11,69	4,69	11,63	69,76
Maluku Utara	42,83	6,96	22,69	67,94
Papua Barat	52,38	37,41	40,84	51,86
Papua Barat Daya	58,77	NA	NA	60,45
Papua	63,11	19,10	16,47	39,75
Papua Selatan	65,34	–	29,41	55,92
Papua Tengah	65,29	19,57	39,26	51,00
Papua Pegunungan	79,33	34,59	64,05	46,22
Indonesia	29,63	6,28	12,09	74,43

Lanjutan Tabel 3.29

Provinsi	Khawatir dengan kandungan dalam vaksin	Ragu terhadap efektivitas imunisasi	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	59,46	47,03	7,32
Sumatera Utara	36,23	38,88	6,31
Sumatera Barat	60,12	51,20	11,85
R i a u	49,15	43,24	13,34
J a m b i	38,31	27,51	15,93
Sumatera Selatan	31,52	34,43	13,69
Bengkulu	27,56	30,36	36,34
Lampung	38,98	42,84	15,66
Kep. Bangka Belitung	55,37	54,63	NA
Kep. Riau	69,11	52,46	NA
DKI Jakarta	NA	NA	27,36
Jawa Barat	44,98	44,37	15,70
Jawa Tengah	24,31	22,01	17,47
DI Yogyakarta	10,76	10,76	89,24
Jawa Timur	37,39	34,99	7,78
Banten	39,54	40,86	17,71
B a l i	NA	NA	40,22
Nusa Tenggara Barat	36,42	45,67	13,74
Nusa Tenggara Timur	8,22	15,16	25,23
Kalimantan Barat	46,94	47,53	6,63
Kalimantan Tengah	35,88	43,19	11,01
Kalimantan Selatan	46,04	42,12	15,45
Kalimantan Timur	36,30	48,56	20,44
Kalimantan Utara	33,81	43,12	22,94
Sulawesi Utara	NA	2,91	56,60
Sulawesi Tengah	19,29	24,98	27,27
Sulawesi Selatan	34,13	29,51	23,53
Sulawesi Tenggara	29,09	29,25	11,46
Gorontalo	4,77	10,38	38,69
Sulawesi Barat	39,13	27,12	13,92
Maluku	44,97	42,37	16,07
Maluku Utara	28,92	30,34	9,96
Papua Barat	41,05	54,53	11,39
Papua Barat Daya	2,94	12,25	NA
Papua	24,14	31,03	12,74
Papua Selatan	9,08	9,73	15,10
Papua Tengah	18,59	14,02	5,72
Papua Pegunungan	37,24	39,21	13,01
Indonesia	41,37	39,21	13,09

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.30
Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Tidak Pernah Diberi Imunisasi Menurut
Karakteristik dan Alasan Tidak Diberi Imunisasi, 2025

Provinsi	Tidak tahu manfaat imunisasi	Tidak memiliki biaya	Tidak tahu program imunisasi	Khawatir dengan efek samping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	27,65	5,86	10,20	76,74
Perdesaan	32,13	6,81	14,47	71,53
Jenis Kelamin				
Laki-laki	28,71	6,15	12,45	73,71
Perempuan	30,55	6,40	11,73	75,16
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	38,09	9,45	23,43	65,51
SD/Sederajat	30,04	7,02	13,69	73,49
SMP/Sederajat	34,26	7,13	12,50	74,18
SMA/Sederajat	25,01	5,42	8,93	76,69
Perguruan Tinggi	25,96	1,98	4,81	79,89
Status Ekonomi				
Kuintil 1	30,50	8,80	14,90	71,73
Kuintil 2	30,10	6,80	13,20	74,67
Kuintil 3	27,39	5,35	10,44	75,80
Kuintil 4	29,98	4,36	8,63	73,88
Kuintil 5	30,08	2,15	9,73	80,32
Indonesia	29,63	6,28	12,09	74,43

Lanjutan Tabel 3.30

Provinsi	Khawatir dengan kandungan dalam vaksin	Ragu terhadap efektivitas imunisasi	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	43,29	42,17	13,44
Perdesaan	38,95	35,49	12,64
Jenis Kelamin			
Laki-laki	41,66	40,01	13,33
Perempuan	41,07	38,42	12,84
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	33,84	36,48	13,98
SD/Sederajat	39,53	38,53	12,78
SMP/Sederajat	41,77	36,87	16,02
SMA/Sederajat	42,48	41,03	13,40
Perguruan Tinggi	50,34	42,43	6,52
Status Ekonomi			
Kuintil 1	39,17	37,65	14,70
Kuintil 2	40,77	37,67	12,79
Kuintil 3	42,30	41,65	12,13
Kuintil 4	42,89	40,24	14,23
Kuintil 5	45,34	41,23	8,91
Indonesia	41,37	39,21	13,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.31
Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi,
2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,22	94,30	95,32
Sumatera Utara	89,00	89,88	94,07
Sumatera Barat	96,41	97,55	96,70
Riau	92,51	93,07	94,20
Jambi	95,44	95,20	94,93
Sumatera Selatan	92,66	93,29	92,33
Bengkulu	94,38	94,51	95,33
Lampung	94,10	94,63	96,67
Kep. Bangka Belitung	90,42	90,94	90,07
Kep. Riau	93,30	93,13	92,40
DKI Jakarta	90,69	91,41	94,28
Jawa Barat	93,04	93,91	95,14
Jawa Tengah	96,02	97,02	96,53
DI Yogyakarta	98,66	99,03	97,45
Jawa Timur	92,69	93,07	94,95
Banten	89,23	89,71	94,65
Bali	91,55	92,85	96,75
Nusa Tenggara Barat	96,65	97,09	97,19
Nusa Tenggara Timur	95,58	96,08	96,94
Kalimantan Barat	94,39	94,86	93,40
Kalimantan Tengah	91,02	91,49	92,75
Kalimantan Selatan	95,25	95,47	95,88
Kalimantan Timur	96,39	96,71	95,71
Kalimantan Utara	95,35	97,15	97,59
Sulawesi Utara	84,54	85,15	91,12
Sulawesi Tengah	89,72	90,53	92,87
Sulawesi Selatan	92,51	92,89	92,24
Sulawesi Tenggara	92,15	92,46	94,96
Gorontalo	90,32	90,68	92,84
Sulawesi Barat	94,38	94,73	96,23
Maluku	92,00	92,27	93,26
Maluku Utara	91,41	91,50	90,65
Papua Barat	88,71 ¹	89,47	86,51
Papua Barat Daya	–	92,64	90,00
Papua	82,38 ²	84,94	87,03
Papua Selatan	–	85,84	92,96
Papua Tengah	–	79,07	95,17
Papua Pegunungan	–	91,22	95,53
Indonesia	93,02	93,63	94,91

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.32
Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	92,78	93,37	94,57
Perdesaan	93,32	93,96	95,39
Jenis Kelamin			
Laki-laki	92,82	93,52	94,63
Perempuan	93,22	93,74	95,21
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	92,27	93,62	93,46
SD/Sederajat	93,30	94,29	94,81
SMP/Sederajat	92,98	93,92	95,66
SMA/Sederajat	93,27	92,89	94,67
Perguruan Tinggi	92,44	93,79	95,72
Status Ekonomi			
Kuintil 1	94,24	94,98	96,38
Kuintil 2	93,94	94,06	95,05
Kuintil 3	92,33	92,90	94,41
Kuintil 4	92,15	93,32	94,22
Kuintil 5	91,27	91,55	93,64
Indonesia	93,02	93,63	94,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.33
Persentase Bayi Umur 0–5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Provinsi,
2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65,21	67,81	68,61
Sumatera Utara	60,35	66,42	70,93
Sumatera Barat	75,09	76,44	72,33
Riau	70,91	71,51	67,55
Jambi	69,02	73,73	70,30
Sumatera Selatan	72,48	75,68	69,29
Bengkulu	71,61	73,88	67,72
Lampung	74,82	76,24	76,68
Kep. Bangka Belitung	63,30	63,72	57,69
Kep. Riau	62,52	63,58	64,82
DKI Jakarta	69,76	76,90	74,10
Jawa Barat	76,76	79,57	76,40
Jawa Tengah	79,22	80,27	75,35
DI Yogyakarta	78,25	80,42	85,08
Jawa Timur	70,96	73,32	68,37
Banten	72,97	75,36	72,44
Bali	69,01	69,42	69,05
Nusa Tenggara Barat	81,09	83,07	77,78
Nusa Tenggara Timur	77,47	79,53	76,45
Kalimantan Barat	67,90	73,34	71,00
Kalimantan Tengah	55,21	59,85	60,62
Kalimantan Selatan	63,09	66,01	66,69
Kalimantan Timur	75,36	78,38	80,09
Kalimantan Utara	73,14	73,71	70,42
Sulawesi Utara	61,03	64,95	60,81
Sulawesi Tengah	65,07	65,84	69,58
Sulawesi Selatan	76,56	77,58	71,36
Sulawesi Tenggara	62,20	66,42	65,71
Gorontalo	53,83	55,11	61,27
Sulawesi Barat	75,04	76,43	80,84
Maluku	61,52	61,61	57,59
Maluku Utara	69,03	69,58	71,37
Papua Barat	60,08 ¹	57,42	56,82
Papua Barat Daya	–	69,44	74,31
Papua	53,86 ²	44,64	53,18
Papua Selatan	–	65,71	65,32
Papua Tengah	–	63,49	72,01
Papua Pegunungan	–	82,25	78,69
Indonesia	72,00	74,54	72,13

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.34
Persentase Bayi Umur 0–5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	71,19	74,63	72,35
Perdesaan	72,95	74,43	71,79
Jenis Kelamin			
Laki-laki	71,61	75,07	70,01
Perempuan	72,42	74,01	74,40
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	70,57	72,53	69,94
SD/Sederajat	71,91	76,09	72,31
SMP/Sederajat	73,43	75,32	72,61
SMA/Sederajat	71,79	72,77	71,19
Perguruan Tinggi	71,87	76,63	75,99
Status Ekonomi			
Kuintil 1	75,77	78,53	75,58
Kuintil 2	73,35	76,87	76,74
Kuintil 3	68,21	74,53	69,68
Kuintil 4	71,79	70,51	66,94
Kuintil 5	68,32	68,36	68,55
Indonesia	72,00	74,54	72,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.35
Persentase Anak Umur 6–23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari
Delapan Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari Kemarin
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	57,35	61,59	66,17
Sumatera Utara	60,38	65,66	70,99
Sumatera Barat	60,98	65,74	72,07
R i a u	61,59	59,81	66,46
J a m b i	62,97	58,61	67,43
Sumatera Selatan	62,24	70,31	69,40
Bengkulu	63,26	69,75	69,15
Lampung	68,31	66,41	69,35
Kep. Bangka Belitung	69,38	74,84	76,01
Kep. Riau	79,95	75,94	83,96
DKI Jakarta	82,33	82,15	83,41
Jawa Barat	72,82	72,90	77,85
Jawa Tengah	70,51	70,24	76,37
DI Yogyakarta	81,59	82,97	88,99
Jawa Timur	71,95	67,93	71,99
Banten	66,80	70,90	69,44
B a l i	68,79	74,06	77,16
Nusa Tenggara Barat	67,28	67,98	73,67
Nusa Tenggara Timur	47,63	44,84	51,07
Kalimantan Barat	57,77	59,21	62,40
Kalimantan Tengah	57,12	59,96	62,11
Kalimantan Selatan	66,20	66,53	68,01
Kalimantan Timur	70,99	69,94	73,84
Kalimantan Utara	64,56	68,21	76,88
Sulawesi Utara	55,73	57,62	62,98
Sulawesi Tengah	49,57	60,20	57,97
Sulawesi Selatan	60,73	63,15	66,86
Sulawesi Tenggara	51,66	51,89	59,03
Gorontalo	50,31	54,48	55,24
Sulawesi Barat	50,47	61,76	62,46
Maluku	47,72	53,09	56,48
Maluku Utara	38,30	43,98	42,49
Papua Barat	53,00 ¹	55,29	57,64
Papua Barat Daya	–	50,32	58,84
Papua	52,35 ²	54,18	57,23
Papua Selatan	–	44,41	47,66
Papua Tengah	–	63,65	66,29
Papua Pegunungan	–	53,48	51,08
Indonesia	66,57	67,47	71,53

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.36
Persentase Anak Umur 6–23 Bulan yang Mengonsumsi Setidaknya Lima dari
Delapan Kelompok Makanan dan Minuman Selama Sehari-hari Kemarin Menurut
Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	72,29	73,44	75,53
Perdesaan	59,15	59,50	65,98
Jenis Kelamin			
Laki-laki	66,51	67,31	72,21
Perempuan	66,63	67,64	70,80
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	56,59	59,70	63,14
SD/Sederajat	61,60	62,93	66,39
SMP/Sederajat	65,76	66,73	73,24
SMA/Sederajat	70,63	70,29	73,71
Perguruan Tinggi	75,50	77,21	78,21
Status Ekonomi			
Kuintil 1	57,58	58,67	65,07
Kuintil 2	63,18	65,61	69,77
Kuintil 3	69,92	69,03	72,86
Kuintil 4	72,24	72,19	75,49
Kuintil 5	77,34	80,57	78,61
Indonesia	66,57	67,47	71,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 3.37
Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan
Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Provinsi	RS Pemerintah				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,49	1,03	15,86	4,47	8,50
Sumatera Utara	0,91	0,26	28,57 ¹	0,40	1,43
Sumatera Barat	4,84	1,01	20,91	2,85	6,82
R i a u	2,83	1,08	38,21 ¹	0,71	4,94
J a m b i	3,87	1,56	40,44 ¹	0,80	6,93
Sumatera Selatan	5,53	2,81	15,86	0,02	11,04
Bengkulu	5,64	2,07	36,68 ¹	1,59	9,70
Lampung	0,64	0,38	15,86	-0,09	1,38
Kep. Bangka Belitung	7,31	2,24	30,61 ¹	2,92	11,69
Kep. Riau	1,10	0,52	47,21 ¹	0,08	2,11
DKI Jakarta	13,29	2,84	21,35	7,73	18,85
Jawa Barat	4,50	0,82	18,18	2,90	6,10
Jawa Tengah	3,46	0,63	18,11	2,24	4,69
DI Yogyakarta	6,88	2,80	40,71 ¹	1,39	12,38
Jawa Timur	3,45	0,67	19,53	2,13	4,78
Banten	1,47	0,65	43,87 ¹	0,21	2,74
B a l i	4,14	1,13	27,32 ¹	1,92	6,35
Nusa Tenggara Barat	4,95	1,06	21,37	2,88	7,02
Nusa Tenggara Timur	3,48	0,87	24,99	1,78	5,19
Kalimantan Barat	3,39	1,10	32,43 ¹	1,23	5,54
Kalimantan Tengah	4,57	1,81	39,51 ¹	1,03	8,11
Kalimantan Selatan	12,04	3,12	25,92 ¹	5,92	18,16
Kalimantan Timur	9,22	2,75	29,87 ¹	3,82	14,62
Kalimantan Utara	9,86	3,41	34,57 ¹	3,18	16,54
Sulawesi Utara	3,16	1,15	36,39 ¹	0,91	5,41
Sulawesi Tengah	9,99	2,99	29,93 ¹	4,13	15,85
Sulawesi Selatan	3,74	1,27	33,92 ¹	1,25	6,22
Sulawesi Tenggara	9,78	3,29	33,68 ¹	3,32	16,24
Gorontalo	4,84	2,06	42,54 ¹	0,80	8,87
Sulawesi Barat	NA	–	72,31 ²	–	–
Maluku	5,49	2,34	42,53 ¹	0,91	10,08
Maluku Utara	NA	–	50,90 ²	–	–
Papua Barat	13,41	4,84	36,09 ¹	3,92	22,89
Papua Barat Daya	5,41	2,02	37,38 ¹	1,45	9,38
Papua	19,67	5,97	30,34 ¹	7,97	31,36
Papua Selatan	NA	–	65,37 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	7,90	2,03	25,64 ¹	3,93	11,87
Indonesia	4,46	0,30	6,65	3,87	5,04

Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	RS Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,60	0,54	34,05 ¹	0,53	2,67
Sumatera Utara	4,73	1,47	31,03 ¹	1,85	7,61
Sumatera Barat	2,43	0,74	30,53 ¹	0,98	3,89
Riau	8,72	2,13	24,48	4,53	12,90
Jambi	NA	–	50,91 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	54,12 ²	–	–
Bengkulu	4,64	1,70	36,73 ¹	1,30	7,98
Lampung	4,29	1,01	23,65	2,30	6,28
Kep. Bangka Belitung	6,39	1,90	29,71 ¹	2,67	10,12
Kep. Riau	22,78	7,43	32,61 ¹	8,22	37,34
DKI Jakarta	8,62	2,50	29,02 ¹	3,72	13,52
Jawa Barat	9,56	1,25	13,03	7,12	12,00
Jawa Tengah	6,94	0,84	12,14	5,29	8,60
DI Yogyakarta	19,58	3,69	18,84	12,35	26,81
Jawa Timur	4,55	0,76	16,66	3,06	6,04
Banten	7,96	2,03	25,46 ¹	3,99	11,94
Bali	6,36	1,70	26,82 ¹	3,02	9,70
Nusa Tenggara Barat	NA	–	72,38 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	2,16	0,88	40,61 ¹	0,44	3,88
Kalimantan Barat	1,94	0,70	35,97 ¹	0,57	3,30
Kalimantan Tengah	3,62	1,73	47,80 ¹	0,23	7,01
Kalimantan Selatan	3,95	1,67	42,28 ¹	0,68	7,22
Kalimantan Timur	10,64	2,29	21,57	6,14	15,14
Kalimantan Utara	NA	–	71,01 ²	–	–
Sulawesi Utara	4,50	1,80	39,88 ¹	0,98	8,02
Sulawesi Tengah	NA	–	73,56 ²	–	–
Sulawesi Selatan	4,16	1,42	34,06 ¹	1,38	6,93
Sulawesi Tenggara	NA	–	56,05 ²	–	1,51
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	1,33	0,66	49,89 ¹	0,03	2,63
Maluku	NA	–	57,00 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	53,55 ²	–	–
Papua	NA	–	73,23 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	6,49	0,39	6,01	6,49	0,39



Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	Klinik				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,32	1,43	13,89	7,51	13,13
Sumatera Utara	16,42	2,53	15,40	11,46	21,38
Sumatera Barat	14,63	1,87	12,79	10,96	18,29
R i a u	31,97	3,60	11,25	24,93	39,02
J a m b i	6,75	1,88	27,83 ¹	3,07	10,44
Sumatera Selatan	11,94	2,52	21,14	6,99	16,88
Bengkulu	6,46	1,79	27,66 ¹	2,96	9,96
Lampung	9,71	2,07	21,29	5,66	13,77
Kep. Bangka Belitung	9,77	2,78	28,44 ¹	4,32	15,21
Kep. Riau	48,22	7,97	16,53	32,60	63,85
DKI Jakarta	27,52	3,95	14,36	19,78	35,27
Jawa Barat	28,63	1,97	6,89	24,76	32,49
Jawa Tengah	10,15	1,00	9,88	8,18	12,12
DI Yogyakarta	16,83	3,80	22,58	9,38	24,29
Jawa Timur	10,83	1,28	11,81	8,32	13,34
Banten	28,44	3,43	12,06	21,72	35,16
B a l i	8,51	2,34	27,53 ¹	3,92	13,11
Nusa Tenggara Barat	6,41	1,48	23,05	3,51	9,31
Nusa Tenggara Timur	7,03	1,19	16,96	4,69	9,37
Kalimantan Barat	8,20	1,98	24,19	4,31	12,09
Kalimantan Tengah	5,45	2,06	37,80 ¹	1,41	9,48
Kalimantan Selatan	8,82	2,39	27,07 ¹	4,14	13,50
Kalimantan Timur	23,21	4,06	17,49	15,25	31,17
Kalimantan Utara	NA	–	67,65 ²	–	–
Sulawesi Utara	2,27	1,03	45,53 ¹	0,24	4,30
Sulawesi Tengah	4,96	2,12	42,84 ¹	0,79	9,12
Sulawesi Selatan	14,02	2,42	17,25	9,28	18,76
Sulawesi Tenggara	5,99	2,23	37,17 ¹	1,63	10,36
Gorontalo	4,34	1,08	24,85	2,23	6,46
Sulawesi Barat	3,22	1,48	45,79 ¹	0,33	6,12
Maluku	NA	–	60,79 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	50,21 ²	–	–
Papua Barat	13,68	1,97	14,42	9,82	17,55
Papua Barat Daya	5,51	2,40	43,48 ¹	0,81	10,21
Papua	NA	–	54,07 ²	–	–
Papua Selatan	2,97	1,41	47,34 ¹	0,21	5,72
Papua Tengah	33,22	16,60	49,97 ¹	0,68	65,75
Papua Pegunungan	NA	–	91,84 ²	–	–
Indonesia	17,04	0,61	3,56	15,85	18,23



Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	Praktik Dokter/Bidan/Perawat				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	47,88	2,70	5,64	42,59	53,18
Sumatera Utara	58,78	3,08	5,24	52,74	64,82
Sumatera Barat	54,49	2,31	4,23	49,97	59,01
R i a u	37,70	3,57	9,46	30,71	44,70
J a m b i	58,53	3,80	6,49	51,09	65,97
Sumatera Selatan	62,08	3,79	6,11	54,65	69,51
Bengkulu	65,67	3,64	5,55	58,53	72,81
Lampung	64,59	2,74	4,25	59,22	69,97
Kep. Bangka Belitung	51,63	4,18	8,10	43,44	59,83
Kep. Riau	15,00	5,05	33,69 ¹	5,09	24,91
DKI Jakarta	4,74	1,65	34,87 ¹	1,50	7,98
Jawa Barat	37,30	2,05	5,49	33,28	41,32
Jawa Tengah	56,98	1,60	2,80	53,85	60,11
DI Yogyakarta	29,73	4,26	14,33	21,39	38,08
Jawa Timur	63,13	1,69	2,68	59,82	66,45
Banten	36,50	3,45	9,46	29,73	43,26
B a l i	65,23	3,66	5,61	58,05	72,41
Nusa Tenggara Barat	42,04	2,89	6,87	36,37	47,70
Nusa Tenggara Timur	16,04	2,04	12,72	12,04	20,03
Kalimantan Barat	48,10	3,81	7,93	40,62	55,58
Kalimantan Tengah	40,46	5,65	13,96	29,38	51,53
Kalimantan Selatan	45,10	4,23	9,38	36,80	53,39
Kalimantan Timur	24,25	5,21	21,49	14,04	34,47
Kalimantan Utara	29,09	5,33	18,32	18,64	39,54
Sulawesi Utara	49,30	4,24	8,59	41,00	57,60
Sulawesi Tengah	29,93	5,03	16,80	20,08	39,79
Sulawesi Selatan	27,32	2,74	10,02	21,95	32,68
Sulawesi Tenggara	21,88	3,77	17,22	14,49	29,27
Gorontalo	42,78	5,13	11,99	32,72	52,84
Sulawesi Barat	29,80	6,61	22,19	16,84	42,76
Maluku	29,90	6,38	21,35	17,38	42,41
Maluku Utara	15,65	4,07	26,00 ¹	7,68	23,63
Papua Barat	12,84	3,33	25,93 ¹	6,32	19,37
Papua Barat Daya	16,67	4,85	29,12 ¹	7,15	26,18
Papua	28,36	6,25	22,06	16,10	40,62
Papua Selatan	13,04	6,02	46,16 ¹	1,24	24,84
Papua Tengah	23,09	11,11	48,14 ¹	1,30	44,87
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	45,43	0,67	1,48	44,11	46,74



Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	Puskesmas/Pustu/Pusling				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	41,28	2,56	6,21	36,25	46,30
Sumatera Utara	19,38	2,34	12,08	14,79	23,97
Sumatera Barat	21,47	1,84	8,58	17,86	25,08
R i a u	14,91	2,49	16,67	10,04	19,78
J a m b i	25,03	3,49	13,96	18,18	31,87
Sumatera Selatan	12,79	2,05	16,06	8,76	16,81
Bengkulu	19,29	3,25	16,82	12,93	25,66
Lampung	21,58	2,27	10,51	17,14	26,03
Kep. Bangka Belitung	28,25	3,78	13,38	20,84	35,66
Kep. Riau	12,81	3,70	28,91 ¹	5,55	20,07
DKI Jakarta	46,88	4,57	9,74	37,93	55,83
Jawa Barat	23,93	1,96	8,18	20,09	27,76
Jawa Tengah	24,25	1,43	5,90	21,45	27,06
DI Yogyakarta	30,86	4,26	13,82	22,50	39,22
Jawa Timur	16,51	1,34	8,12	13,88	19,14
Banten	26,88	3,41	12,70	20,19	33,58
B a l i	19,79	3,43	17,35	13,06	26,52
Nusa Tenggara Barat	48,61	2,90	5,96	42,93	54,29
Nusa Tenggara Timur	65,23	2,54	3,89	60,25	70,20
Kalimantan Barat	38,47	3,60	9,37	31,41	45,54
Kalimantan Tengah	46,30	5,52	11,92	35,49	57,12
Kalimantan Selatan	26,47	3,32	12,53	19,97	32,98
Kalimantan Timur	33,50	4,81	14,37	24,07	42,94
Kalimantan Utara	57,07	6,14	10,76	45,04	69,11
Sulawesi Utara	39,11	4,13	10,57	31,01	47,21
Sulawesi Tengah	50,41	5,57	11,05	39,49	61,33
Sulawesi Selatan	50,89	3,15	6,20	44,71	57,07
Sulawesi Tenggara	58,01	4,58	7,89	49,04	66,99
Gorontalo	50,41	4,92	9,75	40,78	60,05
Sulawesi Barat	62,48	6,63	10,62	49,48	75,48
Maluku	51,69	6,67	12,91	38,61	64,78
Maluku Utara	62,14	6,66	10,71	49,09	75,19
Papua Barat	61,05	5,30	8,67	50,67	71,43
Papua Barat Daya	62,05	7,30	11,77	47,73	76,36
Papua	44,19	6,59	14,91	31,28	57,11
Papua Selatan	76,23	6,39	8,39	63,70	88,77
Papua Tengah	43,70	13,66	31,25 ¹	16,93	70,47
Papua Pegunungan	90,21	6,05	6,71	78,35	102,07
Indonesia	27,59	0,65	2,36	26,32	28,87

Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,99	1,29	18,42	4,47	9,52
Sumatera Utara	1,86	0,52	28,22 ¹	0,83	2,88
Sumatera Barat	4,51	0,95	20,95	2,66	6,36
R i a u	4,69	1,89	40,32 ¹	0,98	8,39
J a m b i	NA	–	86,43 ²	–	–
Sumatera Selatan	3,73	1,54	41,31 ¹	0,71	6,74
Bengkulu	NA	–	50,47 ²	–	–
Lampung	1,71	0,72	42,24 ¹	0,29	3,13
Kep. Bangka Belitung	NA	–	64,78 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	59,42 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	69,33 ²	–	–
Jawa Barat	1,17	0,48	41,10 ¹	0,23	2,10
Jawa Tengah	1,32	0,32	24,18	0,70	1,95
DI Yogyakarta	NA	–	99,95 ²	–	–
Jawa Timur	3,39	0,68	20,15	2,05	4,73
Banten	NA	–	81,46 ²	–	–
B a l i	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	5,34	1,28	23,95	2,83	7,85
Nusa Tenggara Timur	12,45	1,54	12,38	9,43	15,47
Kalimantan Barat	3,89	1,22	31,49 ¹	1,49	6,28
Kalimantan Tengah	NA	–	51,81 ²	–	–
Kalimantan Selatan	7,91	2,24	28,34 ¹	3,51	12,30
Kalimantan Timur	1,52	0,69	45,17 ¹	0,17	2,87
Kalimantan Utara	NA	–	64,30 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	64,15 ²	–	–
Sulawesi Tengah	4,19	1,44	34,26 ¹	1,38	7,01
Sulawesi Selatan	2,16	0,78	36,09 ¹	0,63	3,69
Sulawesi Tenggara	5,88	2,38	40,53 ¹	1,21	10,56
Gorontalo	NA	–	69,66 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	59,11 ²	–	–
Maluku	5,25	2,47	47,00 ¹	0,41	10,10
Maluku Utara	6,86	2,82	41,18 ¹	1,32	12,39
Papua Barat	NA	–	75,76 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	92,20 ²	–	–
Papua	NA	–	77,89 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	83,86 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,44	0,18	7,58	2,07	2,80



Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	50,23 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	85,79 ²	–	–
Sumatera Barat	0,65	0,28	42,75 ¹	0,10	1,19
Riau	–	–	NA	–	–
Jambi	NA	–	59,60 ²	–	–
Sumatera Selatan	1,04	0,37	35,19 ¹	0,32	1,76
Bengkulu	NA	0,50	52,27 ²	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,16 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,48 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	71,76 ²	–	–
Jawa Barat	0,34	0,16	46,45 ¹	0,03	0,65
Jawa Tengah	0,60	0,29	47,79 ¹	0,04	1,17
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	0,46	0,22	48,26 ¹	0,03	0,90
Banten	NA	–	100,53 ²	–	–
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	54,40 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,12 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	80,50 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	60,86 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,15 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	72,54 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,29 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	81,23 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	87,57 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	100,34 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,02 ²	–	–
Maluku	NA	–	99,52 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,29 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,77 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,55	0,09	16,67	0,37	0,73



Lanjutan Tabel 3.37

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	55,08 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	52,39 ²	–	–
Sumatera Barat	0,56	0,26	45,33 ¹	0,06	1,06
R i a u	NA	–	100,16 ²	–	–
J a m b i	3,33	1,39	41,82 ¹	0,60	6,07
Sumatera Selatan	0,88	0,26	29,18 ¹	0,38	1,39
Bengkulu	NA	–	68,91 ²	–	–
Lampung	NA	–	74,43 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,16 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,43 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	72,76 ²	–	–
Jawa Barat	0,44	0,21	47,59 ¹	0,03	0,85
Jawa Tengah	0,67	0,29	44,16 ¹	0,09	1,24
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	0,58	0,23	38,83 ¹	0,14	1,03
Banten	–	–	NA	–	–
B a l i	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	50,01 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,20 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	80,50 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	77,20 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	100,14 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	99,91 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	52,03 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	75,29 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	58,19 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	96,48 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	99,46 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	87,50 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,02 ²	–	–
Maluku	NA	–	99,52 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,29 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,77 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	100,82 ²	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,61	0,09	14,61	0,44	0,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.38

Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	RS Pemerintah				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	63,62	4,64	7,29	54,53	72,71
Sumatera Utara	25,36	3,37	13,28	18,75	31,96
Sumatera Barat	49,69	5,53	11,14	38,84	60,54
R i a u	20,07	5,67	28,26 ¹	8,95	31,19
J a m b i	42,70	6,71	15,72	29,54	55,86
Sumatera Selatan	39,31	5,62	14,29	28,30	50,33
Bengkulu	48,62	7,41	15,23	34,10	63,14
Lampung	15,81	3,60	22,77	8,75	22,86
Kep. Bangka Belitung	70,90	6,44	9,08	58,28	83,52
Kep. Riau	10,03	2,48	24,70	5,17	14,89
DKI Jakarta	48,71	7,26	14,91	34,47	62,94
Jawa Barat	25,38	2,61	10,27	20,27	30,49
Jawa Tengah	31,45	2,30	7,30	26,94	35,95
DI Yogyakarta	16,42	5,10	31,06 ¹	6,42	26,41
Jawa Timur	31,77	2,57	8,09	26,73	36,80
Banten	27,70	6,43	23,20	15,10	40,30
B a l i	33,94	5,73	16,88	22,71	45,17
Nusa Tenggara Barat	32,65	3,81	11,67	25,18	40,12
Nusa Tenggara Timur	48,76	3,94	8,08	41,03	56,48
Kalimantan Barat	48,16	6,35	13,18	35,71	60,61
Kalimantan Tengah	74,46	5,16	6,93	64,34	84,58
Kalimantan Selatan	72,41	4,65	6,42	63,30	81,51
Kalimantan Timur	35,84	5,75	16,04	24,57	47,11
Kalimantan Utara	80,90	6,54	8,08	68,09	93,71
Sulawesi Utara	35,75	5,68	15,89	24,61	46,89
Sulawesi Tengah	59,43	5,76	9,70	48,13	70,73
Sulawesi Selatan	45,25	4,24	9,37	36,94	53,56
Sulawesi Tenggara	43,21	7,42	17,17	28,66	57,76
Gorontalo	60,72	7,57	12,47	45,87	75,56
Sulawesi Barat	46,54	8,17	17,55	30,53	62,56
Maluku	85,28	5,24	6,14	75,02	95,55
Maluku Utara	74,92	7,26	9,70	60,67	89,16
Papua Barat	69,25	10,22	14,75	49,22	89,29
Papua Barat Daya	47,95	10,23	21,33	27,90	68,00
Papua	60,35	12,45	20,64	35,93	84,76
Papua Selatan	36,09	17,65	48,92 ¹	1,48	70,70
Papua Tengah	31,48	14,31	45,44 ¹	3,43	59,53
Papua Pegunungan	NA	–	83,87 ²	–	–
Indonesia	34,00	1,02	2,99	32,01	35,99



Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	RS Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24,72	3,76	15,23	17,33	32,10
Sumatera Utara	51,77	4,34	8,39	43,26	60,29
Sumatera Barat	34,97	5,17	14,77	24,85	45,10
Riau	61,26	6,76	11,03	48,01	74,52
Jambi	42,98	7,23	16,82	28,80	57,15
Sumatera Selatan	46,63	5,59	11,98	35,68	57,58
Bengkulu	43,87	6,68	15,23	30,78	56,97
Lampung	61,58	5,76	9,35	50,29	72,88
Kep. Bangka Belitung	16,19	4,43	27,40 ¹	7,49	24,88
Kep. Riau	89,01	2,55	2,87	84,01	94,02
DKI Jakarta	47,16	7,25	15,37	32,95	61,38
Jawa Barat	59,86	3,19	5,33	53,61	66,11
Jawa Tengah	56,33	2,51	4,46	51,41	61,26
DI Yogyakarta	72,45	6,20	8,55	60,30	84,61
Jawa Timur	49,06	2,70	5,50	43,76	54,35
Banten	62,23	6,65	10,69	49,19	75,28
Bali	63,86	5,76	9,02	52,57	75,15
Nusa Tenggara Barat	12,54	2,68	21,35	7,29	17,79
Nusa Tenggara Timur	23,01	3,42	14,86	16,31	29,72
Kalimantan Barat	30,31	6,40	21,13	17,76	42,87
Kalimantan Tengah	11,24	5,06	45,02 ¹	1,32	21,16
Kalimantan Selatan	16,14	3,85	23,86	8,59	23,69
Kalimantan Timur	50,59	6,03	11,93	38,75	62,42
Kalimantan Utara	17,48	6,40	36,61 ¹	4,93	30,03
Sulawesi Utara	53,07	5,72	10,78	41,86	64,29
Sulawesi Tengah	17,09	4,64	27,13 ¹	8,00	26,17
Sulawesi Selatan	22,64	3,97	17,53	14,85	30,42
Sulawesi Tenggara	15,38	6,38	41,48 ¹	2,87	27,88
Gorontalo	24,69	7,23	29,27 ¹	10,52	38,86
Sulawesi Barat	15,83	4,68	29,55 ¹	6,66	25,01
Maluku	NA	–	69,50 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	54,33 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	76,33 ²	–	–
Papua Barat Daya	45,69	10,27	22,49	25,54	65,83
Papua	36,76	12,50	34,00 ¹	12,26	61,26
Papua Selatan	NA	–	68,58 ²	–	–
Papua Tengah	42,94	17,65	41,11 ¹	8,33	77,55
Papua Pegunungan	NA	–	100,00 ²	–	–
Indonesia	49,68	1,14	2,30	47,44	51,92



Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	Klinik				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	56,51 ²	–	–
Sumatera Utara	13,39	4,07	30,41 ¹	5,41	21,37
Sumatera Barat	NA	–	88,75 ²	–	–
R i a u	6,99	2,59	37,04 ¹	1,91	12,07
J a m b i	7,01	3,22	45,86 ¹	0,71	13,32
Sumatera Selatan	9,33	3,61	38,71 ¹	2,25	16,40
Bengkulu	NA	–	75,43 ²	–	–
Lampung	11,66	4,36	37,39 ¹	3,11	20,20
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,92 ²	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	NA	–	100,63 ²	–	–
Jawa Barat	7,21	1,52	21,08	4,23	10,20
Jawa Tengah	4,49	1,03	22,86	2,48	6,51
DI Yogyakarta	NA	–	59,70 ²	–	–
Jawa Timur	5,91	1,20	20,25	3,56	8,26
Banten	NA	–	57,93 ²	–	–
B a l i	NA	–	83,50 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	10,94	3,43	31,33 ¹	4,22	17,66
Nusa Tenggara Timur	NA	–	71,69 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	67,33 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	100,46 ²	–	–
Kalimantan Selatan	4,44	1,96	44,07 ¹	0,60	8,27
Kalimantan Timur	9,95	4,60	46,28 ¹	0,92	18,97
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	99,75 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	100,30 ²	–	–
Sulawesi Selatan	8,78	2,41	27,50 ¹	4,05	13,51
Sulawesi Tenggara	NA	–	59,81 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,11 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	63,51 ²	–	–
Maluku	1,06	0,13	12,27	0,80	1,31
Maluku Utara	2,33	0,23	10,06	1,87	2,78
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	68,59 ²	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	NA	–	108,83 ²	–	–
Papua Tengah	20,08	9,45	47,06 ¹	1,55	38,60
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	5,89	0,52	8,84	4,87	6,91



Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	Praktik Bidan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8,00	3,05	38,18 ¹	2,01	13,98
Sumatera Utara	NA	–	51,99 ²	–	–
Sumatera Barat	5,22	2,19	42,01 ¹	0,92	9,51
R i a u	NA	–	60,73 ²	–	–
J a m b i	NA	–	61,13 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	54,17 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	83,79 ²	–	–
Lampung	NA	–	64,89 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,48 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	76,21 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	4,14	1,51	36,35 ¹	1,19	7,10
Jawa Tengah	NA	–	51,12 ²	–	–
DI Yogyakarta	NA	–	70,24 ²	–	–
Jawa Timur	0,63	0,30	47,86 ¹	0,04	1,23
Banten	NA	–	100,38 ²	–	–
B a l i	NA	–	99,56 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	71,71 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	54,78 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	61,23 ²	–	–
Kalimantan Selatan	2,80	0,81	28,83 ¹	1,22	4,38
Kalimantan Timur	NA	–	69,63 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	55,81 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	NA	–	99,76 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	99,73 ²	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	99,97 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,35	0,41	17,34	1,55	3,14



Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	Puskesmas				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,89	2,30	23,24	5,39	14,40
Sumatera Utara	7,45	2,72	36,47 ¹	2,12	12,78
Sumatera Barat	8,91	3,43	38,54 ¹	2,18	15,64
Riau	NA	–	55,37 ²	–	–
Jambi	NA	–	61,02 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	76,35 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	72,35 ²	–	–
Lampung	10,04	3,90	38,87 ¹	2,39	17,69
Kep. Bangka Belitung	9,97	4,47	44,84 ¹	1,21	18,74
Kep. Riau	NA	–	58,26 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	69,18 ²	–	–
Jawa Barat	3,85	0,99	25,79 ¹	1,90	5,79
Jawa Tengah	8,06	1,22	15,15	5,67	10,46
DI Yogyakarta	NA	–	54,01 ²	–	–
Jawa Timur	13,16	1,78	13,54	9,67	16,65
Banten	NA	–	59,50 ²	–	–
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	45,24	5,09	11,26	35,26	55,23
Nusa Tenggara Timur	27,21	3,36	12,34	20,62	33,80
Kalimantan Barat	9,09	2,75	30,26 ¹	3,70	14,48
Kalimantan Tengah	12,64	1,51	11,98	9,67	15,61
Kalimantan Selatan	4,57	2,16	47,31 ¹	0,33	8,82
Kalimantan Timur	NA	–	82,67 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	101,20 ²	–	–
Sulawesi Utara	10,62	2,10	19,78	6,50	14,74
Sulawesi Tengah	24,24	5,09	20,99	14,26	34,22
Sulawesi Selatan	22,82	3,08	13,51	16,77	28,87
Sulawesi Tenggara	38,18	7,50	19,64	23,47	52,88
Gorontalo	15,66	5,34	34,09 ¹	5,19	26,12
Sulawesi Barat	28,94	6,98	24,11	15,26	42,62
Maluku	11,26	4,56	40,48 ¹	2,32	20,19
Maluku Utara	13,15	5,45	41,45 ¹	2,46	23,85
Papua Barat	27,35	10,03	36,69 ¹	7,67	47,02
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	2,85	0,66	23,23	1,55	4,15
Papua Selatan	46,68	13,77	29,51 ¹	19,67	73,68
Papua Tengah	5,50	1,06	19,33	3,41	7,58
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	9,11	0,51	5,64	8,11	10,12

Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	NA	–	–
Sumatera Utara	–	–	NA	–	–
Sumatera Barat	–	–	NA	–	–
R i a u	–	–	NA	–	–
J a m b i	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	–	–	NA	–	–
Bengkulu	–	–	NA	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	–	–	NA	–	–
Jawa Tengah	–	–	NA	–	–
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	–	–	NA	–	–
Banten	–	–	NA	–	–
B a l i	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	–	–	NA	–	–



Lanjutan Tabel 3.38

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,22	0,07	5,56	1,09	1,35
Sumatera Utara	–	–	NA	–	–
Sumatera Barat	–	–	NA	–	–
R i a u	–	–	NA	–	–
J a m b i	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	–	–	NA	–	–
Bengkulu	–	–	NA	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	NA	–	100,06 ²	–	–
Jawa Tengah	–	–	NA	–	–
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	–	–	NA	–	–
Banten	–	–	NA	–	–
B a l i	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	99,19 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	100,68 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	NA	–	58,16²	–	–

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.39
Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023–2025

Provinsi	BPJS Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,23	1,57	1,63	93,15	99,31
Sumatera Utara	71,79	4,83	6,73	62,32	81,27
Sumatera Barat	80,40	4,86	6,04	70,88	89,92
Riau	73,09	5,79	7,93	61,73	84,45
Jambi	74,81	4,83	6,45	65,35	84,27
Sumatera Selatan	86,93	2,76	3,17	81,52	92,34
Bengkulu	86,02	4,15	4,83	77,88	94,16
Lampung	69,11	4,92	7,12	59,45	78,76
Kep. Bangka Belitung	84,07	5,77	6,86	72,75	95,38
Kep. Riau	91,94	5,83	6,34	80,51	103,38
DKI Jakarta	90,24	4,71	5,22	81,01	99,47
Jawa Barat	80,92	2,37	2,93	76,26	85,57
Jawa Tengah	73,68	2,13	2,89	69,51	77,85
DI Yogyakarta	88,87	4,66	5,24	79,73	98,00
Jawa Timur	74,00	2,56	3,45	68,99	79,01
Banten	88,35	3,62	4,10	81,25	95,45
Bali	84,06	5,03	5,99	74,20	93,93
Nusa Tenggara Barat	70,32	4,93	7,00	60,67	79,98
Nusa Tenggara Timur	67,28	3,73	5,55	59,96	74,60
Kalimantan Barat	64,26	5,82	9,06	52,85	75,68
Kalimantan Tengah	73,99	6,82	9,22	60,62	87,37
Kalimantan Selatan	87,41	3,38	3,87	80,78	94,05
Kalimantan Timur	90,19	3,72	4,13	82,89	97,50
Kalimantan Utara	84,24	5,87	6,97	72,72	95,76
Sulawesi Utara	80,11	4,58	5,72	71,13	89,10
Sulawesi Tengah	69,68	6,08	8,73	57,75	81,61
Sulawesi Selatan	81,26	3,16	3,89	75,05	87,46
Sulawesi Tenggara	77,28	7,30	9,44	62,97	91,59
Gorontalo	85,60	5,43	6,35	74,95	96,25
Sulawesi Barat	67,73	7,09	10,46	53,84	81,62
Maluku	67,50	11,88	17,60	44,20	90,79
Maluku Utara	53,57	9,85	18,39	34,26	72,88
Papua Barat	54,57	11,37	20,83	32,28	76,85
Papua Barat Daya	76,87	10,96	14,26	55,38	98,35
Papua	86,89	6,01	6,91	75,12	98,67
Papua Selatan	82,96	12,19	14,69	59,07	106,86
Papua Tengah	NA	–	50,32 ²	–	–
Papua Pegunungan	100,00	–	–	100,00	100,00
Indonesia	78,69	0,89	1,13	76,95	80,42



Lanjutan Tabel 3.39

Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	76,15	3,83	5,03	68,64	83,65
Sumatera Utara	22,05	4,13	18,71	13,96	30,14
Sumatera Barat	43,40	5,46	12,58	32,69	54,10
R i a u	25,16	6,18	24,58	13,04	37,28
J a m b i	24,12	6,36	26,35 ¹	11,66	36,58
Sumatera Selatan	46,77	5,81	12,43	35,37	58,17
Bengkulu	48,22	6,98	14,47	34,54	61,90
Lampung	40,39	5,09	12,60	30,41	50,37
Kep. Bangka Belitung	44,79	7,08	15,81	30,91	58,68
Kep. Riau	6,81	2,61	38,26 ¹	1,70	11,92
DKI Jakarta	57,29	7,26	12,68	43,05	71,53
Jawa Barat	28,00	3,25	11,60	21,64	34,37
Jawa Tengah	33,32	2,37	7,10	28,68	37,96
DI Yogyakarta	41,48	6,79	16,37	28,17	54,79
Jawa Timur	37,97	2,50	6,59	33,06	42,87
Banten	30,59	6,54	21,38	17,77	43,42
B a l i	33,01	5,40	16,35	22,43	43,59
Nusa Tenggara Barat	57,72	5,15	8,92	47,63	67,82
Nusa Tenggara Timur	44,15	4,13	9,35	36,05	52,25
Kalimantan Barat	34,01	6,05	17,79	22,15	45,88
Kalimantan Tengah	42,72	7,38	17,27	28,26	57,19
Kalimantan Selatan	42,05	5,05	12,00	32,16	51,94
Kalimantan Timur	27,91	5,93	21,26	16,28	39,55
Kalimantan Utara	52,35	9,22	17,61	34,27	70,43
Sulawesi Utara	29,09	5,61	19,29	18,09	40,10
Sulawesi Tengah	51,49	6,19	12,03	39,35	63,63
Sulawesi Selatan	51,08	4,41	8,64	42,43	59,73
Sulawesi Tenggara	47,45	6,54	13,78	34,63	60,27
Gorontalo	51,91	7,97	15,35	36,28	67,53
Sulawesi Barat	31,93	7,07	22,13	18,08	45,78
Maluku	16,37	4,62	28,21 ¹	7,31	25,42
Maluku Utara	20,89	6,14	29,38 ¹	8,86	32,92
Papua Barat	30,82	10,28	33,35 ¹	10,67	50,97
Papua Barat Daya	51,91	12,76	24,58	26,89	76,93
Papua	45,40	12,74	28,06 ¹	20,42	70,37
Papua Selatan	49,18	14,34	29,16 ¹	21,07	77,29
Papua Tengah	NA	–	71,00 ²	–	–
Papua Pegunungan	8,77	–	–	8,77	8,77
Indonesia	36,50	1,11	3,04	34,32	38,67

Lanjutan Tabel 3.39

Provinsi	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,08	3,57	17,79	13,08	27,09
Sumatera Utara	49,75	5,27	10,60	39,41	60,09
Sumatera Barat	37,00	5,47	14,79	26,27	47,73
R i a u	47,93	7,18	14,98	33,85	62,00
J a m b i	50,69	7,31	14,43	36,35	65,03
Sumatera Selatan	40,15	5,96	14,85	28,46	51,85
Bengkulu	37,79	7,20	19,05	23,68	51,91
Lampung	28,71	4,83	16,82	19,25	38,18
Kep. Bangka Belitung	39,28	6,90	17,58	25,74	52,81
Kep. Riau	85,13	6,60	7,76	72,18	98,08
DKI Jakarta	32,95	6,50	19,73	20,20	45,70
Jawa Barat	52,91	3,49	6,59	46,08	59,75
Jawa Tengah	40,36	2,48	6,13	35,51	45,22
DI Yogyakarta	47,39	6,69	14,12	34,27	60,51
Jawa Timur	36,03	2,70	7,48	30,75	41,32
Banten	57,76	6,67	11,55	44,67	70,84
B a l i	51,06	6,21	12,17	38,87	63,24
Nusa Tenggara Barat	12,60	3,75	29,75 ¹	5,25	19,95
Nusa Tenggara Timur	23,13	3,50	15,15	16,26	30,00
Kalimantan Barat	30,25	6,08	20,09	18,34	42,17
Kalimantan Tengah	31,27	6,83	21,86	17,87	44,67
Kalimantan Selatan	45,36	5,34	11,78	34,89	55,84
Kalimantan Timur	62,28	6,27	10,06	49,99	74,56
Kalimantan Utara	31,89	7,83	24,55	16,54	47,23
Sulawesi Utara	51,02	6,39	12,52	38,50	63,54
Sulawesi Tengah	18,19	5,57	30,65 ¹	7,26	29,11
Sulawesi Selatan	30,18	3,96	13,11	22,42	37,94
Sulawesi Tenggara	29,83	7,21	24,18	15,69	43,98
Gorontalo	33,69	7,88	23,39	18,24	49,14
Sulawesi Barat	35,80	6,70	18,73	22,66	48,94
Maluku	51,13	13,21	25,84 ¹	25,23	77,03
Maluku Utara	32,68	10,33	31,61 ¹	12,42	52,94
Papua Barat	23,75	9,90	41,69 ¹	4,34	43,16
Papua Barat Daya	24,95	10,88	43,59 ¹	3,63	46,28
Papua	41,50	12,27	29,58 ¹	17,43	65,56
Papua Selatan	33,79	7,74	22,91	18,61	48,96
Papua Tengah	NA	–	75,85 ²	–	–
Papua Pegunungan	91,23	–	–	91,23	91,23
Indonesia	42,19	1,17	2,77	39,90	44,48



Lanjutan Tabel 3.39

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,74	1,24	45,27 ¹	0,31	5,17
Sumatera Utara	1,37	0,52	37,81 ¹	0,35	2,38
Sumatera Barat	5,73	0,99	17,32	3,78	7,67
R i a u	NA	–	77,20 ²	–	–
J a m b i	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	100,17 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	101,26 ²	–	–
Lampung	12,60	3,77	29,96 ¹	5,20	20,00
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	102,67 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	NA	–	62,21 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	57,85 ²	–	–
DI Yogyakarta	NA	–	100,29 ²	–	–
Jawa Timur	2,96	1,16	39,20 ¹	0,69	5,24
Banten	2,63	0,72	27,36 ¹	1,22	4,04
B a l i	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	9,98	1,55	15,53	6,94	13,02
Nusa Tenggara Timur	4,17	1,46	34,96 ¹	1,31	7,04
Kalimantan Barat	4,65	1,69	36,34 ¹	1,34	7,96
Kalimantan Tengah	0,53	0,04	7,07	0,46	0,60
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,25 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	55,29 ²	–	–
Sulawesi Selatan	2,62	1,16	44,29 ¹	0,35	4,90
Sulawesi Tenggara	NA	–	92,12 ²	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	20,24	5,50	27,16 ¹	9,46	31,03
Maluku	NA	–	64,93 ²	–	–
Maluku Utara	11,38	2,73	24,02	6,02	16,74
Papua Barat	27,36	9,08	33,19 ¹	9,55	45,17
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	58,82 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	73,87 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	109,03 ²	–	–
Papua Pegunungan	100,00	–	–	100,00	100,00
Indonesia	2,26	0,30	13,04	1,68	2,84

Lanjutan Tabel 3.39

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	100,65 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	79,39 ²	–	–
Sumatera Barat	–	–	NA	–	–
R i a u	NA	–	73,74 ²	–	–
J a m b i	NA	–	67,99 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	65,74 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	100,62 ²	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	NA	–	98,56 ²	–	–
Jawa Barat	5,16	1,48	28,78 ¹	2,25	8,06
Jawa Tengah	1,25	0,55	43,88 ¹	0,17	2,33
DI Yogyakarta	NA	–	69,96 ²	–	–
Jawa Timur	NA	–	62,02 ²	–	–
Banten	NA	–	69,62 ²	–	–
B a l i	NA	–	99,97 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,18 ²	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	97,80 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,14 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,32 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,36	0,46	19,31	1,47	3,25



Lanjutan Tabel 3.39

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	74,08 ²	–	–
Sumatera Utara	3,95	1,77	44,82 ¹	0,48	7,42
Sumatera Barat	NA	–	71,42 ²	–	–
Riau	5,07	2,37	46,80 ¹	0,42	9,72
Jambi	NA	–	62,07 ²	–	–
Sumatera Selatan	2,50	1,08	43,33 ¹	0,38	4,62
Bengkulu	NA	–	64,95 ²	–	–
Lampung	5,70	2,50	43,94 ¹	0,79	10,61
Kep. Bangka Belitung	NA	–	97,98 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,77 ²	–	–
DKI Jakarta	9,76	4,71	48,23 ¹	0,53	18,99
Jawa Barat	3,69	1,30	35,19 ¹	1,14	6,23
Jawa Tengah	2,87	1,02	35,64 ¹	0,87	4,88
DI Yogyakarta	NA	–	100,23 ²	–	–
Jawa Timur	4,89	1,48	30,27 ¹	1,99	7,80
Banten	8,62	3,44	39,93 ¹	1,87	15,37
Bali	NA	–	61,56 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	56,82 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	51,96 ²	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	92,32 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	51,28 ²	–	–
Kalimantan Timur	16,13	4,43	27,46 ¹	7,44	24,81
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	54,35 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	72,01 ²	–	–
Sulawesi Selatan	3,44	1,50	43,51 ¹	0,50	6,37
Sulawesi Tenggara	0,37	0,03	7,20	0,32	0,43
Gorontalo	NA	–	75,88 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	NA	–	104,04 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	65,18 ²	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	94,31 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	84,45 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	4,18	0,52	12,40	3,17	5,20

Tabel 3.40
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir
Menurut Provinsi dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	56,51	2,66	4,70	51,31	61,72
Sumatera Utara	21,15	2,25	10,63	16,74	25,55
Sumatera Barat	34,74	2,15	6,20	30,52	38,97
Riau	42,19	3,77	8,93	34,81	49,58
Jambi	25,63	3,33	13,01	19,09	32,16
Sumatera Selatan	34,77	3,53	10,16	27,85	41,69
Bengkulu	39,36	3,98	10,10	31,56	47,15
Lampung	22,29	2,46	11,04	17,47	27,11
Kep. Bangka Belitung	42,01	4,01	9,54	34,15	49,86
Kep. Riau	70,09	7,14	10,19	56,09	84,08
DKI Jakarta	75,68	3,73	4,93	68,38	82,99
Jawa Barat	41,52	2,16	5,20	37,28	45,75
Jawa Tengah	35,42	1,52	4,28	32,45	38,40
DI Yogyakarta	52,47	4,76	9,07	43,14	61,79
Jawa Timur	30,85	1,55	5,04	27,80	33,89
Banten	38,73	3,48	9,00	31,90	45,56
Bali	35,95	3,83	10,64	28,45	43,45
Nusa Tenggara Barat	30,71	2,45	7,98	25,91	35,51
Nusa Tenggara Timur	45,70	2,61	5,71	40,59	50,82
Kalimantan Barat	36,44	3,44	9,44	29,70	43,18
Kalimantan Tengah	32,32	5,21	16,12	22,11	42,53
Kalimantan Selatan	47,32	4,17	8,82	39,14	55,50
Kalimantan Timur	65,45	4,82	7,36	56,00	74,90
Kalimantan Utara	64,79	5,50	8,48	54,01	75,56
Sulawesi Utara	34,05	3,52	10,34	27,14	40,95
Sulawesi Tengah	42,13	4,46	10,59	33,38	50,87
Sulawesi Selatan	62,07	3,01	4,85	56,17	67,97
Sulawesi Tenggara	50,93	5,13	10,08	40,87	61,00
Gorontalo	51,09	4,94	9,66	41,41	60,76
Sulawesi Barat	54,19	7,13	13,16	40,21	68,16
Maluku	27,33	5,97	21,84	15,63	39,03
Maluku Utara	41,75	6,69	16,01	28,65	54,86
Papua Barat	37,87	6,58	17,36	24,98	50,76
Papua Barat Daya	48,70	7,64	15,69	33,72	63,68
Papua	53,46	6,98	13,05	39,78	67,13
Papua Selatan	52,47	7,84	14,95	37,10	67,84
Papua Tengah	NA	–	70,74 ²	–	–
Papua Pegunungan	55,51	10,38	18,69	35,17	75,85
Indonesia	39,69	0,70	1,75	38,32	41,05



Lanjutan Tabel 3.40

Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	RSE	<i>95% Confidence Interval</i>	
				<i>Lower</i>	<i>Upper</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	52,15	2,64	5,06	46,98	57,33
Sumatera Utara	11,10	1,58	14,27	7,99	14,20
Sumatera Barat	15,13	1,58	10,42	12,04	18,22
Riau	14,22	2,56	18,00	9,20	19,24
Jambi	11,21	2,52	22,51	6,27	16,16
Sumatera Selatan	16,76	3,16	18,85	10,57	22,96
Bengkulu	21,71	3,30	15,20	15,24	28,18
Lampung	15,33	2,03	13,27	11,34	19,31
Kep. Bangka Belitung	21,75	3,47	15,93	14,96	28,54
Kep. Riau	9,77	2,40	24,61	5,06	14,48
DKI Jakarta	48,44	4,54	9,36	39,55	57,33
Jawa Barat	16,96	1,89	11,12	13,27	20,66
Jawa Tengah	17,98	1,29	7,19	15,45	20,51
DI Yogyakarta	33,62	4,53	13,48	24,73	42,50
Jawa Timur	15,59	1,24	7,94	13,17	18,02
Banten	22,54	3,37	14,96	15,93	29,14
Bali	18,18	2,94	16,20	12,41	23,95
Nusa Tenggara Barat	21,72	2,09	9,64	17,61	25,82
Nusa Tenggara Timur	35,11	2,53	7,21	30,15	40,08
Kalimantan Barat	19,37	2,49	12,85	14,49	24,25
Kalimantan Tengah	17,64	4,53	25,68 ¹	8,76	26,52
Kalimantan Selatan	22,98	3,36	14,64	16,39	29,57
Kalimantan Timur	24,81	4,30	17,31	16,39	33,23
Kalimantan Utara	42,85	6,32	14,74	30,48	55,23
Sulawesi Utara	20,76	3,49	16,79	13,93	27,59
Sulawesi Tengah	33,29	4,38	13,17	24,70	41,89
Sulawesi Selatan	41,52	3,41	8,21	34,83	48,20
Sulawesi Tenggara	33,42	4,72	14,11	24,18	42,67
Gorontalo	42,08	4,99	11,85	32,31	51,86
Sulawesi Barat	39,97	6,83	17,10	26,58	53,37
Maluku	7,68	1,78	23,11	4,20	11,16
Maluku Utara	17,49	3,52	20,11	10,60	24,38
Papua Barat	22,65	5,48	24,19	11,91	33,38
Papua Barat Daya	37,74	7,25	19,21	23,53	51,95
Papua	38,47	6,64	17,27	25,45	51,50
Papua Selatan	43,98	7,73	17,58	28,83	59,13
Papua Tengah	NA	9,25	102,52 ²	–	–
Papua Pegunungan	35,51	8,67	24,41	18,52	52,49
Indonesia	21,20	0,61	2,90	19,99	22,40

Lanjutan Tabel 3.40

Provinsi	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,36	0,80	18,38	2,79	5,93
Sumatera Utara	10,05	1,80	17,90	6,52	13,58
Sumatera Barat	19,61	1,98	10,08	15,74	23,49
Riau	27,97	3,47	12,42	21,16	34,78
Jambi	14,42	3,10	21,48	8,35	20,49
Sumatera Selatan	18,00	3,33	18,48	11,48	24,52
Bengkulu	17,64	3,15	17,84	11,47	23,81
Lampung	6,96	1,67	23,94	3,69	10,23
Kep. Bangka Belitung	20,26	3,27	16,14	13,85	26,66
Kep. Riau	60,32	7,39	12,25	45,84	74,79
DKI Jakarta	27,24	3,93	14,43	19,53	34,95
Jawa Barat	24,55	1,88	7,68	20,86	28,25
Jawa Tengah	17,44	1,18	6,77	15,13	19,76
DI Yogyakarta	18,85	3,72	19,74	11,56	26,14
Jawa Timur	15,26	1,32	8,63	12,68	17,84
Banten	16,19	2,51	15,50	11,27	21,11
Bali	17,77	3,00	16,86	11,89	23,64
Nusa Tenggara Barat	8,99	1,76	19,53	5,55	12,44
Nusa Tenggara Timur	10,59	1,53	14,48	7,58	13,59
Kalimantan Barat	17,07	2,92	17,09	11,35	22,79
Kalimantan Tengah	14,68	3,32	22,60	8,18	21,18
Kalimantan Selatan	24,34	3,89	15,97	16,72	31,96
Kalimantan Timur	40,64	5,28	12,99	30,29	50,99
Kalimantan Utara	21,93	4,83	22,04	12,45	31,41
Sulawesi Utara	13,29	2,40	18,06	8,58	17,99
Sulawesi Tengah	8,83	2,44	27,62 ¹	4,05	13,61
Sulawesi Selatan	20,55	2,64	12,82	15,39	25,72
Sulawesi Tenggara	17,51	4,03	23,03	9,61	25,42
Gorontalo	9,00	2,53	28,12 ¹	4,04	13,97
Sulawesi Barat	14,21	3,91	27,48 ¹	6,56	21,87
Maluku	19,65	5,78	29,43 ¹	8,31	30,99
Maluku Utara	24,27	6,96	28,67 ¹	10,63	37,90
Papua Barat	15,23	6,02	39,57 ¹	3,42	27,04
Papua Barat Daya	10,96	4,50	41,11 ¹	2,13	19,79
Papua	14,99	5,20	34,70 ¹	4,79	25,18
Papua Selatan	NA	–	60,91 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	97,57 ²	–	–
Papua Pegunungan	20,00	9,08	45,38 ¹	2,21	37,80
Indonesia	18,49	0,59	3,19	17,33	19,64



Lanjutan Tabel 3.40

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,82	0,34	41,97 ¹	0,15	1,49
Sumatera Utara	NA	–	59,08 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	51,72 ²	–	–
Riau	1,98	0,85	42,95 ¹	0,31	3,66
Jambi	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	3,49	1,39	39,89 ¹	0,76	6,23
Bengkulu	NA	–	100,15 ²	–	–
Lampung	5,80	1,28	22,06	3,29	8,30
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,45 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	–	–	NA	–	–
Jawa Tengah	0,94	0,47	49,85 ¹	0,02	1,87
DI Yogyakarta	NA	–	99,12 ²	–	–
Jawa Timur	0,68	0,31	45,12 ¹	0,08	1,28
Banten	1,69	0,82	48,53 ¹	0,08	3,30
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	2,94	0,73	24,90	1,50	4,37
Nusa Tenggara Timur	5,36	0,84	15,60	3,72	7,00
Kalimantan Barat	NA	–	88,11 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	99,95 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	100,44 ²	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,03 ²	–	–
Sulawesi Tengah	3,11	1,24	39,82 ¹	0,68	5,54
Sulawesi Selatan	0,98	0,44	44,54 ¹	0,12	1,84
Sulawesi Tenggara	5,14	1,71	33,18 ¹	1,80	8,49
Gorontalo	NA	–	99,46 ²	–	–
Sulawesi Barat	7,80	3,79	48,59 ¹	0,37	15,23
Maluku	7,33	2,02	27,57 ¹	3,37	11,29
Maluku Utara	15,98	4,09	25,56 ¹	7,98	23,99
Papua Barat	25,75	5,25	20,39	15,46	36,04
Papua Barat Daya	NA	–	65,18 ²	–	–
Papua	7,13	3,23	45,24 ¹	0,81	13,46
Papua Selatan	19,46	3,76	19,31	12,10	26,83
Papua Tengah	6,27	0,68	10,79	4,95	7,60
Papua Pegunungan	50,92	10,72	21,04	29,92	71,93
Indonesia	1,31	0,13	9,79	1,06	1,56



Lanjutan Tabel 3.40

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	NA	–	–
Sumatera Utara	NA	–	100,16 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	81,36 ²	–	–
R i a u	NA	–	100,31 ²	–	–
J a m b i	NA	–	100,42 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	79,79 ²	–	–
Bengkulu	–	–	NA	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,22 ²	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,98 ²	–	–
Jawa Barat	2,29	0,65	28,44 ¹	1,02	3,57
Jawa Tengah	0,48	0,19	40,36 ¹	0,10	0,85
DI Yogyakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Timur	NA	–	78,73 ²	–	–
Banten	NA	–	57,36 ²	–	–
B a l i	NA	–	73,10 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	99,93 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,56 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	54,93 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	85,11 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	0,81	0,17	20,28	0,49	1,14



Lanjutan Tabel 3.40

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	NA	–	100,09 ²	–	–
Sumatera Utara	1,59	–	50,58 ²	–	–
Sumatera Barat	2,46	0,83	33,70 ¹	0,84	4,09
Riau	NA	–	51,03 ²	–	–
Jambi	NA	–	79,64 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	55,13 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	71,41 ²	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	77,38 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	57,84 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	59,43 ²	–	–
Jawa Barat	2,09	0,87	41,81 ¹	0,38	3,80
Jawa Tengah	1,11	0,32	29,17 ¹	0,48	1,75
DI Yogyakarta	NA	–	100,03 ²	–	–
Jawa Timur	1,94	0,57	29,48 ¹	0,82	3,06
Banten	1,93	0,73	37,85 ¹	0,50	3,36
Bali	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	57,11 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,02 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,17 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	65,63 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	79,75 ²	–	–
Kalimantan Timur	8,93	2,78	31,11 ¹	3,48	14,37
Kalimantan Utara	NA	–	100,29 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	66,74 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	60,61 ²	–	–
Sulawesi Selatan	1,59	0,66	41,36 ¹	0,30	2,87
Sulawesi Tenggara	NA	–	76,93 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	56,28 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	NA	–	100,93 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	68,49 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,85 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	101,57 ²	–	–
Papua	NA	–	71,63 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	1,63	0,24	14,87	1,16	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 3.41
Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menggunakan
Jaminan Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan
Jaminan Kesehatan yang digunakan untuk Rawat Inap, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,24	1,95	2,07	90,42	98,06
Sumatera Utara	66,24	5,03	7,60	56,37	76,11
Sumatera Barat	78,45	4,97	6,33	68,71	88,19
Riau	59,86	6,44	10,77	47,22	72,49
Jambi	61,62	6,49	10,54	48,89	74,35
Sumatera Selatan	73,44	4,89	6,66	63,85	83,03
Bengkulu	83,20	4,48	5,38	74,42	91,98
Lampung	65,39	5,00	7,65	55,59	75,20
Kep. Bangka Belitung	78,07	6,42	8,22	65,49	90,65
Kep. Riau	90,54	5,97	6,60	78,83	102,25
DKI Jakarta	78,65	6,44	8,19	66,02	91,29
Jawa Barat	71,66	3,00	4,19	65,78	77,55
Jawa Tengah	68,57	2,19	3,20	64,28	72,87
DI Yogyakarta	78,87	5,74	7,28	67,62	90,12
Jawa Timur	67,10	2,70	4,02	61,80	72,39
Banten	72,44	6,27	8,66	60,15	84,74
Bali	76,60	6,08	7,93	64,69	88,52
Nusa Tenggara Barat	65,03	4,98	7,66	55,27	74,80
Nusa Tenggara Timur	64,48	3,74	5,80	57,15	71,82
Kalimantan Barat	61,35	5,89	9,61	49,79	72,90
Kalimantan Tengah	68,20	7,56	11,09	53,37	83,03
Kalimantan Selatan	82,57	3,86	4,68	75,00	90,15
Kalimantan Timur	80,77	4,41	5,45	72,14	89,41
Kalimantan Utara	82,36	6,18	7,50	70,25	94,47
Sulawesi Utara	78,62	4,67	5,94	69,46	87,78
Sulawesi Tengah	62,89	6,20	9,87	50,73	75,05
Sulawesi Selatan	79,64	3,19	4,01	73,38	85,89
Sulawesi Tenggara	74,85	7,31	9,77	60,51	89,19
Gorontalo	83,39	5,68	6,82	72,24	94,53
Sulawesi Barat	60,55	7,06	11,66	46,71	74,39
Maluku	65,93	11,98	18,16	42,45	89,41
Maluku Utara	50,14	10,01	19,96	30,52	69,75
Papua Barat	54,57	11,37	20,83	32,28	76,85
Papua Barat Daya	65,17	11,81	18,12	42,01	88,33
Papua	86,89	6,01	6,91	75,12	98,67
Papua Selatan	80,39	11,72	14,58	57,41	103,36
Papua Tengah	NA	–	58,15 ²	–	–
Papua Pegunungan	100,00	–	–	100,00	100,00
Indonesia	71,40	1,05	1,47	69,34	73,46



Lanjutan Tabel 3.41

Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,52	3,95	5,30	66,77	82,27
Sumatera Utara	20,83	4,11	19,72	12,77	28,88
Sumatera Barat	41,45	5,37	12,95	30,92	51,97
Riau	18,82	4,57	24,27	9,86	27,78
Jambi	24,12	6,36	26,35 ¹	11,66	36,58
Sumatera Selatan	41,08	5,75	14,00	29,81	52,36
Bengkulu	46,84	7,04	15,04	33,03	60,65
Lampung	39,48	5,09	12,89	29,50	49,46
Kep. Bangka Belitung	42,38	7,07	16,69	28,51	56,25
Kep. Riau	6,62	2,57	38,88 ¹	1,57	11,67
DKI Jakarta	54,33	7,30	13,44	40,01	68,64
Jawa Barat	26,43	3,22	12,18	20,12	32,75
Jawa Tengah	31,59	2,33	7,37	27,02	36,15
DI Yogyakarta	38,99	6,68	17,12	25,90	52,08
Jawa Timur	34,58	2,47	7,14	29,74	39,42
Banten	27,68	6,52	23,56	14,89	40,46
Bali	29,94	5,16	17,23	19,83	40,06
Nusa Tenggara Barat	52,89	4,81	9,10	43,45	62,33
Nusa Tenggara Timur	44,15	4,13	9,35	36,05	52,25
Kalimantan Barat	33,68	6,06	17,99	21,80	45,56
Kalimantan Tengah	42,72	7,38	17,27	28,26	57,19
Kalimantan Selatan	41,29	5,07	12,27	31,35	51,23
Kalimantan Timur	25,17	5,86	23,28	13,68	36,66
Kalimantan Utara	52,35	9,22	17,61	34,27	70,43
Sulawesi Utara	27,60	5,55	20,11	16,72	38,49
Sulawesi Tengah	44,70	6,15	13,76	32,64	56,76
Sulawesi Selatan	50,44	4,41	8,74	41,79	59,08
Sulawesi Tenggara	45,78	6,53	14,26	32,97	58,58
Gorontalo	49,70	7,93	15,95	34,16	65,23
Sulawesi Barat	28,35	6,98	24,63	14,66	42,04
Maluku	16,37	4,62	28,21 ¹	7,31	25,42
Maluku Utara	17,46	6,20	35,50 ¹	5,31	29,61
Papua Barat	30,82	10,28	33,35 ¹	10,67	50,97
Papua Barat Daya	41,09	12,70	30,90 ¹	16,20	65,99
Papua	45,40	12,74	28,06 ¹	20,42	70,37
Papua Selatan	46,60	14,12	30,30 ¹	18,92	74,28
Papua Tengah	NA	–	71,00 ²	–	–
Papua Pegunungan	8,77	–	–	8,77	8,77
Indonesia	34,26	1,10	3,21	32,11	36,41



Lanjutan Tabel 3.41

Provinsi	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,72	3,57	18,10	12,72	26,72
Sumatera Utara	45,41	5,28	11,63	35,06	55,76
Sumatera Barat	37,00	5,47	14,79	26,27	47,73
Riau	41,04	6,94	16,90	27,44	54,64
Jambi	37,50	7,65	20,41	22,49	52,51
Sumatera Selatan	32,36	5,94	18,35	20,72	44,00
Bengkulu	36,36	7,18	19,75	22,28	50,44
Lampung	25,91	4,68	18,07	16,73	35,09
Kep. Bangka Belitung	35,69	6,84	19,15	22,29	49,09
Kep. Riau	83,92	6,75	8,05	70,68	97,16
DKI Jakarta	24,33	5,87	24,14	12,81	35,84
Jawa Barat	45,23	3,50	7,73	38,37	52,09
Jawa Tengah	36,98	2,47	6,67	32,15	41,82
DI Yogyakarta	39,88	6,64	16,65	26,86	52,90
Jawa Timur	32,52	2,72	8,35	27,19	37,84
Banten	44,77	7,06	15,77	30,92	58,61
Bali	46,66	6,42	13,75	34,09	59,24
Nusa Tenggara Barat	12,14	3,73	30,75 ¹	4,82	19,46
Nusa Tenggara Timur	20,33	3,51	17,24	13,46	27,21
Kalimantan Barat	27,67	6,02	21,77	15,86	39,47
Kalimantan Tengah	25,48	6,27	24,60	13,19	37,76
Kalimantan Selatan	41,28	5,42	13,12	30,66	51,90
Kalimantan Timur	55,60	6,44	11,58	42,97	68,23
Kalimantan Utara	30,01	7,67	25,54 ¹	14,98	45,04
Sulawesi Utara	51,02	6,39	12,52	38,50	63,54
Sulawesi Tengah	18,19	5,57	30,65 ¹	7,26	29,11
Sulawesi Selatan	29,20	3,95	13,52	21,46	36,94
Sulawesi Tenggara	29,07	7,16	24,63	15,03	43,11
Gorontalo	33,69	7,88	23,39	18,24	49,14
Sulawesi Barat	32,20	6,48	20,14	19,49	44,91
Maluku	49,56	13,32	26,87 ¹	23,45	75,67
Maluku Utara	32,68	10,33	31,61 ¹	12,42	52,94
Papua Barat	23,75	9,90	41,69 ¹	4,34	43,16
Papua Barat Daya	24,08	10,87	45,14 ¹	2,77	45,39
Papua	41,50	12,27	29,58 ¹	17,43	65,56
Papua Selatan	33,79	7,74	22,91	18,61	48,96
Papua Tengah	NA	–	101,41 ²	–	–
Papua Pegunungan	91,23	–	–	91,23	91,23
Indonesia	37,14	1,17	3,14	34,85	39,42



Lanjutan Tabel 3.41

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	55,51 ²	–	–
Sumatera Utara	0,01	~0	5,27	–	–
Sumatera Barat	–	–	NA	0,57	5,75
Riau	–	–	NA	1,13	6,81
Jambi	–	–	NA	–	–
Sumatera Selatan	–	–	NA	–	–
Bengkulu	NA	–	101,26 ²	–	–
Lampung	NA	–	85,06 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	NA	–	102,67 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	NA	–	–
Jawa Barat	NA	–	62,21 ²	0,11	3,86
Jawa Tengah	NA	–	70,98 ²	–	–
DI Yogyakarta	NA	–	100,29 ²	–	–
Jawa Timur	1,94	0,90	46,33 ¹	3,22	23,06
Banten	–	–	NA	–	–
Bali	–	–	NA	6,44	11,47
Nusa Tenggara Barat	3,16	1,32	41,78 ¹	2,66	41,80
Nusa Tenggara Timur	3,97	1,45	36,53 ¹	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,16 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	NA	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	0,67	1,62
Sulawesi Utara	NA	–	100,25 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	55,29 ²	–	–
Sulawesi Selatan	1,98	0,96	48,28 ¹	0,57	5,75
Sulawesi Tenggara	NA	–	92,12 ²	1,13	6,81
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	13,14	5,06	38,52 ¹	–	–
Maluku	NA	–	64,93 ²	–	–
Maluku Utara	8,96	1,28	14,35	–	–
Papua Barat	22,23	9,98	44,90 ¹	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	50,41 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	73,87 ²	0,11	3,86
Papua Tengah	NA	–	109,03 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	100,00 ²	–	–
Indonesia	1,14	0,24	21,02	3,22	23,06



Lanjutan Tabel 3.41

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	NA	–	–
Sumatera Utara	NA	–	79,39 ²	–	–
Sumatera Barat	–	–	NA	–	–
R i a u	NA	–	73,74 ²	–	–
J a m b i	NA	–	67,99 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	65,74 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	100,62 ²	–	–
Lampung	–	–	NA	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	NA	–	–
Kep. Riau	–	–	NA	–	–
DKI Jakarta	NA	–	98,56 ²	–	–
Jawa Barat	3,84	1,32	34,35 ¹	1,25	6,43
Jawa Tengah	1,22	0,55	44,90 ¹	0,15	2,30
DI Yogyakarta	NA	–	69,96 ²	–	–
Jawa Timur	NA	–	71,31 ²	–	–
Banten	NA	–	69,62 ²	–	–
B a l i	NA	–	99,97 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	NA	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	NA	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	97,80 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	NA	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,14 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,32 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	NA	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	NA	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	NA	–	–
Gorontalo	–	–	NA	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	–	–	NA	–	–
Maluku Utara	–	–	NA	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	–	–	NA	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,00	0,43	21,30	1,17	2,84



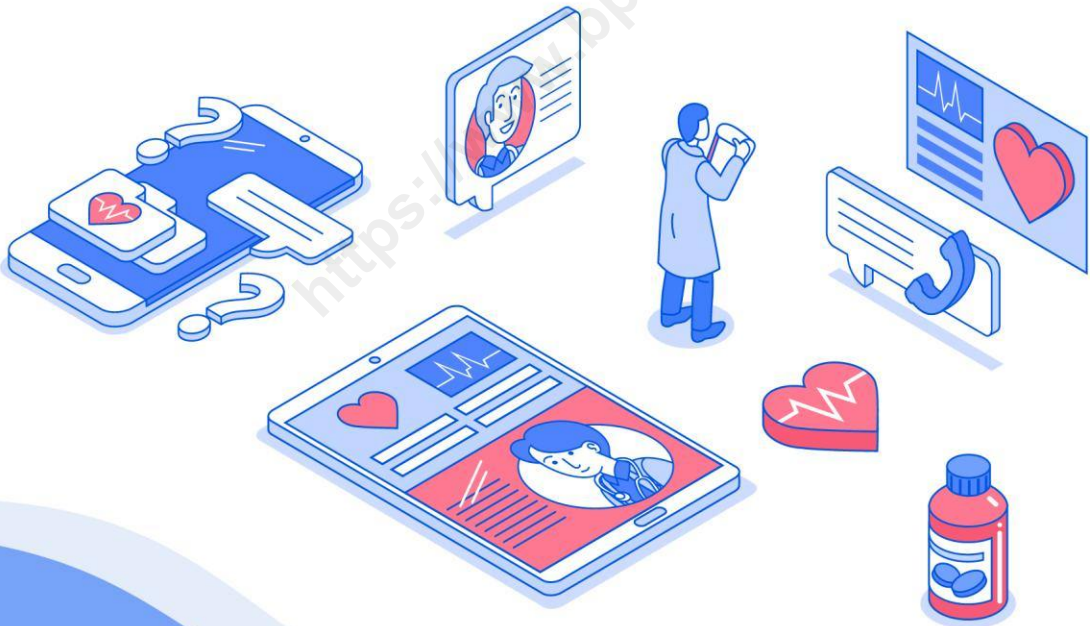
Lanjutan Tabel 3.41

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	NA	–	100,32 ²	–	–
Sumatera Utara	3,95	1,77	44,82 ¹	0,48	7,42
Sumatera Barat	NA	–	71,42 ²	–	–
Riau	NA	–	52,28 ²	–	–
Jambi	NA	–	67,46 ²	–	–
Sumatera Selatan	2,50	1,08	43,33 ¹	0,38	4,62
Bengkulu	NA	–	64,95 ²	–	–
Lampung	5,27	2,46	46,64 ¹	0,45	10,08
Kep. Bangka Belitung	NA	–	97,98 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,77 ²	–	–
DKI Jakarta	9,76	4,71	48,23 ¹	0,53	18,99
Jawa Barat	3,62	1,30	35,76 ¹	1,08	6,16
Jawa Tengah	2,20	0,78	35,42 ¹	0,67	3,73
DI Yogyakarta	NA	–	100,23 ²	–	–
Jawa Timur	4,59	1,46	31,84 ¹	1,73	7,46
Banten	3,92	1,71	43,57 ¹	0,57	7,27
Bali	NA	–	61,56 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	68,13 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	58,91 ²	–	–
Kalimantan Barat	–	–	NA	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	92,32 ²	-1,73	5,99
Kalimantan Selatan	NA	–	51,28 ²	-0,02	7,90
Kalimantan Timur	11,60	3,56	30,71 ¹	4,61	18,58
Kalimantan Utara	–	–	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	54,35 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	72,01 ²	–	–
Sulawesi Selatan	3,44	1,50	43,51 ¹	0,50	6,37
Sulawesi Tenggara	0,37	0,03	7,20	0,32	0,43
Gorontalo	NA	–	75,88 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	NA	–	–
Maluku	NA	–	104,04 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	65,18 ²	–	–
Papua Barat	–	–	NA	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA	–	–
Papua	NA	–	102,64 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	NA	–	–
Papua Tengah	NA	–	84,45 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	NA	–	–
Indonesia	2,00	0,43	21,30	1,17	2,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4

KESEHATAN WANITA USIA SUBUR



4.1 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur (WUS)

Wanita usia subur merupakan kelompok penduduk yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan generasi dan pembangunan nasional. Pada rentang usia 15–49 tahun, wanita berada dalam masa reproduksi yang ditandai dengan berbagai perubahan biologis, sosial, dan ekonomi. Kesehatan mereka tidak hanya memengaruhi kondisi individu, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan ibu hamil, bayi yang dilahirkan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

Peningkatan derajat kesehatan wanita usia subur menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pemeriksaan kehamilan, serta pemenuhan gizi dan kesehatan mental merupakan faktor kunci untuk memastikan wanita dapat menjalani masa reproduksinya secara sehat dan aman.

Wanita usia subur juga berperan sebagai penggerak kesejahteraan keluarga. Ketika wanita memiliki pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan, mereka cenderung membuat keputusan yang lebih baik bagi kesehatan anak dan keluarganya. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan wanita usia subur merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Selama periode 2023–2025, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2023, persentase perempuan dengan keluhan kesehatan tercatat sebesar 22,10 persen, naik menjadi 22,77 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 23,96 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan klasifikasi desa, terlihat adanya perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2025, sebanyak 25,05 persen penduduk perempuan umur 15–49 tahun di perdesaan memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sedikit lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (23,25 persen).

Kecenderungan keluhan kesehatan pada penduduk perempuan meningkat seiring bertambahnya usia. Pada tahun 2025, persentase perempuan usia 15–19 tahun yang memiliki keluhan kesehatan sebesar 20,93 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 31,61 persen pada kelompok usia 45–49 tahun. Pola ini menggambarkan bahwa seiring bertambahnya usia, risiko terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan metabolik, hormonal, dan reproduksi, semakin besar.



Tren Data, 2023–2025



Persentase perempuan umur 15–49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan terakhir **meningkat** dari tahun sebelumnya



Klasifikasi Desa, 2025



Persentase perempuan umur 15–49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan terakhir **di daerah perdesaan lebih tinggi** dibandingkan di daerah perkotaan



Kelompok Umur, 2025



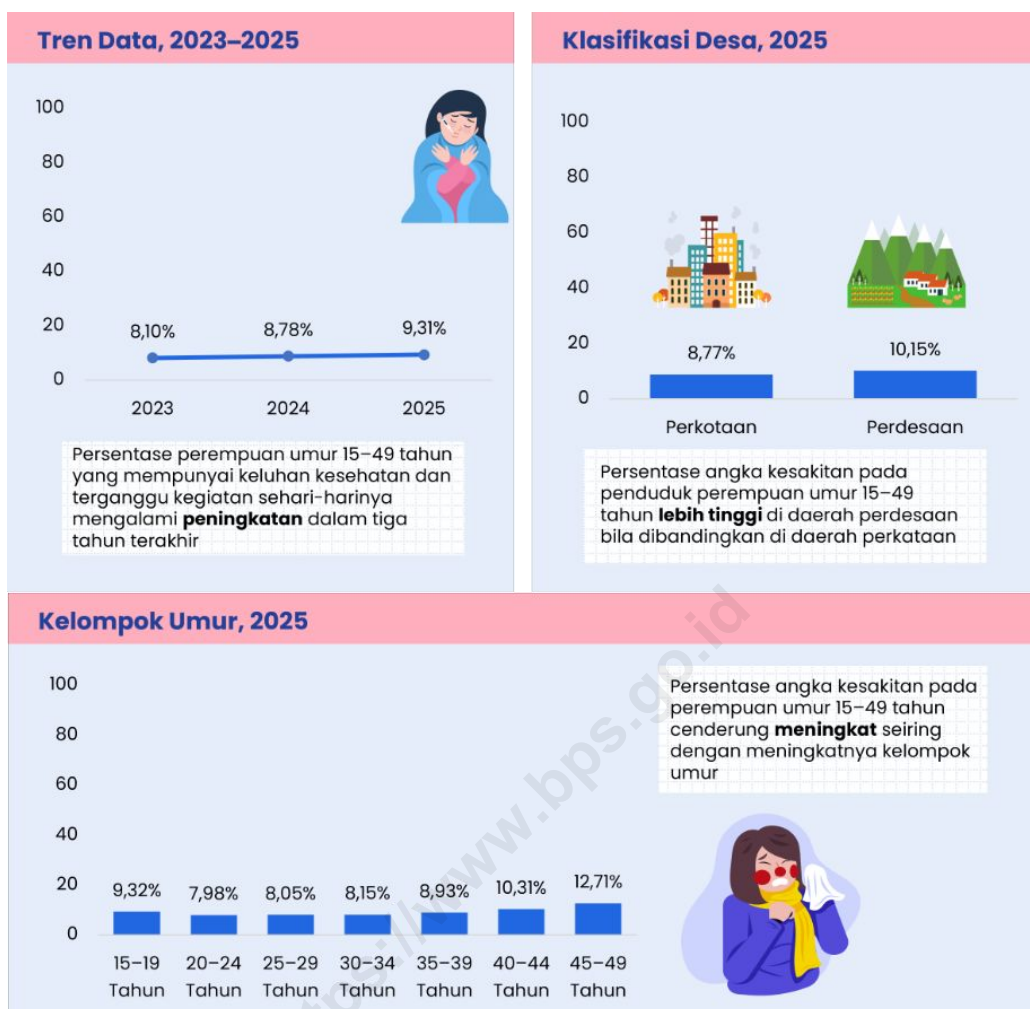
Persentase keluhan kesehatan pada perempuan umur 15–49 tahun **meningkat** seiring dengan meningkatnya kelompok umur



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.1

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.2

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik, 2025

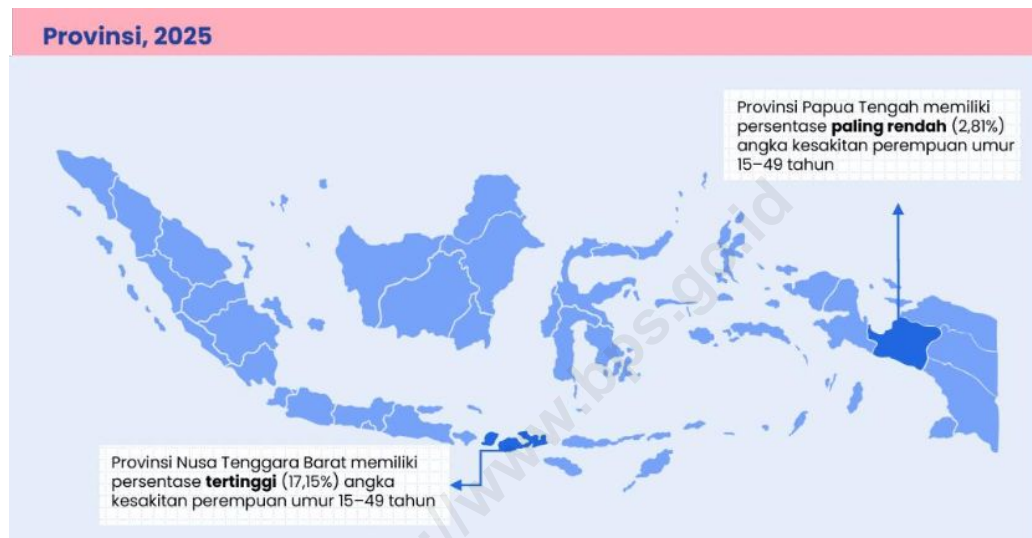
Selama tiga tahun terakhir, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari-hari menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, persentasenya tercatat sebesar 8,10 persen, naik menjadi 8,78 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 9,31 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar keluhan kesehatan yang dialami wanita usia subur mungkin bersifat ringan, masih terdapat persentase yang cukup signifikan yang memengaruhi produktivitas dan aktivitas harian mereka.

Perempuan di daerah perdesaan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dibandingkan dengan yang tinggal di



daerah perkotaan. Pada tahun 2025, sebanyak 10,15 persen perempuan di perdesaan mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya akibat masalah kesehatan, sedangkan di wilayah perkotaan angkanya mencapai 8,77 persen.

Keluhan kesehatan yang berdampak pada kegiatan sehari-hari juga memperlihatkan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya usia. Pada tahun 2025, hanya 9,32 persen perempuan usia 15–19 tahun yang melaporkan keluhan tersebut, sementara pada kelompok usia 45–49 tahun angkanya meningkat menjadi 12,71 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan fisiologis dan meningkatnya risiko penyakit kronis seiring pertambahan usia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

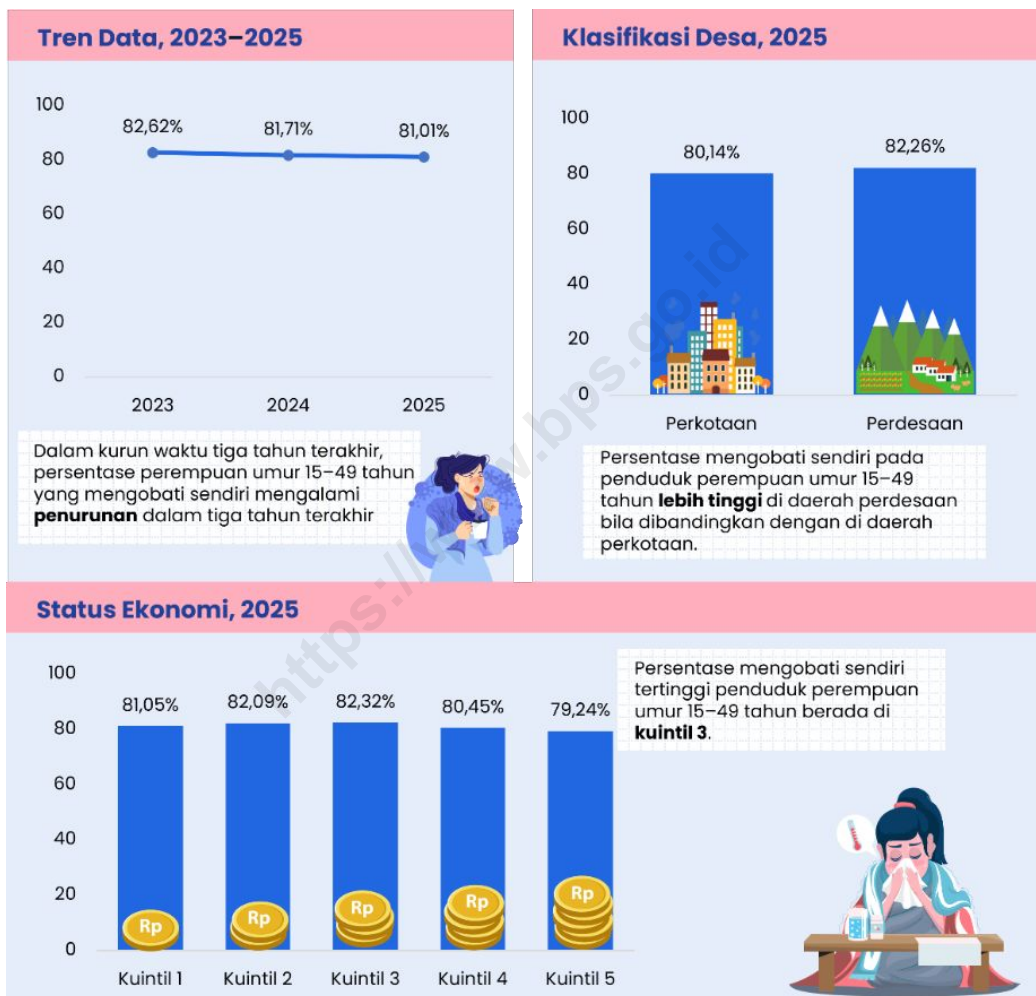
Gambar 4.3

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Menurut Provinsi, 2025

Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi dengan persentase tertinggi, yaitu 17,15 persen perempuan usia 15–49 tahun melaporkan mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir. Angka ini menandakan perlunya peningkatan upaya kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Sebaliknya, provinsi Papua Tengah mencatat persentase terendah, yaitu hanya 2,81 persen. Rendahnya angka ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan karakteristik demografis, persepsi terhadap kesehatan, serta kemungkinan keterbatasan pelaporan keluhan kesehatan akibat akses layanan yang masih terbatas di beberapa wilayah terpencil.

Kecenderungan meningkatnya keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa aspek kesehatan wanita usia subur tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan medis, tetapi juga dengan kualitas hidup secara menyeluruh. Peningkatan akses terhadap pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi mengenai gizi dan kesehatan reproduksi, serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi menjadi langkah penting untuk menurunkan angka kesakitan pada wanita usia subur. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan kesehatan ibu dan perempuan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesehatan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.4

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Perilaku mengobati sendiri (*self-medication*) merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap keluhan kesehatan yang dirasakan tanpa



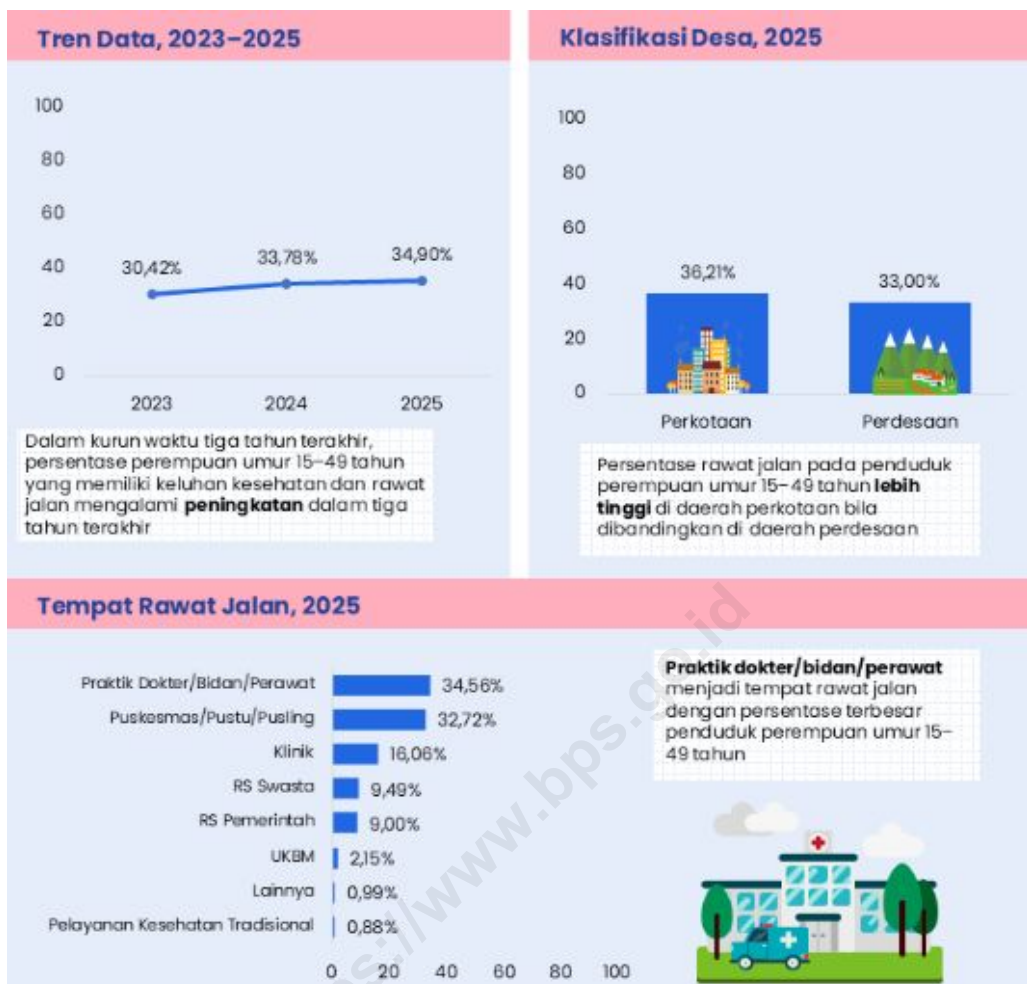
berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis. Meskipun sering dianggap praktis dan hemat waktu, penggunaan obat tanpa pengawasan medis berpotensi menimbulkan risiko seperti salah diagnosis, dosis tidak tepat, atau efek samping yang tidak terpancang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku mengobati sendiri, khususnya di kalangan wanita usia subur, menjadi penting untuk memantau kualitas perilaku kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil Susenas 2023–2025, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang mengobati sendiri menunjukkan kecenderungan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, sebesar 82,62 persen perempuan dengan keluhan kesehatan memilih untuk mengobati sendiri, menurun menjadi 81,71 persen pada tahun 2024, dan sedikit meningkat kembali menjadi 81,01 persen pada tahun 2025.

Dilihat dari klasifikasi desa, perilaku mengobati sendiri pada wanita usia subur (15–49 tahun) masih lebih banyak ditemukan di daerah perdesaan (82,26 persen) dibandingkan perkotaan (80,14 persen). Sementara itu, berdasarkan status ekonomi rumah tangga, kelompok kuintil ketiga (menengah) menunjukkan persentase tertinggi dalam perilaku mengobati sendiri, yaitu 82,32 persen, diikuti oleh kuintil kedua dan pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok ekonomi menengah memiliki kemampuan untuk membeli obat tanpa kesulitan finansial, tetapi belum tentu memiliki kebiasaan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan secara rutin.

Selama periode 2023–2025, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki keluhan kesehatan dan menjalani rawat jalan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2023, persentasenya tercatat sebesar 30,42 persen, naik menjadi 33,78 persen pada tahun 2024, dan terus meningkat menjadi 34,90 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak wanita usia subur yang memanfaatkan layanan rawat jalan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dialami, seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara dini.

Persentase perempuan usia 15–49 tahun yang menjalani rawat jalan lebih tinggi di daerah perkotaan (36,21 persen) dibandingkan dengan perdesaan (33,00 persen). Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya perawatan medis. Sementara itu, di daerah perdesaan, faktor jarak, ketersediaan tenaga medis, dan keterbatasan sarana transportasi masih menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan rawat jalan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.5

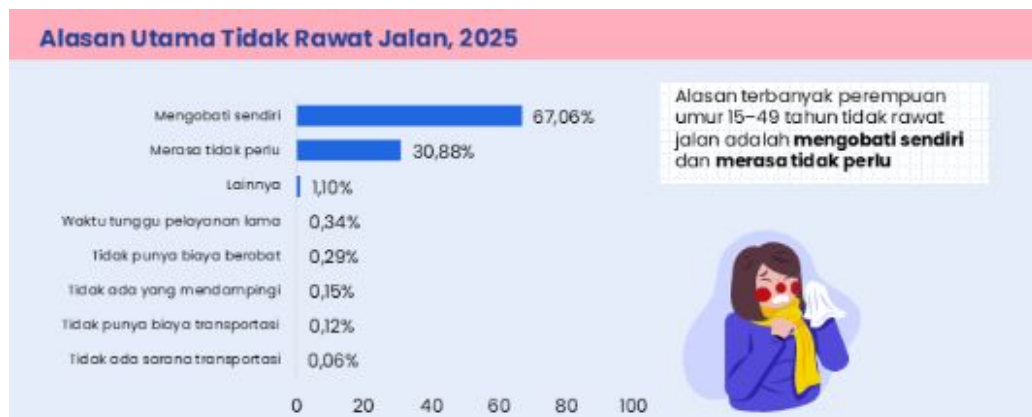
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Berdasarkan jenis tempat rawat jalan yang digunakan, praktik dokter, bidan, dan perawat menjadi pilihan utama bagi perempuan usia 15–49 tahun dengan persentase tertinggi yaitu 34,56 persen, diikuti oleh puskesmas/pustu/pusling (32,72 persen) dan klinik (16,06 persen). Sementara itu, persentase perempuan yang berobat di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah masing-masing sebesar 9,49 persen dan 9,00 persen. Jenis pelayanan lainnya seperti pelayanan kesehatan tradisional (0,88 persen) dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (2,15 persen) relatif kecil.

Pola ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di lini pertama, seperti dokter umum, bidan, dan perawat, masih menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi wanita usia subur di Indonesia. Keberadaan puskesmas dan



praktik tenaga kesehatan mandiri memainkan peran penting dalam memberikan layanan yang cepat dan terjangkau.



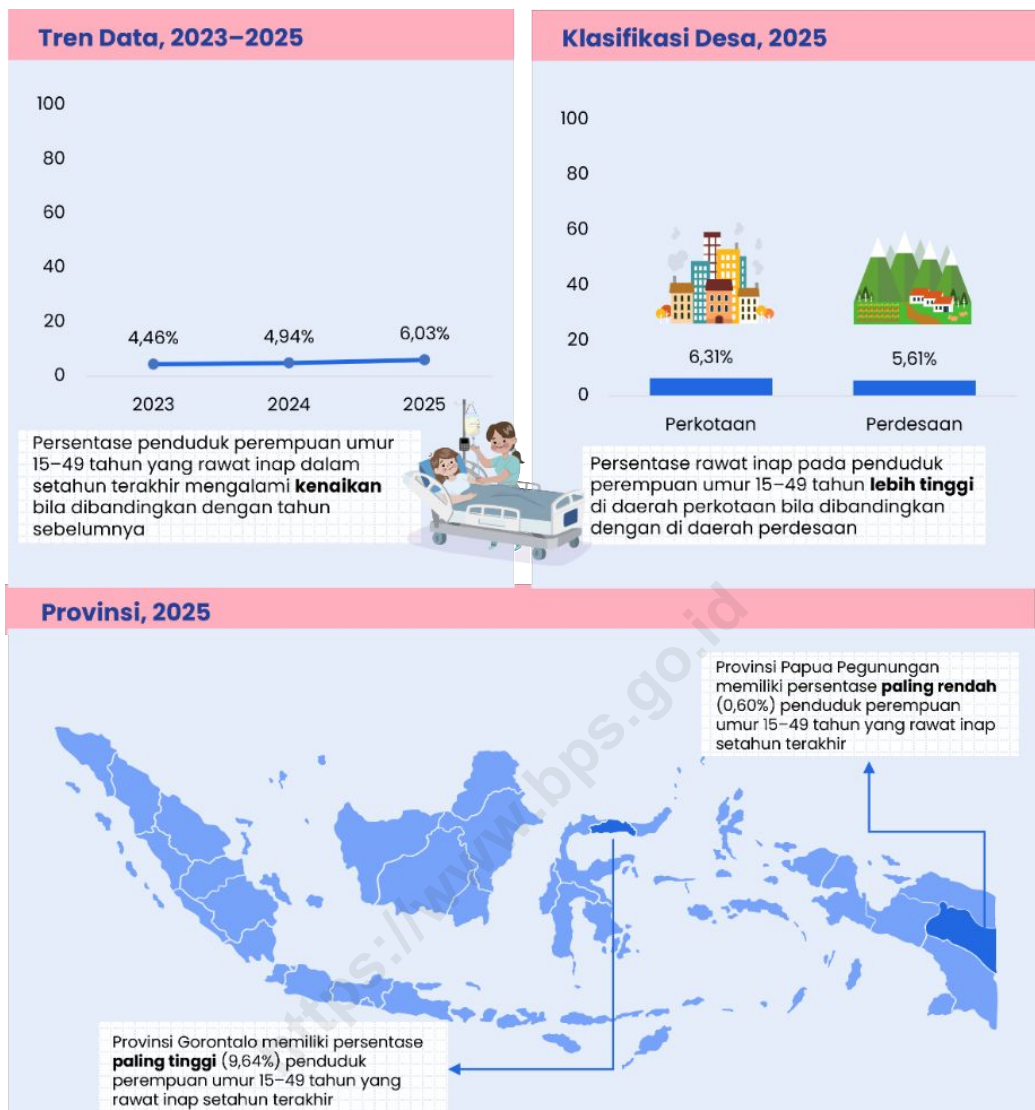
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.6

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Masih terdapat sebagian dari perempuan umur 15–49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari-hari namun tidak rawat jalan. Pada tahun 2025, hasil Susenas menunjukkan bahwa alasan utama perempuan usia 15–49 tahun tidak melakukan rawat jalan adalah karena mengobati sendiri (67,06 persen) dan merasa tidak perlu berobat (30,88 persen). Kedua alasan ini menggambarkan bahwa sebagian besar perempuan memilih menangani keluhan kesehatan secara mandiri tanpa konsultasi tenaga medis, baik karena menganggap keluhannya ringan maupun karena telah memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Alasan lain seperti tidak ada yang mendampingi (0,15 persen), tidak memiliki biaya berobat (0,29 persen), tidak ada sarana transportasi (0,06 persen), serta waktu tunggu pelayanan yang lama (0,34 persen) menunjukkan bahwa hambatan non-medis masih ada, namun relatif kecil dibandingkan faktor perilaku dan persepsi individu.

Setelah membahas perilaku perempuan usia 15–49 tahun dalam memanfaatkan layanan rawat jalan, penting pula untuk melihat bagaimana mereka mengakses layanan rawat inap, yang umumnya mencerminkan kondisi kesehatan yang lebih serius atau membutuhkan perawatan intensif. Berbeda dengan rawat jalan yang sering kali ditujukan untuk penanganan awal dan pemeriksaan rutin, rawat inap menunjukkan adanya kebutuhan pengawasan medis lebih lanjut serta keterlibatan sumber daya kesehatan yang lebih besar. Perbandingan kedua jenis layanan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kesadaran dan pola pencarian pengobatan di kalangan wanita usia subur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.7
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023–2025

Selama periode 2023–2025, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang menjalani rawat inap dalam setahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2023, angkanya tercatat sebesar 4,46 persen, naik menjadi 4,94 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 6,03 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak wanita usia subur yang mendapatkan layanan rawat inap, baik untuk kebutuhan persalinan, komplikasi kesehatan, maupun penyakit tidak menular yang membutuhkan perawatan lanjutan. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase perempuan yang menjalani



rawat inap lebih tinggi di daerah perkotaan (6,31 persen) dibandingkan perdesaan (5,61 persen). Provinsi Gorontalo mencatat persentase tertinggi perempuan usia 15–49 tahun yang dirawat inap (9,64 persen), sedangkan Papua Pegunungan terendah (0,60 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.8
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2025

Pada tahun 2025, sebagian besar perempuan usia 15–49 tahun yang menjalani rawat inap memilih untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta, dengan persentase mencapai 44,55 persen. Angka ini menempatkan rumah sakit swasta sebagai tempat rawat inap dengan persentase tertinggi bila dibandingkan jenis fasilitas lainnya. Hal ini dapat menunjukkan dua hal: pertama, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit swasta; dan kedua, adanya pergeseran preferensi terhadap pelayanan yang dianggap lebih cepat, nyaman, dan memiliki fasilitas yang lengkap, meskipun biayanya relatif lebih tinggi.

Fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah menjadi pilihan kedua dengan persentase 33,87 persen. Rumah sakit pemerintah tetap memainkan peran penting dalam menyediakan layanan rawat inap, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi atau mereka yang memanfaatkan jaminan kesehatan nasional. Peran fasilitas publik ini juga sangat vital dalam penanganan kasus-kasus gawat darurat, penyakit menular, serta layanan persalinan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional di bidang kesehatan ibu dan anak. Selain rumah sakit, sebagian wanita usia subur juga mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas/pustu/pusling (12,07 persen) dan klinik (6,80 persen). Persentase ini menunjukkan bahwa puskesmas dengan fasilitas rawat inap tetap menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan

di banyak wilayah, terutama di daerah perdesaan. Di sisi lain, praktik bidan hanya menyumbang sekitar 4,52 persen, yang umumnya berkaitan dengan perawatan pascapersalinan atau penanganan ringan.

Pola ini memperlihatkan bahwa wanita usia subur semakin aktif memanfaatkan berbagai jenis fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya. Meskipun rumah sakit swasta mendominasi, keberadaan fasilitas kesehatan pemerintah dan layanan primer tetap krusial dalam menjamin akses yang merata di seluruh wilayah. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, sinergi antara sektor publik dan swasta perlu terus diperkuat agar setiap perempuan di Indonesia dapat memperoleh layanan rawat inap yang aman, terjangkau, dan berkualitas tanpa hambatan geografis maupun finansial.

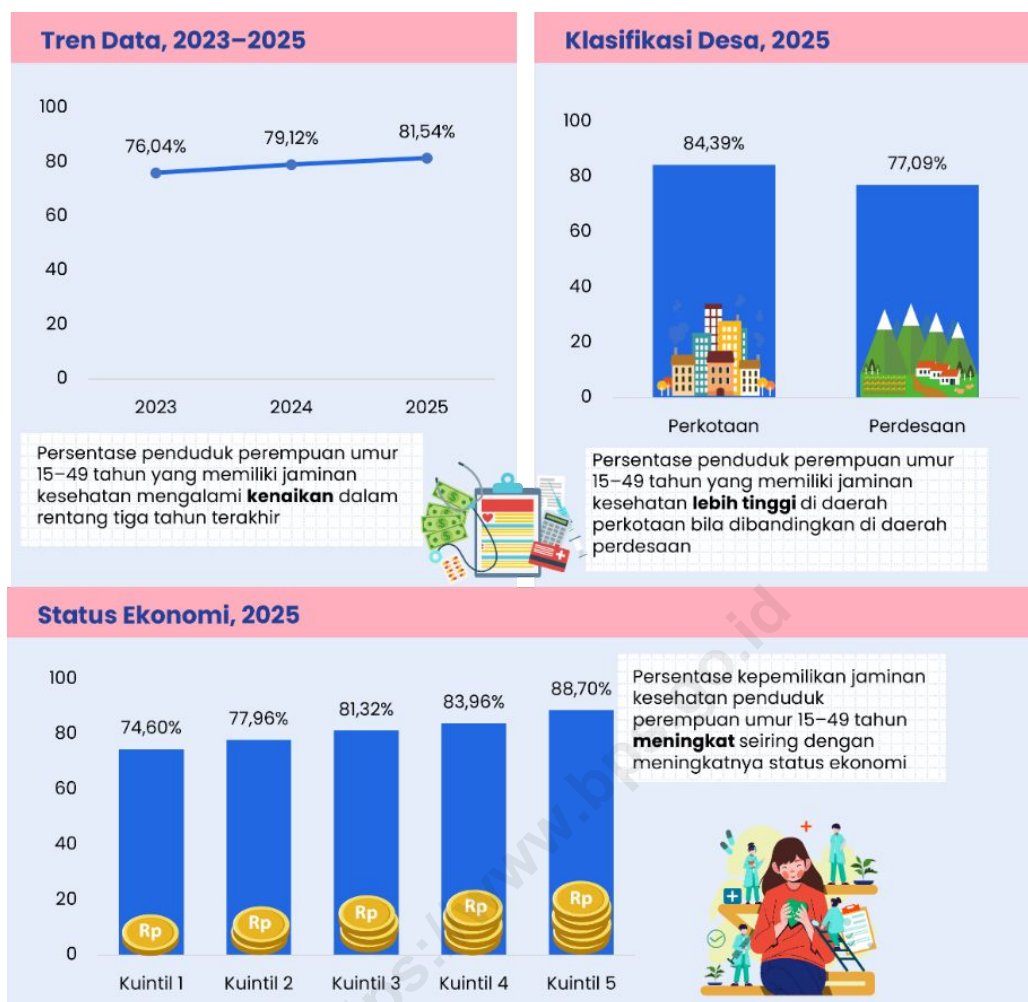
4.2 Kepemilikan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan pada Wanita Usia Subur

Akses terhadap jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan pemerataan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi wanita usia subur. Jaminan kesehatan membantu mencegah beban finansial akibat biaya pengobatan, sekaligus meningkatkan peluang perempuan untuk memanfaatkan layanan promotif, preventif, dan kuratif. Dalam konteks pembangunan kesehatan nasional, peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi langkah strategis untuk mendukung tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia.

Selama periode 2023–2025, persentase perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2023, sebesar 76,04 persen wanita usia subur telah tercakup dalam jaminan kesehatan, meningkat menjadi 79,12 persen pada tahun 2024, dan 81,54 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan hasil dari perluasan cakupan kepesertaan JKN yang digagas pemerintah melalui berbagai program integrasi dan sosialisasi ke masyarakat, termasuk kelompok wanita usia subur.

Kepemilikan jaminan kesehatan lebih tinggi di daerah perkotaan (84,39 persen) dibandingkan perdesaan (77,09 persen). Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi dan akses administrasi antara wilayah, di mana masyarakat perkotaan lebih mudah melakukan pendaftaran maupun pembaruan kepesertaan karena tersedianya fasilitas teknologi dan layanan BPJS yang lebih luas. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses internet, jarak ke fasilitas kesehatan, serta kesadaran administratif yang lebih rendah.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.9

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025

Berdasarkan status ekonomi, kepemilikan jaminan kesehatan meningkat seiring dengan naiknya tingkat kesejahteraan. Kelompok kuintil satu mencatat kepemilikan sebesar 74,60 persen, sementara kelompok kuintil lima mencapai 88,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program jaminan kesehatan telah mencakup sebagian besar penduduk, kelompok berpenghasilan rendah masih memerlukan perhatian khusus. Upaya peningkatan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu terus diperkuat agar kelompok ekonomi terbawah tetap terlindungi dari risiko pengeluaran kesehatan yang tinggi.

Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan wanita usia subur menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, upaya berkelanjutan masih diperlukan

untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan kelompok ekonomi, serta memastikan bahwa kepemilikan jaminan benar-benar diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan yang optimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.10
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2025

Pemerataan kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup besar antarprovinsi. Perbedaan ini menggambarkan bahwa meskipun cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat secara nasional, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi, ketersediaan infrastruktur administrasi, serta kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan masyarakat.

Pada tahun 2025, Provinsi Aceh mencatat persentase tertinggi kepemilikan jaminan kesehatan pada perempuan usia 15–49 tahun, yaitu mencapai 99,50 persen. Angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah Aceh dalam mengintegrasikan seluruh penduduknya ke dalam skema jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berjalan sinergis dengan BPJS Kesehatan per 1 April 2022. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh praktik baik bagi daerah lain dalam memperluas cakupan peserta, khususnya kelompok wanita usia subur yang memiliki kebutuhan layanan kesehatan spesifik.

Sebaliknya, Provinsi Jambi mencatat persentase kepemilikan terendah, yaitu sebesar 66,63 persen. Rendahnya tingkat kepemilikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sosialisasi program, masih adanya penduduk dengan status kepesertaan tidak aktif, serta tantangan administratif



seperti data kependudukan yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan agar kepesertaan jaminan kesehatan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, termasuk wanita usia subur di daerah dengan cakupan rendah.

Secara umum, variasi antarprovinsi menegaskan bahwa perlu dilakukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah. Provinsi dengan capaian tinggi perlu mempertahankan keberlanjutan program, sementara provinsi dengan capaian rendah membutuhkan strategi intensifikasi pendaftaran peserta, validasi data kepesertaan, serta peningkatan literasi masyarakat tentang manfaat jaminan kesehatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesenjangan kepemilikan jaminan kesehatan antarwilayah dapat semakin menyempit dan mendukung terwujudnya *Universal Health Coverage* yang berkeadilan bagi seluruh perempuan Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.11
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Pada tahun 2025, sebagian besar perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki jaminan kesehatan tercakup dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hampir setengah (49,85 persen) wanita usia subur tercatat sebagai peserta BPJS PBI, sementara 27,22 persen lainnya terdaftar sebagai peserta BPJS non-PBI. Hal ini menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan yang didanai oleh pemerintah masih menjadi pilar utama dalam perluasan cakupan kesehatan nasional, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain BPJS Kesehatan, terdapat pula sebagian kecil wanita usia subur yang memperoleh perlindungan kesehatan melalui jaminan daerah (Jamkesda)

dengan persentase 2,67 persen, serta melalui asuransi swasta (0,54 persen) dan jaminan dari perusahaan atau kantor tempat bekerja (3,17 persen). Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan skema-skema alternatif ini berkontribusi terhadap diversifikasi sumber perlindungan kesehatan, khususnya bagi kelompok pekerja formal atau masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Dominasi kepesertaan dalam BPJS PBI menggambarkan bahwa kebijakan subsidi iuran dari pemerintah telah menjangkau sebagian besar kelompok rentan, termasuk wanita usia subur yang tidak memiliki penghasilan tetap. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pendataan, memastikan keberlanjutan kepesertaan aktif, serta memperluas cakupan bagi pekerja informal dan keluarga miskin yang belum terdaftar. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi langkah penting agar seluruh wanita usia subur dapat memperoleh hak atas perlindungan kesehatan yang setara dan berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional telah berhasil mencakup mayoritas wanita usia subur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan *Universal Health Coverage (UHC)* secara menyeluruh, diperlukan perbaikan dalam kualitas layanan, kemudahan akses, dan peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan aktif, terutama di kelompok wanita usia subur yang berperan penting dalam menjaga kesehatan keluarga dan generasi mendatang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.12

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Pemanfaatan jaminan kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan telah berfungsi secara efektif. Bagi perempuan usia 15–49 tahun, kepemilikan jaminan



kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial. Hal ini juga memengaruhi perilaku pencarian pengobatan dan keputusan untuk mengakses layanan kesehatan, terutama rawat jalan yang berkaitan dengan penyakit umum maupun kesehatan reproduksi.

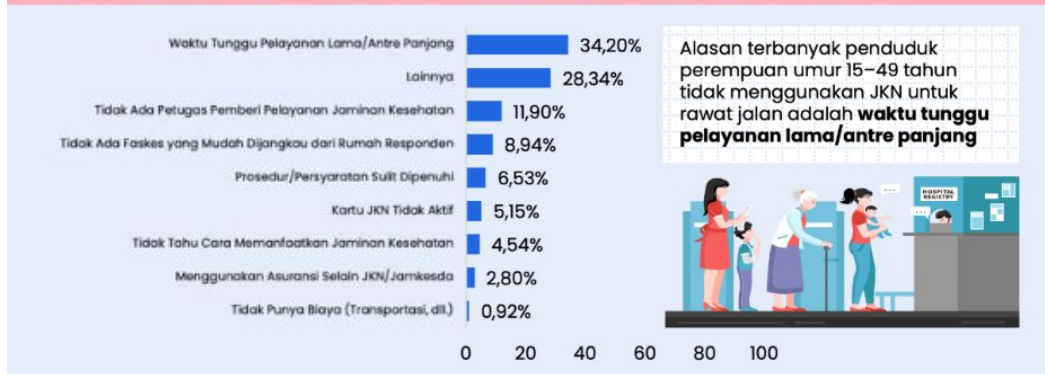
Pada tahun 2025, hasil Susenas menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) menjadi jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh wanita usia subur untuk rawat jalan, yaitu sebesar 36,03 persen. Sementara itu, BPJS Non-PBI digunakan oleh 20,12 persen perempuan. Temuan ini menegaskan peran besar program pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menunjukkan bahwa jaminan kesehatan berbasis negara masih menjadi tulang punggung sistem kesehatan Indonesia.

Selain BPJS, sebagian kecil perempuan umur 15–49 tahun menggunakan skema jaminan lain seperti jaminan perusahaan atau kantor (1,69 persen), Jamkesda (0,83 persen), dan asuransi swasta (0,47 persen). Rendahnya pemanfaatan dari skema nonpemerintah dapat disebabkan oleh terbatasnya cakupan peserta, keterbatasan fasilitas yang bekerja sama, serta preferensi masyarakat yang lebih memilih BPJS Kesehatan karena cakupan layanannya yang luas dan kemudahan aksesnya di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan usia 15–49 tahun semakin memanfaatkan jaminan kesehatan dalam mengakses layanan rawat jalan. Namun, upaya peningkatan mutu layanan dan efisiensi sistem administrasi tetap diperlukan agar seluruh peserta jaminan kesehatan, baik PBI maupun non-PBI, memperoleh pelayanan yang cepat, bermutu, dan setara. Selain itu, penting untuk memperluas sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan agar seluruh wanita usia subur dapat menggunakan haknya secara optimal dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Meskipun kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan perempuan usia 15–49 tahun terus meningkat, tidak semua pemegang jaminan tersebut memanfaatkannya saat menjalani rawat jalan. Pada tahun 2025, hasil Susenas menunjukkan bahwa alasan utama wanita usia subur tidak memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jamkesda untuk layanan rawat jalan adalah karena waktu tunggu pelayanan yang lama atau antrean panjang (34,20 persen). Temuan ini menegaskan bahwa kendala efisiensi layanan, termasuk lamanya proses administrasi dan keterbatasan tenaga kesehatan, masih menjadi tantangan utama dalam sistem pelayanan publik. Panjangnya waktu tunggu dapat menurunkan motivasi pasien untuk berobat ke fasilitas kesehatan, terutama bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik dan pekerjaan yang tidak fleksibel terhadap waktu.

Alasan Tidak Memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025



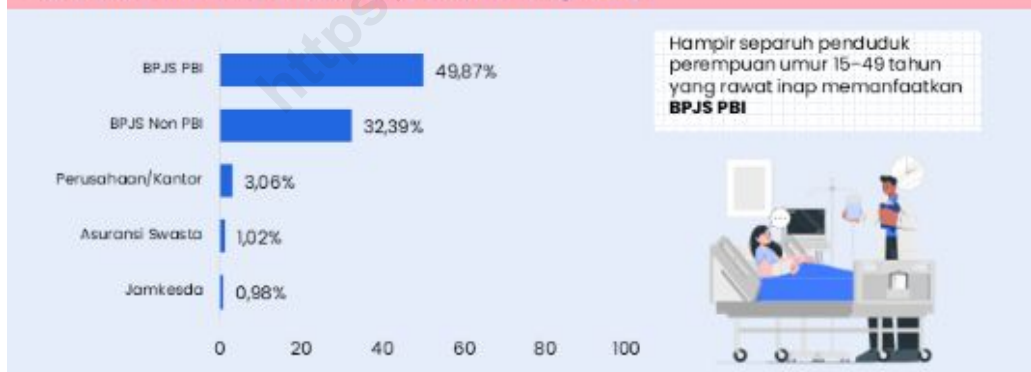
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.13

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Jalan, 2025

Selain itu, sekitar 11,90 persen responden menyebutkan tidak adanya petugas pemberi pelayanan, sementara 8,94 persen mengaku kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah persyaratan administrasi yang rumit (6,53 persen) dan ketidaktahuan cara memanfaatkan JKN (4,54 persen). Sementara itu, sebagian kecil responden memilih menggunakan asuransi lain (2,80 persen) atau menyatakan bahwa kartu JKN-nya tidak aktif (5,15 persen).

Jenis Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.14

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Pemanfaatan jaminan kesehatan pada layanan rawat inap mencerminkan efektivitas sistem perlindungan sosial dalam membantu masyarakat



menghadapi beban biaya kesehatan yang tinggi. Bagi perempuan usia 15–49 tahun, keberadaan jaminan kesehatan berperan penting dalam menjamin akses terhadap layanan medis yang aman dan terjangkau, terutama untuk kondisi yang memerlukan perawatan intensif, persalinan, atau komplikasi kesehatan reproduksi.

Hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir setengah dari wanita usia subur yang menjalani rawat inap (49,87 persen) memanfaatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) sebagai jaminan pembiayaan. Angka ini menegaskan peran besar program subsidi pemerintah dalam membantu kelompok masyarakat rentan memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Selain itu, BPJS non-PBI juga digunakan oleh 32,39 persen perempuan, menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang secara mandiri terdaftar dalam program jaminan nasional dan aktif memanfaatkannya untuk kebutuhan rawat inap. Sementara itu, persentase penggunaan jaminan dari perusahaan/kantor (3,06 persen), asuransi swasta (1,02 persen), dan Jamkesda (0,98 persen) relatif kecil. Hal ini menandakan bahwa meskipun skema jaminan alternatif masih ada, dominasi program BPJS Kesehatan tetap menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk wanita usia subur.

Tingginya penggunaan BPJS Kesehatan, baik PBI maupun non-PBI, untuk layanan rawat inap menggambarkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal kenyamanan pasien, waktu tunggu, dan ketersediaan ruang rawat, agar pemanfaatan jaminan kesehatan tidak hanya tinggi dari sisi kuantitas tetapi juga efektif dari segi mutu layanan. Peningkatan literasi kesehatan juga penting untuk memastikan seluruh peserta memahami hak dan prosedur pemanfaatan jaminan kesehatan ketika membutuhkan layanan rawat inap.

Walaupun kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan perempuan usia 15–49 tahun telah meningkat dan mencakup sebagian besar penduduk, tidak semua peserta memanfaatkan jaminan tersebut saat menjalani rawat inap. Pemanfaatan yang belum maksimal ini mengindikasikan adanya hambatan baik dari sisi pelayanan maupun pemahaman masyarakat terhadap prosedur jaminan kesehatan.

Berdasarkan hasil Susenas 2025, salah satu alasan wanita usia subur tidak menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) saat rawat inap adalah waktu tunggu pelayanan yang lama atau antrean panjang, dengan persentase 22,01 persen. Kondisi ini menandakan bahwa aspek kenyamanan dan kecepatan pelayanan masih menjadi perhatian penting dalam pemanfaatan jaminan kesehatan, terutama untuk layanan rumah sakit yang sering kali mengalami antrean tinggi. Selain itu, alasan lain (23,93 persen) juga menempati porsi besar, yang menunjukkan adanya berbagai faktor

personal atau situasional yang belum tercatat secara spesifik, seperti preferensi memilih layanan privat atau kebutuhan perawatan cepat di fasilitas tertentu.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.15

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap, 2025

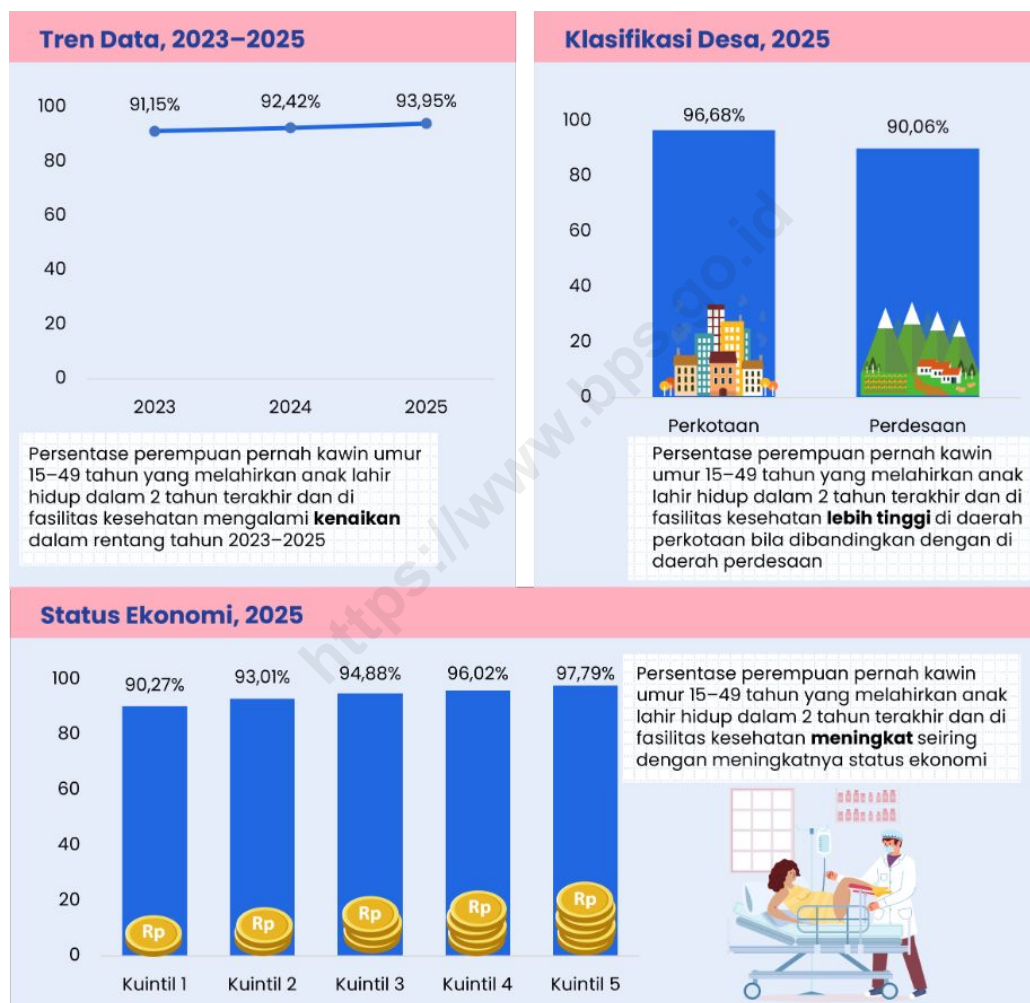
Prosedur dan persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi (13,67 persen), penggunaan asuransi selain JKN (14,45 persen), serta ketidaktahuan tentang cara memanfaatkan JKN (4,74 persen) juga dipilih oleh penduduk yang tidak memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk rawat inap. Sebanyak 10,72 persen responden menyebutkan kartu JKN tidak aktif, dan sebagian kecil lainnya menghadapi kendala seperti tidak ada petugas pelayanan (6,15 persen) atau akses ke fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau (8,77 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan administratif dan literasi kesehatan masih menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan jaminan kesehatan untuk layanan rawat inap.

Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada perluasan cakupan kepesertaan, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan kemudahan prosedur penggunaannya. Diperlukan upaya perbaikan sistem layanan, seperti digitalisasi administrasi rumah sakit, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta edukasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban peserta JKN. Dengan demikian, wanita usia subur yang memiliki jaminan kesehatan dapat lebih mudah mengakses layanan rawat inap tanpa hambatan waktu, administrasi, atau ketidaktahuan prosedur, sehingga perlindungan kesehatan yang dijanjikan oleh program JKN dapat benar-benar dirasakan secara merata.



4.3 Pelayanan Kesehatan untuk Persalinan dan Bayi Baru Lahir

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan nasional. Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu adalah persentase persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan memberikan jaminan keselamatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi, karena memungkinkan penanganan cepat terhadap komplikasi, ketersediaan alat medis, serta dukungan tenaga kesehatan terlatih.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.16

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2023–2025



Hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dalam persentase perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan melahirkan di fasilitas kesehatan, yaitu melahirkan di rumah sakit, klinik, praktik dokter/bidan/perawat, puskesmas, pusku, polindes/poskesdes. Dalam tiga tahun terakhir, persentasenya meningkat dari 91,15 persen pada 2023, menjadi 92,42 persen pada 2024, dan mencapai 93,95 persen pada 2025. Kenaikan ini menandakan keberhasilan berbagai program intervensi pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas.

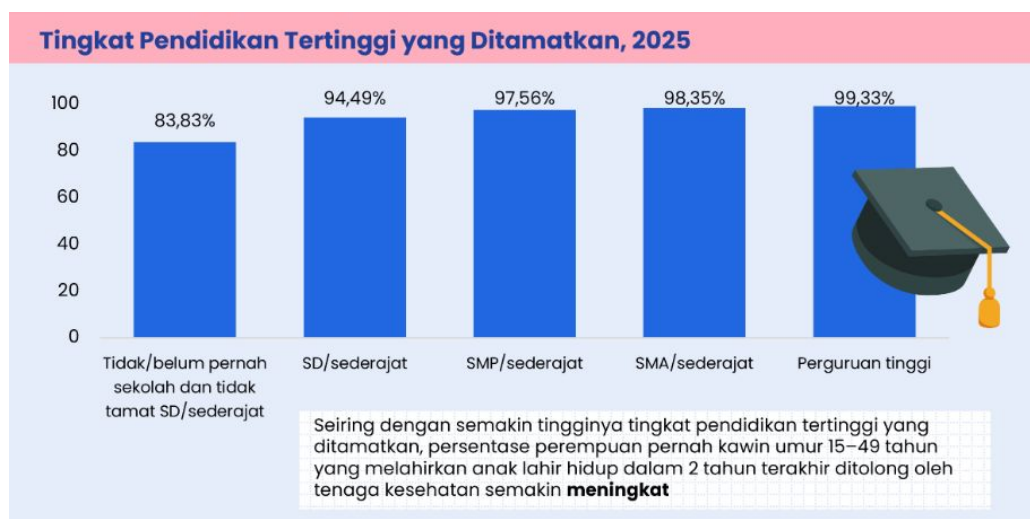
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi desa, perempuan di daerah perkotaan lebih banyak melahirkan di fasilitas kesehatan (96,68 persen) dibandingkan perempuan di daerah perdesaan (90,06 persen). Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan ketersediaan infrastruktur, jarak ke fasilitas medis, serta akses terhadap tenaga kesehatan profesional antara kedua wilayah tersebut. Meskipun demikian, capaian di perdesaan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan bahwa perluasan layanan dasar kesehatan sudah mulai menjangkau masyarakat pedesaan.

Dari sisi status ekonomi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin besar pula persentase persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2025, perempuan dari kelompok kuintil terbawah (kuintil 1) mencatat persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 90,27 persen, sementara kelompok kuintil tertinggi (kuintil 5) mencapai 97,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih berperan dalam menentukan akses terhadap fasilitas kesehatan, meskipun program jaminan persalinan dan JKN telah membantu mengurangi hambatan biaya.

Data ini menegaskan bahwa mayoritas wanita usia subur di Indonesia kini telah memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk persalinan. Namun, masih diperlukan upaya untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas layanan, terutama di daerah terpencil. Penguatan sistem rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan peran bidan desa dan puskesmas dengan layanan rawat inap menjadi kunci untuk memastikan setiap proses persalinan berlangsung aman dan bermutu.

Tingkat pendidikan perempuan merupakan salah satu faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai tempat melahirkan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan akan pentingnya persalinan yang aman, tetapi juga berperan dalam memperluas akses terhadap informasi, pelayanan kesehatan, serta kemampuan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sering digunakan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan ketimpangan sosial dalam akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.17

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Perempuan dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD/ sederajat memiliki persentase terendah, yaitu 78,56 persen. Angka ini meningkat seiring dengan naiknya tingkat pendidikan, mencapai 87,86 persen pada perempuan berpendidikan SD/ sederajat, dan 93,78 persen pada SMP/ sederajat. Tren ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar pula kesadaran dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan.

Persentase tertinggi tercatat pada perempuan berpendidikan SMA/ sederajat (95,74 persen) dan perguruan tinggi (97,67 persen). Capaian ini menggambarkan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku kesehatan yang lebih baik, termasuk keputusan melahirkan di fasilitas medis yang aman dan terstandar. Pendidikan juga seringkali berhubungan dengan status ekonomi dan pekerjaan yang lebih baik, sehingga memberikan kemampuan finansial yang lebih besar untuk mengakses fasilitas kesehatan berkualitas.

Peningkatan pendidikan perempuan merupakan salah satu strategi kunci dalam memperbaiki derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Upaya lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi perempuan di daerah tertinggal dan berpendapatan rendah, tidak hanya berdampak pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan keselamatan ibu saat persalinan.

Capaian persalinan di fasilitas kesehatan merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan sistem pelayanan kesehatan ibu di tingkat daerah. Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan memastikan adanya tenaga medis terlatih dan peralatan memadai untuk menangani komplikasi kehamilan dan persalinan, sehingga berkontribusi besar terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia karena adanya perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, serta ketersediaan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatat persentase tertinggi (100 persen) perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Capaian sempurna ini menunjukkan bahwa seluruh proses persalinan di provinsi tersebut telah dilakukan di fasilitas medis dengan dukungan tenaga kesehatan profesional. Faktor pendukungnya antara lain infrastruktur kesehatan yang lengkap, akses mudah ke rumah sakit, serta tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya persalinan aman.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.18

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi, 2025

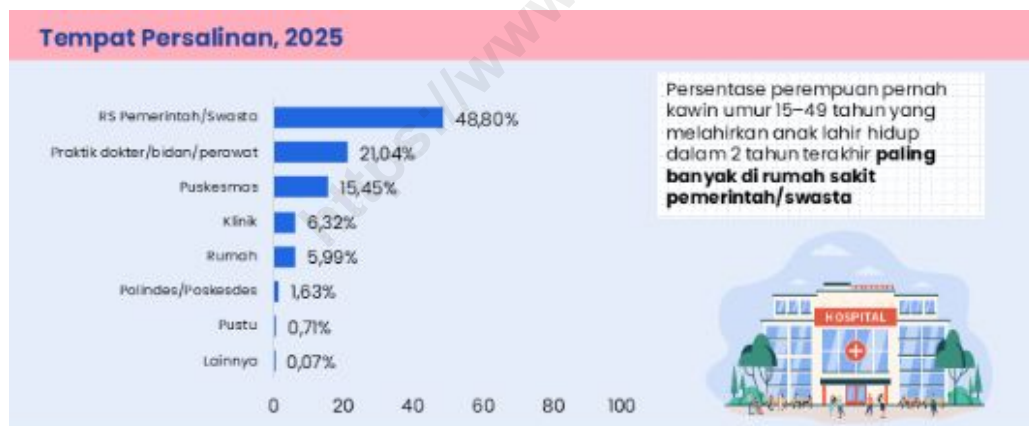
Sebaliknya, Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase terendah (38,13 persen). Rendahnya angka ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, termasuk tantangan



geografis, keterbatasan sarana transportasi, dan jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional capaian persalinan di fasilitas kesehatan telah meningkat, kesenjangan antarprovinsi masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Secara umum, capaian tinggi di sebagian besar provinsi mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan ibu. Namun, perlu dilakukan penguatan kebijakan di provinsi dengan capaian rendah, seperti peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan, pembangunan fasilitas bersalin di daerah sulit dijangkau, serta penyediaan transportasi rujukan yang memadai. Dengan upaya tersebut, diharapkan seluruh perempuan di Indonesia, tanpa terkecuali, dapat melahirkan dengan aman di fasilitas kesehatan dan berkontribusi terhadap pencapaian target *Universal Health Coverage (UHC)* dan penurunan angka kematian ibu.

Tempat persalinan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu wilayah. Pemilihan tempat melahirkan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, pendidikan, serta tingkat kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Semakin tinggi persentase persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, semakin baik pula kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan layanan maternal yang aman dan terstandar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Maret

Gambar 4.19

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Persalinan, 2025

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, sebagian besar perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melakukan persalinan di rumah sakit pemerintah atau swasta, dengan persentase mencapai 48,80 persen. Angka ini menegaskan bahwa rumah sakit

masih menjadi pilihan utama karena dianggap memiliki sarana, tenaga medis, serta peralatan yang lengkap, terutama untuk mengantisipasi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

Selain rumah sakit, sebagian perempuan juga memilih praktik dokter, bidan, atau perawat sebagai tempat melahirkan, dengan persentase sebesar 21,04 persen. Sementara itu, puskesmas menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 15,45 persen, yang menunjukkan peran penting fasilitas kesehatan primer dalam melayani persalinan, khususnya di daerah perdesaan. Adapun persalinan di rumah masih terjadi dengan persentase sebesar 5,99 persen, sedangkan sisanya dilakukan di klinik (6,32 persen), polindes/poskesdes (1,63 persen), dan pustu (0,71 persen).

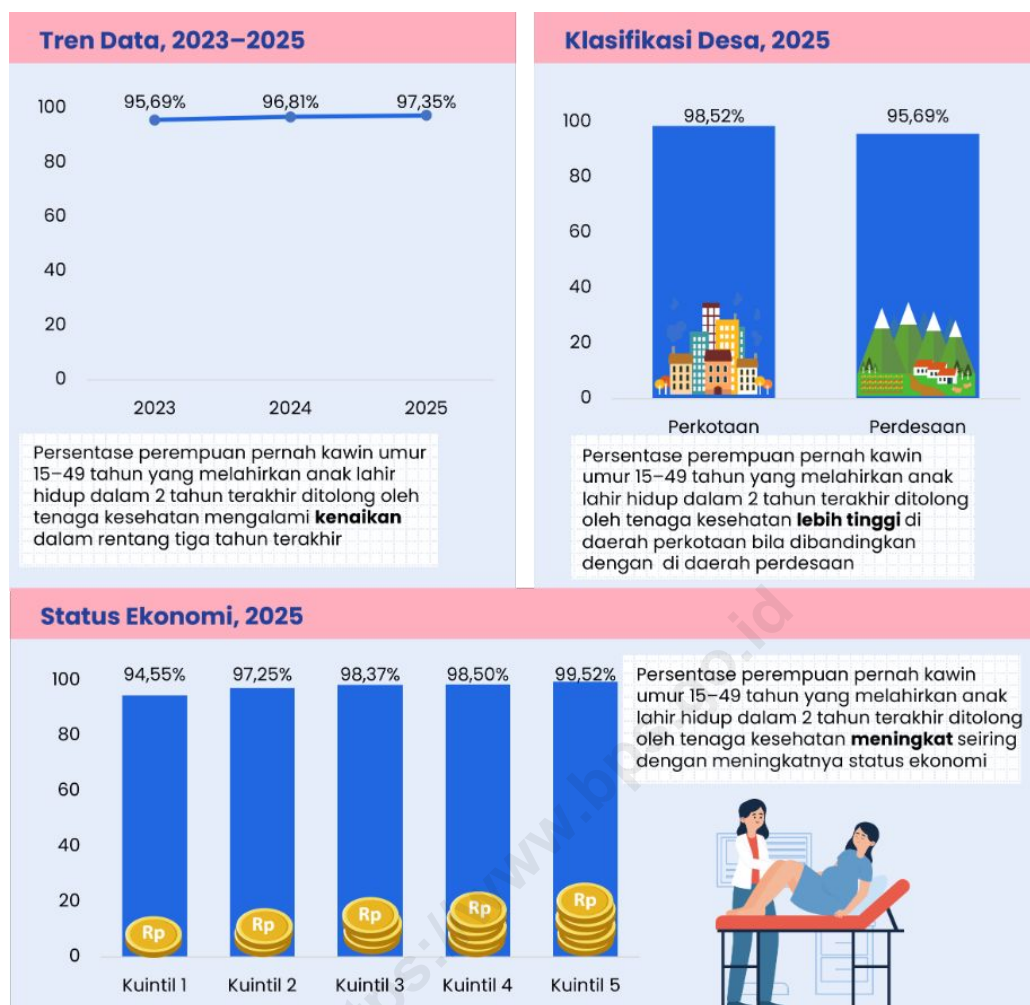
Tingginya persalinan di rumah sakit mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang aman dan memiliki layanan obstetri lengkap. Namun, keberadaan persalinan di rumah dan fasilitas nonmedis lainnya menunjukkan bahwa sebagian perempuan masih menghadapi kendala dalam akses transportasi, biaya, atau faktor budaya yang memengaruhi pilihan tempat melahirkan.

Penguatan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas bidan di daerah, serta pemerataan fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah perlu terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu terus dilakukan. Langkah-langkah tersebut akan memastikan setiap perempuan, di mana pun mereka berada, dapat melahirkan dengan aman, bermutu, dan bermartabat di bawah pengawasan tenaga kesehatan profesional.

Kehadiran tenaga kesehatan saat persalinan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keselamatan ibu dan bayi. Persalinan yang dilakukan dengan bantuan tenaga medis profesional, seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, ataupun perawat dapat mencegah dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama proses melahirkan. Oleh karena itu, peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, tercatat bahwa persentase perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 97,35 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 95,69 persen dan tahun 2024 sebesar 96,81 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas cakupan layanan kesehatan maternal, baik melalui penguatan jaringan puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.20

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2025

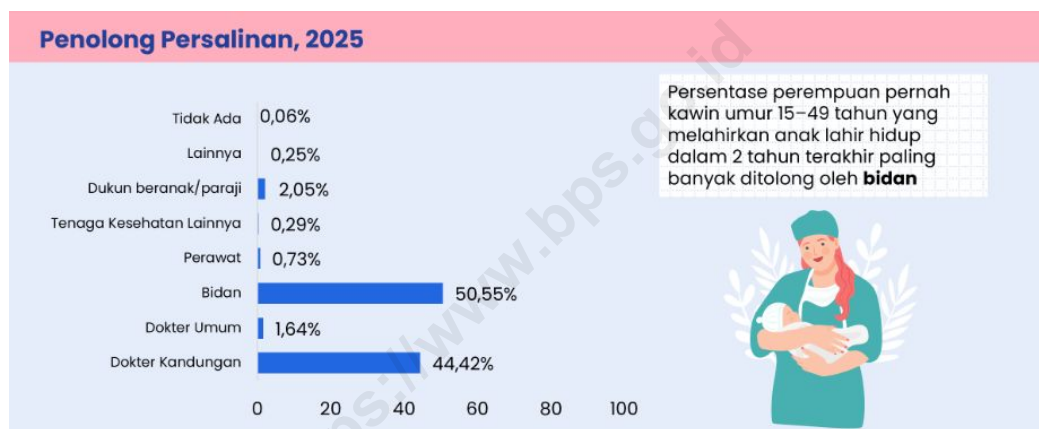
Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa, capaian di daerah perkotaan (98,52 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (95,69 persen). Perbedaan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan profesional di wilayah terpencil, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan tenaga medis, jarak ke fasilitas kesehatan, dan kondisi infrastruktur.

Menurut status ekonomi, terlihat adanya pola yang konsisten: semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin besar pula kemungkinan perempuan melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan. Pada kelompok kuintil 1 (termiskin), persentase mencapai 94,55 persen, sedangkan pada kuintil 5 (terkaya) meningkat hingga 99,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan ekonomi masih berpengaruh terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal.

Selain itu, tingkat pendidikan perempuan juga memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku kesehatan saat melahirkan. Perempuan dengan pendidikan rendah memiliki persentase terendah, yakni 83,83 persen bagi yang tidak/belum pernah sekolah, sedangkan pada kelompok berpendidikan perguruan tinggi, angkanya mencapai 99,33 persen. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kesadaran akan pentingnya bantuan tenaga kesehatan profesional untuk menjamin keselamatan persalinan.

Tenaga penolong persalinan memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi saat proses melahirkan. Penolong persalinan yang kompeten dapat mencegah, mendeteksi, dan menangani komplikasi yang mungkin timbul selama proses persalinan, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan maternal.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.21

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2025

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir ditolong oleh bidan, dengan persentase mencapai 50,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bidan masih menjadi ujung tombak pelayanan persalinan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan wilayah yang belum memiliki banyak tenaga dokter kandungan. Peran bidan yang tersebar hingga tingkat desa menjadi faktor utama tingginya persentase ini.

Selain bidan, sekitar 44,42 persen persalinan ditolong oleh dokter kandungan, yang umumnya terjadi di rumah sakit dan klinik bersalin dengan fasilitas yang lebih lengkap. Persentase ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan medis profesional, khususnya di wilayah perkotaan. Sementara



itu, persalinan yang ditolong oleh dokter umum hanya mencapai 1,64 persen, dan oleh perawat sebesar 0,73 persen.

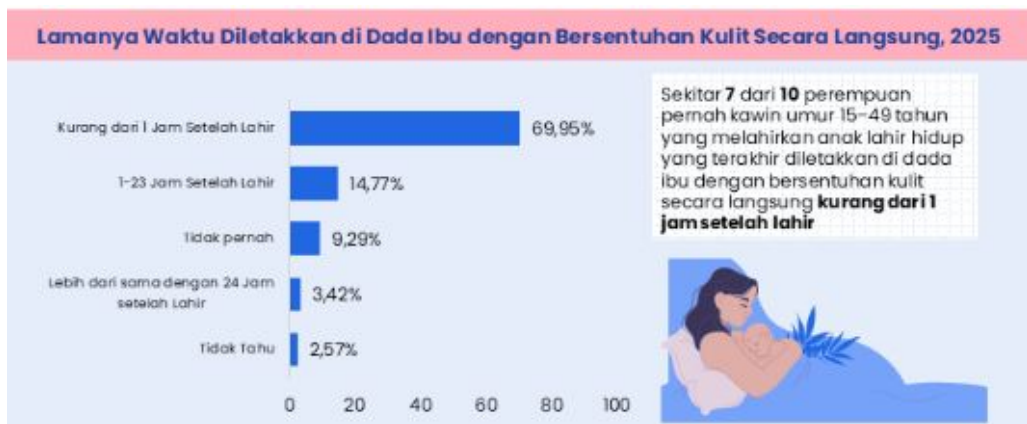
Masih terdapat sebagian kecil persalinan yang ditolong oleh dukun beranak atau paraji (2,05 persen), serta tenaga kesehatan lainnya (0,29 persen). Meskipun angkanya relatif kecil, keberadaan persalinan yang ditolong oleh tenaga nonmedis menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih mempertahankan praktik tradisional karena faktor budaya, kepercayaan, atau keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Adapun persalinan tanpa bantuan penolong (0,06 persen) dan kategori “lainnya” (0,25 persen) menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil perempuan yang melahirkan tanpa dukungan tenaga medis. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan tenaga kesehatan profesional, terutama bidan dan dokter kandungan, di seluruh wilayah Indonesia.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan telah memperoleh pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan profesional, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pelayanan maternal. Namun demikian, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menghapus kesenjangan antarwilayah, memperkuat peran bidan desa, serta meningkatkan literasi kesehatan ibu agar seluruh perempuan Indonesia dapat melahirkan dengan aman, sehat, dan bermartabat.

Salah satu praktik penting yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO) untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir adalah kontak kulit antara ibu dan bayi sesegera mungkin setelah kelahiran. Praktik ini, yang dikenal sebagai *skin-to-skin contact*, memberikan manfaat besar bagi bayi, seperti membantu menjaga suhu tubuh, memperkuat ikatan emosional dengan ibu, menstabilkan detak jantung dan pernapasan, serta mempercepat proses Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Bagi ibu, praktik ini juga dapat mempercepat keluarnya hormon oksitosin yang membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi risiko perdarahan pascapersalinan.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, sekitar 7 dari 10 perempuan (69,95 persen) yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melaporkan bahwa bayi mereka diletakkan di atas dada ibu dan bersentuhan kulit secara langsung dalam waktu kurang dari satu jam setelah lahir. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan di Indonesia telah menerapkan praktik yang selaras dengan standar pelayanan kesehatan neonatal.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

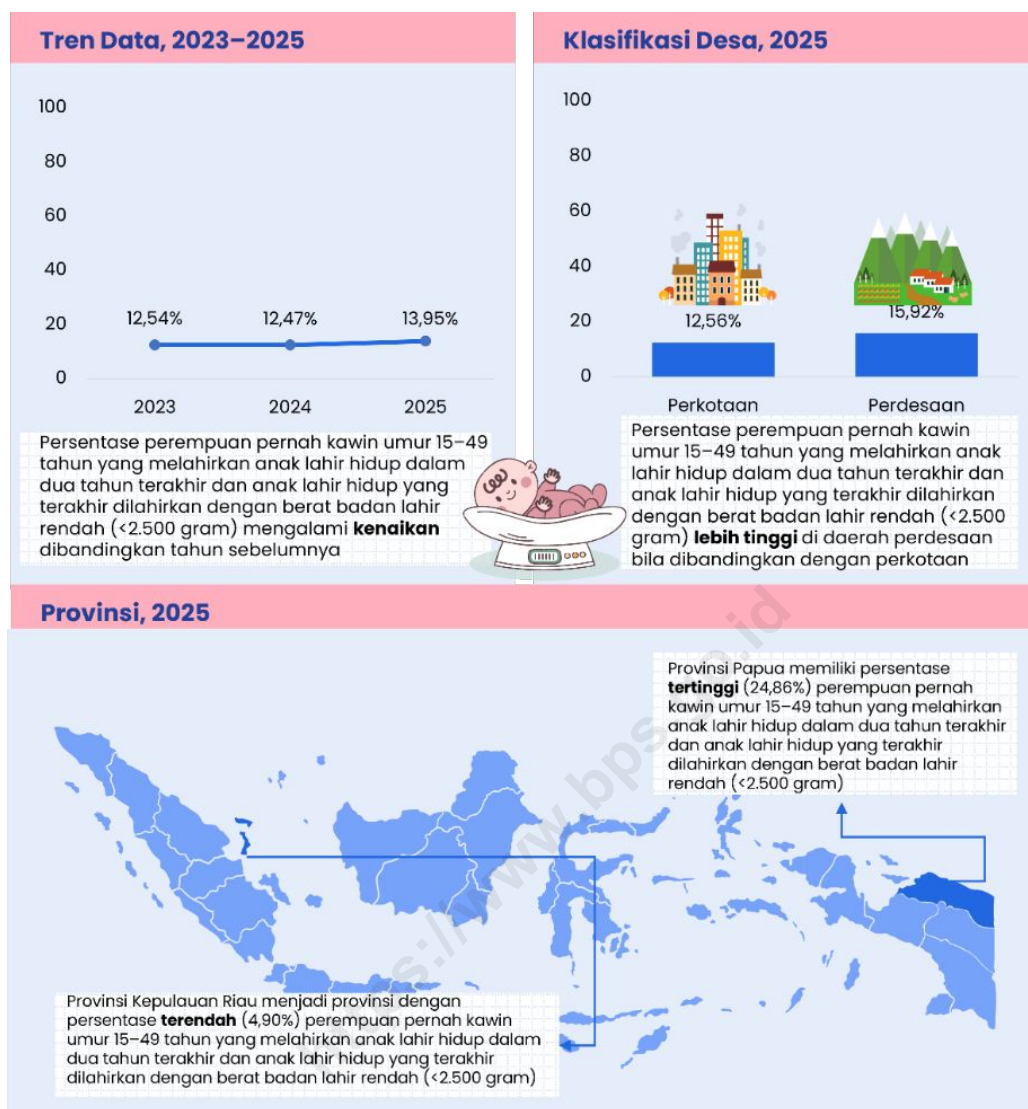
Gambar 4.22

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025

Sebagian lainnya, yaitu 14,77 persen, menyatakan bahwa kontak kulit baru dilakukan antara 1–23 jam setelah lahir, sedangkan 3,42 persen baru melakukannya lebih dari 24 jam setelah lahir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar bayi telah menerima perawatan awal sesuai pedoman, masih ada sebagian kecil yang mengalami keterlambatan kontak kulit karena berbagai faktor, seperti kondisi medis ibu atau bayi, kepadatan tenaga kesehatan di fasilitas persalinan, atau kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya praktik ini. Selain itu, masih terdapat 9,29 persen perempuan yang tidak pernah melakukan kontak kulit dengan bayi setelah lahir, serta 2,57 persen yang tidak mengetahui apakah praktik tersebut dilakukan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan di fasilitas kesehatan agar seluruh persalinan dapat memastikan terlaksananya *skin-to-skin contact* secara tepat waktu. Namun, masih dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan tenaga kesehatan, penguatan kebijakan di fasilitas pelayanan maternal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontak kulit dini sebagai langkah pertama menuju kehidupan bayi yang sehat dan ikatan ibu-anak yang kuat.

Berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram, merupakan salah satu indikator penting kesehatan bayi baru lahir. Bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan, infeksi, dan bahkan kematian neonatal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan gizi ibu selama kehamilan, jarak kelahiran yang terlalu dekat, komplikasi kehamilan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.23

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah, 2023–2025

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2025, diketahui bahwa 13,95 persen perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melaporkan bayi mereka lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,54 persen dan tahun 2024 sebesar 12,47 persen. Peningkatan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi gizi ibu hamil dan pengawasan kehamilan berisiko tinggi.

Berdasarkan klasifikasi desa, prevalensi BBLR cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan (15,92 persen) dibandingkan dengan daerah perkotaan (12,56 persen). Kesenjangan ini mencerminkan adanya perbedaan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, ketersediaan tenaga medis, dan dukungan gizi selama masa kehamilan. Kondisi lingkungan, beban kerja fisik ibu hamil, dan keterlambatan penanganan medis juga turut menjadi faktor yang memperparah risiko kelahiran bayi dengan berat badan rendah di wilayah pedesaan.

Berdasarkan distribusi antarprovinsi, Provinsi Papua tercatat memiliki persentase tertinggi (24,86 persen) perempuan yang melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan persentase terendah (4,90 persen). Disparitas antarprovinsi ini memperlihatkan bahwa masalah BBLR tidak hanya berkaitan dengan faktor biologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, geografi, serta efektivitas program kesehatan daerah dalam menjangkau ibu hamil.

<https://www.bps.go.id>



Tabel 4.1
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,42	20,19	19,52
Sumatera Utara	19,13	19,14	20,21
Sumatera Barat	25,58	26,45	25,42
Riau	21,30	19,79	17,86
Jambi	20,69	19,55	22,02
Sumatera Selatan	23,74	25,30	21,89
Bengkulu	23,91	24,77	25,35
Lampung	21,87	25,71	25,40
Kep. Bangka Belitung	24,80	24,18	25,56
Kep. Riau	29,61	23,67	12,19
DKI Jakarta	16,05	19,16	18,59
Jawa Barat	20,78	24,00	25,52
Jawa Tengah	26,08	27,03	29,13
DI Yogyakarta	23,08	23,20	28,53
Jawa Timur	22,82	23,66	26,67
Banten	21,75	21,19	22,55
Bali	17,79	14,49	15,13
Nusa Tenggara Barat	36,69	34,28	39,63
Nusa Tenggara Timur	28,09	26,56	26,84
Kalimantan Barat	22,47	20,51	20,40
Kalimantan Tengah	20,37	18,42	23,06
Kalimantan Selatan	23,30	23,83	25,13
Kalimantan Timur	19,05	16,74	17,82
Kalimantan Utara	19,41	16,09	18,41
Sulawesi Utara	21,69	18,75	18,24
Sulawesi Tengah	17,56	19,17	18,02
Sulawesi Selatan	19,34	19,57	23,79
Sulawesi Tenggara	18,45	17,48	17,37
Gorontalo	31,59	30,95	26,03
Sulawesi Barat	21,42	20,71	21,71
Maluku	17,57	11,61	15,95
Maluku Utara	13,13	11,23	9,03
Papua Barat	13,80 ¹	12,09	11,48
Papua Barat Daya	–	14,34	16,90
Papua	10,25 ²	10,50	10,13
Papua Selatan	–	17,70	15,44
Papua Tengah	–	10,24	7,16
Papua Pegunungan	–	6,37	11,33
Indonesia	22,10	22,77	23,96

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.2
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	21,43	22,42	23,25
Perdesaan	23,08	23,29	25,05
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	18,56	19,13	20,93
20–24 Tahun	17,75	19,65	20,70
25–29 Tahun	20,13	20,33	21,72
30–34 Tahun	21,07	21,44	22,34
35–39 Tahun	23,21	23,48	24,29
40–44 Tahun	25,18	26,06	26,87
45–49 Tahun	29,76	30,18	31,61
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	26,37	27,35	28,14
SD/Sederajat	25,68	26,29	27,85
SMP/Sederajat	21,69	22,74	24,08
SMA/Sederajat	20,75	21,02	22,70
Perguruan Tinggi	18,95	20,37	20,44
Status Ekonomi			
Kuintil 1	19,44	21,34	22,74
Kuintil 2	22,31	22,45	24,39
Kuintil 3	22,87	22,65	24,36
Kuintil 4	23,20	23,42	24,24
Kuintil 5	22,41	23,77	23,95
Indonesia	22,10	22,77	23,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.3
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari–hari
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,51	9,27	9,01
Sumatera Utara	6,88	6,69	7,47
Sumatera Barat	9,13	12,72	10,59
R i a u	7,36	7,64	6,98
J a m b i	7,55	7,07	7,71
Sumatera Selatan	6,08	7,42	5,87
Bengkulu	8,86	9,74	8,87
Lampung	8,38	10,00	9,80
Kep. Bangka Belitung	7,72	7,42	6,90
Kep. Riau	8,08	7,87	4,85
DKI Jakarta	5,20	6,44	5,48
Jawa Barat	8,01	10,39	10,82
Jawa Tengah	9,21	10,36	11,92
DI Yogyakarta	8,87	8,29	10,80
Jawa Timur	7,91	8,40	9,33
Banten	7,48	7,37	8,32
B a l i	7,72	7,12	7,27
Nusa Tenggara Barat	18,19	14,53	17,15
Nusa Tenggara Timur	11,56	10,61	12,20
Kalimantan Barat	8,95	7,31	8,36
Kalimantan Tengah	6,50	5,70	6,99
Kalimantan Selatan	6,54	6,96	7,40
Kalimantan Timur	6,53	6,31	6,31
Kalimantan Utara	8,78	6,50	7,46
Sulawesi Utara	9,60	8,22	8,08
Sulawesi Tengah	7,09	8,94	8,84
Sulawesi Selatan	6,92	7,20	9,23
Sulawesi Tenggara	8,02	8,06	7,12
Gorontalo	12,55	13,47	12,21
Sulawesi Barat	8,30	8,37	9,15
Maluku	8,80	4,48	6,33
Maluku Utara	6,13	5,47	4,75
Papua Barat	4,64 ¹	5,04	4,84
Papua Barat Daya	–	6,81	6,82
Papua	3,98 ²	5,27	6,58
Papua Selatan	–	7,00	7,65
Papua Tengah	–	2,93	2,81
Papua Pegunungan	–	2,34	3,64
Indonesia	8,10	8,78	9,31

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.4
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,63	8,49	8,77
Perdesaan	8,80	9,21	10,15
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	7,44	7,89	9,32
20–24 Tahun	6,03	7,69	7,98
25–29 Tahun	7,10	7,55	8,05
30–34 Tahun	7,38	8,03	8,15
35–39 Tahun	8,59	8,97	8,93
40–44 Tahun	9,23	9,68	10,31
45–49 Tahun	11,32	11,99	12,71
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	10,32	11,29	11,65
SD/Sederajat	9,79	10,73	11,47
SMP/Sederajat	8,31	8,95	9,81
SMA/Sederajat	7,20	7,81	8,38
Perguruan Tinggi	6,40	7,07	7,09
Status Ekonomi			
Kuintil 1	7,31	8,21	8,81
Kuintil 2	8,00	8,69	9,56
Kuintil 3	8,46	8,69	9,48
Kuintil 4	8,57	9,11	9,78
Kuintil 5	8,11	9,12	8,91
Indonesia	8,10	8,78	9,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.5

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78,45	74,92	74,68
Sumatera Utara	83,56	85,04	81,41
Sumatera Barat	69,24	70,41	69,99
Riau	82,04	80,46	76,79
Jambi	83,06	83,74	83,37
Sumatera Selatan	88,34	84,58	83,70
Bengkulu	81,64	83,87	80,76
Lampung	83,38	79,90	82,69
Kep. Bangka Belitung	85,93	82,81	86,37
Kep. Riau	80,53	84,06	72,00
DKI Jakarta	81,29	78,20	80,06
Jawa Barat	83,11	82,60	80,69
Jawa Tengah	80,94	79,77	78,44
DI Yogyakarta	78,72	77,90	70,86
Jawa Timur	84,97	83,25	83,52
Banten	87,70	85,54	86,64
Bali	69,14	64,30	66,78
Nusa Tenggara Barat	84,37	87,99	84,20
Nusa Tenggara Timur	79,96	82,06	79,87
Kalimantan Barat	85,91	85,97	86,21
Kalimantan Tengah	89,89	90,07	90,77
Kalimantan Selatan	90,21	89,04	91,79
Kalimantan Timur	81,34	77,37	79,22
Kalimantan Utara	84,81	74,92	79,44
Sulawesi Utara	72,71	80,96	80,72
Sulawesi Tengah	87,46	85,99	86,37
Sulawesi Selatan	79,58	78,33	81,79
Sulawesi Tenggara	81,04	83,52	84,39
Gorontalo	85,96	81,57	83,80
Sulawesi Barat	80,93	77,06	74,58
Maluku	80,61	83,47	82,40
Maluku Utara	83,01	78,85	79,44
Papua Barat	69,87 ¹	75,04	71,65
Papua Barat Daya	–	67,21	72,14
Papua	73,70 ²	74,45	63,31
Papua Selatan	–	68,91	69,26
Papua Tengah	–	51,77	54,79
Papua Pegunungan	–	83,09	82,16
Indonesia	82,62	81,71	81,01

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.6
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	82,12	81,04	80,14
Perdesaan	83,31	82,69	82,26
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	82,02	81,98	79,70
20–24 Tahun	82,43	82,32	80,95
25–29 Tahun	83,26	81,15	81,92
30–34 Tahun	83,80	82,28	80,84
35–39 Tahun	83,07	82,79	80,98
40–44 Tahun	82,34	81,81	82,52
45–49 Tahun	81,69	80,03	80,12
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	82,86	82,49	82,13
SD/Sederajat	83,38	82,51	82,38
SMP/Sederajat	83,07	82,58	81,16
SMA/Sederajat	82,31	80,50	80,07
Perguruan Tinggi	80,57	80,95	80,27
Status Ekonomi			
Kuintil 1	82,88	83,53	81,05
Kuintil 2	83,95	82,64	82,09
Kuintil 3	82,68	82,35	82,32
Kuintil 4	82,31	81,14	80,45
Kuintil 5	81,47	79,45	79,24
Indonesia	82,62	81,71	81,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.7
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	43,27	46,61	43,17
Sumatera Utara	28,10	30,31	31,05
Sumatera Barat	41,94	49,19	44,93
Riau	27,29	30,68	34,86
Jambi	25,43	27,85	28,48
Sumatera Selatan	21,71	27,07	27,01
Bengkulu	25,31	30,43	32,12
Lampung	29,19	34,43	33,73
Kep. Bangka Belitung	27,38	31,93	33,34
Kep. Riau	26,35	28,67	46,00
DKI Jakarta	34,50	36,62	37,93
Jawa Barat	33,50	37,98	40,13
Jawa Tengah	32,20	34,33	36,71
DI Yogyakarta	35,27	38,05	43,64
Jawa Timur	28,82	32,56	33,87
Banten	26,27	32,81	30,78
Bali	41,56	54,45	51,07
Nusa Tenggara Barat	37,68	34,96	36,23
Nusa Tenggara Timur	29,05	28,70	31,39
Kalimantan Barat	22,52	24,53	26,38
Kalimantan Tengah	15,70	16,44	19,21
Kalimantan Selatan	19,64	19,09	18,46
Kalimantan Timur	28,67	36,24	29,31
Kalimantan Utara	25,00	31,43	35,90
Sulawesi Utara	33,70	34,65	32,41
Sulawesi Tengah	21,17	20,30	23,97
Sulawesi Selatan	28,85	28,21	26,83
Sulawesi Tenggara	24,44	25,36	23,24
Gorontalo	26,99	32,24	32,35
Sulawesi Barat	26,39	27,89	27,02
Maluku	25,26	26,85	23,77
Maluku Utara	25,50	27,79	24,98
Papua Barat	32,03 ¹	26,86	34,29
Papua Barat Daya	–	37,50	33,63
Papua	30,04 ²	41,58	49,94
Papua Selatan	–	36,72	35,34
Papua Tengah	–	22,98	26,38
Papua Pegunungan	–	23,04	35,48
Indonesia	30,42	33,78	34,90

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.8

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	31,65	35,31	36,21
Perdesaan	28,74	31,54	33,00
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	28,98	32,06	32,40
20–24 Tahun	27,37	30,84	31,53
25–29 Tahun	28,60	32,67	33,49
30–34 Tahun	28,14	32,30	35,68
35–39 Tahun	30,35	33,56	34,69
40–44 Tahun	31,56	35,05	33,97
45–49 Tahun	35,59	38,12	40,61
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	30,48	34,59	34,97
SD/Sederajat	30,88	34,15	35,39
SMP/Sederajat	31,00	33,16	34,47
SMA/Sederajat	29,79	33,90	35,57
Perguruan Tinggi	29,76	33,80	33,14
Status Ekonomi			
Kuintil 1	27,56	29,99	31,89
Kuintil 2	27,85	31,84	32,27
Kuintil 3	30,74	32,56	34,97
Kuintil 4	31,65	35,61	36,63
Kuintil 5	33,42	37,78	38,04
Indonesia	30,42	33,78	34,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.9
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat
Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik Dokter/Bidan/ Perawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	14,45	3,36	7,55	34,02
Sumatera Utara	6,15	8,37	15,45	44,21
Sumatera Barat	11,30	5,34	10,47	33,44
R i a u	11,01	16,79	29,96	21,19
J a m b i	9,41	6,76	6,74	48,00
Sumatera Selatan	9,85	9,34	9,30	48,82
Bengkulu	8,29	5,07	9,41	59,73
Lampung	3,62	9,55	11,36	50,38
Kep. Bangka Belitung	6,98	7,35	11,35	41,89
Kep. Riau	6,61	27,59	31,66	10,96
DKI Jakarta	13,97	16,21	24,29	3,52
Jawa Barat	8,09	10,67	25,15	29,55
Jawa Tengah	7,62	9,66	10,90	41,11
DI Yogyakarta	12,38	19,95	16,83	20,07
Jawa Timur	9,02	7,16	13,46	47,71
Banten	6,19	16,71	30,46	18,69
B a l i	6,57	13,03	9,99	53,10
Nusa Tenggara Barat	6,29	4,04	9,78	42,79
Nusa Tenggara Timur	6,68	5,59	6,48	8,83
Kalimantan Barat	17,36	5,61	3,36	32,58
Kalimantan Tengah	20,74	3,23	7,76	29,00
Kalimantan Selatan	10,70	7,70	6,99	33,50
Kalimantan Timur	12,89	10,17	20,51	23,62
Kalimantan Utara	22,80	5,08	NA	21,65
Sulawesi Utara	9,86	8,72	1,71	40,84
Sulawesi Tengah	19,05	2,48	7,39	20,25
Sulawesi Selatan	14,67	4,50	9,78	21,79
Sulawesi Tenggara	16,41	3,75	7,06	15,43
Gorontalo	10,15	NA	4,10	43,78
Sulawesi Barat	9,54	NA	3,04	21,83
Maluku	14,88	14,17	3,83	21,19
Maluku Utara	14,14	NA	NA	15,90
Papua Barat	17,39	NA	14,90	9,18
Papua Barat Daya	7,81	9,66	8,97	18,77
Papua	8,95	NA	2,33	23,86
Papua Selatan	13,72	NA	5,06	9,46
Papua Tengah	20,69	23,06	19,94	14,56
Papua Pegunungan	8,00	–	NA	–
Indonesia	9,00	9,49	16,06	34,56

Lanjutan Tabel 4.9

Provinsi	Puskesmas/ Pustu/Pusling	UKBM	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	45,29	4,47	2,04	1,74
Sumatera Utara	28,02	0,83	2,19	0,78
Sumatera Barat	40,73	2,16	0,64	0,47
R i a u	21,53	3,13	0,72	NA
J a m b i	27,46	2,87	NA	2,94
Sumatera Selatan	21,70	5,18	0,70	NA
Bengkulu	19,20	NA	NA	NA
Lampung	27,52	0,96	NA	NA
Kep. Bangka Belitung	36,92	2,14	NA	–
Kep. Riau	22,76	0,59	NA	NA
DKI Jakarta	47,19	–	NA	NA
Jawa Barat	29,60	1,03	0,54	0,90
Jawa Tengah	32,41	1,57	0,98	1,09
DI Yogyakarta	35,73	NA	NA	NA
Jawa Timur	24,03	1,97	0,81	0,91
Banten	30,01	NA	1,89	NA
B a l i	19,40	–	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	39,86	5,58	1,42	NA
Nusa Tenggara Timur	66,11	13,81	NA	–
Kalimantan Barat	42,91	3,31	NA	NA
Kalimantan Tengah	37,70	3,09	NA	NA
Kalimantan Selatan	31,71	10,99	1,51	NA
Kalimantan Timur	32,89	2,80	NA	NA
Kalimantan Utara	41,41	NA	NA	4,49
Sulawesi Utara	39,62	NA	NA	NA
Sulawesi Tengah	52,47	5,49	NA	NA
Sulawesi Selatan	50,76	2,08	NA	NA
Sulawesi Tenggara	59,11	5,35	2,53	NA
Gorontalo	43,59	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	60,50	6,74	NA	NA
Maluku	43,71	4,43	NA	NA
Maluku Utara	66,36	NA	NA	NA
Papua Barat	59,33	NA	NA	–
Papua Barat Daya	55,43	NA	NA	–
Papua	63,32	NA	–	NA
Papua Selatan	65,67	NA	–	NA
Papua Tengah	21,75	–	–	–
Papua Pegunungan	92,23	0,25	–	NA
Indonesia	32,72	2,15	0,88	0,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.10
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik Dokter/Bidan/Perawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	9,41	12,28	20,60	26,90
Perdesaan	8,36	5,04	8,82	46,77
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	6,10	6,44	12,32	36,93
20–24 Tahun	7,71	8,13	18,94	35,53
25–29 Tahun	7,29	10,23	19,32	37,57
30–34 Tahun	9,14	10,89	17,83	33,96
35–39 Tahun	7,66	9,43	16,37	35,49
40–44 Tahun	10,69	9,46	14,51	32,20
45–49 Tahun	12,09	10,72	14,41	32,32
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	10,35	5,75	10,34	35,92
SD/Sederajat	9,10	6,78	9,81	39,34
SMP/Sederajat	8,91	7,06	12,99	37,43
SMA/Sederajat	8,08	10,47	21,16	30,97
Perguruan Tinggi	11,15	19,07	22,80	28,61
Status Ekonomi				
Kuintil 1	7,77	3,98	7,08	37,17
Kuintil 2	7,47	5,61	11,42	37,74
Kuintil 3	9,16	7,46	14,72	34,47
Kuintil 4	9,34	10,01	17,32	35,68
Kuintil 5	10,61	17,64	25,88	29,31
Indonesia	9,00	9,49	16,06	34,56

Lanjutan Tabel 4.10

Karakteristik	Puskesmas/ Pustu/Pusling	UKBM	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	33,35	1,29	0,56	0,83
Perdesaan	31,71	3,53	1,40	1,26
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	39,38	1,49	0,49	0,76
20–24 Tahun	30,97	2,06	0,96	0,90
25–29 Tahun	28,18	1,77	0,87	0,87
30–34 Tahun	28,81	2,65	1,01	1,03
35–39 Tahun	33,57	2,31	0,49	0,66
40–44 Tahun	34,21	2,36	1,19	1,23
45–49 Tahun	33,41	2,24	1,04	1,30
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	38,05	4,23	1,08	0,59
SD/Sederajat	36,70	3,23	0,95	0,95
SMP/Sederajat	35,64	1,96	1,07	1,21
SMA/Sederajat	31,17	1,68	0,87	0,92
Perguruan Tinggi	20,53	1,03	0,28	0,99
Status Ekonomi				
Kuintil 1	44,26	3,45	0,57	0,60
Kuintil 2	39,06	2,82	1,00	1,19
Kuintil 3	35,37	2,29	0,68	1,18
Kuintil 4	30,34	1,79	0,97	0,85
Kuintil 5	19,66	0,97	1,09	1,08
Indonesia	32,72	2,15	0,88	0,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.11
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak
Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Punya Biaya Transportasi	Tidak Ada yang Mendampingi	Mengobati Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	NA	NA	NA	64,08
Sumatera Utara	0,38	NA	NA	60,29
Sumatera Barat	NA	NA	NA	60,95
R i a u	–	–	NA	61,44
J a m b i	0,69	–	–	61,20
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	67,93
Bengkulu	NA	–	NA	62,86
Lampung	NA	NA	NA	64,04
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	74,84
Kep. Riau	NA	–	NA	60,72
DKI Jakarta	–	NA	–	63,36
Jawa Barat	0,30	NA	NA	67,59
Jawa Tengah	0,19	NA	–	71,02
DI Yogyakarta	NA	–	–	71,87
Jawa Timur	0,15	NA	NA	68,68
Banten	0,88	NA	NA	60,70
B a l i	–	NA	–	57,76
Nusa Tenggara Barat	0,37	NA	NA	76,00
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	75,43
Kalimantan Barat	0,28	NA	NA	61,34
Kalimantan Tengah	NA	–	–	69,34
Kalimantan Selatan	NA	–	–	74,72
Kalimantan Timur	NA	–	NA	53,29
Kalimantan Utara	–	NA	–	69,09
Sulawesi Utara	NA	–	–	74,46
Sulawesi Tengah	NA	–	NA	62,93
Sulawesi Selatan	NA	NA	–	63,72
Sulawesi Tenggara	NA	0,04	–	75,34
Gorontalo	–	–	NA	76,47
Sulawesi Barat	NA	–	–	61,46
Maluku	0,54	NA	–	61,59
Maluku Utara	NA	NA	–	63,58
Papua Barat	NA	NA	–	57,67
Papua Barat Daya	–	0,30	–	60,73
Papua	–	NA	NA	62,56
Papua Selatan	–	NA	–	53,65
Papua Tengah	NA	NA	NA	40,78
Papua Pegunungan	NA	2,44	NA	71,25
Indonesia	0,29	0,12	0,15	67,06

Lanjutan Tabel 4.11

Provinsi	Merasa Tidak Perlu	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	31,43	–	1,61	2,60
Sumatera Utara	37,53	–	0,43	1,13
Sumatera Barat	35,61	–	NA	NA
Riau	37,64	NA	NA	0,61
Jambi	35,42	NA	NA	NA
Sumatera Selatan	28,93	NA	NA	1,66
Bengkulu	34,88	–	NA	1,22
Lampung	34,96	NA	NA	NA
Kep. Bangka Belitung	23,68	–	NA	NA
Kep. Riau	32,83	–	NA	NA
DKI Jakarta	35,84	–	NA	NA
Jawa Barat	30,16	–	NA	1,33
Jawa Tengah	27,81	NA	0,20	0,72
DI Yogyakarta	25,29	–	0,75	1,33
Jawa Timur	29,43	NA	0,28	1,23
Banten	35,59	–	NA	1,59
Bali	40,35	–	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	22,45	–	NA	0,86
Nusa Tenggara Timur	22,27	0,40	0,43	0,78
Kalimantan Barat	37,61	0,45	NA	0,08
Kalimantan Tengah	29,50	NA	–	0,46
Kalimantan Selatan	24,21	NA	NA	0,36
Kalimantan Timur	42,46	–	1,67	1,15
Kalimantan Utara	26,69	–	NA	3,25
Sulawesi Utara	23,60	NA	NA	NA
Sulawesi Tengah	35,38	NA	NA	1,15
Sulawesi Selatan	34,28	NA	0,74	0,81
Sulawesi Tenggara	23,13	NA	NA	NA
Gorontalo	22,81	–	–	NA
Sulawesi Barat	36,97	–	–	1,20
Maluku	36,79	NA	NA	NA
Maluku Utara	35,15	NA	–	NA
Papua Barat	35,96	–	–	2,04
Papua Barat Daya	35,74	–	NA	NA
Papua	30,82	–	–	5,84
Papua Selatan	43,47	NA	–	–
Papua Tengah	49,72	–	–	7,27
Papua Pegunungan	16,70	NA	NA	1,49
Indonesia	30,88	0,06	0,34	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025



Tabel 4.12
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan
Tidak Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Punya Biaya Transportasi	Tidak Ada yang Mendampingi	Mengobati Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,26	0,12	0,20	67,59
Perdesaan	0,34	0,11	0,08	66,32
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	0,24	NA	0,37	68,89
20–24 Tahun	0,23	0,17	NA	65,75
25–29 Tahun	0,25	NA	NA	67,55
30–34 Tahun	0,35	NA	NA	67,69
35–39 Tahun	0,36	0,19	NA	65,97
40–44 Tahun	0,32	0,06	0,05	66,70
45–49 Tahun	0,29	0,17	NA	67,03
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,87	0,30	NA	62,65
SD/Sederajat	0,46	0,15	0,06	67,10
SMP/Sederajat	0,28	0,02	0,27	67,79
SMA/Sederajat	0,19	0,09	0,10	66,90
Perguruan Tinggi	NA	NA	NA	67,58
Status Ekonomi				
Kuintil 1	0,60	0,23	NA	67,83
Kuintil 2	0,44	0,08	NA	67,76
Kuintil 3	0,18	0,21	NA	67,64
Kuintil 4	0,16	NA	NA	65,77
Kuintil 5	0,10	NA	NA	66,36
Indonesia	0,29	0,12	0,15	67,06

Lanjutan Tabel 4.12

Karakteristik	Merasa Tidak Perlu	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	30,21	0,03	0,42	1,17
Perdesaan	31,80	0,10	0,24	1,00
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	29,09	0,08	0,16	1,15
20–24 Tahun	32,13	NA	0,26	1,28
25–29 Tahun	30,62	NA	0,45	0,88
30–34 Tahun	30,46	NA	0,23	1,07
35–39 Tahun	31,48	NA	0,69	1,20
40–44 Tahun	31,62	0,09	0,26	0,91
45–49 Tahun	30,62	0,07	0,33	1,23
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	33,41	0,26	0,34	1,88
SD/Sederajat	30,89	0,05	0,29	0,99
SMP/Sederajat	30,05	0,07	0,28	1,23
SMA/Sederajat	31,37	0,05	0,44	0,85
Perguruan Tinggi	30,38	NA	0,30	1,34
Status Ekonomi				
Kuintil 1	29,64	0,07	0,16	1,16
Kuintil 2	30,28	0,07	0,33	0,95
Kuintil 3	30,60	0,08	0,39	0,85
Kuintil 4	32,08	NA	0,44	1,25
Kuintil 5	31,69	NA	0,38	1,31
Indonesia	30,88	0,06	0,34	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.13
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,03	5,55	6,24
Sumatera Utara	4,59	4,17	5,16
Sumatera Barat	6,09	7,37	6,79
Riau	4,16	4,47	4,77
Jambi	4,02	5,00	4,98
Sumatera Selatan	3,81	3,95	5,37
Bengkulu	4,89	5,18	5,42
Lampung	4,16	5,33	6,74
Kep. Bangka Belitung	4,65	4,62	5,88
Kep. Riau	6,48	5,24	6,47
DKI Jakarta	3,75	4,40	5,75
Jawa Barat	3,77	4,53	6,01
Jawa Tengah	5,41	5,90	7,30
DI Yogyakarta	4,75	5,70	8,05
Jawa Timur	4,03	4,92	5,78
Banten	3,36	4,43	4,96
Bali	4,75	5,50	6,56
Nusa Tenggara Barat	7,27	7,06	8,36
Nusa Tenggara Timur	5,04	6,16	6,81
Kalimantan Barat	3,84	3,38	4,62
Kalimantan Tengah	2,38	2,76	3,47
Kalimantan Selatan	3,74	3,33	4,39
Kalimantan Timur	4,62	5,02	4,99
Kalimantan Utara	6,27	5,92	7,05
Sulawesi Utara	6,97	7,51	6,42
Sulawesi Tengah	5,56	5,55	7,62
Sulawesi Selatan	6,10	6,00	8,30
Sulawesi Tenggara	5,26	4,76	5,58
Gorontalo	7,82	8,05	9,64
Sulawesi Barat	4,97	5,43	7,06
Maluku	2,57	3,00	3,34
Maluku Utara	2,83	3,52	3,27
Papua Barat	3,77 ¹	3,02	2,93
Papua Barat Daya	–	3,15	4,49
Papua	1,83 ²	3,55	4,73
Papua Selatan	–	4,51	3,62
Papua Tengah	–	1,46	1,66
Papua Pegunungan	–	0,13	0,60
Indonesia	4,45	4,94	6,03

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.14
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,67	5,18	6,31
Perdesaan	4,14	4,59	5,61
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	2,20	2,35	3,34
20–24 Tahun	4,45	5,34	6,14
25–29 Tahun	7,10	7,58	9,04
30–34 Tahun	6,13	6,81	8,41
35–39 Tahun	4,91	5,28	6,01
40–44 Tahun	3,40	3,66	4,68
45–49 Tahun	2,99	3,57	4,59
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	3,22	3,49	4,44
SD/Sederajat	3,64	3,86	4,89
SMP/Sederajat	3,95	4,59	5,43
SMA/Sederajat	4,85	5,43	6,66
Perguruan Tinggi	6,33	6,61	7,64
Status Ekonomi			
Kuintil 1	3,80	4,22	5,15
Kuintil 2	4,12	4,45	5,19
Kuintil 3	4,29	4,72	5,92
Kuintil 4	4,53	5,25	6,46
Kuintil 5	5,41	5,94	7,26
Indonesia	4,45	4,94	6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.15
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun
Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	59,31	23,36	3,53	4,85
Sumatera Utara	23,75	52,12	10,37	9,69
Sumatera Barat	34,75	40,83	7,17	9,15
Riau	29,89	48,50	7,24	7,68
Jambi	36,01	41,13	9,17	4,85
Sumatera Selatan	36,71	37,15	10,44	13,21
Bengkulu	48,17	41,87	4,82	5,98
Lampung	12,35	56,60	16,55	8,46
Kep. Bangka Belitung	42,27	38,18	5,14	5,27
Kep. Riau	16,48	68,67	NA	6,98
DKI Jakarta	42,38	47,21	NA	3,07
Jawa Barat	27,91	49,79	8,57	5,36
Jawa Tengah	29,58	53,35	4,75	1,52
DI Yogyakarta	25,95	63,58	2,87	5,11
Jawa Timur	31,39	45,68	8,48	3,28
Banten	21,02	62,38	7,68	5,48
Bali	32,32	59,73	NA	5,31
Nusa Tenggara Barat	34,01	21,63	10,49	2,99
Nusa Tenggara Timur	45,66	17,22	1,54	NA
Kalimantan Barat	39,87	26,08	7,34	11,34
Kalimantan Tengah	72,45	11,92	4,01	1,43
Kalimantan Selatan	56,11	25,47	6,12	4,93
Kalimantan Timur	38,18	45,28	7,21	2,39
Kalimantan Utara	78,95	11,75	NA	NA
Sulawesi Utara	39,34	49,83	2,56	NA
Sulawesi Tengah	62,15	14,44	NA	–
Sulawesi Selatan	52,57	25,24	4,28	2,06
Sulawesi Tenggara	47,60	21,69	3,42	NA
Gorontalo	66,85	19,86	1,60	NA
Sulawesi Barat	48,56	10,84	NA	NA
Maluku	49,81	37,25	NA	–
Maluku Utara	68,90	10,00	NA	NA
Papua Barat	84,90	NA	–	–
Papua Barat Daya	52,10	43,55	NA	NA
Papua	54,36	35,30	NA	NA
Papua Selatan	33,37	25,15	NA	NA
Papua Tengah	54,37	21,46	19,69	–
Papua Pegunungan	57,29	NA	NA	–
Indonesia	33,87	44,55	6,80	4,52



Lanjutan Tabel 4.15

Provinsi	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	11,82	—	—
Sumatera Utara	4,67	NA	—
Sumatera Barat	9,56	—	NA
Riau	7,24	—	NA
Jambi	11,02	—	—
Sumatera Selatan	3,22	—	NA
Bengkulu	2,80	—	NA
Lampung	7,49	—	—
Kep. Bangka Belitung	10,87	—	—
Kep. Riau	NA	NA	—
DKI Jakarta	6,77	—	—
Jawa Barat	9,64	NA	NA
Jawa Tengah	13,52	NA	—
DI Yogyakarta	3,51	—	—
Jawa Timur	13,43	—	—
Banten	4,63	NA	—
Bali	1,18	NA	—
Nusa Tenggara Barat	37,55	—	NA
Nusa Tenggara Timur	38,35	NA	—
Kalimantan Barat	16,35	NA	NA
Kalimantan Tengah	10,59	—	—
Kalimantan Selatan	10,96	—	—
Kalimantan Timur	7,60	—	—
Kalimantan Utara	8,23	—	—
Sulawesi Utara	8,86	—	—
Sulawesi Tengah	24,38	—	NA
Sulawesi Selatan	17,34	NA	NA
Sulawesi Tenggara	27,90	—	—
Gorontalo	14,03	—	—
Sulawesi Barat	41,83	NA	—
Maluku	11,85	—	—
Maluku Utara	20,00	NA	—
Papua Barat	13,12	—	—
Papua Barat Daya	NA	—	—
Papua	8,36	—	—
Papua Selatan	30,38	—	—
Papua Tengah	NA	—	—
Papua Pegunungan	NA	—	—
Indonesia	12,07	0,06	0,10

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.16
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap Setahun
Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025

Karakteristik	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik Bidan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	32,46	51,63	5,75	4,24
Perdesaan	36,37	32,11	8,66	5,03
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	38,11	36,76	7,42	2,56
20–24 Tahun	32,14	42,58	7,27	6,23
25–29 Tahun	30,10	47,55	6,56	6,83
30–34 Tahun	30,63	47,11	6,58	5,30
35–39 Tahun	33,59	45,76	6,60	3,76
40–44 Tahun	41,10	41,40	7,19	2,30
45–49 Tahun	39,98	44,14	6,44	0,66
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditatamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	43,66	28,45	9,77	2,96
SD/Sederajat	38,91	32,71	8,20	3,15
SMP/Sederajat	35,42	39,00	7,35	5,44
SMA/Sederajat	32,06	48,34	6,27	5,10
Perguruan Tinggi	29,71	56,73	5,51	3,49
Status Ekonomi				
Kuintil 1	34,93	30,57	6,55	5,36
Kuintil 2	35,81	35,65	7,21	5,88
Kuintil 3	34,75	43,03	7,39	4,59
Kuintil 4	37,05	45,48	6,15	4,82
Kuintil 5	28,57	59,31	6,81	2,83
Indonesia	33,87	44,55	6,80	4,52

Lanjutan Tabel 4.16

Karakteristik	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,24	NA	0,07
Perdesaan	20,56	NA	0,15
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	17,83	NA	NA
20–24 Tahun	12,83	NA	NA
25–29 Tahun	11,01	NA	NA
30–34 Tahun	11,43	–	NA
35–39 Tahun	12,76	NA	NA
40–44 Tahun	9,72	NA	NA
45–49 Tahun	11,34	NA	NA
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	18,58	NA	NA
SD/Sederajat	19,66	NA	NA
SMP/Sederajat	15,09	NA	NA
SMA/Sederajat	9,57	NA	0,12
Perguruan Tinggi	5,81	NA	NA
Status Ekonomi			
Kuintil 1	24,33	NA	NA
Kuintil 2	17,50	NA	NA
Kuintil 3	12,01	NA	NA
Kuintil 4	8,51	NA	NA
Kuintil 5	4,11	NA	NA
Indonesia	12,07	0,06	0,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025



Tabel 4.17
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,04	99,02	99,50
Sumatera Utara	70,51	73,85	75,60
Sumatera Barat	77,89	81,71	82,70
Riau	71,45	75,55	80,89
Jambi	59,08	63,27	66,63
Sumatera Selatan	68,90	75,99	77,82
Bengkulu	73,78	78,34	81,90
Lampung	72,34	75,76	77,98
Kep. Bangka Belitung	79,33	83,38	87,17
Kep. Riau	80,65	87,66	88,80
DKI Jakarta	94,57	95,39	96,23
Jawa Barat	71,98	76,37	78,42
Jawa Tengah	75,15	77,21	78,88
DI Yogyakarta	87,52	90,13	92,80
Jawa Timur	73,35	74,77	78,79
Banten	75,80	79,18	82,00
Bali	87,76	89,91	90,39
Nusa Tenggara Barat	69,87	73,43	78,76
Nusa Tenggara Timur	79,97	82,52	84,42
Kalimantan Barat	67,41	70,60	73,41
Kalimantan Tengah	65,21	71,51	73,22
Kalimantan Selatan	73,99	75,99	79,98
Kalimantan Timur	86,12	89,95	90,34
Kalimantan Utara	90,53	91,55	93,99
Sulawesi Utara	85,70	90,21	90,30
Sulawesi Tengah	82,07	84,26	87,32
Sulawesi Selatan	86,02	88,75	91,73
Sulawesi Tenggara	83,10	86,86	90,57
Gorontalo	89,79	92,57	93,26
Sulawesi Barat	93,01	94,49	94,35
Maluku	66,26	69,42	71,36
Maluku Utara	73,90	73,93	78,75
Papua Barat	79,31 ¹	79,39	83,21
Papua Barat Daya	–	87,66	91,34
Papua	82,64 ²	87,44	86,97
Papua Selatan	–	91,48	95,05
Papua Tengah	–	71,10	75,59
Papua Pegunungan	–	97,62	97,39
Indonesia	76,04	79,12	81,54

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.18
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	79,90	82,63	84,39
Perdesaan	70,35	73,79	77,09
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	75,28	78,02	80,08
20–24 Tahun	76,96	79,99	82,35
25–29 Tahun	76,88	80,77	83,34
30–34 Tahun	75,26	78,62	82,30
35–39 Tahun	75,51	78,69	80,51
40–44 Tahun	75,72	78,55	80,98
45–49 Tahun	76,73	79,20	81,26
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	73,84	76,55	78,20
SD/Sederajat	70,64	73,41	75,88
SMP/Sederajat	73,01	76,27	78,50
SMA/Sederajat	78,13	81,23	83,45
Perguruan Tinggi	87,01	89,54	91,11
Status Ekonomi			
Kuintil 1	69,42	71,96	74,60
Kuintil 2	71,80	75,23	77,96
Kuintil 3	75,16	78,01	81,32
Kuintil 4	79,03	82,41	83,96
Kuintil 5	83,69	86,80	88,70
Indonesia	76,04	79,12	81,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.19
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,63	86,18	12,45	1,24
Sumatera Utara	71,96	44,59	27,37	1,50
Sumatera Barat	78,98	52,02	26,96	8,24
R i a u	73,99	46,59	27,40	4,34
J a m b i	64,21	34,30	29,92	–
Sumatera Selatan	72,02	52,53	19,49	5,11
Bengkulu	79,36	51,84	27,52	0,63
Lampung	70,28	50,30	19,98	12,46
Kep. Bangka Belitung	86,09	51,01	35,08	–
Kep. Riau	78,73	30,75	47,98	0,66
DKI Jakarta	90,98	61,76	29,22	NA
Jawa Barat	73,79	42,38	31,40	0,58
Jawa Tengah	76,10	48,29	27,82	0,56
DI Yogyakarta	90,35	56,90	33,44	0,20
Jawa Timur	75,01	52,17	22,85	1,82
Banten	76,44	42,06	34,38	2,71
B a l i	88,33	50,44	37,89	NA
Nusa Tenggara Barat	75,69	61,37	14,32	10,68
Nusa Tenggara Timur	81,71	64,30	17,42	2,99
Kalimantan Barat	67,98	40,94	27,04	6,09
Kalimantan Tengah	69,74	40,04	29,71	1,26
Kalimantan Selatan	76,74	44,79	31,95	0,32
Kalimantan Timur	82,96	37,40	45,56	0,26
Kalimantan Utara	91,82	55,21	36,62	–
Sulawesi Utara	87,58	53,49	34,09	0,23
Sulawesi Tengah	84,34	63,42	20,92	2,25
Sulawesi Selatan	89,76	63,77	25,99	0,43
Sulawesi Tenggara	86,63	63,23	23,40	2,16
Gorontalo	91,59	73,54	18,05	0,12
Sulawesi Barat	92,67	71,46	21,21	20,23
Maluku	67,75	42,61	25,14	2,07
Maluku Utara	61,75	38,92	22,83	16,93
Papua Barat	77,96	59,91	18,04	4,96
Papua Barat Daya	87,62	67,42	20,20	0,41
Papua	75,69	45,87	29,82	10,70
Papua Selatan	72,09	52,61	19,48	22,14
Papua Tengah	40,65	31,87	8,78	34,00
Papua Pegunungan	62,28	52,92	9,36	48,22
Indonesia	77,06	49,85	27,22	2,67

Lanjutan Tabel 4.19

Provinsi	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Memiliki
(1)	(6)	(7)	(7)
Aceh	0,08	0,70	0,50
Sumatera Utara	0,24	2,88	24,40
Sumatera Barat	0,12	1,47	17,30
R i a u	0,43	4,41	19,11
J a m b i	0,51	2,20	33,37
Sumatera Selatan	0,41	2,24	22,18
Bengkulu	NA	1,91	18,10
Lampung	0,25	2,48	22,02
Kep. Bangka Belitung	0,28	0,99	12,83
Kep. Riau	0,58	9,67	11,20
DKI Jakarta	1,78	5,06	3,77
Jawa Barat	1,02	4,48	21,58
Jawa Tengah	0,24	2,59	21,12
DI Yogyakarta	0,95	2,38	7,20
Jawa Timur	0,40	2,87	21,21
Banten	1,05	5,02	18,00
B a l i	0,52	1,96	9,61
Nusa Tenggara Barat	0,19	1,30	21,24
Nusa Tenggara Timur	0,08	0,36	15,58
Kalimantan Barat	0,36	2,20	26,59
Kalimantan Tengah	0,30	3,30	26,78
Kalimantan Selatan	0,23	3,21	20,02
Kalimantan Timur	1,23	8,76	9,66
Kalimantan Utara	NA	2,17	6,01
Sulawesi Utara	0,16	2,49	9,70
Sulawesi Tengah	NA	1,49	12,68
Sulawesi Selatan	0,29	1,65	8,27
Sulawesi Tenggara	NA	1,93	9,43
Gorontalo	NA	1,79	6,74
Sulawesi Barat	NA	0,34	5,65
Maluku	NA	1,65	28,64
Maluku Utara	NA	2,19	21,25
Papua Barat	NA	1,10	16,79
Papua Barat Daya	NA	3,42	8,66
Papua	0,17	2,08	13,03
Papua Selatan	–	1,14	4,95
Papua Tengah	NA	3,75	24,41
Papua Pegunungan	NA	NA	2,61
Indonesia	0,54	3,17	18,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.20
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	79,62	45,27	34,36	1,90
Perdesaan	73,06	57,01	16,05	3,88
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	76,14	54,76	21,38	2,91
20–24 Tahun	77,82	51,50	26,32	2,65
25–29 Tahun	78,21	46,28	31,93	2,63
30–34 Tahun	77,07	44,29	32,78	2,56
35–39 Tahun	75,75	46,76	28,99	2,69
40–44 Tahun	76,73	51,28	25,45	2,61
45–49 Tahun	77,78	54,15	23,63	2,62
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	71,16	64,22	6,94	8,28
SD/Sederajat	73,14	62,10	11,05	2,80
SMP/Sederajat	74,97	55,65	19,32	2,51
SMA/Sederajat	78,60	47,27	31,33	2,31
Perguruan Tinggi	84,20	24,81	59,39	1,98
Status Ekonomi				
Kuintil 1	72,30	64,01	8,29	2,52
Kuintil 2	74,99	60,65	14,34	2,50
Kuintil 3	77,12	54,82	22,30	3,04
Kuintil 4	78,94	45,66	33,28	2,99
Kuintil 5	81,22	27,07	54,15	2,29
Indonesia	77,06	49,85	27,22	2,67

Lanjutan Tabel 4.20

Karakteristik	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Memiliki
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,80	4,09	15,61
Perdesaan	0,13	1,74	22,91
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	0,35	2,45	19,92
20–24 Tahun	0,44	3,27	17,65
25–29 Tahun	0,54	3,99	16,66
30–34 Tahun	0,77	3,99	17,70
35–39 Tahun	0,80	3,37	19,49
40–44 Tahun	0,51	2,84	19,02
45–49 Tahun	0,39	2,25	18,74
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	0,90	21,80
SD/Sederajat	0,12	1,20	24,12
SMP/Sederajat	0,22	2,28	21,50
SMA/Sederajat	0,45	3,93	16,55
Perguruan Tinggi	2,09	6,28	8,89
Status Ekonomi			
Kuintil 1	0,05	0,79	25,40
Kuintil 2	0,08	1,63	22,04
Kuintil 3	0,10	2,65	18,68
Kuintil 4	0,22	3,59	16,04
Kuintil 5	2,12	6,74	11,30
Indonesia	0,54	3,17	18,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.21
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,08	71,94	70,77
Sumatera Utara	36,86	45,00	49,78
Sumatera Barat	54,98	52,38	62,65
R i a u	54,27	61,07	72,37
J a m b i	41,95	46,96	43,37
Sumatera Selatan	46,42	44,36	52,08
Bengkulu	41,39	51,76	46,96
Lampung	39,77	48,16	52,62
Kep. Bangka Belitung	42,81	50,65	59,61
Kep. Riau	75,97	73,74	82,94
DKI Jakarta	77,18	76,97	81,83
Jawa Barat	49,08	53,65	57,02
Jawa Tengah	50,09	53,27	56,93
DI Yogyakarta	59,31	67,62	71,66
Jawa Timur	42,18	45,42	48,28
Banten	54,94	65,17	65,14
B a l i	40,23	45,89	46,85
Nusa Tenggara Barat	36,27	45,78	47,61
Nusa Tenggara Timur	77,87	79,39	81,72
Kalimantan Barat	52,36	49,92	61,16
Kalimantan Tengah	48,16	49,69	52,75
Kalimantan Selatan	61,51	63,62	62,85
Kalimantan Timur	72,68	81,61	80,21
Kalimantan Utara	63,75	76,48	82,87
Sulawesi Utara	64,58	67,87	59,49
Sulawesi Tengah	68,08	74,27	79,29
Sulawesi Selatan	74,28	75,64	76,23
Sulawesi Tenggara	75,21	79,59	82,29
Gorontalo	54,64	61,14	64,68
Sulawesi Barat	83,52	73,52	78,21
Maluku	61,49	64,54	64,46
Maluku Utara	79,39	72,14	84,52
Papua Barat	78,95 ¹	70,68	72,47
Papua Barat Daya	–	84,58	76,88
Papua	74,81 ²	73,80	75,17
Papua Selatan	–	87,78	88,16
Papua Tengah	–	85,28	77,29
Papua Pegunungan	–	98,89	97,80
Indonesia	52,00	55,76	58,94

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.22
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	58,46	62,36	66,36
Perdesaan	42,26	44,99	47,13
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	48,58	54,37	57,21
20–24 Tahun	50,47	53,39	56,36
25–29 Tahun	49,90	55,59	56,97
30–34 Tahun	49,59	55,40	59,19
35–39 Tahun	52,43	54,23	56,86
40–44 Tahun	53,72	57,82	60,74
45–49 Tahun	55,79	57,73	62,54
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	48,48	55,25	55,31
SD/Sederajat	47,66	47,76	52,73
SMP/Sederajat	49,06	53,55	56,58
SMA/Sederajat	55,80	60,05	62,08
Perguruan Tinggi	60,65	65,97	68,71
Status Ekonomi			
Kuintil 1	50,61	51,55	55,03
Kuintil 2	49,42	54,26	55,82
Kuintil 3	48,87	53,80	60,25
Kuintil 4	53,71	56,94	59,78
Kuintil 5	56,00	59,93	62,14
Indonesia	52,00	55,76	58,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.23
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan
Kesehatan yang Digunakan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	70,03	62,02	8,01	0,96
Sumatera Utara	46,33	30,59	15,75	NA
Sumatera Barat	60,99	44,88	16,11	0,36
Riau	70,60	37,49	33,11	NA
Jambi	40,41	20,97	19,44	–
Sumatera Selatan	47,85	34,68	13,17	3,05
Bengkulu	45,68	26,23	19,45	–
Lampung	48,38	36,57	11,81	3,72
Kep. Bangka Belitung	59,20	35,63	23,57	–
Kep. Riau	75,90	30,42	45,47	–
DKI Jakarta	77,50	51,11	26,39	NA
Jawa Barat	53,58	29,73	23,85	NA
Jawa Tengah	55,79	35,65	20,14	NA
DI Yogyakarta	67,00	41,89	25,12	–
Jawa Timur	45,40	28,20	17,20	0,93
Banten	61,05	37,27	23,78	0,51
Bali	46,49	26,27	20,22	NA
Nusa Tenggara Barat	45,89	36,67	9,22	1,22
Nusa Tenggara Timur	79,45	65,48	13,97	2,01
Kalimantan Barat	59,96	37,74	22,22	NA
Kalimantan Tengah	51,77	26,43	25,34	NA
Kalimantan Selatan	59,31	39,42	19,89	NA
Kalimantan Timur	74,09	38,12	35,97	NA
Kalimantan Utara	79,13	51,59	27,54	–
Sulawesi Utara	58,81	39,52	19,29	NA
Sulawesi Tengah	78,55	59,99	18,57	NA
Sulawesi Selatan	74,39	53,36	21,03	NA
Sulawesi Tenggara	79,74	64,73	15,01	1,66
Gorontalo	63,05	52,63	10,42	–
Sulawesi Barat	76,27	65,36	10,91	7,63
Maluku	60,63	33,30	27,33	4,19
Maluku Utara	67,00	46,36	20,64	8,63
Papua Barat	68,15	50,51	17,64	5,26
Papua Barat Daya	76,50	54,79	21,71	NA
Papua	65,50	46,42	19,07	10,69
Papua Selatan	77,11	63,96	13,15	11,13
Papua Tengah	60,53	43,06	17,46	NA
Papua Pegunungan	87,56	70,22	17,34	10,76
Indonesia	56,14	36,03	20,12	0,83



Lanjutan Tabel 4.23

Provinsi	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	NA	NA	29,23
Sumatera Utara	NA	1,55	50,22
Sumatera Barat	NA	0,86	37,35
R i a u	NA	NA	27,63
J a m b i	2,24	NA	56,63
Sumatera Selatan	NA	NA	47,92
Bengkulu	–	NA	53,04
Lampung	–	NA	47,38
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	40,39
Kep. Riau	–	NA	17,06
DKI Jakarta	1,30	2,65	18,17
Jawa Barat	0,71	2,49	42,98
Jawa Tengah	0,16	1,01	43,07
DI Yogyakarta	NA	2,28	28,34
Jawa Timur	NA	1,97	51,72
Banten	NA	2,53	34,86
B a l i	–	NA	53,15
Nusa Tenggara Barat	–	0,85	52,39
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	18,28
Kalimantan Barat	NA	0,69	38,84
Kalimantan Tengah	–	NA	47,25
Kalimantan Selatan	NA	1,53	37,15
Kalimantan Timur	2,15	3,98	19,79
Kalimantan Utara	–	3,74	17,13
Sulawesi Utara	–	NA	40,51
Sulawesi Tengah	NA	NA	20,71
Sulawesi Selatan	–	1,68	23,77
Sulawesi Tenggara	–	NA	17,71
Gorontalo	–	NA	35,32
Sulawesi Barat	–	NA	21,79
Maluku	–	–	35,54
Maluku Utara	–	NA	15,48
Papua Barat	–	–	27,53
Papua Barat Daya	–	–	23,12
Papua	–	NA	24,83
Papua Selatan	–	NA	11,84
Papua Tengah	–	15,91	22,71
Papua Pegunungan	–	NA	2,20
Indonesia	0,47	1,69	41,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.24

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	62,93	36,41	26,52	0,66
Perdesaan	45,33	35,41	9,92	1,09
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	54,82	39,23	15,59	1,06
20–24 Tahun	53,49	33,06	20,43	0,65
25–29 Tahun	53,60	28,76	24,84	0,56
30–34 Tahun	54,43	31,57	22,87	1,06
35–39 Tahun	54,71	34,36	20,35	0,95
40–44 Tahun	58,42	40,25	18,17	0,77
45–49 Tahun	60,39	41,19	19,20	0,76
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	53,16	46,01	7,16	1,60
SD/Sederajat	51,45	43,77	7,69	0,70
SMP/Sederajat	54,29	39,70	14,60	1,20
SMA/Sederajat	59,15	33,59	25,56	0,65
Perguruan Tinggi	61,94	15,50	46,44	0,39
Status Ekonomi				
Kuintil 1	53,62	46,85	6,77	1,14
Kuintil 2	54,31	43,80	10,51	0,66
Kuintil 3	58,34	42,33	16,01	0,96
Kuintil 4	56,87	32,20	24,67	0,77
Kuintil 5	56,68	20,45	36,23	0,68
Indonesia	56,14	36,03	20,12	0,83



Lanjutan Tabel 4.24

Karakteristik	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Memiliki
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,72	2,18	33,64
Perdesaan	NA	0,91	52,87
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	NA	1,31	42,79
20–24 Tahun	NA	2,13	43,64
25–29 Tahun	NA	2,39	43,03
30–34 Tahun	1,17	2,98	40,81
35–39 Tahun	0,64	0,72	43,14
40–44 Tahun	0,38	1,31	39,26
45–49 Tahun	NA	1,36	37,46
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	NA	44,69
SD/Sederajat	NA	0,67	47,27
SMP/Sederajat	NA	1,14	43,42
SMA/Sederajat	0,25	2,20	37,92
Perguruan Tinggi	2,94	3,86	31,29
Status Ekonomi			
Kuintil 1	NA	NA	44,97
Kuintil 2	NA	0,91	44,18
Kuintil 3	NA	1,06	39,75
Kuintil 4	NA	1,94	40,22
Kuintil 5	1,61	3,56	37,86
Indonesia	0,47	1,69	41,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.25

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (transportasi, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,19	1,37	NA
Sumatera Utara	3,51	NA	1,80
Sumatera Barat	NA	NA	8,79
R i a u	–	NA	NA
J a m b i	5,60	NA	11,26
Sumatera Selatan	15,40	NA	4,20
Bengkulu	2,56	–	4,53
Lampung	1,87	NA	4,93
Kep. Bangka Belitung	NA	–	6,44
Kep. Riau	NA	NA	NA
DKI Jakarta	NA	NA	–
Jawa Barat	3,48	NA	7,38
Jawa Tengah	4,43	–	4,36
DI Yogyakarta	NA	–	NA
Jawa Timur	6,76	NA	5,66
Banten	NA	NA	NA
B a l i	NA	–	NA
Nusa Tenggara Barat	3,30	NA	4,11
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	16,99
Kalimantan Barat	NA	NA	4,28
Kalimantan Tengah	12,08	NA	11,79
Kalimantan Selatan	NA	–	NA
Kalimantan Timur	NA	–	NA
Kalimantan Utara	5,35	–	NA
Sulawesi Utara	NA	–	NA
Sulawesi Tengah	NA	2,15	NA
Sulawesi Selatan	–	–	5,62
Sulawesi Tenggara	16,68	–	NA
Gorontalo	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	–	–	NA
Maluku	–	–	NA
Maluku Utara	–	–	NA
Papua Barat	2,55	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–
Papua	6,75	–	4,76
Papua Selatan	–	–	NA
Papua Tengah	–	–	–
Papua Pegunungan	97,84	2,16	–
Indonesia	4,54	0,92	5,15



Lanjutan Tabel 4.25

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	NA	5,42	1,98
Sumatera Utara	NA	3,80	12,90
Sumatera Barat	NA	6,62	8,66
Riau	NA	10,39	14,06
Jambi	NA	11,29	20,32
Sumatera Selatan	NA	NA	19,43
Bengkulu	–	7,35	8,71
Lampung	NA	4,01	17,51
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA
Kep. Riau	NA	NA	NA
DKI Jakarta	8,38	14,96	NA
Jawa Barat	4,07	6,14	11,26
Jawa Tengah	NA	7,05	8,32
DI Yogyakarta	11,63	10,80	NA
Jawa Timur	NA	7,56	6,22
Banten	NA	7,84	9,34
Bali	NA	7,82	14,93
Nusa Tenggara Barat	NA	1,72	3,28
Nusa Tenggara Timur	NA	16,48	5,39
Kalimantan Barat	NA	NA	3,25
Kalimantan Tengah	–	NA	5,88
Kalimantan Selatan	NA	7,94	NA
Kalimantan Timur	20,98	NA	NA
Kalimantan Utara	–	NA	–
Sulawesi Utara	–	NA	NA
Sulawesi Tengah	4,24	NA	NA
Sulawesi Selatan	NA	NA	10,50
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA
Gorontalo	NA	4,99	NA
Sulawesi Barat	1,08	NA	–
Maluku	–	NA	NA
Maluku Utara	4,03	7,35	24,50
Papua Barat	–	–	–
Papua Barat Daya	–	NA	NA
Papua	–	0,22	15,65
Papua Selatan	NA	–	–
Papua Tengah	–	–	NA
Papua Pegunungan	2,07	–	–
Indonesia	2,80	6,53	8,94



Lanjutan Tabel 4.25

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,49	46,73	33,57
Sumatera Utara	5,46	44,30	29,88
Sumatera Barat	18,87	30,15	25,81
R i a u	9,72	32,73	21,86
J a m b i	16,12	28,91	8,18
Sumatera Selatan	9,28	20,85	28,54
Bengkulu	24,64	14,70	39,51
Lampung	15,04	28,26	29,03
Kep. Bangka Belitung	10,12	40,09	29,68
Kep. Riau	–	20,65	NA
DKI Jakarta	NA	39,22	22,58
Jawa Barat	11,84	36,59	22,35
Jawa Tengah	11,63	34,25	30,89
DI Yogyakarta	9,58	39,06	28,73
Jawa Timur	12,08	29,94	31,22
Banten	5,17	56,93	10,92
B a l i	6,78	48,59	24,07
Nusa Tenggara Barat	26,97	15,94	46,44
Nusa Tenggara Timur	5,74	10,83	40,30
Kalimantan Barat	12,17	39,42	28,08
Kalimantan Tengah	13,65	31,11	20,47
Kalimantan Selatan	16,56	44,70	21,84
Kalimantan Timur	12,02	38,28	10,71
Kalimantan Utara	–	62,11	NA
Sulawesi Utara	34,35	27,06	27,64
Sulawesi Tengah	30,82	21,82	28,15
Sulawesi Selatan	NA	46,47	35,46
Sulawesi Tenggara	18,55	15,53	38,25
Gorontalo	11,98	14,80	57,65
Sulawesi Barat	NA	48,93	47,30
Maluku	NA	37,29	38,64
Maluku Utara	NA	NA	NA
Papua Barat	5,45	NA	77,55
Papua Barat Daya	NA	NA	55,05
Papua	16,41	NA	53,49
Papua Selatan	–	NA	63,17
Papua Tengah	12,11	58,51	–
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	11,90	34,20	28,34

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.26

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (transportasi, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,24	0,61	5,64
Perdesaan	4,87	1,26	4,63
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	3,91	NA	4,09
20–24 Tahun	5,78	2,61	6,55
25–29 Tahun	3,83	NA	4,18
30–34 Tahun	4,77	NA	6,19
35–39 Tahun	3,61	NA	5,09
40–44 Tahun	6,33	0,94	5,09
45–49 Tahun	3,87	NA	4,97
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	10,16	NA	5,17
SD/Sederajat	4,24	0,94	6,20
SMP/Sederajat	4,94	0,72	4,17
SMA/Sederajat	4,03	NA	6,11
Perguruan Tinggi	3,01	NA	2,75
Status Ekonomi			
Kuintil 1	5,97	0,75	7,75
Kuintil 2	6,82	2,36	4,45
Kuintil 3	3,10	NA	7,11
Kuintil 4	3,86	NA	3,71
Kuintil 5	3,74	NA	3,89
Indonesia	4,54	0,92	5,15



Lanjutan Tabel 4.26

Karakteristik	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,95	6,74	6,63
Perdesaan	0,50	6,31	11,41
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	1,94	4,89	7,97
20–24 Tahun	3,19	9,25	6,96
25–29 Tahun	3,69	6,10	9,12
30–34 Tahun	6,18	8,38	8,32
35–39 Tahun	2,74	4,51	11,40
40–44 Tahun	1,54	6,61	8,54
45–49 Tahun	0,81	6,26	9,62
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	4,71	9,61
SD/Sederajat	NA	6,04	10,57
SMP/Sederajat	1,12	6,88	10,51
SMA/Sederajat	2,49	6,52	7,95
Perguruan Tinggi	13,48	7,57	4,69
Status Ekonomi			
Kuintil 1	NA	10,28	9,52
Kuintil 2	NA	5,75	9,60
Kuintil 3	NA	3,85	7,99
Kuintil 4	2,47	4,61	9,41
Kuintil 5	7,83	8,75	8,44
Indonesia	2,80	6,53	8,94



Lanjutan Tabel 4.26

Karakteristik	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	8,46	40,36	25,52
Perdesaan	15,56	27,63	31,34
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	8,57	39,46	29,93
20–24 Tahun	13,70	32,58	23,57
25–29 Tahun	13,34	31,60	30,74
30–34 Tahun	9,00	34,66	26,90
35–39 Tahun	13,12	33,59	28,62
40–44 Tahun	12,84	32,49	29,36
45–49 Tahun	12,44	35,11	28,71
Tingkat Pendidikan			
Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	16,30	26,76	29,71
SD/Sederajat	13,96	30,22	31,08
SMP/Sederajat	13,28	35,38	25,99
SMA/Sederajat	9,69	36,24	28,83
Perguruan Tinggi	8,74	37,14	26,35
Status Ekonomi			
Kuintil 1	13,90	25,28	29,41
Kuintil 2	12,98	31,67	29,05
Kuintil 3	12,38	35,41	31,36
Kuintil 4	12,38	36,50	29,57
Kuintil 5	9,09	38,31	23,72
Indonesia	11,90	34,20	28,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.27

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,57	97,48	96,96
Sumatera Utara	71,08	77,71	81,12
Sumatera Barat	79,68	80,66	87,77
Riau	70,05	80,77	83,56
Jambi	65,37	76,40	78,36
Sumatera Selatan	77,87	77,25	79,35
Bengkulu	86,25	90,30	90,07
Lampung	72,27	81,45	87,43
Kep. Bangka Belitung	87,49	90,45	86,06
Kep. Riau	84,27	93,91	92,98
DKI Jakarta	86,30	92,44	91,20
Jawa Barat	77,35	83,87	85,36
Jawa Tengah	76,92	84,31	87,57
DI Yogyakarta	85,04	85,52	90,17
Jawa Timur	74,01	83,04	82,57
Banten	77,14	84,94	88,69
Bali	82,46	92,72	89,34
Nusa Tenggara Barat	69,12	73,00	82,92
Nusa Tenggara Timur	89,36	92,97	93,60
Kalimantan Barat	72,15	77,78	81,76
Kalimantan Tengah	75,71	73,99	90,92
Kalimantan Selatan	84,82	88,70	91,23
Kalimantan Timur	89,80	87,57	93,79
Kalimantan Utara	85,01	92,69	97,07
Sulawesi Utara	91,41	90,46	92,44
Sulawesi Tengah	91,24	93,47	94,97
Sulawesi Selatan	91,21	92,21	96,02
Sulawesi Tenggara	87,22	94,28	93,84
Gorontalo	97,52	96,56	97,95
Sulawesi Barat	91,28	93,78	94,93
Maluku	86,34	90,20	86,40
Maluku Utara	74,58	87,62	89,12
Papua Barat	85,94 ¹	89,93	93,30
Papua Barat Daya	–	92,35	81,13
Papua	76,07 ²	95,28	89,34
Papua Selatan	–	97,59	80,99
Papua Tengah	–	73,73	63,25
Papua Pegunungan	–	98,18	100,00
Indonesia	79,07	84,88	87,09

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.28
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	81,47	87,56	89,15
Perdesaan	75,09	80,31	83,46
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	76,36	83,37	84,31
20–24 Tahun	76,88	83,79	86,12
25–29 Tahun	77,66	85,32	87,91
30–34 Tahun	81,05	85,50	86,73
35–39 Tahun	79,85	83,34	87,59
40–44 Tahun	81,82	88,24	87,71
45–49 Tahun	79,51	84,31	88,33
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	78,51	83,63	86,89
SD/Sederajat	76,83	79,80	85,65
SMP/Sederajat	77,04	84,49	85,08
SMA/Sederajat	78,25	86,22	87,83
Perguruan Tinggi	85,92	87,47	89,45
Status Ekonomi			
Kuintil 1	76,47	82,92	87,98
Kuintil 2	78,90	83,67	88,14
Kuintil 3	78,03	85,37	86,21
Kuintil 4	78,86	85,98	87,63
Kuintil 5	81,77	85,63	86,07
Indonesia	79,07	84,88	87,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.29

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Provinsi	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	94,97	81,57	13,40	0,70
Sumatera Utara	78,23	42,75	35,48	NA
Sumatera Barat	85,75	47,24	38,52	NA
Riau	78,90	47,30	31,60	NA
Jambi	73,27	36,30	36,96	–
Sumatera Selatan	72,93	43,44	29,49	3,06
Bengkulu	86,93	56,68	30,24	NA
Lampung	81,32	54,79	26,53	3,63
Kep. Bangka Belitung	84,30	39,02	45,28	–
Kep. Riau	86,38	22,84	63,53	–
DKI Jakarta	80,15	50,74	29,41	–
Jawa Barat	79,65	45,19	34,47	NA
Jawa Tengah	84,36	50,99	33,37	NA
DI Yogyakarta	85,53	54,50	31,02	–
Jawa Timur	77,28	44,85	32,43	1,42
Banten	80,20	38,34	41,86	NA
Bali	86,55	39,46	47,10	NA
Nusa Tenggara Barat	80,78	66,27	14,51	1,30
Nusa Tenggara Timur	89,78	68,45	21,33	3,95
Kalimantan Barat	77,31	47,99	29,32	NA
Kalimantan Tengah	83,47	41,77	41,70	NA
Kalimantan Selatan	86,15	52,54	33,62	–
Kalimantan Timur	82,73	36,83	45,90	NA
Kalimantan Utara	95,28	61,84	33,43	–
Sulawesi Utara	87,97	50,82	37,14	NA
Sulawesi Tengah	91,93	63,85	28,07	2,24
Sulawesi Selatan	93,80	66,01	27,79	0,35
Sulawesi Tenggara	91,46	68,90	22,57	NA
Gorontalo	95,10	78,11	16,99	NA
Sulawesi Barat	93,92	68,48	25,44	8,85
Maluku	86,24	49,65	36,59	NA
Maluku Utara	68,83	41,23	27,61	15,65
Papua Barat	88,49	56,87	31,63	3,13
Papua Barat Daya	81,13	59,93	21,20	–
Papua	86,00	49,60	36,40	3,35
Papua Selatan	72,46	56,88	15,58	7,96
Papua Tengah	51,18	35,56	15,61	NA
Papua Pegunungan	90,13	35,07	55,06	NA
Indonesia	82,25	49,87	32,39	0,98



Lanjutan Tabel 4.29

Provinsi	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	NA	1,40	3,04
Sumatera Utara	NA	1,97	18,88
Sumatera Barat	NA	NA	12,23
R i a u	NA	3,51	16,44
J a m b i	NA	NA	21,64
Sumatera Selatan	0,97	3,25	20,65
Bengkulu	NA	NA	9,93
Lampung	NA	2,38	12,57
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	13,94
Kep. Riau	NA	NA	7,02
DKI Jakarta	NA	9,17	8,80
Jawa Barat	2,19	3,31	14,64
Jawa Tengah	0,36	2,61	12,43
DI Yogyakarta	3,99	NA	9,83
Jawa Timur	NA	3,65	17,43
Banten	NA	6,39	11,31
B a l i	NA	NA	10,66
Nusa Tenggara Barat	NA	1,25	17,08
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	6,40
Kalimantan Barat	NA	3,40	18,24
Kalimantan Tengah	NA	6,13	9,08
Kalimantan Selatan	NA	5,04	8,77
Kalimantan Timur	3,52	6,48	6,21
Kalimantan Utara	NA	NA	2,93
Sulawesi Utara	NA	4,12	7,56
Sulawesi Tengah	–	1,45	5,03
Sulawesi Selatan	NA	0,79	3,98
Sulawesi Tenggara	–	2,06	6,16
Gorontalo	–	NA	2,05
Sulawesi Barat	NA	NA	5,07
Maluku	–	–	13,60
Maluku Utara	–	4,65	10,88
Papua Barat	NA	NA	6,70
Papua Barat Daya	–	–	18,87
Papua	–	–	10,66
Papua Selatan	–	NA	19,01
Papua Tengah	–	NA	36,75
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	1,02	3,06	12,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.30

Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Karakteristik	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	83,48	45,11	38,37	0,58
Perdesaan	80,09	58,22	21,87	1,68
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	80,40	55,80	24,60	1,88
20–24 Tahun	81,80	52,21	29,59	0,92
25–29 Tahun	83,19	47,08	36,11	0,64
30–34 Tahun	80,97	43,28	37,68	1,03
35–39 Tahun	81,44	48,32	33,13	1,02
40–44 Tahun	83,39	54,01	29,39	0,85
45–49 Tahun	84,89	58,19	26,70	1,03
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	82,87	71,62	11,26	1,55
SD/Sederajat	83,06	70,30	12,76	1,56
SMP/Sederajat	82,16	57,93	24,23	0,81
SMA/Sederajat	82,78	47,43	35,35	1,08
Perguruan Tinggi	80,50	23,32	57,17	0,40
Status Ekonomi				
Kuintil 1	85,80	73,37	12,42	1,75
Kuintil 2	86,22	65,33	20,90	0,57
Kuintil 3	81,69	55,90	25,78	1,21
Kuintil 4	83,55	44,92	38,63	1,00
Kuintil 5	76,82	24,95	51,87	0,58
Indonesia	82,25	49,87	32,39	0,98



Lanjutan Tabel 4.30

Karakteristik	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(6)	(7)	(8)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	1,51	3,75	10,85
Perdesaan	0,17	1,84	16,54
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	0,70	1,42	15,69
20–24 Tahun	NA	3,13	13,88
25–29 Tahun	0,64	3,66	12,09
30–34 Tahun	1,33	3,84	13,27
35–39 Tahun	2,12	3,09	12,41
40–44 Tahun	1,14	2,59	12,29
45–49 Tahun	0,75	1,93	11,67
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	2,52	13,11
SD/Sederajat	NA	1,17	14,35
SMP/Sederajat	0,22	2,11	14,92
SMA/Sederajat	0,52	3,66	12,17
Perguruan Tinggi	4,09	4,75	10,55
Status Ekonomi			
Kuintil 1	–	0,75	12,02
Kuintil 2	NA	1,48	11,86
Kuintil 3	NA	3,37	13,79
Kuintil 4	0,36	2,86	12,37
Kuintil 5	3,54	5,44	13,93
Indonesia	1,02	3,06	12,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.31
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk
Rawat Inap, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (transportasi, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	NA	–	–
Sumatera Utara	1,64	NA	4,12
Sumatera Barat	NA	–	17,38
R i a u	NA	–	NA
J a m b i	NA	–	8,03
Sumatera Selatan	NA	NA	NA
Bengkulu	–	–	10,78
Lampung	7,29	–	23,06
Kep. Bangka Belitung	NA	–	NA
Kep. Riau	–	–	3,22
DKI Jakarta	NA	–	–
Jawa Barat	NA	0,47	7,06
Jawa Tengah	4,85	–	13,52
DI Yogyakarta	–	–	NA
Jawa Timur	13,84	NA	14,73
Banten	–	–	NA
B a l i	NA	–	NA
Nusa Tenggara Barat	–	–	32,22
Nusa Tenggara Timur	–	–	23,86
Kalimantan Barat	NA	–	NA
Kalimantan Tengah	NA	–	0,56
Kalimantan Selatan	NA	–	NA
Kalimantan Timur	–	–	NA
Kalimantan Utara	25,93	–	–
Sulawesi Utara	–	–	33,87
Sulawesi Tengah	NA	0,43	50,39
Sulawesi Selatan	–	–	NA
Sulawesi Tenggara	NA	–	NA
Gorontalo	–	–	41,11
Sulawesi Barat	–	–	37,26
Maluku	NA	–	20,47
Maluku Utara	–	–	83,07
Papua Barat	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	NA
Papua	NA	–	20,55
Papua Selatan	–	–	31,67
Papua Tengah	–	–	NA
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	4,74	0,41	10,72



Lanjutan Tabel 4.31

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,56	26,33	2,93
Sumatera Utara	1,94	10,31	NA
Sumatera Barat	12,22	22,17	NA
Riau	NA	12,18	NA
Jambi	25,42	NA	NA
Sumatera Selatan	8,80	NA	29,42
Bengkulu	–	NA	10,05
Lampung	11,48	11,89	NA
Kep. Bangka Belitung	8,89	38,18	–
Kep. Riau	NA	–	–
DKI Jakarta	NA	NA	NA
Jawa Barat	17,55	11,48	9,07
Jawa Tengah	8,83	16,05	NA
DI Yogyakarta	35,76	30,35	–
Jawa Timur	NA	21,27	8,85
Banten	37,60	NA	–
Bali	NA	NA	9,34
Nusa Tenggara Barat	NA	12,68	NA
Nusa Tenggara Timur	–	32,54	5,68
Kalimantan Barat	27,49	23,61	NA
Kalimantan Tengah	NA	NA	–
Kalimantan Selatan	13,83	–	11,73
Kalimantan Timur	54,63	12,81	–
Kalimantan Utara	1,88	–	–
Sulawesi Utara	32,89	NA	–
Sulawesi Tengah	–	NA	–
Sulawesi Selatan	26,73	NA	–
Sulawesi Tenggara	NA	1,49	–
Gorontalo	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–
Maluku	–	NA	NA
Maluku Utara	–	–	–
Papua Barat	–	100,00	–
Papua Barat Daya	–	NA	–
Papua	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–
Papua Tengah	–	–	25,20
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	14,45	13,67	8,77



Lanjutan Tabel 4.31

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/antri Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,88	45,15	32,31
Sumatera Utara	NA	33,32	27,17
Sumatera Barat	NA	NA	14,64
R i a u	8,48	20,55	36,38
J a m b i	18,05	22,33	NA
Sumatera Selatan	7,25	15,77	17,41
Bengkulu	–	16,09	56,13
Lampung	15,86	15,18	17,60
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA
Kep. Riau	NA	4,08	NA
DKI Jakarta	–	31,68	28,31
Jawa Barat	NA	20,04	27,68
Jawa Tengah	NA	18,53	29,79
DI Yogyakarta	–	NA	30,83
Jawa Timur	4,54	23,42	15,85
Banten	NA	36,82	NA
B a l i	–	31,50	NA
Nusa Tenggara Barat	NA	20,04	30,88
Nusa Tenggara Timur	–	–	37,92
Kalimantan Barat	–	18,40	NA
Kalimantan Tengah	0,86	19,92	32,32
Kalimantan Selatan	NA	23,58	26,25
Kalimantan Timur	NA	5,15	NA
Kalimantan Utara	–	62,58	9,62
Sulawesi Utara	NA	NA	16,98
Sulawesi Tengah	–	19,53	–
Sulawesi Selatan	NA	25,66	16,28
Sulawesi Tenggara	–	48,24	5,51
Gorontalo	13,94	–	58,89
Sulawesi Barat	–	43,70	19,04
Maluku	–	40,46	NA
Maluku Utara	–	15,06	1,87
Papua Barat	–	–	–
Papua Barat Daya	–	81,55	NA
Papua	23,49	–	51,90
Papua Selatan	–	NA	63,56
Papua Tengah	NA	NA	0,95
Papua Pegunungan	–	–	–
Indonesia	6,15	22,01	23,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.32
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun
Terakhir Menurut Karakteristik dan Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda
Untuk Rawat Inap, 2025

Karakteristik	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Tidak Punya Biaya (transportasi, dll.)	Kartu JKN Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	3,72	0,15	8,94
Perdesaan	6,67	0,89	14,08
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	NA	–	12,72
20–24 Tahun	3,99	NA	12,71
25–29 Tahun	4,40	–	13,66
30–34 Tahun	2,79	NA	6,87
35–39 Tahun	5,80	NA	9,00
40–44 Tahun	9,06	0,88	9,25
45–49 Tahun	NA	1,38	14,01
Tingkat Pendidikan			
Tertinggi yang			
Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	–	–	5,98
SD/Sederajat	7,82	NA	19,88
SMP/Sederajat	7,17	–	9,86
SMA/Sederajat	4,90	NA	14,81
Perguruan Tinggi	NA	0,30	3,14
Status Ekonomi			
Kuintil 1	5,22	NA	29,21
Kuintil 2	7,46	NA	10,35
Kuintil 3	6,03	NA	12,41
Kuintil 4	6,13	0,41	11,48
Kuintil 5	2,68	0,24	5,83
Indonesia	4,74	0,41	10,72



Lanjutan Tabel 4.32

Karakteristik	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda	Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	20,77	13,74	5,35
Perdesaan	2,53	13,55	15,22
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	12,85	14,34	NA
20–24 Tahun	9,41	16,40	13,72
25–29 Tahun	14,61	12,77	10,17
30–34 Tahun	13,09	12,35	11,88
35–39 Tahun	22,96	10,52	3,74
40–44 Tahun	12,56	23,19	6,67
45–49 Tahun	12,29	9,66	2,60
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	4,10	20,44	16,91
SD/Sederajat	NA	18,93	7,62
SMP/Sederajat	7,88	13,48	5,85
SMA/Sederajat	9,91	13,58	10,49
Perguruan Tinggi	32,12	11,27	8,77
Status Ekonomi			
Kuintil 1	–	17,63	12,46
Kuintil 2	1,20	17,54	10,37
Kuintil 3	2,83	17,71	9,44
Kuintil 4	10,20	7,25	12,54
Kuintil 5	28,04	13,10	5,46
Indonesia	14,45	13,67	8,77



Lanjutan Tabel 4.32

Karakteristik	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/antre Panjang	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4,45	23,68	24,50
Perdesaan	9,36	18,87	22,85
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	NA	34,72	15,99
20–24 Tahun	8,70	17,22	27,95
25–29 Tahun	7,97	17,47	24,81
30–34 Tahun	3,86	24,34	26,99
35–39 Tahun	8,83	20,71	21,32
40–44 Tahun	NA	20,44	16,99
45–49 Tahun	NA	29,55	26,86
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	15,84	30,61	11,48
SD/Sederajat	5,05	25,47	19,68
SMP/Sederajat	7,28	21,55	30,50
SMA/Sederajat	5,41	22,98	23,24
Perguruan Tinggi	NA	19,02	21,96
Status Ekonomi			
Kuintil 1	9,18	17,28	18,54
Kuintil 2	8,27	23,14	26,97
Kuintil 3	7,46	25,05	30,22
Kuintil 4	4,51	24,68	26,05
Kuintil 5	5,13	20,25	20,72
Indonesia	6,15	22,01	23,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.33
Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun
Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	21,84	21,85	21,94
Sumatera Utara	22,30	22,28	22,36
Sumatera Barat	22,11	22,11	22,26
R i a u	21,51	21,51	21,78
J a m b i	20,51	20,53	20,64
Sumatera Selatan	20,73	20,70	20,96
Bengkulu	20,51	20,60	20,81
Lampung	20,67	20,73	20,93
Kep. Bangka Belitung	20,50	20,50	20,76
Kep. Riau	22,61	22,85	22,73
DKI Jakarta	22,98	22,98	23,06
Jawa Barat	20,29	20,33	20,67
Jawa Tengah	20,77	20,84	21,13
DI Yogyakarta	22,54	22,60	22,77
Jawa Timur	20,57	20,62	20,83
Banten	20,96	21,09	21,37
B a l i	21,80	21,92	22,08
Nusa Tenggara Barat	20,29	20,39	20,61
Nusa Tenggara Timur	22,40	22,34	22,27
Kalimantan Barat	20,67	20,68	20,66
Kalimantan Tengah	19,93	19,88	20,14
Kalimantan Selatan	20,10	20,11	20,02
Kalimantan Timur	21,24	21,08	21,17
Kalimantan Utara	21,11	21,00	21,20
Sulawesi Utara	21,20	21,10	21,09
Sulawesi Tengah	20,81	20,62	20,73
Sulawesi Selatan	21,41	21,36	21,57
Sulawesi Tenggara	20,92	20,74	20,68
Gorontalo	20,62	20,60	20,63
Sulawesi Barat	20,68	20,68	20,82
Maluku	22,07	22,32	22,17
Maluku Utara	21,14	21,14	21,24
Papua Barat	21,21 ¹	21,15	21,08
Papua Barat Daya	–	21,67	21,95
Papua	20,99 ²	21,90	22,03
Papua Selatan	–	20,78	21,25
Papua Tengah	–	20,89	21,22
Papua Pegunungan	–	20,72	20,82
Indonesia	20,97	21,00	21,21

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.34
Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun
Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	21,57	21,58	21,76
Perdesaan	20,18	20,22	20,46
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	16,84	16,76	16,83
20–24 Tahun	19,20	19,32	19,49
25–29 Tahun	20,84	20,79	21,05
30–34 Tahun	21,35	21,35	21,55
35–39 Tahun	21,38	21,40	21,55
40–44 Tahun	21,06	21,13	21,34
45–49 Tahun	20,97	20,96	21,13
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	19,43	19,32	19,34
SD/Sederajat	19,33	19,27	19,43
SMP/Sederajat	20,08	20,01	20,10
SMA/Sederajat	21,85	21,98	22,10
Perguruan Tinggi	24,31	24,44	24,78
Status Ekonomi			
Kuintil 1	20,18	20,26	20,38
Kuintil 2	20,45	20,49	20,67
Kuintil 3	20,76	20,79	21,01
Kuintil 4	21,17	21,23	21,36
Kuintil 5	22,28	22,23	22,62
Indonesia	20,97	21,00	21,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.35

**Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun
yang Pernah Hamil Menurut Provinsi, 2023–2025**

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,20	22,32	22,39
Sumatera Utara	22,74	22,70	22,84
Sumatera Barat	22,57	22,61	22,74
Riau	21,92	22,06	22,29
Jambi	21,07	21,11	21,22
Sumatera Selatan	21,20	21,21	21,45
Bengkulu	20,97	21,21	21,32
Lampung	21,22	21,36	21,46
Kep. Bangka Belitung	21,02	21,15	21,31
Kep. Riau	23,13	23,48	23,22
DKI Jakarta	23,42	23,51	23,48
Jawa Barat	21,14	21,21	21,45
Jawa Tengah	21,39	21,48	21,79
DI Yogyakarta	23,08	23,05	23,28
Jawa Timur	21,45	21,56	21,67
Banten	21,61	21,76	21,95
Bali	22,06	22,24	22,38
Nusa Tenggara Barat	20,92	21,05	21,18
Nusa Tenggara Timur	22,56	22,61	22,50
Kalimantan Barat	21,12	21,11	21,11
Kalimantan Tengah	20,61	20,71	20,79
Kalimantan Selatan	21,00	21,03	20,90
Kalimantan Timur	21,91	21,85	21,88
Kalimantan Utara	21,51	21,56	21,71
Sulawesi Utara	21,51	21,55	21,50
Sulawesi Tengah	21,29	21,24	21,36
Sulawesi Selatan	22,00	22,03	22,09
Sulawesi Tenggara	21,43	21,43	21,29
Gorontalo	21,24	21,35	21,28
Sulawesi Barat	21,29	21,27	21,36
Maluku	22,34	22,53	22,52
Maluku Utara	21,41	21,56	21,64
Papua Barat	21,63 ¹	21,66	21,45
Papua Barat Daya	–	22,05	22,29
Papua	21,55 ²	22,28	22,34
Papua Selatan	–	21,13	21,73
Papua Tengah	–	21,42	21,46
Papua Pegunungan	–	21,50	21,48
Indonesia	21,61	21,69	21,84

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.36
Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun
yang Pernah Hamil Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	22,15	22,21	22,34
Perdesaan	20,89	20,99	21,15
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	16,92	16,83	16,81
20–24 Tahun	19,36	19,49	19,66
25–29 Tahun	21,16	21,17	21,36
30–34 Tahun	21,87	21,89	22,06
35–39 Tahun	22,01	22,09	22,18
40–44 Tahun	21,83	21,93	22,07
45–49 Tahun	21,85	21,93	22,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	20,24	20,23	20,17
SD/Sederajat	20,20	20,23	20,30
SMP/Sederajat	20,74	20,70	20,78
SMA/Sederajat	22,39	22,55	22,64
Perguruan Tinggi	24,82	25,00	25,28
Status Ekonomi			
Kuintil 1	20,86	21,04	21,09
Kuintil 2	21,17	21,23	21,35
Kuintil 3	21,44	21,51	21,68
Kuintil 4	21,81	21,91	22,00
Kuintil 5	22,84	22,83	23,15
Indonesia	21,61	21,69	21,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.37

**Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak
Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir
Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025**

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,43	95,27	96,51
Sumatera Utara	89,37	90,64	91,40
Sumatera Barat	95,94	95,45	96,98
R i a u	87,51	88,35	91,77
J a m b i	81,12	83,14	87,55
Sumatera Selatan	87,23	89,18	91,25
Bengkulu	93,74	96,18	96,26
Lampung	94,02	95,05	96,78
Kep. Bangka Belitung	97,52	97,56	99,28
Kep. Riau	97,81	98,63	98,28
DKI Jakarta	98,15	100,00	100,00
Jawa Barat	86,45	88,74	91,29
Jawa Tengah	98,30	98,63	99,40
DI Yogyakarta	99,99	100,00	99,47
Jawa Timur	97,57	98,22	98,57
Banten	88,68	91,43	94,21
B a l i	99,51	100,00	99,96
Nusa Tenggara Barat	96,47	96,06	97,24
Nusa Tenggara Timur	86,12	88,05	90,19
Kalimantan Barat	82,65	83,54	84,30
Kalimantan Tengah	67,19	71,54	74,00
Kalimantan Selatan	89,44	90,26	93,21
Kalimantan Timur	94,93	95,66	98,04
Kalimantan Utara	94,62	94,44	97,77
Sulawesi Utara	91,39	92,73	95,34
Sulawesi Tengah	88,60	89,20	91,75
Sulawesi Selatan	96,61	96,26	97,42
Sulawesi Tenggara	83,91	85,18	87,56
Gorontalo	95,47	96,09	97,15
Sulawesi Barat	89,50	88,97	89,75
Maluku	52,70	55,65	58,86
Maluku Utara	68,33	70,49	72,02
Papua Barat	70,80 ¹	72,02	73,99
Papua Barat Daya	–	70,82	73,11
Papua	76,19 ²	83,55	81,81
Papua Selatan	–	80,46	80,67
Papua Tengah	–	81,26	72,34
Papua Pegunungan	–	47,41	38,13
Indonesia	91,15	92,42	93,95

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.38
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak
Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir
Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	94,87	95,52	96,68
Perdesaan	86,44	88,35	90,06
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	90,68	86,10	90,44
20–24 Tahun	91,15	91,46	93,61
25–29 Tahun	91,93	93,30	94,81
30–34 Tahun	91,85	92,86	94,89
35–39 Tahun	90,18	92,49	93,08
40–44 Tahun	88,44	90,97	91,21
45–49 Tahun	87,51	88,65	88,87
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	75,23	79,50	78,56
SD/Sederajat	82,76	85,01	87,86
SMP/Sederajat	90,54	90,88	93,78
SMA/Sederajat	94,17	95,60	95,74
Perguruan Tinggi	97,10	96,94	97,67
Status Ekonomi			
Kuintil 1	86,20	88,13	90,27
Kuintil 2	89,64	90,79	93,01
Kuintil 3	92,37	93,48	94,88
Kuintil 4	94,45	96,10	96,02
Kuintil 5	96,58	97,30	97,79
Indonesia	91,15	92,42	93,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.39

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik dokter/ bidan/perawat	Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	48,23	5,57	28,14	7,17
Sumatera Utara	44,00	10,91	25,20	9,67
Sumatera Barat	48,06	12,01	24,00	6,67
R i a u	48,45	9,98	18,82	9,65
J a m b i	42,05	7,04	25,71	9,44
Sumatera Selatan	39,82	7,04	33,41	5,57
Bengkulu	42,44	10,01	31,02	9,61
Lampung	37,50	8,98	45,15	4,24
Kep. Bangka Belitung	54,45	9,38	14,98	19,26
Kep. Riau	53,67	12,55	27,43	4,22
DKI Jakarta	62,59	3,62	16,93	16,86
Jawa Barat	39,90	7,69	32,94	10,03
Jawa Tengah	60,54	4,49	12,09	22,00
DI Yogyakarta	61,61	14,18	17,51	6,17
Jawa Timur	54,09	3,70	23,98	15,05
Banten	46,70	8,18	22,71	16,43
B a l i	79,17	4,17	14,18	2,44
Nusa Tenggara Barat	34,49	4,06	6,16	37,83
Nusa Tenggara Timur	39,81	1,62	0,67	43,28
Kalimantan Barat	34,03	7,40	16,77	23,29
Kalimantan Tengah	34,48	7,53	10,77	14,91
Kalimantan Selatan	50,70	6,22	14,58	13,13
Kalimantan Timur	65,53	9,22	10,83	9,52
Kalimantan Utara	70,21	NA	12,75	13,25
Sulawesi Utara	69,29	5,69	2,65	17,60
Sulawesi Tengah	49,78	4,99	1,28	32,92
Sulawesi Selatan	61,74	4,20	6,66	22,14
Sulawesi Tenggara	36,75	1,51	5,32	41,11
Gorontalo	70,47	NA	NA	24,97
Sulawesi Barat	35,20	2,45	5,84	41,45
Maluku	35,04	NA	2,24	15,61
Maluku Utara	39,83	1,94	NA	22,52
Papua Barat	48,36	NA	NA	22,92
Papua Barat Daya	53,21	NA	NA	12,65
Papua	67,58	NA	2,94	9,27
Papua Selatan	37,63	2,11	3,46	29,90
Papua Tengah	54,16	8,24	NA	8,76
Papua Pegunungan	9,14	4,52	–	17,51
Indonesia	48,80	6,32	21,04	15,45



Lanjutan Tabel 4.39

Provinsi	Pustu	Polindes/Poskesdes	Rumah	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,07	6,33	3,49	–
Sumatera Utara	0,65	0,98	8,60	–
Sumatera Barat	2,96	3,27	2,97	NA
R i a u	1,61	3,25	8,23	–
J a m b i	NA	2,86	12,45	–
Sumatera Selatan	NA	5,16	8,59	NA
Bengkulu	NA	2,22	3,54	NA
Lampung	NA	NA	3,22	–
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	–
Kep. Riau	NA	NA	NA	–
DKI Jakarta	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	0,54	8,56	NA
Jawa Tengah	NA	NA	0,57	NA
DI Yogyakarta	–	–	–	NA
Jawa Timur	0,33	1,42	1,36	NA
Banten	NA	–	5,79	–
B a l i	–	–	NA	–
Nusa Tenggara Barat	1,28	13,43	2,76	–
Nusa Tenggara Timur	3,44	1,38	9,81	–
Kalimantan Barat	NA	2,61	15,70	–
Kalimantan Tengah	1,25	5,06	25,66	NA
Kalimantan Selatan	NA	8,30	6,79	–
Kalimantan Timur	1,70	NA	1,96	–
Kalimantan Utara	–	–	2,23	–
Sulawesi Utara	NA	NA	4,66	–
Sulawesi Tengah	2,07	NA	8,25	–
Sulawesi Selatan	2,05	0,64	2,53	NA
Sulawesi Tenggara	2,03	NA	12,44	–
Gorontalo	NA	NA	2,85	–
Sulawesi Barat	4,40	NA	10,25	–
Maluku	4,07	1,66	41,12	NA
Maluku Utara	2,71	3,38	27,79	NA
Papua Barat	2,09	–	26,01	–
Papua Barat Daya	NA	NA	26,89	–
Papua	NA	NA	18,19	–
Papua Selatan	6,39	NA	18,73	NA
Papua Tengah	–	–	26,42	NA
Papua Pegunungan	NA	3,90	60,46	NA
Indonesia	0,71	1,63	5,99	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.40

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Karakteristik	Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta	Klinik	Praktik dokter/ bidan/perawat	Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	56,04	7,04	22,00	10,64
Perdesaan	38,51	5,31	19,67	22,28
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	41,84	5,87	15,32	23,15
20–24 Tahun	45,62	4,82	21,89	18,80
25–29 Tahun	49,27	6,84	21,80	14,69
30–34 Tahun	51,08	6,71	20,22	14,51
35–39 Tahun	49,35	6,36	20,33	14,60
40–44 Tahun	46,13	5,58	21,91	15,74
45–49 Tahun	37,36	5,87	24,65	18,89
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	31,48	3,78	14,26	23,55
SD/Sederajat	33,89	4,60	22,46	22,93
SMP/Sederajat	40,12	6,32	25,11	19,84
SMA/Sederajat	52,24	6,76	21,94	12,85
Perguruan Tinggi	68,41	7,19	13,23	7,57
Status Ekonomi				
Kuintil 1	35,15	4,66	22,69	24,40
Kuintil 2	43,26	5,29	24,67	16,91
Kuintil 3	49,39	7,24	22,50	13,51
Kuintil 4	57,34	7,36	18,82	10,93
Kuintil 5	68,90	8,16	13,74	6,17
Indonesia	48,80	6,32	21,04	15,45



Lanjutan Tabel 4.40

Karakteristik	Pustu	Polindes/Poskesdes	Rumah	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,17	0,79	3,25	0,07
Perdesaan	1,47	2,82	9,87	0,06
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	1,08	3,17	9,56	NA
20–24 Tahun	0,90	1,57	6,34	NA
25–29 Tahun	0,65	1,55	5,11	0,08
30–34 Tahun	0,67	1,70	5,00	NA
35–39 Tahun	0,78	1,66	6,90	NA
40–44 Tahun	0,49	1,35	8,75	NA
45–49 Tahun	0,41	1,70	11,13	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	1,52	3,97	21,28	NA
SD/Sederajat	1,32	2,67	11,94	NA
SMP/Sederajat	0,69	1,70	6,18	0,04
SMA/Sederajat	0,60	1,35	4,21	NA
Perguruan Tinggi	0,33	0,93	2,31	NA
Status Ekonomi				
Kuintil 1	1,17	2,21	9,56	NA
Kuintil 2	0,89	2,00	6,95	0,03
Kuintil 3	0,54	1,70	5,06	NA
Kuintil 4	0,39	1,18	3,95	NA
Kuintil 5	0,27	0,55	2,21	–
Indonesia	0,71	1,63	5,99	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.41

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,95	99,30	99,52
Sumatera Utara	96,62	97,84	97,90
Sumatera Barat	98,47	98,69	98,80
R i a u	96,65	97,01	96,73
J a m b i	96,03	97,16	95,81
Sumatera Selatan	96,51	97,63	97,66
Bengkulu	98,62	99,23	99,09
Lampung	97,80	98,23	99,51
Kep. Bangka Belitung	99,99	98,60	100,00
Kep. Riau	98,90	99,44	100,00
DKI Jakarta	98,62	98,13	99,68
Jawa Barat	91,98	94,23	95,69
Jawa Tengah	99,08	99,62	99,93
DI Yogyakarta	100,00	100,00	99,47
Jawa Timur	98,27	99,03	98,89
Banten	92,10	95,67	97,56
B a l i	99,92	100,00	99,94
Nusa Tenggara Barat	98,60	98,17	99,15
Nusa Tenggara Timur	91,06	92,52	93,03
Kalimantan Barat	93,03	94,25	93,13
Kalimantan Tengah	89,71	92,59	93,60
Kalimantan Selatan	96,72	97,78	98,45
Kalimantan Timur	99,29	98,37	99,65
Kalimantan Utara	98,08	98,44	99,23
Sulawesi Utara	94,53	97,45	96,48
Sulawesi Tengah	94,92	95,48	95,71
Sulawesi Selatan	98,82	98,69	99,09
Sulawesi Tenggara	93,45	94,03	94,65
Gorontalo	98,60	98,33	97,83
Sulawesi Barat	94,56	95,60	94,06
Maluku	77,02	76,98	78,18
Maluku Utara	85,33	86,87	90,81
Papua Barat	80,10 ¹	78,56	81,73
Papua Barat Daya	–	82,35	84,38
Papua	79,18 ²	89,32	92,00
Papua Selatan	–	82,58	84,01
Papua Tengah	–	88,23	84,26
Papua Pegunungan	–	59,05	59,98
Indonesia	95,69	96,81	97,35

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.42
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak
Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir
Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik,
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	97,12	97,88	98,52
Perdesaan	93,87	95,40	95,69
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	95,52	94,37	93,48
20–24 Tahun	95,94	95,97	97,41
25–29 Tahun	96,01	97,31	97,83
30–34 Tahun	96,21	97,14	97,70
35–39 Tahun	94,92	97,19	97,18
40–44 Tahun	94,53	95,23	95,75
45–49 Tahun	92,08	93,51	94,25
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	83,25	87,29	83,83
SD/Sederajat	91,42	93,26	94,49
SMP/Sederajat	95,16	96,03	97,56
SMA/Sederajat	97,64	98,47	98,35
Perguruan Tinggi	99,08	99,24	99,33
Status Ekonomi			
Kuintil 1	92,14	94,59	94,55
Kuintil 2	95,22	95,83	97,25
Kuintil 3	96,95	97,56	98,37
Kuintil 4	97,64	98,85	98,50
Kuintil 5	98,62	99,05	99,52
Indonesia	95,69	96,81	97,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.43

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Provinsi	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	44,82	0,87	53,15	0,68
Sumatera Utara	41,17	1,52	54,55	0,66
Sumatera Barat	52,32	2,39	43,78	NA
R i a u	47,62	1,73	47,17	NA
J a m b i	41,99	2,00	51,23	NA
Sumatera Selatan	38,05	1,70	57,17	0,74
Bengkulu	37,41	3,20	57,76	NA
Lampung	37,00	1,64	60,30	0,56
Kep. Bangka Belitung	52,49	2,78	43,32	NA
Kep. Riau	59,13	0,32	40,31	NA
DKI Jakarta	59,00	NA	39,18	NA
Jawa Barat	37,83	1,64	56,09	NA
Jawa Tengah	54,73	1,13	43,31	0,76
DI Yogyakarta	55,33	NA	40,97	NA
Jawa Timur	49,37	1,88	46,60	1,04
Banten	46,10	1,51	49,68	NA
B a l i	77,42	NA	20,90	NA
Nusa Tenggara Barat	30,84	2,43	64,70	1,18
Nusa Tenggara Timur	26,89	3,11	61,68	1,34
Kalimantan Barat	30,82	1,89	58,76	1,67
Kalimantan Tengah	31,14	NA	59,67	2,08
Kalimantan Selatan	44,70	1,18	52,07	NA
Kalimantan Timur	54,29	NA	42,16	1,14
Kalimantan Utara	45,03	NA	49,62	NA
Sulawesi Utara	58,08	1,94	35,21	1,24
Sulawesi Tengah	40,71	3,43	48,86	2,70
Sulawesi Selatan	49,22	0,92	48,39	0,55
Sulawesi Tenggara	25,20	1,50	67,36	NA
Gorontalo	56,45	NA	38,06	2,82
Sulawesi Barat	28,10	1,70	63,41	0,84
Maluku	24,45	1,58	51,91	NA
Maluku Utara	28,45	3,15	57,05	2,16
Papua Barat	26,52	2,58	50,10	2,54
Papua Barat Daya	29,80	NA	49,88	2,74
Papua	40,47	NA	47,32	2,85
Papua Selatan	17,05	NA	60,72	5,52
Papua Tengah	29,46	NA	51,17	NA
Papua Pegunungan	3,98	NA	52,42	2,74
Indonesia	44,42	1,64	50,55	0,73



Lanjutan Tabel 4.43

Provinsi	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	NA	NA	–	–
Sumatera Utara	0,34	1,26	0,37	NA
Sumatera Barat	NA	0,70	0,36	–
R i a u	NA	2,67	NA	–
J a m b i	–	4,19	–	–
Sumatera Selatan	NA	1,85	–	NA
Bengkulu	–	0,91	–	–
Lampung	–	0,42	NA	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	–	–
Jawa Barat	NA	3,73	NA	–
Jawa Tengah	–	NA	NA	–
DI Yogyakarta	–	–	NA	–
Jawa Timur	NA	0,65	NA	NA
Banten	0,67	1,78	–	–
B a l i	NA	–	NA	–
Nusa Tenggara Barat	–	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Timur	NA	5,30	1,33	0,29
Kalimantan Barat	NA	6,31	–	–
Kalimantan Tengah	NA	6,18	NA	–
Kalimantan Selatan	–	1,55	–	–
Kalimantan Timur	–	NA	NA	–
Kalimantan Utara	NA	NA	–	–
Sulawesi Utara	NA	3,47	–	–
Sulawesi Tengah	NA	2,91	1,05	NA
Sulawesi Selatan	NA	0,77	NA	–
Sulawesi Tenggara	NA	4,90	NA	–
Gorontalo	NA	NA	–	–
Sulawesi Barat	NA	4,47	NA	NA
Maluku	1,42	18,86	NA	NA
Maluku Utara	NA	7,68	NA	NA
Papua Barat	3,60	7,79	4,32	NA
Papua Barat Daya	1,24	10,01	4,31	NA
Papua	2,25	3,86	1,89	–
Papua Selatan	NA	7,11	7,05	NA
Papua Tengah	–	5,43	4,92	5,39
Papua Pegunungan	6,96	18,46	13,20	NA
Indonesia	0,29	2,05	0,25	0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.44

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Karakteristik	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	51,42	1,41	45,20	0,48
Perdesaan	34,48	1,97	58,14	1,09
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	35,07	1,03	56,06	1,31
20–24 Tahun	40,01	1,88	54,71	0,82
25–29 Tahun	45,46	1,51	50,16	0,71
30–34 Tahun	46,01	1,67	49,34	0,69
35–39 Tahun	45,82	1,50	49,10	0,77
40–44 Tahun	42,92	2,12	50,21	0,50
45–49 Tahun	33,04	1,65	57,82	1,75
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	27,39	1,41	53,64	1,39
SD/Sederajat	30,12	1,95	61,48	0,94
SMP/Sederajat	36,27	1,73	58,74	0,83
SMA/Sederajat	47,24	1,58	48,95	0,59
Perguruan Tinggi	64,14	1,44	33,09	0,66
Status Ekonomi				
Kuintil 1	29,66	1,73	62,32	0,84
Kuintil 2	38,96	1,83	55,45	1,01
Kuintil 3	44,30	1,62	51,71	0,74
Kuintil 4	52,99	1,63	43,37	0,51
Kuintil 5	67,24	1,24	30,60	0,43
Indonesia	44,42	1,64	50,55	0,73



Lanjutan Tabel 4.44

Karakteristik	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,21	1,16	0,09	NA
Perdesaan	0,41	3,32	0,48	0,10
Kelompok Umur				
15–19 Tahun	NA	6,06	NA	NA
20–24 Tahun	0,10	2,15	0,24	NA
25–29 Tahun	0,24	1,53	0,35	0,04
30–34 Tahun	0,39	1,75	0,12	0,03
35–39 Tahun	0,34	2,21	0,21	0,07
40–44 Tahun	0,10	3,66	0,39	NA
45–49 Tahun	NA	3,22	0,60	NA
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,95	12,09	2,32	0,81
SD/Sederajat	0,37	4,77	0,30	0,06
SMP/Sederajat	0,19	1,99	0,25	NA
SMA/Sederajat	0,29	1,15	0,17	NA
Perguruan Tinggi	0,26	0,30	NA	NA
Status Ekonomi				
Kuintil 1	0,34	4,49	0,51	0,11
Kuintil 2	NA	2,02	0,24	0,05
Kuintil 3	NA	1,18	0,16	NA
Kuintil 4	0,28	1,05	0,16	NA
Kuintil 5	NA	0,33	0,04	NA
Indonesia	0,29	2,05	0,25	0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.45

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Provinsi dan Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025

Provinsi	<1 jam setelah lahir	1–23 jam setelah lahir	≥24 jam setelah lahir	Tidak Pernah	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,97	11,87	2,46	9,28	3,42
Sumatera Utara	62,86	14,61	3,88	15,21	3,45
Sumatera Barat	56,98	19,64	3,92	16,61	2,84
R i a u	63,23	19,52	2,91	9,43	4,91
J a m b i	66,36	14,02	2,01	13,83	3,77
Sumatera Selatan	76,89	13,59	2,03	5,69	1,79
Bengkulu	65,08	18,27	3,97	9,55	3,13
Lampung	67,97	16,02	2,97	10,52	2,51
Kep. Bangka Belitung	79,60	10,36	2,29	5,73	2,02
Kep. Riau	81,49	7,50	NA	4,62	NA
DKI Jakarta	76,00	10,04	2,32	7,32	4,33
Jawa Barat	73,60	11,91	3,80	9,09	1,59
Jawa Tengah	70,48	16,87	3,91	7,88	0,85
DI Yogyakarta	82,49	6,00	NA	9,32	NA
Jawa Timur	72,11	15,53	3,09	7,47	1,80
Banten	72,74	12,48	3,22	6,35	5,22
B a l i	60,24	29,08	2,49	7,02	1,17
Nusa Tenggara Barat	73,08	10,68	2,51	11,97	1,77
Nusa Tenggara Timur	69,65	17,47	4,37	6,67	1,84
Kalimantan Barat	62,60	18,57	4,05	11,41	3,37
Kalimantan Tengah	67,12	17,17	3,74	8,44	3,53
Kalimantan Selatan	69,41	17,35	2,39	8,79	2,06
Kalimantan Timur	76,90	13,48	3,08	4,92	1,62
Kalimantan Utara	61,22	16,68	3,44	14,48	4,18
Sulawesi Utara	58,16	17,78	4,97	14,61	4,49
Sulawesi Tengah	56,71	18,16	5,67	12,70	6,77
Sulawesi Selatan	67,50	16,49	4,35	8,69	2,97
Sulawesi Tenggara	63,76	18,18	2,99	12,17	2,89
Gorontalo	67,56	13,06	2,39	14,30	2,69
Sulawesi Barat	66,83	14,12	3,45	12,13	3,48
Maluku	52,98	14,31	4,70	22,82	5,19
Maluku Utara	64,74	16,21	3,34	8,19	7,51
Papua Barat	59,53	19,41	4,04	12,36	4,66
Papua Barat Daya	53,91	16,03	4,98	20,83	4,26
Papua	58,40	15,39	5,65	13,39	7,17
Papua Selatan	69,46	10,71	4,90	4,46	10,48
Papua Tengah	68,47	14,93	NA	NA	10,31
Papua Pegunungan	51,41	12,20	NA	17,69	17,00
Indonesia	69,95	14,77	3,42	9,29	2,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.46
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Karakteristik dan Waktu Pertama Kali Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2025

Karakteristik	<1 jam setelah lahir	1-23 jam setelah lahir	≥24 jam setelah lahir	Tidak Pernah	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	70,44	14,39	3,59	9,17	2,42
Perdesaan	69,25	15,32	3,18	9,47	2,78
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	67,76	13,16	2,88	13,06	3,15
20–24 Tahun	70,19	14,28	3,50	10,20	1,82
25–29 Tahun	69,62	14,00	4,15	9,51	2,72
30–34 Tahun	70,07	15,72	2,73	8,96	2,52
35–39 Tahun	70,18	14,77	3,18	9,13	2,74
40–44 Tahun	70,41	15,31	3,89	7,53	2,86
45–49 Tahun	69,26	16,09	2,15	9,36	3,13
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	62,45	15,66	2,42	15,14	4,33
SD/Sederajat	71,19	13,81	2,67	9,87	2,46
SMP/Sederajat	71,80	14,44	3,43	8,54	1,79
SMA/Sederajat	68,79	15,16	3,55	9,53	2,97
Perguruan Tinggi	70,04	15,05	3,90	8,44	2,57
Status Ekonomi					
Kuintil 1	71,44	13,83	2,87	9,63	2,23
Kuintil 2	69,05	15,13	3,52	9,31	3,00
Kuintil 3	69,19	14,56	3,63	10,12	2,49
Kuintil 4	69,48	15,68	3,98	8,82	2,03
Kuintil 5	70,27	15,06	3,27	8,14	3,26
Indonesia	69,95	14,77	3,42	9,29	2,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.47

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	15,12	14,94	16,16
Sumatera Utara	11,56	11,44	10,91
Sumatera Barat	10,02	10,10	12,76
R i a u	11,82	11,85	13,50
J a m b i	12,50	12,38	12,32
Sumatera Selatan	12,90	12,81	13,08
Bengkulu	11,11	11,09	11,43
Lampung	13,00	12,94	15,60
Kep. Bangka Belitung	11,42	11,19	6,05
Kep. Riau	10,94	10,90	4,90
DKI Jakarta	10,36	10,18	14,33
Jawa Barat	12,63	12,57	14,78
Jawa Tengah	9,91	9,90	13,94
DI Yogyakarta	11,22	11,17	14,83
Jawa Timur	11,51	11,46	12,30
Banten	14,95	14,85	12,93
B a l i	10,23	10,03	8,44
Nusa Tenggara Barat	12,08	11,96	10,83
Nusa Tenggara Timur	16,11	16,06	20,93
Kalimantan Barat	12,99	12,97	15,69
Kalimantan Tengah	14,80	14,51	16,29
Kalimantan Selatan	11,11	11,06	11,01
Kalimantan Timur	16,28	16,22	19,33
Kalimantan Utara	12,32	12,24	11,56
Sulawesi Utara	10,95	10,88	11,51
Sulawesi Tengah	16,89	16,91	15,63
Sulawesi Selatan	16,65	16,54	16,22
Sulawesi Tenggara	14,30	14,20	16,19
Gorontalo	12,68	12,59	19,73
Sulawesi Barat	13,89	13,79	20,93
Maluku	13,27	13,19	14,22
Maluku Utara	19,11	18,86	22,83
Papua Barat	14,88 ¹	14,64	22,39
Papua Barat Daya	–	17,62	16,44
Papua	19,87 ²	18,26	24,86
Papua Selatan	–	18,73	15,31
Papua Tengah	–	16,75	24,41
Papua Pegunungan	–	29,21	15,35
Indonesia	12,54	12,47	13,95

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.48
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak
Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir
Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	11,94	11,78	12,56
Perdesaan	13,30	13,37	15,92
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	14,37	13,43	18,20
20–24 Tahun	13,57	12,37	15,50
25–29 Tahun	11,75	11,61	13,27
30–34 Tahun	11,58	12,35	12,41
35–39 Tahun	13,95	12,63	13,54
40–44 Tahun	13,37	15,78	18,64
45–49 Tahun	12,75	15,48	21,14
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	15,98	17,29	18,58
SD/Sederajat	12,39	12,71	17,30
SMP/Sederajat	13,88	12,94	14,71
SMA/Sederajat	12,07	12,45	13,23
Perguruan Tinggi	10,96	10,73	10,97
Status Ekonomi			
Kuintil 1	13,09	13,05	15,42
Kuintil 2	12,63	13,74	15,10
Kuintil 3	13,59	12,23	13,38
Kuintil 4	11,40	11,91	13,50
Kuintil 5	11,44	10,27	11,11
Indonesia	12,54	12,47	13,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.49
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Merokok Tembakau selama
Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, 2023–2025

Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,48	0,64	0,82
Sumatera Utara	0,61	0,56	1,15
Sumatera Barat	0,95	0,90	1,08
R i a u	0,78	0,32	0,78
J a m b i	0,74	0,75	1,22
Sumatera Selatan	0,52	0,59	0,89
Bengkulu	0,85	0,99	1,29
Lampung	0,70	0,68	1,12
Kep. Bangka Belitung	0,61	0,82	0,79
Kep. Riau	1,11	0,62	1,10
DKI Jakarta	0,87	0,57	0,54
Jawa Barat	1,28	1,31	1,68
Jawa Tengah	0,57	0,56	0,69
DI Yogyakarta	0,33	0,59	0,70
Jawa Timur	0,67	0,56	1,01
Banten	0,74	0,60	0,90
B a l i	0,49	0,42	0,63
Nusa Tenggara Barat	0,38	0,31	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,73	0,66	1,20
Kalimantan Barat	1,35	1,16	1,64
Kalimantan Tengah	1,32	0,92	0,79
Kalimantan Selatan	0,23	0,39	0,53
Kalimantan Timur	0,86	0,49	0,96
Kalimantan Utara	0,58	0,65	1,16
Sulawesi Utara	2,18	1,88	1,67
Sulawesi Tengah	1,20	1,00	1,33
Sulawesi Selatan	0,29	0,82	1,00
Sulawesi Tenggara	0,47	0,54	0,32
Gorontalo	1,16	1,16	1,30
Sulawesi Barat	0,74	0,92	1,04
Maluku	0,59	0,77	1,38
Maluku Utara	1,50	1,57	1,89
Papua Barat	1,42 ¹	1,67	2,55
Papua Barat Daya	–	2,83	3,10
Papua	2,33 ²	0,96	2,00
Papua Selatan	–	5,55	5,23
Papua Tengah	–	0,55	1,41
Papua Pegunungan	–	3,12	4,07
Indonesia	0,83	0,79	1,10

Catatan : ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.50
Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Merokok Tembakau selama
Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,78	0,77	1,04
Perdesaan	0,90	0,81	1,19
Kelompok Umur			
15–19 Tahun	0,28	0,38	0,53
20–24 Tahun	0,88	0,80	1,11
25–29 Tahun	1,12	1,00	1,24
30–34 Tahun	0,74	0,65	1,10
35–39 Tahun	0,75	0,66	1,21
40–44 Tahun	0,96	1,04	1,22
45–49 Tahun	1,12	1,05	1,33
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	1,78	1,70	1,88
SD/Sederajat	0,90	0,94	1,21
SMP/Sederajat	0,71	0,70	1,18
SMA/Sederajat	0,82	0,78	1,06
Perguruan Tinggi	0,59	0,47	0,65
Status Ekonomi			
Kuintil 1	0,87	0,86	1,15
Kuintil 2	0,81	0,74	1,08
Kuintil 3	0,72	0,81	1,12
Kuintil 4	0,78	0,76	1,01
Kuintil 5	0,95	0,79	1,14
Indonesia	0,83	0,79	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 4.51

Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Rumah Sakit Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,36	0,67	20,01	2,04	4,68
Sumatera Utara	8,37	1,44	17,24	5,54	11,20
Sumatera Barat	5,34	0,89	16,70	3,59	7,08
Riau	16,79	2,48	14,74	11,94	21,65
Jambi	6,76	1,43	21,12	3,96	9,56
Sumatera Selatan	9,34	1,86	19,95	5,69	13,00
Bengkulu	5,07	1,64	32,33 ¹	1,86	8,29
Lampung	9,55	1,46	15,33	6,68	12,42
Kep. Bangka Belitung	7,35	1,91	25,98 ¹	3,61	11,10
Kep. Riau	27,59	6,37	23,09	15,10	40,08
DKI Jakarta	16,21	3,21	19,79	9,92	22,49
Jawa Barat	10,67	0,93	8,68	8,85	12,48
Jawa Tengah	9,66	0,76	7,86	8,18	11,15
DI Yogyakarta	19,95	3,03	15,17	14,02	25,88
Jawa Timur	7,16	0,72	10,08	5,74	8,57
Banten	16,71	2,40	14,34	12,01	21,41
Bali	13,03	2,01	15,44	9,09	16,97
Nusa Tenggara Barat	4,04	0,99	24,41	2,11	5,97
Nusa Tenggara Timur	5,59	1,02	18,25	3,59	7,59
Kalimantan Barat	5,61	1,38	24,63	2,90	8,32
Kalimantan Tengah	3,23	1,40	43,27 ¹	0,49	5,97
Kalimantan Selatan	7,70	1,99	25,78 ¹	3,81	11,60
Kalimantan Timur	10,17	1,92	18,86	6,41	13,93
Kalimantan Utara	5,08	2,47	48,75 ¹	0,23	9,93
Sulawesi Utara	8,72	2,03	23,34	4,73	12,71
Sulawesi Tengah	2,48	1,13	45,70 ¹	0,26	4,70
Sulawesi Selatan	4,50	0,89	19,84	2,75	6,25
Sulawesi Tenggara	3,75	1,51	40,35 ¹	0,78	6,71
Gorontalo	NA	–	77,74 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	65,97 ²	–	–
Maluku	14,17	4,09	28,90 ¹	6,14	22,20
Maluku Utara	NA	–	76,28 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,54 ²	–	–
Papua Barat Daya	9,66	4,17	43,18 ¹	1,48	17,83
Papua	NA	–	68,33 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	81,67 ²	–	–
Papua Tengah	23,06	7,66	33,23 ¹	8,04	38,08
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	9,49	0,34	3,60	8,82	10,16



Lanjutan Tabel 4.51

Provinsi	Estimate	Standard Error	Klinik		
			RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	7,55	1,12	14,81	5,36	9,74
Sumatera Utara	15,45	2,04	13,20	11,45	19,45
Sumatera Barat	10,47	1,31	12,50	7,91	13,04
Riau	29,96	3,20	10,67	23,70	36,23
Jambi	6,74	1,61	23,89	3,59	9,90
Sumatera Selatan	9,30	1,84	19,76	5,70	12,90
Bengkulu	9,41	1,78	18,95	5,92	12,91
Lampung	11,36	1,66	14,65	8,09	14,62
Kep. Bangka Belitung	11,35	2,60	22,95	6,25	16,45
Kep. Riau	31,66	6,11	19,31	19,68	43,64
DKI Jakarta	24,29	3,07	12,64	18,28	30,31
Jawa Barat	25,15	1,39	5,54	22,42	27,88
Jawa Tengah	10,90	0,82	7,48	9,30	12,50
DI Yogyakarta	16,83	2,59	15,38	11,76	21,90
Jawa Timur	13,46	1,12	8,30	11,27	15,64
Banten	30,46	3,35	11,00	23,89	37,03
Bali	9,99	2,48	24,81	5,13	14,85
Nusa Tenggara Barat	9,78	1,50	15,34	6,84	12,71
Nusa Tenggara Timur	6,48	1,25	19,25	4,04	8,93
Kalimantan Barat	3,36	0,89	26,57 ¹	1,61	5,11
Kalimantan Tengah	7,76	2,38	30,64 ¹	3,10	12,42
Kalimantan Selatan	6,99	2,26	32,37 ¹	2,56	11,43
Kalimantan Timur	20,51	3,35	16,32	13,95	27,07
Kalimantan Utara	NA	—	55,04 ²	—	—
Sulawesi Utara	1,71	0,80	46,59 ¹	0,15	3,28
Sulawesi Tengah	7,39	2,72	36,79 ¹	2,06	12,72
Sulawesi Selatan	9,78	1,87	19,09	6,12	13,44
Sulawesi Tenggara	7,06	1,89	26,74 ¹	3,36	10,77
Gorontalo	4,10	1,64	39,93 ¹	0,89	7,31
Sulawesi Barat	3,04	1,17	38,36 ¹	0,75	5,33
Maluku	3,83	1,67	43,51 ¹	0,56	7,09
Maluku Utara	NA	—	86,21 ²	—	—
Papua Barat	14,90	4,57	30,69 ¹	5,93	23,86
Papua Barat Daya	8,97	3,27	36,42 ¹	2,57	15,37
Papua	2,33	1,16	49,77 ¹	0,06	4,60
Papua Selatan	5,06	2,13	42,02 ¹	0,89	9,23
Papua Tengah	19,94	6,83	34,28 ¹	6,54	33,33
Papua Pegunungan	NA	—	102,38 ²	—	—
Indonesia	16,06	0,46	2,89	15,15	16,96



Lanjutan Tabel 4.51

Provinsi	UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,47	1,10	24,61	2,31	6,62
Sumatera Utara	0,83	0,39	47,16 ¹	0,06	1,59
Sumatera Barat	2,16	0,48	22,27	1,22	3,10
R i a u	3,13	1,32	42,09 ¹	0,55	5,71
J a m b i	2,87	1,27	44,15 ¹	0,39	5,36
Sumatera Selatan	5,18	1,93	37,26 ¹	1,40	8,97
Bengkulu	NA	–	71,72 ²	–	–
Lampung	0,96	0,44	45,44 ¹	0,11	1,82
Kep. Bangka Belitung	2,14	1,06	49,41 ¹	0,07	4,21
Kep. Riau	0,59	0,17	28,95 ¹	0,25	0,92
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	1,03	0,31	30,10 ¹	0,42	1,64
Jawa Tengah	1,57	0,35	22,54	0,88	2,27
DI Yogyakarta	NA	–	89,16 ²	–	–
Jawa Timur	1,97	0,38	19,49	1,22	2,72
Banten	NA	–	77,70 ²	–	–
B a l i	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	5,58	1,38	24,68	2,88	8,27
Nusa Tenggara Timur	13,81	1,46	10,57	10,95	16,67
Kalimantan Barat	3,31	1,02	30,79 ¹	1,31	5,32
Kalimantan Tengah	3,09	1,16	37,45 ¹	0,82	5,35
Kalimantan Selatan	10,99	2,58	23,49	5,93	16,05
Kalimantan Timur	2,80	0,86	30,64 ¹	1,12	4,47
Kalimantan Utara	NA	–	54,16 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	57,62 ²	–	–
Sulawesi Tengah	5,49	1,46	26,57 ¹	2,63	8,35
Sulawesi Selatan	2,08	0,49	23,44	1,12	3,04
Sulawesi Tenggara	5,35	2,07	38,67 ¹	1,29	9,40
Gorontalo	NA	–	57,18 ²	–	–
Sulawesi Barat	6,74	3,18	47,17 ¹	0,51	12,97
Maluku	4,43	1,56	35,20 ¹	1,38	7,49
Maluku Utara	NA	–	50,50 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	90,22 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	68,20 ²	–	–
Papua	NA	–	100,24 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	101,05 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	71,17 ²	–	–
Indonesia	2,15	0,15	7,10	1,85	2,45



Lanjutan Tabel 4.51

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,04	0,61	29,71 ¹	0,85	3,24
Sumatera Utara	2,19	0,71	32,65 ¹	0,79	3,58
Sumatera Barat	0,64	0,30	46,36 ¹	0,06	1,22
Riau	0,72	0,36	49,52 ¹	0,02	1,42
Jambi	NA	—	93,91 ²	—	—
Sumatera Selatan	0,70	0,30	43,54 ¹	0,10	1,29
Bengkulu	NA	—	76,63 ²	—	—
Lampung	NA	—	58,88 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	NA	—	100,18 ²	—	—
Kep. Riau	NA	—	75,46 ²	—	—
DKI Jakarta	NA	—	71,18 ²	—	—
Jawa Barat	0,54	0,15	28,49 ¹	0,24	0,85
Jawa Tengah	0,98	0,27	27,48 ¹	0,45	1,52
DI Yogyakarta	NA	—	100,23 ²	—	—
Jawa Timur	0,81	0,23	29,02 ¹	0,35	1,26
Banten	1,89	0,89	47,07 ¹	0,15	3,64
Bali	NA	—	85,26 ²	—	—
Nusa Tenggara Barat	1,42	0,55	38,68 ¹	0,34	2,50
Nusa Tenggara Timur	NA	—	100,04 ²	—	—
Kalimantan Barat	NA	—	53,57 ²	—	—
Kalimantan Tengah	NA	—	80,50 ²	—	—
Kalimantan Selatan	1,51	0,69	46,07 ¹	0,15	2,87
Kalimantan Timur	NA	—	100,29 ²	—	—
Kalimantan Utara	NA	—	98,23 ²	—	—
Sulawesi Utara	NA	—	79,99 ²	—	—
Sulawesi Tengah	NA	—	72,09 ²	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	57,25 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	2,53	1,00	39,63 ¹	0,57	4,50
Gorontalo	NA	—	85,61 ²	—	—
Sulawesi Barat	NA	—	64,45 ²	—	—
Maluku	NA	—	100,25 ²	—	—
Maluku Utara	NA	—	100,61 ²	—	—
Papua Barat	NA	—	100,13 ²	—	—
Papua Barat Daya	NA	—	100,09 ²	—	—
Papua	—	—	—	—	—
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	0,88	0,09	10,39	0,70	1,06



Lanjutan Tabel 4.51

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,74	0,56	32,28 ¹	0,64	2,85
Sumatera Utara	0,78	0,39	49,32 ¹	0,03	1,54
Sumatera Barat	0,47	0,16	34,19 ¹	0,15	0,78
R i a u	NA	–	82,78 ²	–	–
J a m b i	2,94	1,11	37,74 ¹	0,76	5,11
Sumatera Selatan	NA	–	50,51 ²	0,01	1,11
Bengkulu	NA	–	61,05 ²	–	–
Lampung	NA	–	59,56 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,55 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	71,18 ²	–	–
Jawa Barat	0,90	0,29	32,43 ¹	0,33	1,47
Jawa Tengah	1,09	0,34	30,95 ¹	0,43	1,75
DI Yogyakarta	NA	–	61,88 ²	–	–
Jawa Timur	0,91	0,26	28,21 ¹	0,41	1,42
Banten	NA	–	81,99 ²	–	–
B a l i	NA	–	91,34 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	52,81 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	52,14 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	62,82 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	54,99 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	76,24 ²	–	–
Kalimantan Utara	4,49	1,89	42,09 ¹	0,79	8,20
Sulawesi Utara	NA	–	67,01 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	58,14 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	55,26 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	61,06 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	100,26 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	54,46 ²	–	–
Maluku	NA	–	87,21 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	101,79 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	NA	–	100,18 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	101,57 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	3,16	3,13	99,00 ²	–	–
Indonesia	0,99	0,12	12,38	0,75	1,24

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.52
Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan tetapi Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Rawat Jalan, 2025

Provinsi	Tidak Punya Biaya Berobat				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	100,02 ²	–	–
Sumatera Utara	0,38	0,13	33,99 ¹	0,13	0,63
Sumatera Barat	NA	–	52,23 ²	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	0,69	0,32	46,70 ¹	0,06	1,32
Sumatera Selatan	NA	–	55,26 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	76,41 ²	–	–
Lampung	NA	–	86,00 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,32 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	0,30	0,13	42,08 ¹	0,05	0,55
Jawa Tengah	0,19	0,08	40,68 ¹	0,04	0,35
DI Yogyakarta	NA	–	71,49 ²	–	–
Jawa Timur	0,15	0,06	40,60 ¹	0,03	0,27
Banten	0,88	0,30	34,01 ¹	0,29	1,47
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,37	0,16	42,47 ¹	0,06	0,68
Nusa Tenggara Timur	NA	–	62,18 ²	–	–
Kalimantan Barat	0,28	0,12	44,49 ¹	0,04	0,52
Kalimantan Tengah	NA	–	54,91 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	92,53 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	99,61 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,10 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	51,48 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	55,31 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	58,48 ²	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	60,76 ²	–	–
Maluku	0,54	0,25	46,22 ¹	0,05	1,03
Maluku Utara	NA	–	69,13 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,47 ²	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	NA	–	62,12 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	96,94 ²	–	–
Indonesia	0,29	0,04	12,90	0,22	0,37



Lanjutan Tabel 4.52

Provinsi	Tidak Punya Biaya Transportasi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	100,02 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	69,41 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	70,76 ²	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	94,31 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	NA	–	100,03 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	100,04 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	84,15 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	80,85 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	NA	–	58,16 ²	–	–
Banten	NA	–	57,26 ²	–	–
Bali	NA	–	100,09 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	71,35 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	59,15 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	63,47 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	70,51 ²	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	93,91 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	0,04	~0	3,07	0,04	0,04
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	76,00 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	63,88 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	99,47 ²	–	–
Papua Barat Daya	0,30	0,14	47,01 ¹	0,02	0,58
Papua	NA	–	60,92 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	86,02 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	100,07 ²	–	–
Papua Pegunungan	2,44	1,14	46,76 ¹	0,20	4,68
Indonesia	0,12	0,03	23,10	0,06	0,17

Lanjutan Tabel 4.52

Provinsi	Tidak Ada yang Mendampingi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	—	99,97 ²	—	—
Sumatera Utara	NA	—	67,80 ²	—	—
Sumatera Barat	NA	—	100,04 ²	—	—
Riau	NA	—	100,17 ²	—	—
Jambi	—	—	—	—	—
Sumatera Selatan	NA	—	99,25 ²	—	—
Bengkulu	NA	—	100,04 ²	—	—
Lampung	NA	—	83,19 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	—	—	—
Kep. Riau	NA	—	99,39 ²	—	—
DKI Jakarta	—	—	—	—	—
Jawa Barat	NA	—	50,26 ²	—	—
Jawa Tengah	—	—	—	—	—
DI Yogyakarta	—	—	—	—	—
Jawa Timur	NA	—	96,84 ²	—	—
Banten	NA	—	100,01 ²	—	—
Bali	—	—	—	—	—
Nusa Tenggara Barat	NA	—	62,25 ²	—	—
Nusa Tenggara Timur	NA	—	88,75 ²	—	—
Kalimantan Barat	NA	—	99,99 ²	—	—
Kalimantan Tengah	—	—	—	—	—
Kalimantan Selatan	—	—	—	—	—
Kalimantan Timur	NA	—	98,87 ²	—	—
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Tengah	NA	—	100,07 ²	—	—
Sulawesi Selatan	—	—	—	—	—
Sulawesi Tenggara	—	—	—	—	—
Gorontalo	NA	—	100,17 ²	—	—
Sulawesi Barat	—	—	—	—	—
Maluku	—	—	—	—	—
Maluku Utara	—	—	—	—	—
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	—	—	—	—	—
Papua	NA	—	100,41 ²	—	—
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	NA	—	100,77 ²	—	—
Papua Pegunungan	NA	—	64,80 ²	—	—
Indonesia	0,15	0,04	29,40 ¹	0,06	0,23



Lanjutan Tabel 4.52

Provinsi	Tidak Ada Sarana Transportasi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	—	—	—	—	—
Sumatera Utara	—	—	—	—	—
Sumatera Barat	—	—	—	—	—
R i a u	NA	—	99,98 ²	—	—
J a m b i	NA	—	100,10 ²	—	—
Sumatera Selatan	NA	—	99,81 ²	—	—
Bengkulu	—	—	—	—	—
Lampung	NA	—	69,25 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	—	—	—
Kep. Riau	—	—	—	—	—
DKI Jakarta	—	—	—	—	—
Jawa Barat	—	—	—	—	—
Jawa Tengah	NA	—	84,01 ²	—	—
DI Yogyakarta	—	—	—	—	—
Jawa Timur	NA	—	100,01 ²	—	—
Banten	—	—	—	—	—
B a l i	—	—	—	—	—
Nusa Tenggara Barat	—	—	—	—	—
Nusa Tenggara Timur	0,40	0,17	42,73 ¹	0,06	0,73
Kalimantan Barat	0,45	0,21	46,51 ¹	0,04	0,86
Kalimantan Tengah	NA	—	100,10 ²	—	—
Kalimantan Selatan	NA	—	100,02 ²	—	—
Kalimantan Timur	—	—	—	—	—
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	NA	—	99,85 ²	—	—
Sulawesi Tengah	NA	—	100,05 ²	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	72,37 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	NA	—	84,47 ²	—	—
Gorontalo	—	—	—	—	—
Sulawesi Barat	—	—	—	—	—
Maluku	NA	—	100,14 ²	—	—
Maluku Utara	NA	—	100,05 ²	—	—
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	—	—	—	—	—
Papua	—	—	—	—	—
Papua Selatan	NA	—	60,81 ²	—	—
Papua Tengah	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	NA	—	74,34 ²	—	—
Indonesia	0,06	0,01	24,43	0,03	0,09



Lanjutan Tabel 4.52

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,61	0,48	29,59 ¹	0,68	2,54
Sumatera Utara	0,43	0,17	39,09 ¹	0,10	0,77
Sumatera Barat	NA	–	54,25 ²	–	–
Riau	NA	–	100,00 ²	–	–
Jambi	NA	–	51,07 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	58,88 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	90,16 ²	–	–
Lampung	NA	–	100,02 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	53,43 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,45 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	72,06 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	63,21 ²	–	–
Jawa Tengah	0,20	0,09	43,40 ¹	0,03	0,37
DI Yogyakarta	0,75	0,36	48,15 ¹	0,04	1,47
Jawa Timur	0,28	0,09	32,04 ¹	0,11	0,46
Banten	NA	–	53,55 ²	–	–
Bali	NA	–	100,05 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	65,20 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	0,43	0,18	42,56 ¹	0,07	0,79
Kalimantan Barat	NA	–	79,42 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	55,04 ²	–	–
Kalimantan Timur	1,67	0,77	46,21 ¹	0,16	3,17
Kalimantan Utara	NA	–	100,10 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	99,99 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	76,55 ²	–	–
Sulawesi Selatan	0,74	0,28	37,14 ¹	0,20	1,28
Sulawesi Tenggara	NA	–	71,03 ²	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	68,77 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	86,38 ²	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	94,42 ²	–	–
Indonesia	0,34	0,04	12,45	0,26	0,42



Lanjutan Tabel 4.52

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,60	0,63	24,20	1,37	3,83
Sumatera Utara	1,13	0,43	38,18 ¹	0,28	1,97
Sumatera Barat	NA	–	50,79 ²	–	–
R i a u	0,61	0,23	36,86 ¹	0,17	1,05
J a m b i	NA	–	54,13 ²	–	–
Sumatera Selatan	1,66	0,56	33,46 ¹	0,57	2,75
Bengkulu	1,22	0,43	35,03 ¹	0,38	2,05
Lampung	NA	–	50,27 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	70,72 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	61,28 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,16 ²	–	–
Jawa Barat	1,33	0,38	28,65 ¹	0,58	2,07
Jawa Tengah	0,72	0,16	22,34	0,41	1,04
DI Yogyakarta	1,33	0,65	49,16 ¹	0,05	2,61
Jawa Timur	1,23	0,28	22,36	0,69	1,77
Banten	1,59	0,45	28,49 ¹	0,70	2,48
B a l i	NA	–	59,18 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,86	0,36	41,90 ¹	0,15	1,58
Nusa Tenggara Timur	0,78	0,22	28,02 ¹	0,35	1,21
Kalimantan Barat	NA	–	99,99 ²	–	–
Kalimantan Tengah	0,46	0,22	49,31 ¹	0,02	0,90
Kalimantan Selatan	0,36	0,18	49,19 ¹	0,01	0,70
Kalimantan Timur	1,15	0,57	49,78 ¹	0,03	2,27
Kalimantan Utara	3,25	1,36	41,90 ¹	0,58	5,92
Sulawesi Utara	NA	–	60,42 ²	–	–
Sulawesi Tengah	1,15	0,42	36,09 ¹	0,34	1,96
Sulawesi Selatan	0,81	0,24	30,00 ¹	0,33	1,28
Sulawesi Tenggara	NA	–	70,94 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	50,35 ²	–	–
Sulawesi Barat	1,20	0,51	42,76 ¹	0,19	2,20
Maluku	NA	–	59,94 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	89,38 ²	–	–
Papua Barat	2,04	0,94	45,91 ¹	0,20	3,88
Papua Barat Daya	NA	–	100,39 ²	–	–
Papua	5,84	2,28	38,98 ¹	1,38	10,30
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	7,27	1,54	21,24	4,25	10,30
Papua Pegunungan	1,49	0,72	48,45 ¹	0,07	2,90
Indonesia	1,10	0,10	9,06	0,91	1,30

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.53
Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap
Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2025

Provinsi	Klinik				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,53	0,79	22,41	1,98	5,08
Sumatera Utara	10,37	1,83	17,65	6,78	13,96
Sumatera Barat	7,17	1,42	19,81	4,38	9,95
Riau	7,24	1,46	20,15	4,38	10,10
Jambi	9,17	2,16	23,55	4,94	13,41
Sumatera Selatan	10,44	1,83	17,53	6,85	14,03
Bengkulu	4,82	1,47	30,43 ¹	1,95	7,70
Lampung	16,55	2,23	13,49	12,17	20,93
Kep. Bangka Belitung	5,14	2,23	43,44 ¹	0,76	9,52
Kep. Riau	NA	–	65,17 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	72,52 ²	–	–
Jawa Barat	8,57	1,11	12,94	6,40	10,75
Jawa Tengah	4,75	0,62	13,10	3,53	5,98
DI Yogyakarta	2,87	1,35	47,09 ¹	0,22	5,52
Jawa Timur	8,48	1,12	13,23	6,28	10,68
Banten	7,68	2,31	30,08 ¹	3,15	12,20
Bali	NA	–	63,25 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	10,49	2,02	19,20	6,54	14,44
Nusa Tenggara Timur	1,54	0,75	48,46 ¹	0,08	3,01
Kalimantan Barat	7,34	1,97	26,77	3,49	11,20
Kalimantan Tengah	4,01	1,64	40,78 ¹	0,81	7,22
Kalimantan Selatan	6,12	2,18	35,67 ¹	1,84	10,40
Kalimantan Timur	7,21	2,32	32,12	2,67	11,75
Kalimantan Utara	NA	–	100,32 ²	–	–
Sulawesi Utara	2,56	0,87	33,81 ¹	0,86	4,26
Sulawesi Tengah	NA	–	65,23 ²	–	–
Sulawesi Selatan	4,28	0,74	17,42	2,82	5,74
Sulawesi Tenggara	3,42	0,83	24,30	1,79	5,06
Gorontalo	1,60	0,80	49,62 ¹	0,04	3,17
Sulawesi Barat	NA	–	77,69 ²	–	–
Maluku	NA	–	65,38 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,02 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	98,95 ²	–	–
Papua	NA	–	80,36 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	87,58 ²	–	–
Papua Tengah	19,69	6,52	33,10 ¹	6,91	32,46
Papua Pegunungan	NA	–	74,91 ²	–	–
Indonesia	6,80	0,34	4,94	6,14	7,46



Lanjutan Tabel 4.53

Provinsi	Praktik Bidan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,85	1,08	22,33	2,73	6,97
Sumatera Utara	9,69	1,89	19,47	5,99	13,39
Sumatera Barat	9,15	1,43	15,68	6,34	11,96
Riau	7,68	1,63	21,24	4,49	10,88
Jambi	4,85	1,50	31,00 ¹	1,90	7,80
Sumatera Selatan	13,21	2,36	17,88	8,58	17,84
Bengkulu	5,98	1,90	31,75 ¹	2,26	9,70
Lampung	8,46	1,63	19,22	5,27	11,65
Kep. Bangka Belitung	5,27	2,28	43,22 ¹	0,81	9,74
Kep. Riau	6,98	3,23	46,27 ¹	0,65	13,30
DKI Jakarta	3,07	1,41	46,05 ¹	0,30	5,85
Jawa Barat	5,36	0,92	17,19	3,55	7,16
Jawa Tengah	1,52	0,43	28,53 ¹	0,67	2,37
DI Yogyakarta	5,11	1,67	32,69 ¹	1,83	8,38
Jawa Timur	3,28	0,62	18,97	2,06	4,50
Banten	5,48	1,56	28,44 ¹	2,43	8,54
Bali	5,31	2,39	44,93 ¹	0,63	9,99
Nusa Tenggara Barat	2,99	1,10	36,86 ¹	0,83	5,15
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,86 ²	–	–
Kalimantan Barat	11,34	2,23	19,71	6,96	15,72
Kalimantan Tengah	1,43	0,71	49,63 ¹	0,04	2,82
Kalimantan Selatan	4,93	1,87	37,94 ¹	1,26	8,60
Kalimantan Timur	2,39	1,02	42,73 ¹	0,39	4,40
Kalimantan Utara	NA	–	53,80 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	55,24 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	2,06	0,61	29,65 ¹	0,86	3,25
Sulawesi Tenggara	NA	–	50,03 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	100,14 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	54,66 ²	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,85 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	100,37 ²	–	–
Papua	NA	–	85,31 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	81,73 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	4,52	0,27	6,06	3,99	5,06

Lanjutan Tabel 4.53

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	–	–	–
Sumatera Utara	NA	–	100,09 ²	–	–
Sumatera Barat	–	–	–	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	–	–	–	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	NA	–	100,17 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	–	78,17 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	95,85 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	–	–	–	–	–
Banten	NA	–	100,10 ²	–	–
Bali	NA	–	100,17 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,12 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,28 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	99,98 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,56 ²	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,56 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	0,06	0,03	43,91¹	0,01	0,12



Lanjutan Tabel 4.53

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	–	–	–
Sumatera Utara	–	–	–	–	–
Sumatera Barat	NA	–	100,03 ²	–	–
Riau	NA	–	95,17 ²	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	52,54 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	100,04 ²	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	–	70,58 ²	–	–
Jawa Tengah	–	–	–	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	–	–	–	–	–
Banten	–	–	–	–	–
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	57,94 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,20 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	99,80 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	100,13 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	0,10	0,03	30,67¹	0,04	0,16

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.54

**Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Pernah Rawat Inap
Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2025**

Provinsi	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	NA	–	64,20 ²	–	–
Perdesaan	NA	–	52,38 ²	–	–
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	NA	–	100,05 ²	–	–
20–24 Tahun	NA	–	96,76 ²	–	–
25–29 Tahun	NA	–	100,03 ²	–	–
30–34 Tahun	–	–	–	–	–
35–39 Tahun	NA	–	91,79 ²	–	–
40–44 Tahun	NA	–	80,79 ²	–	–
45–49 Tahun	NA	–	60,18 ²	–	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	99,95 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	55,77 ²	–	–
SMP/Sederajat	NA	–	77,63 ²	–	–
SMA/Sederajat	NA	–	100,00 ²	–	–
Perguruan Tinggi	NA	–	100,03 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	100,04 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	100,03 ²	–	–
Kuintil 3	NA	–	69,26 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	77,74 ²	–	–
Kuintil 5	NA	–	64,57 ²	–	–
Indonesia	0,06	0,03	43,91¹	0,01	0,12



Lanjutan Tabel 4.54

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	0,07	0,04	48,44 ¹	~0	0,14
Perdesaan	0,15	0,06	39,03 ¹	0,04	0,27
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	NA	–	100,01 ²	–	–
20–24 Tahun	NA	–	52,42 ²	–	–
25–29 Tahun	NA	–	59,97 ²	–	–
30–34 Tahun	NA	–	71,132	–	–
35–39 Tahun	NA	–	72,852	–	–
40–44 Tahun	NA	–	91,93 ²	–	–
45–49 Tahun	NA	–	78,06 ²	–	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	100,17 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	97,00 ²	–	–
SMP/Sederajat	NA	–	55,51 ²	–	–
SMA/Sederajat	0,12	0,05	46,63 ¹	0,01	0,23
Perguruan Tinggi	NA	–	56,48 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	57,92 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	68,22 ²	–	–
Kuintil 3	NA	–	100,03 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	53,93 ²	–	–
Kuintil 5	NA	–	58,92 ²	–	–
Indonesia	0,10	0,03	30,67¹	0,04	0,16

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.55
Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2025

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,24	0,11	8,61	1,03	1,45
Sumatera Utara	1,50	0,16	11,03	1,17	1,82
Sumatera Barat	8,24	0,30	3,66	7,65	8,83
R i a u	4,34	0,38	8,69	3,60	5,08
J a m b i	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	5,11	0,32	6,34	4,47	5,74
Bengkulu	0,63	0,13	21,18	0,37	0,90
Lampung	12,46	0,54	4,31	11,41	13,51
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	0,66	0,18	27,20 ¹	0,31	1,01
DKI Jakarta	NA	–	57,29 ²	–	–
Jawa Barat	0,58	0,11	18,68	0,37	0,80
Jawa Tengah	0,56	0,09	16,80	0,37	0,74
DI Yogyakarta	0,20	0,10	49,95 ¹	~0	0,39
Jawa Timur	1,82	0,14	7,94	1,53	2,10
Banten	2,71	0,20	7,53	2,31	3,10
B a l i	NA	–	54,20 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	10,68	0,44	4,13	9,82	11,54
Nusa Tenggara Timur	2,99	0,21	7,02	2,58	3,40
Kalimantan Barat	6,09	0,47	7,66	5,17	7,00
Kalimantan Tengah	1,26	0,24	19,37	0,78	1,73
Kalimantan Selatan	0,32	0,12	38,54 ¹	0,08	0,55
Kalimantan Timur	0,26	0,11	41,00 ¹	0,05	0,47
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	0,23	0,07	30,60 ¹	0,09	0,37
Sulawesi Tengah	2,25	0,29	12,69	1,69	2,81
Sulawesi Selatan	0,43	0,09	20,24	0,26	0,60
Sulawesi Tenggara	2,16	0,21	9,52	1,75	2,56
Gorontalo	0,12	0,06	48,89 ¹	0,01	0,24
Sulawesi Barat	20,23	1,10	5,45	18,07	22,40
Maluku	2,07	0,25	12,14	1,57	2,56
Maluku Utara	16,93	0,85	5,02	15,26	18,59
Papua Barat	1,24	0,11	8,61	1,03	1,45
Papua Barat Daya	1,50	0,16	11,03	1,17	1,82
Papua	8,24	0,30	3,66	7,65	8,83
Papua Selatan	4,34	0,38	8,69	3,60	5,08
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	5,11	0,32	6,34	4,47	5,74
Indonesia	2,67	0,05	1,71	2,58	2,76



Lanjutan Tabel 4.55

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,08	0,03	33,09 ¹	0,03	0,13
Sumatera Utara	0,24	0,06	24,34	0,12	0,35
Sumatera Barat	0,12	0,05	36,81 ¹	0,03	0,21
Riau	0,43	0,09	22,13	0,24	0,61
Jambi	0,51	0,15	28,52 ¹	0,23	0,80
Sumatera Selatan	0,41	0,10	25,33 ¹	0,21	0,61
Bengkulu	NA	–	79,05 ²	–	–
Lampung	0,25	0,09	36,84 ¹	0,07	0,44
Kep. Bangka Belitung	0,28	0,09	34,46 ¹	0,09	0,46
Kep. Riau	0,58	0,28	48,20 ¹	0,03	1,13
DKI Jakarta	1,78	0,30	17,04	1,18	2,37
Jawa Barat	1,02	0,13	12,48	0,77	1,27
Jawa Tengah	0,24	0,04	18,81	0,15	0,32
DI Yogyakarta	0,95	0,27	28,87 ¹	0,41	1,48
Jawa Timur	0,40	0,07	18,21	0,26	0,54
Banten	1,05	0,21	19,75	0,64	1,45
Bali	0,52	0,18	34,56 ¹	0,17	0,87
Nusa Tenggara Barat	0,19	0,06	34,82 ¹	0,06	0,31
Nusa Tenggara Timur	0,08	0,04	44,44 ¹	0,01	0,15
Kalimantan Barat	0,36	0,08	22,42	0,20	0,51
Kalimantan Tengah	0,30	0,09	30,40 ¹	0,12	0,48
Kalimantan Selatan	0,23	0,07	31,15 ¹	0,09	0,37
Kalimantan Timur	1,23	0,22	17,49	0,81	1,66
Kalimantan Utara	NA	–	94,95 ²	–	–
Sulawesi Utara	0,16	0,06	37,29 ¹	0,04	0,28
Sulawesi Tengah	NA	–	82,56 ²	–	–
Sulawesi Selatan	0,29	0,12	42,55 ¹	0,05	0,52
Sulawesi Tenggara	NA	–	58,06 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	57,60 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	51,28 ²	–	–
Maluku	NA	–	53,50 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	59,37 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	66,62 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	71,49 ²	–	–
Papua	0,17	0,08	47,87 ¹	0,01	0,34
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	NA	–	51,26 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	69,50 ²	–	–
Indonesia	0,54	0,03	6,04	0,48	0,61

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.56
Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Provinsi	Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,96	0,28	29,12 ¹	0,41	1,51
Sumatera Utara	NA	–	62,04 ²	–	–
Sumatera Barat	0,36	0,16	44,81 ¹	0,04	0,67
Riau	NA	–	50,76 ²	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	3,05	1,23	40,14 ¹	0,65	5,45
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	3,72	0,94	25,17 ¹	1,89	5,56
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,78 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	75,11 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	55,66 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	0,93	0,34	36,19 ¹	0,27	1,59
Banten	0,51	0,20	39,43 ¹	0,12	0,90
Bali	NA	–	87,09 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	1,22	0,54	44,32 ¹	0,16	2,28
Nusa Tenggara Timur	2,01	0,58	29,10 ¹	0,86	3,15
Kalimantan Barat	NA	–	60,24 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	100,05 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	93,40 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,22 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,20 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	52,07 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	55,59 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	1,66	0,76	45,74 ¹	0,17	3,15
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	7,63	2,41	31,60 ¹	2,90	12,35
Maluku	4,19	1,44	34,34 ¹	1,37	7,01
Maluku Utara	8,63	3,19	36,97 ¹	2,38	14,88
Papua Barat	5,26	1,57	29,81 ¹	2,19	8,34
Papua Barat Daya	NA	–	100,43 ²	–	–
Papua	10,69	2,34	21,85	6,11	15,27
Papua Selatan	11,13	3,43	30,83 ¹	4,40	17,85
Papua Tengah	NA	–	80,09 ²	–	–
Papua Pegunungan	10,76	2,72	25,30 ¹	5,43	16,10
Indonesia	0,83	0,10	12,33	0,63	1,03



Lanjutan Tabel 4.56

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	100,13 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	63,98 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	62,60 ²	–	–
R i a u	NA	–	99,79 ²	–	–
J a m b i	2,24	1,09	48,77 ¹	0,10	4,39
Sumatera Selatan	NA	–	77,45 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,20 ²	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	1,30	0,63	48,17 ¹	0,07	2,53
Jawa Barat	0,71	0,29	40,51 ¹	0,15	1,27
Jawa Tengah	0,16	0,08	47,63 ¹	0,01	0,31
DI Yogyakarta	NA	–	60,02 ²	–	–
Jawa Timur	NA	–	63,54 ²	–	–
Banten	NA	–	77,80 ²	–	–
B a l i	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,98 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,06 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	100,27 ²	–	–
Kalimantan Timur	2,15	1,00	46,63 ¹	0,19	4,12
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	100,53 ²	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	–	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	0,47	0,09	19,30	0,29	0,65



Lanjutan Tabel 4.56

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	NA	–	61,64 ²	–	–
Sumatera Utara	1,55	0,59	38,35 ¹	0,38	2,71
Sumatera Barat	0,86	0,42	48,49 ¹	0,04	1,68
Riau	NA	–	63,03 ²	–	–
Jambi	NA	–	70,95 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	79,02 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	62,75 ²	–	–
Lampung	NA	–	50,54 ²	0,01	1,81
Kep. Bangka Belitung	NA	–	71,59 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	51,84 ²	–	–
DKI Jakarta	2,65	1,25	47,26 ¹	0,20	5,11
Jawa Barat	2,49	0,46	18,53	1,59	3,40
Jawa Tengah	1,01	0,26	26,11 ¹	0,49	1,52
DI Yogyakarta	2,28	0,91	39,92 ¹	0,50	4,06
Jawa Timur	1,97	0,47	23,67	1,06	2,89
Banten	2,53	0,71	28,21 ¹	1,13	3,92
Bali	NA	–	100,10 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,85	0,40	46,67 ¹	0,07	1,62
Nusa Tenggara Timur	NA	–	99,98 ²	–	–
Kalimantan Barat	0,69	0,34	48,60 ¹	0,03	1,35
Kalimantan Tengah	NA	–	64,00 ²	–	–
Kalimantan Selatan	1,53	0,66	43,04 ¹	0,24	2,83
Kalimantan Timur	3,98	1,39	34,80 ¹	1,27	6,69
Kalimantan Utara	3,74	1,83	49,05 ¹	0,14	7,33
Sulawesi Utara	NA	–	67,90 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	91,19 ²	–	–
Sulawesi Selatan	1,68	0,49	29,46 ¹	0,71	2,65
Sulawesi Tenggara	NA	–	59,55 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	70,58 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	72,01 ²	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	NA	–	61,67 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	NA	–	100,78 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	102,30 ²	–	–
Papua Tengah	15,91	6,86	43,15 ¹	2,45	29,36
Papua Pegunungan	NA	–	100,64 ²	–	–
Indonesia	1,69	0,15	9,13	1,39	1,99

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.57

Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	0,72	0,15	20,18	0,43	1,00
Perdesaan	NA	–	56,16 ²	–	–
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	NA	–	50,02 ²	–	–
20–24 Tahun	NA	–	89,04 ²	–	–
25–29 Tahun	NA	–	57,57 ²	–	–
30–34 Tahun	1,17	0,45	38,881	0,28	2,06
35–39 Tahun	0,64	0,20	31,631	0,24	1,03
40–44 Tahun	0,38	0,13	34,321	0,12	0,63
45–49 Tahun	NA	–	54,33 ²	–	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	100,06 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	59,35 ²	–	–
SMP/Sederajat	NA	–	55,392	–	–
SMA/Sederajat	0,25	0,09	34,65 ¹	0,08	0,42
Perguruan Tinggi	2,94	0,70	23,95	1,56	4,32
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	85,73 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	76,88 ²	–	–
Kuintil 3	NA	–	100,03 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	55,07 ²	–	–
Kuintil 5	1,61	0,34	21,27	0,94	2,28
Indonesia	0,47	0,09	19,30	0,29	0,65

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.58
Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan dan Provinsi, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,19	2,74	44,25 ¹	0,82	11,57
Sumatera Utara	3,51	1,57	44,74 ¹	0,43	6,58
Sumatera Barat	NA	–	68,32 ²	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	5,60	2,46	43,86 ¹	0,78	10,41
Sumatera Selatan	15,40	3,77	24,47	8,01	22,79
Bengkulu	2,56	1,19	46,51 ¹	0,23	4,89
Lampung	1,87	0,75	40,34 ¹	0,39	3,35
Kep. Bangka Belitung	NA	–	64,21 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	59,15 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	71,18 ²	–	–
Jawa Barat	3,48	0,89	25,52 ¹	1,74	5,23
Jawa Tengah	4,43	1,24	27,91 ¹	2,00	6,85
DI Yogyakarta	NA	–	101,27 ²	–	–
Jawa Timur	6,76	1,12	16,57	4,56	8,95
Banten	NA	–	69,10 ²	–	–
Bali	NA	–	100,26 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	3,30	1,34	40,50 ¹	0,68	5,93
Nusa Tenggara Timur	NA	–	68,41 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	55,60 ²	–	–
Kalimantan Tengah	12,08	5,06	41,88 ¹	2,16	22,00
Kalimantan Selatan	NA	–	80,10 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	50,45 ²	0,08	14,82
Kalimantan Utara	5,35	0,78	14,49	3,83	6,87
Sulawesi Utara	NA	–	59,63 ²	–	–
Sulawesi Tengah	9,80	6,71	68,48 ²	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	–	–	–
Sulawesi Tenggara	16,68	7,28	43,65 ¹	2,41	30,96
Gorontalo	NA	–	78,94 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	2,55	0,08	3,12	2,40	2,71
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	6,75	3,31	49,02 ¹	0,26	13,24
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	97,84	0,68	0,70	96,51	99,18
Indonesia	4,54	0,44	9,64	3,68	5,40



Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,37	0,54	39,11 ¹	0,32	2,43
Sumatera Utara	NA	–	63,29 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	80,21 ²	–	–
R i a u	NA	–	64,22 ²	–	–
J a m b i	NA	–	99,47 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	96,96 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	NA	–	100,44 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	NA	–	78,42 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,81 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	79,83 ²	–	–
Jawa Tengah	–	–	–	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	NA	–	64,54 ²	–	–
Banten	NA	–	59,60 ²	–	–
B a l i	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	100,21 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	51,61 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	82,48 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	101,74 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	2,15	0,52	24,24	1,13	3,18
Sulawesi Selatan	–	–	–	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	NA	–	100,24 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	2,16	0,68	31,58 ¹	0,82	3,49
Indonesia	0,92	0,25	27,07¹	0,43	1,41

Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Kartu JKN Tidak Aktif				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	99,96 ²	–	–
Sumatera Utara	1,80	0,85	47,24 ¹	0,13	3,46
Sumatera Barat	8,79	2,20	25,03 ¹	4,48	13,11
Riau	NA	–	64,13 ²	–	–
Jambi	11,26	3,28	29,18 ¹	4,82	17,70
Sumatera Selatan	4,20	1,73	41,28 ¹	0,80	7,60
Bengkulu	4,53	1,98	43,58 ¹	0,66	8,40
Lampung	4,93	2,23	45,20 ¹	0,56	9,29
Kep. Bangka Belitung	6,44	3,00	46,60 ¹	0,56	12,32
Kep. Riau	NA	–	91,17 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	7,38	1,42	19,26	4,59	10,17
Jawa Tengah	4,36	0,90	20,70	2,59	6,13
DI Yogyakarta	NA	–	58,18 ²	–	–
Jawa Timur	5,66	1,26	22,20	3,20	8,13
Banten	NA	–	53,48 ²	–	–
Bali	NA	–	53,49 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	4,11	1,76	42,87 ¹	0,66	7,57
Nusa Tenggara Timur	16,99	5,77	33,98 ¹	5,67	28,30
Kalimantan Barat	4,28	1,89	44,15 ¹	0,58	7,98
Kalimantan Tengah	11,79	4,19	35,56 ¹	3,57	20,01
Kalimantan Selatan	NA	–	58,84 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	71,40 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	80,85 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	71,03 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	100,04 ²	–	–
Sulawesi Selatan	5,62	2,49	44,29 ¹	0,74	10,49
Sulawesi Tenggara	NA	–	99,48 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	77,97 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	102,19 ²	–	–
Maluku	NA	–	63,34 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	96,30 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	4,76	0,53	11,13	3,72	5,79
Papua Selatan	NA	–	111,42 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	5,15	0,45	8,77	4,27	6,04



Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	100,52 ²	–	–
Sumatera Utara	NA	–	52,99 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	62,40 ²	–	–
R i a u	NA	–	99,80 ²	–	–
J a m b i	NA	–	101,06 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	77,48 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	NA	–	72,35 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	100,42 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	97,98 ²	–	–
DKI Jakarta	8,38	3,98	47,51 ¹	0,57	16,19
Jawa Barat	4,07	1,32	32,52 ¹	1,48	6,66
Jawa Tengah	NA	–	54,15 ²	–	–
DI Yogyakarta	11,63	4,99	42,91 ¹	1,85	21,41
Jawa Timur	NA	–	51,03 ²	–	–
Banten	NA	–	53,16 ²	–	–
B a l i	NA	–	100,26 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	50,89 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,54 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	63,06 ²	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	68,36 ²	–	–
Kalimantan Timur	20,98	5,07	24,19	11,03	30,93
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	4,24	0,73	17,25	2,80	5,67
Sulawesi Selatan	NA	–	66,73 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	97,46 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,59 ²	–	–
Sulawesi Barat	1,08	0,12	10,90	0,85	1,31
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	4,03	0,67	16,62	2,72	5,35
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	NA	–	135,35 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	2,07	0,65	31,58 ¹	0,79	3,36
Indonesia	2,80	0,43	15,24	1,96	3,63



Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	5,42	1,99	36,74 ¹	1,51	9,32
Sumatera Utara	3,80	1,42	37,36 ¹	1,02	6,59
Sumatera Barat	6,62	1,74	26,29 ¹	3,21	10,03
Riau	10,39	4,12	39,62 ¹	2,32	18,46
Jambi	11,29	4,02	35,57 ¹	3,42	19,16
Sumatera Selatan	NA	—	55,14 ²	—	—
Bengkulu	7,35	2,84	38,66 ¹	1,78	12,92
Lampung	4,01	1,61	40,20 ¹	0,85	7,16
Kep. Bangka Belitung	NA	—	100,44 ²	—	—
Kep. Riau	NA	—	103,47 ²	—	—
DKI Jakarta	14,96	7,28	48,64 ¹	0,69	29,22
Jawa Barat	6,14	1,50	24,48	3,19	9,09
Jawa Tengah	7,05	1,15	16,32	4,79	9,30
DI Yogyakarta	10,80	5,21	48,27 ¹	0,58	21,01
Jawa Timur	7,56	1,38	18,30	4,85	10,27
Banten	7,84	3,22	41,10 ¹	1,52	14,15
Bali	7,82	3,03	38,70 ¹	1,89	13,75
Nusa Tenggara Barat	1,72	0,75	43,53 ¹	0,25	3,20
Nusa Tenggara Timur	16,48	5,15	31,22 ¹	6,39	26,57
Kalimantan Barat	NA	—	53,26 ²	—	—
Kalimantan Tengah	NA	—	51,10 ²	—	—
Kalimantan Selatan	7,94	3,37	42,49 ¹	1,33	14,56
Kalimantan Timur	NA	—	54,60 ²	—	—
Kalimantan Utara	NA	—	87,24 ²	—	—
Sulawesi Utara	NA	—	52,01 ²	—	—
Sulawesi Tengah	NA	—	54,04 ²	—	—
Sulawesi Selatan	NA	—	52,96 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	NA	—	74,61 ²	—	—
Gorontalo	4,99	2,22	44,51 ¹	0,64	9,35
Sulawesi Barat	NA	—	104,22 ²	—	—
Maluku	NA	—	67,64 ²	—	—
Maluku Utara	7,35	1,22	16,62	4,95	9,74
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	NA	—	78,27 ²	—	—
Papua	0,22	0,02	11,13	0,17	0,26
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	6,53	0,54	8,24	5,48	7,59



Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden				
	<i>Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	<i>RSE</i>	<i>95% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,98	0,53	26,76 ¹	0,94	3,03
Sumatera Utara	12,90	2,34	18,14	8,31	17,49
Sumatera Barat	8,66	2,30	26,60 ¹	4,14	13,17
R i a u	14,06	6,17	43,90 ¹	1,96	26,16
J a m b i	20,32	5,47	26,93 ¹	9,59	31,05
Sumatera Selatan	19,43	3,52	18,10	12,54	26,33
Bengkulu	8,71	3,36	38,55 ¹	2,13	15,28
Lampung	17,51	3,44	19,65	10,76	24,25
Kep. Bangka Belitung	NA	–	64,86 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	71,97 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	95,48 ²	–	–
Jawa Barat	11,26	1,78	15,85	7,76	14,76
Jawa Tengah	8,32	1,34	16,14	5,69	10,95
DI Yogyakarta	NA	–	99,02 ²	–	–
Jawa Timur	6,22	1,20	19,24	3,87	8,56
Banten	9,34	3,69	39,47 ¹	2,11	16,56
B a l i	14,93	3,49	23,37	8,09	21,76
Nusa Tenggara Barat	3,28	1,29	39,35 ¹	0,75	5,81
Nusa Tenggara Timur	5,39	2,67	49,62 ¹	0,15	10,63
Kalimantan Barat	3,25	1,47	45,32 ¹	0,36	6,14
Kalimantan Tengah	5,88	2,88	49,05 ¹	0,23	11,53
Kalimantan Selatan	NA	–	77,62 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	84,45 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	58,87 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	60,33 ²	–	–
Sulawesi Selatan	10,50	2,89	27,49 ¹	4,84	16,16
Sulawesi Tenggara	NA	–	100,83 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	51,98 ²	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	98,32 ²	–	–
Maluku Utara	24,50	7,66	31,26 ¹	9,48	39,52
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	74,17 ²	–	–
Papua	15,65	1,74	11,13	12,23	19,06
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	NA	–	60,04 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	8,94	0,58	6,46	7,81	10,07

Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,49	2,16	28,80 ¹	3,26	11,72
Sumatera Utara	5,46	1,29	23,70	2,92	8,00
Sumatera Barat	18,87	2,67	14,13	13,64	24,10
Riau	9,72	3,21	33,06 ¹	3,42	16,02
Jambi	16,12	4,83	29,95 ¹	6,66	25,59
Sumatera Selatan	9,28	2,37	25,54 ¹	4,63	13,92
Bengkulu	24,64	4,34	17,60	16,14	33,14
Lampung	15,04	3,09	20,51	9,00	21,09
Kep. Bangka Belitung	10,12	3,05	30,20 ¹	4,13	16,11
Kep. Riau	—	—	—	—	—
DKI Jakarta	NA	—	91,56 ²	—	—
Jawa Barat	11,84	2,00	16,90	7,92	15,76
Jawa Tengah	11,63	1,67	14,35	8,36	14,90
DI Yogyakarta	9,58	3,54	36,88 ¹	2,65	16,52
Jawa Timur	12,08	1,49	12,31	9,16	14,99
Banten	5,17	2,49	48,18 ¹	0,29	10,05
Bali	6,78	1,88	27,66 ¹	3,11	10,46
Nusa Tenggara Barat	26,97	3,58	13,28	19,95	33,99
Nusa Tenggara Timur	5,74	2,72	47,42 ¹	0,40	11,07
Kalimantan Barat	12,17	3,83	31,52 ¹	4,65	19,69
Kalimantan Tengah	13,65	5,12	37,53 ¹	3,61	23,69
Kalimantan Selatan	16,56	4,58	27,67 ¹	7,58	25,54
Kalimantan Timur	12,02	4,31	35,84 ¹	3,57	20,47
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	34,35	5,82	16,96	22,93	45,77
Sulawesi Tengah	30,82	8,09	26,23 ¹	14,97	46,68
Sulawesi Selatan	NA	—	79,85 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	18,55	7,25	39,11 ¹	4,33	32,77
Gorontalo	11,98	3,79	31,66 ¹	4,54	19,41
Sulawesi Barat	NA	—	99,63 ²	—	—
Maluku	NA	—	67,76 ²	—	—
Maluku Utara	NA	—	78,81 ²	—	—
Papua Barat	5,45	0,17	3,12	5,12	5,79
Papua Barat Daya	NA	—	94,45 ²	—	—
Papua	16,41	3,96	24,12	8,65	24,17
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	12,11	3,37	27,81 ¹	5,51	18,71
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	11,90	0,64	5,41	10,63	13,16



Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,73	4,02	8,61	38,84	54,62
Sumatera Utara	44,30	3,93	8,86	36,61	52,00
Sumatera Barat	30,15	3,27	10,84	23,74	36,55
Riau	32,73	7,19	21,96	18,64	46,82
Jambi	28,91	5,73	19,83	17,67	40,15
Sumatera Selatan	20,85	3,68	17,66	13,63	28,07
Bengkulu	14,70	3,38	22,98	8,08	21,33
Lampung	28,26	4,47	15,82	19,50	37,02
Kep. Bangka Belitung	40,09	6,69	16,69	26,98	53,21
Kep. Riau	20,65	6,82	33,04 ¹	7,27	34,03
DKI Jakarta	39,22	8,01	20,43	23,51	54,93
Jawa Barat	36,59	3,14	8,57	30,45	42,74
Jawa Tengah	34,25	2,56	7,47	29,23	39,26
DI Yogyakarta	39,06	6,73	17,22	25,88	52,25
Jawa Timur	29,94	2,22	7,42	25,59	34,30
Banten	56,93	7,86	13,81	41,52	72,34
Bali	48,59	4,89	10,05	39,01	58,17
Nusa Tenggara Barat	15,94	2,97	18,62	10,12	21,76
Nusa Tenggara Timur	10,83	3,19	29,46 ¹	4,57	17,08
Kalimantan Barat	39,42	6,58	16,70	26,52	52,33
Kalimantan Tengah	31,11	6,26	20,11	18,85	43,38
Kalimantan Selatan	44,70	6,19	13,85	32,56	56,84
Kalimantan Timur	38,28	7,49	19,57	23,59	52,97
Kalimantan Utara	62,11	12,69	20,43	37,23	86,99
Sulawesi Utara	27,06	4,98	18,39	17,30	36,81
Sulawesi Tengah	21,82	8,58	39,34 ¹	4,99	38,64
Sulawesi Selatan	46,47	6,08	13,08	34,55	58,39
Sulawesi Tenggara	15,53	6,00	38,62 ¹	3,77	27,28
Gorontalo	14,80	4,89	33,02 ¹	5,22	24,39
Sulawesi Barat	48,93	10,44	21,33	28,46	69,39
Maluku	37,29	13,70	36,75 ¹	10,42	64,15
Maluku Utara	NA	–	63,15 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	53,31 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	55,57 ²	–	–
Papua	NA	–	61,30 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	89,00 ²	–	–
Papua Tengah	58,51	19,44	33,23 ¹	20,39	96,63
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	34,20	1,05	3,08	32,14	36,26

Lanjutan Tabel 4.58

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	33,57	3,80	11,33	26,11	41,02
Sumatera Utara	29,88	3,52	11,78	22,98	36,78
Sumatera Barat	25,81	3,11	12,04	19,71	31,90
Riau	21,86	5,26	24,05	11,55	32,17
Jambi	8,18	3,80	46,45 ¹	0,73	15,63
Sumatera Selatan	28,54	4,28	15,00	20,15	36,94
Bengkulu	39,51	4,90	12,41	29,90	49,13
Lampung	29,03	3,95	13,60	21,29	36,77
Kep. Bangka Belitung	29,68	6,13	20,67	17,66	41,71
Kep. Riau	NA	—	57,40 ²	—	—
DKI Jakarta	22,58	6,71	29,71 ¹	9,43	35,74
Jawa Barat	22,35	2,66	11,91	17,13	27,58
Jawa Tengah	30,89	2,58	8,35	25,83	35,94
DI Yogyakarta	28,73	5,87	20,42	17,23	40,24
Jawa Timur	31,22	2,21	7,09	26,88	35,56
Banten	10,92	3,51	32,15 ¹	4,04	17,80
Bali	24,07	4,16	17,27	15,92	32,22
Nusa Tenggara Barat	46,44	4,19	9,01	38,23	54,65
Nusa Tenggara Timur	40,30	5,65	14,03	29,21	51,38
Kalimantan Barat	28,08	6,51	23,19	15,31	40,85
Kalimantan Tengah	20,47	5,12	25,02 ¹	10,43	30,51
Kalimantan Selatan	21,84	5,10	23,37	11,84	31,85
Kalimantan Timur	10,71	5,26	49,14 ¹	0,39	21,03
Kalimantan Utara	NA	—	55,24 ²	—	—
Sulawesi Utara	27,64	5,79	20,93	16,30	38,99
Sulawesi Tengah	28,15	8,16	28,98 ¹	12,15	44,14
Sulawesi Selatan	35,46	6,00	16,92	23,70	47,23
Sulawesi Tenggara	38,25	9,19	24,03	20,23	56,26
Gorontalo	57,65	6,48	11,25	44,94	70,37
Sulawesi Barat	47,30	10,67	22,56	26,38	68,21
Maluku	38,64	12,70	32,88 ¹	13,73	63,54
Maluku Utara	NA	—	51,91 ²	—	—
Papua Barat	77,55	7,69	9,92	62,47	92,63
Papua Barat Daya	55,05	14,52	26,37 ¹	26,59	83,52
Papua	53,49	6,60	12,33	40,56	66,42
Papua Selatan	63,17	23,16	36,66 ¹	17,77	108,58
Papua Tengah	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	28,34	0,94	3,33	26,49	30,19

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.59

Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Jalan dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	0,61	0,27	44,01 ¹	0,08	1,13
Perdesaan	1,26	0,43	34,13 ¹	0,42	2,10
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	NA	–	58,21 ²	–	–
20–24 Tahun	2,61	1,25	47,79 ¹	0,16	5,05
25–29 Tahun	NA	–	73,14 ²	–	–
30–34 Tahun	NA	–	55,88 ²	–	–
35–39 Tahun	NA	–	52,07 ²	–	–
40–44 Tahun	0,94	0,31	33,04 ¹	0,33	1,54
45–49 Tahun	NA	–	51,10 ²	–	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	87,15 ²	–	–
SD/Sederajat	0,94	0,26	27,52 ¹	0,43	1,45
SMP/Sederajat	0,72	0,28	38,66 ¹	0,17	1,26
SMA/Sederajat	NA	–	55,66 ²	–	–
Perguruan Tinggi	NA	–	66,30 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	0,75	0,32	43,27 ¹	0,11	1,38
Kuintil 2	2,36	1,15	48,59 ¹	0,11	4,62
Kuintil 3	NA	–	52,81 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	54,14 ²	–	–
Kuintil 5	NA	–	53,03 ²	–	–
Indonesia	0,92	0,25	27,07¹	0,43	1,41

Lanjutan Tabel 4.59

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	4,95	0,79	16,00	3,40	6,50
Perdesaan	0,50	0,24	47,35 ¹	0,04	0,97
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	1,94	0,87	44,63 ¹	0,24	3,64
20–24 Tahun	3,19	1,25	39,22 ¹	0,74	5,65
25–29 Tahun	3,69	1,27	34,43 ¹	1,20	6,18
30–34 Tahun	6,18	1,86	30,08 ¹	2,53	9,82
35–39 Tahun	2,74	0,76	27,85 ¹	1,24	4,23
40–44 Tahun	1,54	0,51	33,40 ¹	0,53	2,54
45–49 Tahun	0,81	0,38	46,92 ¹	0,06	1,55
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	71,01 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	57,54 ²	–	–
SMP/Sederajat	1,12	0,41	36,80 ¹	0,31	1,92
SMA/Sederajat	2,49	0,72	29,09 ¹	1,07	3,90
Perguruan Tinggi	13,48	2,61	19,38	8,36	18,60
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	76,57 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	52,092	–	–
Kuintil 3	NA	–	52,872	–	–
Kuintil 4	2,47	1,01	40,77 ¹	0,50	4,45
Kuintil 5	7,83	1,36	17,36	5,17	10,50
Indonesia	2,80	0,43	15,24	1,96	3,63

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.60

Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Alasan Tidak Menggunakan JKN/Jamkesda Untuk Rawat Inap dan Provinsi, 2025

Provinsi	Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	99,62 ²	–	–
Sumatera Utara	1,64	0,58	35,42 ¹	0,50	2,78
Sumatera Barat	NA	–	73,13 ²	–	–
R i a u	NA	–	99,04 ²	–	–
J a m b i	NA	–	61,76 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	61,69 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	NA	–	99,10 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	101,05 ²	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	103,57 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	74,32 ²	–	–
Jawa Tengah	4,85	2,08	42,83 ¹	0,77	8,92
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	13,84	4,14	29,89 ¹	5,71	21,97
Banten	–	–	–	–	–
B a l i	NA	–	100,89 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	100,36 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	101,14 ²	–	–
Kalimantan Selatan	NA	–	98,25 ²	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	97,20 ²	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	79,06 ²	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	–	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	–	104,35 ²	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	53,57 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	NA	–	112,94 ²	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	4,74	0,81	17,02	3,16	6,33



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Tidak Punya Biaya (Transportasi, dll.)				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	—	—	—	—	—
Sumatera Utara	NA	—	100,64 ²	—	—
Sumatera Barat	—	—	—	—	—
Riau	—	—	—	—	—
Jambi	—	—	—	—	—
Sumatera Selatan	—	—	55,47 ²	—	—
Bengkulu	—	—	—	—	—
Lampung	—	—	—	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	—	—	—
Kep. Riau	—	—	—	—	—
DKI Jakarta	—	—	—	—	—
Jawa Barat	—	—	—	—	—
Jawa Tengah	—	—	—	—	—
DI Yogyakarta	—	—	—	—	—
Jawa Timur	NA	—	100,20 ²	—	—
Banten	—	—	—	—	—
Bali	—	—	—	—	—
Nusa Tenggara Barat	—	—	—	—	—
Nusa Tenggara Timur	—	—	—	—	—
Kalimantan Barat	—	—	—	—	—
Kalimantan Tengah	—	—	—	—	—
Kalimantan Selatan	—	—	—	—	—
Kalimantan Timur	—	—	—	—	—
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Tengah	0,43	0,11	25,98 ¹	0,21	0,65
Sulawesi Selatan	—	—	—	—	—
Sulawesi Tenggara	—	—	—	—	—
Gorontalo	—	—	—	—	—
Sulawesi Barat	—	—	—	—	—
Maluku	—	—	—	—	—
Maluku Utara	—	—	—	—	—
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	—	—	—	—	—
Papua	—	—	—	—	—
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	0,41	0,14	35,53¹	0,12	0,69



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Kartu JKN Tidak Aktif				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	—	—	—	—	—
Sumatera Utara	4,12	0,53	12,77	3,09	5,16
Sumatera Barat	17,38	5,09	29,28 ¹	7,38	27,37
R i a u	NA	—	71,58 ²	—	—
J a m b i	8,03	2,77	34,46 ¹	2,59	13,47
Sumatera Selatan	NA	—	59,40 ²	—	—
Bengkulu	10,78	2,88	26,73 ¹	5,12	16,44
Lampung	23,06	8,89	38,56 ¹	5,59	40,53
Kep. Bangka Belitung	NA	—	77,31 ²	—	—
Kep. Riau	3,22	0,71	21,97	1,83	4,61
DKI Jakarta	—	—	—	—	—
Jawa Barat	7,06	2,74	38,83 ¹	1,67	12,45
Jawa Tengah	13,52	4,24	31,37 ¹	5,19	21,86
DI Yogyakarta	NA	—	86,13 ²	—	—
Jawa Timur	14,73	4,88	33,16 ¹	5,13	24,32
Banten	NA	—	106,01 ²	—	—
B a l i	NA	—	60,61 ²	—	—
Nusa Tenggara Barat	32,22	10,11	31,39 ¹	12,34	52,10
Nusa Tenggara Timur	23,86	8,00	33,54 ¹	8,13	39,58
Kalimantan Barat	NA	—	73,82 ²	—	—
Kalimantan Tengah	0,56	0,08	15,14	0,39	0,72
Kalimantan Selatan	NA	—	98,25 ²	—	—
Kalimantan Timur	NA	—	104,20 ²	—	—
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	33,87	7,54	22,27	19,05	48,69
Sulawesi Tengah	50,39	13,56	26,90 ¹	23,76	77,03
Sulawesi Selatan	NA	—	54,29 ²	—	—
Sulawesi Tenggara	NA	—	91,05 ²	—	—
Gorontalo	41,11	—	—	—	—
Sulawesi Barat	37,26	—	—	—	—
Maluku	20,47	8,18	39,99 ¹	4,38	36,55
Maluku Utara	83,07	—	—	—	—
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	NA	—	111,76 ²	—	—
Papua	20,55	2,66	12,94	15,32	25,77
Papua Selatan	31,67	1,95	6,15	27,84	35,49
Papua Tengah	NA	—	108,34 ²	—	—
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	10,72	1,29	12,00	8,19	13,25



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Menggunakan Asuransi Selain JKN/Jamkesda				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,56	6,79	43,64 ¹	2,22	28,90
Sumatera Utara	1,94	0,25	13,07	1,44	2,44
Sumatera Barat	12,22	4,05	33,19 ¹	4,25	20,18
Riau	NA	–	64,94 ²	–	–
Jambi	25,42	11,57	45,50 ¹	2,69	48,15
Sumatera Selatan	8,80	2,62	29,75 ¹	3,66	13,94
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	11,48	4,93	42,95 ¹	1,79	21,17
Kep. Bangka Belitung	8,89	1,05	11,85	6,82	10,95
Kep. Riau	NA	–	67,61 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	50,37 ²	0,21	41,87
Jawa Barat	17,55	5,14	29,30 ¹	7,45	27,65
Jawa Tengah	8,83	3,13	35,48 ¹	2,67	14,99
DI Yogyakarta	35,76	13,00	36,35 ¹	10,21	61,30
Jawa Timur	NA	–	55,18 ²	–	–
Banten	37,60	14,42	38,35 ¹	9,27	65,93
Bali	NA	–	66,80 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	100,63 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	27,49	10,85	39,48 ¹	6,17	48,82
Kalimantan Tengah	NA	–	85,07 ²	–	–
Kalimantan Selatan	13,83	6,67	48,26 ¹	0,71	26,94
Kalimantan Timur	54,63	10,75	19,67	33,51	75,75
Kalimantan Utara	1,88	0,02	0,85	1,85	1,91
Sulawesi Utara	32,89	3,39	10,31	26,22	39,55
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	26,73	3,34	12,51	20,16	33,30
Sulawesi Tenggara	NA	–	92,34 ²	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	14,45	1,65	11,44	11,20	17,70



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Prosedur/Persyaratan Sulit Dipenuhi				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	26,33	8,65	32,85 ¹	9,33	43,32
Sumatera Utara	10,31	4,18	40,58 ¹	2,09	18,53
Sumatera Barat	22,17	4,23	19,10	13,85	30,49
R i a u	12,18	4,05	33,21 ¹	4,23	20,14
J a m b i	NA	–	100,18 ²	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	63,83 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	104,36 ²	–	–
Lampung	11,89	5,14	43,24 ¹	1,79	21,99
Kep. Bangka Belitung	38,18	17,73	46,43 ¹	3,34	73,01
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	98,47 ²	–	–
Jawa Barat	11,48	5,03	43,77 ¹	1,61	21,36
Jawa Tengah	16,05	4,23	26,38 ¹	7,73	24,37
DI Yogyakarta	30,35	13,10	43,15 ¹	4,61	56,09
Jawa Timur	21,27	5,11	24,05	11,22	31,31
Banten	NA	–	58,27 ²	–	–
B a l i	NA	–	102,69 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	12,68	5,16	40,67 ¹	2,55	22,81
Nusa Tenggara Timur	32,54	5,10	15,66	22,53	42,56
Kalimantan Barat	23,61	3,32	14,07	17,08	30,13
Kalimantan Tengah	NA	–	59,95 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	12,81	1,82	14,20	9,24	16,39
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	108,33 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	90,36 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	59,32 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	1,49	0,20	13,22	1,10	1,88
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	97,33 ²	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	100,00	–	–	100,00	100,00
Papua Barat Daya	NA	–	126,11 ²	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	13,67	1,62	11,85	10,49	16,86

Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Tidak Ada Faskes yang Mudah Dijangkau dari Rumah Responden				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,93	0,34	11,70	2,26	3,60
Sumatera Utara	NA	—	50,05 ²	—	—
Sumatera Barat	NA	—	66,66 ²	—	—
Riau	NA	—	58,07 ²	—	—
Jambi	NA	—	97,73 ²	—	—
Sumatera Selatan	29,42	9,53	32,40 ¹	10,69	48,15
Bengkulu	10,05	2,24	22,32	5,64	14,46
Lampung	NA	2,02	62,45 ²	—	—
Kep. Bangka Belitung	—	—	—	—	—
Kep. Riau	—	—	—	—	—
DKI Jakarta	NA	—	99,00 ²	—	—
Jawa Barat	9,07	4,28	47,22 ¹	0,65	17,49
Jawa Tengah	NA	—	56,57 ²	—	—
DI Yogyakarta	—	—	—	—	—
Jawa Timur	8,85	4,15	46,88 ¹	0,70	16,99
Banten	—	—	—	—	—
Bali	9,34	4,29	45,89 ¹	0,92	17,76
Nusa Tenggara Barat	NA	—	79,87 ²	—	—
Nusa Tenggara Timur	5,68	0,89	15,66	3,93	7,43
Kalimantan Barat	NA	—	69,30 ²	—	—
Kalimantan Tengah	—	—	—	—	—
Kalimantan Selatan	11,73	2,94	25,03 ¹	5,96	17,49
Kalimantan Timur	—	—	—	—	—
Kalimantan Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	—	—	—	—	—
Sulawesi Tengah	—	—	—	—	—
Sulawesi Selatan	—	—	—	—	—
Sulawesi Tenggara	—	—	—	—	—
Gorontalo	—	—	—	—	—
Sulawesi Barat	—	—	—	—	—
Maluku	NA	—	103,14 ²	—	—
Maluku Utara	—	—	—	—	—
Papua Barat	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	—	—	—	—	—
Papua	—	—	—	—	—
Papua Selatan	—	—	—	—	—
Papua Tengah	25,20	5,70	22,63	13,99	36,41
Papua Pegunungan	—	—	—	—	—
Indonesia	8,77	1,60	18,23	5,63	11,91



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Tidak Ada Petugas Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,88	2,66	33,80 ¹	2,65	13,12
Sumatera Utara	NA	–	90,50 ²	–	–
Sumatera Barat	NA	–	71,26 ²	–	–
R i a u	8,48	3,92	46,27 ¹	0,77	16,19
J a m b i	18,05	5,77	31,97 ¹	6,71	29,39
Sumatera Selatan	7,25	1,89	26,05 ¹	3,54	10,97
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	15,86	7,05	44,48 ¹	2,00	29,72
Kep. Bangka Belitung	NA	–	68,93 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	108,59 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	–	57,46 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	64,14 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	4,54	1,55	34,17 ¹	1,49	7,60
Banten	NA	–	86,26 ²	–	–
B a l i	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	88,05 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	–	–	–	–	–
Kalimantan Tengah	0,86	0,13	15,14	0,60	1,11
Kalimantan Selatan	NA	–	73,05 ²	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	83,63 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	99,83 ²	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	101,31 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	13,94	–	–	13,94	13,94
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	–	–	–	–	–
Maluku Utara	–	–	–	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	23,49	3,04	12,94	17,52	29,47
Papua Selatan	–	–	–	–	–
Papua Tengah	NA	–	74,89 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia					

Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama/Antre Panjang				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	45,15	7,39	16,36	30,64	59,67
Sumatera Utara	33,32	6,11	18,34	21,31	45,33
Sumatera Barat	NA	–	64,17 ²	–	–
Riau	20,55	6,26	30,44 ¹	8,26	32,84
Jambi	22,33	9,09	40,72 ¹	4,46	40,19
Sumatera Selatan	15,77	5,27	33,44 ¹	5,41	26,13
Bengkulu	16,09	7,41	46,03 ¹	1,54	30,65
Lampung	15,18	5,27	34,70 ¹	4,83	25,54
Kep. Bangka Belitung	NA	–	84,99 ²	–	–
Kep. Riau	4,08	0,90	21,97	2,32	5,84
DKI Jakarta	31,68	14,27	45,04 ¹	3,64	59,72
Jawa Barat	20,04	4,77	23,80	10,66	29,41
Jawa Tengah	18,53	4,18	22,54	10,33	26,74
DI Yogyakarta	NA	–	59,77 ²	–	–
Jawa Timur	23,42	4,28	18,29	15,00	31,83
Banten	36,82	15,19	41,26 ¹	6,97	66,67
Bali	31,50	14,28	45,32 ¹	3,45	59,56
Nusa Tenggara Barat	20,04	7,03	35,10 ¹	6,22	33,86
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	18,40	7,52	40,89 ¹	3,62	33,18
Kalimantan Tengah	19,92	9,74	48,91 ¹	0,78	39,06
Kalimantan Selatan	23,58	8,48	35,94 ¹	6,93	40,24
Kalimantan Timur	5,15	1,04	20,20	3,11	7,20
Kalimantan Utara	62,58	0,32	0,51	61,96	63,20
Sulawesi Utara	NA	–	63,19 ²	–	–
Sulawesi Tengah	19,53	5,07	25,98 ¹	9,56	29,50
Sulawesi Selatan	25,66	7,69	29,96 ¹	10,56	40,77
Sulawesi Tenggara	48,24	6,38	13,22	35,71	60,77
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	43,70	–	–	43,70	43,70
Maluku	40,46	3,37	8,33	33,84	47,08
Maluku Utara	15,06	–	–	15,06	15,06
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	81,55	17,35	21,28	47,45	115,65
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	NA	–	106,15 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	89,72 ²	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	22,01	1,83	8,32	18,41	25,61



Lanjutan Tabel 4.60

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	32,31	6,90	21,34	18,76	45,86
Sumatera Utara	27,17	8,83	32,51 ¹	9,81	44,53
Sumatera Barat	14,64	3,84	26,25 ¹	7,09	22,19
Riau	36,38	8,99	24,72	18,71	54,05
Jambi	NA	–	62,50 ²	–	–
Sumatera Selatan	17,41	6,48	37,20 ¹	4,69	30,14
Bengkulu	56,13	14,34	25,55 ¹	27,95	84,31
Lampung	17,60	7,40	42,04 ¹	3,06	32,14
Kep. Bangka Belitung	NA	–	70,76 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	71,70 ²	–	–
DKI Jakarta	28,31	13,65	48,20 ¹	1,50	55,12
Jawa Barat	27,68	6,75	24,40	14,41	40,95
Jawa Tengah	29,79	3,93	13,17	22,08	37,51
DI Yogyakarta	30,83	9,63	31,25 ¹	11,89	49,76
Jawa Timur	15,85	3,69	23,28	8,60	23,10
Banten	NA	–	59,24 ²	–	–
Bali	NA	–	54,33 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	30,88	10,26	33,24 ¹	10,71	51,05
Nusa Tenggara Timur	37,92	11,59	30,58 ¹	15,14	60,70
Kalimantan Barat	NA	–	52,57 ²	–	–
Kalimantan Tengah	32,32	14,44	44,68 ¹	3,94	60,70
Kalimantan Selatan	26,25	9,89	37,70 ¹	6,80	45,69
Kalimantan Timur	NA	–	60,75 ²	–	–
Kalimantan Utara	9,62	0,08	0,85	9,46	9,78
Sulawesi Utara	16,98	8,01	47,16 ¹	1,25	32,72
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	16,28	5,79	35,55 ¹	4,91	27,65
Sulawesi Tenggara	5,51	0,73	13,22	4,08	6,94
Gorontalo	58,89	–	–	58,89	58,89
Sulawesi Barat	19,04	–	–	19,04	19,04
Maluku	NA	–	64,10 ²	–	–
Maluku Utara	1,87	–	–	1,87	1,87
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	72,16 ²	–	–
Papua	51,90	10,29	19,83	31,67	72,12
Papua Selatan	63,56	7,01	11,02	49,80	77,33
Papua Tengah	0,95	0,22	22,63	0,53	1,38
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–
Indonesia	23,93	2,07	8,67	19,85	28,01

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.61
Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang
Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan
Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Provinsi	Polindes/Poskesdes				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,33	0,78	12,30	4,80	7,85
Sumatera Utara	0,98	0,22	22,24	0,55	1,40
Sumatera Barat	3,27	0,63	19,38	2,03	4,52
Riau	3,25	0,79	24,21	1,71	4,80
Jambi	2,86	0,79	27,68 ¹	1,31	4,42
Sumatera Selatan	5,16	0,74	14,38	3,71	6,62
Bengkulu	2,22	0,69	31,17 ¹	0,86	3,58
Lampung	NA	–	53,26 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	NA	–	51,08 ²	–	–
Kep. Riau	NA	–	71,03 ²	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	0,54	0,21	38,28 ¹	0,13	0,94
Jawa Tengah	NA	–	79,02 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	1,42	0,30	21,12	0,83	2,00
Banten	–	–	–	–	–
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	13,43	1,72	12,83	10,05	16,81
Nusa Tenggara Timur	1,38	0,37	26,69 ¹	0,66	2,10
Kalimantan Barat	2,61	0,68	26,10 ¹	1,28	3,95
Kalimantan Tengah	5,06	1,27	25,12 ¹	2,57	7,55
Kalimantan Selatan	8,30	1,23	14,88	5,88	10,72
Kalimantan Timur	NA	–	51,68 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,14 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	65,48 ²	–	–
Sulawesi Selatan	0,64	0,18	28,08 ¹	0,29	0,99
Sulawesi Tenggara	NA	–	51,69 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,92 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	62,39 ²	–	–
Maluku	1,66	0,67	40,61 ¹	0,34	2,98
Maluku Utara	3,38	1,04	30,62 ¹	1,35	5,41
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	56,74 ²	–	–
Papua	NA	–	78,89 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	85,77 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	3,90	1,91	49,09 ¹	0,15	7,65
Indonesia	1,63	0,09	5,49	1,81	1,42



Lanjutan Tabel 4.61

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	–	–	–	–	–
Sumatera Utara	–	–	–	–	–
Sumatera Barat	NA	–	100,09 ²	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	67,49 ²	–	–
Bengkulu	NA	–	99,97 ²	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	–	99,96 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	100,03 ²	–	–
DI Yogyakarta	NA	–	99,98 ²	–	–
Jawa Timur	NA	–	80,13 ²	–	–
Banten	–	–	–	–	–
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Barat	–	–	–	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	72,64 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	100,01 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–
Maluku	NA	–	100,13 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,00 ²	–	–
Papua Barat	–	–	–	–	–
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	NA	–	69,30 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	99,37 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	68,58 ²	–	–
Indonesia	0,07	0,03	44,14¹	0,01	0,13

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.62
Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	NA	–	67,84 ²	–	–
Perdesaan	0,06	0,02	34,45 ¹	0,02	0,10
Kelompok Umur					
15–19 Tahun	NA	–	100,21 ²	–	–
20–24 Tahun	NA	–	99,99 ²	–	–
25–29 Tahun	0,08	0,03	37,57 ¹	0,02	0,14
30–34 Tahun	NA	–	87,08 ²	–	–
35–39 Tahun	NA	–	100,01 ²	–	–
40–44 Tahun	NA	–	81,93 ²	–	–
45–49 Tahun	–	–	–	–	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	NA	–	55,02 ²	–	–
SD/Sederajat	NA	–	92,21 ²	–	–
SMP/Sederajat	0,04	0,02	46,15 ¹	~0	0,09
SMA/Sederajat	NA	–	54,11 ²	–	–
Perguruan Tinggi	NA	–	70,95 ²	–	–
Status Ekonomi					
Kuintil 1	NA	–	65,70 ²	–	–
Kuintil 2	NA	–	46,57 ¹	–	–
Kuintil 3	NA	–	61,58 ²	–	–
Kuintil 4	NA	–	77,07 ²	–	–
Kuintil 5	–	–	–	–	–
Indonesia	0,07	0,03	44,14¹	0,01	0,13

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 4.63

Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2025

Provinsi	Dokter Umum				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,87	0,35	40,56 ¹	0,18	1,57
Sumatera Utara	1,52	0,36	23,68	0,81	2,22
Sumatera Barat	2,39	0,61	25,68 ¹	1,19	3,60
Riau	1,73	0,64	36,90 ¹	0,48	2,99
Jambi	2,00	0,68	34,05 ¹	0,66	3,33
Sumatera Selatan	1,70	0,50	29,71 ¹	0,71	2,68
Bengkulu	3,20	1,10	34,41 ¹	1,04	5,35
Lampung	1,64	0,61	37,17 ¹	0,45	2,84
Kep. Bangka Belitung	2,78	1,07	38,47 ¹	0,68	4,87
Kep. Riau	0,32	0,15	48,49 ¹	0,02	0,62
DKI Jakarta	NA	–	58,67 ²	–	–
Jawa Barat	1,64	0,36	22,16	0,93	2,35
Jawa Tengah	1,13	0,31	27,61 ¹	0,52	1,74
DI Yogyakarta	NA	–	62,77 ²	–	–
Jawa Timur	1,88	0,41	21,83	1,07	2,68
Banten	1,51	0,74	49,42 ¹	0,05	2,96
Bali	NA	–	57,04 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	2,43	0,78	32,29 ¹	0,89	3,96
Nusa Tenggara Timur	3,11	0,61	19,69	1,91	4,32
Kalimantan Barat	1,89	0,55	29,33 ¹	0,80	2,97
Kalimantan Tengah	NA	–	50,72 ²	–	–
Kalimantan Selatan	1,18	0,52	44,37 ¹	0,15	2,20
Kalimantan Timur	NA	–	50,15 ²	0,04	4,08
Kalimantan Utara	NA	–	55,13 ²	–	–
Sulawesi Utara	1,94	0,78	40,17 ¹	0,41	3,47
Sulawesi Tengah	3,43	0,87	25,37 ¹	1,73	5,14
Sulawesi Selatan	0,92	0,34	36,26 ¹	0,27	1,58
Sulawesi Tenggara	1,50	0,52	34,34 ¹	0,49	2,51
Gorontalo	NA	–	69,13 ²	–	–
Sulawesi Barat	1,70	0,70	41,12 ¹	0,33	3,08
Maluku	1,58	0,59	37,63 ¹	0,41	2,74
Maluku Utara	3,15	1,05	33,47 ¹	1,08	5,21
Papua Barat	2,58	0,78	30,37 ¹	1,04	4,12
Papua Barat Daya	NA	–	72,97 ²	–	–
Papua	NA	–	51,80 ²	–	–
Papua Selatan	NA	–	81,15 ²	–	–
Papua Tengah	NA	–	69,20 ²	–	–
Papua Pegunungan	NA	–	100,11 ²	–	–
Indonesia	1,64	0,12	7,25	1,41	1,87



Lanjutan Tabel 4.63

Provinsi	Perawat				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,68	0,26	37,62 ¹	0,18	1,18
Sumatera Utara	0,66	0,28	43,14 ¹	0,10	1,21
Sumatera Barat	NA	–	52,51 ²	–	–
Riau	NA	–	63,96 ²	–	–
Jambi	NA	–	64,12 ²	–	–
Sumatera Selatan	0,74	0,31	42,06 ¹	0,13	1,35
Bengkulu	NA	–	56,61 ²	–	–
Lampung	0,56	0,24	42,93 ¹	0,09	1,03
Kep. Bangka Belitung	NA	–	50,96 ²	–	2,82
Kep. Riau	NA	–	69,00 ²	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,97 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	72,44 ²	–	–
Jawa Tengah	0,76	0,23	30,39 ¹	0,31	1,22
DI Yogyakarta	NA	–	61,70 ²	–	–
Jawa Timur	1,04	0,28	26,78 ¹	0,49	1,59
Banten	NA	–	71,50 ²	–	–
Bali	NA	–	71,33 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	1,18	0,40	33,78 ¹	0,40	1,96
Nusa Tenggara Timur	1,34	0,42	31,11 ¹	0,52	2,17
Kalimantan Barat	1,67	0,63	38,02 ¹	0,42	2,91
Kalimantan Tengah	2,08	0,77	36,99 ¹	0,57	3,58
Kalimantan Selatan	NA	–	63,14 ²	–	–
Kalimantan Timur	1,14	0,54	47,66 ¹	0,07	2,20
Kalimantan Utara	NA	–	57,22 ²	–	–
Sulawesi Utara	1,24	0,50	39,88 ¹	0,27	2,22
Sulawesi Tengah	2,70	0,75	27,79 ¹	1,23	4,18
Sulawesi Selatan	0,55	0,17	30,88 ¹	0,22	0,88
Sulawesi Tenggara	NA	–	54,28 ²	–	–
Gorontalo	2,82	1,28	45,38 ¹	0,31	5,34
Sulawesi Barat	0,84	0,40	48,14 ¹	0,05	1,63
Maluku	NA	–	61,99 ²	–	–
Maluku Utara	2,16	0,57	26,56 ¹	1,03	3,28
Papua Barat	2,54	0,97	38,20 ¹	0,64	4,44
Papua Barat Daya	2,74	0,95	34,63 ¹	0,88	4,59
Papua	2,85	1,09	38,37 ¹	0,71	4,99
Papua Selatan	5,52	1,79	32,51 ¹	2,00	9,03
Papua Tengah	NA	–	95,17 ²	–	–
Papua Pegunungan	2,74	1,13	41,39 ¹	0,52	4,96
Indonesia	0,73	0,07	8,97	0,61	0,86



Lanjutan Tabel 4.63

Provinsi	Tenaga Kesehatan Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	99,93 ²	–	–
Sumatera Utara	0,34	0,11	33,17 ¹	0,12	0,56
Sumatera Barat	NA	–	100,04 ²	–	–
Riau	NA	–	99,98 ²	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	84,98 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	NA	–	99,99 ²	–	–
Jawa Barat	NA	–	54,84 ²	–	–
Jawa Tengah	–	–	–	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	NA	–	58,33 ²	–	–
Banten	0,67	0,31	46,09 ¹	0,06	1,27
Bali	NA	–	100,12 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Timur	NA	–	100,00 ²	–	–
Kalimantan Barat	NA	–	55,65 ²	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	76,80 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	100,09 ²	–	–
Sulawesi Utara	NA	–	100,07 ²	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	59,12 ²	–	–
Sulawesi Selatan	NA	–	100,07 ²	–	0,01
Sulawesi Tenggara	NA	–	72,19 ²	–	–
Gorontalo	NA	–	99,95 ²	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	99,95 ²	–	–
Maluku	1,42	0,51	35,82 ¹	0,42	2,41
Maluku Utara	NA	–	50,05 ²	–	–
Papua Barat	3,60	1,28	35,64 ¹	1,09	6,12
Papua Barat Daya	1,24	0,53	42,60 ¹	0,20	2,28
Papua	2,25	1,11	49,30 ¹	0,08	4,43
Papua Selatan	NA	–	50,83 ²	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	6,96	2,35	33,70 ¹	2,36	11,55
Indonesia	0,29	0,06	21,44	0,17	0,41

Lanjutan Tabel 4.63

Provinsi	Dukun Beranak/Paraji				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	–	52,09 ²	–	–
Sumatera Utara	1,26	0,25	20,11	0,76	1,76
Sumatera Barat	0,70	0,29	41,77 ¹	0,13	1,28
Riau	2,67	0,67	24,98	1,36	3,98
Jambi	4,19	1,06	25,30 ¹	2,11	6,27
Sumatera Selatan	1,85	0,61	33,00 ¹	0,65	3,05
Bengkulu	0,91	0,41	45,74 ¹	0,09	1,72
Lampung	0,42	0,16	38,96 ¹	0,10	0,73
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	3,73	0,51	13,55	2,74	4,73
Jawa Tengah	NA	–	100,00 ²	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	0,65	0,18	28,38 ¹	0,29	1,01
Banten	1,78	0,50	28,21 ¹	0,79	2,76
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	53,43 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	5,30	0,66	12,40	4,01	6,59
Kalimantan Barat	6,31	1,09	17,20	4,18	8,44
Kalimantan Tengah	6,18	1,22	19,73	3,79	8,57
Kalimantan Selatan	1,55	0,53	33,98 ¹	0,52	2,59
Kalimantan Timur	NA	–	70,37 ²	–	–
Kalimantan Utara	NA	–	80,92 ²	–	–
Sulawesi Utara	3,47	0,84	24,10	1,83	5,10
Sulawesi Tengah	2,91	0,72	24,93	1,49	4,33
Sulawesi Selatan	0,77	0,26	33,00 ¹	0,27	1,28
Sulawesi Tenggara	4,90	0,87	17,68	3,20	6,59
Gorontalo	NA	–	57,43 ²	–	–
Sulawesi Barat	4,47	1,88	42,12 ¹	0,78	8,16
Maluku	18,86	1,73	9,16	15,48	22,25
Maluku Utara	7,68	1,38	18,01	4,97	10,39
Papua Barat	7,79	1,59	20,46	4,66	10,91
Papua Barat Daya	10,01	2,33	23,28	5,44	14,57
Papua	3,86	0,89	23,09	2,11	5,61
Papua Selatan	7,11	1,80	25,37 ¹	3,57	10,64
Papua Tengah	5,43	2,48	45,63 ¹	0,57	10,29
Papua Pegunungan	18,46	3,65	19,77	11,30	25,61
Indonesia	2,05	0,11	5,59	1,83	2,28



Lanjutan Tabel 4.63

Provinsi	Lainnya				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	–	–	–	–	–
Sumatera Utara	0,37	0,14	39,16 ¹	0,09	0,65
Sumatera Barat	0,36	0,15	41,84 ¹	0,06	0,65
R i a u	NA	–	63,52 ²	–	–
J a m b i	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	–	–	–	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	NA	–	100,16 ²	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	NA	–	71,39 ²	–	–
Jawa Tengah	NA	–	100,03 ²	–	–
DI Yogyakarta	NA	–	99,98 ²	–	–
Jawa Timur	NA	–	77,65 ²	–	–
Banten	–	–	–	–	–
B a l i	NA	–	100,12 ²	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	98,44 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	1,33	0,39	29,21 ¹	0,57	2,09
Kalimantan Barat	–	–	–	–	–
Kalimantan Tengah	NA	–	100,06 ²	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	NA	–	100,21 ²	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	1,05	0,43	41,25 ¹	0,20	1,90
Sulawesi Selatan	NA	–	57,47 ²	–	–
Sulawesi Tenggara	NA	0,23	56,22 ²	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	99,46 ²	–	–
Maluku	NA	–	58,11 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	100,00 ²	–	–
Papua Barat	4,32	1,18	27,32 ¹	2,01	6,63
Papua Barat Daya	4,31	1,24	28,73 ¹	1,88	6,74
Papua	1,89	0,87	46,00 ¹	0,19	3,59
Papua Selatan	7,05	1,95	27,74 ¹	3,21	10,88
Papua Tengah	4,92	2,19	44,50 ¹	0,63	9,21
Papua Pegunungan	13,20	2,51	18,99	8,29	18,11
Indonesia	0,25	0,03	12,23	0,19	0,31

Lanjutan Tabel 4.63

Provinsi	Tidak Ada				
	Estimate	Standard Error	RSE	95% Confidence Interval	
(1)	(2)	(3)	(4)	Lower	Upper
Aceh	–	–	–	–	–
Sumatera Utara	NA	–	61,61 ²	–	–
Sumatera Barat	–	–	–	–	–
Riau	–	–	–	–	–
Jambi	–	–	–	–	–
Sumatera Selatan	NA	–	70,61 ²	–	–
Bengkulu	–	–	–	–	–
Lampung	–	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–	–
Kep. Riau	–	–	–	–	–
DKI Jakarta	–	–	–	–	–
Jawa Barat	–	–	–	–	–
Jawa Tengah	–	–	–	–	–
DI Yogyakarta	–	–	–	–	–
Jawa Timur	NA	–	80,13 ²	–	–
Banten	–	–	–	–	–
Bali	–	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	NA	–	100,11 ²	–	–
Nusa Tenggara Timur	0,29	0,14	47,97 ¹	–	–
Kalimantan Barat	–	–	–	–	–
Kalimantan Tengah	–	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	–	–	–	–	–
Kalimantan Timur	–	–	–	–	–
Kalimantan Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	NA	–	71,51 ²	–	–
Sulawesi Selatan	–	–	–	–	–
Sulawesi Tenggara	–	–	–	–	–
Gorontalo	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	NA	–	100,01 ²	–	–
Maluku	NA	–	72,21 ²	–	–
Maluku Utara	NA	–	59,23 ²	–	–
Papua Barat	NA	–	64,97 ²	–	–
Papua Barat Daya	NA	–	100,10 ²	–	–
Papua	–	–	–	–	–
Papua Selatan	NA	–	88,75 ²	–	–
Papua Tengah	5,39	2,01	37,32 ¹	1,45	9,34
Papua Pegunungan	NA	–	68,58 ²	–	–
Indonesia	0,06	0,01	21,42	0,03	0,08

Catatan : ¹Jika 25 persen <RSE≤ 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan hati-hati

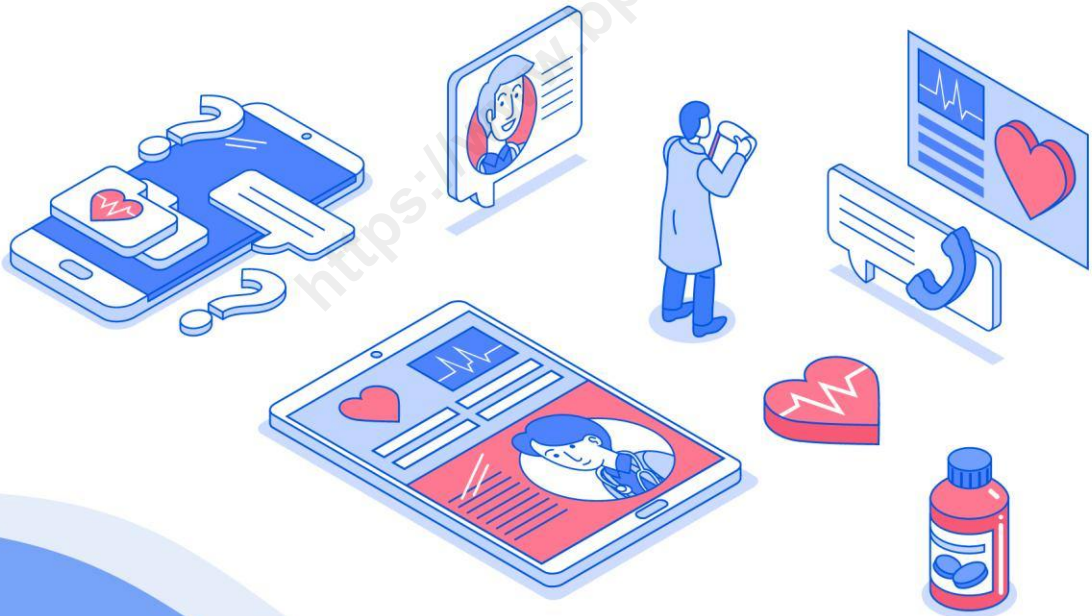
²Jika RSE>50 persen, penggunaan nilai estimasi dianggap tidak akurat

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



5

PENGELUARAN KESEHATAN



Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia mencatat kemajuan besar dalam bidang kesehatan. Harapan hidup penduduk terus meningkat yaitu dari 70,20 tahun pada 2012 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Hal ini menandakan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati usia yang lebih panjang dan sehat. Angka kematian ibu juga turun hampir setengahnya, dari 346 menjadi 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula angka kematian bayi berkurang dari 26 menjadi sekitar 17 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Perbaikan tersebut tidak terjadi begitu saja namun sebagai dampak dari kenaikan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk menamatkan pendidikan menengah atas serta meningkatnya pengeluaran per kapita menjadi sinyal perbaikan taraf hidup yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perbaikan kesehatan.

Meskipun demikian, tantangan besar masih ada di balik capaian positif tersebut terutama berkaitan dengan persoalan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan yang tak terduga sering kali menjadi beban berat bagi keluarga, terutama yang belum memiliki jaminan kesehatan. Ketika seseorang jatuh sakit, pengeluaran untuk layanan medis atau obat-obatan bisa menggerus anggaran rumah tangga, bahkan memaksa sebagian keluarga menunda pengobatan. Padahal upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pembiayaan publik juga terus berjalan dengan cara memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mendorong layanan yang lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif yaitu mengkampanyekan gaya hidup sehat untuk pencegahan penyakit. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan juga menjadi kunci karena kualitas hidup akan menentukan konsumsi layanan kesehatan, baik untuk pengobatan maupun pencegahan.

Memasuki periode RPJMN 2025–2029, arah pembangunan kesehatan Indonesia semakin jelas yaitu untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan agar seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir terbebani biaya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan global *Universal Health Coverage* (UHC) dalam agenda SDGs 2030. Untuk mencapainya, pengeluaran kesehatan perlu terus dipantau sebagai cermin dari sejauh mana akses terhadap layanan kesehatan telah terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian kita dapat mengharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang jatuh miskin karena biaya berobat, dan pada akhirnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan produktif.

Bab ini membahas tentang data pengeluaran kesehatan yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Informasi mengenai pengeluaran kesehatan dikumpulkan melalui kuesioner konsumsi dan pengeluaran. Total pengeluaran kesehatan mencakup seluruh biaya yang

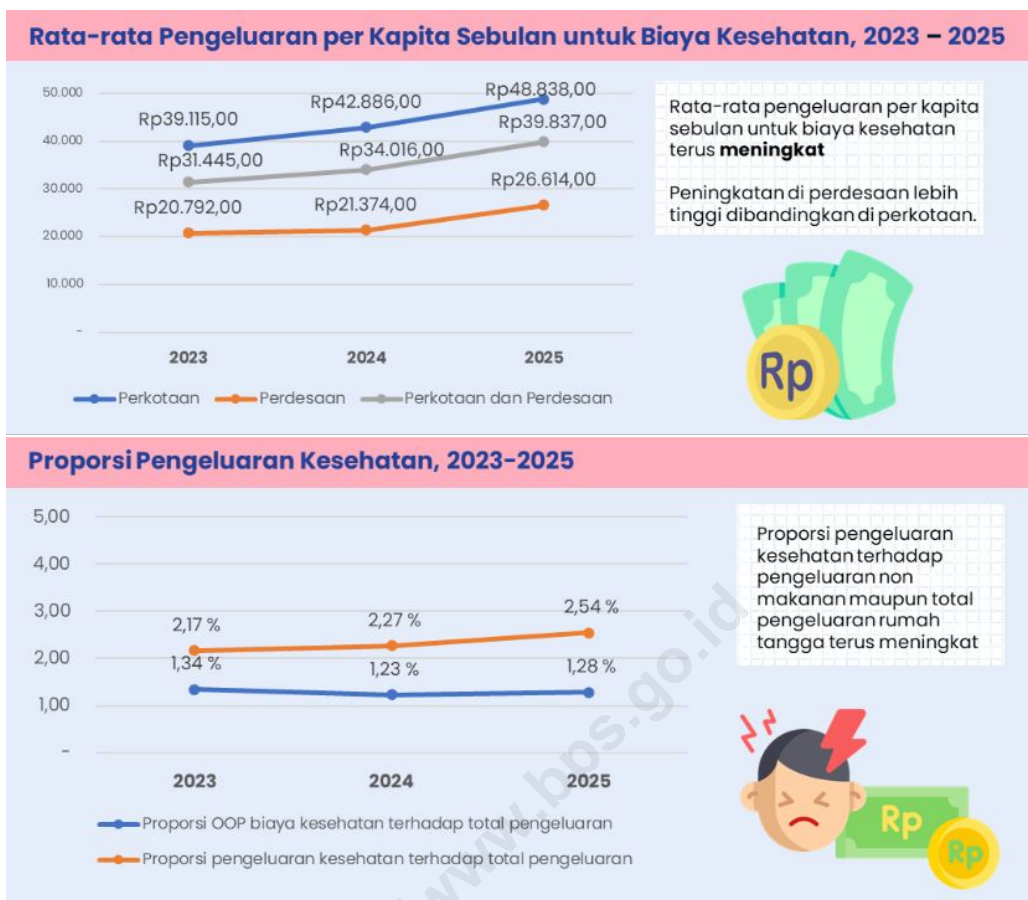


dibayarkan, baik secara langsung oleh rumah tangga maupun oleh pihak lain seperti pemerintah, asuransi, atau lembaga pembiayaan kesehatan lainnya. Pengeluaran kesehatan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga atau *out-of-pocket* (OOP) meliputi berbagai biaya, mulai dari konsultasi dengan tenaga medis, pembelian obat, pembayaran layanan kesehatan, hingga pengobatan alternatif atau tradisional, termasuk pemberian uang jasa atau barang kepada tenaga atau fasilitas kesehatan. Pembahasan dalam bab ini akan menyoroti tren pengeluaran kesehatan masyarakat serta perinciannya berdasarkan jenis atau kelompok pengeluaran kesehatan.

5.1 Pola Pengeluaran Kesehatan

Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk biaya kesehatan penduduk Indonesia sebesar Rp39.837,00. Data Susenas Maret menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk biaya kesehatan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan pada periode 2023–2025 (Gambar 5.1). Peningkatan terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun peningkatan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk biaya kesehatan penduduk di perdesaan pada tahun 2025 sebesar Rp26.614,00 meningkat 28,00 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp20.792,00. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk biaya kesehatan penduduk di perkotaan pada tahun 2025 sebesar Rp48.838,00 lebih besar dibandingkan di perdesaan, namun peningkatannya lebih rendah yaitu hanya 24,86 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp39.115,00.

Gambar 5.1 juga menunjukkan proporsi pengeluaran kesehatan terhadap pengeluaran non makanan maupun terhadap total pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2025, pengeluaran kesehatan mencakup 2,54 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Selama periode 2023–2025, proporsi pengeluaran kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga menunjukkan peningkatan yaitu dari 2,17 persen pada tahun 2023, menjadi 2,27 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 2,54 persen pada tahun 2025. Pengeluaran kesehatan juga mencakup imputasi dari pengeluaran kesehatan yang dibayarkan oleh pihak lain. Sementara itu, pengeluaran kesehatan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga atau *out-of-pocket* (OOP) mencakup 1,28 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Proporsi pengeluaran OOP biaya kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga juga menunjukkan peningkatan selama periode 2023–2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 5.1
Rata-rata dan Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Biaya Kesehatan, 2023–2025

5.2 Komposisi Pengeluaran Kesehatan

Susenas mengumpulkan data mengenai pengeluaran kesehatan yang bersifat kuratif dan preventif serta biaya untuk obat. Pengeluaran kesehatan kuratif mencakup pengeluaran kesehatan untuk pelayanan pengobatan, pengeluaran kesehatan preventif mencakup pengeluaran kesehatan untuk pencegahan, sementara biaya obat mencakup pengeluaran untuk membeli obat, baik dengan resep dokter maupun tanpa menggunakan resep dokter.

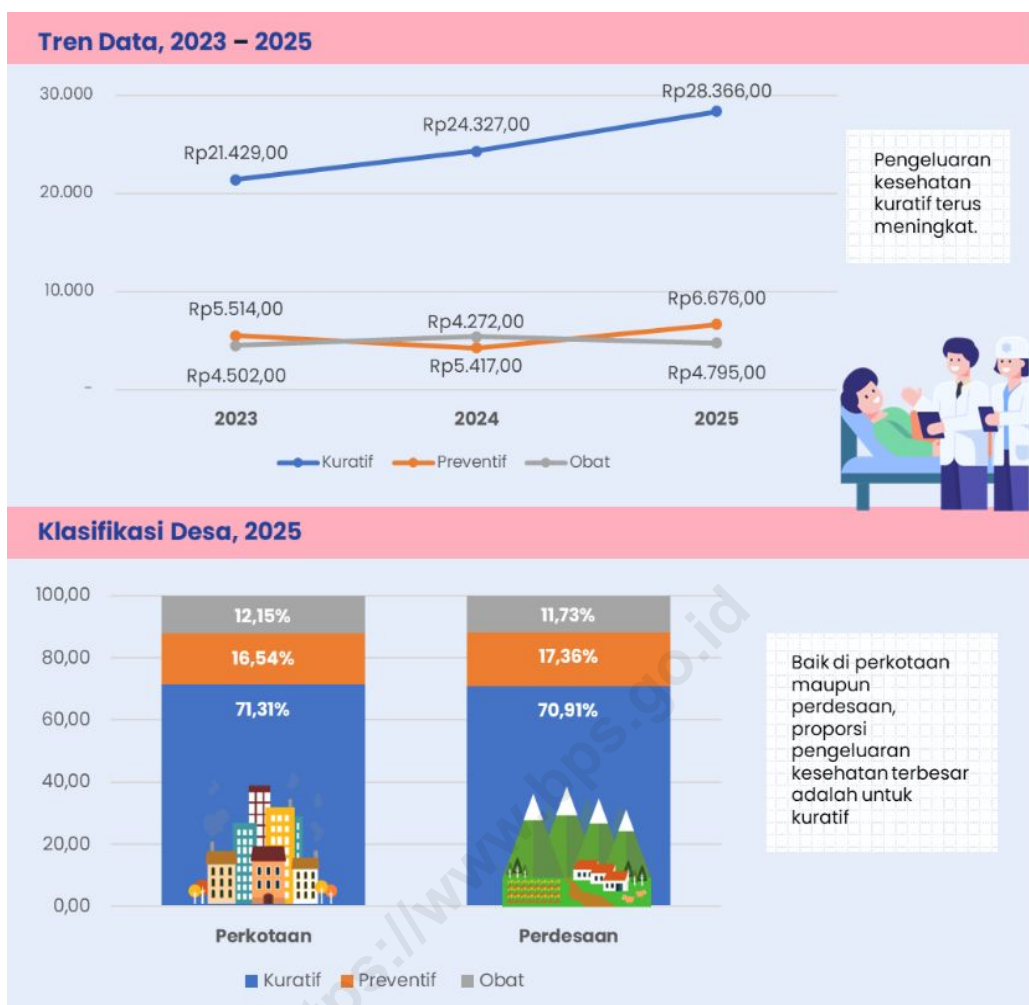
Tren rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pengobatan/kuratif, pelayanan pencegahan/preventif, dan biaya obat pada tahun 2023–2025 ditunjukkan pada Gambar 5.2. Rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pengobatan/kuratif



menunjukkan peningkatan yang lebih tajam dibandingkan untuk pelayanan pencegahan/preventif dan biaya obat. Rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk biaya pelayanan pengobatan/kuratif pada tahun 2025 sebesar Rp28.336,00, meningkat 16,48 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp24.327,00 dan jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp21.429,00 mengalami peningkatan 32,23 persen. Sedangkan rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pencegahan/preventif yang pada tahun 2025 sebesar Rp6.676,00, meningkat 56,27 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4.272,00. Sementara itu, rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk biaya obat pada tahun 2025 justru menurun dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk biaya obat sebesar Rp4.795,00, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp5.417,00.

Proporsi pengeluaran kesehatan berdasarkan jenisnya menurut klasifikasi desa menunjukkan pola yang sama antara daerah perkotaan dan perdesaan yaitu proporsi terbesar adalah untuk pelayanan pengobatan/kuratif, diikuti pelayanan pencegahan/preventif dan yang terkecil adalah untuk biaya obat (Gambar 5.2). Di perkotaan, proporsi pengeluaran kesehatan total untuk pelayanan pengobatan/kuratif sebesar 71,31 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 70,81 persen. Proporsi pengeluaran kesehatan total untuk biaya obat juga sedikit lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Rumah tangga di perkotaan menggunakan 12,15 persen dari seluruh pengeluaran kesehatannya untuk biaya obat sementara di perdesaan hanya 11,73 persen. Pada pengeluaran kesehatan untuk pelayanan pencegahan/preventif, proporsi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yaitu sebesar 17,36 persen dari seluruh pengeluaran kesehatan sedangkan di perkotaan sebesar 16,54 persen.

Berdasarkan wilayah administratif, Tabel 5.7 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan yang tertinggi adalah di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp78.619,00. Sementara yang terendah adalah di Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar Rp9.025,00. Provinsi DI Yogyakarta juga menjadi wilayah dengan rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pengobatan/kuratif yang tertinggi dengan rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan sebesar Rp55.904,00. Sementara itu, rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pencegahan/preventif dan biaya obat yang tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta yaitu berturut-turut sebesar Rp10.251,00 dan Rp18.818,00.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 5.2

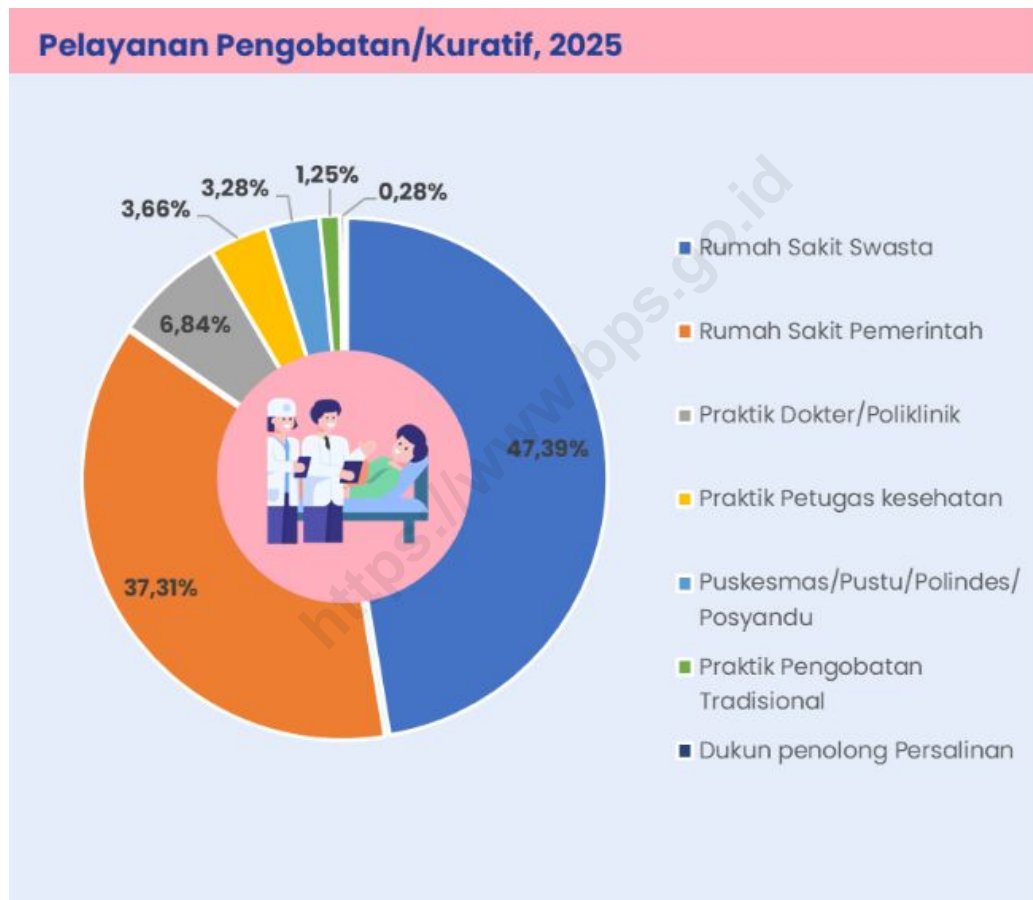
Rata-rata dan Proporsi Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Kesehatan Menurut Jenis Pengeluaran Kesehatan, 2023–2025

Proporsi pengeluaran kesehatan untuk pelayanan pengobatan/kuratif secara lebih terperinci menurut ragamnya ditunjukkan pada Gambar 5.3. Proporsi terbesar pengeluaran kesehatan untuk pelayanan pengobatan/kuratif adalah untuk pengobatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, di rumah sakit swasta (47,39 persen) dan rumah sakit pemerintah (37,31 persen). Jenis pelayanan pengobatan/kuratif yang juga cukup besar adalah pelayanan pengobatan/kuratif di praktik dokter/poliklinik yaitu sebesar 6,84 persen.

Tabel 5.2 dan 5.3 memuat rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pengobatan/kuratif menurut ragamnya di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk



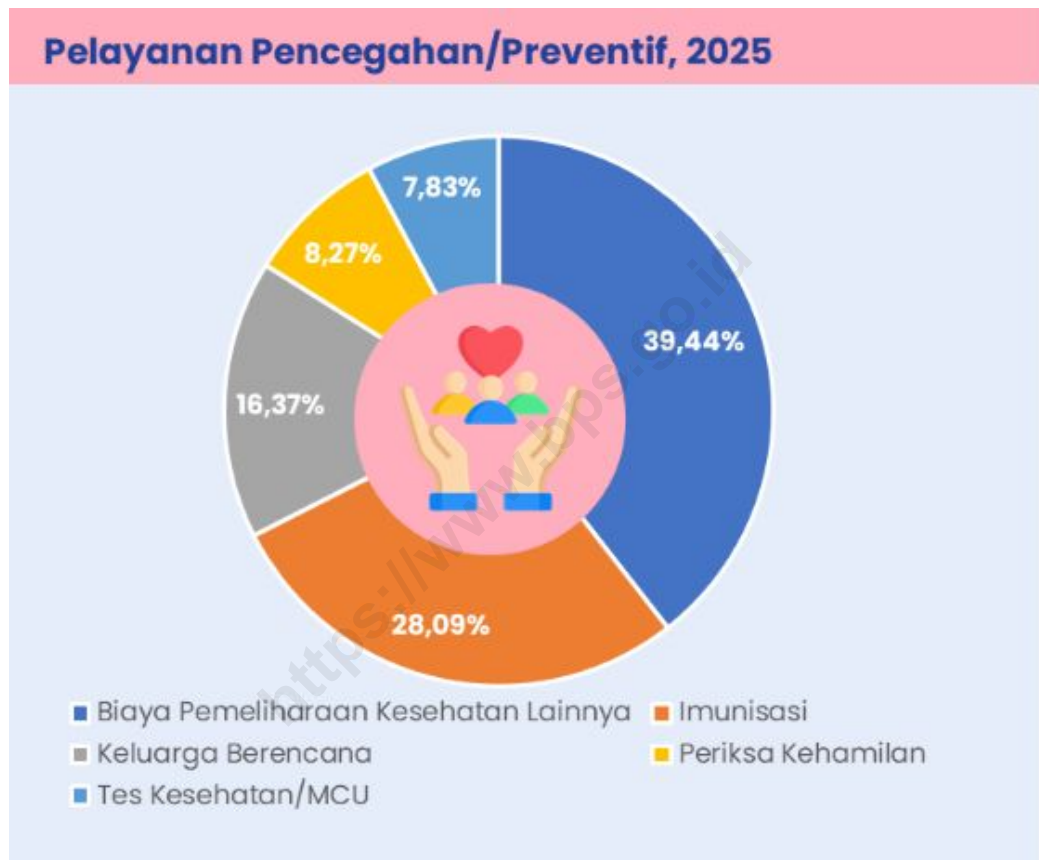
pelayanan pengobatan/kuratif di perkotaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada jenis pengeluaran kesehatan untuk pelayanan pengobatan/kuratif yang lebih detail, rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan untuk pelayanan pengobatan/kuratif di rumah sakit pemerintah maupun swasta serta praktik dokter/poliklinik pada wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pada wilayah perdesaan. Sementara, rata-rata pengeluaran kesehatan total per kapita sebulan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan untuk pelayanan pengobatan/kuratif di Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu dan praktik petugas kesehatan (bidan/perawat/mantri kesehatan). Hal tersebut menunjukkan perbedaan perilaku masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam pelayanan pengobatan/kuratif.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 5.3
Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif Menurut Ragamnya, 2025

Pada tahun 2025, proporsi terbesar biaya kesehatan untuk pelayanan pencegahan/preventif adalah untuk biaya pemeliharaan kesehatan lainnya yaitu sebesar 39,44 persen (Gambar 5.4). Termasuk dalam biaya pemeliharaan kesehatan lainnya adalah biaya untuk urut, *fitness*, bekam, *detox*, yoga, futsal, senam kebugaran, vitamin, jamu untuk menjaga kesehatan, dsb. Selain itu, proporsi biaya kesehatan untuk pelayanan pencegahan/preventif adalah untuk imunisasi yaitu sebesar 28,09 persen, dan untuk KB (Keluarga Berencana) yaitu sebesar 16,37 persen.



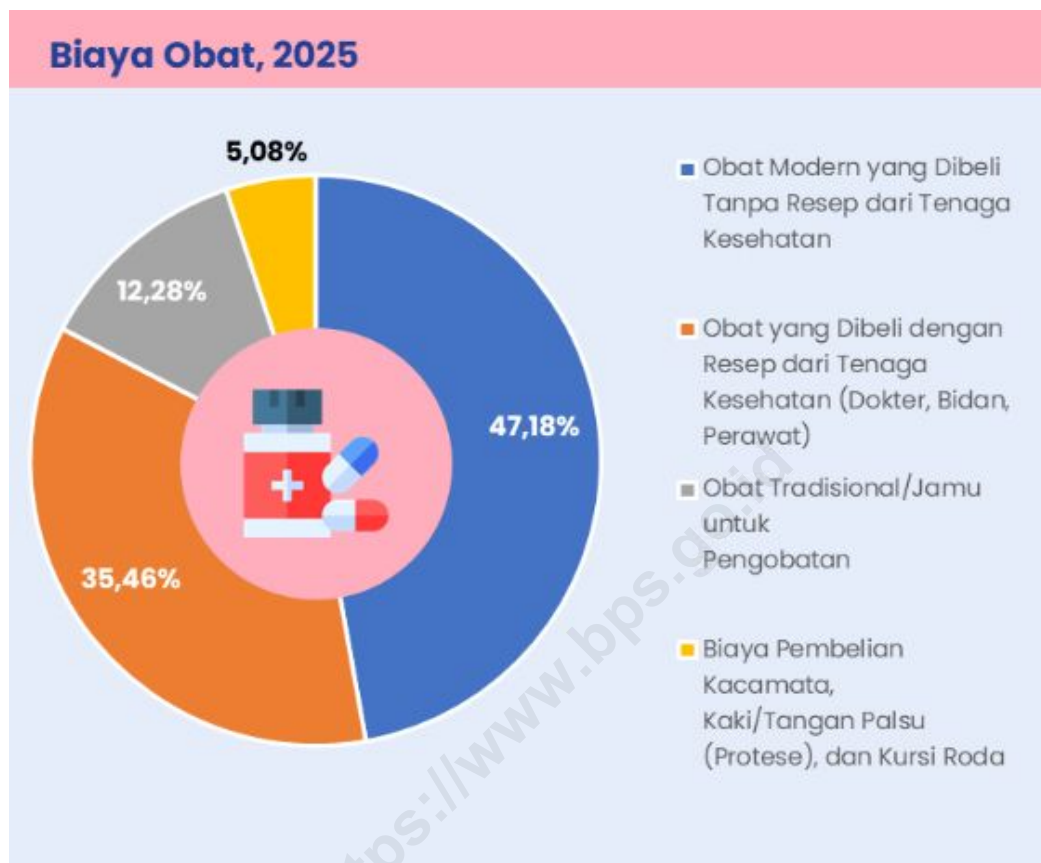
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 5.4
Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif Menurut Ragamnya, 2025

Gambar 5.5 menunjukkan hampir setengah dari biaya obat yang dikeluarkan oleh penduduk Indonesia adalah untuk obat modern yang dibeli tanpa resep dari tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan data Susenas Maret 2025 yang menunjukkan bahwa 78,43 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pernah mengobati sendiri. Sementara itu, obat



yang dibeli dengan resep dari tenaga kesehatan berapa pada urutan kedua proporsi terbesar pengeluaran kesehatan untuk biaya obat yaitu sebesar 35,46 persen.



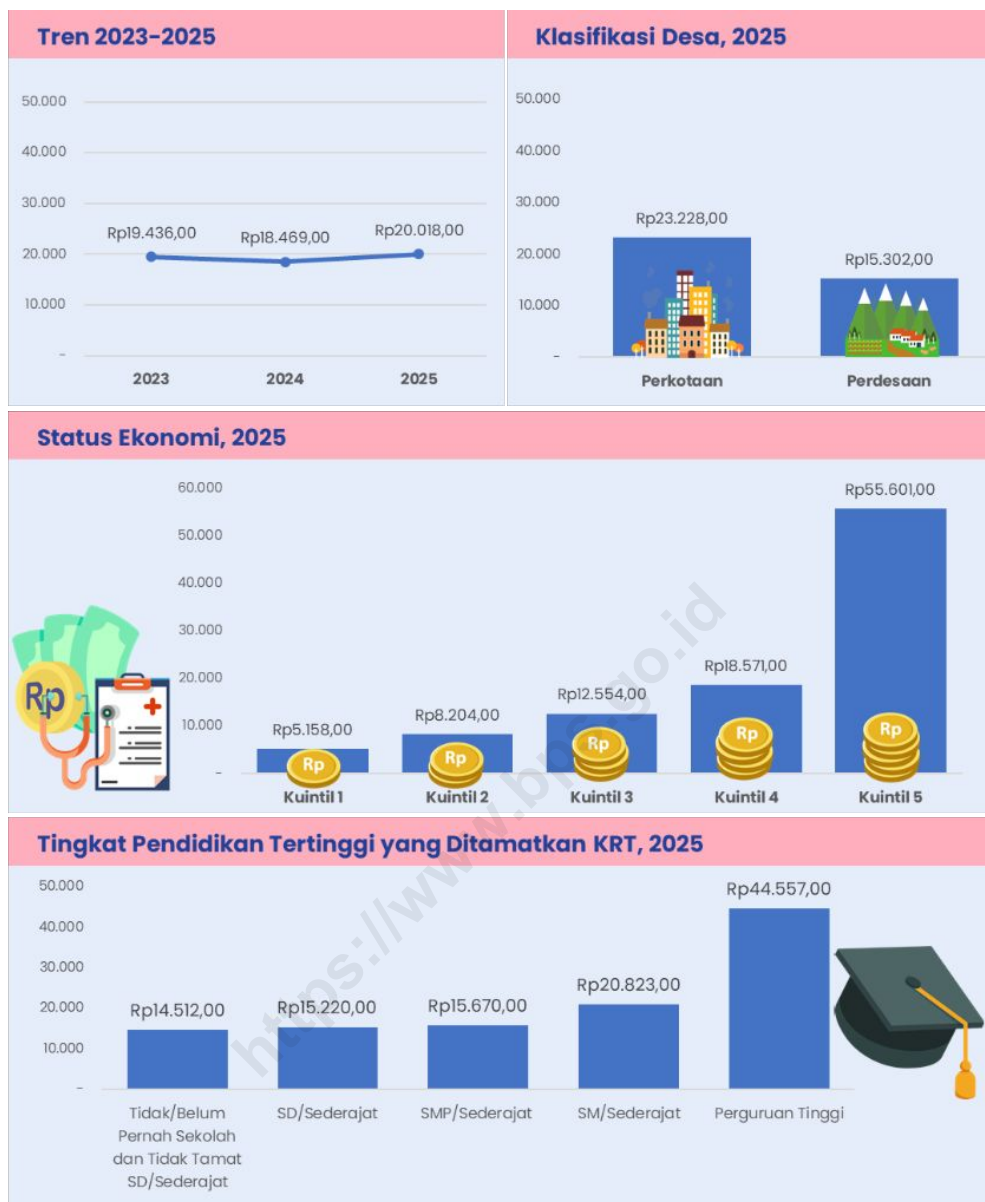
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 5.5

Proporsi Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk untuk Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif Menurut Ragamnya, 2025

5.3 OOP Pengeluaran Kesehatan

Pengeluaran kesehatan oleh penduduk dapat dikelompokkan menurut cara pembayarannya yaitu yang dibayar sendiri oleh rumah tangga atau OOP dan yang ditanggung oleh pihak lain seperti asuransi kesehatan. Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk untuk kesehatan yang dibayar sendiri (OOP biaya kesehatan) sebesar Rp20.018,00, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp18.469,00 maupun tahun 2023 yang sebesar Rp19.436,00 (Gambar 5.6).



Gambar 5.6
Rata-rata Pengeluaran Kesehatan per Kapita Sebulan yang Dibayar Sendiri (*Out-of-Pocket*) Menurut Karakteristik, 2023-2025

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa, OOP biaya kesehatan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk perkotaan untuk kesehatan yang dibayar sendiri sebesar Rp23.228,00 sementara di perdesaan hanya sebesar Rp15.302,00. OOP biaya kesehatan makin meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk di kuintil kelima



sebesar Rp55.601,00, nilai tersebut lebih dari 10 kali lipat rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk di kuintil pertama yang hanya sebesar Rp5.158,00. Gambar 5.6 juga menunjukkan OOP biaya kesehatan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan KRT lulusan perguruan tinggi memiliki rata-rata pengeluaran per kapita penduduk untuk kesehatan yang dibayar sendiri paling besar dibandingkan mereka yang tinggal di rumah tangga dengan KRT yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Berdasarkan wilayah administratif, provinsi dengan OOP biaya kesehatan terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta dan yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (Tabel 5.23). Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk untuk kesehatan yang dibayar sendiri di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp35.164,00. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki OOP biaya kesehatan tertinggi untuk pelayanan pencegahan/preventif dan obat yaitu berturut-turut sebesar Rp7.899,00 dan Rp15.265,00 per kapita sebulan. Sementara itu, OOP biaya kesehatan untuk pelayanan pengobatan/kuratif adalah di Provinsi Bali yaitu sebesar Rp16.532,00 per kapita sebulan.

Tabel 5.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah),
2023–2025

Karakteristik	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Bukan Makanan	711.282	751.789	775.516
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	740.588	748.767	793.572
Aneka Barang dan Jasa (Kecuali Kesehatan)	387.434	391.751	398.657
Kesehatan	146.185	146.309	160.873
OOP	31.445	34.016	39.837
Non OOP	19.436	18.469	20.018
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	12.010	15.548	19.819
Barang Tahan Lama	36.073	35.457	39.163
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	55.171	52.545	63.063
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	58.117	60.362	64.711
Total Pengeluaran	1.451.870	1.500.556	1.569.088

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 5.2
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk di Daerah Perkotaan Menurut
Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025

Kelompok Komoditas	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	26.965	31.099	34.828
Rumah Sakit Pemerintah	8.919	11.014	12.685
Rumah Sakit Swasta	13.832	16.037	17.918
Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu	618	695	818
Praktik Dokter/Poliklinik	2.119	2.074	2.167
Praktik Petugas kesehatan (Bidan/Perawat/Mantri Kesehatan)	919	827	785
Praktik Pengobatan Tradisional	419	367	378
Dukun penolong Persalinan	140	84	76
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	6.536	5.331	8.076
Periksa Kehamilan	556	565	667
Imunisasi	1.311	1.330	1.933
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/ <i>Medical Check Up</i>	661	457	760
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	1.104	1.152	1.126
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, Detox, Yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan, dsb)	2.904	2.953	3.591
Biaya Obat	5.615	6.457	5.934
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	2.185	2.041	2.189
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	2.357	2.412	2.728
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	785	614	685
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	288	264	332
Total Pengeluaran	39.115	42.886	48.838

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 5.3
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk di Daerah Perdesaan Menurut
Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025

Kelompok Komoditas	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	13.741	14.675	18.873
Rumah Sakit Pemerintah	4.945	6.120	7.492
Rumah Sakit Swasta	4.640	4.609	6.869
Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu	894	964	1.093
Praktik Dokter/Poliklinik	1.473	1.288	1.605
Praktik Petugas kesehatan (Bidan/Perawat/Mantri Kesehatan)	1.303	1.286	1.410
Praktik Pengobatan Tradisional	329	288	320
Dukun penolong Persalinan	157	122	84
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	4.094	2.763	4.619
Periksa Kehamilan	333	337	383
Imunisasi	1.479	1.383	1.791
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/ <i>Medical Check Up</i>	152	126	174
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	1.098	1.079	1.045
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, Detox, Yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan, dsb)	1.031	1.011	1.227
Biaya Obat	2.957	3.936	3.122
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	1.051	885	983
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.378	1.392	1.578
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	442	410	448
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	86	76	113
Total Pengeluaran	20.792	21.374	26.614

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 5.4
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut
Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025

Kelompok Komoditas	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	21.429	24.327	28.366
Rumah Sakit Pemerintah	7.256	8.996	10.582
Rumah Sakit Swasta	9.984	11.325	13.443
Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu	733	806	930
Praktik Dokter/Poliklinik	1.848	1.750	1.939
Praktik Petugas kesehatan (Bidan/Perawat/Mantri Kesehatan)	1.080	1.016	1.038
Praktik Pengobatan Tradisional	381	334	355
Dukun penolong Persalinan	147	100	80
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	5.514	4.272	6.676
Periksa Kehamilan	463	471	552
Imunisasi	1.381	1.352	1.876
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/ <i>Medical Check Up</i>	448	320	523
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	1.102	1.122	1.093
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, Detox, Yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan, dsb)	2.120	2.152	2.633
Biaya Obat	4.502	5.417	4.795
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	1.710	1.564	1.700
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.947	1.992	2.262
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	641	530	589
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	203	186	244
Total Pengeluaran	31.445	34.016	39.837

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 5.5
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi
dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2023

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	15.823	2.997	3.072	21.892
Sumatera Utara	14.286	3.746	4.018	22.050
Sumatera Barat	24.751	2.475	4.656	31.883
Riau	20.947	4.159	4.515	29.621
Jambi	22.562	4.853	4.342	31.757
Sumatera Selatan	14.502	3.602	4.606	22.710
Bengkulu	18.668	4.471	5.453	28.593
Lampung	17.089	3.318	5.229	25.636
Kep. Bangka Belitung	15.897	4.548	6.738	27.184
Kep. Riau	31.707	7.011	11.440	50.159
DKI Jakarta	36.259	10.139	12.519	58.917
Jawa Barat	27.551	5.473	4.829	37.853
Jawa Tengah	25.980	3.699	4.744	34.424
DI Yogyakarta	46.503	7.842	6.619	60.963
Jawa Timur	20.394	4.553	7.171	32.118
Banten	19.907	5.163	6.813	31.884
Bali	35.233	3.882	5.801	44.916
Nusa Tenggara Barat	14.609	3.972	4.943	23.524
Nusa Tenggara Timur	5.865	2.002	2.936	10.803
Kalimantan Barat	16.475	3.935	3.715	24.126
Kalimantan Tengah	13.723	4.262	6.357	24.342
Kalimantan Selatan	18.811	4.672	7.582	31.065
Kalimantan Timur	21.936	7.015	8.856	37.808
Kalimantan Utara	14.062	4.354	8.908	27.324
Sulawesi Utara	12.109	3.016	3.112	18.236
Sulawesi Tengah	8.097	2.359	3.590	14.046
Sulawesi Selatan	10.648	2.823	3.810	17.281
Sulawesi Tenggara	14.118	3.207	4.418	21.743
Gorontalo	8.737	3.239	2.469	14.445
Sulawesi Barat	6.889	1.847	3.660	12.395
Maluku	5.925	2.718	4.077	12.719
Maluku Utara	5.925	2.737	4.284	12.946
Papua Barat	8.6721	2.752	3.304	14.728
Papua Barat Daya	–	–	–	–
Papua	5.745 ²	2.816	2.007	10.568
Papua Selatan	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–
Indonesia	21.429	4.502	5.514	31.445

Catatan: ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Tabel 5.6
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi
dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2024

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	15.157	2.656	3.219	21.032
Sumatera Utara	19.113	3.877	4.016	27.006
Sumatera Barat	26.671	3.858	3.160	33.689
R i a u	19.239	5.083	3.714	28.036
J a m b i	22.198	4.819	3.889	30.906
Sumatera Selatan	13.934	4.513	3.887	22.334
Bengkulu	23.758	5.242	3.253	32.253
Lampung	17.336	5.157	2.809	25.302
Kep, Bangka Belitung	23.756	6.603	4.549	34.908
Kep, Riau	29.728	9.199	4.388	43.314
DKI Jakarta	40.070	11.839	9.437	61.345
Jawa Barat	30.386	4.905	4.643	39.934
Jawa Tengah	30.402	4.545	3.752	38.699
DI Yogyakarta	51.028	7.900	7.424	66.353
Jawa Timur	27.234	7.241	4.574	39.049
Banten	24.450	6.377	4.275	35.102
B a l i	38.880	6.356	4.086	49.323
Nusa Tenggara Barat	16.427	3.661	4.328	24.417
Nusa Tenggara Timur	5.636	2.886	2.052	10.574
Kalimantan Barat	16.025	5.008	5.043	26.075
Kalimantan Tengah	13.216	6.510	4.526	24.252
Kalimantan Selatan	19.118	7.408	4.562	31.089
Kalimantan Timur	22.595	9.240	6.219	38.055
Kalimantan Utara	13.996	8.726	2.647	25.368
Sulawesi Utara	14.601	3.276	3.491	21.369
Sulawesi Tengah	7.498	3.602	2.524	13.624
Sulawesi Selatan	10.473	3.358	2.950	16.781
Sulawesi Tenggara	6.759	3.648	2.966	13.373
Gorontalo	10.985	2.335	3.033	16.353
Sulawesi Barat	8.081	3.051	2.492	13.624
Maluku	8.992	2.400	2.197	13.590
Maluku Utara	6.677	3.338	2.636	12.651
Papua Barat	5.369	2.036	2.934	10.339
Papua Barat Daya	11.576	5.908	3.329	20.813
Papua	9.671	2.297	3.450	15.418
Papua Selatan	13.896	6.994	3.346	24.236
Papua Tengah	8.463	1.036	1.139	10.639
Papua Pegunungan	3.039	378	2.437	5.854
Indonesia	24.327	5.417	4.272	34.016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 5.7
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Provinsi
dan Kelompok Komoditas (rupiah), 2025

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	15.608	3.170	2.877	21.655
Sumatera Utara	21.409	4.198	5.028	30.636
Sumatera Barat	33.170	3.192	5.219	41.582
R i a u	25.097	4.378	5.524	34.999
J a m b i	20.679	4.208	6.176	31.063
Sumatera Selatan	17.874	3.632	5.272	26.778
Bengkulu	21.751	3.768	5.440	30.959
Lampung	21.390	2.908	5.607	29.905
Kep, Bangka Belitung	20.828	5.330	6.915	33.073
Kep, Riau	32.880	6.625	16.114	55.619
DKI Jakarta	42.063	10.251	18.818	71.131
Jawa Barat	38.740	4.989	6.109	49.838
Jawa Tengah	35.163	4.512	5.581	45.256
DI Yogyakarta	55.904	9.984	12.730	78.619
Jawa Timur	28.645	5.330	7.450	41.426
Banten	28.474	4.627	7.305	40.406
B a l i	44.615	4.427	8.643	57.685
Nusa Tenggara Barat	14.331	4.152	5.177	23.659
Nusa Tenggara Timur	5.512	2.122	4.877	12.511
Kalimantan Barat	18.556	7.003	5.096	30.654
Kalimantan Tengah	15.428	4.933	6.606	26.967
Kalimantan Selatan	22.972	5.253	8.903	37.128
Kalimantan Timur	37.740	7.311	10.566	55.617
Kalimantan Utara	16.853	4.251	12.749	33.854
Sulawesi Utara	16.549	3.714	4.052	24.315
Sulawesi Tengah	9.862	2.713	3.309	15.884
Sulawesi Selatan	17.198	3.322	5.102	25.621
Sulawesi Tenggara	8.757	2.885	3.978	15.620
Gorontalo	9.867	4.742	3.488	18.097
Sulawesi Barat	9.809	1.981	3.962	15.751
Maluku	6.809	3.040	3.821	13.671
Maluku Utara	6.143	2.946	3.189	12.279
Papua Barat	6.237	2.824	2.883	11.944
Papua Barat Daya	11.341	4.291	9.230	24.861
Papua	13.898	3.983	1.172	19.053
Papua Selatan	19.169	3.535	8.897	31.601
Papua Tengah	5.868	1.899	1.258	9.025
Papua Pegunungan	5.308	3.134	642	9.083
Indonesia	28.366	4.795	6.676	39.837

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 5.8
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2023

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	13.868	13.097	26.965
Perdesaan	8.704	5.037	13.741
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	8.741	6.402	15.143
SD/Sederajat	8.736	6.703	15.439
SMP/Sederajat	9.813	7.907	17.720
SMA/Sederajat	12.175	11.491	23.666
Perguruan Tinggi	26.274	20.943	47.217
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2.460	1.270	3.731
Kuintil 2	4.242	2.563	6.805
Kuintil 3	6.491	4.709	11.200
Kuintil 4	10.295	8.534	18.828
Kuintil 5	35.044	31.539	66.582
Indonesia	11.706	9.723	21.429

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2023



Tabel 5.9
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik Rumah
Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2024

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	13.345	17.754	31.099
Perdesaan	8.042	6.633	14.675
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	9.804	9.826	19.630
SD/Sederajat	8.258	8.768	17.026
SMP/Sederajat	9.083	9.274	18.358
SMA/Sederajat	11.156	15.886	27.042
Perguruan Tinggi	25.166	28.917	54.083
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2.490	1.871	4.360
Kuintil 2	4.185	3.453	7.638
Kuintil 3	6.111	6.196	12.307
Kuintil 4	9.742	10.686	20.428
Kuintil 5	33.263	43.638	76.901
Indonesia	11.158	13.169	24.327

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 5.10
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Kuratif (rupiah), 2025

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	12.814	22.014	34.828
Perdesaan	9.558	9.314	18.873
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	9.011	12.582	21.593
SD/Sederajat	9.599	11.886	21.485
SMP/Sederajat	9.138	12.819	21.957
SMA/Sederajat	11.907	19.562	31.469
Perguruan Tinggi	22.381	34.501	56.883
Status Ekonomi			
Kuintil 1	2.551	2.892	5.443
Kuintil 2	4.230	5.164	9.394
Kuintil 3	6.972	8.884	15.856
Kuintil 4	10.728	14.864	25.592
Kuintil 5	32.996	52.550	85.545
Indonesia	11.495	16.870	28.366

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025



Tabel 5.11
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2023

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4.418	1.197	6.536
Perdesaan	2.605	352	4.094
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2.850	406	3.203
SD/Sederajat	2.642	514	3.753
SMP/Sederajat	2.967	577	4.846
SMA/Sederajat	3.881	1.199	6.236
Perguruan Tinggi	8.256	1.804	12.814
Status Ekonomi			
Kuintil 1	894	124	2.514
Kuintil 2	1.522	210	3.420
Kuintil 3	2.380	381	3.853
Kuintil 4	3.410	658	4.984
Kuintil 5	10.088	2.843	12.799
Indonesia	3.659	843	5.514

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Tabel 5.12
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2024

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4.097	1.234	5.331
Perdesaan	2.419	344	2.763
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2.820	536	3.356
SD/Sederajat	2.513	491	3.005
SMP/Sederajat	2.759	524	3.283
SMA/Sederajat	3.479	1.085	4.564
Perguruan Tinggi	7.714	2.329	10.043
Status Ekonomi			
Kuintil 1	925	120	1.046
Kuintil 2	1.547	236	1.783
Kuintil 3	2.271	428	2.699
Kuintil 4	3.526	774	4.300
Kuintil 5	8.757	2.775	11.532
Indonesia	3.405	867	4.272

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2024



Tabel 5.13
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Obat (rupiah), 2025

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4.665	1.269	5.934
Perdesaan	2.769	353	3.122
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	3.217	559	3.776
SD/Sederajat	2.860	510	3.370
SMP/Sederajat	3.052	610	3.663
SMA/Sederajat	3.954	1.084	5.038
Perguruan Tinggi	8.780	2.294	11.074
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1.061	165	1.226
Kuintil 2	1.753	295	2.049
Kuintil 3	2.635	543	3.178
Kuintil 4	3.891	847	4.739
Kuintil 5	10.146	2.638	12.783
Indonesia	3.897	898	4.795

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 5.14
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2023

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4.911	1.625	5.615
Perdesaan	2.903	1.191	2.957
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2.338	865	3.255
SD/Sederajat	2.761	992	3.156
SMP/Sederajat	3.481	1.365	3.543
SMA/Sederajat	4.617	1.620	5.080
Perguruan Tinggi	9.651	3.163	10.060
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1.619	894	1.018
Kuintil 2	2.269	1.151	1.732
Kuintil 3	2.724	1.129	2.761
Kuintil 4	3.737	1.246	4.068
Kuintil 5	10.002	2.798	12.931
Indonesia	4.070	1.444	4.502

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2023



Tabel 5.15
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2024

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	4.731	1.726	6.457
Perdesaan	2.729	1.207	3.936
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2.132	914	3.046
SD/Sederajat	2.632	1.020	3.652
SMP/Sederajat	3.199	1.289	4.489
SMA/Sederajat	4.443	1.807	6.250
Perguruan Tinggi	9.522	3.210	12.731
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1.492	962	2.453
Kuintil 2	2.125	1.096	3.221
Kuintil 3	2.594	1.171	3.766
Kuintil 4	3.614	1.447	5.061
Kuintil 5	9.702	2.884	12.586
Indonesia	3.905	1.512	5.417

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 5.16
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Menurut Karakteristik
Rumah Tangga dan Cara Pembayaran Untuk Biaya Preventif (rupiah), 2025

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5.291	2.785	8.076
Perdesaan	2.857	1.763	4.619
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2.187	1.369	3.556
SD/Sederajat	2.638	1.472	4.110
SMP/Sederajat	3.360	1.875	5.235
SMA/Sederajat	4.605	2.839	7.444
Perguruan Tinggi	12.048	5.472	17.520
Status Ekonomi			
Kuintil 1	1.495	1.341	2.836
Kuintil 2	2.164	1.545	3.709
Kuintil 3	2.874	1.803	4.676
Kuintil 4	3.788	2.151	5.938
Kuintil 5	11.205	5.016	16.221
Indonesia	4.305	2.371	6.676

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025

Tabel 5.17
Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut
Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2023

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	23.197	15.918	39.115
Perdesaan	14.212	6.580	20.792
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	13.929	7.673	21.601
SD/Sederajat	14.138	8.210	22.348
SMP/Sederajat	16.260	9.849	26.109
SMA/Sederajat	20.673	14.309	34.982
Perguruan Tinggi	44.181	25.910	70.091
Status Ekonomi			
Kuintil 1	4.974	2.289	7.262
Kuintil 2	8.033	3.924	11.957
Kuintil 3	11.595	6.218	17.813
Kuintil 4	17.442	10.438	27.880
Kuintil 5	55.134	37.179	92.313
Indonesia	19.436	12.010	31.445

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Tabel 5.18
Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut
Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2024

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	22.173	20.714	42.886
Perdesaan	13.190	8.184	21.374
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	14.755	11.277	26.032
SD/Sederajat	13.404	10.279	23.683
SMP/Sederajat	15.042	11.088	26.130
SMA/Sederajat	19.078	18.778	37.856
Perguruan Tinggi	42.401	34.456	76.858
Status Ekonomi			
Kuintil 1	4.907	2.953	7.860
Kuintil 2	7.857	4.785	12.642
Kuintil 3	10.976	7.796	18.772
Kuintil 4	16.882	12.907	29.790
Kuintil 5	51.722	49.297	101.019
Indonesia	18.469	15.548	34.016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2024



Tabel 5.19
Rata-rata Pengeluaran Biaya Kesehatan per Kapita Sebulan Penduduk Menurut
Karakteristik Rumah Tangga dan Cara Pembayaran (rupiah), 2025

Karakteristik	OOP	Non OOP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	23.228	25.610	48.838
Perdesaan	15.302	11.312	26.614
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	14.512	14.412	28.925
SD/Sederajat	15.220	13.745	28.964
SMP/Sederajat	15.670	15.184	30.854
SMA/Sederajat	20.823	23.128	43.951
Perguruan Tinggi	44.557	40.919	85.476
Status Ekonomi			
Kuintil 1	5.158	4.348	9.506
Kuintil 2	8.204	6.946	15.151
Kuintil 3	12.554	11.156	23.710
Kuintil 4	18.571	17.697	36.268
Kuintil 5	55.601	58.949	114.550
Indonesia	20.018	19.819	39.837

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



Tabel 5.20
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP)
Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023–2025

Kelompok Komoditas	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	11.706	11.158	11.495
Rumah Sakit Pemerintah	3.287	3.127	2.857
Rumah Sakit Swasta	5.105	5.048	5.495
Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu	378	366	330
Praktik Dokter/Poliklinik	1.509	1.308	1.471
Praktik Petugas kesehatan (Bidan/Perawat/Mantri Kesehatan)	945	918	941
Praktik Pengobatan Tradisional	357	307	338
Dukun penolong Persalinan	125	84	63
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	4.070	3.905	4.625
Periksa Kehamilan	358	352	384
Imunisasi	616	553	641
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/ <i>Medical Check Up</i>	302	187	320
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	928	921	917
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, Detox, Yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan, dsb)	1.866	1.893	2.363
Biaya Obat	3.659	3.405	3.897
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	1.158	995	1.119
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.759	1.788	2.050
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	575	471	528
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	167	151	201
Total Pengeluaran	19.436	18.469	20.018

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025



Tabel 5.21
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP)
Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6.453	2.588	2.222	11.263
Sumatera Utara	8.767	3.284	3.203	15.254
Sumatera Barat	9.022	2.057	2.744	13.822
R i a u	12.768	3.911	3.507	20.186
J a m b i	16.200	4.383	3.334	23.917
Sumatera Selatan	8.736	2.887	3.301	14.924
Bengkulu	8.924	3.701	3.664	16.289
Lampung	10.231	3.000	4.096	17.327
Kep, Bangka Belitung	8.908	3.990	4.871	17.769
Kep, Riau	11.503	5.824	7.916	25.243
DKI Jakarta	19.535	7.223	9.150	35.907
Jawa Barat	16.524	4.167	4.057	24.749
Jawa Tengah	12.433	3.163	3.321	18.917
DI Yogyakarta	15.962	5.628	5.502	27.092
Jawa Timur	13.097	3.978	5.783	22.858
Banten	10.383	4.132	4.661	19.176
B a l i	14.350	3.232	4.516	22.098
Nusa Tenggara Barat	7.857	3.644	3.076	14.577
Nusa Tenggara Timur	2.380	1.729	997	5.105
Kalimantan Barat	10.522	3.430	2.941	16.893
Kalimantan Tengah	9.412	3.969	4.567	17.948
Kalimantan Selatan	10.554	3.984	5.686	20.223
Kalimantan Timur	7.890	4.732	5.381	18.003
Kalimantan Utara	4.931	3.442	4.532	12.906
Sulawesi Utara	5.789	2.281	1.981	10.051
Sulawesi Tengah	3.146	1.847	1.622	6.615
Sulawesi Selatan	4.974	2.170	1.889	9.034
Sulawesi Tenggara	8.463	2.464	2.170	13.098
Gorontalo	3.836	2.580	1.682	8.099
Sulawesi Barat	3.073	1.426	1.343	5.842
Maluku	3.192	2.189	1.725	7.106
Maluku Utara	3.062	1.960	2.154	7.176
Papua Barat	4.1521	2.118	1.511	7.781
Papua Barat Daya	–	–	–	–
Papua	3.688 ²	2.000	1.652	7.340
Papua Selatan	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–
Indonesia	11.706	3.659	4.070	19.436

Catatan: ¹Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya

²Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Tabel 5.22
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP)
Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2024

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5.473	2.822	1.982	10.278
Sumatera Utara	9.616	3.348	2.864	15.829
Sumatera Barat	6.359	2.242	2.131	10.731
R i a u	11.070	3.312	4.066	18.447
J a m b i	11.399	3.506	3.655	18.560
Sumatera Selatan	7.123	3.100	3.101	13.324
Bengkulu	9.070	2.549	3.314	14.933
Lampung	7.777	2.511	3.863	14.150
Kep, Bangka Belitung	12.056	3.348	4.396	19.799
Kep, Riau	17.084	3.610	7.515	28.210
DKI Jakarta	15.590	6.495	8.724	30.809
Jawa Barat	14.060	3.712	3.851	21.624
Jawa Tengah	13.544	3.127	3.337	20.008
DI Yogyakarta	12.077	5.215	5.917	23.209
Jawa Timur	14.585	3.747	5.299	23.631
Banten	10.262	3.370	4.683	18.315
B a l i	19.027	3.196	4.748	26.972
Nusa Tenggara Barat	7.546	3.275	2.584	13.406
Nusa Tenggara Timur	2.271	1.640	1.072	4.984
Kalimantan Barat	7.873	3.670	3.307	14.850
Kalimantan Tengah	8.211	4.090	4.820	17.122
Kalimantan Selatan	10.583	3.773	5.746	20.101
Kalimantan Timur	7.492	5.009	5.659	18.159
Kalimantan Utara	6.891	2.380	4.104	13.375
Sulawesi Utara	6.242	2.464	2.096	10.802
Sulawesi Tengah	3.389	2.042	1.831	7.263
Sulawesi Selatan	3.937	2.334	1.637	7.908
Sulawesi Tenggara	2.841	2.432	1.956	7.228
Gorontalo	3.767	2.344	1.653	7.764
Sulawesi Barat	3.928	1.903	896	6.727
Maluku	6.283	1.762	1.212	9.257
Maluku Utara	3.859	1.978	1.835	7.673
Papua Barat	3.261	2.254	1.057	6.572
Papua Barat Daya	5.911	2.293	2.025	10.229
Papua	4.041	2.433	1.908	8.382
Papua Selatan	8.857	2.825	4.195	15.876
Papua Tengah	7.915	1.067	1.004	9.986
Papua Pegunungan	437	722	142	1.301
Indonesia	11.158	3.405	3.905	18.469

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 5.23
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk yang Dibayar Sendiri (OOP)
Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2025

Provinsi	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	7.274	2.781	2.085	12.140
Sumatera Utara	10.414	3.741	3.704	17.859
Sumatera Barat	5.757	2.549	3.201	11.507
R i a u	13.677	3.919	4.172	21.768
J a m b i	9.602	3.809	4.508	17.920
Sumatera Selatan	7.552	2.987	3.476	14.015
Bengkulu	7.920	3.397	3.692	15.010
Lampung	9.549	2.654	4.057	16.260
Kep. Bangka Belitung	8.408	4.669	4.399	17.477
Kep. Riau	12.374	5.823	10.737	28.934
DKI Jakarta	12.000	7.899	15.265	35.164
Jawa Barat	16.078	4.028	4.417	24.523
Jawa Tengah	12.598	3.728	3.952	20.279
DI Yogyakarta	15.572	7.483	7.903	30.958
Jawa Timur	13.545	4.238	5.738	23.521
Banten	13.225	3.690	4.732	21.647
B a l i	16.532	3.514	5.578	25.625
Nusa Tenggara Barat	6.753	3.105	2.845	12.702
Nusa Tenggara Timur	2.143	1.807	1.222	5.172
Kalimantan Barat	10.245	5.164	3.569	18.978
Kalimantan Tengah	9.125	4.121	4.883	18.129
Kalimantan Selatan	11.539	4.443	6.102	22.084
Kalimantan Timur	9.959	6.074	5.903	21.935
Kalimantan Utara	3.216	3.286	5.172	11.673
Sulawesi Utara	6.704	2.735	2.211	11.650
Sulawesi Tengah	4.386	2.321	1.554	8.261
Sulawesi Selatan	4.718	2.811	1.962	9.491
Sulawesi Tenggara	2.838	2.314	2.142	7.295
Gorontalo	3.695	3.881	2.169	9.744
Sulawesi Barat	3.285	1.521	1.336	6.142
Maluku	3.718	2.228	1.759	7.705
Maluku Utara	2.489	2.161	1.766	6.416
Papua Barat	2.487	2.304	935	5.725
Papua Barat Daya	5.217	3.503	1.945	10.665
Papua	9.582	3.248	729	13.559
Papua Selatan	15.107	2.756	4.279	22.142
Papua Tengah	5.058	1.809	1.118	7.985
Papua Pegunungan	2.347	1.435	264	4.046
Indonesia	11.495	3.897	4.625	20.018

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



DAFTAR PUSTAKA

Profil Statistik Kesehatan 2025

- Fadl, et al. "Routine childhood immunization in Sub-Saharan Africa: addressing parental vaccine hesitancy." *Public Health* 226 (2024): 66–73.
- Kalhor, et al. "Predictors of exclusive breastfeeding: a systematic review and meta-analysis." *International Breastfeeding Journal* 20, no. 1 (2025): 52.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas. 2020. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): Pilar Pembangunan Sosial*. Edisi II. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- _____. 2020. *Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Jakarta: Bappenas.
- Mboi, N., Syailendrawati, R., Ostroff, S. M., Elyazar, I. R., Glenn, S. D., Rachmawati, T., ... & Mokdad, A. H. (2022). The state of health in Indonesia's provinces, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Global Health*, 10(11), e1632–e1645.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI). 2024. "Target 98 Persen UHC Tercapai di 2024, Wapres Apresiasi Sinergi BPJS Kesehatan dan Pemangku Kepentingan". <https://www.wapresri.go.id/miliki-potensi-besar-wapres-minta-revitalisasi-jalur-rempah-bangkitkan-kejayaan-perdagangan-rempah-indonesia-2/>.
- WHO & UNICEF. 2021. Indicators for assessing infant and young child feeding practices: definitions and measurement methods. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Williams, Sarah V., Tanimola Akande, and Kaja Abbas. "Systematic review of social determinants of childhood immunisation in low-and middle-income countries and equity impact analysis of childhood vaccination coverage in Nigeria." *Plos one* 19, no. 3 (2024): e0297326.



LAMPIRAN

Profil Statistik Kesehatan 2025

Lampiran 1 Kuesioner KOR Susenas Maret 2025

SELAMAT PAGI/SANGGUP/SEMANGAT! KAMI SAYA DARI BPS SEDANG MENKUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELOMPOKAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU, KAMI SAYA AKAN MENYAWANGKAR BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASAKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN PEMBAHNGAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

- ☐ Ya bersedia → Mulai wawancara
☐ Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXII Catatan
☐ Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXII Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pemeriksa.

BLOK II. KETERANGAN PENDATAAN				
Urutan	Nama dan Kode NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pendata		Staf BPS Provinsi Staf BPS Kab/Kota Mitra	1 Tgl 2 Blh 3	
202. Penerima		Staf BPS Provinsi Staf BPS Kab/Kota Mitra	1 Tgl 2 Blh 3	
203. Hasil pendataan rumah tangga	Terisi lengkap 1 Terisi tidak lengkap 2 Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan 3 Responden menolak 4 Rumah tangga pindah/bangunan tempat tinggal sudah tidak ada 5			

BLOK III. RINGKASAN	
301	Banyaknya anggota rumah tangga
302	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0-4 tahun
303	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas
304	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas
305	Banyaknya perempuan umur 10-54 tahun berstatus pernah kawin

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2025

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	
101	Provinsi
102	Kabupaten/Kota
103	Kecamatan
104	Desa/Kelurahan
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan
106	Nomor Blok Sensus
107	Nomor Kode Sampel
108	Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga
110	Nama Kepala Rumah Tangga
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga

Latitude (lintang) :
Longitude (bujur) :

* Coret yang tidak perlu



Lanjutan Lampiran 1

Waktu mulai wawancara: : :

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

No. unit ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) SEBUTKAN SAMA SAMA YANG BISA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPERJURUSAN MAKANNYA Dikelola dari satu dapur, mulai dari kepala rumah tangga, pasangannya, anak yang belum menikah, anak yang sudah menikah, menantu, cucu, orang tua mertua, pembantu/USP, keluarga, dan lainnya.	APAKAH HUBUNGAN DENGAN KELOMPOK RUMAH TANGGA?	APAKAH STATUS PERKAWINAN?	KUPAH (nama) DILAHIRKAN?	BERAPAKAH UMUR (nama)?	Jika berstatus kawin (404-2) Asapah (nama) pasangannya (nama) harus diisi	Jika berstatus kawin (404-2) Asapah (nama) pasangannya (nama) harus diisi	Jika berstatus kawin (404-2) Asapah (nama) pasangannya (nama) harus diisi	No. unit ART
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
1		1		/ /					
2				/ /					
3				/ /					
4				/ /					
5				/ /					
6				/ /					
7				/ /					
8				/ /					
9				/ /					
10				/ /					

Tgl/Bln/Thn (Dalam DD/MM/YYYY tahun)
Jika 97 tahun, tulis 97
1 Ya 5 Tidak

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat. Cek sekali lagi, apakah pengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.
Jika terdapat ART yang pengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.
Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)
 1 KRT 3 Anak kandung/tni 5 Menantu 7 Orang tua mertua 9 Lainnya (familian orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)
 2 Istri/suami 4 Anak angkat 6 Cucu 8 Pembantu/sopir

Waktu selesai wawancara: : :

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
- Tulis isian selengkap selengkap dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
- Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pemeriksa dan pengisi. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
- Perdasarkan hasil pengisian kuesioner seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pemeriksa.
- Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
- Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibaca.
- Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh diingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh diingkari salah satu.
- Blok I terentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**.
- Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda garis putus-putus dan tulisan "Lipat disini" pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibarkan saja).
- Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
- Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
- Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dan selap blok.
- Contoh cara penulisan informasi penerimaan bantuan/bantuan sosial/subsidi dari pemerintah daerah adalah menggunakan format rata kanan.

Bantuan yang diterima Sahabat Tersebut
 Rp. 1.500.000,-
 (a) Bantuan dari pemerintah daerah
 (b) Bantuan dari swasta
 (c) Bantuan dari keluarga

14. Tabulasi umur responden yang sudah berumur tahun pada bulan Februari 2025.

Tahun lahir	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tahun lahir	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tahun lahir	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Tahun lahir	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
														60



Lanjutan Lampiran 1

KONSEP DAN DEFINISI			
> Pertanyaan 615: Apa IjazahSTTB Tertinggi yang Dimiliki? IjazahSTTB adalah lamaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. > Pertanyaan 613: Dalam 3 Bulan Terakhir, Seberapa Sering Menggunakan Internet? Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong mengakses internet yang tinggi Minimal satu kali dalam seminggu, tetapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, tetapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali, artinya orang tersebut tergolong jarang mengakses internet. Tidak mengakses lebih dari seminggu, yaitu dalam 3 bulan terakhir, pernah lebih dari 1 minggu tidak mengakses internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. > Pertanyaan 605: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2024, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya? Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tidak kejahatan atau usaha percobaan tidak kejahatan. > Pertanyaan 1304: Jenis Imunisasi			
Jenis Imunisasi	Cara Pemberian	Umur	
Hepatitis B (<24 jam)	Disuntikkan di paha.	Diberikan sesaat setelah bayi lahir sampai bayi berumur 7 hari.	
BCG	Disuntikkan di pangkal lengan kanan atas dan biasanya menimbulkan bekas luka.	Diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum berumur 1 bulan.	
Polio Tetes 1-4	Diteteskan ke dalam mulut.	Diberikan 4 kali pada umur 1, 2, 3, dan 4 bulan.	
DPT-HB-Hib 1-3	Disuntikkan di paha, biasa diberikan bersama dengan vaksin polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.	
Rota Virus (RV) 1-3	Diteteskan ke dalam mulut.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.	
PCV 1-3	Disuntikkan di paha kiri, biasanya diberikan bersama vaksin DPT-HB-Hib dan Polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 12 bulan.	
Polio suntik (IPV) 1-2	Disuntikkan di paha kiri.	Diberikan mulai umur 2 atau 3 bulan.	
Campak-Rubella (MR)	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan satu kali mulai umur 9 bulan.	
Japanese Encephalitis (JE)	Disuntikkan di lengan atas.	Diberikan mulai umur 9 bulan di wilayah tertentu sesuai peraturan Kementerian Kesehatan (Bali, Kalimantan Barat, Di Yogyakarta).	
DPT- Hib-HB lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kanan.	Diberikan pada umur 18 bulan.	
Campak-Rubella (MR) Lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan pada umur 18-24 bulan.	

KONSEP DAN DEFINISI	
> Pertanyaan 203: Hasil Pendataan Rumah Tangga - Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap. - Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pendataan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota. - Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pendataan. - Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai. - Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tanggabangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pendataan. Misalnya: rumah tangga pindah, keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/hunah karena gempa/banjir/bencana lain. > Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT. > Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini? Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut. > Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. > Pertanyaan 611: Apakah Sedang/Pernah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket AB/C)? Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket AB/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun Kementerian lainnya. > Pertanyaan 613: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Dilikuti? Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket AB/C). > Pertanyaan 614: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki? Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkat/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket AB/C); di sekolah negeri maupun swasta. Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket AB/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.	



Profil Statistik Kesehatan 2025

4

Lampiran

459

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN														
Untuk ART Umur 5-24 Tahun														
No. Unit ART	Untuk ART Umur 5 tahun ke Atas					Untuk ART yang masih bersekolah (611=2)					Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (611=2 atau 3)		Untuk ART yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi (611=1 atau 3)	
	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? PERNAH BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C)	APAKAH BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA?	APA JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG/ PERNAH DIKUTI (nama)?	APA TINGKAT/ KELAS YANG SEDANG/ PERNAH DIDUDUKI (nama)?	APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2023/2024)?	DALAM SEMINGGU, SEBERAPA SENG BIASANYA (nama) SAGAPAN/MAKAN PAK?	DALAM SETUJUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENDAPATKAN UANG PERNAH?	DALAM SETUJUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)?	DALAM SETUJUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)?	APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2023/2024)?	APA JENJANG PENDIDIKAN YANG DIDUDUKI (nama) WAKTUTU?	APA TINGKAT/ KELAS YANG DIDUDUKI (nama) WAKTUTU?		
	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)	(Kode)		
	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
1								A B X						
2								A B X						
3								A B X						
4								A B X						
5								A B X						
6								A B X						
7								A B X						
8								A B X						
9								A B X						
10								A B X						

Kode 611 dan 621:		Kode 613 dan 622: Jenjang Pendidikan dan Kode 615: Jajaz/STTB		Kode 614 dan 623: Tingkat/Kelas		Kode 618: Program Makanan Tambahan		Kode 624: Alasan Tidak Sekolah																	
Partisipasi Sekolah	1. Tidak/belum pernah bersekolah	01 Paket A	02 SBLB	03 SD	04 MI	05 SPW/PDF Ula	06 Paket B	07 SMP LB	08 SMP	09 MTs	10 SPW/PDF Wulstha	11 Paket C	12 SMLB	13 SMA	14 NAK	15 SMK	16 NAK	17 SPW/PDF Ula	18 D1/D2	19 D3	20 D4	21 S1	22 Prolesi	23 S2	24 S3
Partisipasi Sekolah	1. Tidak/belum pernah bersekolah	01 Paket A	02 SBLB	03 SD	04 MI	05 SPW/PDF Ula	06 Paket B	07 SMP LB	08 SMP	09 MTs	10 SPW/PDF Wulstha	11 Paket C	12 SMLB	13 SMA	14 NAK	15 SMK	16 NAK	17 SPW/PDF Ula	18 D1/D2	19 D3	20 D4	21 S1	22 Prolesi	23 S2	24 S3
2. Masih bersekolah	2. Masih bersekolah	01 Paket A	02 SBLB	03 SD	04 MI	05 SPW/PDF Ula	06 Paket B	07 SMP LB	08 SMP	09 MTs	10 SPW/PDF Wulstha	11 Paket C	12 SMLB	13 SMA	14 NAK	15 SMK	16 NAK	17 SPW/PDF Ula	18 D1/D2	19 D3	20 D4	21 S1	22 Prolesi	23 S2	24 S3
3. Tidak bersekolah lagi	3. Tidak bersekolah lagi	01 Paket A	02 SBLB	03 SD	04 MI	05 SPW/PDF Ula	06 Paket B	07 SMP LB	08 SMP	09 MTs	10 SPW/PDF Wulstha	11 Paket C	12 SMLB	13 SMA	14 NAK	15 SMK	16 NAK	17 SPW/PDF Ula	18 D1/D2	19 D3	20 D4	21 S1	22 Prolesi	23 S2	24 S3



Lanjutan Lampiran 1

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN									
Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas									
No. Urut ART	Apakah (nama) memiliki rekening tabungan BAK ATAS BERISMA-SAMA KEUANGAN (KONVENSIONAL ATAU SYARIAH) SEPERTI: TABUNGAN, KREDIT, DEPOSITO, SAHAM, REKSADANA, ASURANSI, PEMBIAYAAN KENDARAAN, PINJAMAN ONLINE, DLL.?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, apakah (nama) PRODUK/LAYANAN JASA KEUANGAN DARI LEMBAGA JASA KEUANGAN (KONVENSIONAL ATAU SYARIAH) SEPERTI: TABUNGAN, KREDIT, DEPOSITO, SAHAM, REKSADANA, ASURANSI, PEMBIAYAAN KENDARAAN, PINJAMAN ONLINE, DLL.?	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA SAJA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibacakan) A. BEKERJA B. SEKOLAH C. MENGURUS RUMAH TANGGA D. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIHADI X. Tidak melakukan kegiatan	Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak ditinggari) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, apakah (nama) MEMPUNYAI PEKERJAAN/USHA, TETAPI SEMENTARA TIDAK BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok VIII	Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (704-706) pilih A ditinggari atau 704-1) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA LAPANGAN USHA/ATAU BIDANG PEKERJAAN UTAMA DARI TEMPAT PEKERJAAN (nama)? Tuliskan selengkap-lengkapannya (Kode lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama diisi oleh pemeriksa. Kode dapat dilihat pada halaman terakhir VSEN25 K)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEDUDUKAN (nama) DALAM PEKERJAAN UTAMA? (Kode)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA (nama) DARI PEKERJAAN UTAMA? (Jam)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA (nama) DARI SELURUH PEKERJAAN? (Jam)	
									701
401									
1			A B C D X						
2			A B C D X						
3			A B C D X						
4			A B C D X						
5			A B C D X						
6			A B C D X						
7			A B C D X						
8			A B C D X						
9			A B C D X						
10			A B C D X						
Penjelasan 702: Lembaga Jasa Keuangan a. Perbankan: Bank umum (konvensional atau syariah) dan unit usaha syariah, Bank Perkotaan Rakyat/BPR, Konvensional atau syariah). b. Pasar Modal: Manajer investasi (konvensional atau syariah, perusahaan efek, sekuritas, layanan urun dana (konvensional atau syariah). c. Lembaga Pembiayaan: Perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura (konvensional atau syariah). d. Perasuransian: Perusahaan asuransi (konvensional atau syariah), unit syaria perusahaan asuransi. e. Dana Pensiun: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) (konvensional atau syariah), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (konvensional atau syariah), unit syariah DPPK. f. Lembaga Keuangan Mikro (LKM): LKM (konvensional atau syariah), Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wau Tamwil (BMT). g. Pergadaian: Perusahaan gadai (konvensional atau syariah), unit usaha syaria perusahaan gadai. h. Fintech Lending: Fintech lending pinjaman online (konvensional atau syariah). Kode 706: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan (Jika 704-1), 706 tidak boleh berkode 5 atau 6) 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluar/gatik tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar									



462

[illegible]

463

9

464

Profil Statistik Kesehatan 2025

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN									
JAWABAN KESEHATAN APA SAMA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	DALAM SERILAN TERAKHIR APAKAH TERAKHIR (nama)?	Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak diingkar Apa sama alasan (nama) tidak menggunakan JKH/Jankesda untuk rawat jalan? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Tidak punya biaya (transportasi, dll.) C. Kaitu JKH tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKH/Jankesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada akses yang mudah dijangkau dari rumah responden G. Tidak ada petugas/pembina pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lama/lambat/panjang I. Lainnya, tuliskan: X. Tidak memiliki JKH/Jankesda
No.	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
2	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
3	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
4	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
5	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
6	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
7	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
8	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
9	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X
10	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X

Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan	1106	1107	1108	1109
1. Tidak punya biaya berobat				
2. Tidak punya biaya transportasi				
3. Tidak ada yang mendampingi				
4. Merasa tidak perlu				
5. Tidak ada sarana transportasi				
6. Waktu tunggu pelayanan lama				
7. Waktu tunggu pelayanan lama				
8. Lainnya				

Kode 1109: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan	1109	1110
1. Tidak punya biaya berobat		
2. Tidak punya biaya transportasi		
3. Tidak ada yang mendampingi		
4. Merasa tidak perlu		
5. Tidak ada sarana transportasi		
6. Waktu tunggu pelayanan lama		
7. Waktu tunggu pelayanan lama		
8. Lainnya		



Lanjutan Lampiran 1

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK									
No. unit ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERIAH MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI RAWAT INAP?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?
401	1	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208	
1	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
2	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
3	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
4	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
5	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
6	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
7	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
8	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
9	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		
10	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I	X	1206	1207	1208		

Jika 1204 pilihan A.B. dan C tidak dilingkari
 APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP?
 A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan
 B. Tidak ada biaya (transportasi, dll.)
 C. Kartu JKN tidak aktif
 D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda
 E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi
 F. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah/responden
 G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan
 H. Waktu tunggu pelayanan lama/antara panjang
 I. Lainnya, tuliskan:
 X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda

JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK RAWAT INAP?
 A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 B. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri
 C. Jamkesda
 D. Asuransi swasta
 E. Perusahaan/kantor
 X. Tidak menggunakan

DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI RAWAT INAP?
 A. RS Pemerintah
 B. RS Swasta
 C. Klinik
 D. Praktik bidan
 E. Puskesmas
 F. Pelayanan kesehatan tradisional
 G. Lainnya

DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) TERAKHIR MEROKOK TENBAKAU?
 1. Ya
 2. Ya, setiap hari
 3. Ya, tidak setiap hari
 4. Tidak
 5. Tidak tahu
 6. Tidak tahu

Untuk ART Umur 15 Tahun ke Atas
 SELAMIA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK TENBAKAU?
 1. Ya, setiap hari
 2. Ya, tidak setiap hari
 3. Tidak
 4. Tidak tahu
 5. Tidak tahu
 6. Tidak tahu

SELAMIA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK TENBAKAU?
 1. Ya, setiap hari
 2. Ya, tidak setiap hari
 3. Tidak
 4. Tidak tahu
 5. Tidak tahu
 6. Tidak tahu

APAKAH DULU, SEBELUM SEBULAN TERAKHIR (nama) PERIAH MEROKOK TENBAKAU?
 1. Ya, setiap hari
 2. Ya, tidak setiap hari
 3. Tidak
 4. Tidak tahu
 5. Tidak tahu
 6. Tidak tahu

ART berikutnya
 Blok XIII



Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIII. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)									
PERTANYAAN		BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3			
Nama dan No. Unut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401)									
Nama & No. Unut Pemberi Informasi									
1301. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)		bulan		bulan		bulan			
IMUNISASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)									
SAYA AKAN MENYANYIKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI									
1302. Apakah (nama balita) PERUAH DIBERI IMUNISASI?	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak		
1303. APAKAH BAPAK/IBU MEMILIKI CAJARAN IMUNISASI SEPERTI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BERORIENTASI DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLLEHKAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku		
1304. Jenis imunisasi Pada 1304 i isian tanggal, bulan, dan tahun. Tulis 44 jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada Tulis 66 jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis 00 jika imunisasi tidak/belum diberikan.	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku	Ya, dapat ditunjukkan Ya, tidak dapat ditunjukkan Tidak ada kartu/buku		
A HEPATITIS B (<24 JAM)									
B BCG									
C POLIO TETES 1									
D DPT-HB-Hib 1									
E POLIO TETES 2									
F ROTA Virus (RV) 1									
G PCV 1									



Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3	
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401):						
Jenis imunisasi Pada 1304 i isian tanggal, bulan, dan tahun: Tulis 44 jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis 66 jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis 00 jika imunisasi tidak pernah diberikan.	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak pernah diberi imunisasi	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak pernah diberi imunisasi	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak pernah diberi imunisasi
H. DPT-HB-Hib 2		☐		☐		☐
I. POLIO TETES 3		☐		☐		☐
J. ROTA VIRUS (RV) 2		☐		☐		☐
K. PCV 2		☐		☐		☐
L. DPT-HB-Hib 3		☐		☐		☐
M. POLIO TETES 4		☐		☐		☐
N. POLIO SUNTIK (IPV) 1		☐		☐		☐
O. ROTA VIRUS (RV) 3		☐		☐		☐
P. CAMPYLOBACTER (MR)		☐		☐		☐
Q. POLIO SUNTIK (IPV) 2		☐		☐		☐
R. JAPANESE ENCEPHALITIS (JE)		☐		☐		☐
S. PCV 3		☐		☐		☐
T. DPT-HB-Hib LANJUTAN		☐		☐		☐
U. CAMPYLOBACTER (MR) LANJUTAN		☐		☐		☐
Pastikan tidak ada pencatatan imunisasi yang terlewat (Periksa kembali isian 1304)						

469

15

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Selin dari Blok IV 402 dan 401):			
1309. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSU/DIBERI ASI?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
1310. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MEMERIMA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
A. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)?	A).....1 B).....5 C).....8	A).....1 B).....5 C).....8	A).....1 B).....5 C).....8
Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta.	kali	kali	kali
B. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, SUP, KALDI, TEH KOPI TANPA AIR TAJIN, DLL)?	B).....1 C).....5 D).....8	B).....1 C).....5 D).....8	B).....1 C).....5 D).....8
C. MINUMAN BERPEMANIS GULA (JUS BUAH, MINUMAN RINGAN, TEH KOPIMANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL)?	C).....1 D).....5 E).....8	C).....1 D).....5 E).....8	C).....1 D).....5 E).....8
1311. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN BAKU BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	kali	kali	kali
1312. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JALAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
A. BUAH DAN UMBI-UMBAN (PISANG, BUBUR, JAGUNG, PASTA, ROTI, PANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL)?	A).....1 B).....5 C).....8	A).....1 B).....5 C).....8	A).....1 B).....5 C).....8
B. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)?	B).....1 C).....5 D).....8	B).....1 C).....5 D).....8	B).....1 C).....5 D).....8
C. PRODUK TURUNAN SUSU (KEJU, YOGURT, DLL)?	C).....1 D).....5 E).....8	C).....1 D).....5 E).....8	C).....1 D).....5 E).....8
D. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGINGKAN DALAM KALENG, DLL)?	D).....1 E).....5 F).....8	D).....1 E).....5 F).....8	D).....1 E).....5 F).....8
E. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL)?	E).....1 F).....5 G).....8	E).....1 F).....5 G).....8	E).....1 F).....5 G).....8
F. BUAH DAN SAYUR TINGGI (MELON, KACANG, BAYAM, DLL)?	F).....1 G).....5 H).....8	F).....1 G).....5 H).....8	F).....1 G).....5 H).....8
G. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SAMA, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL)?	G).....1 H).....5 I).....8	G).....1 H).....5 I).....8	G).....1 H).....5 I).....8
H. MAKANAN MANIS, GURUH, DAN MAKANAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT YANG DIGORENG (BISKUIT, KENTANG GORENG, SINGKONG, BISKUIT, DONAT, CAKE, BISKUIT, MAKANAN RINGAN, PERMEN, COKLAT, DLL)?	H).....1 I).....5 J).....8	H).....1 I).....5 J).....8	H).....1 I).....5 J).....8



Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIV. KETERANGAN PENOLONG PERSALINAN (UNTUK ART PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407):	 tahun	 tahun	 tahun
1401. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL?	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) HAMIL PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1402. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1403. KAPAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV ←
1404. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat... 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8



Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407):	 tahun	 tahun	 tahun
B. SIAPA YANG MELONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1405. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALINIE TAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XV. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)	
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:	
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN.	
1501. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1502. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1503. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1504. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTEKUTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1505. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1506. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1507. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1508. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:	
1601. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	keluarga (Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1602. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI?	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5 1604
1603. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis 3 Sertifikat selanjutnya (SHGB, SHMSRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, AUB, Letter C, dll) 5 Tidak punya 6
1604. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	m ² (Bulatkan dalam meter persegi)
1605. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-NYALAHKAN MELUKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Ya 1 Tidak 5
1606. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS?	Belton 1 Genteng 2 Seng 3 Kayu/sirap 4 Asbes 5 Bambu/jerami/juk/daun-daunan/rumbia 6 Lainnya 7
1607. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan/batang kayu 3 Bambu/anyaman bambu 4 Lainnya 5
1608. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmar/granit 1 Keramik/ubin/legel/teraso 2 Parket/vinil/karpet 3 Kayu/papan 4 Semen/bata merah 5 Bambu/tanah 6 Lainnya 7



BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1608. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DARI SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 2 Ada, di MCK komunal 3 Ada, di MCK umum/sepapun menggunakan 4 Ada, ART tidak menggunakan 5 Tidak ada fasilitas 6 1610.A
B. <i>Jika 1609.A = 1, 2, atau 3:</i> APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa 1 Plengsengan dengan tulup 2 Plengsengan tanpa tulup 3 Cemplung/cubuk 4 Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut 3 Lubang tanah 4 Pantat/tanah lapang/kebun 5 Lainnya 6 1610.A
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUNYANGAN AKHIR Tinja?	Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut 3 Lubang tanah 4 Pantat/tanah lapang/kebun 5 Lainnya 6 1610.A
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu tahun 98 Ya Tidak Tidak pernah 7 Tidak tahu 8
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/DILUKUKAN PENYEDOTAN?	☐ kali (isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah 7 Tidak tahu 8
1610. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek 1 Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tek terlindung 6 Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 Lainnya 11 1611.A

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. <i>Jika 1610.A = 3 (teding):</i> APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Perpipaan meteran 1 Hidran tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8 1611.A
C. <i>Jika 1610.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air):</i> BERAPA Jarak ke tempat perampung limbah kotoran/tinja terdekat?	< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8 1611.A
1611. A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah 1 → 1612 Di luar kawasan pagar rumah 2 menit Tidak tahu 998
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	Ya 1 Tidak 8 Tidak tahu 998
1612. DALAM SETAUH TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENKALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya 1 Tidak 8 Tidak tahu 998
1613. BAGAMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	A. KERUH 1 B. BERWARNA 1 C. BERASA 1 D. BERBUSA 1 E. BERBAU 1 Ya Tidak A. KERUH 1 5 B. BERWARNA 1 5 C. BERASA 1 5 D. BERBUSA 1 5 E. BERBAU 1 5
1614. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDICUCI/DUL?	Air kemasan bermerek 1 Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tek terlindung 6 Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 Lainnya 11 1615.A

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1618. APAKAH RUANG TANGGA MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAJA JEIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5
1619. A. DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENEMBAH LAYANAN PENGUMPULAN SAMPAH DARI RUMAH KE RUMAH?	Ya 1 Tidak 5 → 1620.A
B. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAJA JEIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
C. BERAJA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5
1620. A. DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENGGALUKAN TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	Ya 1 Tidak 5 → 1621
B. BERAJA PERUBAAN JARAK DARI RUMAH KE TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	≤ 200 m 1 Lebih dari 200 m 2
C. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAJA JEIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
D. BERAJA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5 Tidak tahu 8

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. <i>[Jika 1614.A = 3 (tidak)]</i> APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGANGKAS SUMBER AIR UTAMA UNTUK MANDICUCI/DILL?	Perpipaan meteran 1 Perpipaan tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8
1615. A. BOLERKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BASA MEMCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 Tidak dikenali melihet 4 } 1616.A
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau bakom, ember, wadah air atau sepihnya.	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
C. Cek ketersediaan salun atau delejeran di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/detergen 1 Tidak tersedia sabun/detergen 5
1616. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Lisrik PLN dengan meteran 1 Lisrik PLN tanpa meteran 2 } 1617 Lisrik non-PLN 3 Bukan lisrik 4
B. BERAJA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1 Meteran 2 Meteran 3 1. 450 Watt 2. 800 Watt 3. 1.300 Watt atau lebih (Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)
1617. APAKAH JEIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Lisrik 1 Elipji 5.5 kg/blue gaz 2 Elipji 12 kg 3 Elipji 3 kg 4 Gas kota 5 Bogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah 0

21



BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG		
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya	Tidak
A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH	1	5
B. LEWARI/ESKUKUS	1	5
C. AC	1	5
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER)	1	5
E. TELEPON RUMAH (PSTN)	1	5
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET	1	5
G. EWA3/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM	1	5
H. SEPEDA MOTOR	1	5
I. PERAHU	1	5
J. PERAHU MOTOR	1	5
K. MOBIL	1	5
L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH	1	5
M. TANPAH/BAHAN	1	5
N. UANG TUNAI/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM/EMAS	1	5
1802. Jika 1801.M = 1. JIKA MEMILIKI TANPAH/BAHAN, SIAPA PEMILIK TANPAH/BAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D	
BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
1901.A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBAYARAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja 1 Kriman uang/barang 2 → 1901.C Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll) 3 → Blok XX Tabungan 4 → Blok XX Pensiunan 5 → Blok XX	
B. Jika 1901.A = 1. SIAPAKAH ART YANG MEMANGGUNG PEMBAYARAN TERBESAR?	Nama ART : No Urut ART :	
C. Jika 1901.A = 2 APABILA MENERIMA KRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua 1 Anak 2 Famili lain 3 Lainnya 4	

BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG		
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya	Tidak
A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH	1	5
B. LEWARI/ESKUKUS	1	5
C. AC	1	5
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER)	1	5
E. TELEPON RUMAH (PSTN)	1	5
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET	1	5
G. EWA3/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM	1	5
H. SEPEDA MOTOR	1	5
I. PERAHU	1	5
J. PERAHU MOTOR	1	5
K. MOBIL	1	5
L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH	1	5
M. TANPAH/BAHAN	1	5
N. UANG TUNAI/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM/EMAS	1	5
1802. Jika 1801.M = 1. JIKA MEMILIKI TANPAH/BAHAN, SIAPA PEMILIK TANPAH/BAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D	
BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
1901.A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBAYARAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja 1 Kriman uang/barang 2 → 1901.C Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll) 3 → Blok XX Tabungan 4 → Blok XX Pensiunan 5 → Blok XX	
B. Jika 1901.A = 1. SIAPAKAH ART YANG MEMANGGUNG PEMBAYARAN TERBESAR?	Nama ART : No Urut ART :	
C. Jika 1901.A = 2 APABILA MENERIMA KRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua 1 Anak 2 Famili lain 3 Lainnya 4	

BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG		
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya	Tidak
A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH	1	5
B. LEWARI/ESKUKUS	1	5
C. AC	1	5
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER)	1	5
E. TELEPON RUMAH (PSTN)	1	5
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET	1	5
G. EWA3/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM	1	5
H. SEPEDA MOTOR	1	5
I. PERAHU	1	5
J. PERAHU MOTOR	1	5
K. MOBIL	1	5
L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH	1	5
M. TANPAH/BAHAN	1	5
N. UANG TUNAI/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM/EMAS	1	5
1802. Jika 1801.M = 1. JIKA MEMILIKI TANPAH/BAHAN, SIAPA PEMILIK TANPAH/BAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D	
BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
1901.A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBAYARAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja 1 Kriman uang/barang 2 → 1901.C Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll) 3 → Blok XX Tabungan 4 → Blok XX Pensiunan 5 → Blok XX	
B. Jika 1901.A = 1. SIAPAKAH ART YANG MEMANGGUNG PEMBAYARAN TERBESAR?	Nama ART : No Urut ART :	
C. Jika 1901.A = 2 APABILA MENERIMA KRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua 1 Anak 2 Famili lain 3 Lainnya 4	

BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG		
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya	Tidak
A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH	1	5
B. LEWARI/ESKUKUS	1	5
C. AC	1	5
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER)	1	5
E. TELEPON RUMAH (PSTN)	1	5
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET	1	5
G. EWA3/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM	1	5
H. SEPEDA MOTOR	1	5
I. PERAHU	1	5
J. PERAHU MOTOR	1	5
K. MOBIL	1	5
L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH	1	5
M. TANPAH/BAHAN	1	5
N. UANG TUNAI/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM/EMAS	1	5
1802. Jika 1801.M = 1. JIKA MEMILIKI TANPAH/BAHAN, SIAPA PEMILIK TANPAH/BAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D	
BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
1901.A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBAYARAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja 1 Kriman uang/barang 2 → 1901.C Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll) 3 → Blok XX Tabungan 4 → Blok XX Pensiunan 5 → Blok XX	
B. Jika 1901.A = 1. SIAPAKAH ART YANG MEMANGGUNG PEMBAYARAN TERBESAR?	Nama ART : No Urut ART :	
C. Jika 1901.A = 2 APABILA MENERIMA KRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua 1 Anak 2 Famili lain 3 Lainnya 4	

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL								
2001. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA:	(i)		(ii)		(iii)		(iv)	
	Ya		Tidak		BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?		APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG SUDAH MELAKUKAN KLAIM MANFAAT JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2001. A. JAMINAN PENSUNUVETERAN	A. 1 → 2001.iii.A	5 → 2001.B	A. 1 orang	A. 1	1	5		
B. JAMINAN HARI TUA	B. 1 → 2001.iii.B	5 → 2001.C	B. 1 orang	B. 1	1	5		
C. JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA	C. 1 → 2001.iii.C	5 → 2001.D	C. 1 orang	C. 1	1	5		
D. JAMINAN ASURANSI KEMATIAN	D. 1 → 2001.iii.D	5 → 2001.E	D. 1 orang	D. 1	1	5		
E. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)	E. 1 → 2001.iii.E	5 → 2001.F	E. 1 orang	E. 1	1	5		
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F. 1 → 2001.iii.F	5 → 2002	F. 1 orang	F. 1	1	5		
2002. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya	Tidak	1	5 → 2004				
2003. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya	Tidak	1	5 } 2004				
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Tidak tahu		8					
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAMA BANTUAN PKH DIPERLUKAN? ADA LAGI?	Kantor pos		1					
	ATM		2					
	Kantor bank		3					
	Agen bank		4					
	Pendamping, ketua kelompok		5					
	Belanja pangan							
	Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.)							
	Biaya pengobatan							
	Biaya perawatan ibu hamil							
	Biaya sekolah							
	Pembayaran hutang/kredit							
	Lainnya, tuliskan:							
2004. JIKA TERDAPAT ART LAMUR 5-24 TAHUN, BERSEKOLAH YANG MENERIMA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (Jlita 678 terdapat ART yang kode A diilangkari), SEBUTLAH APA SAMA MENU YANG DIPEROLEH SELAMA SEMINGGU TERAKHIR	A. DAGING	Ya	Tidak					
	B. IKAN	1	5	E. SAYUR	1	5		
	C. AYAM	1	5	F. SUSU	1	5		
	D. TAHU/TEMPE	1	5	G. LAINNYA, tuliskan:	1	5		
2005. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DIGALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya	Tidak	1	5 → 2007				



Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL				
	Bulan Januari 2025	Bulan Desember 2024	Bulan November 2024	Bulan Oktober 2024
2006. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELUN/PENGUNAAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS:	Ya 1 Tidak 5 → Desember '24	Ya 1 Tidak 5 → November '24	Ya 1 Tidak 5 → Oktober '24	Ya 1 Tidak 5 → 2006
A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D	Ya, tuliskan 1 Rp 5 → 2006.D Tidak 5 → 2006.D
C. UNTUK PERHATIAN BERAPA BULAN?	Bulan Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Bulan Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Bulan Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	Bulan Kantor pos 1 ATM 2 Kantor bank 3 Agen bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5
D. DIMANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G
E. UNTUK APA SAJA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G	Belanja pangan A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga B Biaya pengobatan C Biaya perawatan ibu hamil D Biaya sekolah E Pembayaran hutang/kredit F Lainnya, tuliskan: G
2007. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN/PROGRAM DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) 5 C. BANTUAN PANGAN PERMINTAH (BEGAS DARI BADAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) 5 C. BANTUAN PANGAN PERMINTAH (BEGAS DARI BADAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) 5 C. BANTUAN PANGAN PERMINTAH (BEGAS DARI BADAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) 5 C. BANTUAN PANGAN PERMINTAH (BEGAS DARI BADAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5
2008. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?	Ya 1 Tidak 5 Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.	Ya 1 Tidak 5 Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.	Ya 1 Tidak 5 Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.	Ya 1 Tidak 5 Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.



BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	(i) PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI.....	Ya	Tidak
	(ii) PERIZINAN KOMERSIL/SERTIFIKASI.....	1	5
	(iii) PEMASARAN/DIGIT ALBASI USAHA.....	1	5
	(iv) PELAPORAN KEUANGAN.....	1	5
	(v) FASILITAS PERMODALAN.....	1	5
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir			
2009. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?	(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGKAN	Rp.	
	(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK	Rp.	
	(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA	Rp.	
	(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	Rp.	
	(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA	Rp.	
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?	Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir		
	(i) BANTUAN TIDAK RUTIN	Rp.	

BLOK XXI. KETERANGAN PENGASUHAN ANAK UMUR 2-4 TAHUN			
PERTANYAAN	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (1)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (2)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut Anak Umur 2-4 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407):	 tahun	 tahun	 tahun
2101. BERAPA BANYAK BUKU ANAK-ANAK ATAU BUKU BERGAMBAR YANG ADA DI RUMAH INI UNTUK (nama anak)?	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih
2102. SAYA INGIN MENGETAHUI BENDA-BENDA APA SAMA YANG (nama anak) MINIKAN KETIKA DIA BERMAIN DI RUMAH. APAKAH (nama anak) BERMAIN DENGAN:	Ya Tidak A) 1 5 8	Ya Tidak Tidak Tahu A) 1 5 8	Ya Tidak Tidak Tahu A) 1 5 8
A. MAINAN BUATAN SENDIRI, SEPERTI BOHEKA, MOBIL, NOCILAN, ATAU MAINAN LAINNYA YANG DIBUAT DI RUMAH?	B) 1 5 8	B) 1 5 8	B) 1 5 8
B. MAINAN YANG DIBELI DARI TOKO ATAU MAINAN BUATAN PABRIK?	C) 1 5 8	C) 1 5 8	C) 1 5 8
C. MAINAN DARI PERALATAN RUMAH TANGGA (SEPERTI WANGKUK, PANGCI) ATAU BENDA YANG DIDAPAT DARI LUAR RUMAH (SEPERTI RANTING POHON, BATU, KULIT KERANG, ATAU DAUN)?			



	Tanggal:	Mulai:	Selesai:
Kunjungan I			
Kunjungan II			

01. Petenian tanaman padi dan palawija
02. Hortikultura
03. Perkebunan
04. Perikanan
05. Peternakan
06. Keluturan dan pertanian lainnya
07. Pertambangan dan pengalihan
08. Industri pengolahan
09. Pengalihan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin
10. Pengalihan air, pengolahan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
11. Konstruksi
12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
13. Pengangkutan dan pergudangan
14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
15. Informasi dan komunikasi
16. Aktivitas keuangan dan asuransi
17. Real estat
18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis
19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, keteracakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya
20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
21. Pendidikan
22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial
23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi
24. Aktivitas jasa lainnya
25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja
26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstranasional lainnya

26

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4; Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>; email: bpshq@bps.go.id

ISSN 2598-5655



9 772598 565506